



**PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**



**GUBERNUR JAWA BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT**

**NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 belum ditetapkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat pada akhir bulan Juni Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);



20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Teknokratik dan mengacu pada RKP.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 2

RKPD merupakan:

- a. dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode Tahun 2023, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- b. penjabaran dari RPJM Daerah Provinsi dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Provinsi, prioritas pembangunan Daerah Provinsi, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.



Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
  - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
  - c. acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
  - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah Provinsi;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
  - e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II  
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I       Pendahuluan
  - b. BAB II       Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. BAB III       Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. BAB IV       Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. BAB V       Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - f. BAB VI       Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - g. BAB VII       Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - h. BAB VIII      Penutup
- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

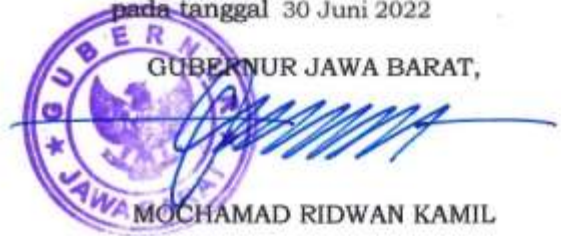
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 25 Tahun 2022

Nomor 25

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2023

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 25 Tahun 2022

Tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT****NOMOR : 25 TAHUN 2022****TANGGAL : 30 JUNI 2022****TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2023.**

# LAMPIRAN





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Selanjutnya, dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 30 Juni 2022.



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-8
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-14
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-17
1.5 Sistematika.....	I-17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-22
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-89
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-189
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2021 .....	II-209
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2021 .....	II-210
2.3.1 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) .....	II-212
2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 .....	II-274
2.3.3 Realisasi Sasaran RPJMD .....	II-277
2.4 Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat .....	II-281
2.4.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19 .....	II-281
2.4.2 Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021 .....	II-283



2.4.3	Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021 .....	II-284
2.4.4	Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 .....	II-285
2.5	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-286
2.5.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-286
2.5.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	II-297
2.6	Inovasi .....	II-335
2.6.1	Capaian <i>Outcome</i> Program Jabar Juara .....	II-336
2.6.2	Contoh Impelementasi Program Jabar Juara .....	II-340

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN**

#### **DAERAH ..... III-1**

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2023 .....	III-1
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	III-15
3.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi .....	III-23
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-26
3.2.1	Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-29
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-29
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-36
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-43
3.3	Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah .....	III-47
3.3.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	III-47
3.3.2	APBD Kabupaten/Kota .....	III-47
3.3.3	Dana Masyarakat/Umat .....	III-48





- 3.3.4 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) ..... III-48
- 3.3.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) ..... III-49
- 3.3.6 Hibah..... III-51

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023..... IV-1**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-2
  - 4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023..... IV-3
  - 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023..... IV-11
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-28
  - 4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV-28
  - 4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... IV-33
  - 4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat..... IV-40
  - 4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ..... IV-72
  - 4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023..... IV-162
- 4.3 Kebijakan Pembangunan ..... IV-207
  - 4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang IV-212
  - 4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Ruang ..... IV-215
- 4.4 Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan ... IV-219
  - 4.4.1 Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah IV-221
  - 4.4.2 Perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta IV-223
  - 4.4.3 Perbatasan Jawa Barat dan Banten ..... IV-224



## **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

.....	<b>V-1</b>
5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota .....	V-1
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	V-1
5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....	V-5
5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	V-9
5.1.4 Persentase Penduduk Miskin .....	V-13
5.1.5 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota .....	V-18
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota .....	V-23
5.2.1 Kebijakan Pembangunan Berbasis Pengembangan Wilayah .....	V-23
5.2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi.....	V-34
5.2.3 Arah Kebijakan Tematik Pembangunan Daerah.....	V-75
5.3 Sinergitas Pembangunan Daerah .....	V-104

## **BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023 .....**

.....	<b>VI-1</b>
6.1 Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2023 .....	VI-1
6.1.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023 .....	VI-1
6.2 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2023.....	VI-5
6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	VI-19
6.2.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) .....	VI-30
6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023.....	VI-33



<b>BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VII-4
7.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)	VII-6
7.2.1 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah ( <i>Impact</i> ) .....	VII-7
7.2.2 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil ( <i>Outcome</i> ) .....	VII-25
<b>BAB VIII P E N U T U P.....</b>	<b>VIII-1</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di 27 Kabupaten/Kota .....	II-2
Tabel 2.2	Cekungan Air Tanah (CAT) di Wilayah Jawa Barat .....	II-6
Tabel 2.3	Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat .....	II-12
Tabel 2.4	Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat	II-15
Tabel 2.5	Pertumbuhan PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 dan Triwulan I-2022 (Persen) .....	II-25
Tabel 2.6	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021 (persen) .....	II-25
Tabel 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (persen) .....	II-26
Tabel 2.8	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah) .....	II-29
Tabel 2.9	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah) .....	II-29
Tabel 2.10	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah) .....	II-30
Tabel 2.11	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan .....	II-31
Tabel 2.12	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan .....	II-32
Tabel 2.13	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen) .....	II-33
Tabel 2.14	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (persen) .....	II-34
Tabel 2.15	Nilai PDRB Per Kapita dan Target Daerah Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah) .....	II-36
Tabel 2.16	PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2021 .....	II-37
Tabel 2.17	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antar dan Atas Dasar Harga	



Konstan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Ribu Rupiah) .....	II-37
Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (ribu rupiah) .....	II-38
Tabel 2.19 Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021 .....	II-45
Tabel 2.20 Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 ...	II-46
Tabel 2.21 Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020-2023 .....	II-50
Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021 .....	II-52
Tabel 2.23 Indikator Kesehatan yang Terkait dengan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat 2019-2021 (persen) .....	II-54
Tabel 2.24 Umur Harapan Hidup Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Tahun) .....	II-55
Tabel 2.25 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (Tahun) .....	II-56
Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-59
Tabel 2.27 Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Tahun) .....	II-59
Tabel 2.28 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (Tahun) .....	II-60
Tabel 2.29 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Tahun) .....	II-63
Tabel 2.30 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (Tahun) .....	II-63
Tabel 2.31 Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Rp.000/kapita/tahun) .....	II-67
Tabel 2.32 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (Rp.000/kapita/tahun) .....	II-67
Tabel 2.33 Target Daerah Kemiskinan Tahun 2019-2021 ....	II-71
Tabel 2.34 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Persen) .....	II-72
Tabel 2.35 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Maret 2019-2021 (Persen) .....	II-73
Tabel 2.36 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021 .....	II-76



Tabel 2.37 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota .....	II-77
Tabel 2.38 Target Daerah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Tahun 2019-2021 ...	II-81
Tabel 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa .....	II-81
Tabel 2.40 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (Persen) .....	II-82
Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 .....	II-86
Tabel 2.42 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 .....	II-88
Tabel 2.43 Kecamatan di Provinsi Jawa Barat yang Tidak Memiliki Sekolah (SMA/SMK) Negeri Maupun Swasta .....	II-89
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-90
Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-92
Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-98
Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-100
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2021 .....	II-103
Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 .....	II-103
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-104
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 .....	II-106
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-107
Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-109





Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 .....	II-110
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .....	II-111
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 .....	II-112
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-113
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-116
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ...	II-118
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-123
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-123
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-126
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-126
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-127
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-130
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-132
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-134
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ...	II-134
Tabel 2.69	Tren Lokasi PMDN Tahun 2019-2021 .....	II-134
Tabel 2.70	Tren Lokasi PMA Tahun 2019-2021 .....	II-135



Tabel 2.71	Tren Lokasi PMDN dan PMA Tahun 2019-2021..	II-135
Tabel 2.72	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 .....	II-136
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2021 .....	II-137
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-139
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-140
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-141
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-143
Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2021 .....	II-147
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-149
Tabel 2.80	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-151
Tabel 2.81	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-154
Tabel 2.82	Indikator Kinerja Program pada Urusan Kehutanan .....	II-155
Tabel 2.83	Realisasi Indikator Kinerja Urusana Tahun 2021	II-156
Tabel 2.84	Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-158
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-163
Tabel 2.86	Capaian Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....	II-164
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-166
Tabel 2.88	Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-169
Tabel 2.89	Level Maturitas UKPBJ .....	II-171
Tabel 2.90	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-180



Tabel 2.91	Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-182
Tabel 2.92	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 .....	II-183
Tabel 2.93	Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2021 .....	II-184
Tabel 2.94	Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2021.	II-189
Tabel 2.95	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten/Kota (Rupiah) .....	II-191
Tabel 2.96	Nilai Tukar Petani (Petani) Provinsi di Pulau Jawa 2019-2021 .....	II-193
Tabel 2.97	Nilai Tukar Petani (Nelayan) Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021 .....	II-195
Tabel 2.98	Nilai Tukar Petani menurut Sub Sektor Tahun 2019-2021 .....	II-196
Tabel 2.99	Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2021 .....	II-203
Tabel 2.100	Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 .....	II-204
Tabel 2.101	Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota 2018-2021 .....	II-206
Tabel 2.102	Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 (Persen) .....	II-208
Tabel 2.103	Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) .....	II-210
Tabel 2.104	Ketercapaian Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) .....	II-213
Tabel 2.105	Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2021 .....	II-255
Tabel 2.106	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Tahun Anggaran 2021 ....	II-274
Tabel 2.107	Ringkasan Realisasi Sasaran RPJMD Menurut Misi .....	II-277
Tabel 2.108	Realisasi Indikator Sasaran RPJMD .....	II-279
Tabel 2.109	Capaian Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2021.....	II-290





Tabel 2.110	Perubahan Jumlah Penduduk Bekerja Tahun 2019-2021 (Orang) .....	II-295
Tabel 2.111	Komponen yang Dinilai Masih Rendah dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 .....	II-297
Tabel 2.112	Keterkaitan Program Jabar Juara Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaiannya pada Tahun 2019-2021 .....	II-337
Tabel 2.113	Target <i>Outcome</i> Kinerja Program Tahun 2025...	II-350
Tabel 2.114	Penanganan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang dilaksanakan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota .....	II-351
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Disandingkan dengan Nasional Tahun 2023 .....	III-14
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 .....	III-20
Tabel 3.3	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen) .....	III-21
Tabel 3.4	Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2023 .....	III-22
Tabel 3.5	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023 .....	III-23
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2023 .....	III-31
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2023 .....	III-41
Tabel 3.8	Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 s.d 2023 .....	III-45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	IV-18
Tabel 4.2	Sandingan Keterhubungan Sasaran antara RPJMN dengan RPJMD .....	IV-26
Tabel 4.3	Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2023 .....	IV-30
Tabel 4.4	Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	IV-41
Tabel 4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	IV-62
Tabel 4.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan .....	IV-73



Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis .....	IV-75
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	IV-76
Tabel 4.9	Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Program Prioritas .....	IV-82
Tabel 4.10	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Reformasi Sistem Kesehatan Daerah .....	IV-98
Tabel 4.11	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi .....	IV-101
Tabel 4.12	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan .....	IV-106
Tabel 4.13	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial .....	IV-109
Tabel 4.14	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan .....	IV-111
Tabel 4.15	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana .....	IV-113
Tabel 4.16	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah..	IV-115
Tabel 4.17	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Gerakan Membangun Desa .....	IV-123



Tabel 4.18	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara ....	IV-124
Tabel 4.19	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	IV-125
Tabel 4.20	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata .....	IV-134
Tabel 4.21	Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan .....	IV-135
Tabel 4.22	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 .....	IV-162
Tabel 4.23	Persandingan antara Sasaran Prioritas Nasional RKP .....	IV-163
Tabel 4.24	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 .....	IV-166
Tabel 4.25	Keselarasn Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RKP 2023 .....	IV-170
Tabel 4.26	Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas .....	IV-178
Tabel 4.27	Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> ) Pembangunan Nasional Tahun 2023 .....	IV-197
Tabel 5.1	Capaian Indeks Pembangunan Manusia .....	V-1
Tabel 5.2	Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota .....	V-2
Tabel 5.3	Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023...	V-5
Tabel 5.4	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2021 .....	V-6
Tabel 5.5	Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota .....	V-7



Tabel 5.6	Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 .....	V-9
Tabel 5.7	Capaian TPT Kabupaten/Kota .....	V-10
Tabel 5.8	Kategori Capaian TPT Kabupaten/Kota .....	V-10
Tabel 5.9	Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 .....	V-13
Tabel 5.10	Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota .....	V-14
Tabel 5.11	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota .....	V-15
Tabel 5.12	Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota .....	V-17
Tabel 5.13	Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota .....	V-18
Tabel 5.14	Kategori Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota .....	V-19
Tabel 5.15	Tabel Pengeluaran per Kapita .....	V-21
Tabel 5.16	Penetapan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 .....	V-22
Tabel 5.17	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat .....	V-24
Tabel 5.18	Desa/Kelurahan yang Menjadi Lokasi Prioritas Penurunan <i>STunting</i> .....	V-77
Tabel 5.19	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan .....	V-105
Tabel 5.20	Sinergi Pembangunan Provinsi Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan .....	V-107
Tabel 5.21	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	V-112
Tabel 5.22	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	V-117
Tabel 5.23	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman dan	



	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat .....	V-118
Tabel 5.24	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial .....	V-121
Tabel 5.25	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja .....	V-130
Tabel 5.26	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	V-131
Tabel 5.27	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan .....	V-132
Tabel 5.28	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan .....	V-133
Tabel 5.29	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup .....	V-134
Tabel 5.30	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	V-135
Tabel 5.31	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	V-136
Tabel 5.32	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	V-137
Tabel 5.33	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika .....	V-138
Tabel 5.34	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah .....	V-140
Tabel 5.35	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal .....	V-141
Tabel 5.36	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olahraga .....	V-142
Tabel 5.37	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan .....	V-143
Tabel 5.38	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik .....	V-144
Tabel 5.39	Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian .....	V-145





Tabel 5.40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan .....	V-146
Tabel 5.41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan .....	V-146
Tabel 5.42 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan .....	V-147
Tabel 5.43 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata .....	V-151
Tabel 5.44 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian .....	V-152
Tabel 5.45 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan .....	V-153
Tabel 5.46 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	V-154
Tabel 5.47 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan .....	V-155
Tabel 5.48 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian .....	V-156
Tabel 5.49 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi .....	V-157
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023 .....	VI-2
Tabel 6.2 Pagu Anggaran Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2023 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023 .....	VI-4
Tabel 6.3 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2023 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2023 .....	VI-6
Tabel 6.4 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 .....	VI-19
Tabel 6.5 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	VI-21
Tabel 6.6 Proyek Strategis Provinsi Tahun 2023 .....	VI-23
Tabel 6.7 Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2023 .....	VI-31
Tabel 6.8 Prospek Proyek KPBU .....	VI-32



Tabel 6.9	Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 .....	VI-36
Tabel 7.1	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	VII-2
Tabel 7.2	Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	VII-3
Tabel 7.3	Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	VII-5
Tabel 7.4	Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/ <i>Impact</i> Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 .....	VII-8
Tabel 7.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/ <i>Outcome</i> Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 .....	VII-26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	I-7
Gambar 1.2	Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	I-8
Gambar 1.3	Hubungan RKPD Tahun 2023 Terhadap Dokumen Lain .....	I-16
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat .....	II-3
Gambar 2.2	Sebaran Curah Hujan Rata-rata Tahunan Provinsi Jawa Barat .....	II-7
Gambar 2.3	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi Jawa Barat ....	II-10
Gambar 2.4	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi Jawa Barat .....	II-12
Gambar 2.5	Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat .....	II-17
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Jawa Barat (Juta Orang)...	II-18
Gambar 2.7	Piramida Penduduk Tahun 2020 .....	II-19
Gambar 2.8	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur pada Tahun 2020 .....	II-20
Gambar 2.9	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur pada Tahun 2000-2020 .....	II-21
Gambar 2.10	Target dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2021 (Persen) .....	II-24
Gambar 2.11	Pola Spasial Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2021 (persen) .....	II-28
Gambar 2.12	Pola Spasial Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota .....	II-35
Gambar 2.13	Pola Spasial PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2021.	II-39
Gambar 2.14	Inflasi <i>Year-On-Year</i> Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2021 (Persen) .....	II-41
Gambar 2.15	Realisasi Inflasi dan Target Daerah Tahun 2019-2021 (Persen) .....	II-42
Gambar 2.16	Target dan Realisasi Gini Tahun 2019-2021...	II-43



Gambar 2.17 Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019-2021 .....	II-44
Gambar 2.18 Peta Capaian Gini Rasio Tahun 2021 .....	II-47
Gambar 2.19 Indeks Williamson Tahun 2019-2021 .....	II-48
Gambar 2.20 Target dan Capaian IPM Tahun 2019-2021 ...	II-49
Gambar 2.21 Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021 .....	II-51
Gambar 2.22 Target dan Capaian Umur Harapan Hidup Tahun 2019-2021 (Tahun) .....	II-53
Gambar 2.23 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan .....	II-54
Gambar 2.24 Pola Spasial Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Tahun) .....	II-57
Gambar 2.25 Target dan Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2021 (Tahun) .....	II-58
Gambar 2.26 Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021 (tahun) .....	II-61
Gambar 2.27 Target dan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2021 (Tahun) .....	II-62
Gambar 2.28 Pola Spasial Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Tahun) .....	II-65
Gambar 2.29 Capaian Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tahun 2019-2021 (Rp.000) .....	II-66
Gambar 2.30 Pola Spasial Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Rp.000/kapita/tahun) .....	II-69
Gambar 2.31 Kemiskinan Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2021 (Persen) .....	II-70
Gambar 2.32 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tahun 2019-2021 (Rp000/Kapita/Tahun) .....	II-71
Gambar 2.33 Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Persen) .....	II-74
Gambar 2.34 Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019-2021 .....	II-76
Gambar 2.35 Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota .....	II-79
Gambar 2.36 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2021 .....	II-80
Gambar 2.37 Pola Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Persen) .....	II-83

Gambar 2.38 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan SMK Tahun 2019-2021 .....	II-84
Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2021 .....	II-85
Gambar 2.40 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019-2021 .....	II-87
Gambar 2.41 Capaian Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 .....	II-120
Gambar 2.42 Capaian Total Penurunan Emisi dan Total Intensitas Emisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 .....	II-120
Gambar 2.43 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 .....	II-121
Gambar 2.44 Peta Sebaran Aksi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 .....	II-122
Gambar 2.45 Informasi APBD Provinsi Jawa Barat secara <i>Online</i> .....	II-181
Gambar 2.46 Informasi APBD Provinsi Jawa Barat Secara <i>Online</i> .....	II-187
Gambar 2.47 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah) .....	II-190
Gambar 2.48 Nilai Tukar Petani (NTP) Petani Tahun 2019-2021 .....	II-193
Gambar 2.49 Nilai Tukar Petani (NTP) Nelayan 2019-2021...	II-194
Gambar 2.50 Nilai dan <i>Share</i> Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2019-2021 .....	II-197
Gambar 2.51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 .....	II-199
Gambar 2.52 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 .....	II-201
Gambar 2.53 Indeks Kemandirian Fiskal 2018-2020 .....	II-206
Gambar 2.54 Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2020 (Persen) .....	II-208
Gambar 2.55 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021 .....	II-292
Gambar 2.56 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2021 (Persen) .....	II-294
Gambar 2.57 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019-2021 .....	II-296



Gambar 2.58 Aplikasi Warna Jabar .....	II-341
Gambar 2.59 Penggunaan E-ASB di Provinsi Jawa Barat ....	II-342
Gambar 2.60 Aplikasi Pikobar .....	II-344
Gambar 2.61 <i>Command Centre</i> .....	II-345
Gambar 2.62 Model Kerangka Pikir Gerbang Desa .....	II-346
Gambar 2.63 Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) ...	II-347
Gambar 2.64 Gerakan Membangun Desa Jawa Barat .....	II-347
Gambar 2.65 <i>Creative Center</i> .....	II-348
Gambar 2.66 BIJB Kertajati .....	II-349
Gambar 2.67 Fokus Penanganan DAS Citarum .....	II-352
Gambar 2.68 Citarum Harum Juara .....	II-352
Gambar 2.69 <i>One Pesantren One Product (OPOP)</i> dan Pesantren Juara .....	II-353
Gambar 2.70 Masagi .....	II-354
Gambar 2.71 Kolecer dan Candil .....	II-355
Gambar 2.72 Layad Rawat .....	II-356
Gambar 2.73 Kredit Mesra .....	II-357
Gambar 2.74 Jabar Saber <i>Hoaks</i> .....	II-358
Gambar 2.75 Sambara .....	II-358
Gambar 2.76 Jabar <i>Quick Response</i> .....	II-359
Gambar 2.77 Petani Milenial .....	II-360
Gambar 2.78 Aplikasi Manajemen Talenta .....	II-361
Gambar 3.1 Perkembangan Sektor Lapangan Usaha Perekonomian Jawa Barat Y-on-Y (Persen) ....	III-3
Gambar 3.2 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulan (YoY) Provinsi Jawa Barat..	III-4
Gambar 3.3 Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2021 ...	III-5
Gambar 3.4 Perkembangan TPK Hotel .....	III-7
Gambar 3.5 Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Januari 2021-April 2022 (Juta USD)....	III-9
Gambar 3.6 Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas Januari 2021-April 2022 .....	III-10
Gambar 3.7 Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Provinsi Jawa Barat .....	III-11
Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Februari 2018 – Februari 2022 (Persen)	III-12
Gambar 3.9 Perkembangan Indeks Gini Maret 2018 – September 2021 .....	III-13
Gambar 3.10 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – September 2021 .....	III-14

Gambar 3.11	Perkembangan Kasus COVID-19 Dunia dan Nasional .....	III-17
Gambar 3.12	Kolaborasi Pendanaan Pembangunan .....	III-28
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....	IV-2
Gambar 4.2	Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat .....	IV-9
Gambar 4.3	Kontribusi Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat .....	IV-10
Gambar 4.4	Peta Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	IV-161
Gambar 4.5	Wilayah Pengembangan di Jawa Barat .....	IV-209
Gambar 4.6	Keterkaitan Fungsional Antar Wilayah Pengembangan .....	IV-212
Gambar 4.7	Peta Rencana Struktur Ruang .....	IV-214
Gambar 4.8	Perubahan Peta Rencana Struktur Ruang .....	IV-215
Gambar 4.9	Rencana Pola Ruang Jawa Barat Tahun 2009-2029 .....	IV-216
Gambar 4.10	Perubahan Peta Rencana Pola Ruang .....	IV-217
Gambar 4.11	Perubahan Peta Kawasan Strategis Provinsi .....	IV-219
Gambar 4.12	Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah .....	IV-222
Gambar 4.13	Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta .....	IV-224
Gambar 4.14	Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Banten .....	IV-226
Gambar 5.1	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021 .....	V-4
Gambar 5.2	Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota .....	V-8
Gambar 5.3	Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota .....	V-12
Gambar 5.4	Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota .....	V-16
Gambar 5.5	Analisis Kuadran Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota .....	V-20



# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan



7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 periode 20 (dua puluh) tahunan, RPJMD Tahun 2018-2023 untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan tahap akhir atau tahun ke lima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021. Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mengusung tema **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**. Tema tersebut berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yang memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Tema RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan tema lanjutan dari tema-tema Pembangunan Tahunan Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023. Dimana tahap awal pencapaian kemandirian masyarakat Jawa Barat ini sudah dicanangkan pada saat tahun pertama di tahun 2019.

Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh sektor pembangunan terutama ekonomi sehingga pada tahun 2021 dilakukan upaya dengan





Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Percepatan pemulihan Ekonomi dan penguatan Sistem Kesehatan Daerah. Selanjutnya setelah Pandemi COVID-19 mulai mereda, pada tahun 2022, tema Pembangunan Jawa Barat adalah Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian. Kemandirian diwujudkan melalui pemerataan pembangunan yang dilakukan untuk menghindari kesenjangan dengan meningkatkan berbagai sektor diantaranya infrastruktur, agribisnis, kelautan, pariwisata, dan ekonomi melalui revitalisasi pasar rakyat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat serta digitalisasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui hal tersebut diharapkan pada tahun 2023, masyarakat Jawa Barat sudah dapat mencapai kemandirian melalui Inovasi dan Kolaborasi sehingga dapat terwujud masyarakat Jawa Barat Juara Lahir dan Batin yang siap meraih kemajuan di segala bidang untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan tema RKP 2023, yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (2) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*; (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta (8) Pembangunan Rendah Karbon.

Seperti yang kita ketahui bersama penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih ada tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun ini sudah terkendali pada level rendah dan diharapkan di tahun 2023 mulai bisa terlepas dari tekanan Pandemi COVID-19.



Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran berharga dalam perencanaan pembangunan nasional. Pandemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru dalam melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang - peluang yang ada. Munculnya 10 (sepuluh) tren besar yang terjadi selama pandemi diantaranya Industri 4.0; Digital dan Data; Kebangkitan Disrupsi Digital; Perangkat pintar dan Infra; Mengubah Keseimbangan Kekuatan Ekonomi; Revitalisasi Energi; Kesehatan; Tempat Tinggal; Globalisasi; dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Sepuluh tren tersebut dijadikan peluang untuk pengembangan di Jawa Barat yaitu:

1. Memanfaatkan peluang pasar global untuk memberikan dampak yang lebih baik akibat munculnya industri 4.0, adanya perubahan keseimbangan kekuatan ekonomi, dan terjadinya globalisasi.
2. Kemandirian bangsa dimanfaatkan Jawa Barat untuk melangkah maju dan menjadi pemasok bahan-bahan strategis di dalam negeri dan ke luar negeri.
3. Industri kesehatan dimanfaatkan sebagai pariwisata medis untuk menjadi salah satu pusat perawatan kesehatan terbaik di Indonesia akibat pengembangan ilmu pengetahuan serta digitalisasi data, dan adanya perubahan keseimbangan kekuatan ekonomi.
4. Pemanfaatan otomatisasi manufaktur menggunakan perangkat pintar dan infrastruktur untuk memperpendek jangka waktu pekerjaan sehingga memiliki daya saing.
5. Menciptakan dan menjadi pusat inovasi digital dengan memproduksi sesuai dengan permintaan pasar akibat munculnya industri 4.0, digitalisasi dan data, kebangkitan disrupsi digital serta berkembangnya perangkat pintar dan infrastruktur.
6. Mengembangkan energi terbarukan seperti panel surya energi panas bumi dan energi baru terbarukan lainnya sebagai upaya revitalisasi energi untuk tempat tinggal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
7. Memanfaatkan globalisasi dan perkembangan perangkat pintar untuk menciptakan peluang dalam berinvestasi di bidang pariwisata, dengan melakukan promosi melalui perangkat digital dengan cara yang unik dan menarik. Dengan ini diharapkan wisatawan tertarik untuk singgah lebih lama.



Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat yang mengalami perubahan besar tersebut, maka kebijakan-kebijakan pembangunan juga mempertimbangkan peluang pengembangan di Jawa Barat. Dalam menjalankan proses penyusunan beberapa metode pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari perwujudan pendekatan-pendekatan di atas yaitu:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*). *Academic* meliputi unsur perguruan tinggi dan peneliti yang berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan identifikasi potensi daerah dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi pembangunan daerah. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. *Business* meliputi unsur pengusaha/swasta yang berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor Swasta dapat berperan sebagai *enabler* menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. *Community* meliputi unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini komunitas juga berperan sebagai akselerator seiring dengan modal sosial yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Komunitas juga bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki oleh suatu wilayah. *Government* atau pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,



pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan potensi suatu wilayah. *Media* bertindak sebagai *expander*, media berperan dalam mendukung publikasi dan promosi serta membuat *brand image*. Dalam menjalankan perannya ini, media juga berfungsi sebagai perantara diseminasi informasi di antara pemangku kepentingan dan konsep *pentahelix*.

2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.
3. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pendekatan spasial dan a-spasial melalui 6 (enam) wilayah pengembangan;
5. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam:
  - a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - b. Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
6. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.

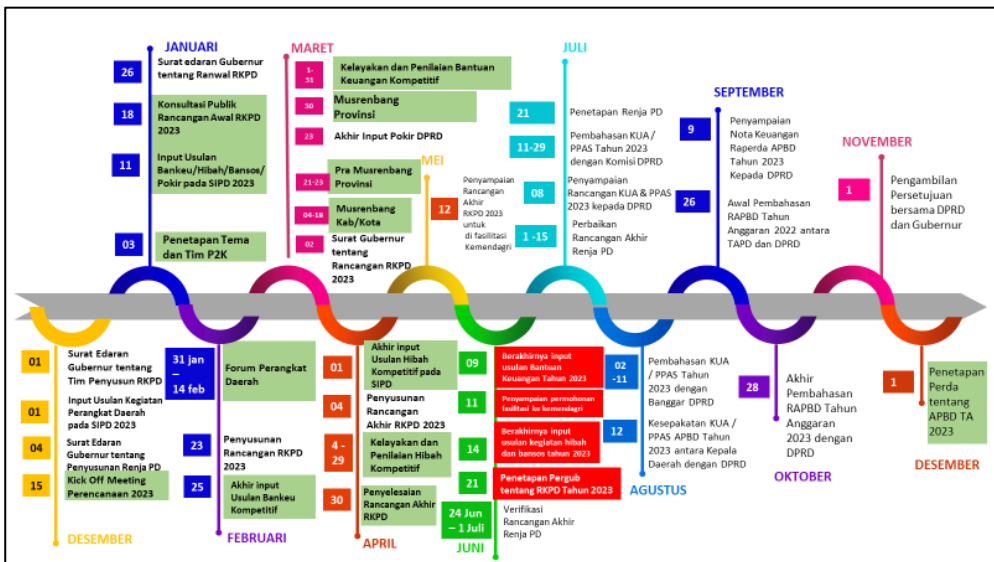
Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun

2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan *Kick Off Meeting* perencanaan 2023, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Pra-Musrenbang Provinsi dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi.

Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2023 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Provinsi Jawa Barat. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2023 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada minggu ke-IV bulan Juni 2022.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disajikan dalam gambar di bawah ini.

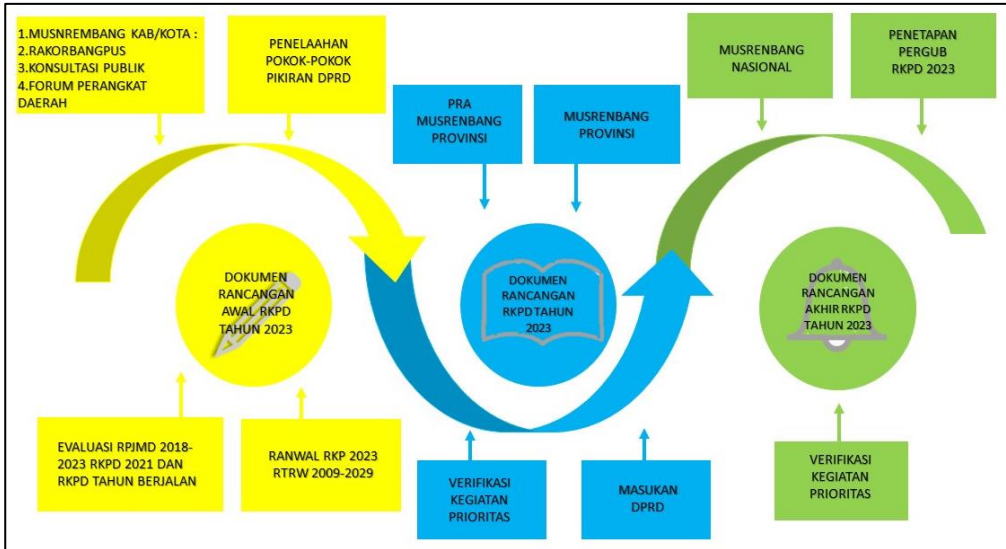
**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022



**Gambar 1.2**  
**Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan**  
**RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

Secara umum, dokumen RKPD Tahun 2023 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31).
19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);



22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi





- Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.



Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

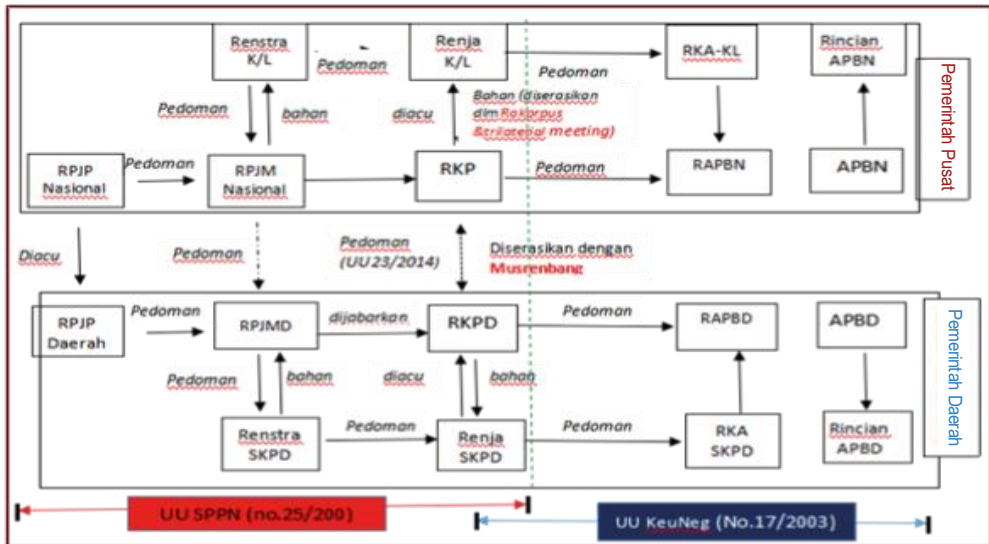
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Terdapat 2 (dua) ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut ini:

**Gambar 1.3**  
**Hubungan RKPD Tahun 2023 Terhadap Dokumen Lain**



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan Gambar 1.3. di atas, RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3). RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi



Jawa Barat Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2023;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.5 Sistematika**

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang  
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
- 1.2. Dasar Hukum  
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen  
Menjelaskan hubungan antara RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.



- 1.4. Maksud dan Tujuan  
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
- 1.5. Sistematika  
Memuat sistematika RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Kondisi Umum Daerah  
Menjelaskan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum/publik, dan aspek daya saing daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021  
Menjelaskan evaluasi ketercapaian Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Provinsi Jawa Barat sampai Tahun 2021.
- 2.3. Kondisi Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Jawa Barat  
Menjelaskan kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kondisi pelaksanaan anggaran pada masa pandemi COVID-19 Tahun 2020.
- 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah  
Menjelaskan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 2.5. Inovasi  
Menjelaskan inovasi perencanaan dan pembangunan daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



**BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  
Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2023, proyeksi, dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2023.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah  
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2023 serta pendanaan pembangunan lainnya.
- 3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah  
Menjelaskan sumber - sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
- 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023  
Menjelaskan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, pokok pokok pikiran, isu strategis, strategis dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan serta sinkronisasi dan keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022.
- 4.3. Kebijakan Pembangunan  
Menjelaskan telaahan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.





- 4.4. Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan  
Menjelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan yang menjangkau daerah terpencil dan daerah perbatasan.

**BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

- 5.1. Indikator Makro Kabupaten/Kota  
Menjelaskan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021.
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota  
Menjelaskan mengenai kebijakan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan berbasis prioritas pembangunan daerah.
- 5.3. Sinergitas Pembangunan Daerah  
Menjelaskan keterkaitan dari indikator kinerja urusan baik di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota seperti yang akan diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

- 6.1. Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2023  
Menjelaskan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN Tahun 2023. Rencana program dan kegiatan tersebut disusun dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.



- 6.2. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2023  
Menjelaskan keterkaitan antara rencana program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- 6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023  
Menjelaskan rencana program dan kegiatan tahun 2023 yang dilakukan untuk pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditingkat Provinsi.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 7.2. Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2023.

**BAB VIII : PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2023.



## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Provinsi Jawa Barat memiliki posisi geostrategis yang penting karena berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis, diantaranya: Provinsi Jawa Barat sebagai daerah yang mensuplai kebutuhan air baku bagi Ibukota Negara sebesar 82 persen (Tempo.co. 23 Desember 2020), menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali dengan memiliki 3 (tiga) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 1.896 MW dan 6 (enam) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas terpasang 1.259 MW, sebagai pusat pendidikan tinggi yang memiliki 727 perguruan tinggi dengan 40 diantaranya adalah perguruan tinggi negeri. Selain itu, Provinsi Jawa Barat memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia sebagai basis industri manufaktur dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia (18,48 persen dari total penduduk Indonesia) sehingga menjadi barometer dalam setiap pesta demokrasi pemilihan Presiden. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dinamika pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 sehingga menuntut adanya reorientasi strategi pembangunan daerah pada berbagai aspek pembangunan. Kondisi umum daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi sebagai berikut.

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun, gambaran kondisi demografi memberikan gambaran terkait struktur, komposisi dan persebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun tertentu.

### 2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

#### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah mencapai 35.377,76 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai mencapai 724,85 km dan luas wilayah laut sebesar 15.5128,90 Ha. Provinsi Jawa Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Banten
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa (lihat Tabel 2.1).

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di 27 Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kabupaten Bogor	2.710,62	40	19	416
2	Kabupaten Sukabumi	4.145,70	47	5	381
3	Kabupaten Cianjur	3.840,16	32	6	354
4	Kabupaten Bandung	1.767,96	31	10	270
5	Kabupaten Garut	3.074,07	42	21	421
6	Kabupaten Tasikmalaya	2.551,19	39	-	351
7	Kabupaten Ciamis	1.414,71	27	7	258
8	Kabupaten Kuningan	1.110,56	32	15	361
9	Kabupaten Cirebon	984,52	40	12	412
10	Kabupaten Majalengka	1.204,24	26	13	330
11	Kabupaten Sumedang	1.518,33	26	7	270
12	Kabupaten Indramayu	2.040,11	31	8	309
13	Kabupaten Subang	1.893,95	30	8	245
14	Kabupaten Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Kabupaten Karawang	1.652,20	30	12	297
16	Kabupaten Bekasi	1.224,88	23	7	180
17	Kabupaten Bandung Barat	1.305,77	16	-	165
18	Kabupaten Pangandaran	1.010,00	10	-	93
19	Kota Bogor	118,50	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-

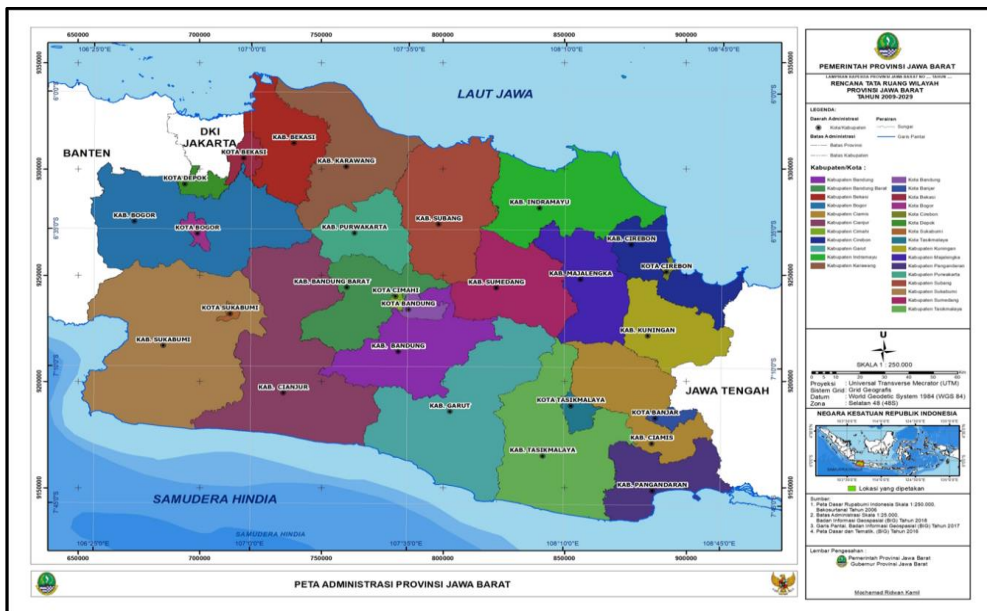
No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Kelurahan	Desa
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	200,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	16
<b>Jawa Barat</b>		<b>35.377,76</b>	<b>627</b>	<b>645</b>	<b>5.312</b>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

### b. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Barat memiliki letak geografis pada posisi lintang 50,50' – 70,50' Lintang Selatan dan 104,048' – 108,048' Bujur Timur, terletak di bagian barat Pulau Jawa. Kawasan Pantai Utara (Pantura) merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertinggi adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah Barat Daya Kota Cirebon. Provinsi Jawa Barat memiliki sungai-sungai yang cukup penting yakni Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk yang bermuara di Laut Jawa.

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat**



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029



### c. Topografi

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik topografi wilayah pegunungan curam di selatan, wilayah lereng bukit yang landai di tengah, wilayah dataran luas di utara, dan wilayah aliran sungai. Wilayah pegunungan curam (9,5 persen) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, dan wilayah lereng bukit yang landai (36,48 persen) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 mdpl, serta wilayah dataran landai (54,02 persen) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 mdpl.

Kondisi topografi Pesisir Utara Jawa Barat yang terdiri atas dataran pantai dan rawa *alluvial* pantai dengan kemiringan lereng 0–5 persen, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus Laut Jawa, serta bervegetasi *mangrove* dan terumbu karang. Adapun, kondisi topografi wilayah Pantai Selatan Jawa Barat merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia.

### d. Geologi

Aktivitas geologi di wilayah Provinsi Jawa Barat menghasilkan beberapa zona fisiografi yang satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan morfologi, petrologi, dan struktur geologinya. Van Bemmelen (1949), membagi daerah Jawa Barat ke dalam 4 (empat) besar zona fisiografi, masing-masing dari utara ke selatan adalah Zona Dataran Pantai Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat banyak pola kelurusan bentang alam yang diduga merupakan hasil proses pensesaran. Jalur sesar tersebut umumnya berarah barat-timur, utara-selatan, timur laut-barat daya, dan barat laut-tenggara. Secara regional, struktur sesar berarah timurlaut-baratdaya dikelompokkan sebagai Pola Meratus, sesar berarah utara-selatan dikelompokkan sebagai Pola Sunda, dan sesar berarah barat-timur dikelompokkan sebagai Pola Jawa. Struktur sesar dengan arah barat-timur umumnya berjenis sesar naik, sedangkan struktur sesar dengan arah lainnya

berupa sesar mendatar. Sesar normal umum terjadi dengan arah bervariasi.

Dari sekian banyak struktur sesar yang berkembang di Provinsi Jawa Barat, ada 3 (tiga) struktur regional yang memegang peranan penting, yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Baribis, dan Sesar Lembang. Ketiga sesar tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh van Bemmelen (1949) dan diduga ketiganya masih aktif hingga sekarang.

#### **e. Hidrologi**

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya air permukaan (sungai induk dan anak sungainya) yang cukup besar, dengan mencapai rata-rata 48.023,78 juta m<sup>3</sup>/tahun dalam kondisi normal. Secara kewilayahan, potensi sumber daya air Provinsi Jawa Barat terdistribusi pada 6 (enam) Wilayah Sungai (WS) yang meliputi WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan-Cilaki.

Ketersediaan sumber daya air sangat bergantung pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Jumlah DAS yang ada di Jawa Barat sebanyak 41 DAS, yang terdiri dari 21 DAS bermuara ke Laut Jawa, dan 20 (dua puluh) DAS bermuara ke Samudera Hindia.

Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Utara, diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Selatan diantaranya Sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggiri, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy.

Secara hidrogeologi, wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki 27 Cekungan Air Tanah (CAT) yang tersebar ke seluruh wilayah yang mencakup 8 (delapan) CAT lokal, 15 (lima belas) CAT lintas kabupaten/kota, dan 4 (empat) CAT lintas provinsi. Masing-masing CAT memiliki luasan area tertentu dalam km<sup>2</sup>, juga potensi air tanah tertentu yang dinyatakan dalam potensi debit air tanah

(juta m<sup>3</sup>/tahun). Potensi air tanah dalam masing-masing CAT tersimpan dalam lapisan satuan batuan tertentu yang dinamakan akuifer, yang berdasarkan sifatnya, akuifer dibedakan atas akuifer bebas (Q1) dan akuifer tertekan (Q2).

Setiap CAT memiliki sifat atau karakteristik yang mencakup luasan area, potensi air tanah pada akuifer bebas, dan potensi air tanah pada akuifer tertekan. Dalam rangka memelihara keberadaan dan keberlanjutan potensi air tanah, mencakup keadaan, sifat dan fungsi air tanah, pada masing-masing CAT perlu adanya upaya konservasi air tanah di seluruh wilayah Jawa Barat. Sifat atau karakteristik setiap CAT disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Cekungan Air Tanah (CAT) di Wilayah Jawa Barat**

No	CAT	Luas (km <sup>2</sup> )	Q <sub>1</sub> (jt m <sup>3</sup> /thn)	Q <sub>2</sub> (jt m <sup>3</sup> /thn)
1	Bogor	1.311	1.019	37
2	Sukabumi	868	759	34
3	Cianjur	467	451	16
4	Jampang Kulon	384	276	-
5	Bekasi-Karawang	3,641	1,43	6
6	Pamanukan	1,514	429	3
7	Ciater	566	413	30
8	Lembang	169	164	16
9	Batujajar	85	66	1
10	Bandung	1.716	369	117
11	Campaka	621	595	28
12	Banjarsari	60	550	30
13	Tasikmalaya	1.219	978	69
14	Garut	886	621	87
15	Sadawangi - Selaawi	514	415	30
16	Sumedang	483	519	28
17	Sukamantri	151	98	13
18	Ciamis	581	448	14
19	Kawali	291	224	7
20	Kuningan	507	445	21
21	Jatiwangi	686	554	5
22	Indramayu	1.282	362	46
23	Cirebon	1.659	638	4
<b>Jumlah</b>		<b>20.206</b>	<b>11.826</b>	<b>642</b>

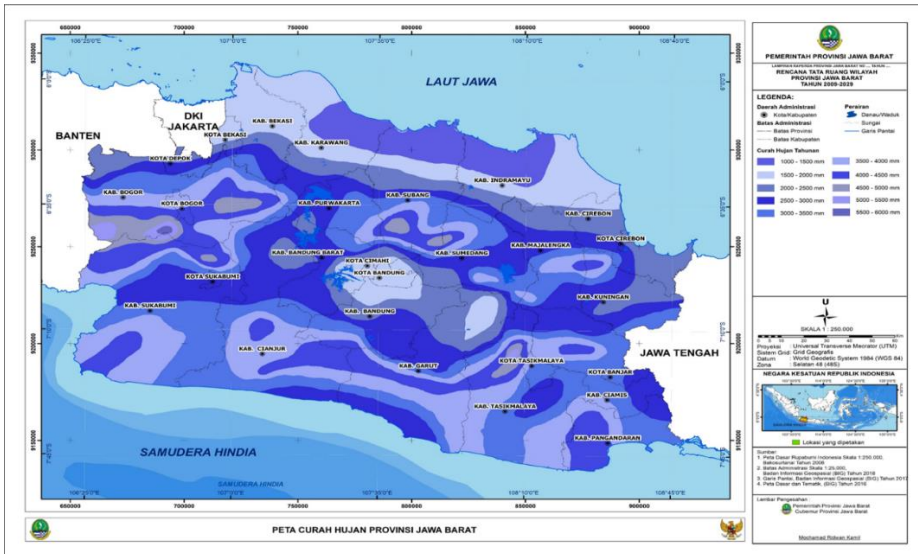
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Tahun 2017

## f. Klimatologi

Provinsi Jawa Barat memiliki keragaman bentuk topografi, dimulai dari wilayah pantai dan dataran rendah yang terdapat di bagian utara, dataran tinggi di bagian tengah dan pegunungan di

bagian selatan. Beragamnya kondisi topografi ini mengakibatkan keragaman kondisi klimatologis, terutama distribusi curah hujan dan suhu. Sebaran curah hujan dan suhu sangat beragam. Setiap daerah di Provinsi Jawa Barat tidak semuanya mempunyai nilai suhu dan curah hujan yang sama, terutama pada bagian tengah dan bagian selatan karena adanya barisan pegunungan.

**Gambar 2.2**  
**Sebaran Curah Hujan Rata-rata Tahunan Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018

Gambar 2.2 menunjukkan distribusi rata-rata curah hujan tahunan yang diambil dari data BMKG. Provinsi Jawa Barat termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°-34° celsius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan berada pada rentang 1.000-4.000 mm per tahun (Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm sedangkan pada musim hujan curah hujan lebih dari 150 mm.

Persebaran curah hujan terendah berada di wilayah Utara (Pantura, Bekasi sampai dengan Cirebon dan Kuningan) dan sebagian wilayah Tengah Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut, dan sekitarnya); sedangkan sebaran curah hujan tinggi melingkupi wilayah Barat-Selatan (Bogor dan

Sukabumi), wilayah Tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang, dan sekitarnya), serta wilayah Timur-Selatan (Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran).

### **2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Provinsi Jawa Barat**

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, penetapan Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dimana berdasarkan kebijakan dan strategi terkait pola ruang dalam peraturan daerah tersebut adanya target mempertahankan fungsi kawasan lindung sebesar 45 persen, sedangkan untuk kawasan budidaya relatif tidak mengalami perubahan secara kontekstual, karena pada dasarnya perubahan di dalam kawasan budidaya selama sesuai dengan karakteristik, daya dukung, dan daya tampung wilayahnya tetap dikembangkan.

#### **a. Kawasan Peruntukan Lindung**

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung provinsi meliputi upaya:

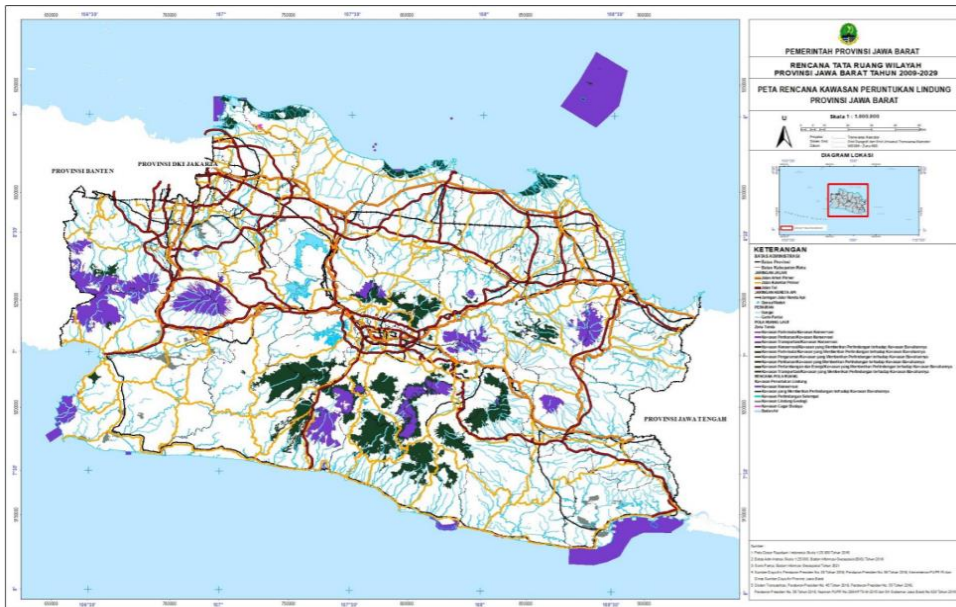
- 1) Menetapkan kawasan lindung provinsi meliputi kawasan lindung dalam kawasan hutan (terdiri atas hutan konservasi dan hutan lindung) serta kawasan lindung di luar kawasan hutan (terdiri atas kawasan yang menunjang fungsi lindung di wilayah darat);
- 2) Mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 3) Mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
- 4) mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, maka penentuan rencana kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Kawasan hutan yang menjadi kawasan lindung yakni kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi bersumber dari Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 9404 Tahun 2019;
- 2) Kawasan hutan pangongan dengan luas 7.286,08 Ha dan kawasan hutan cadangan 29.075,13 Ha;
- 3) Kawasan resapan air merupakan kawasan imbuhan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- 4) Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 dengan luas 15.999 Ha;
- 5) Kawasan Lindung Geologi bersumber data dari Direktorat Geologi hasil penyelidikan sampai dengan, Badan Geologi tahun 2018;
- 6) Kawasan Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan danau/waduk;
- 7) Kawasan rawan bencana alam berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG, 2016) dan BNPB Provinsi Jawa Barat tahun 2016 terdiri atas: Kawasan Bahaya Gunung api, Gerakan tanah, rawan tsunami, dan sesar aktif;
- 8) Kawasan cagar budaya; dan
- 9) Kawasan lindung berdasarkan RZWP3K Provinsi (Revisi Revisi Materi Teknis Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 Tahun 2021, versi November 2021);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
- 11) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018;
- 12) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).



**Gambar 2.3**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung**  
**Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. 2021

b. Kawasan Peruntukan Budidaya

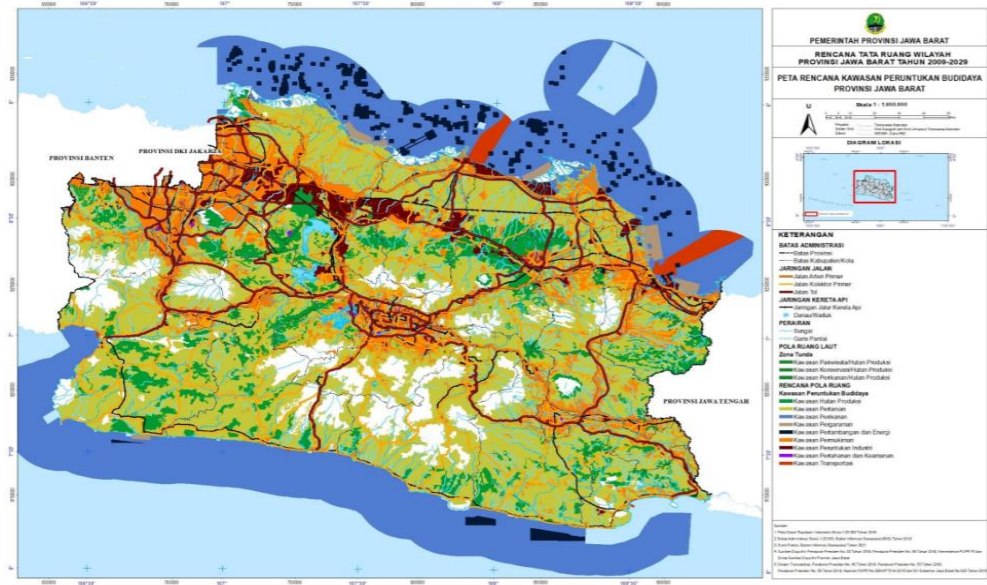
Kawasan peruntukan budi daya adalah kawasan peruntukan budi daya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas:

- 1) Kawasan Hutan Produksi (Hp);
- 2) Kawasan Pertanian (P);
- 3) Kawasan Perikanan (IK);
- 4) Kawasan Pergaraman (KEG);
- 5) Kawasan Pertambangan Dan Energi (TE);
- 6) Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- 7) Kawasan Pariwisata (W);
- 8) Kawasan Permukiman (PM);
- 9) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan Di Laut (DA);
- 10) Kawasan Transportasi (TR); Dan
- 11) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan (HK).

Kawasan peruntukan budidaya disesuaikan dengan perkembangan karakteristik struktur dan pola ruang yang terjadi. Selain itu pengaruh perubahan iklim dan karakteristik eksternal mewarnai pola ruang yang direncanakan. Perubahan karakteristik pola ruang yang terjadi antara lain berkaitan dengan persoalan, isu dan tantangan dalam mewujudkan pola ruang yang modern berbasis teknologi informasi, berkelanjutan, inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, mendorong terwujudnya ketahanan energi, adaptif terhadap bencana, mendorong terwujudnya ketahanan pangan, serta kompetitif dan membuka ruang investasi namun tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Lahan pengembangan wilayah/kota atau kawasan merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Banyak contoh kasus kerugian ataupun korban yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penggunaan lahan yang melampaui kapasitasnya. Untuk itulah perlu dikenali sedini mungkin karakteristik fisik suatu wilayah maupun kawasan untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alamnya maupun kerawanan bencana yang dikandungnya, yang kemudian diterjemahkan sebagai potensi dan kendala pengembangan wilayah atau kawasan. Analisis fisik dan lingkungan wilayah atau kawasan ini adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang maupun rencana pengembangan wilayah dan/atau kawasan (rencana tindak, rencana investasi, dan lain-lain), karena akan memberikan gambaran kerangka fisik pengembangan wilayah dan/atau kawasan.

**Gambar 2.4**  
**Peta Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya**  
**Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. 2021

c. Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, ditetapkan rencana KSP Provinsi Jawa Barat sebanyak 24 KSP, yang disajikan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.3**  
**Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat**

No	KSP	Penanganan
1	KSP Pulau Manuk	Penanganan kegiatan pengamanan dan konservasi pulau
2	KSP Bandung Utara	- Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan
		- Pembatasan dan pengendalian pembangunan
3	KSP Hulu Sungai	Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi



No	KSP	Penanganan
	Citarum	kawasan
4	KSP Bogor-Puncak-Cianjur	-Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan -Pembatasan dan pengendalian pembangunan
5	KSP Pesisir Pantura	Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan <i>Mangrove</i> Pengembangan/ peningkatan kegiatan ekonomi pesisir Peningkatan kualitas pemukiman nelayan
6	KSP Pangandaran dan sekitarnya	Mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat khusus Menjaga kelestarian lingkungan pantai Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata
7	KSP Sukabumi bagian selatan dsk	Mengembangkan kawasan agromarine bisnis dan wisata minat khusus Menjaga kelestarian lingkungan pantai Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata
8	KSP koridor Bekasi-Cikampek	Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional Sinergitas infrastruktur Sinergitas pembangunan antar daerah Pengendalian perubahan kawasan lahan basah
9	KSP koridor Padalarang-Purwakarta	Pengembangan kawasan wisata terpadu dan agroindustri Pengembangan <i>Technopark</i> dan perkantoran Optimalisasi pemanfaatan Waduk Jatiluhur dan Cirata untuk kegiatan pariwisata & kegiatan khusus sesuai daya dukungnya
10	KSP pertanian lahan basah Pantura	Daerah lumbung padi nasional Mempertahankan luasan lahan sawah Meningkatkan pendapatan petani dengan program multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi Memperkecil resiko banjir dan kekeringan
11	KSP Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dsk	Mengembangkan bandara & <i>aerocity</i> Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya Kerjasama dengan pihak swasta
12	KSP Bandung-Cirebon	Mengembangkan kawasan agroindustri Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan
13	KSP Garut Selatan dsk	Mengembangkan Kota Garut Selatan secara terbatas sesuai daya dukung lingkungan Mengembangkan wisata IPTEK
14	KSP Perbatasan Jabar-Jateng	Peningkatan infrastruktur Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi



No	KSP	Penanganan
		dan saling mendukung dengan kawasan tetangga
15	KSP Kilang Minyak Balongan	Mengembangkan kawasan agroindustri Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan
16	KSP Pendidikan Jatinangor	Revitalisasi kawasan Penataan lingkungan sekitar Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan Pengembangan pembangunan vertikal
17	KSP Pusat Pemerintahan Gedung Sate	Pelestarian cagar budaya Peningkatan citra kawasan
18	KSP Jonggol	Pengembangan perkotaan mandiri Peningkatan pelayanan publik tingkat nasional
19	KSP Observatorium Bosscha	Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan; Pengendalian pembangunan di Lembang dan Kawasan Bandung Utara; Pelarangan adanya kegiatan yang mengganggu berfungsinya observatorium Bosscha; Pengendalian kegiatan wisata terbatas di Lembang dan Kawasan Bandung Utara.
20	KSP panas bumi Wayang Windu	Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar
21	KSP panas bumi Wayang Windu	Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar
22	KSP panas bumi Kamojang-Darajat-Papandayan	Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar
23	KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Gunung Salak-Pongkor	Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar
24	KSP Panas Bumi Sangkanhurip	Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Hasil evaluasi KSP di Provinsi Jawa Barat ditetapkan 5 (lima) KSP dari 24 KSP sebelumnya, maka rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dalam revisi RTRWP Jawa Barat Tahun 2022-2042 terdiri dari beberapa sudut kepentingan. Tabel dan gambar berikut di bawah ini menyajikan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat**

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
1	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSP Bandung Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian</li><li>▪ Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro</li><li>▪ Memiliki pusat kegiatan pada Kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam</li></ul>
2	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Sukabumi Bagian Selatan dsk	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi</li><li>▪ Memiliki potensi ekspor</li><li>▪ Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah</li><li>▪ Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi</li></ul>
3	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Aerocity-Kertajati	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keberadaan BIJB sebagai bandar udara internasional;</li><li>▪ Potensi peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui kegiatan distribusi logistik;</li><li>▪ Potensi pengembangan kawasan tematik pendukung dan penghubung Aerocity;</li><li>▪ Keberadaan BUMD Provinsi Jawa Barat yang dapat diarahkan sebagai pengelola kawasan;</li><li>▪ Penetapan kawasan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang</li></ul>





No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
			(Bersama Kadipaten).
4	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Patimban	<ul style="list-style-type: none"><li>Keberadaan Pelabuhan Utama Patimban yang merupakan Pelabuhan internasional;</li><li>Potensi peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kegiatan ekspor-impor dan distribusi logistik;</li><li>Potensi pengembangan kawasan untuk mendukung kawasan industri di sekitarnya;</li><li>Penetapan kawasan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang;</li></ul>
5	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Mundu - Losari	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan daya saing ekonomi kawasan;</li><li>Peningkatan konektivitas antarkawasan, terutama menuju simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan;</li><li>Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik;</li><li>Melindungi kawasan pesisir dan pantai serta kawasan lainnya yang berfungsi lindung;</li><li>Menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir;</li><li>Peningkatan kerjasama antarwilayah (Provinsi Jabar dengan Jateng)</li></ul>

Sumber: Raperda Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

**Gambar 2.5**  
**Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

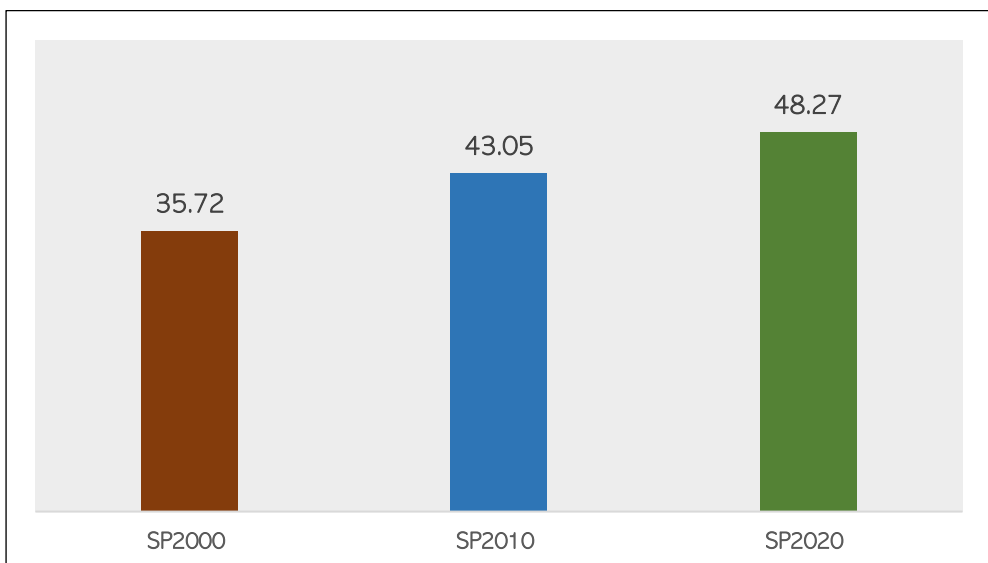
### 2.1.1.3 Kondisi Demografi

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah, antara lain adalah: pertama, kependudukan, dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh semua lapisan penduduk. Dengan demikian, jelas bahwa pembangunan harus direncanakan dan dijalankan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan yang terjadi. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. SP 2020 mencatat jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48,27 juta jiwa, ekuivalen dengan 17,86 persen dari

total penduduk Indonesia. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 5,2 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 0,44 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,11 persen poin per tahun. Terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,79 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,90 persen (lihat Gambar 2.6).

**Gambar 2.6**  
**Jumlah Penduduk Jawa Barat (Juta Orang)**

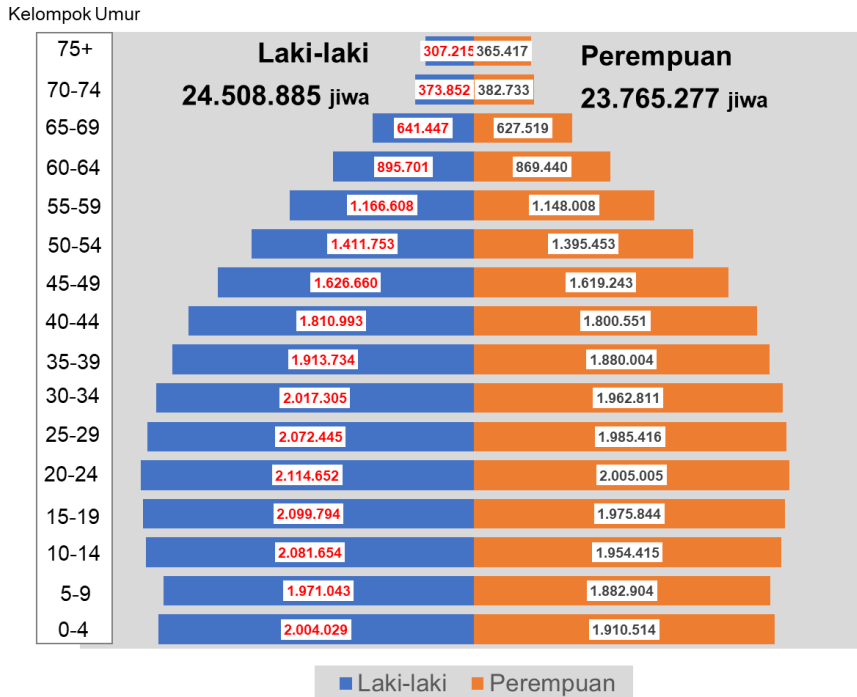


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Potensi sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat dapat diketahui dari komposisi penduduk menurut kelompok umur yang tergambar dari bentuk piramida penduduk. Gambar 2.7 menunjukkan piramida penduduk termasuk jenis yang ekspansif ditandai dengan bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Bentuk piramida ini menunjukkan penduduk Provinsi Jawa Barat berada dalam keadaan bertumbuh dimana penduduk usia muda lebih besar. Hal ini berarti, angka kelahiran masih cukup tinggi, sementara tingkat kematian bayi cukup rendah. Kondisi ini menandakan pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat termasuk yang cepat, hal ini terkonfirmasi dari angka laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 yang mencapai 1,41 persen. Kondisi

demikian menuntut perlu adanya kebijakan pengendalian jumlah penduduk, sebab penduduk yang terlalu banyak akan berpengaruh pada pemerataan sumber daya dan pembangunan.

**Gambar 2.7**  
**Piramida Penduduk Tahun 2020**

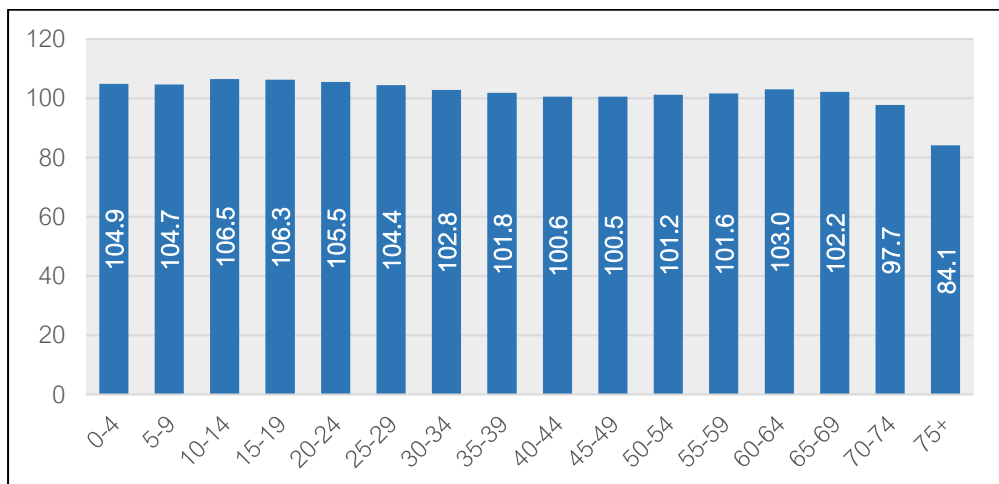


Sumber: Hasil SP2020 BPS Provinsi Jawa Barat

Komposisi penduduk menunjukkan proporsi penduduk usia anak (kelompok penduduk usia 0-18 tahun) di Provinsi Jawa Barat masih cukup besar mencapai 32,90 persen dari total penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa pengarusutamaan anak masih menjadi isu utama. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga

pelayanan dan penanganan kepada anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Menyadari bahwa kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini, maka pemenuhan hak dan perlindungan anak hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

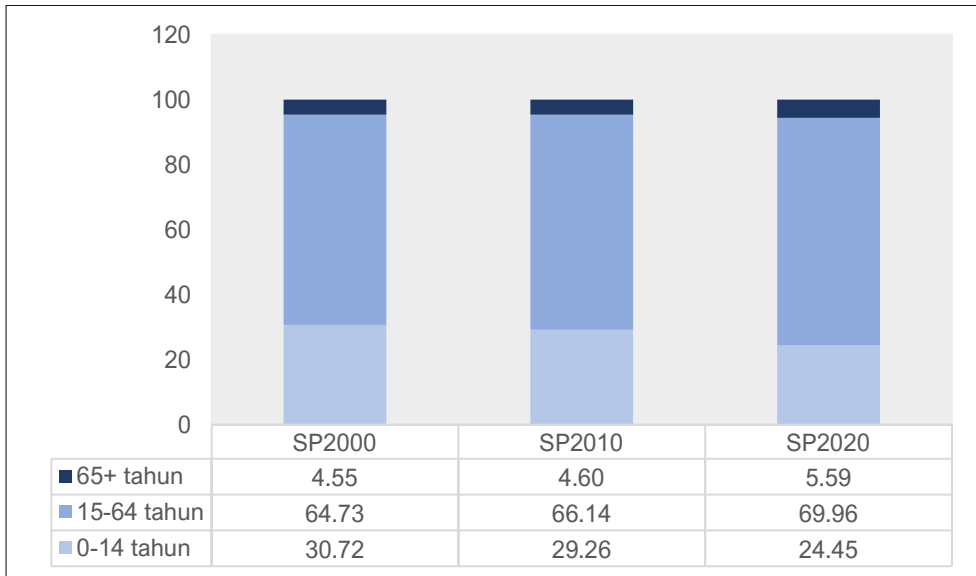
**Gambar 2.8**  
**Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur pada Tahun 2020**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Jawa Barat berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Hal ini dilihat dari persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2000. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020 (lihat Gambar 2.9). Struktur penduduk yang demikian dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar atau dengan kata lain disebut “bonus demografi”. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

**Gambar 2.9**  
**Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur pada**  
**Tahun 2000-2020**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Pada 3 (tiga) periode SP (lihat Gambar 2.9) terlihat bahwa penduduk kelompok usia 65 tahun ke atas terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk lansia menimbulkan konsekuensi yang kompleks. Berbagai tantangan yang diakibatkan penuaan penduduk telah mencakup hampir setiap aspek kehidupan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan lansia di Jawa Barat. Penambahan jumlah lansia diikuti dengan peningkatan rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk produktif. Pada tahun 2020, tercatat rasio ketergantungan lansia sebesar 15,54 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 15 orang penduduk lansia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Jawa Barat berada dalam masa transisi menuju era *ageing population* kondisi dimana persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai lebih dari 10 persen.

Capaian pembangunan di Provinsi Jawa Barat cenderung memberikan dampak yang positif dengan adanya peningkatan kualitas kesehatan dan keadaan sosial masyarakat. Fenomena



peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tergambar dari penurunan tingkat kematian ibu, bayi, dan anak yang efek dominonya akan menyebabkan peningkatan usia harapan hidup penduduk Jawa Barat. Konsekuensi yang akan timbul dari semakin membaiknya angka harapan hidup penduduk Jawa Barat tersebut adalah semakin bertambah banyaknya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi kependudukan yang demikian menuntut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population* dengan mempersiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi kependudukan.

Suatu keniscayaan bahwa bertambahnya lansia berbanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan termasuk di dalamnya perawatan yang pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia. Untuk itu, perlu adanya peningkatan sinergi dalam melaksanakan program-program terkait dengan lansia yang dapat mengurangi beban ketergantungan lansia terhadap kelompok usia produktif. Tujuannya adalah untuk membuat lansia menjadi sehat, mandiri, dan aktif selama mungkin guna turut mendorong ekonomi dapat tumbuh ketika lansia bekerja.

### **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan Tahun 2020 - 2021 adalah sebagai berikut:

#### **2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB**

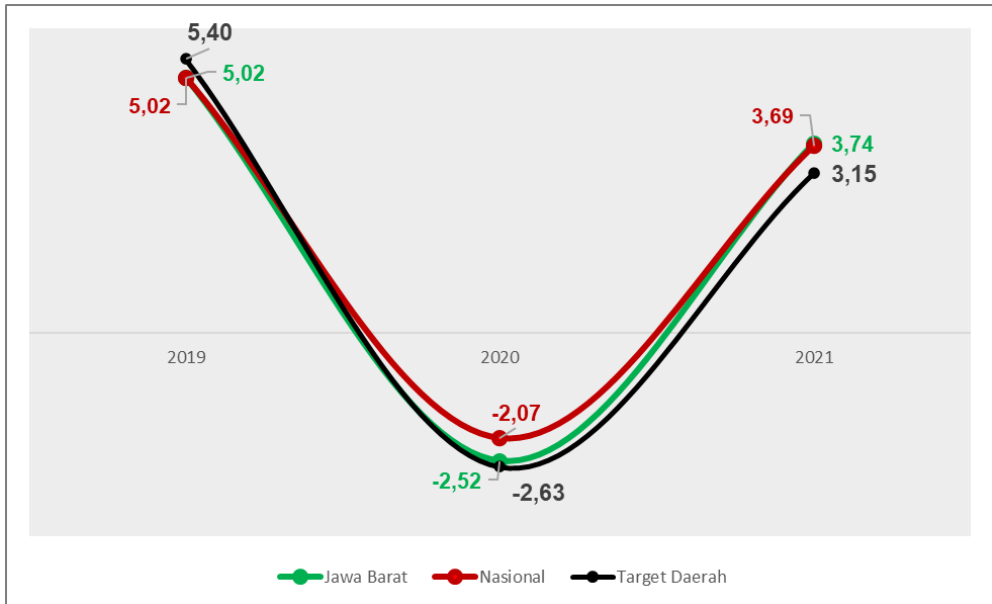
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan instrumen penting untuk mengukur kemajuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digunakan untuk mengamati sejauh mana keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan

ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran atas dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2021 menunjukkan kinerja yang positif ditandai dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif dibandingkan capaian tahun 2020 yang berkontraksi cukup dalam. Hal ini mengindikasikan menguatnya pemulihan ekonomi dampak dari keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, dan efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah. Perekonomian yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut merupakan cerminan dari kemajuan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, khususnya pasca pelanggaran PPKM Jawa-Bali dan ditopang oleh meningkatnya permintaan global dan domestik pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi permintaan, peningkatan terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor. Konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama terhadap perekonomian kembali tumbuh positif. Adapun menguatnya permintaan global memberikan dampak yang sangat baik pada permintaan ekspor ke Jawa Barat sehingga tumbuh cukup tinggi. Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan terjadi pada sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan besar & eceran, serta transportasi & pergudangan. Sejalan dengan ekspor yang meningkat, kinerja industri pengolahan juga terakselerasi, terutama ditopang oleh industri utama yakni TPT, elektronik, dan otomotif. Dengan berbagai dinamika yang terjadi baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun perkembangan kasus COVID-19, serta kemajuan vaksinasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 tercatat sebesar 3,74 persen (*y-o-y*), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,52 persen (*y-o-y*). Gambar 2.10 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dibandingkan target daerah dan capaian nasional.

**Gambar 2.10**  
**Target dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2021 (Persen)**



Sumber: Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Keterangan: Target daerah merupakan angka target pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha terutama lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi, sementara itu tiga lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan negatif (lihat Tabel 2.5). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berdampak terhadap peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang mengingat guncangan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 berdampak cukup parah terhadap kondisi sosial ekonomi di Provinsi Jawa Barat dimana pengangguran dan kemiskinan meningkat cukup signifikan.

**Tabel 2.5**  
**Pertumbuhan PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019-2021 dan Triwulan I-2022 (Persen)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,80	2,30	1,31
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,75	-4,11	0,82
C	Industri Pengolahan	3,95	-4,36	4,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,20	-7,62	11,66
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,03	10,80	9,63
F	Konstruksi	6,12	-5,96	6,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	-7,95	3,19
H	Transportasi dan Pergudangan	4,97	-4,18	-0,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,25	-5,60	-0,04
J	Informasi dan Komunikasi	9,31	34,09	7,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,16	1,14	5,69
L	Real Estat	9,55	1,92	11,75
M,N	Jasa Perusahaan	9,16	-18,38	8,54
O	Administrasi Pemerintahan	4,91	-6,92	-2,02
P	Jasa Pendidikan	5,22	6,69	0,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,48	-5,39	7,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,15	-2,63	0,81

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menunjukkan arah pemulihan ekonomi dialami oleh semua provinsi. DI Yogyakarta mengalami pertumbuhan tertinggi hingga mencapai angka 5 persen, sementara terendah dialami oleh Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 3,32 persen. Dari sisi peranan, Provinsi Jawa Barat masih menjadi penopang perekonomian nasional dengan pangsa 13,02 persen, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (17,17 persen) dan Jawa Timur (14,46 persen).

**Tabel 2.6**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi**  
**di Pulau Jawa Tahun 2019-2021 (persen)**

Provinsi	2019	2020	2021	Rata-rata
DKI Jakarta	5,82	-2,39	3,56	4,02



Provinsi	2019	2020	2021	Rata-rata
Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	
Jawa Tengah	5,36	-2,65	3,32	
DI Yogyakarta	6,59	-2,68	5,53	
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,57	
Banten	5,26	-3,39	4,44	
<b>Indonesia</b>	<b>5,02</b>	<b>-2,07</b>	<b>3,69</b>	--

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambaran keadaan ekonomi Provinsi Jawa Barat merupakan resultan dari semua perubahan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota. Pertumbuhan ekonomi 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kabupaten Karawang diikuti Kabupaten Majalengka dan Kota Cimahi. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon (lihat Tabel 2.7).

**Tabel 2.7**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021 (persen)**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Bogor	5,85	-1,76	3,55
Sukabumi	5,64	-0,92	3,75
Cianjur	5,67	-0,78	3,48
Bandung	6,36	-1,8	3,56
Garut	5,02	-1,26	3,58
Tasikmalaya	5,43	-0,98	3,43
Ciamis	5,38	-0,14	3,66
Kuningan	6,59	0,11	3,56
Cirebon	4,68	-1,08	2,47
Majalengka	7,77	0,89	4,75
Sumedang	6,33	-1,12	3,17
Indramayu	3,2	-1,58	0,58
Subang	4,61	-1,15	2,40
Purwakarta	4,37	-2,13	3,42
Karawang	4,21	-3,8	5,85
Bekasi	3,95	-3,4	3,65
Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46



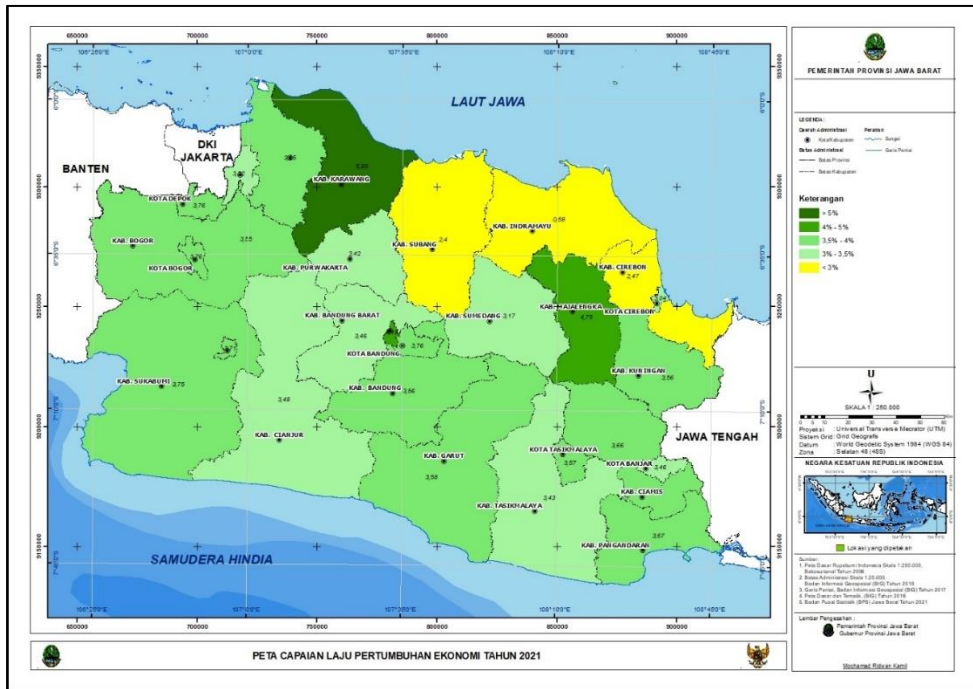
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Pangandaran	5,94	-0,05	3,67
Kota Bogor	6,19	-0,41	3,76
Kota Sukabumi	5,53	-1,49	3,71
Kota Bandung	6,79	-2,28	3,76
Kota Cirebon	6,29	-0,98	3,04
Kota Bekasi	5,41	-2,58	3,22
Kota Depok	6,74	-1,92	3,76
Kota Cimahi	7,85	-2,26	4,19
Kota Tasikmalaya	5,97	-2,01	3,57
Kota Banjar	5,03	0,94	3,46
<b>Jawa Barat</b>	<b>5,02</b>	<b>-2,52</b>	<b>3,74</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Pola spasial pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami pertumbuhan di atas 3 persen. Hanya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah 3 persen. Secara umum, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2021 sebesar 3,50 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten tersebut tidak terlepas dari adanya faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah adalah kualitas sumber daya manusia. Jika ditilik dari capaian IPM dan indikator rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen pembentuk IPM menunjukkan kualitas sumber daya manusia di ketiga kabupaten tersebut tergolong rendah. Hal ini disinyalir sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten tersebut.



**Gambar 2.11**  
**Pola Spasial Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2021 (persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2022

Gambaran perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Nilai nominal PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola oleh suatu daerah atau dengan kata lain seberapa besar nilai tambah/jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar Rp125.202,13 miliar, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp54.365,67 miliar (lihat Tabel 2.8).

**Tabel 2.8**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto**  
**Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)**

PDRB	2019	2020	2021
PDRB (ADHB)	2.123.153,71	2.084.620,25	2.209.822,38
PDRB (ADHK)	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Tiga lapangan usaha sebagai kontributor utama dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan nilai PDRB dibanding tahun 2020, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan meningkat sebesar Rp66.781,72 miliar, Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor meningkat sebesar Rp15.723,29 miliar, dan Konstruksi meningkat sebesar Rp20.357,15 miliar. Peningkatan nilai nominal PDRB yang cukup besar di 3 (tiga) sektor tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan strategis dalam rangka pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

**Tabel 2.9**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga**  
**Berlaku Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186.441,35	192.139,11	188.617,98
B	Pertambangan dan Penggalan	26.448,30	23.160,87	25.537,44
C	Industri Pengolahan	883.289,85	857.004,32	923.786,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.966,98	10.069,94	11.242,25
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.936,91	2.156,07	2.373,85
F	Konstruksi	181.289,37	171.250,94	191.608,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323.622,36	303.862,68	319.585,97
H	Transportasi dan Pergudangan	117.219,61	109.147,87	110.361,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.141,69	60.845,27	62.641,20



Lapangan Usaha		2019	2020	2021
J	Informasi dan Komunikasi	60.943,95	81.729,95	87.369,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	57.490,59	58.425,45	64.779,15
L	Real Estat	22.955,76	23.561,25	26.392,45
M,N	Jasa Perusahaan	9.974,90	8.402,88	9.169,97
O	Administrasi Pemerintahan	49.060,74	46.031,12	45.441,76
P	Jasa Pendidikan	68.079,32	75.567,57	77.760,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.680,68	16.214,51	17.787,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	45.611,35	45.050,44	45.366,76
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>2.123.153,71</b>	<b>2.084.620,25</b>	<b>2.209.822,38</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.10 menunjukkan terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami penurunan nilai PDRB, yakni lapangan usaha Administrasi Pemerintahan turun sebesar Rp538,58 miliar, Transportasi dan Pergudangan turun sebesar Rp115,91 miliar, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turun sebesar Rp13,92 miliar.

**Tabel 2.10**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104.596,75	107.000,79	108.406,55
B	Pertambangan dan Penggalian	24.791,42	23.771,26	23.966,20
C	Industri Pengolahan	640.760,96	612.799,43	638.689,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.373,58	4.964,31	5.543,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.168,93	1.295,18	1.419,97
F	Konstruksi	126.612,45	119.062,01	126.767,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	232.878,84	214.374,85	221.203,99
H	Transportasi dan Pergudangan	71.064,36	68.097,41	67.981,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40.928,32	38.634,85	38.620,93



Lapangan Usaha		2019	2020	2021
J	Informasi dan Komunikasi	63.861,23	85.632,78	91.882,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	36.498,69	36.914,80	39.014,44
L	Real Estat	19.344,12	19.716,06	22.033,68
M,N	Jasa Perusahaan	6.859,66	5.599,12	6.077,47
O	Administrasi Pemerintahan	28.704,06	26.716,83	26.178,25
P	Jasa Pendidikan	42.156,30	44.978,19	44.988,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.448,02	11.777,49	12.666,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	32.912,01	32.045,37	32.305,31
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>1.490.959,69</b>	<b>1.453.380,72</b>	<b>1.507.746,39</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Pemanfaatan nilai tambah menjadikan setiap wilayah memiliki struktur komponen PDRB pengeluaran yang berbeda-beda. Secara umum, struktur PDRB pengeluaran Provinsi Jawa Barat didominasi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (lihat Tabel 2.11 dan Tabel 2.12).

**Tabel 2.11**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.387.762,27	1.378.904,38	1.424.594,08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13.629,89	13.340,95	13.760,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	117.448,94	118.688,96	123.705,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	531.364,62	489.180,23	547.931,94
Perubahan Inventori	73.290,76	27.303,94	- 15.096,31
Net Ekspor Antar Daerah	- 342,76	57.201,78	114.926,61
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2.123.153,71</b>	<b>2.084.620,25</b>	<b>2.209.822,38</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

**Tabel 2.12**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	920.742,90	894.114,73	905.974,62
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.353,99	8.971,94	9.144,60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	72.248,44	71.902,49	73.303,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	366.760,22	336.213,72	359.705,21
Perubahan Inventori	43.599,93	16.198,45	- 8.456,84
Net Ekspor Antar Daerah	78.254,21	125.979,39	168.075,19
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>1.490.959,69</b>	<b>1.453.380,72</b>	<b>1.507.746,39</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa tergambar dari struktur ekonomi. Selama 3 (tiga) tahun terakhir struktur perekonomian didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi di atas 41 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di atas 14 persen dan Konstruksi dengan kontribusi di atas 8 persen. Dominasi sektor Industri Pengolahan dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat mengindikasikan kegiatan ekonomi bertumpu pada kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan/atau barang yang nilainya kurang menjadi bernilai tinggi.

Karakteristik sektor Industri Pengolahan yang memiliki produktivitas relatif tinggi serta memiliki keterkaitan dan memasok kebutuhan bagi sektor lainnya menjadikan sektor ini tumbuh pesat. Selain itu, jenis industri yang berkembang mulai dari industri padat karya, padat modal hingga padat teknologi mempengaruhi serapan tenaga kerja yang menentukan produktivitas ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, maka *output* produksi semakin tinggi. Sektor Industri Pengolahan memiliki prospek ke depan yang baik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Barat melalui kombinasi pendekatan sektoral dengan mengembangkan klaster industri dan pendekatan regional atau kawasan yang berlandaskan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Ke depan, pangsa sektor Industri

Pengolahan diperkirakan akan semakin menguat seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

Namun demikian, Kejadian Luar Biasa (KLB) Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 mengirimkan pesan bahwa tatanan perekonomian Provinsi Jawa Barat rentan terhadap guncangan ekonomi (*economic shock*) akibat peristiwa atau kejadian tidak terduga dan tidak dapat diprediksi yang berasal dari lingkungan eksternal (global). Guncangan ekonomi yang terjadi menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam yang disebabkan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan yang menjadi kontributor utama perekonomian terdampak cukup parah.

**Tabel 2.13**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,78	9,22	8,54
B	Pertambangan dan Penggalian	1,25	1,11	1,16
C	Industri Pengolahan	41,60	41,11	41,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,48	0,51
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,11
F	Konstruksi	8,54	8,21	8,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,24	14,58	14,46
H	Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,24	4,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,88	2,92	2,83
J	Informasi dan Komunikasi	2,87	3,92	3,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,80	2,93
L	Real Estat	1,08	1,13	1,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,47	0,40	0,41
O	Administrasi Pemerintahan	2,31	2,21	2,06
P	Jasa Pendidikan	3,21	3,63	3,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,78	0,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,15	2,16	2,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022



Lanskap perekonomian Provinsi Jawa Barat tergambarkan dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota. Tabel 2.14 dan Gambar 2.12 memperlihatkan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota tahun 2021. Pola spasial memperlihatkan lanskap perekonomian Provinsi Jawa Barat didominasi oleh 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan kontribusi  $\geq 10$  persen. Tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang ditambah satu kota yaitu Kota Bandung menyumbang sebesar 50,34 persen terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Berdasarkan struktur perekonomian, sektor Industri Pengolahan menjadi basis ekonomi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang dan sektor Perdagangan menjadi basis ekonomi di Kota Bandung. Dilihat dari peranannya, Provinsi Jawa Barat memiliki ketergantungan yang tinggi kepada kabupaten dan kota tersebut.

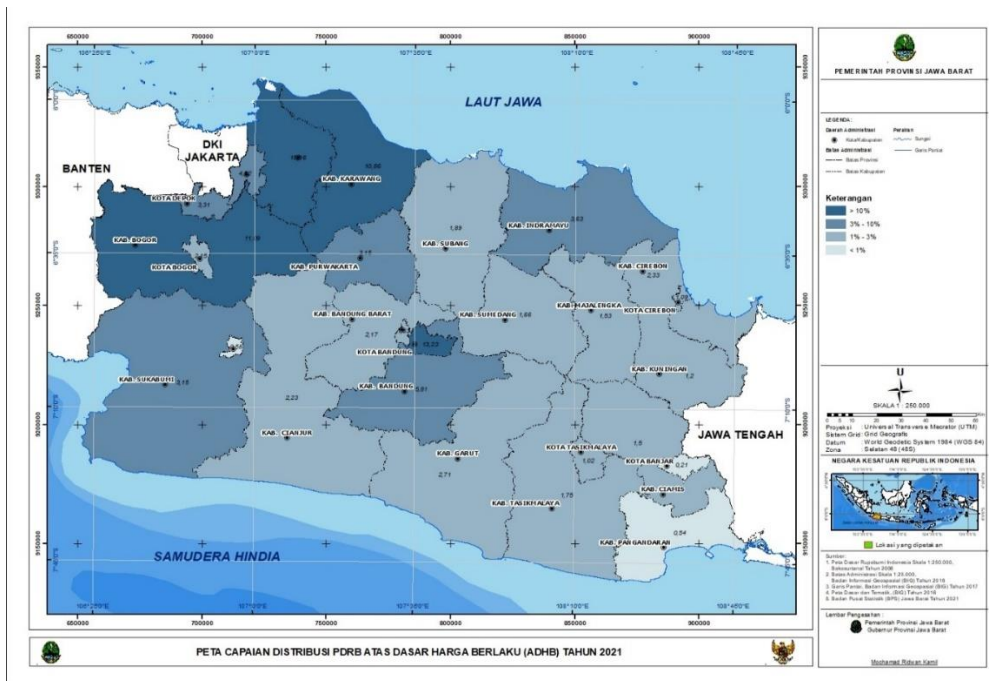
**Tabel 2.14**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas**  
**Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021 (persen)**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Bogor	11,06	11,12	11,09
Sukabumi	3,14	3,18	3,15
Cianjur	2,19	2,24	2,23
Bandung	5,78	5,83	5,81
Garut	2,70	2,74	2,71
Tasikmalaya	1,74	1,76	1,75
Ciamis	1,47	1,51	1,50
Kuningan	1,17	1,21	1,20
Cirebon	2,29	2,34	2,33
Majalengka	1,46	1,52	1,53
Sumedang	1,65	1,67	1,66
Indramayu	3,75	3,74	3,63
Subang	1,90	1,89	1,89
Purwakarta	3,16	3,16	3,15
Karawang	10,73	10,56	10,86
Bekasi	15,20	14,98	15,16
Bandung Barat	2,20	2,19	2,17

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Pangandaran	0,53	0,54	0,54
Kota Bogor	2,15	2,16	2,15
Kota Sukabumi	0,58	0,58	0,58
Kota Bandung	13,45	13,37	13,23
Kota Cirebon	1,09	1,10	1,09
Kota Bekasi	4,57	4,55	4,52
Kota Depok	3,31	3,32	3,31
Kota Cimahi	1,52	1,52	1,53
Kota Tasikmalaya	1,01	1,02	1,02
Kota Banjar	0,20	0,21	0,21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

**Gambar 2.12**  
**Pola Spasial Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 (persen)**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

### 2.1.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan

jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin makmur.

PDRB per kapita tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Secara nominal, PDRB per kapita atas dasar berlaku meningkat sebesar Rp2,01 juta, sedangkan atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp727,05 ribu (lihat Tabel 2.15). Peningkatan ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya kegiatan ekonomi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pelonggaran kegiatan masyarakat dan meningkatnya nilai tambah *output* lapangan usaha utama, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor, dan Konstruksi.

**Tabel 2.15**  
**Nilai PDRB Per Kapita dan Target Daerah**  
**Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)**

Provinsi	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jawa Barat	43.309,19	43.288,70	45.299,58	30.413,37	30.180,54	30.907,59
Indonesia	59.317,91	57.269,80	62.236,44	41.021,61	39.778,89	40.775,88
Target Daerah	N/A	41.500,00	44,020,00	N/A	29.640,00	31.420,00

Sumber: BPS. 2022

Secara rata-rata, PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat masih di bawah atau lebih rendah dari capaian Nasional (lihat Tabel 2.16). Berdasarkan kategori Bank Dunia, Provinsi Jawa Barat termasuk daerah dengan kategori pendapatan per kapita menengah bawah. PDRB per kapita menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki nilai PDRB per kapita paling tinggi diikuti lapangan usaha Konstruksi dan Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (lihat Tabel 2.16). Artinya, penduduk yang bekerja di ketiga lapangan usaha tersebut terutama Industri Pengolahan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding penduduk yang bekerja di lapangan usaha lainnya. Tabel 2.16 menunjukkan 5

(lima) lapangan usaha dengan PDRB per kapita terbesar tahun 2021.

**Tabel 2.16**  
**PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2021**

Lapangan Usaha	Jumlah Pekerja	Persentase Pekerja	PDRB ADHB Sektor	PDRB per Kapita
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.180.000	23,22%	319.585.970.000.000	61.696.133
Industri Pengolahan	4.320.000	19,37%	923.786.040.000.000	213.839.361
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.500.000	15,70%	188.617.980.000.000	53.890.851
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.010.000	9,01%	62.641.200.000.000	31.164.776
Konstruksi	1.590.000	7,13%	191.608.090.000.000	120.508.233

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Tabel 2.17 menampilkan data nilai PDRB per kapita nominal provinsi se-Pulau Jawa tahun 2019 sampai tahun 2021. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah *output* dari setiap sektor ekonomi.

**Tabel 2.17**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antar dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Ribu Rupiah)**

Provinsi	PDRB per Kapita ADHB			PDRB per Kapita ADHK		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
DKI Jakarta	268.052,25	262.702,12	274.709,59	174.812,51	170.099,68	174.962,98
Jawa Barat	43.309,19	43.288,70	45.299,58	30.413,37	30.180,54	30.907,59
Jawa Tengah	39.388,15	36.983,99	38.669,11	28.695,92	26.483,64	27.143,42
DI Yogyakarta	36.459,73	37.745,22	40.229,83	27.008,68	27.750,38	28.901,58
Jawa Timur	59.015,17	56.640,41	60.043,33	41.512,20	39.689,02	40.830,88
Banten	52.013,99	52.736,47	55.210,65	35.913,90	37.164,35	38.199,27

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022

Dalam skala provinsi, PDRB per kapita kabupaten/kota (lihat Tabel 2.18 dan Gambar 2.13) menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar >Rp100 juta per tahun jauh di atas rata-rata pendapatan provinsi. Dilihat dari peranannya, Kabupaten Bekasi dengan basis ekonomi sektor Industri Pengolahan dan Kota Bandung dengan basis ekonomi sektor Perdagangan memiliki peranan yang besar dan penting dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat.

PDRB per kapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah atau daerah. Namun demikian, PDRB per kapita tidak dapat mengukur secara riil pendapatan penduduk secara keseluruhan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa besarnya PDRB per kapita tidak menggambarkan tingkat pendapatan penduduk secara riil. Hal ini mengingat pembentukan PDRB didominasi oleh sektor industri Minyak dan Gas (Migas) dengan keberadaan Objek Vital Negara (Kilang Pertamina Balongan dan eksplorasi migas ExxonMobil). Tanpa migas, nilai PDRB ADHB Kabupaten Indramayu hanya berada di kisaran 50 persen dari total nilai PDRB.

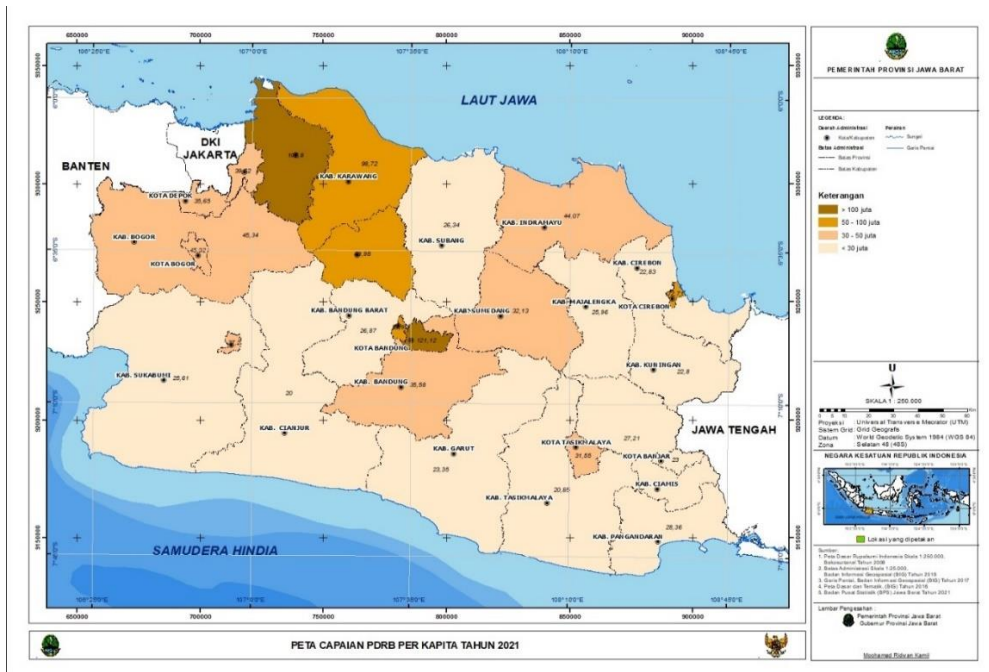
**Tabel 2.18**  
**Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (ribu rupiah)**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Bogor	40.389	43.598	45.347
Sukabumi	26.968	24.838	25.615
Cianjur	20.373	19.239	20.002
Bandung	33.526	34.206	35.589
Garut	22.116	22.480	23.356
Tasikmalaya	20.925	20.120	20.855
Ciamis	26.273	26.048	27.218
Kuningan	23.152	21.996	22.805
Cirebon	22.506	21.869	22.833
Majalengka	25.812	24.726	25.964
Sumedang	30.341	30.821	32.130

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Indramayu	46.279	43.308	44.072
Subang	25.983	25.208	26.348
Purwakarta	71.580	67.430	69.985
Karawang	98.626	92.130	98.726
Bekasi	88.370	102.466	107.801
Bandung Barat	28.209	26.088	26.879
Pangandaran	28.206	27.195	28.366
Kota Bogor	42.403	44.101	45.920
Kota Sukabumi	37.928	35.926	37.209
Kota Bandung	113.177	116.056	121.126
Kota Cirebon	74.398	70.472	72.714
Kota Bekasi	33.330	38.000	39.529
Kota Depok	30.079	34.356	35.655
Kota Cimahi	54.268	56.715	59.929
Kota Tasikmalaya	32.213	30.223	31.558
Kota Banjar	23.508	22.189	23.003

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

**Gambar 2.13**  
**Pola Spasial PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2021**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022



### 2.1.2.3 Inflasi

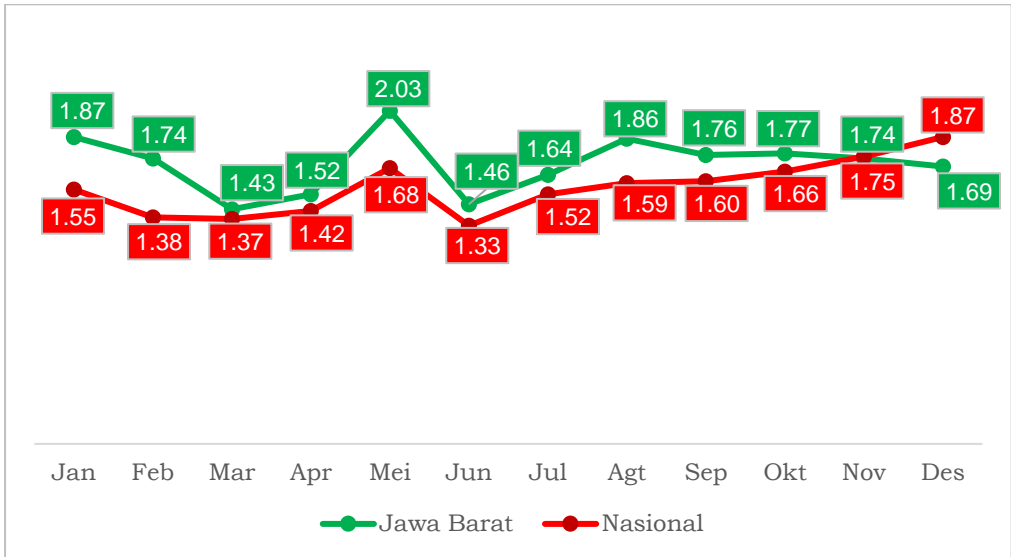
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berdampak terhadap capaian pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga.

Berdasarkan analisis Bank Indonesia, inflasi Jawa Barat pada tahun 2021 tetap terkendali sebesar 1,69 persen (*y-o-y*) dan berada di bawah rentang target ( $3\pm 1$  persen), sejalan dengan pembatasan secara selektif aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan belum optimalnya daya beli masyarakat. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Jawa Barat, laju inflasi Kota Bogor menjadi yang tertinggi sebesar 1,94 persen (*y-o-y*), sementara Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan laju inflasi terendah yakni sebesar 1,17 persen (*y-o-y*).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi pada sebagian besar kelompok pengeluaran barang dan jasa tahun 2021 cukup terkendali. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,16 persen (*y-o-y*), kelompok pendidikan sebesar 2,77 persen (*y-o-y*), dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,67 persen (*y-o-y*).

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I-2022 diperkirakan berada dalam rentang target sasaran inflasi 2022 yakni  $3 \pm 1$  persen, namun cenderung bias ke bawah seiring dengan pembatasan aktivitas ekonomi akibat gelombang ketiga COVID-19.

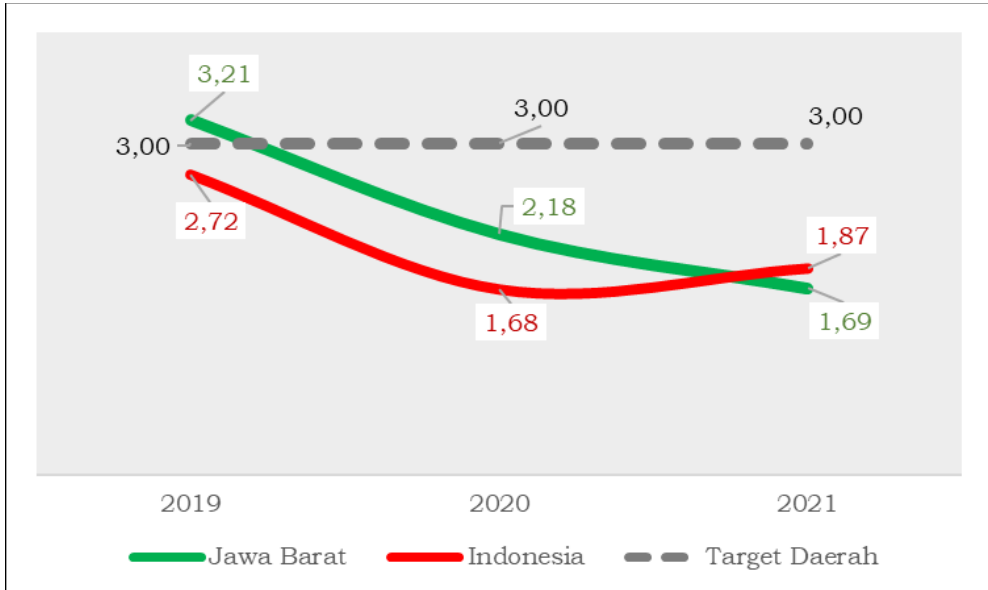
**Gambar 2.14**  
**Inflasi Year-On-Year Provinsi Jawa Barat dan Indonesia**  
**Tahun 2021 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2022

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi inflasi cenderung menurun (lihat Gambar 2.15). Hal ini tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang turut mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga dengan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Selain itu, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif serta meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 2.15**  
**Realisasi Inflasi dan Target Daerah Tahun 2019-2021 (Persen)**



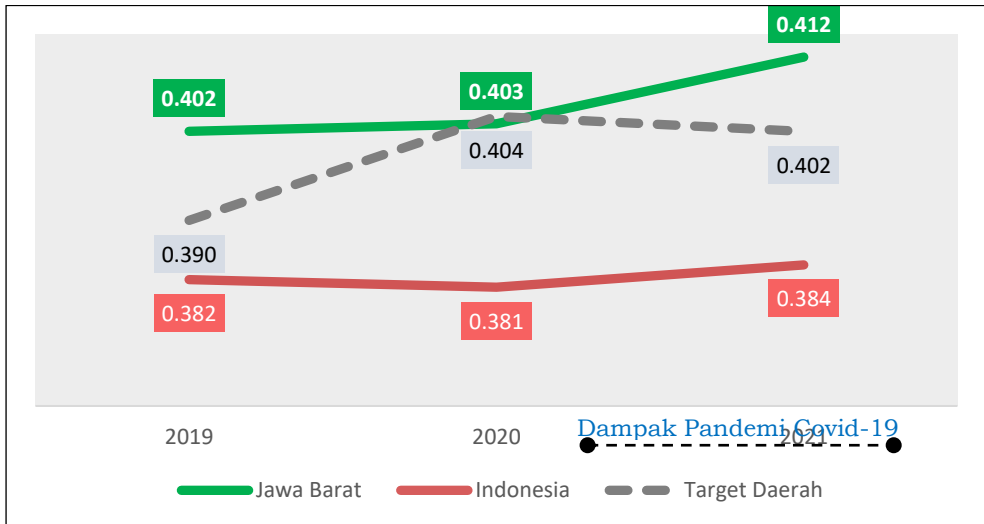
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2022

#### 2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Angka gini ratio selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, artinya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat semakin timpang meskipun masih termasuk kategori ketimpangan sedang (lihat Gambar 2.16). Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan selama periode RPJMD 2018-2023 dilakukan melalui serangkaian strategi, diantaranya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha, mempercepat pembangunan desa, dan mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

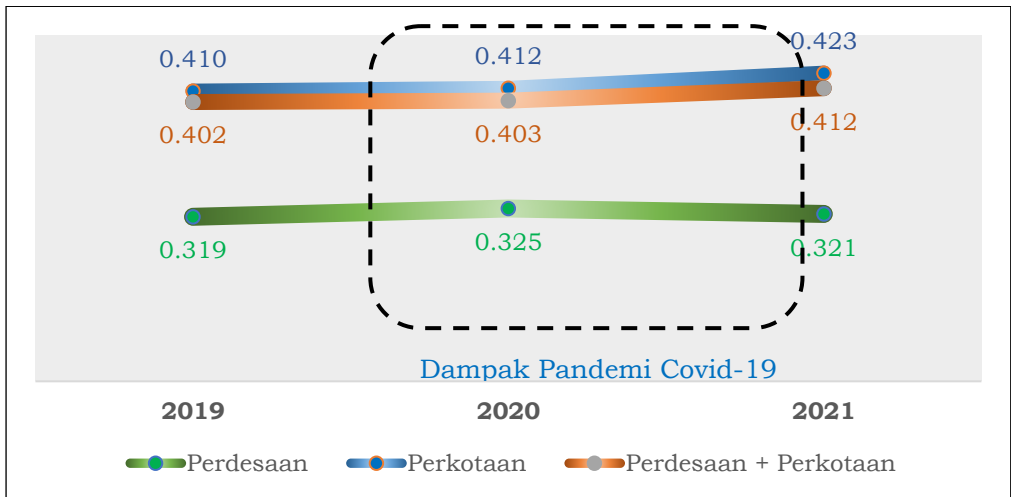
**Gambar 2.16**  
**Target dan Realisasi Gini Tahun 2019-2021**



Sumber: Dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan dan perdesaan memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi di perkotaan dibanding perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana di perdesaan sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen yang mana mayoritas bekerja di sektor pertanian, sedangkan di perkotaan lebih bersifat heterogen yang mana pada umumnya penduduk di perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa.

**Gambar 2.17**  
**Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan**  
**Tahun 2019-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2021

Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu : 1) ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; 2) ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; 3) konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti dan saham; dan 4) ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Dalam konteks Jawa Barat, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka gini ratio sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.16 lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB provinsi dimana 51 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten (Bogor,

Bekasi, dan Karawang) dan 1 (satu) kota (Kota Bandung). Dari sisi inklusivitas, tercermin dari angka indeks pembangunan ekonomi inklusif yang masih rendah (5,61) dibawah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau (> 6,0). Selain itu, ketimpangan yang meningkat di tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh guncangan ekonomi dampak pandemi COVID-19, dimana masyarakat di perkotaan terkena dampak yang lebih parah dibanding masyarakat di perdesaan (lihat Gambar 2.17).

Dalam konstelasi regional Jawa, tahun 2021 Jawa Barat termasuk provinsi dengan capaian angka gini ratio di atas capaian nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa. Artinya ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa. Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.19**  
**Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021**

Provinsi	2019	2020	2021	Rata-Rata
DKI Jakarta	0,400	0,391	0,411	<b>0,391</b>
<b>Jawa Barat</b>	<b>0,398</b>	<b>0,398</b>	<b>0,412</b>	
Jawa Tengah	0,359	0,358	0,368	
DI Yogyakarta	0,437	0,420	0,436	
Jawa Timur	0,364	0,384	0,364	
Banten	0,365	0,361	0,363	
<b>Indonesia</b>	<b>0,385</b>	0,380	<b>0,381</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2022

Dalam skala provinsi, ketimpangan (*gini ratio*) kabupaten/kota sebagaimana data pada Tabel 2.20 dan Gambar 2.18 menunjukkan angka yang bervariasi. Terdapat 2 (dua) kelompok kabupaten/kota yang terbagi berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadar, yakni kelompok kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0,36-0,49) dan kelompok kabupaten/kota dengan pemerataan yang relatif tinggi (angka gini ratio berkisar 0,20-0,35). Kabupaten/kota yang termasuk kategori ketimpangan sedang, umumnya memiliki karakteristik



perekonomian yang berbasis industri dan perdagangan. Adapun kelompok kabupaten/kota dengan distribusi pengeluaran yang merata memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis pertanian. Hal ini disebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini pula yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan.

**Tabel 2.20**  
**Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Barat	0,402	0,403	0,412
Bogor	0,404	0,381	0,396
Sukabumi	0,347	0,334	0,343
Cianjur	0,363	0,350	0,372
Bandung	0,355	0,414	0,386
Garut	0,352	0,352	0,322
Tasikmalaya	0,322	0,343	0,378
Ciamis	0,354	0,336	0,342
Kuningan	0,435	0,361	0,349
Cirebon	0,344	0,338	0,339
Majalengka	0,347	0,336	0,354
Sumedang	0,344	0,384	0,359
Indramayu	0,284	0,319	0,321
Subang	0,333	0,350	0,329
Purwakarta	0,399	0,414	0,388
Karawang	0,357	0,327	0,374
Bekasi	0,354	0,372	0,340
Bandung Barat	0,362	0,376	0,356
Pangandaran	0,310	0,335	0,320
Kota Bogor	0,386	0,412	0,441
Kota Sukabumi	0,419	0,397	0,436
Kota Bandung	0,442	0,402	0,427
Kota Cirebon	0,408	0,421	0,489
Kota Bekasi	0,352	0,352	0,401
Kota Depok	0,344	0,344	0,367
Kota Cimahi	0,437	0,380	0,415
Kota Tasikmalaya	0,360	0,366	0,414

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Banjar	0,302	0,312	0,341

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

**Gambar 2.18**  
**Peta Capaian Gini Rasio Tahun 2021**



Sumber: Hasil analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

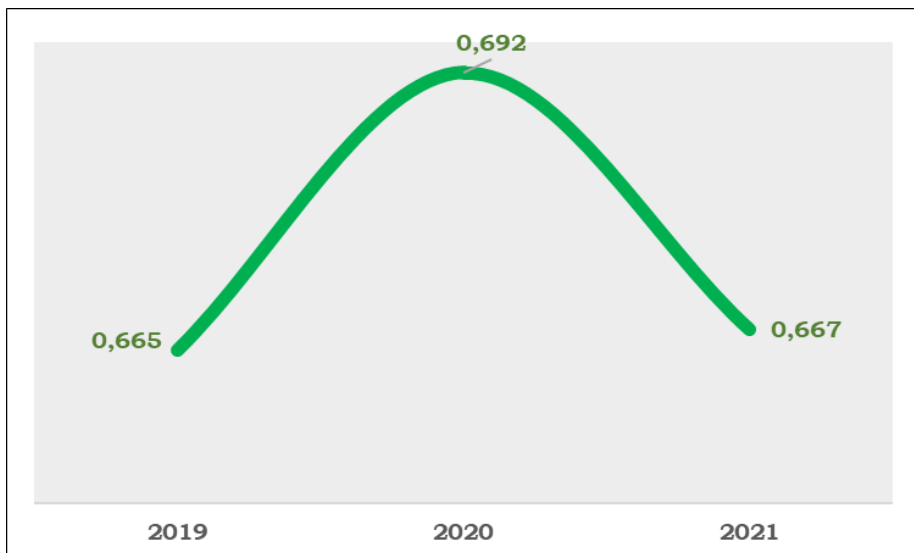
### 2.1.2.5 Indeks Williamson

Salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah ketimpangan pendapatan antarwilayah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antardaerah, perbedaan sumber daya alam antarwilayah, perbedaan kondisi demografi antarwilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah. Hal ini mengisyaratkan ketimpangan antarwilayah yang cukup tajam yang terkonfirmasi dari angka Indeks Williamson tahun 2021 sebesar 0,667 (lihat Gambar 2.19). Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM juga disebabkan faktor eksternal yaitu ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Perbedaan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, dan akumulasi modal lainnya yang dimiliki oleh daerah

kabupaten/kota telah mengakibatkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, heterogenitas karakteristik wilayah juga ditenggarai sebagai penyebab terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan indeks williamson dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021) yang ditunjukkan pada Gambar 2.19 memberikan pesan bahwa guncangan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 dampak kejadian luar biasa pandemi COVID-19 mengisyaratkan ketimpangan antarwilayah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terindikasi dari angka indeks williamson tahun 2020 yang meningkat cukup signifikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi cukup dalam. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan dampaknya dimana pertumbuhan ekonomi kembali ke zona positif. Ke depan, ketimpangan wilayah masih menjadi isu strategis pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 2.19**  
**Indeks Williamson Tahun 2019-2021**



Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. 2022

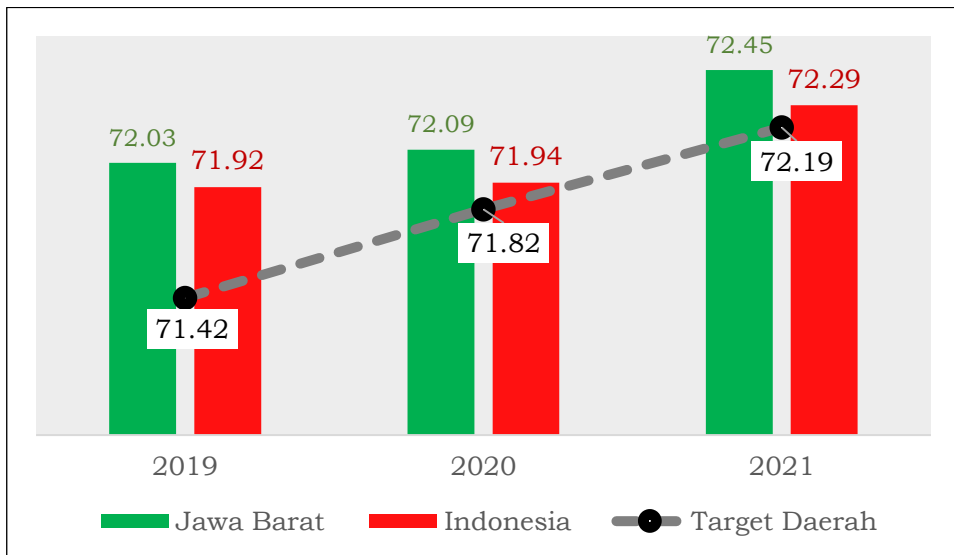
#### **2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hakikat pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan semestinya berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber

daya manusia. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020, telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh indikator ekonomi makro dan sosial mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM. Meskipun begitu, pembangunan manusia di Jawa Barat selama 2 (dua) tahun terakhir (2020-2021) menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibanding tahun sebelumnya, dimana IPM 2021 tumbuh sebesar 0,50 persen atau meningkat sebesar 0,36 poin.

**Gambar 2.20**  
**Target dan Capaian IPM Tahun 2019-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda. 2022

Perlambatan IPM di masa pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup (UHH) dan

dimensi pengetahuan yang diwakili variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya agar lebih terarah.

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, capaian IPM provinsi menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta lebih maju dibandingkan provinsi lain ditunjukkan dengan capaian IPM yang sudah  $\geq 80$  yang berarti pembangunan sumber daya manusia termasuk kategori **“Sangat Tinggi”**. Sementara itu, capaian pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat bersama tiga provinsi lainnya masih tergolong kategori **“Tinggi”**. Faktor penyebab adanya disparitas pembangunan manusia antar daerah adalah perbedaan kesempatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal ini masih menjadi kendala sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah di Jawa Barat.

**Tabel 2.21**  
**Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020-2023**

Provinsi	2019	2020	2021	Rata-rata
DKI Jakarta	80,76	80,77	81,11	<b>75,13</b>
<b>Jawa Barat</b>	<b>72,03</b>	<b>72,09</b>	<b>72,45</b>	
Jawa Tengah	71,73	71,87	72,16	
DI Yogyakarta	79,99	79,97	80,22	
Jawa Timur	71,50	71,71	72,14	
Banten	72,44	72,45	72,72	
<b>Indonesia</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>	

Sumber: BPS, 2020

Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya IPM pada tahun 2021 meskipun di tengah kondisi disrupted pandemi.

Peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat merupakan resultan dari kemajuan pembangunan manusia di 27 kabupaten/kota. Pola spasial status pencapaian IPM kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 2.21.

Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan permasalahan disparitas antarwilayah. Luasnya wilayah dan tidak meratanya pembangunan menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan disparitas terjadi antar kabupaten/kota. Salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Adapun sasaran pembangunan kewilayahan yang menjadi prioritas antara lain pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya wilayah selatan dan wilayah utara melalui peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah. Dengan sasaran pembangunan tersebut, diharapkan kesenjangan pembangunan di segala aspek dapat teratasi, termasuk kesenjangan dalam pembangunan manusia.

**Gambar 2.21**  
**Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021**



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

Pertumbuhan IPM kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi (Tabel 2.22). Pertumbuhan tertinggi dialami Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis, sedangkan terendah dialami oleh Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta. Perbedaan level pertumbuhan menunjukkan kinerja pembangunan manusia dalam kurun Tahun 2020-2021, semakin cepat laju pertumbuhannya semakin cepat pula peningkatan IPM-nya.

**Tabel 2.22**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
1	Bogor	71,36	12,49	8,31	10.410	70,60	0,28
2	Sukabumi	71,21	12,24	7,10	8.850	67,07	0,28
3	Cianjur	70,32	12,00	7,19	8.052	65,56	0,31
4	Bandung	73,72	12,70	9,07	10.307	72,73	0,47
5	Garut	71,59	12,03	7,53	7.961	66,45	0,50
6	Tasikmalaya	69,67	12,54	7,48	7.829	65,90	0,35
7	Ciamis	72,02	14,20	7,90	9.259	70,93	0,62
8	Kuningan	73,78	12,23	7,80	9.409	69,71	0,48
9	Cirebon	72,18	12,27	7,10	10.368	69,12	0,54
10	Majalengka	70,46	12,23	7,31	9.591	67,81	0,33
11	Sumedang	72,62	12,98	8,52	10.262	71,80	0,22
12	Indramayu	71,84	12,26	6,52	9.810	67,64	0,52
13	Subang	72,58	11,71	7,11	10.854	69,13	0,26
14	Purwakarta	71,18	12,12	8,10	11.669	70,98	0,23
15	Karawang	72,33	12,10	7,78	11.522	70,94	0,40
16	Bekasi	73,81	13,10	9,30	11.341	74,45	0,51
17	Bandung Barat	72,52	11,88	8,20	8.546	68,29	0,31
18	Pangandaran	71,60	12,08	7,85	9.065	68,28	0,32
19	Kota Bogor	73,82	13,42	10,53	11.716	76,59	0,63
20	Kota Sukabumi	72,58	13,58	9,81	10.942	74,60	0,53
21	Kota Bandung	74,46	14,21	10,99	16.996	81,96	0,55
22	Kota Cirebon	72,44	13,13	10,12	11.810	75,25	0,48
23	Kota Bekasi	75,19	14,10	11,31	15.903	81,95	0,55
24	Kota Depok	74,62	13,93	11,46	15.420	81,37	0,49
25	Kota Cimahi	74,21	13,81	11,08	12.019	78,06	0,30
26	Kota Tasikmalaya	72,34	13,46	9,52	10.213	73,31	0,37
27	Kota Banjar	71,19	13,24	8,77	10.476	71,92	0,31
<b>Jawa Barat</b>		<b>73,23</b>	<b>12,61</b>	<b>8,61</b>	<b>10.934</b>	<b>72,45</b>	<b>0,50</b>

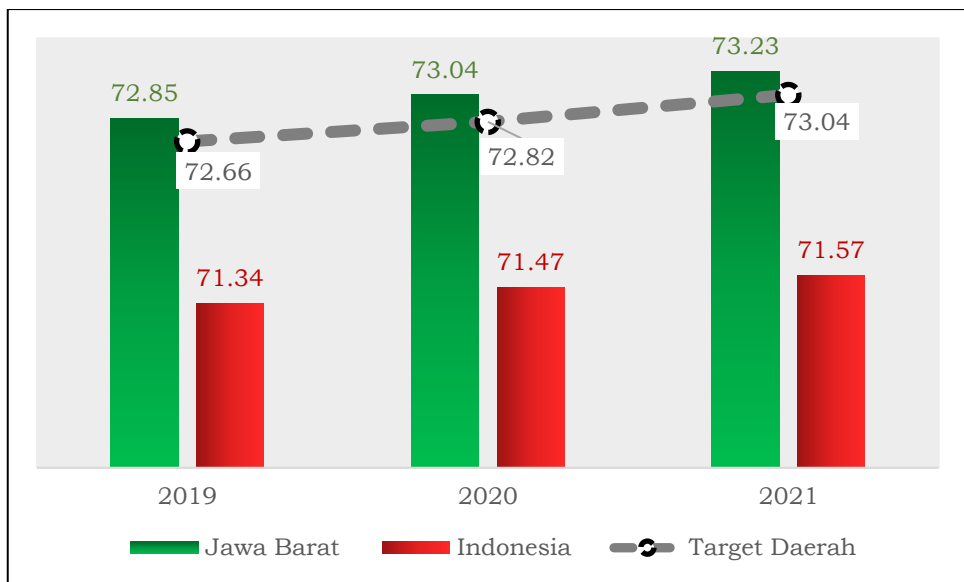
Sumber: BPS, 2022



a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

**Gambar 2.22**  
**Target dan Capaian Umur Harapan Hidup**  
**Tahun 2019-2021 (Tahun)**



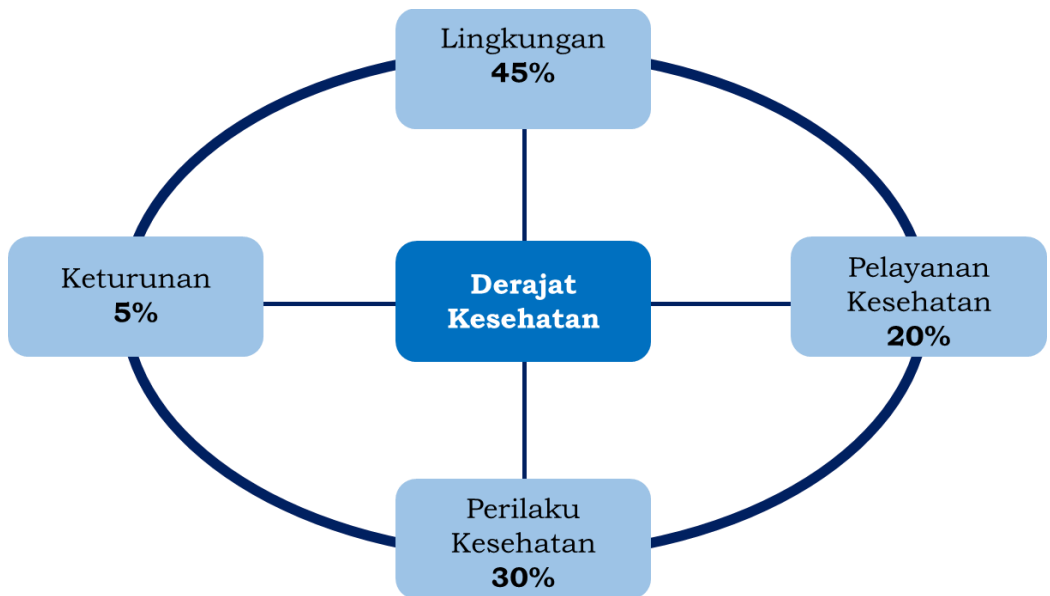
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda. 2022

Teori Henrik L. Blum menjelaskan bahwa tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan (lihat Gambar 2.23). Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjo dkk, 1997).

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar dan akses terhadap air minum layak. Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat adalah perilaku sehat dan

pelayanan kesehatan. Salah satu indikator dari perilaku sehat adalah perkawinan usia dini yang dapat berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, indikator pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan diantaranya adalah siapa dan dimana penolong proses kelahiran.

**Gambar 2.23**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan**



Sumber: Kementerian Kesehatan RI

Secara umum dapat dikatakan bahwa indikator-indikator kesehatan yang bisa berdampak terhadap peningkatan umur harapan hidup di masa pandemi COVID-19 masih menunjukkan perbaikan, meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan umur harapan hidup turut memberikan peran yang positif pada peningkatan IPM di masa pandemi.

**Tabel 2.23**  
**Indikator Kesehatan yang Terkait dengan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat 2019-2021 (persen)**

Indikator	2019	2020	2021
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	69,64	71,40	71,66

Indikator	2019	2020	2021
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	91,02	92,13	91,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang mengalami peningkatan UHH yang cukup tinggi ditunjukkan dengan pertumbuhan UHH yang mencapai 0,26 persen (Tabel 2.24). Pertumbuhan UHH ini merupakan yang tertinggi diantara provinsi di regional Pulau Jawa. Artinya, ditengah kondisi pandemi COVID-19 pembangunan bidang kesehatan terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Jaba et al. (2014) menyebutkan bahwa derajat kesehatan suatu populasi merupakan dampak dari sistem kesehatan serta sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Sumber daya dalam sistem kesehatan yang memiliki peran penting dalam derajat kesehatan suatu populasi adalah jumlah dokter, lama rawat inap, tingkat imunisasi, level edukasi, dan teknologi (Ramesh and Mirmirani, 2007). Selain itu, pengeluaran per kapita sebulan untuk kesehatan juga erat kaitannya dengan derajat kesehatan penduduk (Jaba et al (2014)).

**Tabel 2.24**  
**Umur Harapan Hidup Provinsi Se-Pulau Jawa**  
**Tahun 2020-2021 (Tahun)**

Provinsi	2019	2020	2021	Rata-Rata
DKI Jakarta	72,79	72,91	73,01	<b>72,85</b>
<b>Jawa Barat</b>	<b>72,85</b>	<b>73,04</b>	<b>73,23</b>	
Jawa Tengah	74,23	74,37	74,47	
DI Yogyakarta	74,94	74,99	75,04	
Jawa Timur	71,18	71,30	71,38	
Banten	69,84	69,96	70,02	
<b>Indonesia</b>	<b>71,34</b>	<b>71,47</b>	<b>71,57</b>	

Sumber: BPS, 2022

Perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif (Tabel 2.25). Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan UHH, disparitas antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah semakin mengecil. Tahun 2020, selisih antara Kota Bekasi yang memiliki UHH tertinggi dengan Kabupaten

Tasikmalaya yang memiliki UHH terendah sebesar 5,54 tahun berkurang menjadi 5,52 tahun pada tahun 2021.

**Tabel 2.25**  
**Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021 (Tahun)**

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Bogor	71,01	71,17	71,36
2	Sukabumi	70,73	70,97	71,21
3	Cianjur	69,91	70,13	70,32
4	Bandung	73,40	73,53	73,72
5	Garut	71,22	71,41	71,59
6	Tasikmalaya	69,21	69,47	69,67
7	Ciamis	71,57	71,83	72,02
8	Kuningan	73,35	73,59	73,78
9	Cirebon	71,82	71,99	72,18
10	Majalengka	69,97	70,27	70,46
11	Sumedang	72,29	72,43	72,62
12	Indramayu	71,37	71,63	71,84
13	Subang	72,13	72,35	72,58
14	Purwakarta	70,80	70,99	71,18
15	Karawang	71,98	72,15	72,33
16	Bekasi	73,56	73,68	73,81
17	Bandung Barat	72,18	72,34	72,52
18	Pangandaran	71,12	71,40	71,60
19	Kota Bogor	73,41	73,61	73,82
20	Kota Sukabumi	72,26	72,42	72,58
21	Kota Bandung	74,14	74,28	74,46
22	Kota Cirebon	72,13	72,26	72,44
23	Kota Bekasi	74,89	75,01	75,19
24	Kota Depok	74,31	74,44	74,62
25	Kota Cimahi	73,89	74,03	74,21
26	Kota Tasikmalaya	71,93	72,15	72,34
27	Kota Banjar	70,79	70,99	71,19
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>72,85</b>	<b>73,04</b>	<b>73,23</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Pola spasial capaian UHH kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam. Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan

Kabupaten Majalengka termasuk kabupaten dengan capaian UHH paling rendah di banding kabupaten/kota lain (<71 tahun). Hal ini mengindikasikan pembangunan bidang kesehatan di keempat kabupaten tersebut perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya.

**Gambar 2.24**  
**Pola Spasial Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Tahun)**



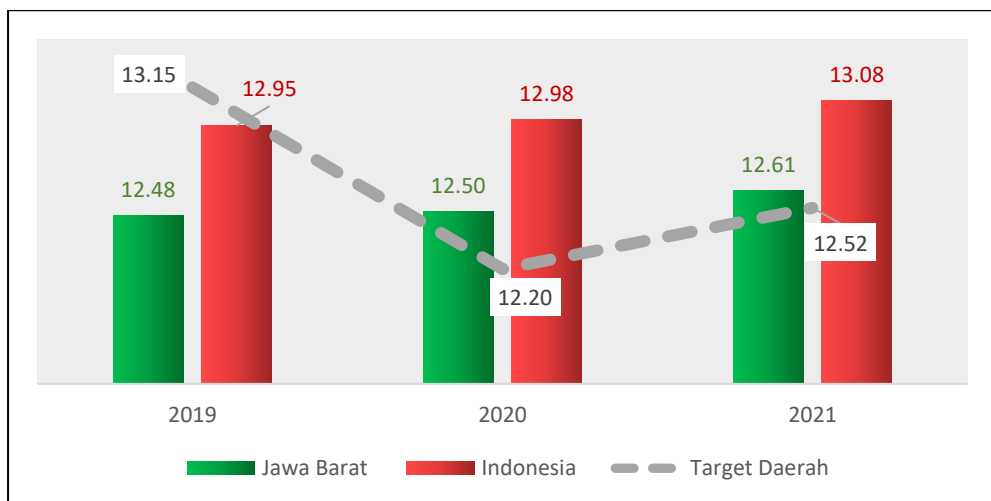
Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator *output* pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. HLS terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, rata-rata pertumbuhan HLS Jawa Barat sebesar 1,53 persen per tahun. Pada 2021, HLS Jawa Barat mencapai 12,61 tahun, yang berarti anak umur 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I (lihat Gambar 2.25).

Peningkatan HLS pada tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kelompok umur pendidikan yaitu 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun. Tabel 2.26 menunjukkan peningkatan tertinggi terjadi pada APS 13-15 tahun diikuti APS 19-24 tahun. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya APS 19-24 tahun yang capaiannya masih di bawah 25 persen. Padahal kelompok umur ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal tersebut dimungkinkan karena ketersediaan dan jumlah daya tampung perguruan tinggi yang lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan sekolah menengah atas. Selain itu, hal lain yang juga berpengaruh adalah tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.

**Gambar 2.25**  
**Target dan Capaian Harapan Lama Sekolah**  
**Tahun 2019-2021 (Tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda. 2022

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan di Bidang Pendidikan, selain HLS adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Tabel 2.26 menunjukkan capaian APS selama 3 (tiga) tahun terakhir, data menunjukkan APS pada kelompok 16-18 tahun yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan

masih perlu ditingkatkan. APS kelompok penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2021 mengindikasikan masih terdapat sekitar 32,20 persen kelompok penduduk di usia tersebut yang tidak mengakses fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau dengan kata lain tidak sedang bersekolah. Sementara angka APS penduduk usia 19-24 tahun yang masih rendah menjadi suatu ironi dibandingkan dengan banyaknya jumlah fasilitas pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.26**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,53	99,66	99,50
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	94,18	94,45	95,09
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun	67,29	67,74	67,80
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 tahun	22,71	22,84	23,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah dibanding lima provinsi lainnya (Tabel 2.27). Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan di lima provinsi tersebut lebih lama dibandingkan di Jawa Barat.

**Tabel 2.27**  
**Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2021 (Tahun)**

Provinsi	2020	2021	Rata-Rata
DKI Jakarta	12,98	13,07	<b>13,41</b>
<b>Jawa Barat</b>	<b>12,50</b>	<b>12,61</b>	
Jawa Tengah	12,70	12,77	
DI Yogyakarta	15,59	15,64	
Jawa Timur	13,19	13,36	
Banten	12,89	13,02	
<b>Indonesia</b>	<b>12,98</b>	<b>13,08</b>	--

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



Capaian HLS kabupaten/kota sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.28 menunjukkan angka yang bervariasi. Perbedaan HLS mengindikasikan adanya disparitas dalam mengakses fasilitas pendidikan antardaerah kabupaten/kota. Disparitas tersebut terlihat dari capaian HLS tertinggi sebesar 14,21 tahun di Kota Bandung dan terendah sebesar 11,71 tahun di Kabupaten Subang. Selisih 2,50 tahun menandakan perbedaan jumlah tahun (kesempatan) untuk menempuh pendidikan bagi penduduk usia 7 (tujuh) tahun.

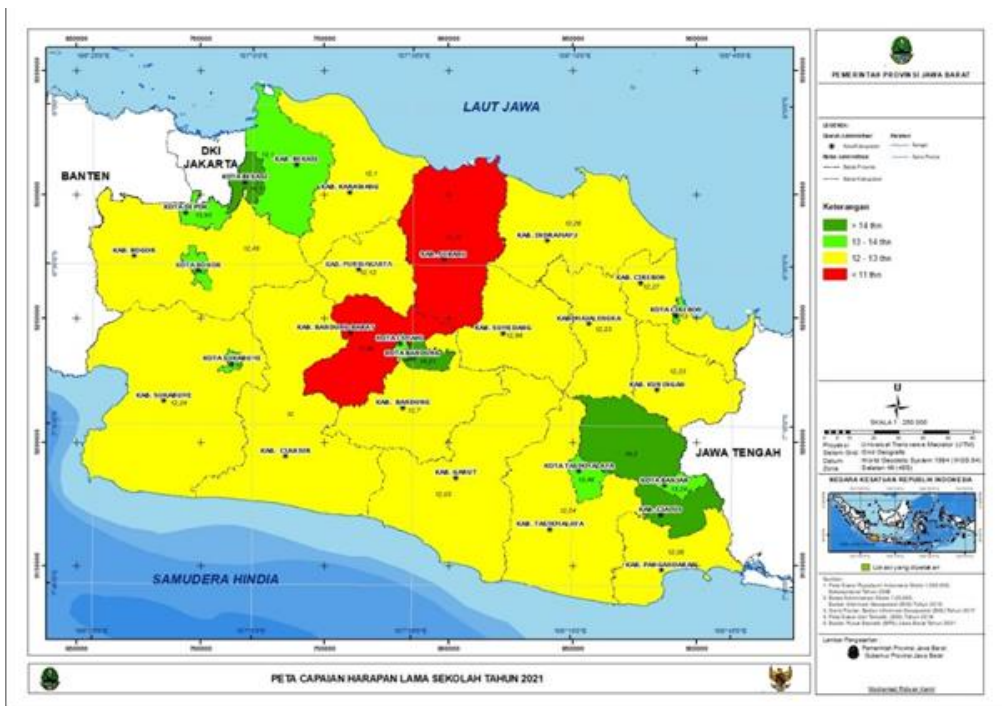
**Tabel 2.28**  
**Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021 (Tahun)**

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Bogor	12,47	12,48	12,49
2	Sukabumi	12,22	12,23	12,24
3	Cianjur	11,98	11,99	12,00
4	Bandung	12,68	12,69	12,70
5	Garut	11,82	11,91	12,03
6	Tasikmalaya	12,52	12,53	12,54
7	Ciamis	13,79	14,06	14,20
8	Kuningan	12,10	12,22	12,23
9	Cirebon	12,24	12,25	12,27
10	Majalengka	12,21	12,22	12,23
11	Sumedang	12,96	12,97	12,98
12	Indramayu	12,24	12,25	12,26
13	Subang	11,69	11,70	11,71
14	Purwakarta	12,10	12,11	12,12
15	Karawang	12,08	12,09	12,10
16	Bekasi	13,08	13,09	13,10
17	Bandung Barat	11,86	11,87	11,88
18	Pangandaran	12,06	12,07	12,08
19	Kota Bogor	13,40	13,41	13,42
20	Kota Sukabumi	13,46	13,47	13,58
21	Kota Bandung	14,19	14,20	14,21
22	Kota Cirebon	13,11	13,12	13,13
23	Kota Bekasi	13,99	14,00	14,10
24	Kota Depok	13,91	13,92	13,93
25	Kota Cimahi	13,79	13,80	13,81
26	Kota Tasikmalaya	13,44	13,45	13,46
27	Kota Banjar	13,22	13,23	13,24
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>12,48</b>	<b>12,50</b>	<b>12,61</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pola spasial capaian HLS kabupaten/kota (Gambar 2.26) memperlihatkan disparitas yang cukup tajam. Terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan HLS >13 tahun, 14 (empat belas) kabupaten/kota dengan capaian HLS antara 12-13 tahun, dan 2 (dua) kabupaten dengan capaian HLS < 12 tahun. Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah yang relatif tertinggal dibanding daerah lain dalam hal pembangunan bidang pendidikan. Sementara, Kabupaten Ciamis menjadi daerah kabupaten dengan capaian HLS tertinggi menyamai capaian HLS Kota Bandung dan Kota Bekasi.

**Gambar 2.26**  
**Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021 (tahun)**



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

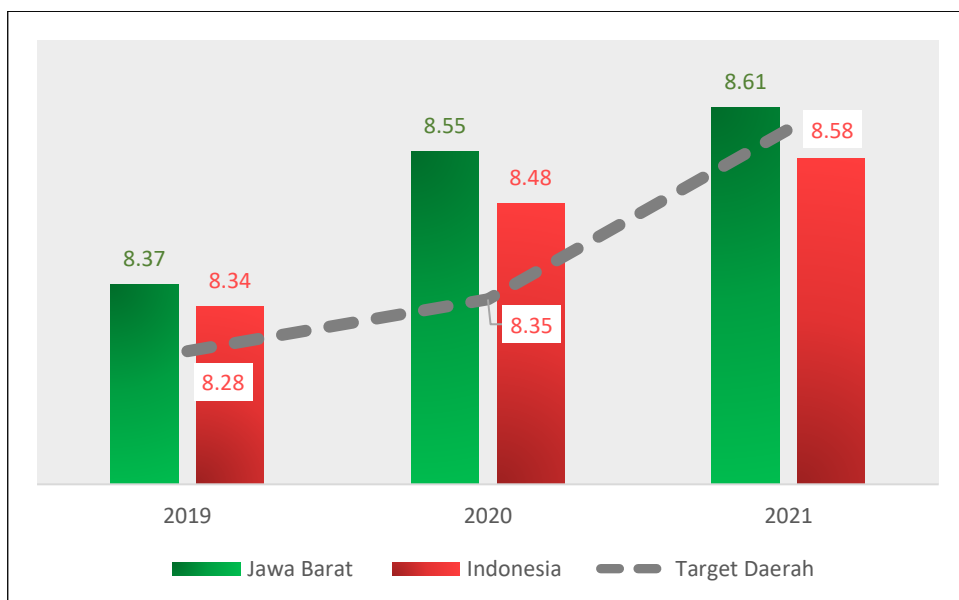
c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat tumbuh 1,46 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2021. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas

manusia Jawa Barat yang lebih baik. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,61 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas II). Secara alamiah, peningkatan RLS sangat dipengaruhi oleh peningkatan APS kelompok umur 19-24 tahun, terutama APS umur 24 tahun.

Terkait dengan hal ini, upaya peningkatan dimensi pendidikan difokuskan pada peningkatan APS kelompok 19-24 tahun karena dapat sekaligus meningkatkan indikator HLS dan RLS secara bersamaan dan kelompok 16-18 tahun. Hal ini mengingat APS di kedua kelompok tersebut masih sangat rendah dibandingkan rata-rata APS nasional, dimana APS kelompok 16-18 tahun diatas 72 persen dan kelompok 19-24 tahun diatas 25 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya kenaikan RLS terindikasi dari program/kegiatan untuk meningkatkan akses pendidikan yang hanya mengarah kepada kelompok usia sekolah belum mengarah kepada kelompok usia 25 tahun keatas. Untuk itu, perlu digencarkan program Kejar Paket di daerah yang RLS-nya relatif tertinggal dibanding daerah lain.

**Gambar 2.27**  
**Target dan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Tahun 2019-2021 (Tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda. 2022

Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan RLS meskipun melambat dibanding kondisi sebelum pandemi. Dibandingkan dengan dimensi lain penyusun IPM, RLS terkena dampak pandemi yang lebih panjang. Hal ini ditandai dengan rata-rata pertumbuhan RLS yang hanya sebesar 0,75 persen atau meningkat sebesar 0,06 tahun. Pertumbuhan tertinggi dialami Provinsi Jawa Timur sebesar 1,29 persen atau ekuivalen dengan peningkatan RLS sebesar 0,10 tahun dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2.29**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa**  
**Tahun 2020-2021 (Tahun)**

Provinsi	2020	2021	Rata-Rata
DKI Jakarta	11,13	11,17	9,00
<b>Jawa Barat</b>	<b>8,55</b>	<b>8,61</b>	
Jawa Tengah	7,69	7,75	
DI Yogyakarta	9,55	9,64	
Jawa Timur	7,78	7,88	
Banten	8,89	8,93	
<b>Indonesia</b>	<b>8,48</b>	<b>8,54</b>	--

Sumber: BPS, 2022

Tabel 2.30 merefleksikan disparitas pembangunan manusia dalam skala kabupaten/kota. Disparitas komponen RLS jauh lebih tinggi dibandingkan HLS. Capaian RLS tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Depok (11,46 tahun) dan terendah Kabupaten Indramayu (6,52 tahun). Tren ketimpangan RLS kedua wilayah ini berfluktuatif dan disparitas RLS di kedua wilayah tetap lebar, walaupun selisihnya menurun dari 4,98 poin di tahun 2020 menjadi 4,94 poin di tahun 2021.

**Tabel 2.30**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021 (Tahun)**

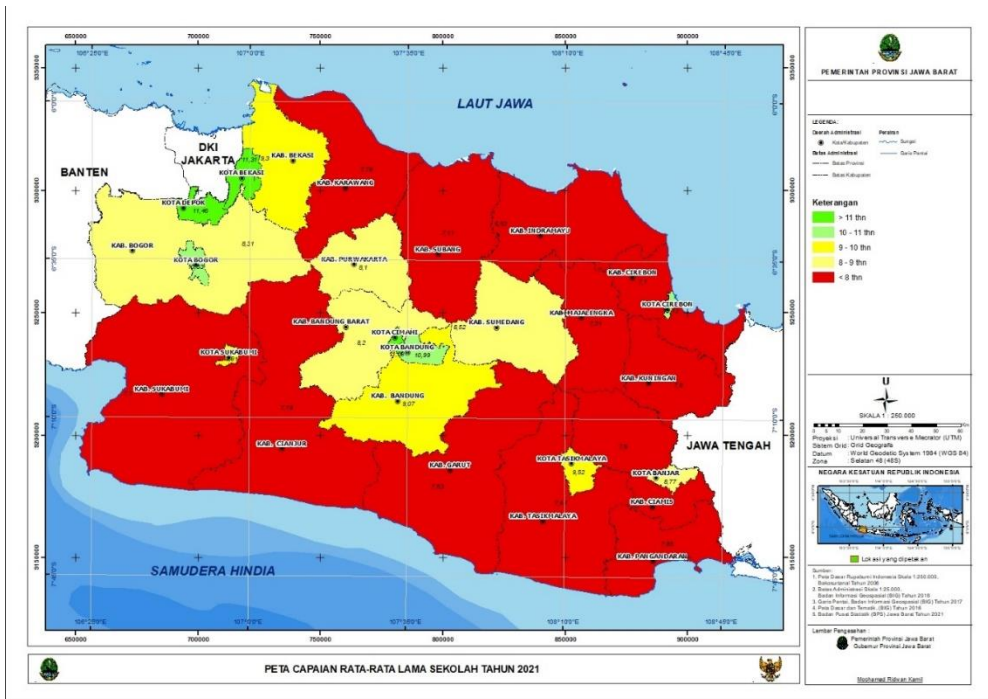
No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Bogor	8,29	8,30	8,31
2	Sukabumi	7,02	7,07	7,10

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
3	Cianjur	6,97	7,18	7,19
4	Bandung	8,79	8,96	9,07
5	Garut	7,51	7,52	7,53
6	Tasikmalaya	7,17	7,35	7,48
7	Ciamis	7,69	7,70	7,90
8	Kuningan	7,38	7,57	7,80
9	Cirebon	6,71	6,92	7,10
10	Majalengka	7,09	7,27	7,31
11	Sumedang	8,27	8,51	8,52
12	Indramayu	5,99	6,30	6,52
13	Subang	6,85	7,10	7,11
14	Purwakarta	7,92	8,09	8,10
15	Karawang	7,65	7,77	7,78
16	Bekasi	8,84	9,12	9,30
17	Bandung Barat	8,18	8,19	8,20
18	Pangandaran	7,67	7,74	7,85
19	Kota Bogor	10,32	10,33	10,53
20	Kota Sukabumi	9,58	9,59	9,81
21	Kota Bandung	10,74	10,75	10,99
22	Kota Cirebon	9,90	9,91	10,12
23	Kota Bekasi	11,10	11,16	11,31
24	Kota Depok	11,00	11,28	11,46
25	Kota Cimahi	10,95	10,96	11,08
26	Kota Tasikmalaya	9,13	9,33	9,52
27	Kota Banjar	8,62	8,63	8,77
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>8,37</b>	<b>8,55</b>	<b>8,61</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.28 memperlihatkan pola spasial capaian RLS kabupaten/kota pada tahun 2021. Terlihat jelas disparitas RLS antara wilayah tengah dengan wilayah utara dan selatan serta wilayah timur. Kabupaten/kota di wilayah tengah pada umumnya memiliki capaian RLS di atas 8 (delapan) tahun, sedangkan wilayah kabupaten yang terletak di bagian utara, selatan dan timur hampir seluruhnya memiliki capaian RLS dibawah 8 (delapan) tahun. Artinya secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah tersebut telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII.

**Gambar 2.28**  
**Pola Spasial Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Tahun)**



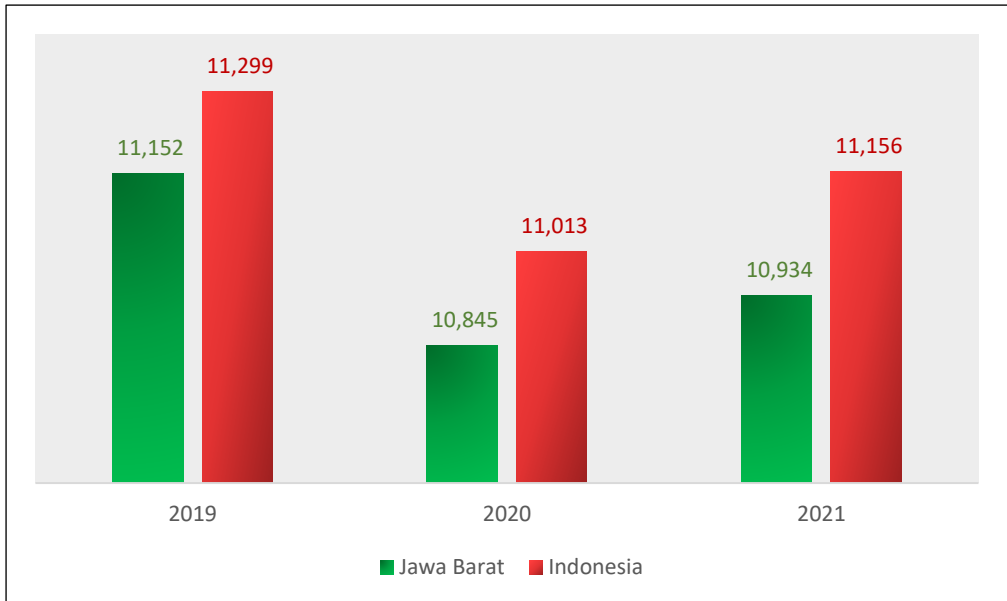
Sumber : BPS dan Bappeda. 2022

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PpK)

Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Selama periode sebelum pandemi (Tahun 2010-2019), indikator ini selalu tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,02 persen per tahun. Akan tetapi pada periode 2020-2021 turun menjadi 0,82 persen, meskipun secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp89.000. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi berkontraksi cukup dalam. Penurunan aktivitas perekonomian mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan yang berimbas pada penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya memicu kenaikan tingkat kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan miskin akibat guncangan ekonomi sehingga perlu menciptakan stabilitas

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, selain terus mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

**Gambar 2.29**  
**Capaian Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**  
**Tahun 2019-2021 (Rp.000)**



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda. 2022

Semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan pengeluaran per kapita meskipun laju pertumbuhannya belum setinggi kondisi sebelum pandemi COVID-19, seiring dengan perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan tertinggi dialami Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 1,61 persen atau ekuivalen dengan kenaikan sebesar Rp293.000,-. Sementara itu, pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar Rp89.000,-, ekuivalen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,82 persen. Dibandingkan dengan lima provinsi lainnya, pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat relatif kecil, hal ini mengingat besarnya populasi penduduk yang menjadi faktor pembagi angka perkapita.



**Tabel 2.31**  
**Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2020-2021 (Rp.000/kapita/tahun)**

Provinsi	2020	2021	Perubahan	Pertumbuhan (%)
DKI Jakarta	18.227	18.520	293	1,61
<b>Jawa Barat</b>	<b>10.845</b>	<b>10.934</b>	<b>89</b>	<b>0,82</b>
Jawa Tengah	10.930	11.034	104	0,95
DI Yogyakarta	14.015	14.111	96	0,68
Jawa Timur	11.601	11.707	106	0,91
Banten	11.964	12.033	69	0,58
<b>Indonesia</b>	<b>11.013</b>	<b>11.156</b>	<b>143</b>	<b>1,30</b>

Sumber: BPS. 2022

Pengeluaran per kapita merupakan komponen IPM yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Semua kabupaten/kota mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2020. Seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan pemulihan, 19 (sembilan belas) kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita dibanding tahun sebelumnya. Terkecuali, delapan kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita (Tabel 2.32). Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Indramayu sebesar Rp851.000,-, sementara penurunan nilai pengeluaran per kapita tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar Rp59.000,-. Kondisi ini menyebabkan selisih antara nilai pengeluaran per kapita yang tertinggi (Kota Bandung) dengan yang terendah (Kabupaten Tasikmalaya) semakin besar mencapai Rp9.167.000,- di tahun 2021.

**Tabel 2.32**  
**Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021 (Rp.000/kapita/tahun)**

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Bogor	10.683	10.317	10.410
2	Sukabumi	8.973	8.823	8.850
3	Cianjur	8.290	7.980	8.052
4	Bandung	10.502	10.201	10.307
5	Garut	8.099	7.876	7.961
6	Tasikmalaya	8.092	7.852	7.829
7	Ciamis	9.557	9.288	9.259

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
8	Kuningan	9.673	9.459	9.409
9	Cirebon	10.670	10.342	10.368
10	Majalengka	9.822	9.521	9.591
11	Sumedang	10.406	10.217	10.262
12	Indramayu	10.090	8.959	9.810
13	Subang	11.012	10.790	10.854
14	Purwakarta	11.819	11.614	11.669
15	Karawang	11.856	11.315	11.522
16	Bekasi	11.610	11.241	11.341
17	Bandung Barat	8.684	8.455	8.546
18	Pangandaran	9.423	9.084	9.065
19	Kota Bogor	11.825	11.564	11.716
20	Kota Sukabumi	11.204	10.999	10.942
21	Kota Bandung	17.254	16.887	16.996
22	Kota Cirebon	11.930	11.800	11.810
23	Kota Bekasi	16.157	15.776	15.903
24	Kota Depok	15.696	15.281	15.420
25	Kota Cimahi	12.448	12.025	12.019
26	Kota Tasikmalaya	10.414	10.263	10.213
27	Kota Banjar	10.705	10.535	10.476
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>11.152</b>	<b>10.845</b>	<b>10.934</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Gambar 2.30 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan untuk wilayah Jawa Barat bagian selatan masih berada pada kisaran kurang dari Rp9 juta per tahun. Berbeda dengan Jawa Barat bagian utara yang secara umum menunjukkan nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada kisaran Rp9 juta hingga Rp16 juta per tahun. Gambaran ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Jawa Barat bagian utara dengan Jawa Barat bagian selatan dalam hal ekonomi.

**Gambar 2.30**  
**Pola Spasial Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Rp.000/kapita/tahun)**



Sumber: Analisis Bappeda. 2022

### 2.1.2.7 Kemiskinan

#### a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kejadian luar biasa pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di awal tahun 2020 telah memberikan pesan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi (kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,52 persen). Guncangan ekonomi yang terjadi menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami kemunduran 5 (lima) tahun ke belakang, ditandai dengan jumlah penduduk miskin di masa pandemi hanya berselisih sedikit dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Gambar 2.31 menunjukkan kondisi kemiskinan sebelum pandemi dan di masa pandemi.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibanding nasional. Pada September 2021 selisih persentase penduduk miskin dengan nasional cukup tinggi mencapai 1,74

persen poin. Namun demikian, secara kuantitas menunjukkan jumlah penduduk miskin masih cukup besar ( $\pm$  4 juta orang). Data 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum pandemi, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 146,4 ribu orang per tahun, sementara dalam dua tahun masa pandemi, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 620 ribu orang. Hal ini menyiratkan perlunya upaya keras dalam penanggulangan kemiskinan di masa pandemi.

**Gambar 2.31**  
**Kemiskinan Jawa Barat dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2021 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Dibandingkan dengan target daerah, capaian persentase dan jumlah penduduk miskin di masa pandemi tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 (Tabel 2.33). Hal ini dipengaruhi oleh kinerja perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, dimana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,52 persen dan tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 3,74 persen belum mencapai rata-rata pertumbuhan di kisaran 5 – 6 persen (periode 2011-2019).

**Tabel 2.33**  
**Target Daerah Kemiskinan Tahun 2019-2021**

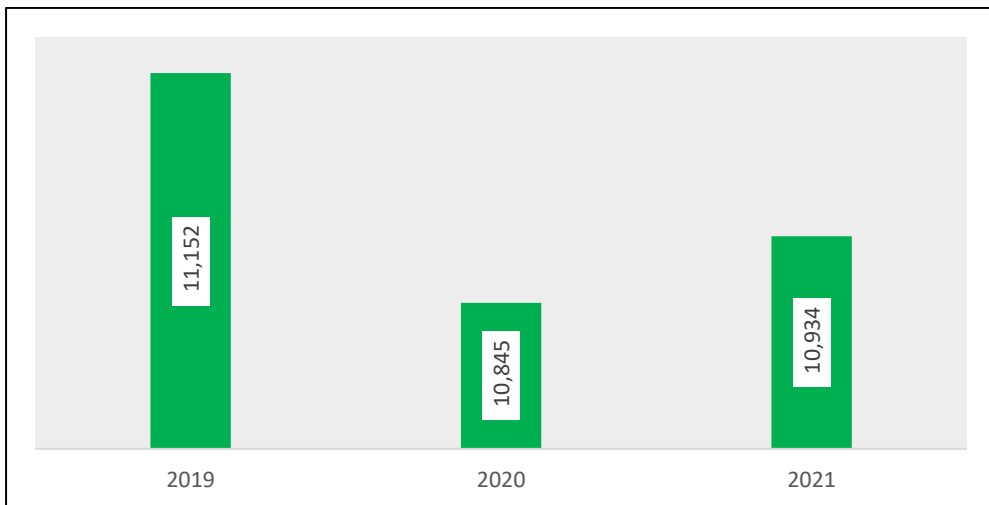
Target Daerah	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	6,90	6,31	7,97
Jumlah Penduduk Miskin	3.431.625	3.138.196	3.864.308

Sumber: Bappeda. 2022

Keterangan: Target 2021 mengacu pada Perubahan RPJMD

Secara umum, faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan meningkat selama pandemi COVID-19 lebih disebabkan oleh terkontraksinya pertumbuhan ekonomi hingga -2,52 persen yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita). Turunnya daya beli masyarakat tercermin dari indikator pengeluaran per kapita (lihat Gambar 2.32). Hal ini mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

**Gambar 2.32**  
**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tahun 2019-2021**  
**(Rp000/Kapita/Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Perkembangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Jawa pada periode tahun 2020-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.34. Dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat relatif rendah, meskipun belum

kembali ke kondisi sebelum pandemi. Secara umum, kondisi kemiskinan di semua provinsi mengalami perbaikan meskipun masih di masa pandemi, ditunjukkan dengan turunnya persentase penduduk miskin pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari upaya penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah, salah satunya dengan fokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

**Tabel 2.34**  
**Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2020-2021 (Persen)**

Provinsi	2019	2020	2021	Perubahan
DKI Jakarta	3,42	4,69	4,67	-0,02
<b>Jawa Barat</b>	<b>6,82</b>	<b>8,43</b>	<b>7,97</b>	<b>-0,46</b>
Jawa Tengah	10,58	11,84	11,25	-0,59
DI Yogyakarta	11,44	12,80	11,91	-0,89
Jawa Timur	10,20	11,46	10,59	-0,87
Banten	4,94	6,63	6,50	-0,13
<b>Indonesia</b>	<b>9,22</b>	<b>10,19</b>	<b>9,71</b>	<b>-0,48</b>

Sumber: BPS. 2022

Perkembangan tingkat kemiskinan di 27 kabupaten/kota pada periode tahun 2019-2021 (kondisi Maret) menunjukkan kenaikan persentase penduduk miskin (Tabel 2.35). Tingkat kemiskinan tahun 2021 mengalami peningkatan di semua kabupaten/kota. Pada tahun 2020, terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan menyentuh angka 2 (dua) digit (>10 persen), kemudian jumlahnya bertambah menjadi 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan >10 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Jawa Barat selama 2021 dibanding 2020. Data pengeluaran per kapita disesuaikan pada Tabel 2.35 mengkonfirmasi hal ini dimana nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2021 masih berada di bawah nilai sebelum pandemi tahun 2019.

**Tabel 2.35**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota**  
**Maret 2019-2021 (Persen)**

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Bogor	6,66	7,69	8,13
2	Sukabumi	6,22	7,09	7,70
3	Cianjur	9,15	10,36	11,18
4	Bandung	5,94	6,91	7,15
5	Garut	8,98	9,98	10,65
6	Tasikmalaya	9,12	10,34	11,15
7	Ciamis	6,65	7,62	7,97
8	Kuningan	11,41	12,82	13,10
9	Cirebon	9,94	11,24	12,30
10	Majalengka	10,06	11,43	12,33
11	Sumedang	9,05	10,26	10,71
12	Indramayu	11,11	12,70	13,04
13	Subang	8,12	9,31	10,03
14	Purwakarta	7,48	8,27	8,83
15	Karawang	7,39	8,26	8,95
16	Bekasi	4,01	4,82	5,21
17	Bandung Barat	9,38	10,49	11,30
18	Pangandaran	7,71	8,99	9,65
19	Kota Bogor	5,77	6,68	7,24
20	Kota Sukabumi	6,67	7,70	8,25
21	Kota Bandung	3,38	3,99	4,37
22	Kota Cirebon	8,41	9,52	10,03
23	Kota Bekasi	3,81	4,38	4,74
24	Kota Depok	2,07	2,45	2,58
25	Kota Cimahi	4,39	5,11	5,35
26	Kota Tasikmalaya	11,60	12,97	13,13
27	Kota Banjar	5,50	6,09	7,11
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>6,91</b>	<b>7,88</b>	<b>8,40</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Secara spasial, Gambar 2.33 memperlihatkan pola tingkat kemiskinan di kabupaten/kota. Sebaran penduduk miskin terkonsentrasi di kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian selatan dan utara (warna merah). Pola spasial memperlihatkan adanya diparitas tingkat kemiskinan yang cukup tajam antar kabupaten/kota. Hal ini disebabkan beberapa faktor,



diantaranya keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas; keterbatasan akses layanan dasar; ketidakberdayaan dari kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan; rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan rendahnya investasi yang masuk.

**Gambar 2.33**  
**Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Persen)**



Sumber: Analisis Bappeda. 2022

Data dan informasi beserta analisis yang diuraikan di atas, menggambarkan bahwa kemiskinan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Untuk itu, kemiskinan semestinya menjadi isu strategis yang dikedepankan pada tahun rencana 2023.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

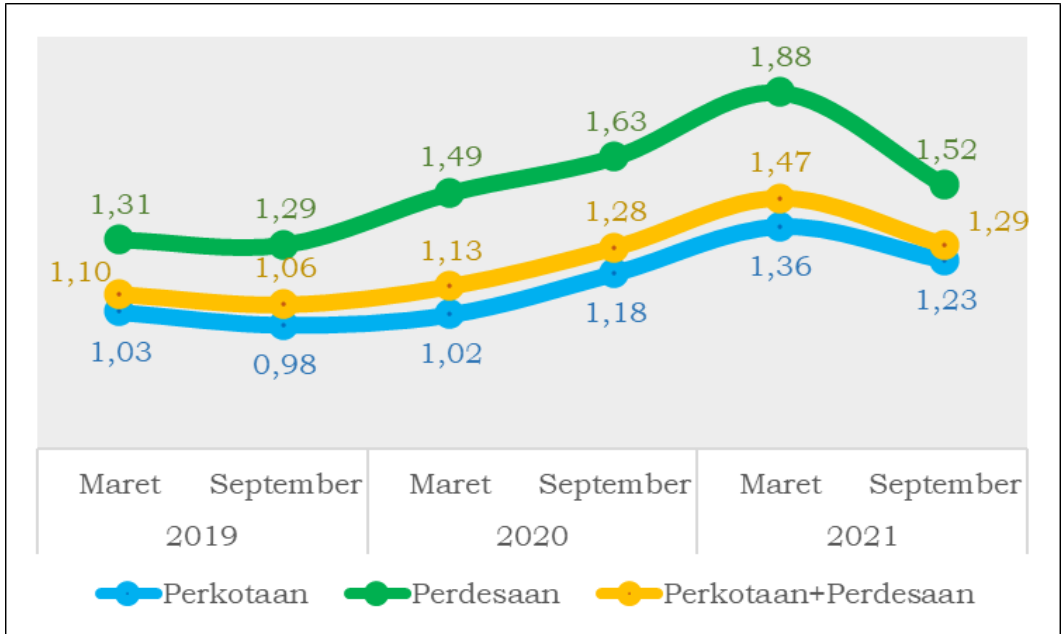
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk



miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Gambar 2.34 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021 mengalami lonjakan kenaikan dampak pandemi. Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran bahwa pada periode tersebut rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan semakin memburuk. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan, meskipun secara persentase penduduk miskin lebih rendah dibanding perkotaan. Kondisi ini memberikan pesan bahwa kelompok penduduk miskin di wilayah perdesaan mengalami tekanan yang lebih berat akibat menurunnya atau bahkan hilangnya pendapatan imbas dari guncangan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dengan fokus pada kelompok penduduk miskin ekstrem menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari indeks kedalaman kemiskinan pada September 2021 menurun cukup signifikan dibanding kondisi Maret 2021. Program perlindungan sosial yang menasar pada kelompok penduduk miskin ekstrem sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi kelompok penduduk miskin ekstrem di wilayah perdesaan dan perkotaan.

**Gambar 2.34**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luas terhadap kondisi kemiskinan di regional Pulau Jawa. Hampir semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada periode Maret 2020 hingga September 2021. Terkecuali, Jawa Timur yang mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan pada September 2021 dibanding Maret 2020. Hal ini mengindikasikan efektifitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur relatif lebih baik dibanding provinsi lain.

**Tabel 2.36**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021**

Provinsi	Maret 2020	Sept 2021	Maret 2020	Sept 2021	Perubahan (Maret 2020-Sept 2021)
DKI Jakarta	0,59	0,67	0,64	0,75	0,16
<b>Jawa Barat</b>	<b>1,13</b>	<b>1,28</b>	<b>1,47</b>	<b>1,29</b>	<b>0,16</b>
Jawa Tengah	1,72	1,84	1,91	1,94	0,22
DI Yogyakarta	1,94	2,08	2,42	2,06	0,12

Provinsi	Maret 2020	Sept 2021	Maret 2020	Sept 2021	Perubahan (Maret 2020-Sept 2021)
Jawa Timur	1,82	1,97	1,84	1,58	-0,24
Banten	0,99	1,14	1,09	1,20	0,21
<b>Indonesia</b>	<b>1,61</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>	<b>1,67</b>	<b>0,06</b>

Sumber : BPS. 2022

Dalam skala provinsi, indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota menunjukkan nilai yang bervariasi. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dialami Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (lihat Tabel 2.37). Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di 3 (tiga) kabupaten tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ketiga daerah tersebut semestinya menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.37**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota**  
**Maret 2019-2021**

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Bogor	0,83	0,83	1,36
2	Sukabumi	0,66	0,80	1,04
3	Cianjur	0,74	1,38	1,83
4	Bandung	1,04	0,92	1,23
5	Garut	0,87	0,97	1,40
6	Tasikmalaya	0,84	0,83	1,57
7	Ciamis	0,76	0,92	0,88
8	Kuningan	1,24	2,41	2,02
9	Cirebon	1,29	1,30	1,94
10	Majalengka	1,39	1,41	2,44
11	Sumedang	1,05	1,72	1,72
12	Indramayu	1,66	2,18	2,46
13	Subang	1,39	1,29	1,93
14	Purwakarta	1,24	1,04	1,31
15	Karawang	1,06	1,28	1,27

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
16	Bekasi	0,60	0,72	0,91
17	Bandung Barat	1,54	1,40	1,62
18	Pangandaran	0,90	1,32	1,25
19	Kota Bogor	0,72	1,08	1,10
20	Kota Sukabumi	1,39	1,17	1,08
21	Kota Bandung	0,78	0,61	0,53
22	Kota Cirebon	2,22	1,68	1,23
23	Kota Bekasi	0,66	0,60	0,47
24	Kota Depok	0,34	0,29	0,24
25	Kota Cimahi	0,93	0,75	0,60
26	Kota Tasikmalaya	2,42	1,75	1,98
27	Kota Banjar	1,19	0,70	0,57
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>1,09</b>	<b>1,13</b>	<b>1,47</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Gambar 2.35 memperlihatkan pola spasial indeks kedalaman kemiskinan September 2021. Pola tersebut memberikan gambaran skala prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan warna merah dan kuning memerlukan upaya yang lebih keras untuk akselerasi penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang dimaknai dengan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, tentu saja akan memudahkan intervensi terhadap kelompok penduduk miskin agar dapat keluar dari zona kemiskinan (pengeluaran diatas garis kemiskinan) melalui konvergensi program-program penanggulangan kemiskinan.

**Gambar 2.35**  
**Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota**  
**September 2021**



Sumber: Bappeda. 2022

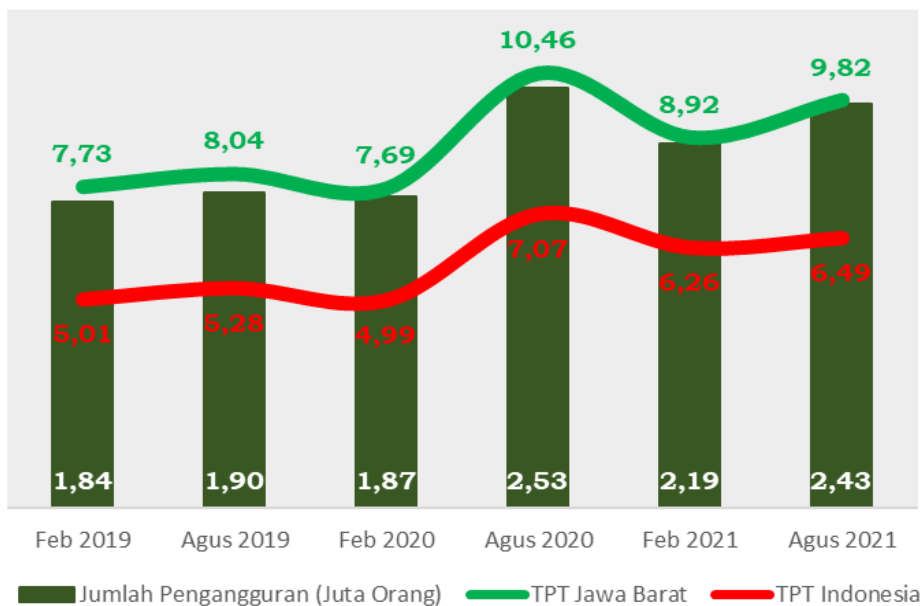
### 2.1.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei BPS, terdapat 4 (empat) kategori penduduk yang terdampak COVID-19 dari sudut pandang ketenagakerjaan, yaitu pengangguran karena COVID-19; Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau mereka yang memilih aktivitas lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak mencari pekerjaan karena pandemi COVID-19; penduduk yang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Penduduk yang sementara berhenti bekerja dan yang mengalami pengurangan jam kerja merupakan dampak pandemi

COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang pada Agustus tahun 2020 masih bekerja, sedangkan penganggur dan mereka yang berubah status menjadi BAK merupakan penduduk yang terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan mereka berhenti bekerja.

Pada tahun 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Jawa Barat. Gambar 2.36 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat dan Indonesia pada periode tahun sebelum pandemi dan di masa pandemi. Terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat selalu lebih tinggi dibanding nasional dengan selisih yang semakin membesar pada Agustus 2021 mencapai 3,33 persen poin. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja.

**Gambar 2.36**  
**Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS. 2022

Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat menurun dibanding kondisi Agustus 2020.



Dibandingkan dengan target daerah, TPT pada Agustus 2021 lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Demikian halnya dengan jumlah pengangguran, dimana realisasi jumlah pengangguran pada Agustus 2021 lebih kecil dibanding target daerah (lihat Tabel 2.38). Artinya realisasi serapan tenaga kerja lebih besar dibanding target daerah.

**Tabel 2.38**  
**Target Daerah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Tahun 2019-2021**

Target Daerah	2019	2020	2021*
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	8,0 - 7,9	7,9 - 7,7	10,45
Jumlah Pengangguran (Orang)	1.811.506 - 1.788.862	1.788.862 - 1.743.574	2.585.896

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2022

Keterangan: \*Target Daerah berdasarkan Perubahan RPJMD

Pada skala regional Pulau Jawa, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2021 merupakan yang tertinggi dibanding lima provinsi lain. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat ke depan. Dinamika ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat berbeda dengan provinsi lain, jumlah penduduk yang banyak tentu saja mempengaruhi laju pertumbuhan angkatan kerja.

**Tabel 2.39**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2021 (Persen)**

Provinsi	2019	2020	2021	Rata-rata 2021
DKI Jakarta	6,54	10,95	8,50	7,26
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	
DI Yogyakarta	3,18	4,57	4,56	
Banten	8,11	10,64	8,98	
<b>Jawa Barat</b>	<b>8,04</b>	<b>10,46</b>	<b>9,82</b>	
Indonesia	5,23	7,07	6,49	--

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2021

Pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ketenagakerjaan di 27 kabupaten/kota. Tabel 2.40 memperlihatkan dampak pandemi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota. Pada tahun 2020, terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen) dan di tahun 2021 masih terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota. Tingginya angka pengangguran mengindikasikan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibanding penciptaan lapangan kerja, karakteristik sektor industri yang cenderung padat modal menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang semakin kecil, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta dunia kerja, ketidakstabilan perekonomian, dan rendahnya wirausaha.

**Tabel 2.40**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021 (Persen)**

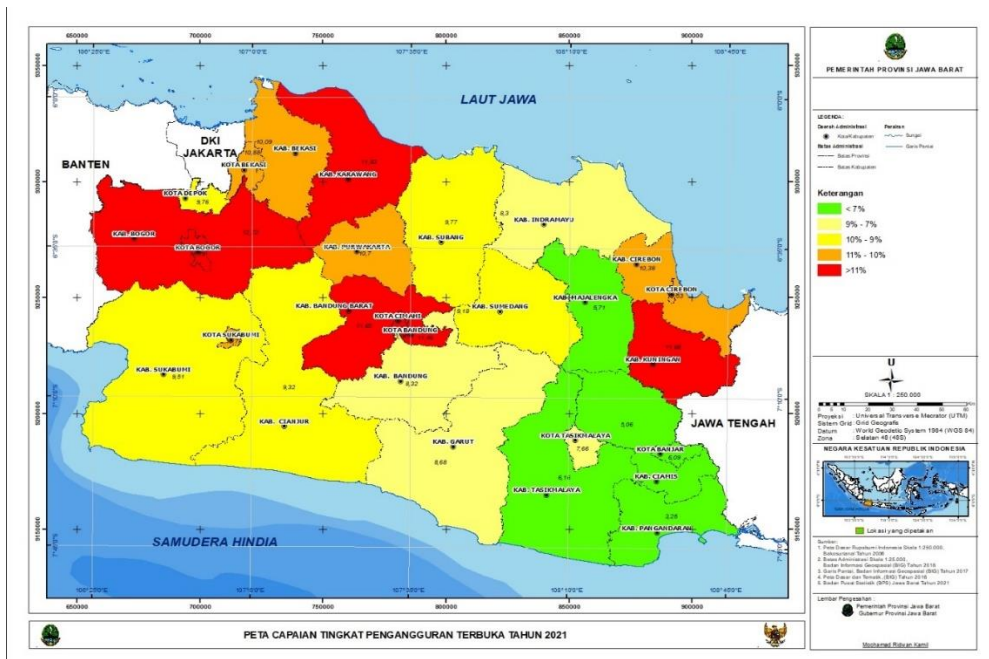
No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Bogor	9,11	14,29	12,22
2	Sukabumi	8,05	9,60	9,51
3	Cianjur	9,81	11,05	9,32
4	Bandung	5,51	8,58	8,32
5	Garut	7,35	8,95	8,68
6	Tasikmalaya	6,31	7,12	6,16
7	Ciamis	5,16	5,66	5,06
8	Kuningan	9,68	11,22	11,68
9	Cirebon	10,35	11,52	10,38
10	Majalengka	4,37	5,84	5,71
11	Sumedang	7,70	9,89	9,18
12	Indramayu	8,35	9,21	8,30
13	Subang	8,68	9,48	9,77
14	Purwakarta	9,73	11,07	10,70
15	Karawang	9,68	11,52	11,83
16	Bekasi	9,00	11,54	10,09
17	Bandung Barat	8,24	12,25	11,65
18	Pangandaran	4,52	5,08	3,25
19	Kota Bogor	9,16	12,68	11,79
20	Kota Sukabumi	8,49	12,17	10,78
21	Kota Bandung	8,18	11,19	11,46

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
22	Kota Cirebon	9,04	10,97	10,53
23	Kota Bekasi	8,30	10,68	10,88
24	Kota Depok	6,12	9,87	9,76
25	Kota Cimahi	8,09	13,30	13,07
26	Kota Tasikmalaya	6,78	7,99	7,66
27	Kota Banjar	6,16	6,73	6,09
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>8,04</b>	<b>10,46</b>	<b>9,82</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Pola spasial tingkat pengangguran terbuka memperlihatkan kabupaten/kota dengan angka pengangguran yang tinggi (>10 persen) umumnya adalah kabupaten/kota dengan basis perekonomian sektor industri pengolahan dan perdagangan (Gambar 2.37). Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang paling terdampak di masa pandemi COVID-19 dilihat dari banyaknya pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara dan permanen serta pengurangan jam kerja.

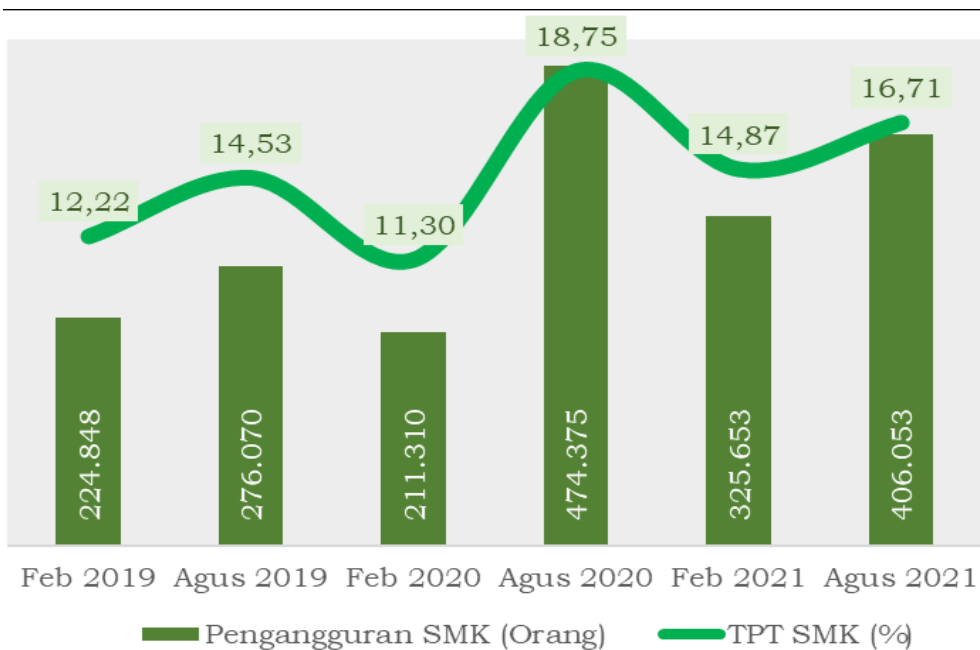
**Gambar 2.37**  
**Pola Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota  
Tahun 2021 (Persen)**



Sumber: Analisis Bappeda. 2022

Masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat dapat dilihat dari tingkat pendidikan angkatan kerja. Gambar 2.38 menunjukkan angka pengangguran menurut tingkat pendidikan SMK. Dilihat dari pola tingkat pengangguran terbuka pada Februari dan Agustus, tingkat pengangguran pada Agustus selalu lebih tinggi dibanding Februari. Hal ini disebabkan mereka yang lulus SMK pada bulan Juli baru masuk pasar kerja. Informasi lain yang didapat dari gambar tersebut adalah dampak pandemi yang menyebabkan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan SMK meningkat cukup signifikan. Pada Agustus 2020, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 198.305 orang (73,81 persen) dan tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,22 poin dibanding Agustus 2019. Hal ini terkonfirmasi dari hasil kajian lembaga riset SMERU menyatakan bahwa pekerja yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah mereka yang lulusan SMK dan bekerja di perkotaan.

**Gambar 2.38**  
**Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan SMK Tahun 2019-2021**



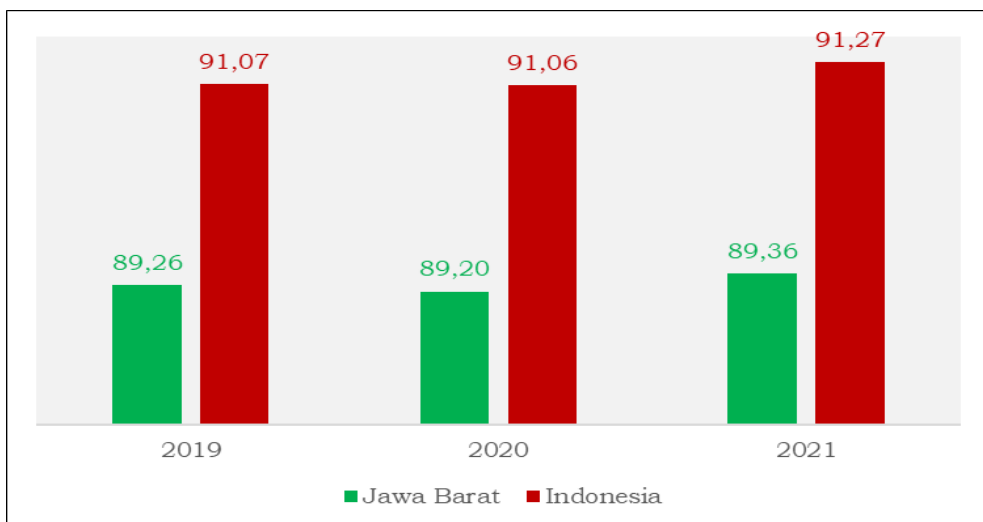
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

### 2.1.2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator indeks pembangunan gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Gambar 2.39 menunjukkan capaian IPG Jawa Barat lebih rendah dibanding Indonesia. Artinya pembangunan manusia secara gender di tingkat nasional lebih merata dibanding di Jawa Barat.

**Gambar 2.39**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS, 2022

Capaian IPG di tingkat kabupaten/kota memperlihatkan angka yang bervariasi. Perbedaan capaian IPG menandakan adanya disparitas pembangunan kualitas sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan antar kabupaten/kota. Secara keseluruhan, pada tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota dengan capaian IPG di bawah provinsi. Tiga kabupaten terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon. Sementara itu, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon merupakan 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki IPG tertinggi. Hal ini mengindikasikan pembangunan yang berkesetaraan gender semakin menunjukkan keberhasilannya.

**Tabel 2.41**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021**

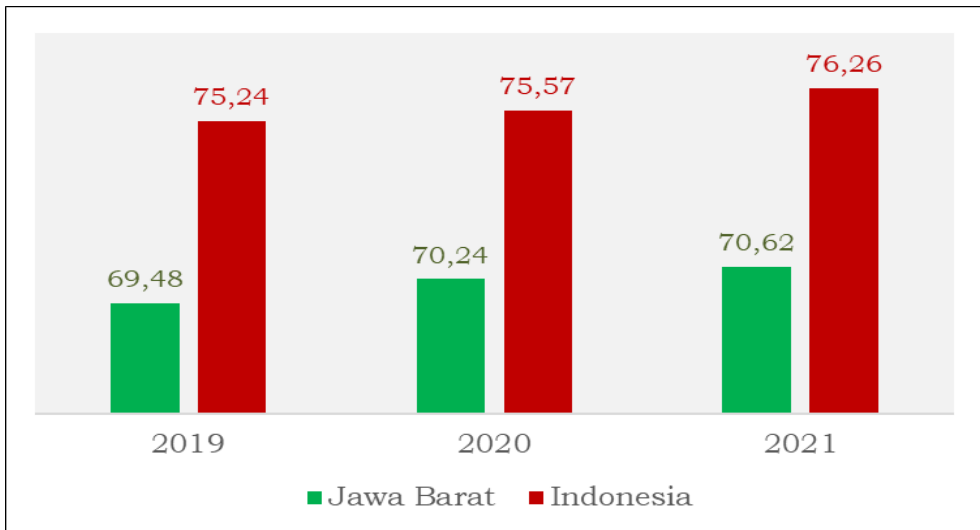
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Bogor	89,39	89,23	89,40
Sukabumi	87,43	87,37	87,44
Cianjur	84,36	84,14	84,30
Bandung	93,96	93,95	93,85
Garut	82,54	82,29	82,13
Tasikmalaya	86,05	86,02	86,36
Ciamis	86,49	86,61	86,55
Kuningan	86,92	86,81	86,97
Cirebon	83,50	83,47	83,49
Majalengka	85,76	85,91	86,24
Sumedang	95,01	95,18	95,18
Indramayu	88,35	88,15	87,92
Subang	90,58	90,53	90,51
Purwakarta	86,78	86,56	86,70
Karawang	90,33	90,12	90,29
Bekasi	88,68	88,58	88,88
Bandung Barat	79,29	79,06	79,07
Pangandaran	90,02	89,78	89,92
Kota Bogor	91,11	91,02	90,87
Kota Sukabumi	91,44	91,36	91,58
Kota Bandung	94,82	94,68	94,72

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Cirebon	94,35	94,39	94,46
Kota Bekasi	93,02	92,95	93,09
Kota Depok	92,78	93,01	92,96
Kota Cimahi	92,20	92,01	91,95
Kota Tasikmalaya	91,48	91,64	91,74
Kota Banjar	87,12	87,17	87,01
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>89,26</b>	<b>89,20</b>	<b>89,36</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender adalah indeks pemberdayaan gender (IDG). Gambar 2.40 memperlihatkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2019-2021) IDG Jawa Barat masih berada di bawah IDG nasional. Namun demikian, angka IDG menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Peningkatan IDG ini lebih disebabkan meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional disertai dengan meningkatnya persentase perempuan dalam hal sumbangan pendapatan dan keterlibatan di parlemen.

**Gambar 2.40**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS. 2022

Secara keseluruhan, capaian IDG kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih rendah (lihat Tabel 2.42). Pada tahun 2021, terdapat lima belas kabupaten/kota dengan IDG lebih



rendah dibanding provinsi. Hal ini menandakan peran perempuan dalam hal ekonomi dan politik masih rendah. Idealnya peningkatan IPG disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender (IDG). Dalam periode tahun 2019-2021, IDG di 27 kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang positif ditandai dengan meningkatnya capaian IDG di semua kabupaten/kota.

**Tabel 2.42**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Bogor	55,73	55,76	55,86
Sukabumi	60,70	55,86	57,45
Cianjur	60,32	58,59	59,70
Bandung	65,86	67,07	68,68
Garut	68,23	71,91	64,87
Tasikmalaya	64,30	64,13	63,79
Ciamis	65,35	66,43	63,65
Kuningan	70,58	70,54	73,04
Cirebon	75,61	72,07	72,52
Majalengka	58,90	60,06	60,04
Sumedang	70,94	70,78	70,13
Indramayu	70,10	70,45	70,93
Subang	68,83	68,75	70,77
Purwakarta	74,39	73,94	76,88
Karawang	74,80	74,42	74,83
Bekasi	60,83	62,46	65,24
Bandung Barat	64,53	65,40	65,83
Pangandaran	74,56	74,57	75,98
Kota Bogor	68,91	69,03	72,33
Kota Sukabumi	66,82	66,93	66,81
Kota Bandung	70,38	70,49	70,81
Kota Cirebon	77,86	78,09	77,64
Kota Bekasi	66,10	65,75	66,57
Kota Depok	74,82	76,31	76,53
Kota Cimahi	74,14	75,13	74,07
Kota Tasikmalaya	59,32	59,51	59,59
Kota Banjar	49,53	50,56	54,32
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>69,48</b>	<b>70,24</b>	<b>70,62</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

##### 2.1.3.1.1 Pendidikan

Bidang Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada Perubahan RPJMD periode Tahun 2018-2023. Ukuran keberhasilan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun kondisi saat ini, menunjukkan bahwa sebaran jumlah sekolah di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat belum merata. Sampai Bulan Mei Tahun 2022 masih Terdapat 18 (delapan belas) kecamatan yang tidak memiliki sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta yang tersebar di 6 Kabupaten dari total keseluruhan kecamatan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 627 kecamatan. Kecamatan yang tidak memiliki sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta tersebut, sebagian besar berada di Kabupaten Kuningan dengan jumlah kecamatan yang tidak memiliki sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

**Tabel 2.43**  
**Kecamatan di Provinsi Jawa Barat yang Tidak Memiliki Sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta**

Kabupaten	Kecamatan
Kabupaten Sukabumi	Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Ganeas
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatigede
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cisitu
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cisarua
Kabupaten Garut	Kecamatan Pangatikan
Kabupaten Ciamis	Kecamatan Tambaksari
Kabupaten Ciamis	Kecamatan Sukamantri
Kabupaten Ciamis	Kecamatan Banjaranyar
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cipicung
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kalimanggis
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Karangkencana
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Nusaherang
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilebak
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Hantara



Kabupaten	Kecamatan
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cimahi
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibeureum
Kabupaten Purwakarta	Kecamatan Pondok Salam

Sumber: DAPODIK, Mei 2022

Disamping itu, Indikator kinerja urusan pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Beberapa indikator yang mengalami peningkatan diantaranya APK SMP/MTs, APK SMA/SMK/MA, APM SMP/MTs, APM SMA/SMK/MA, Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C, Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), SMA/SMK Sederajat Akreditasi A, Kualifikasi S2 Guru SMK, dan Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Sementara itu, indikator lainnya mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Indeks	N/A	3,22	3,61	IKU
APM SMA, SMK dan SLB	Persen	68,44	66,77	83,58	IKU
Nilai Mutu Pendidikan 16/01/2021					
SMA	Nilai	6,56	N/A	-	IKU
SMK	Nilai	6,5	N/A	-	
SLB	Nilai	4,23	N/A	-	
APK SD/MI	Persen	104,45	104,46	101,18	
APK SMP/MTs	Persen	99,37	99,61	99,65	
APK SMA/SMK/MA	Persen	77,82	90,94	94,82	
APM SD/MI	Persen	94,42	96,75	95,00	
APM SMP/MTs	Persen	78,17	76,73	77,46	
APM SMA/SMK/MA	Persen	57,53	66,77	83,58	
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia	Persen	67,29	67,29 (BA FSDI)	67,80	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
16-18 Tahun			67,74 (PPM)		
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C	Persen	77,82	90,94	94,82	
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C	Persen	57,53	66,77	83,58	
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Rasio	19	19	18	
Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	0,3	SMA: 0,22 SMK: 0,38	SMA: 0,16 SMK: 0,15	
Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	98,78	SMA: 99,27 SMK: 98,29	SMA: 99,96 SMK: 99,89	
SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	Persen	43,64	SMA: 56,07 SMK: 33,28	SMA: 62,44 SMK: 27,98	
Kualifikasi S2 Guru SMA	Persen	13,7	13,74	13,52	
Kualifikasi S2 Guru SMK	Persen	6,69	7,60	8,76	
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK	Buah	194	RKB: 93 RPS: 135	RKB: 35 RPS: 82	
Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	Persen	58,97	58,97	N/A	
Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Niali	3,20	3,22	3,61	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022  
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun, 2022

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan pendidikan dari Tahun 2019-2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan angka capaian. Namun pada indikator Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SLB terjadi peningkatan capaian yang cukup signifikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi awal, dimana terjadi peningkatan sebesar 15,14 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai program bantuan yang diberikan pada jenjang SMA/SMK/SLB, baik negeri maupun swasta, serta bantuan lainnya yang dikhususkan bagi keluarga tidak mampu.

### 2.1.3.1.2 Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan, Rasio Kematian Bayi, dan Jumlah Kasus Kematian Ibu. Rasio Kematian Bayi menunjukkan tren yang positif, dimana Rasio Kematian Bayi pada tahun 2021 menjadi 3,39 persen dari 3,18 persen pada tahun 2020 dan Jumlah Kasus Kematian Ibu mengalami kenaikan menjadi 1.204 kasus pada tahun 2021.

Indikator yang mengalami penurunan pada Tahun 2019-2021 adalah Rasio Kematian Bayi. Sedangkan indikator yang mengalami kecenderungan peningkatan pada Tahun 2019-2021 adalah Rasio Puskesmas/ per satuan penduduk, Persentase penduduk menggunakan jamban sehat, Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi, Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi, Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, dan Prevalensi Hipertensi. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,85	73,04	73,23	IKU
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT **	Poin	N/A	N/A	81,99	IKU
Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	RS Terakreditasi	2	N/A	3	IKU
Prevalensi Stunting	Persen	26,21	26,21	24,50	IKU
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	86	86,67	86,87	IKU
Rasio Kematian Bayi	Per 1000	3,26	3,18	3,39	
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	684	745	1.204	
Rasio Kematian Ibu	Per 100.000 KH	78,3	85,77	149,21	
Rasio Puskesmas/ per satuan penduduk	Rasio	45.328	45.687	44.482	
Persentase Rumah	Persen	60,40	60,70	59,20	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)					
Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	99,90	99,30	100	
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	72,39	82,49	85,90	
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	96,71	94,9	98,62	
Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	66,64	73	80	
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	1.028	1.028	1.028	
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	320	322	322	
Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	94,33	92,12	91,77	
Persentase penduduk dengan jaminan Kesehatan	Persen	84,46	85,51	84,56	
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB ( <i>Treatment Success Rate</i> )	Persen	67	73,16	82	
Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI (Universal Child Immunitation) >90%	Persen	93,80	44,80	71	
Prevalensi Hipertensi	Persen	39,60	39,60	39,60	
Persentase Kabupaten/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	100	100	100	

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2022  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, diolah

Keterangan : \* Indikator dihapus

\*\* Indikator Baru

\*\* N/A 2020 mencerminkan indikator tidak dilaksanakan akibat COVID-19

Ratio Kematian Bayi meningkat 0,3 persen dari tahun 2020 tetapi targetnya masih tercapai dari target 2021 sebesar 4,8/1000 KH, kenaikan rasio kematian bayi tersebut disebabkan oleh keterlambatan merujuk dan sampai ketempat rujukan serta

keterlambatan penanganan ditempat rujukan. Ratio Kematian Ibu naik sekitar 40 persen hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga masih banyak fasyankes yang tidak melakukan akselerasi. Capaian Persentase penduduk dengan jaminan Kesehatan mengalami penurunan dari tahun 2020 hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak penduduk yang tidak mampu membayar jaminan Kesehatan.

Dalam upaya menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir selama 3 (tiga) tahun dengan varian yang terus berkembang, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya pencegahan. Penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Menginjak awal tahun 2022, jumlah kasus konfirmasi harian COVID-19 semakin turun, dimana 61,29 persen kasus konfirmasi berasal dari wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) dan 23,39 persen dari Bandung Raya. Untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada periode awal tahun 2022 yaitu 9 (sembilan) kabupaten/kota berada pada level 1 (satu) dan 18 (delapan belas) kabupaten/kota berada pada level 2 (dua). Artinya, secara keseluruhan penanganan COVID-19 di Jawa Barat dapat dikatakan baik.

Hal ini diperkuat dengan progres vaksinasi COVID-19 yang mencapai 96,40 persen dari total distribusi 75.815.337 dosis terealisasi sebanyak 73.085.862 dosis vaksin, dengan capaian vaksin untuk masyarakat umum mencapai 94,56 persen untuk dosis ke-1 dan 80,11 persen untuk dosis ke-2. Untuk Lansia, mencapai 92,70 persen untuk dosis ke-1 dan dosis ke-2 mencapai 76,99 persen. Ketercapaian vaksin pada kelompok anak-anak untuk dosis ke-1 mencapai 94,42 persen dan dosis ke-2 mencapai 77,18 persen. Tingginya pencapaian vaksinasi sangat mempengaruhi kondisi *herd immunity* di masyarakat, dimana ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kecepatan vaksinasi tertinggi di Indonesia.

Sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, tahun 2023



adalah “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Dalam mencapai kemandirian di sektor kesehatan, dalam Reformasi Sistem Kesehatan Daerah dilaksanakan melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui kolaborasi dan kemitraan. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat melalui puskesmas melalui penguatan kapasitas, kualitas SDM Kesehatan dan penguatan melalui program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) sedangkan untuk penguatan layanan dasar di Rumah Sakit melalui kajian pengembangan Rumah Sakit Rujukan pusat infeksi Provinsi Jawa Barat sebagai upaya kesiapsiagaan serta mitigasi bencana non alam seperti COVID-19. Dalam memenuhi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan keuangan berupa pemberian bantuan iuran kepada peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional serta menganggarkan jaminan Kesehatan masyarakat pada UPTD Khusus Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak *stunting* juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, *stunting* dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. *Stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan produktivitas kerja pasar yang mengakibatkan hilangnya 11 persen *Gross Domestic Product* (GDP), mengurangi pendapatan bekerja dewasa hingga 20 persen, dan melebarnya kesenjangan sehingga mengurangi 10 persen total pendapatan seumur hidup. Maka kemiskinan antar-generasi akan terjadi terus menerus jika *stunting* tidak segera ditangani (100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)).

Berdasarkan kerangka penyebab masalah gizi “*The Conceptual Framework of the Determinants Child Undernutrition*” dan “*The Underlying Drivers of Malnutrition*”, Pencegahan *stunting*

dititikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi yang langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung mencakup masalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi. Sementara, penyebab tidak langsung mencakup ketahanan pangan (akses pangan bergizi), lingkungan sosial (pemberian makan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (akses air bersih, air minum, dan sarana sanitasi).

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi *stunting* balita di Jawa Barat masih relatif tinggi yaitu sebesar 24,5 persen. Dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 24,4 persen. Kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat tingkat tinggi menurut WHO (2010) karena menetapkan ambang batas untuk *stunting* adalah 20 persen. Dalam upaya penanganan *stunting* Provinsi Jawa Barat mempunyai program “*Jabar Zero New Stunting*” dengan target prevalensi *stunting* sebesar 19,2 persen di tahun 2023 dan menjadi pendorong untuk mencapai target nasional diangka 14 persen di tahun 2024 hal tersebut diupayakan melalui penguatan 8 (delapan) aksi konvergensi dan membuka peluang kemitraan dengan berbagai *stakeholder*.

#### **2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator, antara lain Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Air Minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar.

Sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 Tanggal 31 April 2015, panjang jaringan jalan nasional adalah 1.789,200 km dan panjang jaringan jalan provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek Tanggal 4 November 2016 adalah 2.360,580 km. Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa



Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tanggal 23 Desember 2016 panjang jaringan jalan kabupaten/kota adalah 43.570,184 km. Tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan penurunan dari tahun 2019 sebesar 91,90 persen menjadi 81,54 persen di tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 82,15 persen hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Negara Indonesia sehingga terjadi pengalihan anggaran untuk menanggulangi wabah tersebut, sehingga capaian terkoreksi sekitar 10 persen, namun pada tahun 2021 dengan adanya pendanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah sisi keuangan berangsur membaik sehingga capaian kemantapan jalan meningkat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi, yang menjadi kewenangan provinsi. Karena jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi, tetapi karena banyaknya terjadi bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi, umur bangunan jaringan irigasi sudah melewati umur konstruksi, sehingga menyebabkan kondisi baik jaringan irigasi mengalami penurunan dari 69,53 persen di tahun 2019 menjadi 52,05 persen di tahun 2020, dan menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 52,83 persen.

Infrastruktur dasar Permukiman yakni Air Minum, Air Limbah Domestik (sanitasi), Persampahan dan Drainase permukiman tetap menjadi fokus pembangunan di Jawa Barat dan terus ditingkatkan kinerjanya yang tercermin dalam perubahan angka capaian indikator tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020, dilakukan perubahan nomenklatur dan perhitungan target lingkup infrastruktur dasar permukiman khususnya Air Minum, Air Limbah Domestik (Sanitasi) dan Persampahan yang menyesuaikan dengan arahan RPJMN Tahun 2020-2024 dan telah diinternalisasikan kedalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Penyesuaian perlu dilakukan mengingat bahwa urusan infrastruktur dasar permukiman tersebut bersifat konkuren dimana target nasional merupakan agregat dari target

seluruh provinsi, sedangkan target provinsi merupakan agregat dari target seluruh kabupaten/kota. Demikian juga capaian nasional merupakan agregat dari capaian seluruh provinsi, sedangkan capaian provinsi merupakan agregat dari capaian seluruh kab/kota. Penerapan indikator kinerja infrastruktur dasar permukiman dimulai pada tahun 2021 dimana pencapaiannya masih belum mencapai target yang ditetapkan terutama karena minimnya intervensi pembangunan yang disebabkan adanya keterbatasan anggaran (pemerintah, swasta dan masyarakat) akibat Pandemi COVID-19.

Indikator Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Tingkat Kemantapan Jalan	persen	91,90	81,54	82,15	IKU
Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	persen	1,35	7,44	15,83	IKU
Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)*	persen	N/A	N/A	54,78	IKU
Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaat Ruang*	persen	N/A	N/A	34,45	IKU
Persentase Sumber Daya Kontruksi yang terlatih*	persen	N/A	20,10	83,27	IKU
Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	persen	0,29	0,02	0,34	IKU
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	persen	52,20	53,38	54,60	IKU
Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Kondisi Baik dan Sedang	Persen	91,90	81,54	82,15	
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	69,53	52,05	52,83	
Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	78,78	79,59	N/A	
Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	69,01	69,69	N/A	
Cakupan Pelayanan Air	Persen	72,44	73,31	N/A	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Limbah Domestik					
Cakupan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman	Persen	74,57	75,36	N/A	
Akses Air Minum Layak	Persen	N/A	N/A	93,24	
Akses Penanganan Sampah di Perkotaan	Persen	N/A	N/A	70,70	
Akses Sanitasi Layak	Persen	N/A	N/A	77,08	
Persentase Luasan Genangan Permukiman yang Tertangani	Persen	29,2	36,93	N/A	
Persentase Luas Genangan yang tertangani	Persen	N/A	N/A	50,31	
Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	50	50	N/A	
Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang terkendali	Persen	8	8	N/A	
Tingkat Kualitas Kawasan Permukiman	Persen	6,39	12,79	85,63*	

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 2022

Keterangan: - N/A tahun 2021 menjelaskan indikator berlaku sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2021

- N/A 2019&2020 : Indikator sudah tidak digunakan pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023,

- \*) Perubahan metode hitung

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui jenis pelayanan:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, pencapaiannya tahun 2021 mencapai 50 persen. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan

pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota dimana capaiannya adalah 50 persen.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, pencapaiannya pada tahun 2021 sebesar 0 (nol) persen. Capaian tersebut sebagai konsekuensi logis dari belum dimilikinya SPAL Domestik Regional yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional dimana capaiannya pada tahun 2021 adalah 0 (nol) persen.

#### 2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator rasio permukiman layak pada tahun 2019 mempunyai angka capaian yang sama pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,9952 poin, karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran di tahun 2020, serta pada tahun 2021 sebesar 0,9968 poin. Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Permukiman mengalami peningkatan sebesar 7,01 persen dari tahun 2019 ke tahun 2020, pada tahun 2021 indikator tersebut sudah tidak dipergunakan lagi.

**Tabel 2.47**

#### **Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Luas genangan yang tertangani*	persen	29,20	36,93	50,31	IKU
Tingkat kualitas kawasan permukiman	persen	61,25	12,79	85,63	IKU
Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib	persen	100	63,5	78,54	IKU
Tingkat ketersediaan rumah layak	persen	91,70	91,90	92,33	IKU
Tingkat tertib tata kelola pertanahan*	persen	N/A*	N/A*	54,24	IKU



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Akses Sanitasi Layak*	persen	N/A*	N/A*	77,08	IKU
Akses Air Minum Layak*	persen	N/A*	N/A*	93,24	IKU
Akses Penanganan Sampah di Perkotaan*	persen	N/A*	N/A*	70,70	IKU
Rasio Permukiman Layak	Rasio	0,9952	0,9952	0,9968	IKU
Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	98,72	99,19	N/A**	Indikator Urusan Disperkim
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	60.800	56.004	118.083	Indikator Urusan Disperkim
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	Persen	79,59	86,6	N/A**	Indikator Urusan Disperkim
Rasio Permukiman Layak	Poin	0,9952	0,9952	N/A**	Indikator Urusan Disperkim

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2022

Keterangan: \*) Indikator baru yang digunakan di 2021

\*\*) Menjelaskan bahwa indikator ini sudah tidak digunakan lagi di tahun 2021

Khusus Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui jenis pelayanan :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, pencapaian pada tahun 2021 mencapai 100 persen. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dimana capaian pada tahun 2021 adalah 100 persen.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dengan indikator jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, pencapaiannya sebesar 100 persen. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh





Rumah Layak Huni dimana capaian pada tahun 2021 adalah 100 persen.

#### **2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Laju Penegakan Perda dan Perkada; Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat; dan Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten. Pada tahun 2021 Tingkat Laju Penegakan Perda dan Perkada di sektor urusan ketentraman dan ketertiban yaitu mencapai 6 persen meningkat tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 diangka 4,05 persen; selanjutnya untuk Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat tahun 2021 yaitu mencapai 74 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 diangka 68,19 persen; Kemudian untuk Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat, pada tahun 2021 yaitu mencapai 77,35 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 diangka 59,19; Demikian pula untuk Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten pada tahun 2021 yaitu mencapai 72,8 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 diangka 68,25 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2021 tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu meliputi 27 Kabupaten/Kota atau sudah meliputi semua Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, indikator meningkatnya nilai indeks kapasitas di Kabupaten/Kota di Jawa Barat memperoleh nilai 63 persen.

**Tabel 2.48**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan**  
**Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,4	0,4	0,67	IKU
Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat*	Poin		N/A	98.51	IKU
Laju Penegakan Perda dan Perkada	Persen		4,05	6,00	IKU
Tingkat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab/Kota	27	27	27	
Meningkatnya Nilai Indeks Kapasitas Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	N/A*	N/A*	63	
Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	persen	N/A*	68,25	74	
Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat	persen	N/A*	59,19	77,35	
Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	poin	N/A*	68,25	100	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Keterangan: N/A\* pada tahun 2019-2020 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

#### **2.1.3.1.6 Sosial**

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Seluruh indikator urusan sosial merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2021. Untuk indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2.49**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2019**

Indikator	Satuan	2019	Keterangan
Persentase PMKS yang pulih dan	Persen	72,44	Indikator



Indikator	Satuan	2019	Keterangan
berkembang keberfungsian sosialnya			Urusan Dinsos
Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	53,81	Indikator Urusan Dinsos
Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	6,42	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	45,49	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	1,96	Indikator Urusan Dinsos
Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	0,85	Indikator Urusan Dinsos
Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	0,59	Indikator Urusan Dinsos
Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	17,28	Indikator Urusan Dinsos
Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	53,81	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	72,44	Indikator Urusan Dinsos
Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	53,81	Indikator Urusan Dinsos

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

**Tabel 2.50**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

Indikator	Satuan	2020	Ket
Persentase PMKS Yang Direhabilitasi (Diluar Katagori PMKS Di UPTD)	Persen	0,07	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PMKS Yang Mendapat Jaminan Sosial	Persen	9,53	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PMKS Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	0,00	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PSK Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	51,19	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PSKS Yang Berdaya/Persentase PMKS Yang Pulih Fungsi Sosialnya	Persen	0,00	Indikator Urusan Dinsos



Indikator	Satuan	2020	Ket
Persentase Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial	Persen	0,00	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Keluarga Miskin Dan Kelompok Rentan Yang Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya	Persen	39,45	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD PantI Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	Persen	99,29	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD PantI Rehabilitasi Sosial Bina Karya	Persen	97,85	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Persen	97,55	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	Persen	97,64	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persen	97,98	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Persen	91,61	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Pengembangan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Persen	96,64	Indikator Urusan Dinsos
Persentase ABH yang Direhab di PSRABH Cileungsi Bogor dan Satpel	Persen	98,00	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PSKS Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	56,45	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Remaja Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial Di UPTD Dan Satpel	Persen	70,60	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PMKS Yg Mendapat Rehabilitasi Sosial Di PRSBK Dan Satpel - Rtm	Persen	67,30	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Di UPTD	Persen	122,50	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD PantI Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Persen	93,82	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Direhabilitasi Di UPTD	Persen	80,80	Indikator Urusan Dinsos

Indikator	Satuan	2020	Ket
PSRPD Cibabat Cimahi			
Persentase Wanita Tuna Susila Yang Direhabilitasi Sosial Di UPTD PSRTS Dan Satpel - RTM Selama 6 Bulan	Persen	62,60	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Lanjut Usia Di Dalam Balai Yg Mendapat Perlindungan Sosial	Persen	138,80	Indikator Urusan Dinsos

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

**Tabel 2.51**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**

Indikator	Satuan	2021	Ket
Indeks Kesejahteraan Sosial*	Persen	42,50	IKU
Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Kesos*	persen	59,67	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Kesos UPTD PPKS*	persen	21,86	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi*	persen	13	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Daerah yang Difasilitasi Untuk Membentuk Puskesmas*	persen	44,70	Indikator Urusan Dinsos
Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani*	persen	1,73	Indikator Urusan Dinsos
Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti*	persen	110	Indikator Urusan Dinsos
Persentase Fakir Miskin yang tertangani*	persen	69,7	Indikator Urusan Dinsos
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi*	persen	120	Indikator Urusan Dinsos
Tingkat pengelolaan makam pahlawan*	persen	100	Indikator Urusan Dinsos

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

### 2.1.3.1.7 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah

faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan.

Selama periode Tahun 2019-2021 terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebesar 22.628.122 orang menjadi sebesar 23,81 juta jiwa orang dan pada capaian tahun 2020 menjadi sebesar 24,21 juta jiwa orang , rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebesar 91,83 persen menjadi sebesar 92,02 persen pada tahun 2019, dan tingkat kesempatan kerja pada tahun 2018 sebesar 91,83 persen menjadi sebesar 92,02 persen pada tahun 2020. Selain itu, masih terdapat indikator lain yang menunjukkan belum optimalnya kinerja ketenagakerjaan pada tahun 2020 karena mengalami penurunan yaitu tingkat pengangguran terbuka yang semakin tinggi dari tahun 2018 sebesar 8,17 persen menjadi sebesar 7,99 persen, dan capaian tahun 2020 menjadi sebesar 10,46 persen.

Selama periode Tahun 2019-2021 terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu jumlah Angkatan kerja pada tahun 2019 sebesar 23,81 juta jiwa dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 24,74 juta jiwa. Tingkat kesempatan kerja menunjukkan fluktuatif yaitu pada tahun 2019 sebesar 92.02 persen dan pada tahun 2020 meningkat serta pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 90,18 persen. Demikian pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang cenderung fluktuatif pada tahun 2019 sebesar 65,07 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 64.95 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka pun menunjukkan fluktuatif hal ini terlihat pada tahun 2019 sebesar 7,99 persen, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 10,46 persen dan pada tahun 2021 mengalami perbaikan menjadi 9,82 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Disnakertrans ada perbaikan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.52**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	N/A	N/A	100	IKU Dinas Tenaga Kerja dan



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
					Transmigrasi
Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persen	N/A	N/A	36,76	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	Persen	N/A	N/A	91,93	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	19,20	20,25	22,92	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase transmigran yang ditempatkan	Persen	N/A	N/A	100	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	orang	N/A	N/A	135.638	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	N/A	N/A	72,78	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	N/A	20,25	22,92	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian yang Direalisasikan	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	23,81 (Juta Jiwa)	24,21 (Juta Jiwa)	24,74 (Juta Jiwa)	Urusan Tenaga Kerja





Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	92,02	89,54	90,18	Urusan Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	65,07	64,53	64,95	Urusan Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,99	10,46	9,82	Urusan Tenaga Kerja
Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	persen	N/A	N/A	100	Urusan Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	persen	N/A	N/A	36,76	Urusan Tenaga Kerja
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	persen	N/A	N/A	91,93	Urusan Tenaga Kerja
Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	persen	19,2	20,25	22,92	Urusan Tenaga Kerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2022

### 2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Jawa Barat melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak maupun pencegahan terjadinya pornografi. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Seluruh indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2021. Untuk indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2.53**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender*	Persen	N/A	N/A	88,88	IKU
Persentase Perempuan di Parlemen Provinsi	persen	20	N/A	21,67	IKU
Tingkat Keberhasilan	persen	100	100	100	IKU



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan					
Tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan*	persen	N/A	N/A	66,67	IKU
Tingkat penanganan kasus KED terhadap anak	persen	100	N/A	100	IKU
Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	persen	85,18	85,18	77,78	IKU
Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	anak	2,52	2,55	2,30	IKU
Indeks Perlindungan Anak*	Nilai	N/A	N/A	68,32**	IKU

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: (\*) indikator baru mulai tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri 90/2019

**Tabel 2.54**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender *	persen	N/A	N/A	22,22	
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) *	persen	N/A	N/A	3,6	
Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA *	persen	N/A	N/A	100	
Jumlah Kab Kota yang Sudah Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Di Jawa Barat *	kab/kota	N/A	N/A	16	
Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat *	persen	N/A	N/A	66	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi *	persen	N/A	N/A	25	
Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi *	persen	N/A	N/A	25	
Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak) *	rasio	N/A	N/A	0,73	
Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA *	persen	N/A	N/A	100	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: (\*) indikator baru mulai tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri 90/2019

**Tabel 2.55**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu **	Persen	100,00	N/A	N/A	
Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional **	Persen	85,18	N/A	N/A	
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum **	Persen	100,00	N/A	N/A	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: (\*) indikator baru mulai tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri 90/2019

**Tabel 2.56**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Cakupan Organisasi Perempuan Yang Mendapat Pembinaan ***	Persen	N/A	45,00	N/A	
Cakupan Ketersediaan Data Terpilah Yang Up To Date Pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat ***	Persen	N/A	44,00	N/A	
Cakupan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Ke Kabupaten Kota ***	Persen	N/A	45,00	N/A	
Cakupan Kelompok Pekka Yang Mendapat Program Pembinaan Program Pekka ***	Persen	N/A	45,00	N/A	
Cakupan Kepala Keluarga Yang Mendapat Pembinaan Program P2WKSS ***	Persen	N/A	45,00	N/A	
Cakupan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu ***	Persen	N/A	100,00	N/A	
Cakupan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu ***	Persen	N/A	100,00	N/A	
Cakupan Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Berhasil Dibina ***	Persen	N/A	100,00	N/A	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: (\*) indikator baru mulai tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri 90/2019

(\*\*) indikator lama tahun 2019

(\*\*\*) indikator lama tahun 2020

### 2.1.3.1.9 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di Jawa Barat. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Skor PPH Jawa Barat pada tahun 2021 adalah 84,10 poin. Kelompok padi-padian terutama beras masih mendominasi konsumsi masyarakat Jawa Barat jika dibandingkan dengan kelompok ubi, sayur dan buah-buahan. Salah satu indikator terkait ketahanan pangan adalah konsumsi energi terdapat penurunan konsumsi dari 2,199 kkal/kap/hari pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,150 kkal/kap/hari pada tahun 2020 dan meningkat menjadi sebesar 2,176 kkal/kap/hari pada tahun 2021 (WPNPG 2012). Data indikator keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Skor PPH Tingkat Ketersediaan	poin	90,4	92,88	94,02	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Persentase peningkatan keamanan	persen	N/A	65,21	140,51	IKU Dinas Ketahanan Pangan



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
pangan segar asal tumbuhan sesuai standar mutu dan keamanan pangan					dan Pernaka n
Tingkat Konsumsi Pangan:					IKU Dinas Ketahana n Pangan dan Pernaka n
- energi	kkal/kap / hr	2199	2150	2.176	
- protein	gr/kap/h r	62,9	64,9	64,34	
Persentase Cadangan Pangan	persen	N/A	N/A	42,36	Indikator Program DKPP
Persentase Desa Rawan Pangan yang Diintervensi	persen	N/A	N/A	4	Indikator Program DKPP
Persentase Peningkatan Sertifikasi PSAT	persen	N/A	N/A	140,51	Indikator Program DKPP
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada**	Ada	Indikator urusan
Ketersediaan Pangan Utama	Kg / Jiwa / tahun	110,45	100,60	111,09	Indikator urusan
Konsumsi Beras per Kapita	Kg / kapita / tahun	79,4	79,60	79,60*	Indikator urusan
Persentase Kapasitas Kompetensi SDM Aparatur dan Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan (%)	persen	51,85	51,85	51,85	Indikator urusan
Jumlah Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	Ton	831,78	814,5	1.628,50	Indikator urusan
Ketersediaan Informasi, Harga dan Akses pangan	Persen	100	100	100	Indikator urusan



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	90,4	90,40**	90,40*	Indikator urusan
Persentase Capaian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Persen	100	100	100	Indikator urusan
Persentase Intervensi Lokasi Potensi Rawan Pangan	Persen	90,4	90,40	90,40*	Indikator urusan
Jumlah Pelaku Usaha yang Bisa Mengakses Pasar Regional dan Nasional	Orang	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Indikator urusan
Jumlah Sarana Pemasaran Peternakan di Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal SOP	Unit	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Indikator urusan
Konsumsi (hewani/daging, telur, susu)	gr/Kap/h r	73,08	74,66	74,66*	Indikator urusan
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	84,8	84,1	84,1*	Indikator urusan
Persentase Sampel Komoditi Pangan Segar yang Tersertifikat	Persen	56,31	56,31**	50	Indikator urusan
Persentase Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan yang sesuai SNI	Persen	98,46	65,21	142	Indikator urusan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: \*) Data Sangat Sementara

\*\*\*) Data Sementara



### 2.1.3.1.10 Pertanian

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, dengan indikator Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan Melalui Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 19,59 persen menjadi sebesar 48,48 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 indikator mengalami perubahan menjadi Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan dengan capaian sebesar 54,24 persen.

**Tabel 2.58**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan Melalui Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren	Persen	19,59	48,48	N/A
Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	N/A	N/A	54,24

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2022

Keterangan: N/A pada tahun 2019 dan 2020 menjelaskan indikator belum di pergunakan

N/A pada tahun 2021 menjelaskan indikator tidak ada di Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

### 2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup

Mengacu pada prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan 3 (tiga) pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup direpresentasikan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Metode perhitungan IKLH sangat dinamis dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perkembangan berbagai hasil penelitian. Perhitungan IKLH terkini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan metode terbaru, IKLH provinsi terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pada metode sebelumnya, IKAL belum menjadi komponen perhitungan IKLH. Selain itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat meningkat dari 61,59 poin pada tahun 2020 menjadi 62,69 poin pada tahun 2021 dan berada pada kategori sedang. Peningkatan capaian IKLH didukung oleh meningkatnya capaian IKA dan IKL, serta masuknya IKAL dalam perhitungan IKLH.

Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 mencapai 43,09 poin, meningkat dari capaian tahun 2020 sebesar 42,84 poin. Pemantauan kualitas air dilakukan pada 11 (sebelas) sungai, terdiri dari 4 (empat) sungai utama kewenangan Pemerintah Pusat dan 7 (tujuh) sungai kewenangan provinsi dengan parameter yang diukur meliputi 11 (sebelas) parameter. Peningkatan capaian IKA terutama didukung oleh berbagai upaya penanganan DAS Prioritas, diantaranya pengendalian dan pencemaran DAS Citarum yang dilaksanakan secara pentahelix melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Indeks Kualitas Air Laut pada tahun 2021 mencapai 87,42 poin, meningkat dari capaian tahun 2020 sebesar 74,84 poin. Pemantauan kualitas air laut dilakukan di 2 (dua) titik pantau yang mewakili pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat, dengan parameter yang diukur meliputi padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), ammonia total (NH<sub>3</sub>-N), orto fosfat (PO<sub>4</sub>-P), dan minyak dan lemak. Jumlah titik lokasi pemantauan air laut perlu ditingkatkan agar lebih representatif menggambarkan kualitas air laut di Jawa Barat, meliputi muara sungai utama, lokasi yang berpotensi terdampak kegiatan daratan atau lautan, dan ekosistem penting seperti hanya *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, estuari, dan ekosistem lainnya.

Indeks Kualitas Udara pada tahun 2021 mencapai 79,34 poin, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 79,58 poin yang diperkirakan terjadi akibat meningkatnya kembali aktivitas industri dan penggunaan transportasi sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 27 kabupaten/kota dengan parameter yang diuji meliputi sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) titik yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, permukiman padat penduduk, dan kawasan perkantoran. Adapun capaian untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) diuraikan lebih lanjut pada bagian Urusan Kehutanan dan menjadi indikator Dinas Kehutanan.

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup juga dapat direpresentasikan melalui indikator Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2021, Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat mencapai 4,23 persen, meningkat dari capaian tahun 2020 sebesar 3,85 persen, yang diperoleh dari upaya penurunan emisi pada 5 (lima) sektor, yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi dan limbah domestik (sampah dan air limbah domestik). Tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor limbah domestik khususnya, mencapai 0,81 persen pada tahun 2021, meningkat dari capaian tahun 2020 sebesar 0,80 persen. Upaya penurunan emisi pada sektor limbah masih terkendala TPPAS Regional Lulut Nambo dan TPPAS Legoknangka yang belum beroperasi, serta operasional komposting di TPK Sarimukti, operasional TPA Kabupaten/Kota, bank sampah, dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang belum optimal dalam pengelolaan metan.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.59**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	52,12	61,59	62,69	IKU
Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	42,73	42,84	43,09	Indikator



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
					DLH
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	N/A	74,17	87,42	Indikator DLH
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	79,4	79,58	79,34	Indikator DLH
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,85	3,87	4,23	IKU
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,78	0,8	0,81	Indikator DLH

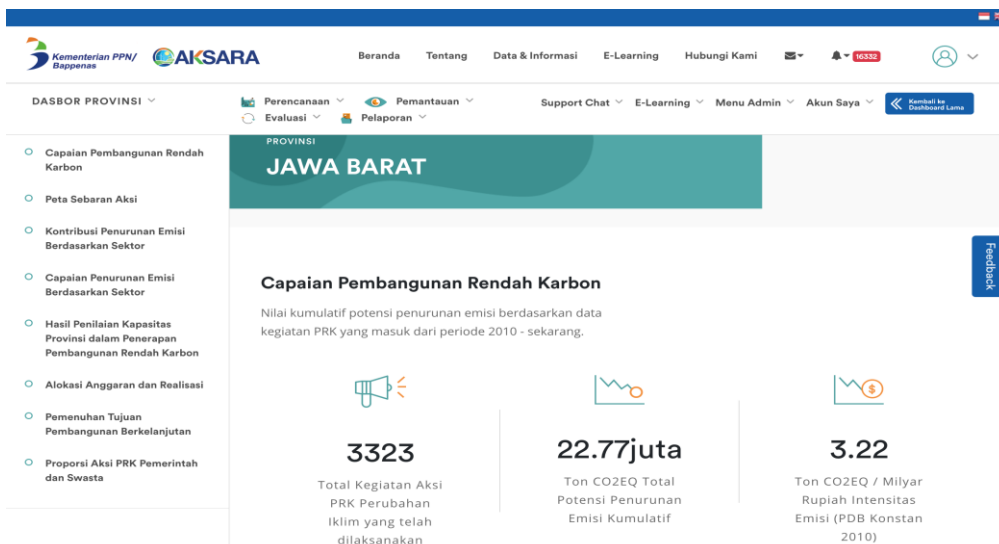
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. 2022

Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Berkaitan dengan capaian tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau pembangunan rendah karbon, Provinsi Jawa Barat telah tepat waktu melaporkan, baik pada tahap perencanaan maupun pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pada setiap tahunnya melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional( AKSARA). AKSARA merupakan wadah/*platform* yang dikembangkan oleh BAPPENAS untuk mendokumentasikan aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang transparan akurat, lengkap, konsisten, dan terintegrasi.

Capaian Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 yang dilaporkan dan tervalidasi pada AKSARA mencakup 3.323 total kegiatan aksi yang telah dilaksanakan, dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 22,77 juta ton CO<sub>2</sub>eq, dan intensitas emisi sebesar 3,22 ton CO<sub>2</sub>eq/milyar rupiah, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.41.

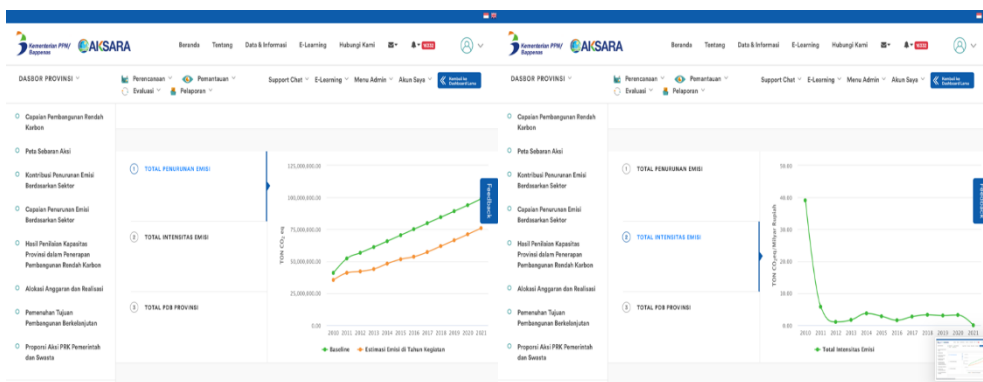
**Gambar 2.41**  
**Capaian Pembangunan Rendah Karbon**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021**



Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>

Adapun tren Capaian Total Penurunan Emisi dan Total Intensitas Emisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 tersaji pada Gambar 2.42.

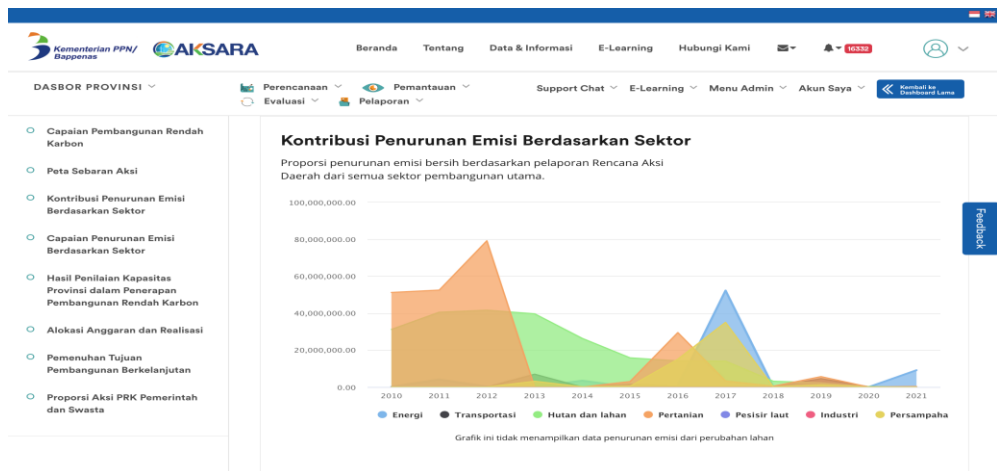
**Gambar 2.42**  
**Capaian Total Penurunan Emisi dan Total Intensitas Emisi**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021**



(Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>)

Tingkat keterlaporan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat tergambarkan melalui Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021, meliputi sektor energi (91.466 juta ton CO<sub>2</sub> eq), transportasi, hutan dan lahan (221.062 ton CO<sub>2</sub>eq), pertanian (3.041 juta ton CO<sub>2</sub>eq), limbah (air limbah domestik dan persampahan) (31.071 ton CO<sub>2</sub>eq), dan pesisir dan laut (baru mencakup kegiatan pendukung), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.43.

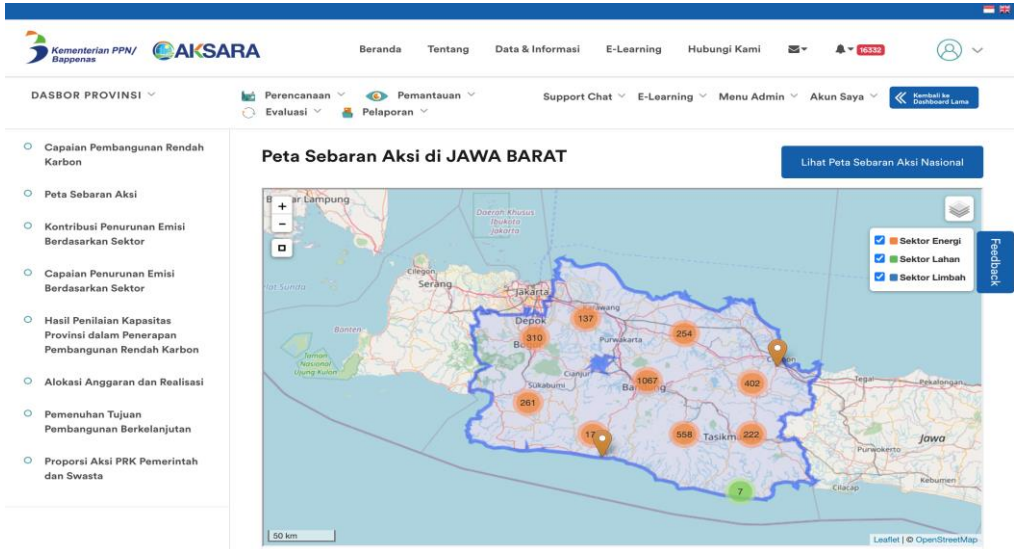
**Gambar 2.43**  
**Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021**



Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>

Adapun Peta Sebaran Aksi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 pada sektor berbasis energi, lahan dan limbah, disajikan pada Gambar 2.44.

**Gambar 2.44**  
**Peta Sebaran Aksi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021**



(Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>)

#### 2.1.3.1.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Ketersediaan basis data kependudukan skala kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 berada dalam kategori “ada” dan tetap pada kategori tersebut sampai pada tahun 2020 dan tahun 2021. Indikator Akurasi Data Kependudukan berada di angka 80,53 persen pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 81,37 pada tahun 2020 dan sebesar 83,57 pada tahun 2021. Adapun indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.60**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat*	persen	82,50	82,22	84,81	IKU
Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	Persen	96,79	96,79	98,45	
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	
Akurasi Data Kependudukan	Persen	80,53	81,37	83,57	
Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	16,00	23	23	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2022

#### 2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, Persentase Desa Mandiri dari tahun 2019 sebesar 1,58 persen meningkat menjadi 5,08 persen pada tahun 2020 dan 11,03 pada tahun 2021. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.61**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Perkembangan Strata Desa Mandiri	persen	1,84	5,08	11,03	IKU
Persentase Perkembangan Strata Desa Tertinggal	persen	2,28	0,69	0,33	IKU
Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan	Persen	100	100	100	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
TMMD, BSMSS, dan BBGRM					
Persentase Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen	100	N/A		
Persentase Posyandu Mandiri	Persen	27,06	30,2	33,33	
Identifikasi Potensi Kawasan Perdesaan di Perbatasan	Kabupaten	6	200	374	
Jumlah Kerjasama Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan di Perbatasan	Kabupaten	2	2	2	
Jumlah Desa yang sudah Menerapkan SISKEUDES	Desa	90	100	100	
Persentase anggaran APB-Desa di atas 30% untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persen	100	100	100	
Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	Dokumen	40	40	40	
Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	73,26	N/A	85	
Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	Buah	27	27	27	
Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	70	74	87	
Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen	30	34	37	
Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	79,74	0,81	82,4	
Persentase Desa Mandiri	Persen	1,58	5,08	11,03	
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan TMMD/BBGRM/BSMSS	Jumlah	TMMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi	MMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi	MMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Jumlah KPD	KPD	653,00	440	857	
Persentase BUMDesa aktif	Persen	69,55	78,2	87,15	
Jenis Inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota	Jenis	9	25	25	
Persentase Fasilitas Penataan Desa yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan*	Persen	90,2	92,5	94,51	
Persentase Fasilitas Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi*	Persen	95,6	97,3	99,07	
Persentase Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sesuai dengan Ketentuan*	Persen	94,5	96,4	98,71	
Persentase Fasilitas Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa*	Persen	94,3	96,3	98,2	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	Grade	A	A	A	
Persentase Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu*	Persen	100	100	100	
Persentase Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel*	Persen	100	100	100	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

#### 2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,11 persen dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,41 persen. Pada tahun 2021, pengukuran kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami perubahan indikator sehingga tidak dapat dinyatakan pada tahun 2019 dan 2020. Perubahan indikator ini menyesuaikan dengan kesepakatan dengan Pemerintah Pusat. Indikator tersebut adalah Persentase Peserta KB Aktif/mCPR, Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota, dan Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat di Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.62**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Persentase Peserta KB Aktif/mCPR*	Persen	N/A	N/A	58,9
Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota*	Persen	N/A	N/A	100
Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat di Kabupaten/Kota*	Persen	N/A	N/A	100
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,30	1,11	1,41

**Tabel 2.63**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera **	Keluarga	1.157.346	N/A	N/A
Cakupan Peserta KB Aktif **	Persen	56,97	N/A	N/A
Cakupan KB Pria **	Persen	2,46	N/A	N/A
Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun **	Persen	59,52	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2022

Keterangan: (\*) indikator baru mulai tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri 90/2019

(\*\*) indikator lama tahun 2019

### 2.1.3.1.15 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan melingkupi 3 (tiga) bidang pelayanan, yaitu: perhubungan darat, perhubungan laut, dan perkeretaapian. Kinerja penyelenggaraan perhubungan darat dapat dilihat dari indikator tingkat ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan, kinerja perhubungan laut dan ASDP, serta bidang perkeretaapian dapat terlihat dari tingkat pelayanan transportasi kereta api perkotaan di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa perubahan pada urusan pemerintah daerah, salah satunya pada urusan penerbangan yang tidak lagi menjadi urusan provinsi, sehingga dalam perencanaan ke depan perlu ditindaklanjuti dari segi arah kebijakan hingga penentuan kinerja urusan perhubungan di Provinsi Jawa Barat.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2021 mengalami beberapa kali perubahan hal tersebut membuat Indikator pada bidang Perhubungan berbeda pada setiap tahunnya ada indikator yang berakhir pada tahun 2019 tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja pada bidang perhubungan tahun 2021, adapun beberapa indikator yang digunakan mulai pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.64**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	persen	33,85	34,04	35,83
Presentase Terminal Tipe B yang dibangun*	Persen	N/A	N/A	1,04
Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Dukungan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Laut	Persen	36,16	38,35	43,33



Indikator	Satuan	2019	2020	2021
dan ASDP				
Tingkat Ketersediaan Jaringan Transportasi Massal Berbasis Rel	Persen	20,40	30,51	34,15

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: Tahun 2019 merupakan masa transisi, yaitu ketika penyusunan RKPD 2019 dan indikator 2019 tersebut sesuai dengan Renja dan RKPD 2019

\*N/A pada tahun 2018-2021 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

\*\*Tahun 2021 menggunakan capaian pada Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indikator presentase fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi di tahun 2021 sebesar 35,83 persen dari target 37,00 persen, tidak tercapaiannya target tersebut disebabkan beberapa faktor penghambat yang menyebabkan target tidak dapat tercapai sesuai target hal tersebut disebabkan masih banyaknya daerah rawan kecelakaan yang belum terakomodir kebutuhan fasilitas lalu lintasnya dan dibutuhkan kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) untuk penyajian data yang komprehensif terkait kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di Provinsi Jawa Barat.

Capaian indikator presentase Terminal Tipe B tahun 2021 sebesar 1,04 persen dari target 3,48 persen yang harus terbangun. Hal ini disebabkan keterlambatan lelang pada pembangunan Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon. Penyebab lainnya adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, mengakibatkan terminal Cikarang menjadi Terminal Tipe A sehingga tidak jadi dibangun.

Capaian indikator tingkat ketersediaan prasarana dan dukungan fasilitas keselamatan perhubungan laut dan ASDP tahun 2021 tercapai sebesar 43,33 persen dari indikator yang ditargetkan sebesar 58,97 persen. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan terdapat hambatan dalam pencaapaian target tahun 2021 yaitu adanya kendala teknis dilapangan khususnya di Pelabuhan Palabuhanratu yang mengalami sedimentasi sehingga perlu kajian terlebih dahulu untuk pembangunan selanjutnya.

Untuk indikator tingkat ketersediaan jaringan transportasi massal berbasis rel tahun 2021 tercapai sebesar 34,15 persen dari yang di targetkan sebesar 34,24 persen. Target capaian indikator

tersebut masih belum dapat tercapai hal tersebut disebabkan faktor penghambat yaitu belum operationalnya reaktivasi Jalur Cibatugarut dan belum keluarnya Surat Rekomendasi Ijin Operasi dari Kementerian Perhubungan terkait operasionalisasi reaktivasi Jalur Cibatugarut oleh Pemerintah Pusat.

#### **2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika**

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik merupakan bentuk komitmen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi. Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui Keputusan Gubernur Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

PPID Provinsi Jawa Barat disamping melakukan pelaporan dan layanan informasi publik berdasarkan permohonan, juga memberikan layanan informasi dengan menyampaikan/mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program, kegiatan, hingga capaian pembangunan melalui berbagai kanal informasi dan komunikasi yang dimiliki. Beberapa kanal yang digunakan yaitu *website* (dengan situs [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id), [www.humas.jabarprov.go.id](http://www.humas.jabarprov.go.id), [www.ppid.jabarprov.go.id](http://www.ppid.jabarprov.go.id), dan *website* masing-masing Perangkat Daerah), media sosial ([www.instagram.com/humas\\_jabar](https://www.instagram.com/humas_jabar), [www.twitter.com/humasjabar](https://www.twitter.com/humasjabar), [www.twitter.com/ppidprovjabar](https://www.twitter.com/ppidprovjabar)), dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah, majalah (Majalah Gedung Sate, Warta Bappeda, Info SDA, dan lain sebagainya), media luar ruang hingga distribusi informasi/ berita (*press release*) kepada media massa.

Laju kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari ketersediaan *website* milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki *website* resmi yang dapat diakses pada alamat <https://www.jabarprov.go.id/>. Tidak



hanya *website*, media penyebarluasan informasi juga memanfaatkan media sosial diantaranya *facebook, twitter, instagram* dan *youtube*.

Dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, terdapat dua indikator kinerja urusan yang mengalami penurunan yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mana realisasi pada tahun 2020 sebesar 3,58 menjadi 3,28 pada tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan capaian pada evaluasi SPBE untuk tahun 2021 menggunakan instrument penilaian baru yang menambahkan 22 indikator baru ke dalam 4 (empat) domain dan 8 (delapan) aspek. Selain itu, indikator urusan yang mengalami penurunan adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang mana realisasi pada tahun 2020 mencapai 90,45 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 78,54. Meski terjadi penurunan, Jawa Barat termasuk ke dalam 5 (lima) Provinsi dengan capaian terbesar bersama Bali, Kalimantan Barat, Aceh dan Sulawesi Tenggara. Secara keseluruhan indikator lainnya mengalami kenaikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,12	3,58	3,28	IKU
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	Provinsi Informatif**	98,15	78,54	IKU
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi*	Persen	N/A	N/A	91	
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo*	Persen	100	100	100	
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan	Persen	N/A	N/A	50	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Secara Online dan Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan*					
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi*	Persen	N/A	N/A	41.09	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	Poin	N/A	85.33	85.38	
Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum*	Persen	100	100	100	
Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi*	Persen	40	20	55	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: (\*) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

#### 2.1.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2019-2021 memperlihatkan tren positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya persentase UMKM yang naik kelas meningkat dari semula 5,3 persen pada tahun 2020 menjadi 6,9 pada tahun 2021, tingkat kepatuhan koperasi yang pada tahun 2020 berada pada angka 15,17 persen menjadi 17,25 persen. Selain itu, laju pertumbuhan volume usaha koperasi pun meningkat yang semula pada tahun 2020 menurun tajam pada angka -6,24 persen akibat COVID-19 menjadi 11 persen pada tahun 2021.

Indikator kinerja pada bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada periode Tahun 2019-2021 mengalami beberapa perubahan menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan di setiap tahunnya. Terdapat indikator yang dilaksanakan pada tahun 2019 serta indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2020. Secara lebih lengkap untuk indikator yang lain dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.66**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Koperasi yang mengakses kredit*	Persen	N/A	N/A	27,27	IKU
Persentase UMKM yang Naik Kelas	Persen	18,00	5,3	6,90	IKU
Persentase Koperasi Aktif	Persen	46,82	58,90	58,90	
Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	12.631	14.657	N/A*	
Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	29,84	27,97	N/A*	
Pertumbuhan Akses Modal KUK	Persen	24,61	24,61**	N/A*	
Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	Persen	1,5	1,5**	N/A*	
Jumlah wirausaha pemula	Unit	N/A	1.300	N/A*	
Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit	Persen	NA	NA	27,27	
Persentase UMKM yang Naik Kelas	Persen	18	5,3	6,9	
Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional	Persen	N/A	N/A	0	
Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	N/A	N/A	0	
Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro	Persen	N/A	N/A	44,92	
Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	Persen	N/A	N/A	50	
Tingkat Koperasi yang Berkualitas	Persen	N/A	N/A	88,5	
Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	N/A	15,17	77,52	
Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	N/A	-6,24	11	
Laju pertumbuhan omzet UMKM binaan	Persen	N/A	8,25	50	
Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	Persen	N/A	30	75,9	

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan: N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A\* pada tahun 2021 menjelaskan bahwa indikator ini sudah tidak digunakan di tahun 2021

Untuk indikator bernilai Nol pada tahun 2021 merupakan indikator baru akan dijalankan pada tahun 2022

### 2.1.3.1.18 Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di

seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peran investasi dalam Pemulihan Ekonomi setelah pasca pandemi antara lain yaitu:

1. Penyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran;
2. Meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan SDM dan daya saing;
3. Meningkatkan kinerja ekspor; dan
4. Memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat;

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi melalui Program Kegiatan di Dinas PMPTSP yang terintegrasi pada Program Investasi Juara yang merupakan program unggulan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN Jawa Barat di tahun 2021 sebesar 13,03 persen apabila dibandingkan dengan realisasi PMA dan PMDN di tahun 2020 dan menjadi peringkat pertama realisasi investasi Nasional .

Peningkatan ini dipicu oleh realisasi PMA sebesar Rp76,18 triliun (meningkat 10,36 persen) dan realisasi PMDN sebesar Rp59,95 triliun (meningkat 16,63 persen). Peningkatan nilai realisasi terutama kenaikan PMDN merupakan dampak dari gencarnya promosi investasi, selain itu juga faktor letak geografis, infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, SDM Jawa Barat lebih unggul, banyaknya kawasan industri dan nilai ICOR Jawa Barat yang lebih rendah dari rata-rata Nasional.

Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini mendakan kualitas pelayanan perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

**Tabel 2.67**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Nilai Realisasi investasi	Poin	-	120,4	136,13
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Poin	-	85,36	85,84

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

**Tabel 2.68**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	81,62	85,36	85,84
Jumlah Total Proyek	Buah	15.370	20.020	31.804
a. PMA	Buah	10.455	11.031	12.614
b. PMDN	Buah	4.915	8.989	19.180
Jumlah Total Investasi	Rp. Triliun	137,5	120,43	136,13
a. PMA	Rp. Triliun	88,21	69,03	76,18
b. PMDN	Rp. Triliun	49,28	51,40	59,95
Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	130.704	113.426	109.331
a. PMA	Orang	94.644	85.928	72.554
b. PMDN	Orang	36.06	27.498	36.777

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

**Tabel 2.69**  
**Tren Lokasi PMDN Tahun 2019-2021**

2018	2019	2020	2021
Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
Rp 42,3T (12,9%)	Rp 49,3 T (12,8%)	Rp 51,4 T (12,4%)	Rp 59,95 T (13,4%)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2022

**Tabel 2.70**  
**Tren Lokasi PMA Tahun 2019-2021**

2018	2019	2020	2021
Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
US\$ 5,6 M (19,1%)	US\$ 5,9 M (20,8%)	US\$ 4,8 M (16,7%)	US\$ 5,22 M (16,8%)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2022

**Tabel 2.71**  
**Tren Lokasi PMDN dan PMA Tahun 2019-2021**

2018	2019	2020	2021
Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
Rp 116,9 T (16,2%)	Rp 137,5 T (17,0%)	Rp 120,4 T (14,6 %)	Rp 136,13 T (15,1%)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2022

Pencapaian nilai realisasi investasi dan IKM didukung dengan

4 (empat) indikator kinerja Program Dinas PMPTSP, yaitu:

1. Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi: Jumlah pelaku usaha diperoleh dengan Nomor Induk Berusaha dapat dipersentasekan yang sudah memperoleh informasi. Faktor pendorong: kegiatan formalisasi NIB, sosialisasi untuk memperoleh NIB untuk pelaku usaha di Jawa Barat, gencarnya promosi investasi melalui Program Kegiatan di Dinas PMPTSP, (648.629 pelaku usaha)
2. Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu: Realisasi Tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan Permendagri 90 tahun 2019. Faktor: adanya fitur penandatanganan secara elektronik (TTE), proses pelayanan perizinan secara elektronik, adanya UU Cipta kerja di aplikasi OSS mengamankan fiktif positif sehingga proses perijinan bila sudah melebihi proses perizinan akan dapat secara otomatis diizinkan. Nilai ini masih 71,49 persen karena baru dimulai pada Agustus 2021. Implementasi fiktif positif (izin

- terbit secara otomatis apabila melebihi durasi) ini baru dilaksanakan pada Mei 2022. (5.340 naskah izin)
3. Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya:  
Realisasi Tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan Permendagri 90 tahun 2019 (sebelumnya : Peningkatan Laju Realisasi Proyek Penanaman Modal). (8.717 perusahaan) Faktor pendukung: program Gedoran (gerakan dorong realisasi dalam negeri) masuk kedalam pemantauan dan pengawasan, dikhususkan untuk PMDN dalam melaporkan LKPMnya secara berkala; *helpdesk* pengisian LKPM melalui LKPM *online* permasalahan dibagi menjadi kategori bila OSS (diarahkan langsung ke OSS melalui *email*) dan bantuan informasi akan ditangani langsung ke dinas, bantuan berbentuk sosialisasi dan pembinaan pengisian LKPM, Faktor penghambat : kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, menyebabkan terjadinya *refocusing* anggaran, sehingga kegiatan pembinaan pelaku usaha yang melaporkan realisasi investasi melalui LKPM tidak maksimal.
  4. Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal:  
Realisasi Tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan Permendagri 90 tahun 2019. Nama indikator tahun 2020: persentase data dan informasi yang valid. (Data yang dimanfaatkan=9 data set, data yang dikelola=11 data set) Faktor: Kanal teknologi informasi berupa media komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan data dan informasi dinas melalui website, kontak center (WA), aplikasi perizinan jelita dimana sudah ada rekapan data sehingga bisa diunduh secara mandiri, adanya media komunikasi dengan dinas PMTPSP kabupaten/kota dalam rangka mengumpulkan dan melaporkan data secara elektronik, portal satu data jabar.

**Tabel 2.72**  
**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Indikator Daya Saing (Peringkat <i>Ease Of Doing Business</i> )	Peringkat		N/A	N/A
Peningkatan Jumlah	Persen		N/A	10





Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi				
Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Persen		N/A	73,58
Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	Persen		N/A	40,77
Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen		N/A	81

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

### 2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2020 jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional adalah sebanyak 115 orang dimana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah pada tahun 2020 memiliki cabang olahraga yang lebih sedikit daripada Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2019. Kemudian tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 634 orang. Sedangkan, jumlah pemuda yang berwirausaha pada tahun 2019 adalah 1.082.664 orang meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.167.169 orang dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.150.209 orang dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan wirausaha muda sulit berkembang terutama pada segi pemasaran dan modal. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat berada di angka 50,00 poin dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 48,83 poin. Penurunan IPP pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pada domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi. Untuk indikator lainnya bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.73**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan	poin	45,33	46,7	46,67*	IKU



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	
Pemuda*					
Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	persen	52	47,3	49,7	IKU
Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional:					
a. PON	Peringkat	N/A*	N/A*	1	IKU
b. PEPARNAS	Peringkat	N/A*	N/A*	2	
Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional:					
a. PEPARPENAS	Peringkat	5	N/A*	N/A*	IKU
b. POPNAS	Peringkat	1	N/A*	N/A*	
c. POPWILNAS	Peringkat	N/A*	N/A*	N/A*	
Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	342	115	634	Indikator Urusan Dispora
Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	110	100	100	Indikator Urusan Dispora
Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	Orang	1.082.664	2.167.169	2.150.209	Indikator Urusan Dispora
Jumlah Pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi Nasional	Orang	19	5	14	Indikator Urusan Dispora

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan : \*) Data menggunakan angka proyeksi dari Kemenpora RI

N/A\*) Data tidak ada dikarenakan Covid dan akan dilaksanakan pada tahun 2022

### 2.1.3.1.20 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Jawa Barat yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan kebudayaan.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, persentase seni dan budaya yang dilestarikan

pada tahun 2019 mencapai 58,21 persen lalu mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 37,69 persen, dan Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan sebesar 77,77 persen namun turut mengalami penurunan pada tahun 2020 yang mencapai angka 52,38 persen. Terdapat indikator yang juga mengalami peningkatan seperti Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan pada tahun 2019 sebesar 30 jumlah menjadi sebesar 44 jumlah pada tahun 2020. Adapun untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.74**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan	Persen	23,28	17,86	24,78	IKU
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	13	12	12	
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	30	44	44	
Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	Jumlah Pembinaan	16	0	0	
Pengusulan HKI	Usulan/Rekomendasi Per Tahun	1	0	0	
Pelestarian Seni Tradisi	Jumlah Pembinaan	9	1	83	
Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	7	155	122	
Pengusulan HAKI/Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Usulan	13	32	22	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
(WBTB)					
Pelestarian seni tradisi, kontemporer dan perfilman	Jenis	9	0	83	
Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	Persen	77,77	52,38	28,57	
Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	58,21	37,69	24,78	
Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga yang dilestarikan	Persen	26,46 (800 koleksi museum)	9,93 (300 koleksi museum)	24,60 (743 koleksi museum)	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

### 2.1.3.1.21 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku Provinsi Dalam Angka dan Buku PDRB Provinsi di Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 untuk kedua buku tersebut sudah tidak masuk ke dalam urusan statistik, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.75**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah*	Persen	N/A	N/A	100	IKU
Buku Provinsi Dalam Angka**	Ada/ Tidak	Ada	Ada	N/A	Indikator Urusan Diskominfo

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Buku PDRB Provinsi**	Ada/ Tidak	Ada	Ada	N/A	Indikator Urusan Diskominfo
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah*	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Urusan Diskominfo
Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah*	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Urusan Diskominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: (\*) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

(\*\*) Indikator sudah tidak digunakan di tahun 2021.

### 2.1.3.1.22 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Seluruh indikator urusan persandian dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan. Hal ini didorong dengan adanya percepatan di beberapa indikator Indeks Keamanan Informasi, diantaranya pembentukan Tim *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT).

**Tabel 2.76**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Score	571	610	623	IKU

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase aplikasi di Pemda yang telah dilakukan <i>penetration test</i> **	Aplikasi	22	22***	N/A	Indikator Urusan Diskominfo
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	88,53	94,57	96,59	Indikator Urusan Diskominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2022

Keterangan: (\*\*) Indikator sudah tidak digunakan di tahun 2021

(\*\*\*) Nilai Indikator menggunakan capaian tahun 2019

### 2.1.3.1.23 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Layanan yang diberikan kepada pemustaka antara lain inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi misalnya membaca dengan menggunakan *handphone*, yaitu CANDIL (Maca Dina *Digital Library*) memperbanyak buku digital, ekstentifikasi melalui mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat antara lain safari/*road show* kegemaran membaca, serta melalui pengembangan KOLECER (Kotak Literasi Cerdas), perlombaan, pengangkatan duta baca, iklan layanan masyarakat di berbagai media, kerja sama dengan berbagai PT, dan kolaborasi dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang transportasi yaitu PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) melalui kegiatan Makan Jengkol (Mari Kita Antar Jemput Buku dengan Kolaborasi), bantuan buku kepada komunitas, pondok pesantren, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di berbagai lapisan masyarakat dan komunitas di desa.

Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.77**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Poin	68,50	61,49	65,34	IKU
Indeks membaca masyarakat	Poin	69	61,49	61,49	IKU
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	676.609	69.256	59.509	Indikator Urusan Dispusipda
Tingkat Kepuasan Pemustaka	Persen	87	87**	5,15	Indikator Urusan Dispusipda
Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Umum	Eksemplar	536.373	563.236	595.028	Indikator Urusan Dispusipda
Jumlah Pembinaan Lembaga Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan	Unit	54	100	200	Indikator Urusan Dispusipda
	Orang	82	270	150	Indikator Urusan Dispusipda
Persentase Bahan Perpustakaan yang Dipreservasi	Persen	2,5	2,5	0,26	Indikator Urusan Dispusipda
Persentase Bahan Perpustakaan yang Dialihmediakan	Persen	1,81	1,81	1	Indikator Urusan Dispusipda
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	62,76	52,33	52,33	Indikator Urusan Dispusipda
Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat	Poin	67,68	63,54	63,54	Indikator Urusan Dispusipda
Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	74,39	68,61	68,61	Indikator Urusan Dispusipda
Laju Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Persen	2,2	2,25	3,91	Indikator Urusan Dispusipda
Persentase Karya Cetak, Karya Rekam dan Hasil Khazanah Budaya Jawa Barat yang Disimpan Sesuai dengan Peraturan	Persen	2,87	50,5	27	Indikator Urusan Dispusipda
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	0,3178	N/A	0,00055	Indikator Urusan Dispusipda



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	82,75	80,53	85,15	Indikator Urusan Dispusipda

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: \*\* Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2020 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan perpustakaan dari Tahun 2019-2021 menunjukkan kecenderungan angka capaian yang menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pandemi COVID-19 antara lain yaitu *refocusing* Anggaran Tahun 2021 yang menyebabkan beberapa program/kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga menjadi salah satu faktor penyebab keterbatasan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas membaca.

#### 2.1.3.1.24 Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui *workshop*, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala Provinsi Jawa Barat, alih

media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 28,95 persen menjadi 57,89 persen di tahun 2021.

Jumlah Khasanah Arsip Diselamatkan Pada Tahun 2019 dan 2020 tidak digunakan sebagai indikator urusan kinerja kearsipan, sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel 2.58**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	persen	11	11	57,89	IKU
Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	persen	31	66	48	IKU
Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal*	Kategori	CC	N/A	B	IKU
Persentase Jumlah Arsip yang Digitalisasi/ Dialih-Mediakan	Persen	100	100	100	Indikator Urusan Dispusipda
Jumlah Arsip yang di Preservasi	Lembar	275	375	480	Indikator Urusan Dispusipda
Jumlah Khasanah Arsip Diselamatkan	Khasanah	N/A	N/A	10	Indikator Urusan Dispusipda
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	11	28,95	57,89	Indikator Urusan Dispusipda
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	6	5	Indikator Urusan Dispusipda
Persentase Penyusutan Arsip	Persen	12	4	5.765	Indikator Urusan Dispusipda
Persentase Simpul SIKN yang Terintegrasi Se-Jawa Barat	Persen	4	4	5	Indikator Urusan Dispusipda
Survei Kepuasan	Poin	50	N/A	85.025	Indikator

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kearsipan					Urusan Dispusipda

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan perpustakaan dari Tahun 2019-2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan angka capaian. Salah satunya ditunjukkan oleh indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib dengan peningkatan sebesar 18 persen jika dibandingkan dengan kondisi awal. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara tertib hingga mencapai Kategori B. Hal ini sejalan dengan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga kondisi pengelolaan arsip pada tahun 2021 dapat dikatakan sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019.

### **2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan**

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan namun juga dilihat dari sisi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan.

Tingkat produksi perikanan tangkap di Jawa Barat cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian halnya dengan tingkat kesejahteraan pelaku sektor perikanan juga

menunjukkan angka cukup baik yang tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan mengalami peningkatan, dari 104,76 poin pada tahun 2020 menjadi 111,32 poin di tahun 2021. Adapun indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.78**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	1.518.215,58	1.435.835,45	1.491.723,08*
Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Jawa Barat	persen	2,95	1,1	3,62**
Persentase Kawasan konservasi perairan yang dikelola	persen	14,03	19,04	22,38
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	persen	51,18	51,85	64,16
Persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	persen	N/A	85	87,8
Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	persen	N/A	82	85
Nilai Tukar	Poin	126,71	104,76	111,32



Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Usaha Pertanian Sektor Perikanan				
Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	249.745,87	250.919,50	277.282,94
Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	1.268.509,71	1.184.915,96	1.214.440,14
Konsumsi Ikan per Kapita	Kg/kap/ tahun	35,81	36,41	37,73
Produksi Garam	Ton	445.727,64	41.342,98	79.314,33

Sumber:- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Tahun 2022

Keterangan: N/A pada tahun 2019 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

Penurunan produksi perikanan pada tahun 2020 dikarenakan munculnya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan sosial. Hal ini berdampak pada aspek pemasaran sektor perikanan, sehingga produsen membatasi produksi perikanan yang dilakukan karena terhambat oleh pemasarannya. Produksi garam menurun penyebabnya stok di tahun sebelumnya masih banyak di gudang garam (harga garam sangat rendah sehingga petambak garam tidak menjual hasil produksinya), faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk memproduksi garam, kualitas garam rakyat masih rendah perlunya penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas garam

#### 2.1.3.2.2 Pariwisata

Sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Terdapat indikator yang terus meningkat yaitu Jumlah event pariwisata, di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini karena event pariwisata pada masa pandemi dilakukan secara virtual atau *hybrid*. Event pariwisata tersebut diantaranya adalah: Penyelenggaraan MICE Nasional, Pergelaran Seni di ruang Publik, Riksa Budaya Jawa Barat, Pameran Seni Rupa di Galeri Rumah Teh, Pergelaran Karya Seni Unggulan, Pergelaran Karya Seni Kontemporer, Pergelaran Karya Seni Kreasi Baru, Museum Sri Baduga Expo, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Expo, Pameran Peranan Santri dalam Perjuangan Jawa Barat, dan Memperingati hari lahir Dewi Sartika dan sebagainya.

Indikator Jumlah event promosi pariwisata mengalami fluktuatif, hal ini karena pandemi COVID-19 sehingga jumlah event promosi pariwisata menurun. Event promosi pariwisata diantaranya yaitu *West Java Calendar Of Event*, *Smiling West Java*, *Famtour Halal*, *Familiarization Tour* Pasar Nusantara, *Nomadic Traveler*, Promosi *Geopark Ciletuh* pada Asia Pasific *Geopark Network Outcome*, Seni Budaya dan Wisata yang dipromosikan (1) Rampak Gendang; 2) Wayang Golek; 3)Pergelaran Silat; Wisata: 1) *Historical Railway Tour* Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Bandung; 2) Desa Wisata Cibuntu Kab. Kuningan; 3) Desa Wisata Cibuluh Kab. Subang; 4) *Fam Trip Bicycles Touring Nomad Behind* Jabar Selatan; 5) *Fam Trip Kunjungan Dubes Tunisia & Yordania* di Lembang Kab. Bandung Barat; 6) *Smiling West Java Reat Sale* Kota Bandung; 7) *Malaysia Jurnalis Fam Trip* Lembang Kab. Bandung Barat dan sebagainya.

**Tabel 2.79**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.830.000	31.610	1.120	IKU
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	49.000.000	35.513.885	47.132.138	IKU
Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	3	8	16	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	25	10	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pariwisata yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Barat melalui pintu masuk Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung, Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka dan Pelabuhan Muarajati Kota Cirebon secara keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 1.120 orang atau 3,73 persen dari target 30.000, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara dihadapkan pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan *lockdown* di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dan penutupan sementara Bandara di Jawa Barat untuk penerbangan internasional.

Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Jawa Barat sebanyak 47.132.138 orang atau 157,11 persen dari target 30.000.000 orang, peningkatan jumlah kunjungan/perjalanan wisatawan nusantara ke akomodasi dan obyek wisata selama tahun 2021 dan pada masa libur akhir tahun 2021 mulai membaik di tengah pandemi COVID-19. Dengan okupansi kamar hotel dan penginapan di akhir tahun 2021 meningkat signifikan. Kondisi PSBB mulai melonggar di akhir tahun 2021, sehingga objek wisata mendapat jumlah wisatawan yang meningkat pada masa libur akhir tahun.

### 2.1.3.2.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Jawa Barat, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, diantaranya : penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok



untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya adalah produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura, laju peningkatan kelompok tani yang terfasilitasi sarana prasarana perkebunan, laju peningkatan poktan yang terfasilitasi penanganan bencana perkebunan, laju peningkatan perkebunan besar yang mendapatkan rekomendasi teknis usaha perkebunan, persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha perkebunan yang dibina, produksi komoditas peternakan, Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular, Persentase Peningkatan mutu produk hewan. Terdapat indikator yang mengalami fluktuatif, yaitu Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (Registrasi Lahan dan Kebun) yang mana pada tahun 2020 sebesar 110 sertifikat dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 493 sertifikat. Capaian data indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.80**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	
Produksi Padi	Ton	9.084.957	9.016.773	9.113.573	
Luas Tanam Padi Sawah	Hektar	1.903.360	1.834.326	1.944.018	
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	5,88*	6,17**		
Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (Registrasi Lahan dan Kebun)	Sertifikat	474	110	493	
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	Persen	-0,07	0,01	-0,02	
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	Persen	0,04	0,01	0,16	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	-6,94	0,88	-2,15	
Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	4,21	1,36	16,10	



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sektor Perkebunan	Poin	108,18	89,10	101,33	
Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Sarana Perkebunan	Persen	N/A	N/A	29,4	
Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen	N/A	N/A	20	
Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan	Persen	N/A	N/A	25	
Laju Peningkatan Perkebunan Besar yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan	Persen	N/A	N/A	50	
Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	Persen	N/A	N/A	26,84	
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sektor Peternakan	Poin	125,01	94,44	95,25	IKU Dinas
Produksi komoditas peternakan (ton):					IKU Dinas
- Daging	Ton	1.080.775	941.995	1.109.769	
- Telur	Ton	593.129	710.655	694.674	
- Susu	Ton	300.337	281.199	283.361	
Persentase Peningkatan mutu produk hewan	persen		4,6	340	IKU Dinas
Rata-Rata Performa Ternak yang Sesuai Standar	persen		N/A	47	Indikator Kinerja Program
Tingkat Pemenuhan Prasarana Peternakan	persen		N/A	26	Indikator Kinerja Program
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	persen		N/A	64	Indikator Kinerja Program



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	
Menular					
Persentase Pelaku Usaha Peternakan dengan produktivitas yang Meningkatkan Kinerjanya	persen		N/A	25	Indikator Kinerja Program
Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	502	801	920	Indikator Kinerja Program
Peningkatan Mutu Produk Peternakan:					Indikator Kinerja Program
a. Daging	Persen	58	92	85	
b. Telur	Persen	80	93	93	
c. Susu	Persen	80	79	93	
Jumlah Kawasan Usaha Peternakan	Kawasan	5	5**	2	Indikator Kinerja Program
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa:					Indikator Kinerja Program
a. <i>Anthrax</i>	Kasus/tahun	0	0**	0	
b. AI	Kasus/tahun	26	18	11	
c. <i>Brucellosis</i>	Prevalensi	1,74	1,23	0,86	
d. Rabies	Kasus/tahun	1	3	0	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2022;  
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2022.

Keterangan : \* Data Sementara

\*\* Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

#### 2.1.3.2.4 Kehutanan

Kewenangan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kehutanan adalah rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, sehingga sektor kehutanan memiliki peran penting dari segi lingkungan/ekologi yaitu dalam upaya menurunkan luas lahan kritis dan emisi gas rumah kaca. Selain memberikan peran dalam lingkungan sektor kehutanan juga mempunyai peran dari segi lingkungan/ekologi, melalui hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Indikator kinerja urusan kehutanan ditunjukkan oleh Indeks Kulaitas Tutupan Lahan, Persentase Tutupan Lahan dan Nilai Produksi Hasil Hutan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Pencapaian Target Indeks Kulaitas Lahan dan Peningkatan presentase tutupan hutan dilakukan melalui rehabilitasi pada lahan kritis, baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Selain itu, juga adanya pencaanngkan Gerakan Tanam dan Pelihar Pohon (GTPP) oleh Gubernur Jawa Barat dengan target penanaman sebanyak 50 juta pohon pada tahun 2023 yang pada tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 53 juta pohon yang tersebar di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibarengi dengan peluncuran aplikasi *E-Tanam* untuk memetakan lahan kritis yang ada di Jawa Barat serta dilengkapi dengan peta digital yang berfungsi menginformasikan lokasi-lokasi lahan kritis dan lokasi-lokasi yang sudah dilaksanakan penanaman.

Peningkatan peran sektor kehutanan dari segi ekonomi dilakukan dengan memacu produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Peningkatan hasil hutan kayu diarahkan pada hutan rakyat, sementara hasil hutan bukan kayu dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan sentra budidaya lebah madu, jamur kayu, pemanfaatan jasa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sebagai objek wisata.

Berikut ini indikator yang dapat menggambarkan pembangunan di sektor kehutanan selama periode Tahun 2019-2021, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.81**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	Point	N/A	N/A	40,78
Presentase Tutupan Hutan	Persen	33,67	45,43	43,17
Nilai Produksi Hasil Hutan	Rp. Milyar	N/A	N/A	1.944,51

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2022

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Persentase tutupan hutan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena Perhitungan Tutupan Hutan menggunakan citra landsat Resolusi Sedang. Sementara itu realisasi tahun 2020 lebih tinggi daripada realisasi tahun 2021 karena adanya perbedaan penggunaan resolusi citra landsat dalam analisisnya dan adanya kegiatan penebangan pada Kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani dan belum dilaksanakan Reboisasi.

Indikator kinerja urusan kehutanan pada Tahun 2019 - 2021 dapat dicapai melalui indikator program, yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.82**  
**Indikator Kinerja Program pada Urusan Kehutanan**

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi		2021	
			2019	2020	Target	Realisasi
1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahan Pengelolaan Hutan	Persen	N/A	N/A	71	72.7
2	Persentase Penanganan Lahan Kritis	Persen	N/A	N/A	3	3,54
3	Tingkat Kerusakan Hutan	Persen	0	0,78	0.7	0.1
4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	108,15	12,45	10	31.46
5	Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	Persen	-5,75	0	10	-11.2
6	Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan	Persen	5	0	5	3.75
7	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Mengikuti Bimtek/Diklat	Orang	N/A	N/A	75	297
8	Penurunan Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Daerah Aliran Sungai	Mg/L	N/A	N/A	41.55	23,84 Mg/L

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2022

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Pencapaian indikator program Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahan Pengelolaan

Hutan berupa dokumen Arahan Pengelolaan Hutan. Target Penanganan Lahan Kritis tercapai melalui :

- a. Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) yang melibatkan semua *stakeholder* di Jawa Barat baik dari Instansi Pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.
- b. Aplikasi Simantri bibit untuk mengetahui lokasi penanganan lahan kritis sampai pada tingkat koordinat.
- c. Pembangunan Hutan Rakyat dari sumber dana APBD dan DAK (APBN), Penghijauan Lingkungan di luar Hutan Negara melalui rehabilitasi *Mangrove* dan Hutan Pantai.

Tingkat Kerusakan Hutan mengalami penurunan yang cukup signifikan karena menurunnya Kejadian Bencana Alam, menurunnya Perambahan Kawasan Hutan dan Perusakan Kawasan Hutan. Peningkatan Produksi Hasil Hutan diperoleh dari meningkatnya produksi hasil hutan Kayu dan Bukan Kayu berupa Jamur kayu, madu, bambu, getah pinus, daun kayu putih baik yang berasal di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan. Target Penerimaan Dari Jasa Lingkungan tidak dapat tercapai karena imbas dari pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat kunjungan masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata akibat adanya PPKM Level 3 dan Level 4. Target Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan juga tidak dapat tercapai karena penurunan Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar yang sudah tidak beroperasi. Target Nilai *Total Suspended Solid* (TSS) di Daerah Aliran Sungai tercapai karena erosi pada daerah aliran sungai mengalami penurunan sebagai implementasi dari Program penanganan lahan kritis pada DAS Citarum berupa pelaksanaan Rehabilitasi Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis, sehingga Erosi di daerah Hulu dapat ditekan.

Realisasi Penacapaian Taerget Indikator Kinerja Urusan kehutanan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.83**  
**Realisasi Indikator Kinerja Urusana Tahun 2021**

No.	Kinerja	Indikator	Realisasi
1.	Meningkatnya luas hutan	Persentase luas lahan	3.254,95 Ha

No.	Kinerja	Indikator	Realisasi
	dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	kritis yang direhabilitasi	
2.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	34.468,78 Ha

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2022)

### 2.1.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan dan tantangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral semakin kompleks pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi mekanisme perizinan di sektor ketenagalistrikan. Selain itu, air permukaan belum dapat memainkan peran sebagai sumber utama suplai air sementara eksploitasi air tanah yang tak terkendali dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar (turunnya muka air tanah, penurunan kualitas air, intrusi air laut, *land subsidence*).

Masih minimnya tingkat kesadaran pengusaha pertambangan dalam aplikasi *good mining practices* menjadi menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan usaha pertambangan yang tertib secara administrasi dan teknis melalui strategi yang dilakukan yakni meningkatkan pengelolaan perusahaan sumber daya pertambangan, melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaku usaha pertambangan dan inventarisasi data dan pengembangan usaha pertambangan.

Salah satu capaian indikator pada bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu capaian jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat. Nilai capaian pada tahun 2020 sebesar 57.257 Gwh. Nilai capaian ini lebih kecil dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 63.381 GWh. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penggunaan listrik khususnya pada sektor industri akibat pandemi, sehingga dilakukan penyesuaian target mengingat adanya ketidakpastian



menghadapi pandemi COVID-19. Akan tetapi, pada tahun 2021 nilai capaian jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat meningkat menjadi 61.816 GWh dibandingkan tahun 2020. Faktor pendukung peningkatan tersebut karena adanya peningkatan konsumsi listrik baik dari pelanggan PLN dan non PLN. Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang energi dan sumber daya mineral dalam kurun waktu Tahun 2019-2021, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.84**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	63.381	57.257	61.816	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Persen	1,84	1,84	1,90	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	40,87	46,65	48,33	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Persen	2,06	2,37	10,46	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Rasio Sumur Imbuhan Terhadap Sumur Produksi	Persen	N/A	N/A	41,53	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil Air Tanah yang Taat Peraturan	Persen	N/A	N/A	59,99	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	N/A	N/A	58,06	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	N/A	N/A	60,91	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil	Persen	N/A	N/A	58,73	Indikator



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta					Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	N/A	N/A	61,73	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	N/A	N/A	56,22	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	N/A	N/A	56,05	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	N/A	N/A	61,6	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Sample Air Tanah yang Diuji Kualitasnya	Persen	N/A	N/A	1,56	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi	Persen	N/A	N/A	58,81	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	N/A	N/A	59,42	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	N/A	N/A	58,06	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	N/A	N/A	52,38	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang	Persen	N/A	N/A	61,73	Indikator Kinerja Program Perangkat



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Dinas IV Bandung					Daerah
Persentase Usaha Pertambahan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	N/A	N/A	56,25	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambahan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	N/A	N/A	61,9	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambahan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	N/A	N/A	58	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Pengujian Kualitas Bahan Tambang Di Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	41,33	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Usaha Pertambahan yang Tertib Teknis	Persen	N/A	N/A	48,33	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Jumlah Reduksi CO2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	Ton Co2eq	N/A	N/A	932,7	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Komoditas EBT yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Bidang Energi	Persen	N/A	N/A	50	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan	Persen	N/A	N/A	85	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	Persen	N/A	N/A	60,65	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Cabang Dinas Wilayah II Bogor	Persen	N/A	N/A	62,36	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta	Persen	N/A	N/A	60,53	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung	Persen	N/A	N/A	70,82	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang	Persen	N/A	N/A	76,25	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	N/A	N/A	72	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon	Persen	N/A	N/A	62,27	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung					Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah
Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	1.302	1.146,6	1.280,53	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 2022

Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

### 2.1.3.2.6 Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan di antaranya terkait dengan peningkatan atau penurunan nilai ekspor bagi sektor non migas. Peningkatan ini pada tahun 2019 dan 2020 diukur dengan indikator Nilai Ekspor Non Migas yang dinyatakan dengan satuan miliar. Namun, pada tahun 2021, indikator ini mengalami perubahan menjadi Pertumbuhan Ekspor Non Migas dengan satuan persen. Perubahan satuan ini ditujukan untuk memperjelas seberapa besar pertumbuhan yang dialami oleh indikator tersebut.

Dalam pengukuran kinerja bidang perdagangan tahun 2021, hampir semua indikator yang digunakan telah berubah, sehingga tidak dapat dinyatakan pada tahun 2019 dan 2020. Perubahan ini dikarenakan adanya penyesuaian indikator daerah dengan indikator yang disepakati dengan pemerintah pusat. Salah satunya indikator Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen yang digunakan untuk mengukur banyaknya pengaduan yang ditangani sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Total terdapat 8 (delapan) indikator baru yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.85**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persen	-1,38	1,44	27,51	IKU Dinas
Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persen	-1,38	1,44	27,51	IKU Dinas
PDRB Sektor Perdagangan	Rp Triliun	323,64	310,23	319,59	IKU Dinas
Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program
Laju Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	N/A	N/A	29,53	Indikator Kinerja Program
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	N/A	N/A	4	Indikator Kinerja Program
Nilai Ekspor Non Migas	Milyar USD	N/A	N/A	12,46	Indikator Kinerja Program
Persentase Konsumen yang dilayani dan Ditangani	Persen	N/A	N/A	88,53	Indikator Kinerja Program
Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Program
Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persen	N/A	N/A	27,51	Indikator Kinerja Urusan
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	N/A	N/A	82,81	Indikator Kinerja Urusan
Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persen	N/A	N/A	75,64	Indikator Kinerja Urusan
Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan Ketentuan berlaku	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Urusan
Tertib Usaha	Persen	N/A	N/A	100	Indikator Kinerja Urusan
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	N/A	N/A	32,53	Indikator Kinerja Urusan
Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	N/A	N/A	4	Indikator Kinerja Urusan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Inflasi Pangan Bergejolak	Persen	N/A	N/A	2,67	Indikator Kinerja Urusan
Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Persen	N/A	N/A	N/A	Indikator Kinerja Urusan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat, 2022

Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

### 2.1.3.2.7 Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap *input* atau bahan dasar yang diolah. Dengan didukung oleh pemulihan ekonomi dunia, ekspor industri pengolahan meningkat seiring dengan regulasinya yang semakin mudah. Kinerja sektor industri pengolahan dapat dilihat dari besarnya PDRB Industri Non Migas di Jawa Barat.

Dalam pengukuran kinerja bidang perindustrian tahun 2021, hampir semua indikator yang digunakan berubah karena adanya penyesuaian indikator dengan pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan indikator-indikator yang baru tidak dapat dinyatakan pada tahun 2019 dan 2020. Terdapat 5 (lima) indikator baru yang digunakan, yaitu Presentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas, Persentase kontribusi sektor Industri pengolahan non Migas terhadap PDRB, Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas, dan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

**Tabel 2.86**  
**Capaian Indikator Bidang Perindustrian**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
PDRB Industri Non Migas	Rp Triliun	884,12	823,6	923,79	IKU Dinas
Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	Unit Usaha	N/A	N/A	261	Indikator Kinerja Program



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Keterangan
Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Persen	N/A	N/A	2,09	Indikator Kinerja Program
Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SII Nas	Persen	N/A	N/A	88,18	Indikator Kinerja Program
Presentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas	Persen	N/A	N/A	4,22	Indikator Kinerja Urusan
Persentase kontribusi sektor Industri pengolahan non Migas terhadap PDRB	Persen	N/A	N/A	41,80	Indikator Kinerja Urusan
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Milyar)	Nilai	N/A	N/A	33,47	Indikator Kinerja Urusan
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Orang	N/A	N/A	4.323.002	Indikator Kinerja Urusan
Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rupiah	N/A	N/A	106.92 Triliun	Indikator Kinerja Urusan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat, 2022

Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

### 2.1.3.2.8 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi meliputi program perencanaan kawasan transmigrasi, program pembangunan kawasan transmigrasi, dan program pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam upaya mempersiapkan transmigran agar mampu mengembangkan berbagai program kegiatan produktif di lahan transmigrasi, maka para calon transmigran memerlukan beberapa

pelatihan guna membekali dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi yang kuat dalam menjalankan program transmigrasi di daerah penempatan nantinya. Selama periode Tahun 2019-2021, telah dilakukan pelatihan calon transmigran sebagaimana data di bawah ini.

Alokasi target penempatan calon transmigran ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Setiap tahun alokasi target pengiriman berkurang. Pada tahun 2018 target pengiriman yang diterima oleh Jawa Barat sebanyak 67 kepala keluarga (KK), kemudian menjadi 40 KK pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada target penempatan calon transmigrasi karena dampak dari pandemi COVID-19 dan pada tahun 2021 hanya 40KK.

Kurangnya informasi antara pusat dengan daerah menyebabkan calon transmigran menghadapi kondisi yang sulit. Kesulitan calon transmigran dalam menghadapi perbedaan karakteristik fisik daerah penempatan dengan daerah asal calon transmigran, sehingga calon transmigran harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan karakter daerah penempatan. Daerah penempatan transmigran saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI., sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi ketransmigrasian.

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dimaksudkan untuk sinkronisasi pelaksanaan ketransmigrasian antara daerah pengirim dengan daerah penempatan. Pada kenyataannya KSAD ini sulit untuk ditindaklanjuti pasca-penempatan transmigran. Hal ini disebabkan oleh penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan Kementerian terkait. Dikarenakan semua alokasi target dari Kemendes sudah terpenuhi realisasinya.

**Tabel 2.87**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Persentase transmigran yang ditempatkan	Persen	N/A	N/A	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022  
Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

### **2.1.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **2.1.3.3.1 Sekretariat Daerah**

##### **1) Nilai SAKIP**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran indikator tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dilakukan oleh Kemenpan RB atas laporan dan evidence kinerja yang telah disiapkan oleh Sekretariat Daerah. Fokus evaluasi AKIP pada implementasi Sistem AKIP yaitu 80 persen pelaksanaan sistem dan 20 persen capaian kinerja, dengan komponen terdiri dari Perencanaan Kinerja (30 persen), Pengukuran Kinerja (25 persen), Pelaporan Kinerja (15 persen), Evaluasi Internal (10 persen), dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (20 persen).

Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 Nilai SAKIP Provinsi Jawa Barat adalah dengan kategori A. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

## 2) **Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPKN (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuann dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skoring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

Untuk tahun 2021, pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Setda melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun perolehan skoring LPPD Provinsi Jawa Barat ditargetkan 3,329 dan berdasarkan data sementara, kinerja dapat tercapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, kinerja tercapai 99,25 persen dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diperoleh pertumbuhan sebesar 0,60 persen. Dengan capaian 100 persen, diperoleh efisiensi

sebesar Rp31.840.217,00 atau sebesar 5,72 persen dari pagu Rp556.423.834,00 dengan realisasi Rp524.583.617,00. Skoring 3,329 memperlihatkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan sangat tinggi. Kondisi ini didorong oleh kinerja Perangkat Daerah yang sangat baik dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan. Selain itu, didukung pula oleh pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh 6 (enam) perangkat daerah.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian LPPD Jawa Barat selama periode 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dengan status sangat tinggi.

**Tabel 2.88**  
**Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan**  
**Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Uraian	2019	2020	2021
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat 2 / Skor: 3,34 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,31 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,329/Status: sangat tinggi

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Ketercapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan didorong oleh adanya beberapa upaya yaitu:

- Menginternalisasikan hasil LPPD ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan renja melalui harmonisasi target capaian kinerja sebagai dasar prioritas pengalokasian anggaran;
- Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang masih rendah sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih baik;
- Menyelenggarakan bimbingan teknis bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap metode dan cara penghitungan capaian kinerja

- serta menyusun data dukung akurat yang dapat dipertanggungjawabkan; serta
- d) Menyusun manual tata cara perhitungan dan penyajian data dukung yang disepakati bersama oleh pusat, provinsi dan kabupaten kota.

### **3) Level Kematangan/Maturitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)**

Salah satu indikator peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah bidang perekonomian pembangunan adalah melalui pengukuran level kematangan/maturitas PBJ. Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Penetapan Indikator Level Kematangan/Maturitas UKPBJ didasari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019 – 2020 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Pimpinan K/L yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kantor Staf Presiden tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020 dimana salah satu aksinya adalah Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa yang salah satu ukuran keberhasilannya adalah dilaksanakannya Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Tingkat Maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi.

Dalam penjabarannya, Level Maturitas dibagi menjadi 4 (empat) Domain (Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) yang dibagi lagi kedalam 9 (sembilan) Variabel (Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, Manajemen Penyedia dan Manajemen Pengadaan, Pengorganisasian Kelembagaan, Tupoksi Kelembagaan, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Sistem Informasi). Realisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Level Kematangan/Maturitas PBJ

mencapai tingkat kematangan pada level 3 (tiga) proaktif. Adapun yang menjadi faktor pendorong tercapainya target diatas antara lain:

- a) Terbentuknya kelembagaan UKPBJ melalui terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2019 yang memiliki tugas, fungsi serta organisasi kelembagaan yang jelas dan terdokumentasi sesuai peraturan perundangan.
- b) Terselenggaranya layanan pengadaan secara elektronik (SIRUP, *e-Tendering*, *e-Purchasing*, SIKAP) secara terpadu.
- c) Terselenggaranya proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak.

**Tabel 2.89**  
**Level Maturitas UKPBJ**

Uraian	2019	2020	2021
Level Maturitas Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 3 /Status: Proaktif	Level 3 /Status: Proaktif	Level 3 /Status: Proaktif

Sumber: Kementerian PAN RB

Target Pencapaian Tingkat Kematangan/Maturitas PBJ pada Level 3 atau Proaktif dimana beberapa hal perlu diperhatikan diantaranya indikator tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya yaitu Level Kematangan/Maturitas PBJ pada daftar IKU Tahun 2018 -2023. Perubahan indikator didasari pada terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### **4) Penggunaan *E-Procurement***

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan 4 (empat) penghargaan *National e-Procurement Award* pada tahun 2016. Dengan prestasi ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai yang terbaik secara nasional dalam





Rapat Kerja Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Dua dari 4 (empat) penghargaan itu adalah penghargaan individu kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai Pejuang LPSE yang Konsisten Sejak Awal Kehadiran LPSE di Indonesia pada akhir bulan Agustus 2007 yang mana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai salah satu Pusat LPSE Regional yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 28 September 2007. Gubernur Jawa Barat sebelumnya sangat mendukung implementasi LPSE di Provinsi Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi dengan Kegiatan *Grand Launching* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Ikrar Bersama 18 (delapan belas) Institusi mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK); Revitalisasi Manajemen Pemerintahan; Pencanaan Peningkatan Disiplin Pegawai; Pencanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta Uji Coba Penerapan Tunjangan Berbasis Kinerja dan pembentukan *Desk* Akuntabilitas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Pengadaan barang dan jasa secara nasional diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan yang terakhir Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Secara nasional pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Dengan terbitnya peraturan



presiden terkait pengadaan barang dan jasa tersebut, setiap kepala instansi pemerintah harus membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan kepala UKPBJ sebagai jabatan struktural dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dan Keputusan Gubernur Nomor 027/Kep.405-Dalbang/2018 tentang Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengelolaan pengadaan barang /jasa;
- b) Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik;
- c) Pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d) Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Barat (Biro Pengadaan Barang Jasa) berada pada Sekretariat Daerah di bawah Asisten Daerah II yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Pengadaan Barang Jasa, Bagian Pembinaan dan Advokasi serta Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan kepada penyedia, UKPBJ, Auditor dan Intansi. Pelayanan kepada penyedia telah dilakukan sebanyak 38.681 penyedia. Paket lelang yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dengan total paket tender, seleksi, tender cepat, dan penunjukan langsung sebanyak 518 paket dengan total pagu anggaran Rp2.439.186.040.086,- dan juga telah dilaksanakan paket non tender sebanyak 1872 paket dengan nilai transaksi sebesar Rp251.298.019.768,36.

**5) Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti.**

Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Sasaran IKU Gubernur Jawa Barat, dijabarkan dalam IKU Kepala Biro BUMD dan Investasi dalam bentuk persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah yang ditindaklanjuti.

Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi daerah yang ditindaklanjuti adalah tingkat penyelesaian bahan perumusan kebijakan umum, hasil koordinasi, monitoring dan fasilitasi administratif aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah. Kondisi tersebut akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, dan isu-isu strategis serta disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Biro BUMD dan Investasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro BUMD dan Investasi periode Januari sampai dengan Desember 2021 yaitu Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi,

pengendalian dalam aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti, terealisasi 95,25 persen sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dinyatakan **Memuaskan**.

**6) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti.**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian yang menunjukkan besar sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2021 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian.

Pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti.

**7) Indeks Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah.**

Hasil survei indeks kepuasan pelayanan Biro umum tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan responden/*sample* sebanyak 550 orang meliputi pegawai lingkup Sekretariat Daerah dan BPKAD dengan menilai 20 (dua puluh) unsur pelayanan menghasilkan IKM dengan kualifikasi nilai (Baik). Hal ini didukung pula antara lain dengan terselenggaranya berbagai kegiatan sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan lancar serta pelayanan

dapat terlaksana optimal dari 3 (tiga) aspek pelayanan yaitu aspek layanan umum dan kepegawaian, aspek administrasi keuangan, serta aspek pengelolaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target Biro Umum didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah.

#### **2.1.3.3.2 Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

##### **1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat telah tersedia atau ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

##### **2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat telah tersedia atau ada.

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

### **3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut: (a) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013; (b) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; (c) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; (d) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; (e) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; (f) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; (g) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, (h) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, (i) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, dan (j) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

### **4) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun

bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 98,43 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100 persen.

## 5) Penerapan SIPD

Sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menggunakan sistem informasi berbasis *online* dalam proses perencanaan di Provinsi Jawa Barat. Sistem ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan: 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai menggunakan sistem informasi yang dinamakan *RKPD Online* 2101, dan pada tahun 2019 sistem ini mengalami pengembangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dinamakan “Si Rampak Sekar”, singkatan dari Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sistem ini merupakan salah satu media agar proses perencanaan pembangunan dapat selaras, sinkron, sinergis, dan terintegrasi



antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Sistem ini digunakan untuk proses perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2020-2021.

Seiring dengan pemberlakuan Si Rampak Sekar, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan: 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

#### **2.1.3.3.3 Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Namun bila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, maka gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

**Tabel 2.90**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	Proses audit BPK
Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: [www.sakip.jabarprov.go.id](http://www.sakip.jabarprov.go.id) dan Lakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

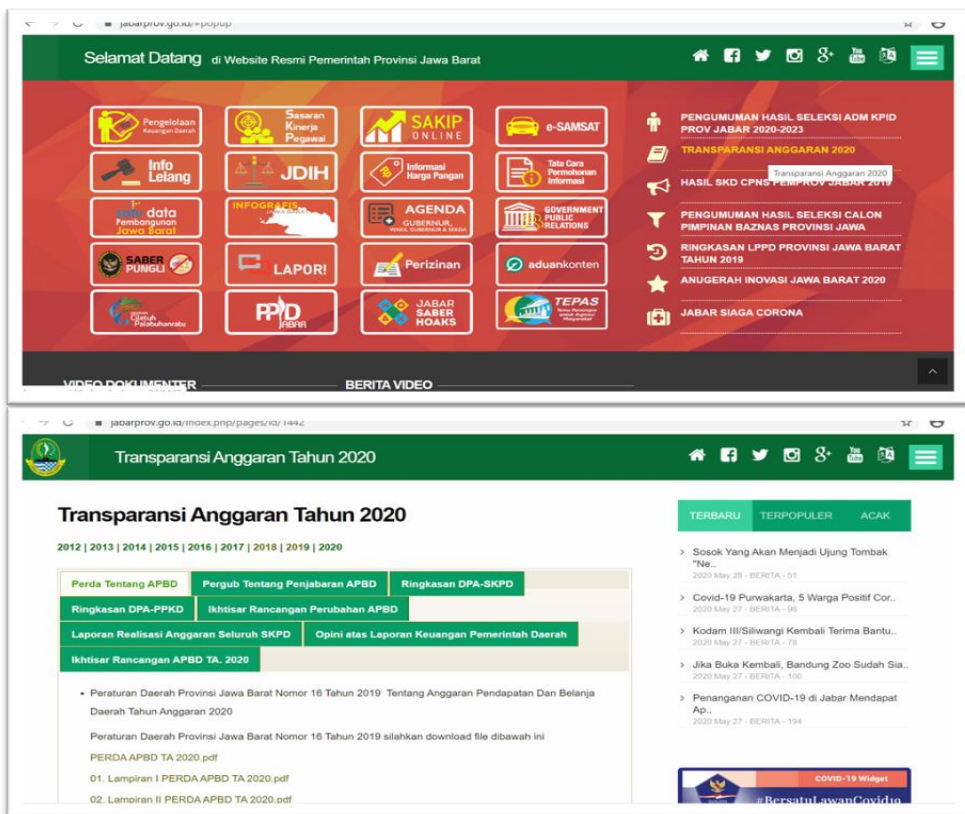
Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani

permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Guna mendorong keterbukaan informasi publik yang terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan yang dapat diakses secara *online* oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui *website* di alamat <https://jabarprov.go.id/> pada menu Transparansi Anggaran.

**Gambar 2.45**  
**Informasi APBD Provinsi Jawa Barat secara Online**



Sumber : <https://jabarprov.go.id/>

#### 2.1.3.3.4 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, yaitu: 1) Membuat

dan/atau menyempurnakan peraturan tentang kepegawaian di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 2) Penyempurnaan data pegawai dan aplikasi kepegawaian; 3) Mengembangkan sistem digital *assessment* secara *online*; 4) Sudah mengimplementasikan *Corporate University* dan dilaksanakannya pengembangan kompetensi secara *hybrid* (daring dan tatap muka) sehingga dapat menampung peserta lebih banyak; 5) Adanya *early warning* pada aplikasi KMOB terkait kedisiplinan pegawai dan tindakan preventif berupa pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 44 kali selama tahun 2021; dan 6) Adanya SKP *online* pada aplikasi TRK.

**Tabel 2.91**  
**Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Indeks Sistem Merit	Poin	277	375,50	375,50	IKU
Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL	Persen	65	92,16	104	IKU
Persentase Akreditasi Penyelenggaraan Diklat*	Persen	100	100	100	IKU
Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,05	0,11	0,09	
Persentase pegawai yang mendapat nilai SKP >76%	Persen	87,89	93,78	99,23	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, 2022

#### **2.1.3.3.5 Penelitian dan Pengembangan**

Indikator kinerja urusan fungsi penelitian dan pengembangan pada tahun 2021 umumnya menunjukkan peningkatan dari tahun 2020. Terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya mengalami penurunan yaitu persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual dari tahun 2020 sebesar 20,8 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2021. Meski demikian, jika dilihat dari target realisasi persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual pada tahun 2021 yaitu sebesar 20 persen maka realisasi pada tahun 2021 tetap mencapai target. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.92**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Ket
Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/Pemerintah Kab.Kota di Jabar/Masyarakat/Dunia Usaha/Pihak Lainnya*	Persen	N/A	N/A	100	IKU
Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah	N/A*	N/A*	N/A*	
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	4	5	13	
Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	10	11	22	
Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk Mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	20	26	41	
Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan	Persen	20	12,5	20	
Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	Persen	20	10,5	20	
Persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual	Persen	37,1	20,8	20	
Persentase kajian kelitbangan yang didiseminasikan kepada perangkat daerah atau stakeholder lainnya	Persen	16,7	17,14	20	
Persentase kerja sama penelitian yang ditindaklanjuti	Persen	20	20	20	
Persentase dokumen perencanaan, peningkatan kualitas aparatur, sarana prasarana dan dokumen pengelolaan keuangan	Persen	100	100	100	

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2022  
Keterangan : (\*) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

### 2.1.3.3.6 Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindaklanjuti (B). Berdasarkan data beberapa tahun terakhir,

indikator kinerja urusan pengawasan disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.93**  
**Capaian Indikator Kinerja Pengawasan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2021**

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Ket.
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Kabupaten/kota					
	% S (tindak lanjut yang selesai)	persen	61,6	61,6	57,45	
	% DP (tindak lanjut dalam proses)	persen	26,16	26,16	36,68	
	% B (belum ditindaklanjuti)	persen	12,24	12,24	5,44	
2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan terhadap PD					
	% S	persen	51,46	51,46	91,08	
	% DP	persen	22,33	22,33	3,13	
	% B	persen	26,21	26,21	66,67	
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK					
	% TS	persen	66,07	66,07	58,96	
	% TB	persen	27,11	27,11	34,88	
	% BT	persen	5,16	5,16	4,16	
4.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	Poin	3,259	3,309	N/A	IKU
5.	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	A	A	A	IKU
6.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP	IKU
7.	Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	94	N/A	58,96	
8.	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	83	N/A	91,08	
9.	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah	Persen	92	91,80	91,80	IKU



No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Ket.
	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)					
10.	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	100	N/A	100	
11.	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	3	3	
12.	Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	Persen	100	100	100	
13.	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	Persen	77	N/A	90	
14.	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikasi	Orang	80	80	78	
15.	Jumlah auditor dan P2UPD yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor madya	Orang	36	36	34	
16.	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern	Level	III	III	III	IKU

Sumber: Inspektorat, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja urusan pengawasan mengalami kenaikan dan terdapat pula yang tetap. Akan tetapi terdapat indikator yang realisasinya mengalami penurunan yaitu jumlah auditor dan P2UPD bersertifikasi dari tahun 2020 sebanyak 80 orang menjadi 78 orang di tahun 2021. Kemudian, jumlah auditor dan P2UPD yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor madya juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 36 orang menjadi 34 orang di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun. Selain itu, pada Indikator lainnya yaitu hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional masih menunggu Kementerian Dalam Negeri merilis hasil penilaian EPPD.

#### 2.1.3.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Faktor Pendorong yang menyebabkan target tercapai pada indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa dan Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi adalah kegiatan sosialisasi dan pembinaan





dilaksanakan melalui luring dan daring, sehingga jumlah peserta dapat mencapai target.

Target Indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa sebesar 100 persen dengan diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Kesatuan Bangsa yaitu sebanyak 5.894 orang sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun 2021, capaian target Indikator untuk Tingkat Bina Kesatuan Bangsa sebesar 135 persen, diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Kesatuan Bangsa yaitu sebanyak 7.962 orang. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat telah cukup efektif untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan di tengah adaptasi kebiasaan baru dimana dicegahnya kegiatan yang mengumpulkan massa serta himbauan untuk menjaga jarak sehingga diperlukan metode baru dalam rangka upaya pembinaan tentang kesatuan bangsa. Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pertama yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan pendidikan bela negara, pemilihan Duta Bela Negara, peningkatan wawasan kebangsaan, dan pemantapan ideologi bangsa, tujuan dari kegiatan ini adalah menguatkan nilai – nilai Bela Negara di Masyarakat, mensosialisasikan Bela Negara, dan menanamkan nasionalisme di kalangan generasi muda. Selain itu Bakesbangpol bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka memberikan pemahaman kepada ASN berupa peningkatan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan kontra Radikalisme terhadap ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui *link zoom* dan *youtube* yang hampir diikuti oleh seluruh ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terhadap kalangan milenial diwakili oleh siswa SMA, SMK dan SLB se Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan lainnya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang ideologi bangsa, selain itu juga terlaksananya kegiatan *Ormas Day* dalam rangka meningkatkan toleransi dan hubungan harmonis diantara organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat, Kegiatan Penguatan Ekonomi Nasional berbasis era digital di Jawa Barat dengan tujuan memantau keberadaan daerah rawan ketahanan ekonomi di Jawa Barat dan membuat peta daerah kerawanan ketahanan ekonomi,

kegiatan Optimalisasi peran FKUB dalam moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi dalam menjaga kondusifitas di wilayah Jawa Barat, serta kegiatan pengawasan orang asing, monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah untuk menjaga kondusifitas daerah serta kegiatan rencana aksi penanganan konflik sosial di Jawa Barat telah terlaksana dengan baik.

Selain itu, upaya peningkatan cakupan masyarakat yang terbina dilakukan melalui kanal media sosial (*instagram*), berbagai konten terkait pemahaman nilai-nilai Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan terus digaungkan berupa interaksi-interaksi *stories*, *quizz*, dan edukasi lainnya untuk para netizen *instagram* bangkit.jabar. Hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik, terlihat dari *report Instagram Insight* bangkit.jabar yang dalam pemantauan 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober, November, Desember 2021) menunjukkan hasil cukup signifikan yang terlihat dari jumlah *follower* dan aktifitas *netizen* dalam merespon konten tersebut. Gambaran perkembangan kanal Instagram tersebut, dapat dilihat pada kondisi bulan Desember 2021, sebagai berikut.

**Gambar 2.46**  
**Informasi APBD Provinsi Jawa Barat Secara Online**



Sumber : Insight Bangkit Jabar, Desember 2021

Data dimaksud dapat di klaim sebagai proses pembinaan yang secara tidak langsung berjalan efektif, dan metode seperti ini



terus dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah ditujukan untuk seluruh elemen masyarakat, namun lebih dominan bagi kalangan generasi muda di Jawa Barat, selebihnya sasaran ditujukan untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota dan pengurus ormas/LSM, pelaku budaya. Hal ini ditujukan untuk memfokuskan sasaran pada kelompok masyarakat / penduduk usia produktif di Jawa Barat.

Target Indikator Tingkat Bina Demokratisasi sebesar 100 persen dengan diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Demokratisasi yaitu sebanyak 1.600 orang sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun 2021, capaian target Indikator untuk Tingkat Bina Demokratisasi sebesar 103 persen, diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Demokratisasi yaitu sebanyak 1.652 orang, hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja kedua telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Ketercapaian ini berkaitan dengan upaya Bakesbangpol dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota parpol serta kegiatan penguatan aspek IDI dalam rangka memberikan pemahaman tentang pendidikan politik di Jawa Barat. Kegiatan tersebut khususnya adalah Diseminasi Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila, Jambore Infrastruktur Politik Jawa Barat, Pendidikan Politik bagi Masyarakat, Penguatan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat, Penguatan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, Bimbingan Teknis Keuangan bagi Pengurus Partai Politik, Model Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila, Pemantauan Perkembangan Politik di Jawa Barat, dan Rapat Koordinasi Tim Pokja IDI.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung indikator Tingkat Bina Demokratisasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan Jawa Barat, *stakeholder* di Jawa Barat, serta para pelaku politik dan demokrasi di Jawa Barat, dan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat dalam rangka membina kehidupan berdemokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi di Jawa Barat.

Kemudian capaian indikator kinerja kesatuan bangsa dan politik yang lainnya adalah Jumlah ormas yang terdaftar di Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 meningkat sebesar 5,96 persen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sedangkan dari jumlah tersebut ormas yang aktif meningkat sebesar 16 persen. Kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.94**  
**Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2021**

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Ket
1.	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Persen	70,78	0,0111 (estimasi Anggaran)	135	IKU
2.	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Persen	70,78	0,00099 (estimasi Anggaran)	103	IKU
3.	Jumlah Ormas Terdaftar	Unit	1.290	1.290	1.367	
4.	Jumlah Ormas Aktif	Unit	402	468	545	
5.	Persentase Ormas Aktif	Persen	70,78	36,28	39,87	

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2022

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

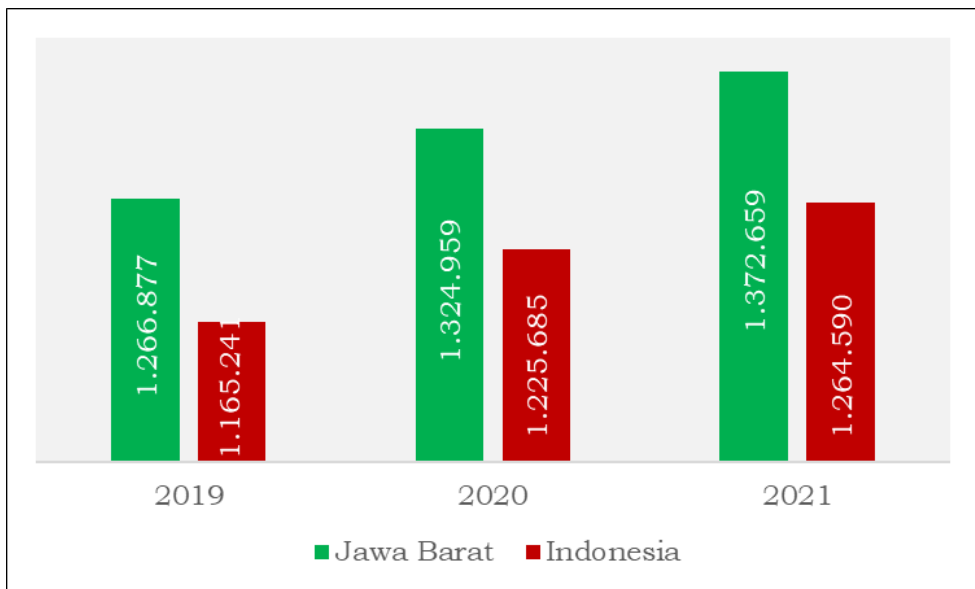
##### **2.1.4.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan**

Salah satu indikator daya saing ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah indikator rata-rata pengeluaran per kapita. Indikator ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan

non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga Jawa Barat maupun rata-rata nasional mengalami peningkatan selama periode tiga tahun (2019-2021), lihat Gambar 2.47 Data menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar Rp1.372.659, artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk Jawa Barat selama setahun adalah Rp1.372.659.

**Gambar 2.47**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)**



Sumber : BPS. 2022

Di tingkat kabupaten/kota, nilai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menunjukkan angka yang bervariasi. Terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita sebulan di atas provinsi, sedangkan delapan belas kabupaten/kota lainnya memiliki nilai pengeluaran per kapita sebulan di bawah provinsi. Tiga kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan paling tinggi adalah Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung, sedangkan Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,

dan Kabupaten Bandung Barat merupakan 3 (tiga) kabupaten dengan nilai rata-rata pengeluaran per kapita penduduk paling rendah. Selisih nilai pengeluaran per kapita antara yang tertinggi dengan yang terendah sebesar Rp1.657.361 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup tajam. Hal ini disebabkan penduduk yang berdomisili di kota dengan karakteristik wilayah perkotaan memiliki peluang yang lebih terbuka untuk meningkatkan pendapatannya disebabkan lapangan pekerjaan yang bersifat heterogen (industri, perdagangan, dan jasa) dibanding penduduk yang berdomisili di kabupaten dengan karakteristik wilayah perdesaan dimana lapangan pekerjaan bersifat homogen (pertanian).

**Tabel 2.95**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten/Kota**  
**(Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Bogor	1.216.394	1.111.823	1.220.669
Sukabumi	983.841	918.757	1.018.782
Cianjur	815.802	927.198	959.446
Bandung	1.098.748	1.184.544	1.210.944
Garut	838.489	940.065	831.102
Tasikmalaya	836.214	849.655	884.302
Ciamis	1.001.390	1.010.334	1.021.570
Kuningan	977.930	1.157.538	1.211.684
Cirebon	858.977	985.858	1.016.766
Majalengka	997.249	1.123.213	1.095.738
Sumedang	971.996	1.271.292	1.144.317
Indramayu	1.036.106	1.159.453	1.248.638
Subang	1.065.185	1.060.201	1.154.420
Purwakarta	1.228.740	1.216.436	1.400.486
Karawang	1.224.815	1.155.109	1.242.403
Bekasi	1.519.651	1.708.114	1.588.581
Bandung Barat	1.015.303	1.007.906	952.620
Pangandaran	1.067.368	1.131.678	1.179.731
Kota Bogor	1.747.986	1.720.694	1.960.499
Kota Sukabumi	1.557.065	1.445.759	1.483.147
Kota Bandung	1.974.339	1.958.841	2.082.374
Kota Cirebon	1.495.050	1.474.218	1.629.707
Kota Bekasi	2.147.104	2.347.086	2.488.463



Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Depok	2.027.984	2.169.732	2.304.941
Kota Cimahi	1.755.952	1.808.790	1.827.071
Kota Tasikmalaya	1.212.982	1.255.704	1.310.775
Kota Banjar	976.593	1.144.797	1.088.976
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>1.266.877</b>	<b>1.324.959</b>	<b>1.372.659</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

#### 2.1.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Selain itu menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

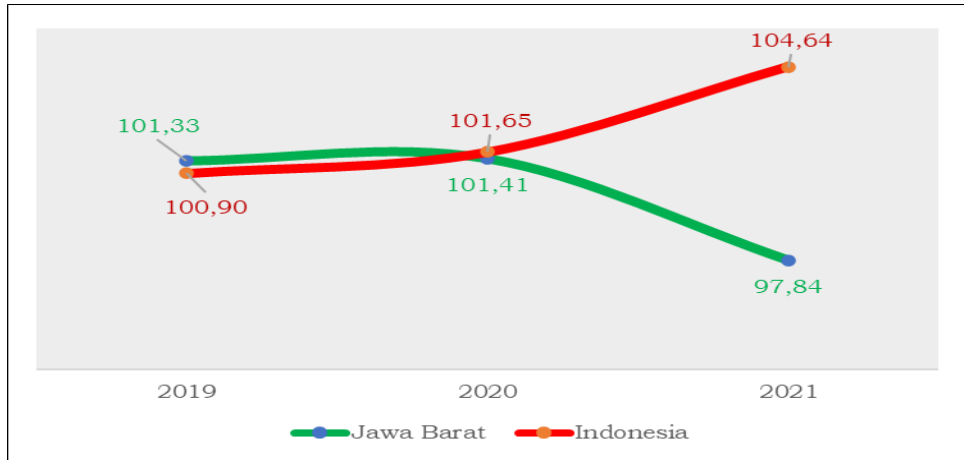
Dari sisi pendapatan petani, perkembangan dalam kurun waktu 2019-2021 memperlihatkan adanya peningkatan. Peningkatan pendapatan ini akibat kenaikan harga komoditas yang dihasilkan petani, dengan asumsi jumlah produksinya tetap sebagaimana jumlah produksi pada tahun dasar. Fluktuatifnya NTP menunjukkan harga-harga komoditas pertanian yang sangat dipengaruhi faktor musiman, harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau, musim angin barat saat gelombang lautan meningkat produksi ikan menurun, sebaliknya harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen. Hal ini mengakibatkan *take home pay* petani tidak tetap untuk jumlah produksi yang diasumsikan sama seperti produksi pada tahun dasar 2018.

Pada kurun Tahun 2019-2020, kenaikan indeks yang dibayar petani lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks yang diterima petani. Hal ini menunjukkan adanya surplus pendapatan petani akibat kenaikan harga komoditas pertanian yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang/jasa yang dibayar petani. Adapun pada kurun Tahun 2020-2021, indeks yang dibayar petani mengalami kenaikan sementara indeks yang diterima petani mengalami penurunan. Akibatnya, terjadi penurunan pendapatan petani akibat menurunnya harga komoditas pertanian dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa yang dibayar petani. Hal ini yang menyebabkan NTP



tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup dalam (lihat Gambar 2.48).

**Gambar 2.48**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Petani Tahun 2019-2021**



Sumber : BPS. 2022

Dalam lingkup regional Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang mengalami penurunan NTP Petani yang cukup besar pada periode Tahun 2020-2021 (Tabel 2.96). Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani pada periode tersebut mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Secara umum, turunnya NTP di beberapa provinsi dipicu oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) di perdesaan dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

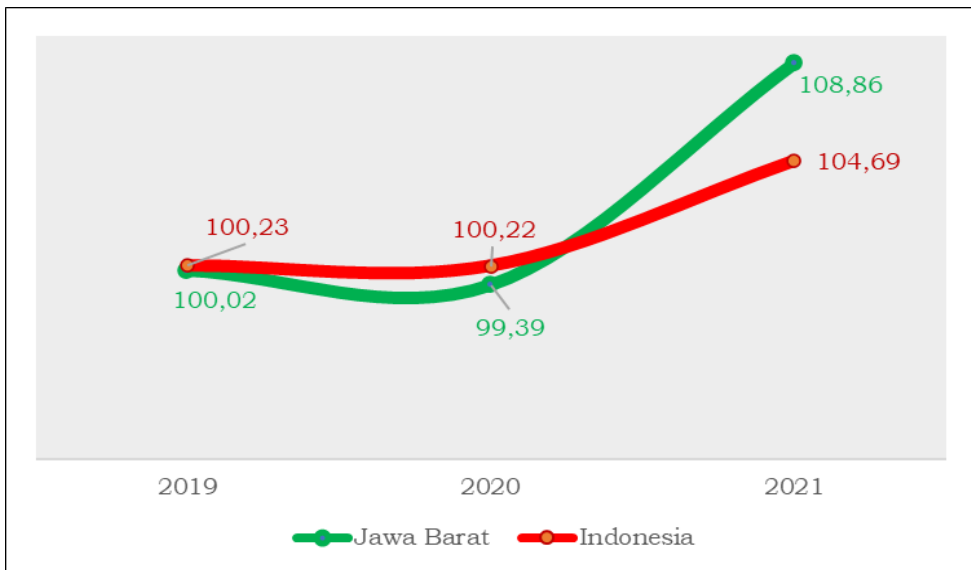
**Tabel 2.96**  
**Nilai Tukar Petani (Petani) Provinsi di Pulau Jawa 2019-2021**

Provinsi	2019	2020	2021	Perubahan (2020-2021)
DKI Jakarta	99,86	99,55	100,97	1,42
<b>Jawa Barat</b>	<b>101,33</b>	<b>101,41</b>	<b>97,84</b>	<b>-3,57</b>
Jawa Tengah	101,85	101,79	100,37	-1,42
DI Yogyakarta	102,57	101,12	97,38	-3,74
Jawa Timur	101,17	100,77	100,02	-0,75
Banten	101,71	102,27	98,44	-3,83
Indonesia	100,90	101,65	104,64	2,99

Sumber: BPS. 2022

Nilai Tukar Petani (NTP) Nelayan menunjukkan perkembangan yang berbanding terbalik dengan NTP Petani, jika pada periode Tahun 2020-2021, NTP Petani mengalami penurunan, sebaliknya NTP Nelayan mengalami peningkatan (lihat Gambar 2.49). Secara umum, hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya indeks harga yang diterima nelayan. Peningkatan indeks ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya harga produk perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya seiring dengan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat.

**Gambar 2.49**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Nelayan 2019-2021**



Sumber : BPS. 2022

Secara umum, tingkat kesejahteraan nelayan di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding 4 (empat) provinsi lain (lihat Tabel 2.97). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, NTP nelayan di Provinsi Jawa Barat meningkat cukup signifikan. Di Yogyakarta merupakan provinsi dengan NTP nelayan paling tinggi sehingga dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan nelayan di provinsi tersebut lebih tinggi dibanding provinsi lainnya.

**Tabel 2.97**  
**Nilai Tukar Petani (Nelayan) Provinsi**  
**di Pulau Jawa Tahun 2019-2021**

Provinsi	2019	2020	2021	Perubahan (2020- 2021)
DKI Jakarta	98,21	95,19	97,83	2,64
<b>Jawa Barat</b>	<b>100,02</b>	<b>99,39</b>	<b>108,86</b>	<b>9,47</b>
Jawa Tengah	99,89	102,71	108,45	5,74
DI Yogyakarta	101,99	106,66	115,83	9,17
Jawa Timur	98,44	95,77	101,11	5,34
Banten	101,28	98,73	100,99	2,26
Indonesia	100,23	100,22	104,69	4,47

Sumber: BPS. 2022

NTP sub sektor memperlihatkan perbedaan tingkat pendapatan petani. Petani yang berkecimpung di subsektor hortikultura, pembudidayaan ikan, dan nelayan dan pembudidayaan ikan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi yang ditandai dengan nilai NTP >100. Sementara itu, petani yang berkecimpung di subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan peternakan mengalami defisit dimana NTP <100, atau dengan kata lain mengalami kerugian karena indeks yang dibayar lebih besar dibanding indeks yang diterima.

Rendahnya tingkat kesejahteraan petani yang berkecimpung di subsektor tanaman pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya luas tanam, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, dan kelembagaan petani. Sementara di subsektor peternakan rendahnya NTP dipengaruhi oleh regulasi yang terkait peternakan, kualitas dan kuantitas bibit yang sesuai standar mutu, penerapan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, pemanfaatan pakan lokal dan limbah pertanian. Adapun, untuk subsektor tanaman perkebunan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan NTP diantaranya melalui peningkatan luas tanam atau ekstensifikasi, optimalisasi lahan, peremajaan tanaman tua dan rusak/sakit, peningkatan produktivitas dan kualitas, penguatan kelembagaan petani/koperasi, dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan.

**Tabel 2.98**  
**Nilai Tukar Petani menurut Sub Sektor Tahun 2019-2021**

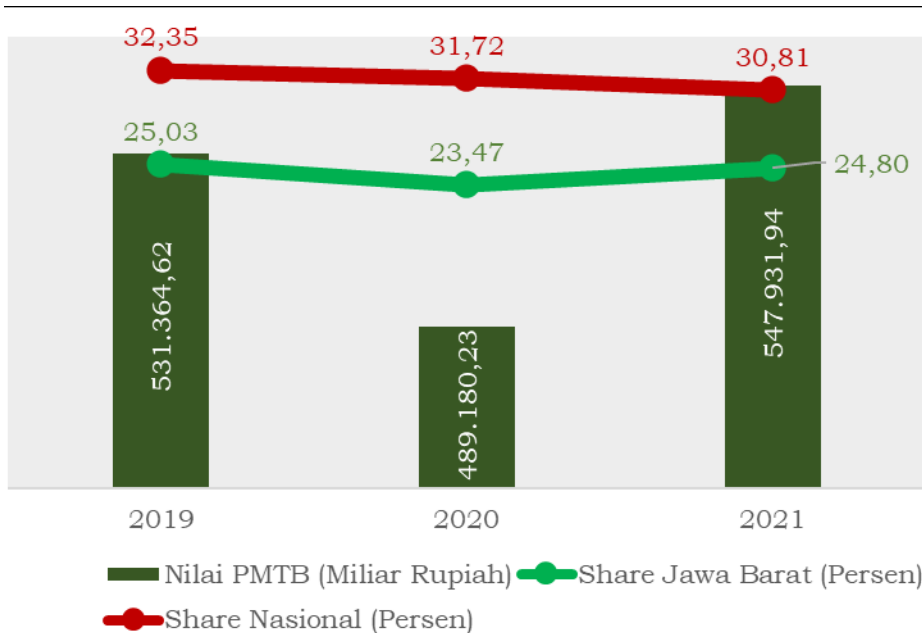
Sub Sektor	2019	2020	2021	Perubahan (2020- 2021)
Tanaman Pangan	102,14	103,28	96,94	-6,34
Hortikultura	101,28	100,41	102,28	1,87
Tanaman Perkebunan	98,19	92,72	95,19	2,47
Peternakan	98,07	95,36	96,78	1,42
Pembudidayaan Ikan	102,04	103,49	107,63	4,14
Nelayan dan Pembudidayaan Ikan	101,48	102,35	107,97	5,62

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

#### **2.1.4.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang merepresentasikan besaran investasi. PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Peningkatan *share* PMTB terhadap PDRB suatu daerah dari waktu ke waktu adalah gejala yang diharapkan. Sebab, kenaikan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Gambar 2.50 memperlihatkan perkembangan nilai dan *share* PMTB terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, nilai PMTB berfluktuatif disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, PMTB Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan nilai dan *share*. Seiring dengan arah pemulihan ekonomi pada tahun 2021, nilai PMTB pun bergerak naik cukup signifikan dibarengi dengan peningkatan *share* meskipun masih di bawah angka sebelum pandemi. Dibandingkan dengan nasional, *share* PMTB Provinsi Jawa Barat lebih kecil dari nasional. Hal ini menandakan peranan PMTB dalam pertumbuhan ekonomi nasional lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 2.50**  
**Nilai dan *Share* Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**  
**Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS. 2022

#### 2.1.4.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami pengembangan, sesuai dengan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SPT/REN.O/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020, dan telah diatur dengan lebih jelas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

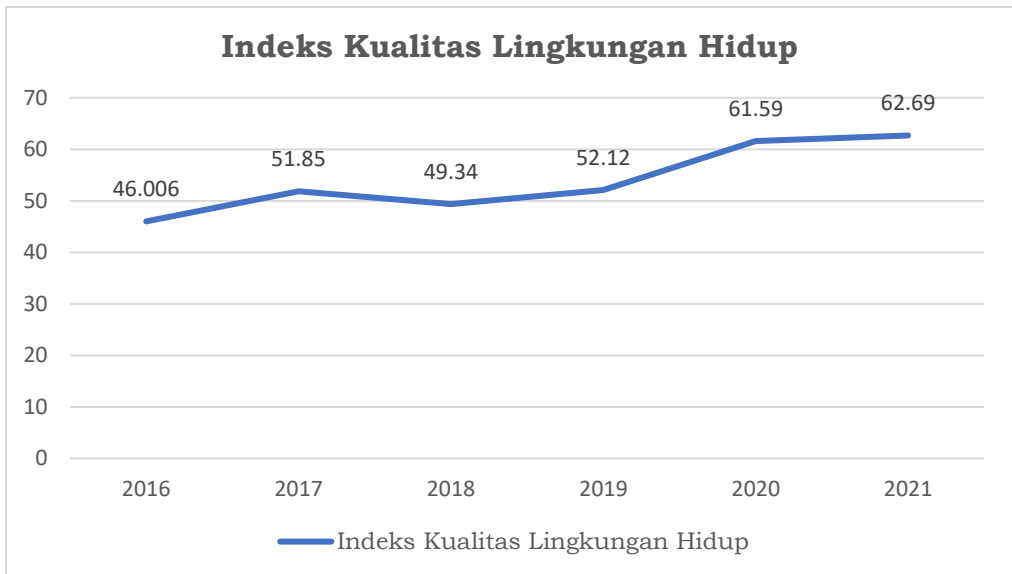


Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan peraturan tersebut, IKLH Provinsi terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus perhitungan IKLH disesuaikan dari  $(0,30 \times IKA) + (0,30 \times IKU) + (0,40 \times IKL)$ , menjadi rumus yang baru =  $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ . Adapun IKLH Kabupaten/Kota hanya meliputi IKA, IKU, dan IKL dengan perhitungan =  $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ .

Selama periode Tahun 2016-2021, IKLH Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka berfluktuasi yang disebabkan adanya perubahan metode perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Capaian IKLH Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.51 dimana pada tahun 2019 sebesar 52,12 dengan perhitungan yang berlaku tahun 2019 yaitu dengan 3 (tiga) komponen. Sedangkan capaian IKLH Tahun 2021 adalah 62,69, yang berarti kualitas lingkungan hidup Jawa Barat dalam status sedang ( $50 \leq x \leq 70$ ) dimana nilai tersebut dihitung berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu IKA, IKU, IKAL, dan IKL. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggalakkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan diantaranya program penanganan DAS Prioritas di Provinsi Jawa Barat yaitu DAS Citarum, DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi.

**Gambar 2.51**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

#### **2.1.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *Machinery of Government* (MoG) yakni *interconnected between structural and process*, belum semuanya memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak *The Right Man In The Right Place*.

Penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta ekonomis (hemat dan optimal). Tujuan penataan yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih



KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

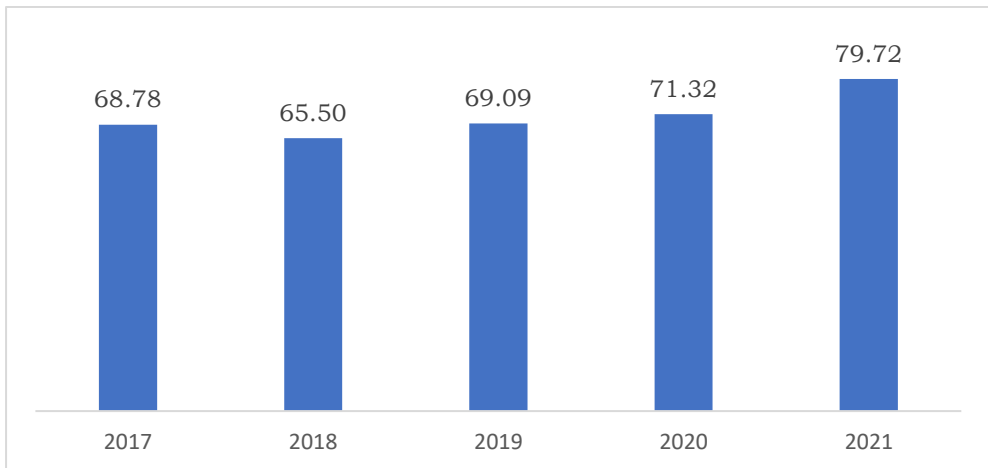
Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2019-2021 mempunyai predikat BB.

#### **2.1.4.6 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel, dan 28 indikator demokrasi. Namun demikian, dalam perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdapat penyempurnaan hasil kajian revisi IDI (Indikator) dan Penajaman indikator revisi dan identifikasi sumber data; Simulasi pernghitungan IDI dengan Indikator Revisi. Oleh karena itu, pada tahun 2021 telah dilakukan Finalisasi Indikator Revisi dan Metode Pengukuran yang menjadi 3 (tiga) aspek dan 22 Indikator Demokrasi. Ringkasan Indikator metode baru tersebut meliputi : 1). Aspek Kebebasan terdapat 7 (tujuh) Indikator; 2). Aspek Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator; dan 3). Aspek Lembaga Demokrasi terdapat 8 (delapan) Indikator, dengan sumber data diperoleh dari Surat Kabar yaitu 5 (lima) Indikator; Dokumen/Sekunder yaitu 18 (delapan belas) indikator; FGD yaitu 5 (lima) indikator dan wawancara mendalam.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penguatan aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat adalah sebesar 65,5 dan tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 68,78. Selanjutnya pada tahun 2020 kembali meningkat ke angka 71,32. Tingkat demokrasi di Jawa Barat secara umum masih dalam katagori sedang.

**Gambar 2.52**  
**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat diolah, Tahun 2021

#### **2.1.4.7 Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1) Toleransi, (2) Kesetaraan, dan (3) Kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme.

Indeks Toleransi menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan sikap atau sifat menenggang yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Sedangkan Indeks Kesetaraan menggambarkan kondisi masyarakat akan sikap tingkatan yang sama kepada sesama manusia, memiliki kesempatan yang sama dan perlindungan perbedaan agama. Adapun Indeks Kerjasama menggambarkan kondisi berkenaan tindakan saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja-sama. Sehingga menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak

lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan.

Dari hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat dari awal tahun 2015 berada pada angka 72,6. Tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 9 (sembilan) Poin menjadi 63,39, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 68,5. Posisi di tahun 2019 ini masuk dalam kategori rukun. Dalam pencapaian realisasi indeks kerukunan umat beragama Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor sebesar 68,5 atau dengan kata lain mencapai 100,59 persen dari target 68,10 dengan efisiensi sumber daya sebesar 5,45 persen. Capaian ini didorong oleh adanya peningkatan toleransi beragama, kesetaraan dalam kehidupan beragama, dan kerjasama antar umat beragama. Bentuk-bentuk dari upaya tersebut antara lain dialog kerukunan di enam kabupaten/kota dan penanaman dua desa sadar kerukunan. Meski demikian, capaian tersebut masih menempatkan Jawa Barat pada urutan 3 (tiga) terbawah secara Nasional. Pada tahun 2021, nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) masuk pada kategori tinggi dengan nilai 72,7 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Skor tersebut termasuk pada rata-rata nasional sebesar 72,39.

#### **2.1.4.8 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)**

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021, Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

**Tabel 2.99**  
**Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2021**

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
1.	Sulawesi Barat	164,85	TINGGI
2.	Bengkulu	160,98	TINGGI
3.	Kepulauan Bangka Belitung	160,84	TINGGI
4.	Maluku	157,90	TINGGI
5.	Sulawesi Selatan	157,14	TINGGI
6.	Sulawesi Tenggara	157,03	TINGGI
7.	Banten	154,87	TINGGI
8.	Kalimantan Timur	153,28	TINGGI
9.	Kalimantan Utara	149,99	TINGGI
10.	Aceh	149,08	TINGGI
11.	Sumatera Barat	147,36	TINGGI
12.	Riau	146,63	TINGGI
13.	Lampung	146,46	TINGGI
14.	Jawa Barat	146,07	TINGGI
15.	Maluku Utara	145,42	TINGGI
16.	Sumatera Utara	143,83	SEDANG
17.	Sulawesi Tengah	142,52	SEDANG
18.	Kalimantan Selatan	142,41	SEDANG
19.	Papua Barat	141,66	SEDANG
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	138,69	SEDANG
21.	Nusa Tenggara Timur	137,31	SEDANG
22.	Sulawesi Utara	135,32	SEDANG
23.	Sumatera Selatan	134,94	SEDANG
24.	Jambi	133,29	SEDANG
25.	Kalimantan Barat	130,75	SEDANG
26.	Jawa Timur	126,34	SEDANG
27.	Jawa Tengah	125,86	SEDANG
28.	Kalimantan Tengah	125,73	SEDANG
29.	Bali	124,19	SEDANG
30.	Nusa Tenggara Barat	123,06	SEDANG
31.	Gorontalo	122,38	SEDANG
32.	Papua	122,33	SEDANG
33.	Kepulauan Riau	114,71	SEDANG
34.	Dki Jakarta	60,43	SEDANG

Sumber: IRBI Tahun 2022, BNPB

Potret penurunan indeks risiko bencana di beberapa kabupaten/kota Jawa Barat yang rawan bencana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.100**  
**Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana**  
**Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	KELAS RISIKO 2021
1	Cianjur	207.13	207.13	215.08	197.08	TINGGI
2	Garut	208.63	208.63	205.52	185.00	TINGGI
3	Tasikmalaya	203.01	203.01	203.01	186.51	TINGGI
4	Sukabumi	190.75	190.75	190.75	192.40	TINGGI
5	Karawang	175.20	175.20	174.43	165.58	TINGGI
6	Bandung	174.00	174.00	174.00	161.89	TINGGI
7	Kota Cirebon	172.76	172.76	172.76	157.19	TINGGI
8	Subang	175.20	175.20	171.91	168.78	TINGGI
9	Cirebon	170.79	160.63	160.63	147.51	TINGGI
10	Kota Banjar	152.80	152.80	152.80	152.80	TINGGI
11	Pangandaran	168.52	145.44	145.44	129.21	SEDANG
12	Majalengka	166.00	166.00	143.43	124.74	SEDANG
13	Sumedang	162.00	162.00	142.15	124.39	SEDANG
14	Ciamis	163.29	156.23	141.57	122.22	SEDANG
15	Purwakarta	138.00	138.00	137.31	124.53	SEDANG
16	Bogor	136.88	136.88	136.88	125.31	SEDANG
17	Indramayu	167.22	167.22	136.79	114.59	SEDANG
18	Bekasi	133.03	133.03	132.89	130.11	SEDANG
19	Kota Bekasi	131.60	131.60	131.60	123.18	SEDANG
20	Kuningan	154.00	154.00	131.13	131.13	SEDANG
21	Kota Bandung	122.32	122.32	122.32	111.32	SEDANG
22	Kota Tasikmalaya	119.20	119.20	119.20	117.37	SEDANG
23	Kota Sukabumi	114.40	114.40	114.40	102.67	SEDANG
24	Bandung Barat	115.01	110.22	110.22	108.18	SEDANG
25	Kota Cimahi	120.40	120.40	105.41	91.71	SEDANG
26	Kota Depok	89.63	89.63	89.63	82.56	SEDANG
27	Kota Bogor	75.75	75.75	75.75	65.38	SEDANG

Sumber: IRBI Tahun 2022, BNPB

\*Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

#### 2.1.4.9 Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Indeks Kemandirian

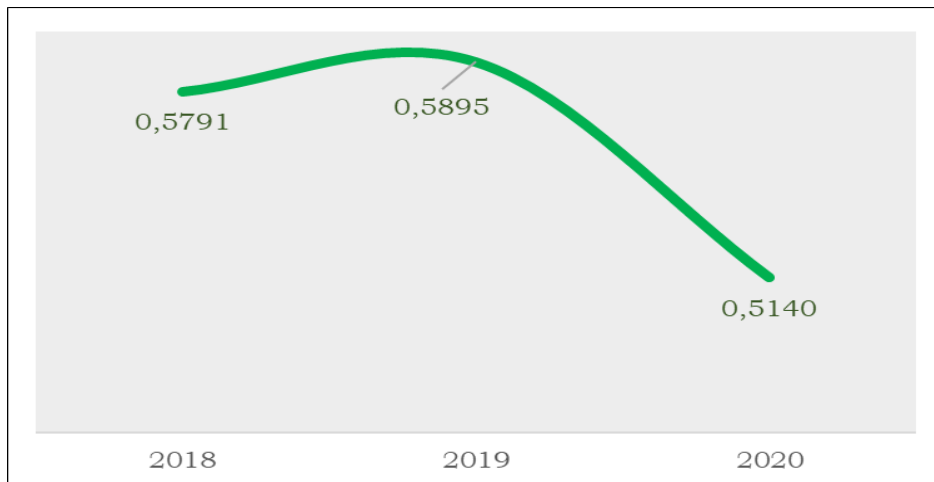


Fiskal (IKF) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Esensi kemandirian fiskal daerah yaitu pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran). Pemerintah daerah dalam hal ini setidaknya memiliki posisi tawar untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan yang dikumpulkan, yang diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Perkembangan IKF dari Tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kondisi kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori “Mandiri” (angka indeks berada direntang  $0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$ ). Namun demikian terjadi penurunan angka IKF pada tahun 2020. Hal ini dapat dimaknai dana transfer dari pusat bertambah sementara penerimaan dari PAD berkurang. Kondisi ini merupakan transmisi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian yang berkontraksi cukup dalam yang kemudian berakibat menurunnya penerimaan pajak daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB).

**Gambar 2.53**  
**Indeks Kemandirian Fiskal 2018-2020**



Sumber: BPK. 2021

Dalam lingkup kabupaten/kota, angka IKF menunjukkan bahwa berdasarkan kategori kemandirian fiskal daerah terdapat 2 (dua) kelompok kabupaten/kota, yakni kelompok kabupaten/kota dengan kategori IKF “Menuju Kemandirian” (angka indeks direntang  $0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$ ) dan kelompok kabupaten/kota dengan kategori “Belum Mandiri” (angka indeks direntang  $0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$ ). Hal ini menandakan semua kabupaten/kota di Jawa Barat belum memiliki kemampuan secara mandiri dalam membiayai belanja pembangunan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin mandiri suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

**Tabel 2.101**  
**Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota 2018-2021**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Bandung	0,1763	0,1789	0,1907
Bandung Barat	0,1623	0,1819	0,1837
Bekasi	0,4032	0,4300	0,4289
Bogor	0,3828	0,3884	0,3656
Ciamis	0,0903	0,0896	0,0968
Cianjur	0,1418	0,1527	0,1466
Cirebon	0,1588	0,1585	0,1635



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Garut	0,0979	0,1015	0,1055
Indramayu	0,1258	0,1161	0,1461
Karawang	0,2792	0,2899	0,2980
Kuningan	0,1199	0,1091	0,1076
Majalengka	0,1597	0,1484	0,1515
Pangandaran	0,0978	0,0779	0,0630
Purwakarta	0,1790	0,1937	0,1948
Subang	0,1411	0,1510	0,1537
Sukabumi	0,1503	0,1525	0,1683
Sumedang	0,1560	0,1495	0,1504
Tasikmalaya	0,0698	0,0752	0,0851
Kota Bandung	0,4329	0,3993	0,3656
Kota Banjar	0,1452	0,1264	0,1500
Kota Bekasi	0,4138	0,4095	0,4024
Kota Bogor	0,3861	0,3763	0,3544
Kota Cimahi	0,2545	0,2518	0,2562

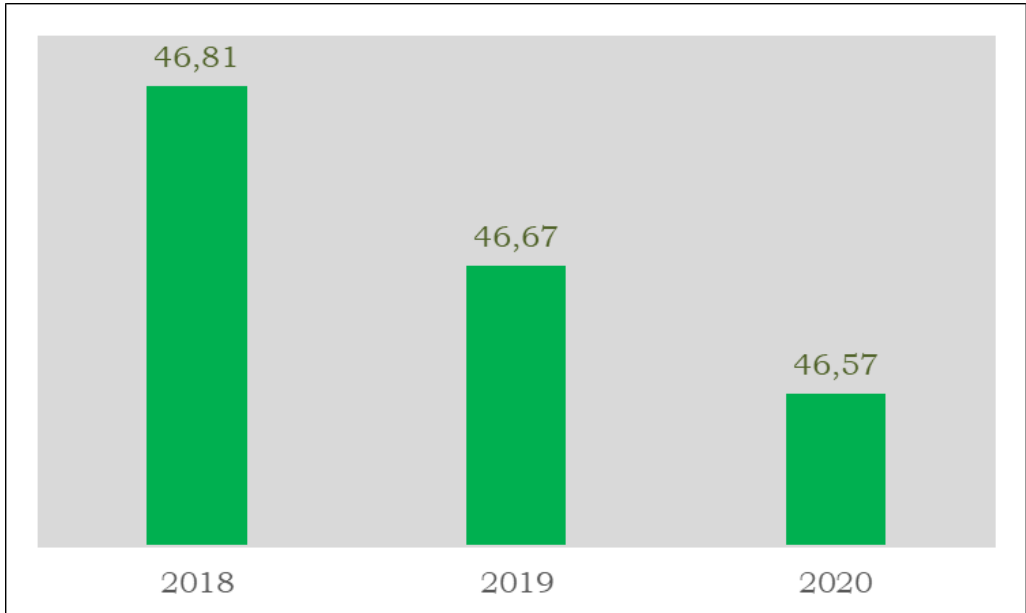
Sumber: BPK. 2021

#### 2.1.4.10 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Perkembangan rasio ketergantungan selama 3 (tiga) tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif dimana persentase rasio ketergantungan semakin turun. Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2020, persentase rasio ketergantungan sebesar 46,57 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum dan produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

**Gambar 2.54**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2020 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Rasio ketergantungan kabupaten/kota sebagaimana data pada Tabel 2.102 memberikan informasi tingkat ketergantungan di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2020, terdapat 6 (enam) kabupaten dengan persentase rasio ketergantungan > 50 persen. Kabupaten Garut menjadi daerah dengan persentase rasio ketergantungan paling tinggi, artinya, penduduk usia produktif di kabupaten Garut beban tanggungannya terhadap penduduk usia belum dan tidak produktif lagi lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sementara persentase rasio ketergantungan paling rendah terjadi di Kota Bekasi, artinya penduduk usia produktifnya menanggung beban yang lebih kecil. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi produktivitas penduduk dalam kegiatan ekonomi.

**Tabel 2.102**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2018-2020 (Persen)**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Bogor	49,14	48,96	48,83
Sukabumi	52,11	51,97	51,90



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Cianjur	52,13	51,97	51,88
Bandung	49,53	49,38	49,27
Garut	57,75	57,59	57,50
Tasikmalaya	52,55	52,48	52,49
Ciamis	49,27	49,26	49,34
Kuningan	50,83	50,82	50,89
Cirebon	47,16	47,07	47,04
Majalengka	48,21	48,19	48,24
Sumedang	47,76	47,78	47,87
Indramayu	44,62	44,51	44,48
Subang	46,40	46,37	46,41
Purwakarta	49,05	48,93	48,86
Karawang	44,72	44,61	44,55
Bekasi	43,04	42,88	42,75
Bandung Barat	51,60	51,49	51,44
Pangandaran	46,93	46,91	46,97
Kota Bogor	42,11	41,99	41,91
Kota Sukabumi	46,86	46,76	46,72
Kota Bandung	38,32	38,27	38,25
Kota Cirebon	42,72	42,59	42,51
Kota Bekasi	36,93	36,74	36,58
Kota Depok	40,07	39,91	39,78
Kota Cimahi	40,39	40,29	40,22
Kota Tasikmalaya	46,72	46,61	46,55
Kota Banjar	48,07	48,02	48,05
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>46,81</b>	<b>46,67</b>	<b>46,57</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2021

Pada tahap penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD. Hal ini dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan RKPD. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa RKPD Jawa Barat telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

### 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2021

Kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dapat diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah pada pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2021 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian: < 50% Sangat Rendah; 51% < 65% Rendah; 66 % < 75% Sedang; 76 % < 90% Tinggi dan 91% < 100% Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2021 mendasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tinggi dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.103**  
**Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program**  
**(Outcome)**

Indikator	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>		
Pendidikan	125.76	Sangat Tinggi
Kesehatan	82.93	Tinggi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.43	Sedang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	102.30	Sangat Tinggi
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	110.50	Sangat Tinggi
Sosial	71.71	Sedang
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>		
Tenaga Kerja	109.82	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	106.36	Sangat Tinggi
Pertanahan	56.66	Rendah
Lingkungan Hidup	87.75	Tinggi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	102.01	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	124.57	Sangat Tinggi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.31	Sangat Tinggi
Perhubungan	82.08	Tinggi
Komunikasi dan Informatika	88.23	Tinggi



Indikator	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	266.14	Sangat Tinggi
Penanaman Modal	140.44	Sangat Tinggi
Kepemudaan dan Olahhraga	96.74	Sangat Tinggi
Statistik	100.00	Sangat Tinggi
Persandian	99.68	Sangat Tinggi
Kebudayaan	79.81	Tinggi
Perpustakaan	92.67	Tinggi
Kearsipan	72.06	Sedang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
Kelautan dan Perikanan	98.45	Sangat Tinggi
Pariwisata	88.89	Tinggi
Pertanian	154.68	Sangat Tinggi
Kehutanan	96.01	Sangat Tinggi
Energi dan Sumber Daya Mineral	90.36	Tinggi
Perdagangan	308.68	Sangat Tinggi
Perindustrian	137.13	Sangat Tinggi
Transmigrasi	105.26	Sangat Tinggi
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
Perencanaan	100.00	Sangat Tinggi
Keuangan	113.64	Sangat Tinggi
Kepegawaian	96.84	Sangat Tinggi
Pendidikan dan Pelatihan	99.41	Sangat Tinggi
Penelitian dan Pengembangan	100.00	Sangat Tinggi
Penghubung	100.00	Sangat Tinggi
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
Sekretariat Daerah	85.13	Tinggi
Sekretariat DPRD	99.28	Sangat Tinggi
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
Kesatuan Bangsa dan Politik	89.85	Tinggi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Berdasarkan evaluasi dari Tabel 2.103 diatas rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD tahun 2021 pada 40 urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat berada pada level **sangat tinggi - tinggi**. Adapun urusan pertanahan memiliki capaian rendah hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya realisasi pemanfaatan tanah kosong untuk pembangunan strategis serta



penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

### **2.3.1 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (Outcome)**

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dilakukan, salah satunya terkait indikator kinerja program (*outcome*). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini disajikan tabel realisasi indikator kinerja program (*outcome*) tahun 2021. Data bersumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dikumpulkan pada Desember 2021 oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.



**Tabel 2.104**  
**Ketercapaian Indikator Kinerja Program (Outcome)**

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>Pendidikan</b>										
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	78.46	persen	66.77	72.56	83.58	83.58	106.53	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	47.59	persen	96.06	45.27	96.41	96.41	202.58	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
3	Tingkat pengembangan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	84.00	persen	N/A	80	100	100	119.05	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
4	Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai Standar	100.00	persen	91	100	94	94	94.00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
5	Persentase izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan	84.00	persen	100	80	100	100	119.05	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
6	Persentase dokumen pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya	88.20	persen	N/A	80	100	100	113.38	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan





Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
lintas daerah di Provinsi Jawa Barat									
<b>Kesehatan</b>							<b>82,93</b>		
1 Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	93.00	Persen	94	89	98.62	98.62	106.04	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
2 Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	95.00	Persen	80.29	85	87.9	87.9	92.53	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
3 Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	90.00	Persen	82.94	80	85.9	85.9	95.44	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
4 Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan <i>Surveilans Gizi</i>	90.00	Persen	80.11	73.27	100	100	111.11	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
5 Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	93.00	Persen	100	63	100	100	107.53	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
6 Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00	Persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
7 Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00	Persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
8 Persentase Puskesmas di	100.00	Persen	81	91	95	95	95.00	Sangat	Dinas



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
	Kab/Kota sesuai standar							Tinggi	Kesehatan
9	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	Persen	75.23	80	82.45	82.45	85.89	Tinggi	Dinas Kesehatan
10	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	88.95	80	88.95	88.95	88.95	Tinggi	Dinas Kesehatan
11	Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Laya Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	Persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
12	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	Persen	95.4	45	46.03	46.03	57.54	Rendah	Dinas Kesehatan
13	Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	Persen	85.18	80	85.18	85.18	85.18	Tinggi	Dinas Kesehatan
14	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Persen	92.12	90	91.77	91.77	96.60	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
15	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Persen	85.51	90	84.56	84.56	88.08	Tinggi	Dinas Kesehatan
16	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	Persen	100	91.67	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
17	Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan	Persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
18	promotif dan preventif Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	9.00	hari	3	9	3	3	33.33	Sangat Rendah	RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RS Paru, RS Kesehatan kerja, RS Jampangkulon
19	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	21.00	hari	17.09	<21	16.14	16.14	76.86	Tinggi	RS Jiwa
20	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	95.00	persen	70	90	72	72	75.79	Sedang	Labkes
21	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	80.00	persen	50	75	50	50	62.50	Rendah	Upelkes
22	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	69.00	Persen	39	70	47	47	68.12	Sedang	Dinas Kesehatan
23	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	100.00	Persen	40	60	40	40	40.00	Sangat Rendah	UPTD RS Paru
24	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	75.00	Persen	72	75	20	20	26.67	Sangat Rendah	UPTD RSUD Jampang Kulon
25	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	100.00	Persen	65	75	20	20	20.00	Sangat Rendah	UPTD RSUD Pameungpeuk
26	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	30.00	Persen	72	30	30	30	100.00	Sangat Tinggi	UPTD RS Kesehatan Kerja



Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi				
27	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	4.99	Persen	0.92	2.4	3.9	3.9	78.16	Tinggi	UPTD Upelkes
28	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	90.00	Persen	87.52	N/A	95.97	95.97	106.63	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
29	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	100.00	Persen	85.19	N/A	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
30	Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring eksternal TB melalui kegiatan Layad Paru	100.00	Persen	100	N/A	90	90	90.00	Tinggi	UPTD RS Paru
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								<b>75,43</b>		
1	Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah	0.00	persen	62.7	75.77	76.44	76.44	0.00	Sangat Rendah	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
2	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
3	Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
4	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	1979.18	km	1.924.817	1,914.76	1,939	1,939	97.98	Sangat Tinggi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang



Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi				
5	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	24.90	persen	7.44	13.23	15.83	15.83	63.57	Rendah	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
6	Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih	100.00	persen	20.1	47.29	83.27	83.27	83.27	Tinggi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
7	Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang	0.00	persen	N/A	42.86	40	40	0.00	Sangat Rendah	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
8	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	100.00	persen	N/A	0	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
9	Persentase Berita Acara yang diterbitkan dalam rangka persetujuan substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota	89.86	persen	N/A	69.57	69.57	69.57	77.42	Tinggi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
10	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	60.10	persen	N/A	34.46	34.46	34.46	57.34	Rendah	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
11	Persentase SITU yang Terpelihara	10.95	persen	N/A	10.71	11.19	11.19	102.19	Sangat Tinggi	Dinas Sumber Daya Air
12	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Sumber Daya Air
13	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	69.77	Persen	N/A	69.65	52.83	52.83	75.72	Sedang	Dinas Sumber Daya Air
15	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang	50.00	persen	N/A	50	50	50	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota										
16	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	74.60	persen	N/A	70.6	70.7	70.7	94.77	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman
17	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	0.00	persen	N/A	0	0	0	0.00	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman
18	Persentase Luas genangan yang tertangani	77.00	persen	N/A	36.9	50.31	50.31	65.34	Rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	88.50	Persen	N/A	77	78.54	78.54	88.75	Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (% PBL)	67.50	persen	N/A	64.5	85.63	85.63	126.86	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>							<b>102,30</b>			
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	76.00	persen	N/A	74	47.243	47.243	62.16	Rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman
3	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	49.63	persen	N/A	42.4	71.83	71.83	144.73	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>							<b>110,5</b>			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat	71.00	persen	N/A	65	98.65	98.65	138.94	Sangat Tinggi	Satuan Polisi dan Pamong



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
	Diselesaikan								Praja
2	Persentase Anggota Linmas Desa di Jawa Barat	persen	N/A	70	69.44	69.44	92.59	Sangat Tinggi	Satuan Polisi dan Pamong Praja
3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	persen	N/A	75	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Satuan Polisi dan Pamong Praja
4	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	persen	N/A	40	100	100	200.00	Sangat Tinggi	Satuan Polisi dan Pamong Praja
5	Persentase Kabupaten Kota yang indeks ketahanan daerahnya meningkat	persen	N/A	100	63	63	63.00	Rendah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Persentase Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Persentase Pendampingan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Sosial</b>							<b>71,71</b>		
1	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang	persen	N/A	55	59.67	59.67	87.75	Tinggi	Dinas Sosial





Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Kesos									
2 Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesos UPTD PPKS	68.00	persen	N/A	55	21.86	21.86	32.15	Sangat Rendah	Dinas Sosial, UPTD PPKS
3 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi	32.00	persen	N/A	28	13	13	40.63	Sangat Rendah	Dinas Sosial
4 Persentase Daerah yang Difasilitasi Untuk Membentuk Puskesmas	100.00	persen	N/A	95	44.7	44.7	44.70	Sangat Rendah	Dinas Sosial
5 Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100.00	persen	N/A	0.75	1.73	1.73	1.73	Sangat Rendah	Dinas Sosial
6 Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	100.00	persen	N/A	100	110	110	110.00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, UPTD PRSAMPK, PPSBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU
7 Persentase Fakir Miskin yang tertangani	38.70	persen	N/A	37.5	69.7	69.7	180.10	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
8 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100.00	persen	N/A	100	120	120	120.00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
9 Tingkat pengelolaan makam pahlawan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
10 Indeks Partisipasi Sosial	50.00	Poin		40.00	0	0	0.00	Sangat Rendah	Dinas Sosial



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>Tenaga Kerja</b>										
1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	88.30	persen	N/A	84.05	135.638	135.638	153.61	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	90.00	persen	N/A	80	72.78	72.78	80.87	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	20.00	persen	20.25	20	22.92	22.92	114.60	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
1	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	51.85	persen	N/A	22.22	22.22	22.22	42.85	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	1.88	persen	N/A	1.92	3.6	3.6	191.49	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Anak, dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, UPTD PPA
4	Jumlah Kab Kota yang Sudah Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Di Jawa Barat	27.00	kab/kota	N/A	16	16	16	59.26	Rendah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
5	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	100.00	persen	N/A	66	66	66	66.00	Sedang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
6	Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	100.00	persen	N/A	25	25	25	25.00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
7	Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak	100.00	persen	N/A	25	25	25	25.00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Anak Tingkat Provinsi									Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
8 Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	0.21	rasio	N/A	0.27	0.73	0.73	347.62	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
9 Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (UPTD PPA)
<b>Pangan</b>							<b>411,24</b>		
1 Persentase Cadangan Pangan	50.00	persen	N/A	50	42.36	42.36	84.72	Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2 Persentase Desa Rawan Pangan yang Diintervensi	10.00	persen	N/A	10	4	4	40.00	Sangat Rendah	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3 Persentase Peningkatan Sertifikasi PSAT	12.67	persen	N/A	10.27	140.51	140.51	1109.00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
<b>Pertanahan</b>							<b>56,66</b>		
1	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Pembangunan Strategis Di Jawa Barat	persen	N/A	33.33	33.33	33.33	49.99	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman
3	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	N/A	20	20	20	20.00	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Lingkungan Hidup</b>							<b>87,75</b>		
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	persen	54.16	50	70	70	70.00	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD (Mg/L)	persen	136.32	94	127.86	127.86	127.86	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SOX	persen	107.9	93	87.34	87.34	87.34	Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota	persen	60	60	70.37	70.37	70.37	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase Peningkatan Kampung Iklim	persen	81	85.71	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Diuji	persen	72.3	81.25	83.33	83.33	83.33	Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase Jumlah Sertifikat Kompetensi Teknis yang	persen	90.63	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
	Diperoleh								Hidup
8	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	persen	110.74	100	114	114	114.00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3	persen	71.43	45.23	50	50	50.00	Rendah	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	persen	89.16	70	80	80	80.00	Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase Status Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten/Kota	persen	N/A	20	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Berbudaya Lingkungan	persen	81.84	88.89	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	persen	40	60	85.52	85.52	85.52	Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	persen	76.33	80.91	91.52	91.52	91.52	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
15	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	persen	53.78	50	56.34	56.34	56.34	Rendah	Dinas Lingkungan Hidup



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							<b>102,01</b>			
1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	83.25	persen	N/A	81.6	83.92	83.92	100.80	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.25	persen	N/A	81.6	90.45	90.45	108.65	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	84.78	persen	N/A	82.35	83.57	83.57	98.57	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							<b>124,57</b>			
1	Persentase fasilitas penataan desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	100.00	persen	N/A	100	94.51	94.51	94.51	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi	100.00	persen	N/A	100	99.07	99.07	99.07	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentasi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	70.00	persen	N/A	100	98.71	98.71	141.01	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan	60.00	persen	N/A	100	98.20	98.20	163.67	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan





Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Masyarakat dalam pembangunan di desa									Masyarakat dan Desa
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							<b>97,31</b>		
1	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	persen	N/A	63.27	58.9	58.9	91.93	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
3	Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat Di Kabupaten Kota	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
<b>Perhubungan</b>							<b>82,08</b>		
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Provinsi	persen	N/A	87.69	87.69	87.69	99.82	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
2	Nilai V/C Ratio di Jalan Provinsi	persen	N/A	0.82	0.52	0.52	63.41	Rendah	Dinas Perhubungan
3	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	persen	N/A	87.69	87.69	87.69	99.82	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
4	Rasio Konektivitas Provinsi	persen	N/A	87.69	87.69	87.69	99.82	Sangat	Dinas



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)								Tinggi	Perhubungan
5 Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	87.85	persen	N/A	87.69	87.69	87.69	99.82	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
6 Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)	87.85	persen	N/A	87.69	87.69	87.69	99.82	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
7 Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi	100.00	persen	N/A	92.59	92.59	92.59	92.59	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
8 Jumlah Dokumen Pendukung Pelabuhan Pengumpan Regional yang Disiapkan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)	14.00	dokumen	N/A	10	5	5	35.71	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
9 Persentase Dermaga yang Terpenuhi Standar (UPTD PPP LL ASDP)	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
10 Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yang Kewenangan Provinsi	100.00	persen	N/A	30	30	30	30.00	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
<b>Komunikasi dan Informatika</b>							<b>88.23</b>		
1 Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	90.00	persen	92.78	80	91	91	101.11	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100.00	persen	100	95	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika



Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi				
3	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	60.00	persen	N/A	40	41.09	41.09	68.48	Sedang	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	60.00	persen	N/A	40	50	50	83.33	Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>								<b>266,14</b>		
1	Tingkat Kepatuhan Koperasi	4.50	persen	15.17	3.1	17.25	17.25	383.33	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2	Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro	100.00	persen	N/A	48.4	44.92	44.92	44.92	Sangat Rendah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
3	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	100.00	persen	0	33.3	50	50	50.00	Rendah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
4	Tingkat Koperasi yang Berkualitas	37.00	persen	N/A	33	88.5	88.5	239.19	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
5	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6.90	persen	-6.24	6.3	11	11	159.42	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
6	Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	35.00	persen	N/A	30	75.9	75.9	216.86	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
7	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	6.50	persen	8.52	5.5	50	50	769.23	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
<b>Penanaman Modal</b>								<b>140.44</b>		
1	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	10.00	persen	N/A	10	10	10	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	70-75	persen	N/A	60	73.58	73.58	98.11	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
									Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	15.00	persen	N/A	15	40.77	40.77	271.80	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	88.20	persen	N/A	80	81	81	91.84	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							<b>96.74</b>			
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	18.00	persen	31.42	17.3	31.97	31.97	177.61	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	72.00	persen	N/A	68	40	40	55.56	Rendah	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	3.00	persen	2.6	2.6	2.69	2.69	89.67	Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	12.00	persen	12.34	10.5	12.48	12.48	104.00	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik	87.00	persen	N/A	80	71	71	81.61	Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Persentase Peningkatan	10.00	persen	10	10	10	10	100.00	Sangat	Dinas Pemuda



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Partisipasi Masyarakat Berolahraga								Tinggi	dan Olahraga
7 Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa barat dalam Kepramukaan	17.00	persen	11.27	17	11.69	11.69	68.76	Sedang	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Statistik</b>							<b>100.00</b>		
1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Persandian</b>							<b>99.68</b>		
1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	96.90	persen	94.57	89.15	96.59	96.59	99.68	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Kebudayaan</b>							<b>79.81</b>		
1 Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan Aksara daerah yang dilestarikan, dan seni budaya yang dilindungi)	30.79	persen	11.45	18.47	18.47	18.47	59.99	Rendah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	26.09	persen	19.13	17.39	19.13	19.13	73.32	Sedang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 Persentase Benda Koleksi Museum Negeri Sri Baduga yang Dilindungi	23.18	persen	9.93	19.87	24.6	24.6	106.13	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
<b>Perpustakaan</b>									
							<b>92.67</b>		
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	63.23	53	52.33	52.33	95.15	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	75.95	69	68.61	68.61	96.63	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Tingkat Kebiasaan Membaca	Poin	68.38	64	63.54	63.54	96.27	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	persen	19	19	19	19	82.61	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Kearsipan</b>									
							<b>72.06</b>		
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	persen	56.75	15	15	15	33.33	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	persen	63.33	58	58	58	82.86	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	persen	70	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
1	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	83.51	persen	82	79,51	85	85	101,78	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Jumlah Produksi Garam	284750.29	ton	41.489,20	25.8276,9	79.314,33	79.314,33	30,71	Sangat Rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	186558.07	ton	250.919,50	182.160,00	277.282,94	277.282,94	152,22	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	882923.42	ton	1.184.915,96	832.240	1.214.440,14	1.214.440,14	145,92	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	85.00	persen	85	85	87,8	87,8	103,29	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	30.93	Kg/Kap/Th	36,41	30,28	37,73	37,73	124,60	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>Pariwisata</b>										
1	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	29.27	persen	17.86	19.51	19.51	19.51	66.66	Sedang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	28.57	persen	1.47	14.29	28.57	28.57	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Sumber Daya Industri Kreatif yang Dikembangkan	22.22	persen	11.11	22.22	22.22	22.22	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pertanian</b>										
1	Rata-Rata Performa Ternak yang Sesuai Standar	44.00	persen	N/A	42	47	47	106.82	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	Tingkat Pemenuhan Prasarana	90.00	persen	N/A	32	26	26	28.89	Sangat	Dinas





Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
Peternakan								Rendah	Ketahanan Pangan dan Peternakan	
3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	5.00	persen	N/A	4	64	64	1280.00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4	Persentase Petugas dan Pelaku Usaha Peternakan yang Meningkatkan Kinerjanya	25.00	persen	N/A	25	25	25	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
5	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	58.76	Ku/Ha	57.42	57.76	57,41*	57.41	97.70	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	90.34	Ku/Ha	95.34	90.19	101,36*	101.36	112.20	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	82.21	persen	85.16	80.59	90.16	90.16	109.67	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8	Luas Panen Tanaman Pangan	1892521.00	Ha	1846931	1892521	1.776.697*	1,776,697	93.88	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
9	Luas Panen Tanaman Hortikultura	199271.00	Ha	138540	194718	336.992*	336,992	169.11	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
10	Indeks Pertamanan (IP)	2.00	persen	1.98	1.9	2.1	2.1	105.00	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
11	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	4.50	persen	3.21	4.5	4.46	4.46	99.11	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi				
12	Persentase Penyuluh yang Berprestasi	2.13	persen	2.13	2.13	2.13	2.13	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
13	Persentase Kelompok Tani yang di Bina oleh Penyuluh	94.17	persen	37.54	56.15	52.63	52.63	55.89	Rendah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	20.41	persen	11.16	20.41	20.73	20.73	101.57	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	88.86	persen	88.89	88.86	89.27	89.27	100.46	Sangat Tinggi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Sarana Perkebunan	25.00	persen	N/A	25	29.4	29.4	117.60	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
17	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	25.00	persen	N/A	20	20	20	80.00	Tinggi	Dinas Perkebunan
18	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan	25.00	persen	N/A	25	25	25	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
19	Laju Peningkatan Perkebunan Besar yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan	50.00	persen	N/A	25	50	50	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perkebunan
20	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	75.00	persen	N/A	25	26.84	26.84	35.79	Sangat Rendah	Dinas Perkebunan
<b>Kehutanan</b>								<b>96.01</b>		
1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahana Pengelolaan Hutan	100.00	persen	N/A	71	72.7	72.7	72.70	Sedang	Dinas Kehutanan
2	Persentase Penanganan Lahan Kritis	5.00	persen	N/A	3	3.54	3.54	70.80	Sedang	Dinas Kehutanan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
3	Tingkat Kerusakan Hutan	0.50	persen	N/A	0.7	0.1	0.1	20.00	Sangat Rendah	Dinas Kehutanan
4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	30.00	persen	N/A	10	31.46	31.46	104.87	Sangat Tinggi	Dinas Kehutanan
5	Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	10.00	persen	N/A	10	11.2	11.2	112.00	Sangat Tinggi	Dinas Kehutanan
6	Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan	5.00	persen	N/A	5	3.75	3.75	75.00	Sedamh	Dinas Kehutanan
7	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Mengikuti Bimtek/Diklat	120.00	orang	N/A	75	297	297	247.50	Sangat Tinggi	Dinas Kehutanan
8	Penurunan Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Daerah Aliran Sungai	36.55	persen	N/A	41.55	23,84 (Mg/L)	23.84	65.23	Rendah	Dinas Kehutanan
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							<b>90.36</b>			
1	Rasio Sumur Imbuhan Terhadap Sumur Produksi	20.64	persen	N/A	15.98	41.53	41.53	201.21	Sangat Tinggi	Dinas Sumber Daya Mineral
2	Persentase Pengambil Air Tanah yang Taat Peraturan	60.00	persen	N/A	56	59.99	59.99	99.98	Sangat Tinggi	Dinas Sumber Daya Mineral
3	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	60.00	persen	N/A	56	58.06	58.06	96.77	Sangat Tinggi	Cabang Dinas Wilayah I Cianjur Dinas Sumber Daya Mineral,
4	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	60.00	persen	N/A	56	60.91	60.91	101.52	Sangat Tinggi	Cabang Dinas Wilayah II Bogor Dinas Sumber Daya Mineral
5	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	60.00	persen	N/A	56	58.73	58.73	97.88	Sangat Tinggi	Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta Dinas Sumber



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
6	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	60.00	persen	N/A	56	61.73	61.73	102.88	Sangat Tinggi	Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah IV Bandung Dinas Sumber Daya Mineral
7	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	60.00	persen	N/A	56	56.22	56.22	93.70	Sangat Tinggi	Cabang Dinas Wilayah V Sumedang Dinas Sumber Daya Mineral
8	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	60.00	persen	N/A	56	56.05	56.05	93.42	Sangat Tinggi	Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya Dinas Sumber Daya Mineral
9	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	60.00	persen	N/A	56	61.6	61.6	102.67	Sangat Tinggi	Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon Dinas Sumber Daya Mineral
10	Persentase Sample Air Tanah yang Diuji Kualitasnya	3.00	persen	N/A	1.5	1.56	1.56	52.00	Rendah	Cabang Dinas UPTD Laboratorium Dinas Sumber Daya Mineral
11	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi	60.00	persen	N/A	58	58.81	58.81	98.02	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	60.00	persen	N/A	58	59.42	59.42	99.03	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
									Cianjur
13	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	N/A	58	58.06	58.06	96.77	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
14	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	N/A	58	52.38	52.38	87.30	Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
15	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	N/A	58	61.73	61.73	102.88	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
16	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	N/A	58	56.25	56.25	93.75	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
17	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	N/A	58	61.9	61.9	103.17	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
18	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	N/A	58	58	58	96.67	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
									Wilayah VII Cirebon
19	Persentase Pengujian Kualitas Bahan Tambang Di Jawa Barat	persen	N/A	40	41.33	41.33	68.88	Sedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas UPTD Laboratorium
20	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Teknis	persen	N/A	46	48.33	48.33	100.69	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21	Jumlah Reduksi CO2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	Ton Co2eq	N/A	932.7	932.7	932.7	42.88	Sangat Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22	Persentase Komoditas EBT yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Bidang Energi	persen	N/A	50	50	50	50.00	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan	persen	N/A	79.08	85	85	86.73	Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	persen	N/A	60	60.65	60.65	60.65	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
25	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Cabang Dinas Wilayah II Bogor	persen	N/A	60	62.36	62.36	62.36	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
26	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang	persen	N/A	60	60.53	60.53	60.53	Rendah	Dinas Energi



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta									dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
27 Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung	100.00	persen	N/A	60	70.82	70.82	70.82	Sedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
28 Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang	100.00	persen	N/A	60	76.25	76.25	76.25	Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
29 Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya	100.00	persen	N/A	60	72	72	72.00	Sedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
30 Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon	100.00	persen	N/A	60	62.27	62.27	62.27	Rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
31 Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
32 Persentase Kab/Kota	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat	Dinas Energi





Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
	Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur							Tinggi	dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	
33	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
34	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
35	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
36	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
37	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya



Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi				
38	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
<b>Perdagangan</b>								<b>308.68</b>		
1	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	7.00	persen	N/A	3	29.53	29.53	421.86	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5.00	persen	N/A	5	4	4	80.00	Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	10.84	milyar USD	N/A	10.14	12.46	12.46	114.94	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase Konsumen yang dilayani dan Ditangani	80.00	persen	N/A	73	88.53	88.53	110.66	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	9.76	persen	N/A	100	100	100	1024.59	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
<b>Perindustrian</b>							<b>137.13</b>			
1	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	250.00	Unit Usaha	N/A	200	261	261	104.40	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	1.60	persen	N/A	1.6	2.09	2.09	130.63	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SII Nas	50.00	persen	N/A	50	88.18	88.18	176.36	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>Transmigrasi</b>							<b>105.26</b>			
1	Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketrasmigrasian yang Direalisasikan	95.00	persen	N/A	85	100	100	105.26	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>Perencanaan</b>							<b>100.00</b>			
1	Rata-Rata Tingkat Kesesuaian Perencanaan Antar Waktu dan Level Pemerintahan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Perekonomian dan Sumber Daya Alam									Daerah
4 Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Keuangan</b>							<b>113.64</b>		
1 Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan Provinsi Jawa Barat	Tepat Waktu	Waktu	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2 Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3 Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tepat waktu	Tepat Waktu	Waktu	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan APBD Perubahan yang dievaluasi tepat waktu	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 Persentase Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang dievaluasi tepat waktu	80.00	persen	N/A	80	100	100	125.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	6.00	persen	N/A	6	6.4	6.4	106.67	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7 Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan	100.00	persen	N/A	80	99	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Pengelolaan Aset Daerah									Keuangan dan Aset Daerah
8 Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	0.36	persen	N/A	0.26	0.63	0.63	175.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9 Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah	80.00	persen	N/A	70	99.81	100	125.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	95.48	persen	N/A	90	102.40	100	104.73	Sangat Tinggi	Badan Pendapatan Daerah
<b>Kepegawaian</b>							<b>96.84</b>		
1 Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan ; Pengadaan; Perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	120.00	poin	N/A	113	113	113	94.17	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah
2 Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40.00	poin	N/A	40	40	40	100.00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah
3 Nilai Kriteria Pengembangan Karir	110.00	poin	N/A	102.5	102.5	102.5	93.18	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah
4 Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120.00	poin	N/A	120	120	120	100.00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>							<b>99.41</b>		
1 Persentase Jabatan Struktural Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL	85.00	persen	N/A	80	84	84	98.82	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi				
2	Persentase Pelaksana Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL	90.00	persen	N/A	80	82	82	91.11	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan atau STTPL Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	85.00	persen	N/A	80	82	82	96.47	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	6.00	persen	6	6	6	6	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Dan Sumber Belajar	3.00	persen	3	3	3	3	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Persentase Ketersediaan	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tinggi	Pengembangan Sumber Daya Manusia
8 Persentase Ketersediaan dokumen Akuntansi dan Pelaporan keuangan	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9 Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10 Persentase Ketersediaan dokumen untuk diverifikasi	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11 Persentase Ketersediaan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12 Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13 Persentasi Pemeliharaan Kendaraan	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14 Persentase Tersedianya Akomodasi Rapat Internal Dan Luar Kantor	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15 Persentase Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	100.00	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan





Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
									Sumber Daya Manusia
16	Persentase Ketersediaan Barang Habis Pakai Kantor	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17	Persentase Terpenuhinya Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18	Persentase Terpenuhinya Langganan Kantor	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Persentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Persentase Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olah	persen	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Raga Serta Pakaian Aparatur, Sarana Dan Prasarana Olah Raga									Manusia
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							<b>100.00</b>		
1 Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dihasilkan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2 Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Dihasilkan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3 Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Dihasilkan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4 Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang Dihasilkan	100.00	Persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
5 Persentase kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Tehnologi dan Hasil Kelitbangan	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>Penghubung</b>							<b>100.00</b>		
1 Tingkat layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol dan Promosi Informasi yang Difasilitasi	100.00	persen	N/A	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Penghubung
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>Sekretariat Daerah</b>							<b>85.13</b>		
1 Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja yang efektif dan	93.00	persen	N/A	93	93	93	100.00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah/ Biro



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Realisasi					
efisien									Organisasi	
2	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan dan otonom daerah yang ditindaklanjuti	90.00	Jumlah	N/A	90	99.31	99.31	110.34	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	90.00	persen	N/A	80	80	80	88.89	Tinggi	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Presentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90.00	persen	N/A	80	80	80	88.89	Tinggi	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra
5	Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	100.00	persen	N/A	80	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
6	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan	80.00	persen	N/A	62	62	3	3.75	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
7	Level Maturitas UKPBJ	3.00	Level	N/A	3	3	3	100.00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
8	Kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ	70.00	persen	N/A	70	52	52	74.29	Sedang	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa



Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi				
9	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Sekretariat Daerah		Nilai	N/A	Baik	Baik	Baik	100.00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
<b>Sekretariat DPRD</b>								<b>99.28</b>		
1	Tingkat Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100.00	persen	N/A	100	99.42	99.42	99.42	Sangat Tinggi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD serta Penjaringan Aspirasi	100.00	persen	N/A	100	99.14	99.14	99.14	Sangat Tinggi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>										
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>								<b>89.85</b>		
1	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	0.0110	persen	N/A	0.0079	0.0084	0.0084	76.36	Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	0.0077	persen	N/A	0.0054	0.0055	0.0055	71.43	Sedang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0.0046	persen	N/A	0.0032	0.0032	0.0032	69.57	Sedang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0.0068	persen	N/A	0.0047	0.0119	0.0119	175.00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan	0.0058	persen	N/A	0.004	0.0033	0.0033	56.90	Rendah	Badan Kesatuan



Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD 2018-2023	Satuan	Realisasi 2020	2021		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Predikat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
Fasilitas Penanganan Konflik Sosial									Bangsa dan Politik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2021



Berdasarkan data yang tertera, dapat diketahui bahwa terdapat 327 indikator kinerja program (*outcome*) pembangunan daerah yang dievaluasi. Tingkat ketercapaian indikator kinerja program tersebut mencapai 61,40 persen. Dengan kata lain, terdapat 210 indikator kinerja program yang hasil realisasinya memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan indikator kinerja program yang tidak tercapai sebanyak 47 indikator atau sebesar 13,74 persen. Selain itu, terdapat 85 indikator yang tidak tersedia datanya atau tidak dilaporkan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab.

### **2.3.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja**

Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada Triwulan IV-2021 dilaporkan dalam bentuk formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi kegiatan pada Triwulan IV, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian setiap sub kegiatan, kegiatan dan rata-ratanya per program dan per Perangkat Daerah. Capaian kinerja dan anggaran program setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan berada pada kategori yang tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV-2021, Perangkat Daerah mengalami berbagai kendala baik eksternal, internal, maupun hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja, seperti adanya koordinasi yang baik di lingkup Perangkat Daerah dan faktor penghambat antara lain: adanya penyusunan ulang anggaran, proses pencairan dana terkendala dikarenakan perbaikan aplikasi SIPD, dsb. Untuk penjelasan yang lebih rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.105**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>Dukungan Internal dari Pemerintah Daerah.</li><li>Kelancaran ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.</li><li>Waktu yang cukup untuk berjalannya kegiatan.</li><li>Keseimbangan antara waktu dengan jadwal yang sudah dirancang.</li><li>Proses administrasi secara tepat sasaran.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tidak tercukupinya anggaran yang tersedia untuk kegiatan.</li><li>Tidak sinkronnya antara rencana yang sudah dirancang dengan jumlah anggaran yang sudah tertera dalam DPA.</li><li>Faktor lingkungan yang tidak mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.</li><li>Faktor SDM yang tidak cakap atau belum fasih dalam melaksanakan kegiatan tersebut.</li><li>Terbenturnya keadaan daripada wabah nasional atau dunia yaitu Pandemi COVID-19.</li></ol>
2	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>Dinas Kesehatan komponen sumber daya yang cukup besar dan sangat memadai meliputi sumber daya manusia yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD dan anggaran untuk bidang kesehatan sudah menjadi bagian dari 5% dari total APBD Provinsi Jawa Barat.</li><li>Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Kesehatan sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas.</li><li>Alat pendukung seperti alat pengolahan data, internet dsb dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah tersedia di Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat.</li><li>Peraturan terkait dengan kesehatan menjadi bagian perhatian Pemerintah Daerah terutama SPM Bidang Kesehatan.</li><li>Dukungan CSR dalam mendukung kesehatan sangat terbuka lebar.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Adanya <i>refocussing</i> anggaran pada beberapa program dan kegiatan.</li><li>Pengadaan barang melalui e-catalog dan lelang masih dalam proses sehingga kegiatan tertunda.</li><li>Belum sesuai dan serasinya program pemerintah pusat dengan potensi dan kebutuhan lokal daerah. Sementara itu perencanaan Anggaran Daerah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan lokal di daerah.</li><li>Masih kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga belum terwujudnya sinergi antara program dan kegiatan pembangunan Provinsi dengan program/ kegiatan pembangunan kabupaten/Kota.</li></ol>





NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
3	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>Koordinasi yang baik antara Dinas, UPTD, Biro Barang dan Jasa dalam proses pengadaan.</li><li>Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan.</li><li>Adanya Kegiatan Pelatihan dan Diklat dan Bimbingan Teknik Peningkatan Sumber Daya Aparatur.</li><li>Adanya paket paket pada tahun jamak pada pendanaan PEN dan adanya juga peningkatan dalam rehabilitasi regular</li><li>Adanya optimalisasi SDM yang ada dan kolaborasi bersama kab/kota.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Terlambatnya proses lelang karena kendala integrasi sistem SIPD dengan SIRUP.</li><li>Terlambatnya pelaksanaan proyek karena adanya lelang ulang.</li><li>Terdapat beberapa kegiatan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran.</li><li>Diperlukan perbaikan mutu untuk hasil yang lebih optimal.</li><li>Program belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena keterbatasan anggaran.</li><li>Kurang cermat dalam perencanaan.</li><li>Adanya beberapa paket yang waktu pelaksanaannya tidak mencukupi sehingga sisa pekerjaan diluncurkan tahun anggaran 2022 yaitu paket tahun jamak.</li><li>Adanya indikator perda tata ruang provinsi yang belum ditetapkan pada tahun 2020 dan ada nya perubahan regulasi</li></ol>
4	Dinas Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"><li>Di beberapa kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan target Rencana Keuangan dan Fisik dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang tepat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kegiatan fisik yang ber-hubungan dengan Proyek Strategis baru masuk tahap Manajemen Kon-struksi (MK) menunggu proses Tender Barang dan Jasa.</li><li>Kegiatan fisik sudah terlaksana menunggu proses keuangan (SPJ 3).</li></ol>
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</li><li>Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</li><li>Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur dalam penyusunan program/ kegiatan.</li><li>Kurang cermatnya apa-ratur dalam penyusunan perencanaan program/ kegiatan dan pengang-garan (target keuangan dan fisik, RUP dan RAK).</li><li>Proses pencairan dana mengalami keterlambatan karena terlambat-nya penyiapan admi-nistrasi.</li><li>Beberapa kegiatan ter-gantung kondisi cuaca dan kegiatan Lembaga lain.</li><li>Pelaksanaan lelang ke-giatan dinyatakan gagal.</li></ol>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
6	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya Pengaduan Masyarakat baik secara langsung, surat atau secara online (Tlp/WA), yang harus segera ditindaklanjuti.</li><li>b. Kebutuhan Kesiapan Personil baik PPNS maupun Satpol PP untuk kegiatan penegakan Perda.</li><li>c. Kebutuhan Peningkatan Personil anggota Linmas dalam menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka perlindungan masyarakat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan konsultan.</li><li>a. Dikarenakan Satpol PP sebagai Satgas Penanganan Wabah COVID-19 di bidang KP4A, kegiatan banyak difokuskan kepada penanganan dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19.</li><li>b. Keterbatasan personil yang terfokus pada kegiatan penanganan wabah virus corona.</li><li>c. Ada beberapa kegiatan yang belum sesuai jadwal pelaksanaan.</li></ul>
7	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</li><li>b. Penyelesaian kegiatan tepat waktu.</li><li>c. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran.</li><li>b. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan dikarenakan menggunakan aplikasi SIPD.</li><li>c. Pergeseran Anggaran Kegiatan.</li><li>d. Pandemi menjadi penyebab beberapa kegiatan belum atau tidak dapat dilaksanakan</li><li>e. <i>Refocussing</i> Anggaran Bansos/Hibah Tidak Tersalurkan Karena Data CPCL di Lapangan dengan di Penjabaran APBD berbeda.</li></ul>
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</li><li>b. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</li><li>c. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.</li><li>d. Beberapa program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang disusun.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pada pelaksanaan kegiatan TA. 2021 beberapa kegiatan masih sering terlambat memproses LS.</li><li>b. Realisasi kegiatan tidak sesuai dengan alokasi anggaran.</li><li>c. Operasionalisasi laporan penatausahaan melalui aplikasi SIPD masih mengalami hambatan sehingga menyebabkan keterlambatan pengajuan SP2D GU.</li><li>d. Dalam hal pengadaan barang dan jasa adanya perubahan-perubahan harga barang yang tidak dapat diprediksi terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah.</li></ul>
9	Dinas Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pimpinan yang suport langsung dan secara berlanjut mengevaluasi dan mengawal pada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terjadi pandemi COVID-19 menyebabkan berubahnya arah kebijakan anggaran sehingga terjadi penyesuaian</li></ul>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	<p>setiap kegiatan.</p> <p>b. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</p> <p>c. Koordinasi yang baik antara DP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan serta penyediaan data dan informasi.</p> <p>d. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung pelaksanaan kegiatan.</p> <p>e. Adanya aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya</p> <p>f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja memadai</p>	<p><i>refocusing</i> dan relokasi anggaran dan berdam-pak kebijakan Program Kegiatan DP3AKB</p> <p>b. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan.</p> <p>c. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran.</p> <p>d. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan.</p> <p>e. Kekurangcermatan da-lam penyusunan Target Keuangan dan Fisik</p> <p>f. Ketidaksepehaman antara verifikatur keuangan dengan pegelola kegiatan terkait kelengkapan SPJ</p>
10	Dinas Lingkungan Hidup	<p>a. Pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, koordinasi yang baik dengan pihak terkait.</p> <p>b. Sarana dan prasarana kerja yang memadai.</p> <p>c. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</p> <p>d. Ada kontribusi dari Perangkat Daerah lainnya dalam upaya peningkatan kualitas air</p> <p>e. Dokumen perencanaan sudah sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>f. Peningkatan inventarisasi dan mitigasi gas rumah kaca, serta koordinasi dan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota dan pelaku usaha untuk meningkatkan keterlaporan data upaya penurunan emisi gas rumah kaca.</p>	<p>a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan.</p> <p>b. Proses administrasi peng-adaan barang/ jasa mengalami keter-lambatan.</p> <p>c. Terdapat kegiatan yang bergantung terhadap kegiatan lain atau lembaga lain.</p> <p>d. Dampak dari COVID-19 yang membuat beberapa program kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana.</p> <p>e. Tingkat keterlaporan data yang belum optimal</p>
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	<p>a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</p> <p>b. Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/ kota</p>	<p>a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/ kegiatan.</p> <p>b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran.</p>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		dalam penyediaan data dan informasi. c. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.	c. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan. d. Terjadinya wabah COVID-19 sehingga diberlaku-kannya PPKM Darurat.
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh DPM-Desa. b. Adanya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa. c. Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kememterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). d. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat – provinsi Jawa Barat antara lain : digitaslisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem berbasis IT.	a. Banyaknya desa yang membutuhkan pembinaan, dengan aksesibilitas yang belum memadai. b. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa. c. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan desa dan kapasitas keuangan desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar terutama untuk desa yang kuantitas Sumber Daya Alam terbatas di desa perbatasan. d. Keterbatasan jaringan jalan dan sarana penghubung lainnya serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa. e. Belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat lokal dalam pembangunan desa. f. Minimnya informasi dan akses masyarakat desa terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dengan kerjasama investasi.
13	Dinas Perhubungan	a. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. b. Faktor Pendorong realisasi tercapai dikarenakan menurunnya volume kendaraan di Jalan Provinsi karena adanya PPKM.	a. Adanya refocussing anggaran pada beberapa program dan kegiatan b. Adanya kendala teknis dilapangan, sehingga dikaji ulang untuk rencana pembangunan selanjutnya. c. Beberapa indikator belum menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) d. Faktor Penghambat yang menyebabkan target tidak



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			tercapai di bidang perkeretaapian adalah kaitannya dengan perijinan yang dikeluarkan oleh pusat yaitu Surat Rekomendasi Ijin Operasi dari Kementerian Perhubungan. e. Belum adanya data base untuk rencana kebutuhan faslalin terutama untuk daerah rawan kecelakaan. f. Terlambatnya proses lelang sehingga uang muka pembangunan fisiknya tidak terbayarkan megakibatkan realisasi rendah. g. Kurangnya komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan Bidang/ UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam percepatan pelaksanaan kegiatan. h. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/ kegiatan.
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	a. Pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. b. Pemeberlakuan SOP yang jelas. c. Tingkat pemahaman pimpinan terhadap keamanan informasi ( <i>security awareness</i> ) d. Sejalan dengan program SPBE dari KemenPAN-RB	a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan. b. Keterkaitan dengan lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan. c. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan.
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan. b. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.	Masih ada permasalahan pada aplikasi SIPD terkait penarikan anggaran.
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan. b. Koordinasi yang baik antar bidang dalam penyediaan data dan informasi. c. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan. d. Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan	a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan. b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran. c. Komponen <i>e-budgeting</i> yang terlalu detail mem-buat pelaksanaan ke-giatan tidak fleksibel. d. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum terkendali



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan.	e. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020
17	Dinas Pemuda Dan Olahraga	a. Adanya komitmen dari pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan dan sesuai dengan pengalokasian anggaran kegiatan. Serta komitmen dalam membereskan administrasi keuangan tepat waktu.	a. Dengan aplikasi penatausahaan yang baru, memerlukan adaptasi lagi sehingga terjadi keterlambatan dalam pengusulan kebutuhan anggaran kegiatan b. Peningkatan SDM dalam pengelolaan aplikasi penatausahaan keuangan ini perlu ditingkatkan.
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tidak melaporkan	Tidak melaporkan
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan. b. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi. c. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.	a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan. b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan prog-ram/kegiatan dan peng-anggaran. c. Kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan pelak-sanaan kegiatan terganggu.
20	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	a. Pelaksanaan evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; b. Pendorong untuk urusan kebudayaan: Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk proses penetapan/pemeringkatan/pencabutan status cagar budaya pro-vinsi, telah terbentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jabar melalui SK Gub No. 430.05/Kep.593-Disparbud/2020;</li> <li>• Untuk proses regis-trasi cagar budaya kabupaten dan kota, telah terbentuk TACB di 9 Kabupaten/Kota (Kota Bandung, Kota</li> </ul>	a. Sistem SIPD yang belum sempurna menyebabkan pengajuan anggaran dan SPJ menjadi terkendala. Pengelola keuangan di Perangkat Daerah tidak bisa mengelola sistem se-cara mandiri dikarenakan sistem yang kurang ke-bergunaan ( <i>user friendly</i> ). b. Tidak adanya sosialisasi SIPD kepada pengelola di Perangkat Daerah se-hingga hanya bersandar pada buku manual yang sulit dipahami. c. Pada Program Pemasaran Pariwisata penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NesparDA) mundur dari jadwal dikarenakan belum ada kesepakatan dengan BPS terkait mekanisme kerjasama. d. Beberapa SPJ masih dalam proses kelengkapan dokumen karena ada beberapa penye-suaian yang harus dipenuhi.



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		<p>Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Purwakarta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersusunnya bahan rekomendasi penetapan/pemeringkatan cagar budaya peringkat provinsi;</li> <li>• Telah diajukan Ran Kepgub untuk 7 cagar budaya peringkat provinsi;</li> </ul> <p>Program Pengembangan Kebudayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersusunnya juklak pendukung kegiatan kebudayaan melalui keputusan kepala dinas.</li> </ul> <p>c. Kesesuaian DPA dengan jadwal pelaksanaan dan ketentuannya.</p> <p>d. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</p>	<p>e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya system <i>database</i> cagar budaya yang ter-integrasi</li> <li>• Belum tersedianya tim <i>register</i> cagar budaya provinsi dan kabu-paten/kota;</li> <li>• Tidak tersedianya Anggaran survey cagar budaya sebagai dossier kajian, pendataan, dan pencatatan</li> <li>• Tidak tersedianya ang-garan dukungan sertifikasi TACB kabupaten/ kota</li> <li>• Tidak tersedianya peningkatan kom-petensi TACB</li> <li>• Tidak tersedianya anggaran untuk kajian lanjutan cagar budaya</li> </ul> <p>f. Program Pengembangan Kebudayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan/tuntutan implementasi pemajuan kebudayaan;</li> <li>• Antara lain untuk penyusunan/ pem-bangunan data base berbasis <i>web</i> yang ter-integrasi dan linear dengan Dapobud RI, Regnas Cagar Budaya, dan kebutuhan “<i>updating</i>” PPKD Pro-vinsi sesuai dengan amanat undang-undang, kajian di bidang kebudayaan sebagai salah satu IKP 2021, Keikutsertaan Pekan Kebudayaan Nasional, kongres bahasa daerah sesuai amanat Perda, Pekan Kebudayaan Daerah sebagai salah satu event wajib dalam implemen-tasi pemajuan kebudayaan;</li> <li>• Masih kurangnya ang-garan untuk perekam-an karya budaya se-bagai salah satu syarat pengusulan WBTb.</li> </ul> <p>g. Memberikan kesempatan untuk perbaikan alokasi anggaran agar efektif.</p>
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan	a. Adanya pandemi COVID-19 salah satu yang mendorong kegiatan seperti pertemuan, pelatihan,	a. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini tidak mencukupi dalam melaksanakan beban kerja yang cukup



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Peternakan	<p>koordinasi, monitoring, evaluasi dll melalui virtual sehingga realisasi kinerja dapat melebihi target indikator kinerja.</p> <p>b. Melaksanakan peningkatan kapasitas/ <i>in house training</i> bagi seluruh aparatur di DKPP Jawa Barat agar dengan jumlah pegawai yang masih kurang tetap dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.</p> <p>c. Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektifitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan.</p>	<p>tinggi di DKPP Provinsi Jawa Barat kondisi ini ikut memberi kontribusi pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja.</p> <p>b. Adanya beberapa kegiatan DKPP Jabar Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan dengan personil yang sama dan terbatas.</p> <p>c. Adanya pandemi COVID-19 yang menjadi keterbatasan kerja dengan membatasi hubungan sosial dan bekerja di rumah. Banyak anggaran yang <i>direfocussing</i> sehingga realisasi terhadap target menjadi kurang maksimal.</p>
22	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	<p>a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</p> <p>b. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</p> <p>c. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Kegiatan yang dilaksanakan pada beberapa jenis tanaman sesuai dengan jadwal tanam.</p>	<p>a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/ kegiatan.</p> <p>b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran.</p> <p>c. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan.</p> <p>d. Kegiatan yang dilaksanakan pada beberapa jenis tanaman tidak sesuai dengan jadwal tanam.</p> <p>e. Adanya pandemi COVID-19 sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.</p> <p>f. Adanya pekerjaan konstruksi yang tidak dilaksanakan akibat gagal tender.</p>
23	Dinas Perkebunan	<p>a. Antusiasme tinggi dari Perangkat Daerah kabupaten/kota dan peserta pelatihan (petani perkebunan).</p> <p>b. Dukungan langsung dari Pimpinan Perangkat Daerah dan sinergi antar stakeholder di daerah (dinas, asosiasi petani, petani).</p> <p>c. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya.</p> <p>d. Sarana dan prasarana kerja memadai.</p>	<p>a. Adanya pembaruan sistem aplikasi yang menyebabkan terhambatnya pengajuan keuangan LS/GU tidak sesuai dengan alur kas.</p> <p>b. Pengajuan belum maksimal dikarenakan adanya pergeseran rincian anggaran kas.</p> <p>c. Minimnya informasi yang diterima petani mengenai kelembagaan Kelompok Tani.</p> <p>d. Terbatasnya anggaran sehingga jumlah poktan yang terfasilitasi terbatas</p>





NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. Adanya <i>refocussing</i> anggaran untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawalan, dan monev kurang optimal</li><li>f. Pelaksanaan pelayanan sertifikasi benih, terutama pemeriksaan lapangan mengalami keterlambatan akibat pemberlakuan PSBB/PPKM.</li><li>g. Petugas kebun dinas dan penangkar benih tanaman perkebunan belum sepenuhnya memahami teknologi perbenihan, sehingga penyediaan benih belum maksimal abik kuantitas maupun kualitas.</li><li>h. Masih banyak petani yang belum mengetahui teknik pengendalian OPT yang ramah lingkungan.</li><li>i. Penerapan mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim dan penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP) belum optimal.</li><li>j. Terdapat overlapping regulasi berkaitan dengan perizinan usaha serta konflik perpanjangan HGU.</li></ul>
24	Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat Edaran Gubernur tentang Pencanaan Gerakan Tanam pelihara Pohon (GTPP) yang melibatkan semua <i>stakeholder</i> di Jawa Barat baik dari Instansi Pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.</li><li>b. Adanya aplikasi Simantri bibit juga membantu realisasi tercapai.</li><li>c. Dukungan anggaran untuk Pembangunan Hutan Rakyat dari sumber dana APBD maupun DAK (APBN).</li><li>d. Menurunnya Kejadian Bencana Alam, menurunnya Perambahan Kawasan Hutan dan Perusakan Kawasan Hutan.</li><li>e. Meningkatnya produksi hasil hutan yang terdiri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Faktor Penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah karena adanya Pandemi COVID-19, sehingga kunjungan masyarakat menjadi terbatas karena adanya PPKM Level 3 dan Level 4.</li><li>b. Penurunan Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar karena beberapa penangkar sudah tidak beroperasi.</li></ul>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		dari Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu baik di Dalam Kawasan hutan maupun Di luar Kawasan hutan	
25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.</li><li>Sarana dan prasarana kerja yang memadai.</li><li>Koordinasi yang baik antara dinas dengan Cabang Dinas serta UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Belum terbitnya peraturan pelaksana pasca terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Bara sehingga kegiatan untuk sektor pertambangan belum dapat dilaksanakan.</li><li>Belum terbitnya Peraturan Presiden terkait dengan kewenangan kon-servasi energi di pemerintah daerah sehingga kegiatan konservasi energi belum dapat dilaksanakan.</li><li>Belum terbitnya peraturan pelaksana terkait perizinan pada sektor ketenagalistrikan pasca terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2021 sehingga kegiatan terkait per-izinan sektor ketenaga-listrikan belum dapat dijalankan.</li><li>Belum terbitnya peraturan pelaksana terkait kewenangan sektor air tanah pasca terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.</li></ol>
26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"><li>Koordinasi yang intensif antar bidang dan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.</li><li>Komitmen dan kerja sama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Surat Edaran Nomor 91/KU.01/BPKAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.</li><li>Arahan dari BPKAD Jawa Barat dalam Surat Edaran Nomor 1305/KU.03.10/ Anggaran tentang Penyesuaian Belanja Operasional Penunjang APBD TA 2022 tanggal 29 Juli 2022.</li><li>Sampai Penyerapan pada Peningkatan Sarana Distribusi belum maksimal, dikarenakan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) terdapat beberapa hambatan, antara lain:</li></ol>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan adanya pengurangan waktu pelaksanaan karena adanya sanggah diawal yang seharusnya 105 Hari Kerja menjadi 85 Hari Kerja di proses lelangnya;</li><li>• Sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama antara Kontraktor Pelaksana dengan Konsultan Pengawas dan dihadiri oleh PPK, PPTK, Bantuan Teknis Dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Tim Unit Manajemen Proyek Strategis (UMPS), bahwa PT. Dana Simba telah bekerja dan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tahap kontruksi dengan tingkat kemajuan pekerjaan sebesar 93%, sehingga hal ini membutuhkan perpanjangan masa waktu pelaksanaan pekerjaan;</li><li>• Sisa pekerjaan sebesar 7% dapat dilaksanakan dengan penambahan waktu selama 50 (Lima Puluh) hari kalender dengan pengenaan besaran sanksi denda keterlambatan sesuai dengan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;</li><li>• Pembangunan Pasar Kreatif dan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) dan Dukungan tidak terselesaikan pada Tahun 2021 menyebabkan capaian kinerja disperindag menjadi kurang optimal, karena Pagu Anggaran Pembangunan Pasar Kreatif dan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) dan Dukungan sebesar Rp. 25.294.335.095,- atau 23.03 Persen dari Pagu</li></ul>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Adapun Realisasi anggaran pada kegiatan Pembangunan Pasar Kreatif dan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) dan Dukungan sebesar Rp. 20.462.233.231,- atau 80.90 Persen, atau deviasi sebesar 19.10 Persen atau Rp. 4.832.101.864,-. Distribusi Provinsi (PDP) dan dukungan mengalami penyesuaian jadwal pada Desember 2021.
27	Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>Adanya koordinasi dan komunikasi serta sinergitas diantara pemegang kegiatan di Biro, Verifikatur, dan pihak ketiga</li><li>Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana kerja memadai, ketersediaan dana tepat waktu, dll.</li><li>Pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal; pelaporan berkas kegiatan tepat waktu; pemahaman SDM mengenai teknis pelaksanaan kegiatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Terjadinya pandemi COVID-19 sejak awal Triwulan I Tahun 2020, berdampak pada terjadinya pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan <i>refocussing</i> anggaran.</li><li>Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 maka perlu diperlukan adanya penyesuaian target dan anggaran pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.</li><li>Kekurang cermatan dalam penyusunan alokasi anggaran, target keuangan dan fisik, RUP dan KAK; kasus SK PPK/PPTK terlambat diterima; serta kurangnya pemahaman mengenai teknis pembayaran non tunai menjadi hambatan.</li></ol>
28	Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"><li>Koordinasi yang baik antara bagian dalam penyediaan data dan informasi.</li><li>Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program / kegiatan dan penganggaran</li><li>Komponen <i>e-budgeting</i> yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel.</li></ol>
29	Badan Penghubung	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</li><li>Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meng-</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Adanya Pandemi COVID-19 sehingga membatasi pelaksanaan beberapa kegiatan karena dapat menimbulkan keru-munan yang berten-tangan dengan Prokes Kesehatan.</li></ol>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		<p>optimalkan pelaksanaan Kegiatan melalui online/ Virtual dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.</p> <p>c. Koordinasi dan komunikasi yang dijalin cukup baik antara dua lokasi kantor Badan Penghubung yaitu Kantor di Jl.Pembangunan II No.3-5 Jakarta serta di Anjungan Jawa Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).</p>	<p>b. SDM Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat yang masih diperlu ditingkat-kan kualitas maupun kuantitasnya.</p>
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>a. Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.</p> <p>b. Melaksanakan peningkatan kapasitas/<i>in house training</i> bagi seluruh aparatur di Bappeda Provinsi Jawa Barat agar dengan jumlah pegawai yang masih kurang tetap dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.</p> <p>c. Sinergi antar unit organisasi yang menyebabkan efektivitas pencapaian kinerja sebagai-mana yang ditargetkan.</p>	<p>a. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini tidak memenuhi beban kerja yang cukup tinggi di Bappeda Provinsi Jawa Barat, karena ingin mencapai tujuan dan sasaran dengan sebaik-baiknya, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja.</p> <p>b. Adanya pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan dengan personil yang sama sementara sebagai-mana pada poin a terdapat permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya aparatur.</p> <p>c. Terkendala pelaksanaan penatausahaan keuangan imbas dari kebijakan baru penggunaan Sistem Informasi Penatausahaan yang belum sempurna;</p> <p>d. Kegiatan terjadi bersamaan dengan kegiatan lain; dan</p> <p>e. Adanya pandemi COVID-19 yang menjadi keterbatasan kerja dengan membatasi hubungan sosial dan bekerja di rumah.</p>
31	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	<p>a. Penyesuaian regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran,</p>	<p>a. Adanya pembatasan aktifitas di masyarakat sebagai dampak Pandemi COVID-19, sehingga terhambat/tertundanya realisasi kegiatan.</p> <p>b. Regulasi Pemerintah Pusat yang belum harmonis.</p>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		<p>penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.</p> <p>b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>c. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik.</p> <p>d. Dukungan anggaran melalui APBD, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.</p>	<p>c. Target pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah turun karena kondisi Pandemi COVID-19 masih berlangsung sampai dengan tahun 2021 sehingga berdampak pada perekonomian secara umum termasuk di dalamnya sektor usaha.</p> <p>d. Belum adanya perencanaan yang efektif dan efisien, sehingga perencanaan kebutuhan yang ada sering berbeda dengan kebutuhan yang sebenarnya.</p> <p>e. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani pemanfaatan BMD.</p> <p>f. Koordinasi penanganan sengketa yang belum optimal.</p> <p>g. Masih belum lengkapnya input data pada sistem informasi aset yang ada.</p> <p>h. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>
32	Badan Pendapatan Daerah	<p>a. Komitmen seluruh unit kerja Bapenda optimal melaksanakan program/kegiatan sesuai yang direncanakan yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Gubernur Jawa Barat.</p> <p>b. Perjanjian Kinerja individu secara konsisten dilaksanakan.</p> <p>c. Koordinasi yang baik antara Bapenda Pusat dengan P3DW se Jawa Barat dalam penyediaan data dan informasi.</p> <p>d. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait.</p> <p>e. Disiplin dalam melaksanakan realisasi sesuai dengan anggaran kas.</p>	<p>a. Pandemi COVID-19 (adanya PSBB, PPKM).</p> <p>b. Adanya Surat Edaran Sekda tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencairan Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.</p> <p>c. Masih menggunakan anggaran murni sehingga realisasi penyerapan anggaran dianggap masih rendah bilamana menggunakan target anggaran pergeseran maka realisasi anggaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan di pergeseran.</p> <p>d. Kegiatan/Sub Kegiatan belum dilaksanakan karena bersifat penyediaan.</p> <p>e. Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal sudah dilaksanakan akan tetapi pembayaran dilakukan pada Triwulan IV TA.</p>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		<ul style="list-style-type: none"><li>f. Rapat-rapat koordinasi masih bisa dilaksanakan dengan cara virtual.</li><li>g. Semakin meningkatnya peran sistem pengendalian internal di setiap unit pelaksana kegiatan serta arahan perbaikan kebijakan dari kantor Pusat Bapenda.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Adanya kesalahan dalam memilih Jenis Komponen (Seharusnya belanja modal);</li><li>g. Berapa P3DW tidak memiliki Pejabat Pengadaannya sendiri dilaksanakan oleh Pejabatan dari P3DW yang lain sehingga koordinasi agak terhambat.</li></ul>
33	Badan Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Target perjanjian kinerja yang sudah disepakati baik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana.</li><li>b. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di dalam Badan Kepegawaian Daerah.</li><li>c. Struktur organisasi dan kelembagaan BKD sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas.</li><li>d. Alat pendukung seperti alat pengolah data, internet, dst dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah tersedia di Dinas kesehatan provinsi Jawa Barat.</li><li>e. Koordinasi yang baik terjalin dengan instansi terkait dalam penyusunan rencana anggaran.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat dalam proses pertanggung-jawaban keuangan.</li><li>b. Terdapat beberapa indi-kator kinerja terukur capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran sedangkan kegiatan telah dilaksanakan.</li><li>c. Penetapan indikator kinerja sub kegiatan yang kurang tepat sehingga kinerja menjadi sulit terukur secara jelas.</li><li>d. Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pandemi COVID-19 yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.</li></ul>
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terdapat beberapa perubahan anggaran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat yang menjadikan alokasi anggaran yang lebih efisien.</li><li>b. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang atau sub bagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan pada level tersebut. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan bertugas dalam mengendalikan,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sehingga kegiatan yang semula akan dilakukan secara klasikal, berubah pola penyelenggaraannya menjadi secara virtual.</li><li>b. Hambatan kedua terjadi karena adanya perubahan pejabat struktural di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berdampak pada terlambatnya rencana pelaksanaan kegiatan.</li><li>c. Adapun hambatan selanjutnya yang merupakan salah</li></ul>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		mengevaluasi, dan memberikan persetujuan melalui aplikasi. c. Koordinasi yang baik terjalin antara Bappeda-BPKAD-Biro Organisasi pada proses <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> dan penetapan komponen belanja yang menjadi regulasi berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).	satu dampak dari hambatan kedua yaitu terjadinya perubahan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
35	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	a. Koordinasi yang baik antara bidang dalam penyediaan data dan informasi. b. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan. c. Tersedianya Fungsional Peneliti dengan berbagai macam kepakaran.	a. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran. b. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan. c. Adanya perubahan pagu anggaran yang menyebabkan pengurangan beberapa Sub Kegiatan pada Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat. d. Pengurangan Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menyebabkan indikator kinerja yang berubah semula Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu menjadi Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan. e. Adanya <i>refocussing</i> anggaran dikarenakan pandemi COVID-19.
36	Inspektorat	a. Dalam penyusunan PKPT sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan tugas pengawasan. b. Kebutuhan tenaga ahli sesuai jenjang pendidikan fungsional secara bertahap tiap tahun diusulkan/diprogramkan. c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai jenis pelatihan maupun pendidikan dan pelatihan penjurangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan	a. Terbatasnya jumlah aparat pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas auditor dan P2UPD yang belum memadai dan meningkatnya kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para auditor secara proporsional. Seiring dengan semakin berkurangnya tenaga Auditor yang memasuki masa pensiun, Inspektorat harus menyiapkan tenaga-tenaga baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu relatif





NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		<p>merupa-kan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas para aparatur pengawasan secara internal.</p> <p>d. Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun kabupaten/kota dalam penyediaan data dan informasi.</p>	<p>singkat, yang mana hal ini tentu sulit untuk mewujudkannya</p> <p>b. Ketatnya waktu pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundang-undangan, jumlah Audit ditambah dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung di-tujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupa-kan limpahan dari Pemerintah Pusat (KemenPANRB, KPK, Setneg atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lainnya), yang harus segera di-tangani dan diselesaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemeriksaan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sempit dan terbatas, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan itu sendiri.</p>
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<p>a. Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektifitas pen-capaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan.</p>	<p>a. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini tidak memenuhi beban kerja yang cukup tinggi di BPBD Provinsi Jawa Barat, karena ingin mencapai tujuan dan sasaran dengan sebaik-baiknya, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja.</p> <p>b. Adanya pelaksanaan kegiatan BPBD Provinsi Jawa Barat yang di-laksanakan pada waktu yang bersamaan dan dengan personil yang sama sementara seba-gaimana pada poin a terdapat permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya aparatur.</p> <p>c. Adanya pandemi COVID-19 yang menjadi keter-batasan kerja dengan membatasi hubungan sosial dan bekerja di rumah.</p>



NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan.</li><li>b. Sinergitas antar pemangku kebijakan (<i>stakeholder</i>) sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.</li><li>c. Komitmen seluruh pihak untuk dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terdapat perbedaan satuan antara indikator program dan indikator kegiatan (persen dan jumlah).</li><li>b. Terdapat beberapa indikator kegiatan yang harus diperbaiki/ direvisi karena tidak dapat dihitung sebagai output.</li><li>c. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mmembuat keterbatasan pergerakan progress kegiatan, sehingga banyak kegiatan yang memerlukan metode baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.</li></ul>

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021, diolah



### 2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021

Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut dapat memberikan informasi penting mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 diperoleh dari evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada triwulan III-2021.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021, maka kelengkapan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 pada tingkat kegiatan di Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2021 sebanyak 3.345 kegiatan. Jumlah program pada APBD Tahun 2021 adalah 773 Program. Hasil pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah pada tahun 2021, diperoleh informasi bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 91,21 persen dan capaian (penyerapan) anggaran kegiatan pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah 89,16 persen. Berikut ini disajikan rincian rata-rata tingkat capaian kinerja anggaran kegiatan dalam Program Tahun 2021 seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.106**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Tahun Anggaran 2021**

Indikator	Target Kinerja (Persen)	Realisasi Kinerja (Persen)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Ketercapaian Terhadap Target Kinerja
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
Pendidikan	100,00	96,70	16.727.430.720.240	16.423.598.424.614	Tidak Tercapai
Kesehatan	58,07	24,98	2.410.513.925.228	2.078.439.700.776	Tidak Tercapai
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,98	81,48	1.758.768.734.250	1.505.304.769.750	Tidak Tercapai
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83,77	85,31	793.223.395.924	782.256.820.846	Tercapai
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	97,50	89,28	54.973.043.173	52.039.427.608	Tidak Tercapai
Sosial	70,46	80,82	243.220.596.250	230.276.239.260	Tercapai
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>					
Tenaga Kerja	76,81	86,27	111.810.657.126	109.537.893.936	Tercapai
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	53,95	54,12	28.377.322.472	27.115.596.441	Tercapai



Indikator	Target Kinerja (Persen)	Realisasi Kinerja (Persen)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Ketercapaian Terhadap Target Kinerja
Anak					
Pertanahan	51,11	51,11	761.987.505	697.919.659	Tercapai
Lingkungan Hidup	69,60	81,77	97.664.752.550	94.037.851.787	Tercapai
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,11	87,59	14.246.983.003	13.706.467.347	Tercapai
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	99,61	141.601.817.352	138.540.450.137	Tidak Tercapai
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87,76	86,30	47.026.931.697	46.625.191.743	Tidak Tercapai
Perhubungan	76,91	76,49	146.161.363.378	134.169.786.809	Tidak Tercapai
Komunikasi dan Informatika	73,75	77,27	203.438.494.212	194.215.334.560	Tercapai
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46,62	57,05	81.494.028.120	77.376.176.634	Tercapai
Penanaman Modal	53,38	59,16	40.296.280.304	39.254.303.117	Tercapai
Kepemudaan dan Olahhrga	37,22	7,57	510.744.811.437	484.131.271.034	Tidak Tercapai
Statistik	100,00	100,00	1.425.314.556	1.412.760.663	Tercapai
Persandian	89,15	96,59	1.177.472.040	1.164.776.813	Tercapai
Kebudayaan	59,59	60,77	65.758.614.126	64.415.271.867	Tercapai
Perpustakaan	64,20	62,20	51.170.459.843	49.408.893.921	Tidak Tercapai
Kearsipan	57,67	57,67	2.418.511.063	2.314.230.249	Tercapai
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
Kelautan dan Perikanan	85,60	94,30	92.242.789.032	85.003.392.904	Tercapai
Pariwisata	18,67	29,78	26.681.843.004	26.485.335.666	Tercapai
Pertanian	60,52	59,80	218.944.983.450	208.218.691.762	Tidak Tercapai
Kehutanan	49,75	64,75	239.333.559.679	229.399.045.273	Tercapai
Energi dan Sumber Daya Mineral	68,61	75,07	73.178.582.580	72.616.462.481	Tercapai
Perdagangan	71,59	91,37	108.363.280.827	100.781.444.980	Tercapai
Perindustrian	50,53	73,59	1.489.218.348	1.459.040.548	Tercapai
Transmigrasi	85,00	100,00	351.228.250	346.446.350	Tercapai

Sumber: Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

\*dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan tahun ke-3 dalam periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dipengaruhi oleh kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Secara umum, evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2021 bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian berbagai program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka



mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode RPJMD Tahun 2018-2023.

Program-program pembangunan daerah tahun 2023 merupakan upaya sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah periode RPJMD Tahun 2018-2023, yakni: 1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; 2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 4) Pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami perlambatan; 5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2021 mengalami hambatan dan kendala imbas dari Kejadian Luar Biasa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia diawal tahun 2020. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan optimal seiring adanya kebijakan nasional mengenai *refocusing* APBN/APBD Tahun Anggaran 2021 dimana dukungan pendanaan pembangunan lebih difokuskan kepada upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi. Pelaksanaan program dan kegiatan yang masih terhambat dan tidak berjalan optimal tersebut mempengaruhi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2021.

Kinerja pembangunan daerah dapat diketahui dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sebagai alat manajemen untuk mengetahui pencapaian kinerja terhadap apa yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2021. Tolak ukur yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah 3 (tiga) komponen terukur dari RPJMD yang menjadi target pembangunan daerah meliputi 1) indikator makro; 2) indikator kinerja utama pemerintah daerah; dan 3) indikator kinerja program pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2.104, dapat diketahui bahwa terdapat 342 indikator kinerja program (*outcome*) pembangunan daerah yang dievaluasi. Tingkat ketercapaian indikator kinerja program tersebut mencapai **61,40 persen**. Dengan kata lain, terdapat 210 indikator kinerja program yang hasil realisasinya memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan indikator kinerja program yang tidak tercapai sebanyak 47 indikator atau sebesar **13,74 persen**. Selain itu, terdapat 85 indikator yang tidak

tersedia datanya atau tidak dilaporkan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab.

### 2.3.3 Realisasi Sasaran RPJMD

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan 2 (dua) tahun terakhir. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kinerja perekonomian makro, namun juga berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat terefleksikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi sasaran RPJMD sampai dengan tahun 2021, kinerja pemerintahan daerah menunjukkan kinerja yang positif dan semakin baik. Hal ini tercermin dari capaian 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dimana secara rata-rata capaian 2021 diatas 100 persen. Tabel 2.107 menyajikan ringkasan realisasi sasaran RPJMD yang terbagi dalam 5 (lima) misi.

**Tabel 2.107**  
**Ringkasan Realisasi Sasaran RPJMD Menurut Misi**

MISI RPJMD	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Sasaran Misi	
		s.d Tahun 2021	Dibanding Target Akhir Periode RPJMD Tahun 2023
<i>Misi Kesatu.</i> Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban	2	101,77%	99,65%
<i>Misi Kedua.</i> Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	10	104,50%	101,62%



MISI RPJMD	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Sasaran Misi	
		s.d Tahun 2021	Dibanding Target Akhir Periode RPJMD Tahun 2023
<i>Misi Ketiga.</i> Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah	9	102,88%	90,27%
<i>Misi Keempat.</i> Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan	7	108,87%	96,41%
<i>Misi Kelima.</i> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	2	121,64%	112,27%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda. 2022

Secara rinci, hasil evaluasi realisasi sasaran RPJMD sampai dengan 2021 menunjukkan capaian kinerja dengan predikat “ST atau Sangat Tinggi” (tingkat capaian kinerja diatas 90 persen) , sementara dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD di tahun 2023 capaian kinerja pemerintahan daerah terbagi dalam 3 (tiga) kategori dengan predikat “ST : Sangat Tinggi”, “S : Sedang”, dan “SR : Sangat Rendah”. Gambaran kinerja pembangunan daerah ini mengindikasikan bahwa dengan tercapainya atau terpenuhinya sasaran pembangunan daerah maka tujuan pembangunan daerah pun kemungkinan besar akan tercapai pada akhir periode RPJMD 2018-2023 dan diharapkan akan berdampak terhadap kinerja pembangunan makro di Provinsi Jawa Barat.



**TABEL 2.108**  
**Realisasi Indikator Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	2021		Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2021	Kategori Predikat Kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2023	Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2023	Kategori Predikat Kinerja
			Target	Realisasi					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,6	70,52	102,80%	ST	69,6	101,32%	ST
2	Indeks Demokrasi	Persen	70,79	79,72	100,75%	ST	72,79	97,98%	ST
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,77	7,97	97,49%	ST	7,54	105,70%	ST
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,45	9,82	106,41%	ST	9,69	101,34%	ST
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,06	73,23	100,23%		73,11	100,16%	
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,60	70,24*	100,92%	ST	70,3	99,91%	ST
7	Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,30	89,36	100,07%	ST	90,02	99,27%	ST
8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,58	8,61	100,35%	ST	8,64	99,65%	ST
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,52	12,61	100,72%	ST	12,56	100,40%	ST
10	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	50	49*	98,00%	ST	54	90,74%	ST
11	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	19,56	24,78	126,69%	ST	24,21	102,35%	ST
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	72,00	87,50	121,53%	ST	75,00	116,67%	ST
13	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/kapita	1050	1280,53	121,96%	ST	1150	111,35%	ST
14	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	41,00	43,51	106,12%	ST	47,00	92,57%	ST
15	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7	0,72	102,86%	ST	0,72	100,00%	ST
16	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	2	-	-	6	33,33%	SR
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,78	62,69	103,14%	ST	61,6	101,77%	ST
18	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4,29	4,23	98,60%	ST	5,22	81,03%	ST





No	Indikator Sasaran	Satuan	2021		Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2021	Kategori Predikat Kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2023	Tingkat Ketercapaian terhadap Target 2023	Kategori Predikat Kinerja
			Target	Realisasi					
19	Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1922	1,1913	99,92%	ST	1,1902	100,09%	ST
20	Indeks Risiko Bencana	Poin	149	134,94	90,56%	ST	144	93,71%	ST
21	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	84	84,10	100,12%	ST	85,6	98,25%	ST
22	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	51,7	53,14	102,79%	ST	53,9	98,59%	ST
23	Nilai Tukar Petani	Poin	102,25	97,84	95,69%	ST	104,52	93,61%	ST
24	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,91	2,84	97,59%	ST	3,08	92,21%	ST
25	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,78	4,22	151,80%	ST	3,72	113,44%	ST
26	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,23	3,19	98,76%	ST	4,45	71,69%	S
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB	Triliun Rupiah	501,52	547,93	109,25%	ST	531,87	103,02%	ST
28	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	19,9	21,67	108,89%	ST	21,1	102,70%	ST
29	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB (78,01)	BB (78,01)	100%	ST	A (82,01)	95,12%	ST
30	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	56,00	80,24	143,29%	ST	62,00	129,42%	ST

Keterangan:

- Target bersumber dari Perubahan RPJMD 2018-2023
- Realisasi bersumber dari LKPJ 2021
- ST : Sangat Tinggi (jika capaian kinerja diatas 90%)
- S : Sedang (jika capaian kinerja diatas 65% sampai dengan 75%)
- SR : Sangat Rendah (jika capaian kinerja sama atau kurang dari 50%)



## **2.4 Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat**

### **2.4.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19**

Penyakit menular yang disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-Cov-2) atau yang lazim dikenal sebagai COVID-19 sejak tanggal 9 Maret 2020 telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Pandemi. Artinya, COVID-19 telah menyebar secara luas di dunia, termasuk di Indonesia. Hingga tanggal 21 Juni 2022 tercatat 544.811.319 kasus terkonfirmasi pada 221 Negara dengan 18.364.786 Kasus Aktif, 520.104.759 Kasus telah sembuh, namun terdapat 6.341.774 Kasus menyebabkan meninggal dunia (sumber: coronavirus.thebaselab.com).

Sementara di Indonesia pandemi COVID-19 telah dikategorikan sebagai bencana non alam sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebanyak 6.070.933 kasus terkonfirmasi tercatat hingga tanggal 21 Juni 2022 jumlah ini meningkat sebanyak 1.678 kasus terkonfirmasi baru, dengan 10.095 kasus aktif, 5.904.134 Sembuh dan 156.700 Meninggal (sumber: covid19.go.id). Dari 19 (sembilan belas) Provinsi yang mengalami penambahan kasus Terkonfirmasi Baru Jawa Barat menempati urutan ke-2 dengan 291 Kasus dibawah DKI Jakarta dengan 953 kasus baru. Kondisi pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat khususnya menuntut respon kesiapsiagaan yang harus didukung oleh kesiapan sistem kesehatan daerah yang optimal baik dari aspek upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Melihat data pada data.covid19.go.id hingga 21 Juni 2022, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.109.114 kasus, dengan jumlah kasus aktif sebanyak 1.820 kasus dan jumlah sembuh sebanyak 1.091.440 kasus dan 15.854 Kasus meninggal dunia. Sedangkan jumlah orang dalam perawatan sebanyak 13.464 orang. Data kasus baik kasus terkonfirmasi positif, sembuh, meninggal, dan dalam perawatan memang masih terbilang rendah bila dibandingkan lonjakan kasus di awal tahun 2022 yang dikarenakan munculnya berbagai varian virus baru seperti varian Delta yang meningkatkan *mortality rate* dan juga varian omicron yang meningkatkan *positivity rate*, namun dalam 1 (satu) bulan terakhir angka-angka tersebut menunjukkan



kecenderungan meningkat sehingga membutuhkan upaya ketat untuk mengendalikan penularan. Lonjakan ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun multi faktor. Pertama, telah terjadi penurunan proteksi diri yang terjadi di masyarakat. Kedua, cakupan vaksinasi booster di Indonesia juga masih sedikit terutama di kelompok rentan seperti lansia. Ketiga, ada kemungkinan munculnya subvarian BA.4 dan BA.5 yg lebih efektif bersirkulasi di populasi.

Tentu Faktor-faktor tersebut harus membuat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan, tercatat data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi mejadi kota dengan kasus konfirmasi terbanyak dengan 107 kasus dan kabupaten dengan kasus konfirmasi tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan 34 kasus. Melihat data sebaran, 86,60 persen kasus konfirmasi berasal dari wilayah BODEBEK (252 kasus). Untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) pemerintah menetapkan pemberian vaksinasi dengan Provinsi Jawa Barat mendapat target sebanyak 37,91 juta orang. Cakupan vaksinasi dosis 1 di Provinsi Jawa Barat, hingga Kamis, 21 April 2022, telah mencapai 94,69 persen. Angka ini setara dengan 35,89 juta peserta vaksin. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 hingga telah tercapai 80,24 persen atau setara 30,41 juta orang dari target. Vaksinasi dosis ketiga/*booster* telah mencapai 18,81 persen atau sebanyak 7,13 juta orang.

Berdasarkan kondisi fasilitas kesehatan saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penanganan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga angka penularan dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tersedia, tentunya akan memperlambat penanganan kasus akibat pandemi COVID-19. Sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah Jawa Barat masih belum memenuhi standar minimal penanganan. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit (TT) menurut *World Health Organization* (WHO) adalah 1 (satu) TT untuk 1000 penduduk, sehingga dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebesar kurang lebih 49 juta jiwa maka dibutuhkan total tempat tidur sebanyak 49 ribu TT. Sementara kondisi saat ini, dari 390 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat, jumlah total tempat tidur yang tersedia adalah 37.296



tempat tidur, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.088 TT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.088 Puskesmas dimana 292 unit (26,84 persen) merupakan Puskesmas Rawat Inap dan 796 unit (73,16) merupakan Puskesmas Non Rawat Inap. Selain kebutuhan TT, permasalahan penting lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah persoalan data. Hal ini disebabkan tidak sinkronnya data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidakteraturan data ini menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan. Selain ketidaksinkronan data, permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah ketidaktepatan data dan penemuan data kasus sehingga memerlukan sistem informasi yang saling terintegrasi, transparan, dan terkini serta peningkatan kapasitas tes dan penguatan kegiatan *surveilans*.

#### **2.4.2 Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021**

Kondisi ekonomi pada masa pandemi tercermin dari komponen pembentuk PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi serta ekspor dan impor. konsumsi rumah tangga menurun, konsumsi pemerintah teralihkan dari konsumsi untuk pembangunan menjadi konsumsi untuk penanggulangan pandemi COVID-19, investasi diperkirakan menurun, ekspor dan impor tumbuh negatif.

Konsumsi rumah tangga kondisi Maret 2020 menurun. Penurunan Konsumsi Rumah Tangga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Keyakinan Konsumen (IEK) dan Konsumsi listrik. IKK turun menjadi 109,1 pada bulan Maret 2020, dari kondisi sebesar 118 bulan Februari 2020. IEK turun menjadi 124,2 pada bulan Maret 2020, dari kondisi sebesar 134,6 pada bulan Februari 2020. Adapun konsumsi listrik pada triwulan I-2020 (Januari-Februari) sebesar -29,05 persen (*y-o-y*).

Konsumsi Pemerintah yang sudah dialokasikan untuk pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis dan program kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa



Barat, dilakukan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar 4,48 triliun rupiah. Pendapatan Daerah terkoreksi 2,6 triliun rupiah. Selain itu terjadi penurunan realisasi belanja pemerintah khususnya belanja modal.

Investasi pada masa pandemi COVID-19 terhenti karena seluruh dunia teralih perhatiannya pada penanganan pandemi COVID-19. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurun 12 persen pada tahun 2020. Ekspor pada bulan Januari 2021 net masih surplus USD 1,64 miliar dan tumbuh positif 8,20 persen (*y-o-y*). Adapun impor tercatat tumbuh negatif -4,01 persen (*y-o-y*).

#### **2.4.3 Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang berada dalam kategori Level 1, 11 (sebelas) kabupaten/kota berkategori Level 2, dan ada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Level 3.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap dunia pendidikan bahwa aktivitas belajar dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi sudah memberlakukan pembelajaran daring. Sehingga tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan dari tatap muka langsung menjadi jarak jauh.

Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya.

Dampak lain adalah kemiskinan meningkat yang salah satunya disebabkan juga oleh pengangguran, ketika tinggal di rumah bagi masyarakat yang pendapatannya harian maka otomatis tidak akan mendapat penghasilan, permasalahan lainnya juga ini akan lebih berat bagi orang-orang yang memang kondisinya sudah miskin sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kesimpulannya akibat dari pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat adalah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, kualitas pendidikan terganggu.



#### 2.4.4 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Dengan adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terganggu. Kebijakan penerapan PSBB mengakibatkan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan. Kondisi ini mempengaruhi terhadap keuangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kemudian dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan *refocusing* terhadap program dan anggaran. Sampai dengan bulan April 2020, anggaran untuk penanganan kesehatan dan *social safety net* (bantuan tunai dan bantuan nontunai) sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut masih akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19. Apabila pandemi COVID-19 masih terus berlangsung maka anggaran akan terus mengalami *refocusing*.

Selain itu, dari sisi pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami deviasi sebesar 12,74 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp41 triliun. Hal serupa, dana transfer dari pusat berkurang yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang telah mengoreksi penurunan rencana penerimaan dana transfer ke pemerintah daerah untuk tahun 2020.

Selain itu, dari sisi pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami deviasi sebesar 9,69 persen dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD 2020 sebesar Rp38,2 triliun.

## **2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang mana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperlukan sebagai dasar pijakan dalam perencanaan tahun 2023 mendatang. Secara umum, analisis permasalahan pembangunan daerah terbagi dalam 4 (empat) kelompok permasalahan daerah, yakni permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan sumber daya manusia dan masalah sosial, dan tata kelola pemerintahan.

### **2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Jawa Barat yang harus menjadi perhatian tahun 2023, diantaranya 1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan; 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; 5) Kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 6) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:



**1. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota masih tinggi dan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor Industri Pengolahan**

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan pada subbab 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat, permasalahan pembangunan daerah pada aspek pengembangan ekonomi adalah masalah disparitas pengembangan ekonomi wilayah dan dependensi terhadap satu sektor ekonomi. Masalah disparitas pengembangan ekonomi terlihat dari peranan atau kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi (lihat Tabel 2.14 dan Gambar 2.12). Sampai dengan tahun 2021, data menunjukkan secara spasial perekonomian Provinsi Jawa Barat disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, masing-masing adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bandung yang memberikan kontribusi paling besar (> 10 persen). Sumbangan PDRB kabupaten/kota tersebut mencapai 50,34 persen terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Sementara kabupaten/kota yang lain, secara rerata hanya menyumbang sebesar 2,16 persen.

Dominasi peranan 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota tersebut sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami guncangan dampak dari kejadian luar biasa pandemi COVID-19, dimana kabupaten/kota tersebut terdampak cukup parah yang tergambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi cukup dalam (pertumbuhan negatif). Perbedaan peranan atau kontribusi PDRB kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas pengembangan ekonomi wilayah yang salah satu faktor penyebabnya adalah tidak meratanya investasi. Disparitas pengembangan ekonomi wilayah juga tercermin dari capaian indikator indeks Williamson, dimana pada tahun 2021 nilai indeks sebesar 0,667 (lihat Gambar 2.19). Artinya distribusi perekonomian antar kabupaten/kota menunjukkan ketidakmerataan.

Masalah lain yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi. Data yang disajikan pada Tabel 2.18 menunjukkan dominasi peranan sektor Industri Pengolahan. Pandemi COVID-19 memberikan pesan bahwa ketergantungan terhadap sektor tersebut memberikan dampak buruk bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang



dengan basis ekonomi sektor Industri Pengolahan mengalami tekanan yang besar yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam. Hal ini mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan pada tahun 2020.

Pemerataan ekonomi perlu terus diupayakan untuk menghindari dampak ketimpangan. Jika tidak ditangani akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan semakin timpang disebabkan konsentrasi kekayaan pada daerah tertentu, rentan terhadap guncangan ekonomi, berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat, serta ketimpangan peluang akan meningkatkan kesenjangan pendapatan di masa mendatang.

## **2. Ketimpangan pendapatan relatif tinggi**

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang masih dihadapi dalam menjalankan roda pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Data 3 (tiga) tahun terakhir (lihat Gambar 2.16) menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio) yang cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat di tahun 2021. Ketimpangan distribusi pendapatan perlu menjadi fokus kebijakan di masa mendatang mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan gangguan keamanan, serta penurunan permintaan yang bisa mengerem pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Meskipun perekonomian Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, akan tetapi adanya persoalan distribusi pendapatan yang belum merata dapat menimbulkan masalah pada saat ini maupun di masa datang.

Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil-hasil pembangunan di Jawa Barat. Oleh karena itu upaya untuk mengurangi ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Disamping itu, perlu terus diupayakan mengurangi ketimpangan kesempatan antar penduduk menurut golongan pengeluaran terhadap aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasarnya (kesehatan dan pendidikan).



### **3. Konektivitas antar wilayah belum optimal**

Konektivitas atau keterhubungan antarwilayah diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah (lihat Gambar 2.19). Dalam konteks kebijakan pembangunan kewilayahan, pendekatan konsep perspektif regional menekankan pentingnya konektivitas. Konektivitas diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antarwilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota melalui skema bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Pembangunan jalan maupun prasarana perhubungan lainnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah.

Capaian tingkat konektivitas antar wilayah pada tahun 2021 tercatat sebesar 43,51 persen dari target yang ditetapkan sebesar 41 persen pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa infrastruktur maupun ketersediaan prasarana transportasi berkontribusi positif terhadap aksesibilitas wilayah. Namun demikian, tingkat konektivitas masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai target pada akhir periode RPJMD sebesar 50-52 persen sehingga diharapkan ketimpangan ekonomi wilayah antara kabupaten/kota yang berada di wilayah selatan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah tengah dan utara semakin berkurang.

### **4. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah**

Kualitas lingkungan hidup merupakan merupakan salah satu isu penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun dampak dari peningkatan jumlah penduduk. Kondisi lingkungan di Provinsi Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan penduduk yang terus meningkat diiringi dengan peningkatan pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan yang berimplikasi pada meningkatnya alih fungsi lahan dan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Gambaran kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).



Hingga tahun 2021, nilai IKLH mencapai 62,69 meningkat 1,10 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan secara umum terjadi perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, jika dilihat dari capaian nilai IKLH menurut parameternya (lihat Tabel 2.109), kualitas air, udara dan tutupan lahan menunjukkan kualitas yang masih relatif rendah.

Kualitas air yang rendah mengindikasikan tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air, sumber pencemar dapat diperkirakan berasal dari limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Adapun kualitas udara dipengaruhi oleh pencemaran yang berasal dari emisi cerobong industri, emisi gas buang kendaraan bermotor, pembakaran terbuka sampah, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Sementara, rendahnya kualitas tutupan lahan lebih dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan permukiman. Kualitas air laut yang cukup baik masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut karena jumlah titik lokasi pemantauan diperkirakan belum representatif menunjukkan kualitas air laut Jawa Barat.

Capaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 disertai peringkat capaian dibandingkan dengan provinsi lainnya berdasarkan perhitungan dan analisis KLHK adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.109

**Tabel 2.109**  
**Capaian Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2021**

Keterangan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Lahan
Nilai	43,09	79,34	87,42	40,78
Peringkat	ke-34	ke-32 dari 34 provinsi	ke-2 dari 34 provinsi	ke-29 dari 34 provinsi

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022

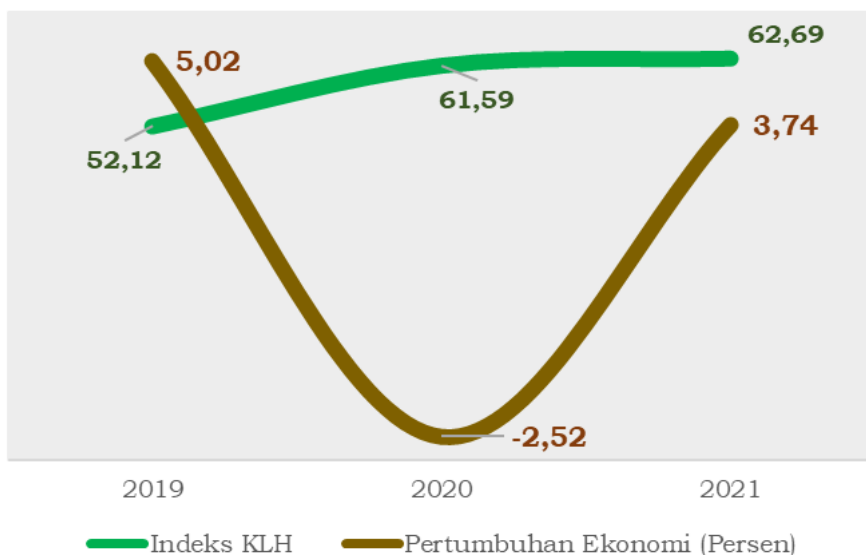
Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke-34 untuk capaian Indeks Kualitas Air (IKA), urutan ke-32 untuk capaian Indeks Kualitas Udara (IKU), dan urutan ke-29 untuk capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL). Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Jawa Barat berada pada urutan ke-2 dari 34 provinsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, urutan capaian seluruh provinsi dihitung berdasarkan perhitungan IKLH Nasional yang diperoleh dari penjumlahan setiap indeks provinsi dikalikan dengan bobot provinsi yang terdiri dari faktor luas wilayah dan penduduk. Dalam hal ini, analisis IKLH nasional dan urutan capaian IKLH provinsi dinilai perlu dikaji kembali, tidak hanya mempertimbangkan faktor luas wilayah dan penduduk, tetapi juga mempertimbangkan lebih lanjut mengenai karakteristik aktivitas perekonomian untuk provinsi yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Sebagai contoh, tingginya aktivitas industri sebagai salah satu sumber pencemar utama dari kualitas air, air laut dan udara di Pulau Jawa, tentunya akan menimbulkan beban pencemaran lebih besar untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa.

Dampak pandemi COVID-19 menunjukkan fenomena yang menarik terhadap lingkungan. Guncangan ekonomi yang ditandai dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, justru berdampak positif terhadap kualitas lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan IKLH pada tahun yang sama dibanding tahun sebelumnya (lihat Gambar 2.55). Peningkatan IKLH berlanjut di tahun 2021, dimana kinerja ekonomi tumbuh positif meskipun belum mencapai level sebelum pandemi. Beberapa penelitian mengkonfirmasi pembatasan mobilitas masyarakat dan aktivitas produksi di sektor industri berdampak positif terhadap kualitas lingkungan di masa pandemi, disebabkan oleh penurunan emisi gas rumah kaca, membaiknya kualitas perairan dan udara perkotaan, serta peningkatan keanekaragaman hayati.

Membaiknya beberapa parameter lingkungan tersebut dikhawatirkan hanya bersifat sementara dan akan kembali memburuk jika aktivitas masyarakat serta ekonomi berjalan normal kembali. Penurunan emisi selama pandemi disinyalir hanya efek jeda dan tak terencana, yang belum tentu bermakna pada perubahan kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Ke depan, tantangan pembangunan pilar ekonomi dan sosial harus disertai pembangunan pilar lingkungan/ekologi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui upaya mitigasi, adaptasi, maupun pengurangan dampak dari perubahan iklim.

**Gambar 2.55**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022

## 5. Disparitas kualitas sumber daya manusia antar kota dengan kabupaten

Provinsi Jawa Barat diproyeksikan akan mengalami fenomena bonus demografi dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2030. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan dimana komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+). Hasil SP 2020 menunjukkan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) semakin meningkat dalam 3 (tiga) periode sensus penduduk (lihat Gambar 2.9).

Guna memaksimalkan potensi dari bonus demografi tersebut, pengembangan kualitas SDM menjadi sangat krusial. Perkembangan capaian indikator IPM sebagai ukuran kualitas SDM sampai dengan tahun 2021 masih berada di angka 72,45 poin, artinya perlu upaya lebih keras untuk mencapai angka acuan IPM 80 poin yang merepresentasikan kualitas SDM yang unggul dan maju melalui tiga dimensi, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kualitas SDM yang tidak merata masih menjadi masalah dalam pembangunan daerah di Jawa Barat (Gambar 2.22 dan Tabel 2.23). Hal ini



disebabkan adanya kesenjangan dalam memperoleh pelayanan dasar di bidang kesehatan yang ditunjukkan melalui data capaian indikator Umur Harapan Hidup (UHH) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.25 dan Gambar 2.24. Sementara pada dimensi pendidikan yang ditunjukkan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tabel 2.28 dan Gambar 2.26 serta capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.30 dan Gambar 2.28.

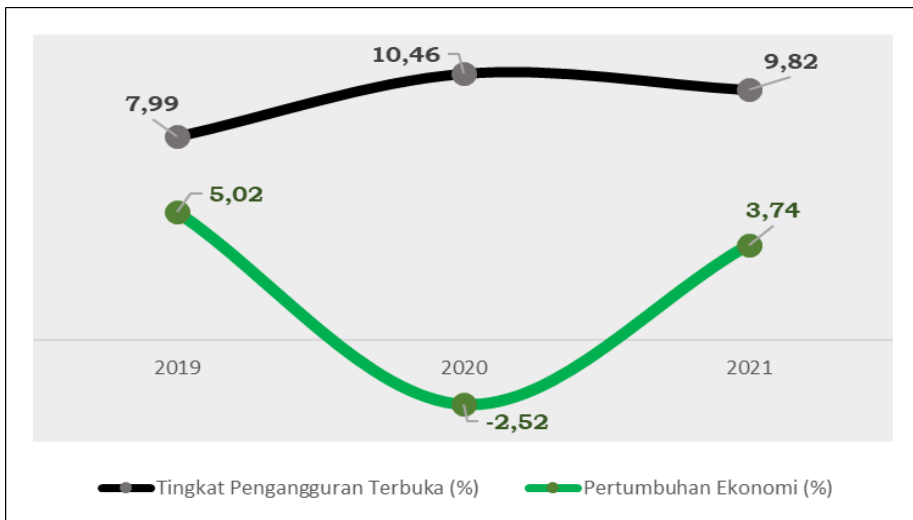
menunjukkan disparitas yang lebih tajam. Hal ini mengindikasikan setidaknya terdapat dua akar permasalahan, yakni sebagian besar penduduk utamanya yang berdomisili di wilayah kabupaten masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan sehingga berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan.

## **6. Tingkat pengangguran terbuka relatif tinggi**

Tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD 2018-2023, Jawa Barat masih dihadapkan pada permasalahan tingkat pengangguran terbuka yang relatif lebih tinggi dibanding nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa (rujuk Tabel dan/atau Gambar 2.56). Hal ini perlu menjadi fokus kebijakan mengingat tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pembangunan daerah dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan tenaga kerja sangat besar (Gambar 2.56). Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 berdampak terhadap penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tingkat pengangguran terbuka meningkat pesat, naik 2,47 persen poin.

**Gambar 2.56**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 2019-2021 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Peningkatan jumlah dan persentase pengangguran disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor sebagai akar masalah, yakni ketidakseimbangan antara sisi penawaran (angkatan kerja) dengan sisi permintaan (lapangan kerja). Tabel 2.110 memperlihatkan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap jumlah penduduk bekerja. Data pada Agustus 2020 hingga Februari 2021 menunjukkan jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan cukup besar yang mengindikasikan serapan tenaga kerja berkurang cukup signifikan. Sementara, keadaan ketenagakerjaan pada Agustus 2021 meskipun jumlah penduduk bekerja meningkat cukup pesat namun belum mencapai kondisi sebelum pandemi dimana penduduk bekerja bertambah lebih dari satu juta orang setiap semesternya. Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat, hingga Agustus 2021 masih terdapat 4,63 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi dan ±460.000 orang diantaranya menjadi pengangguran.

**Tabel 2.110**  
**Perubahan Jumlah Penduduk Bekerja Tahun 2019-2021 (Orang)**

Feb 2019	Águs 2019	Feb 2020	Águs 2020	Feb 2021	Águs 2021
1.080.000	1.120.000	470.000	- 380.000	- 310.000	630.000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Akar masalah lain yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat adalah rendahnya daya saing tenaga kerja muda. Indikasi ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan (lihat Gambar 2.38), dimana TPT Jawa Barat didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 dimana hasil riset SMERU menyatakan pekerja yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah mereka yang lulusan SMK dan bekerja di perkotaan.

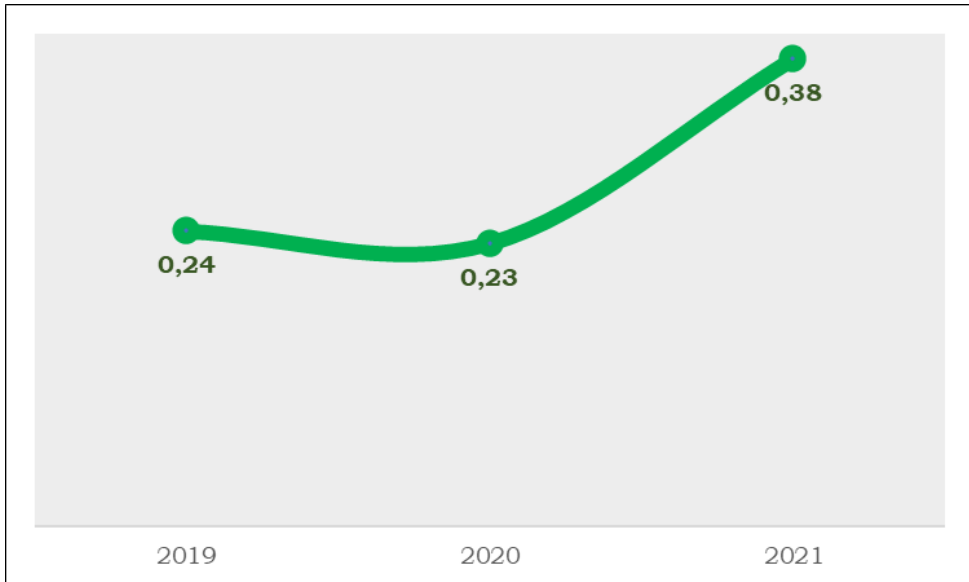
#### **7. Jumlah penduduk miskin meningkat signifikan akibat guncangan ekonomi**

Pandemi COVID-19 yang mulai menginfeksi pada Maret 2020 memberikan pesan penting, yakni terdapat kelompok masyarakat yang rentan miskin akibat guncangan ekonomi. Hal ini tercermin dari jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat signifikan dibanding kondisi sebelum pandemi (lihat Gambar 2.31). Kondisi demikian menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat mengalami kemunduran lima tahun ke belakang (jumlah penduduk miskin pada 2021 berselisih sedikit dibanding jumlah penduduk miskin di tahun 2016).

Permasalahan lain terkait dengan kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin ekstrem yang mengalami peningkatan, hal ini menyebabkan semakin besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk program perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, bantuan sembako dll) yang tentu saja membebani APBD provinsi. Kondisi kemiskinan ekstrem dapat dilihat dari semakin melebarnya ketimpangan pendapatan diantara kelompok penduduk miskin yang diukur melalui indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagaimana disajikan pada Gambar 2.57.



**Gambar 2.57**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

#### **8. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan belum berjalan efektif dan optimal**

Tata kelola pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Konsep akuntabilitas menunjukkan pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik dalam mengelola berbagai urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2021 masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 yang mencapai 78,68 dengan kategori “BB”. Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dibanding tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian



komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagaimana Tabel 2.111.

**Tabel 2.111**  
**Komponen yang Dinilai Masih Rendah dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021**

Komponen Reformasi Birokrasi	Skala	Nilai	Status
ASN Profesional	0-100	39,76	Sangat Rendah
Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	63,84	Zona Kuning

Sumber: Kementerian PANRB. 2022

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar 85,01 meskipun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 81,28., namun jika dibandingkan dengan nilai minimum capaian tertinggi kategori “AA” sebesar 90, maka masih ada selisih sebesar 4,99. Artinya kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat masih jauh dari perwujudan *good governance* yang menandakan seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*) dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

### **2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2020, evaluasi capaian RKPD Tahun 2021 sampai dengan triwulan I, dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.



## **2.5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

### **2.5.2.1.1 Bidang Pendidikan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Secara umum permasalahan bidang pendidikan mencakup 2 (dua) hal penting dan mendasar yaitu :

a. Utilisasi Sumber Daya antara lain :

1. Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan:

- a) Rasio Siswa SMA/SMK/SLB per Guru yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB. "Guru pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru).
- b) Rasio Siswa SMA/SMK/SLB per Guru Sertifikasi yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru bersertifikasi pada jenjang pendidikan SMA/MA. "Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar disatuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang SMA atau yang sederajat adalah 20:1 dan untuk untuk MA atau yang sederajat 15:1". (PP No. 74 tahun 2008 Tentang Guru yang mengacu pada SNP ).
- c) Rasio Guru SMA/MA Berkualifikasi Akademik per Sekolah yaitu perbandingan antara jumlah guru SMA/SMK/SLB berkualifikasi minimal S1/DIV dengan jumlah sekolah. "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru).



- d) Persentase Guru SMA/MA Berkualifikasi yaitu perbandingan antara jumlah guru berkualifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/MA dan dinyatakan dalam persen. "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru).
  - e) Persentase Guru SMA/MA Bersertifikasi yaitu perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/MA dan dinyatakan dalam persen. "Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar disatuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang SMA atau yang sederajat adalah 20:1 dan untuk untuk MA atau yang sederajat 15:1". (PP No. 74 tahun 2008 Tentang Guru yang mengacu pada SNP).
  - f) Masih belum memadainya Insentif untuk GTK Non PNS, hal ini menuntut perhatian pemerintah khususnya terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah di bawah Kemendikbud atau Kemenag.
2. Masih belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran termasuk masih ada beberapa kecamatan yang belum terbangun sekolah negeri jenjang SMA/SMK/SLB;
  3. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan (bangunan sekolah dan ruang kelas), serta sarana prasarana penunjang lainnya untuk pendidikan formal dan informal;
  4. Belum optimal dan memadainya Utilisasi dan modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh disetiap satuan pendidikan serta pengembangan fitur-fitur pembelajaran daring yang menarik minat dan mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan, penguatan jaringan internet di *blank spot* area, distribusi kuota data internet gratis secara merata



- dan tepat sasaran sesuai operator yang memiliki jangkauan baik di masing-masing wilayah. Mengingat trend pendidikan jarak jauh ini akan terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca pandemi COVID-19 perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terutama dalam peningkatan mutu pembelajarannya;
5. Pelatihan-pelatihan *life skill* dan *soft skill* yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum optimal dalam mengatasi masalah pengangguran;
  6. Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru); dan
  7. Belum efektifnya pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
- b. Dukungan Optimalisasi Anggaran Pembangunan Pendidikan baik yang bersumber dari APBN, APBD dan Sumbangan Partisipasi Masyarakat melalui fasilitasi Pemerintah Daerah, yaitu belum optimalnya penguatan dan *capacity building* SDM aparatur terkait manajemen pengelolaan keuangan khususnya manajemen belanja dan penatausahaan keuangan daerah secara keberlanjutan

#### **2.5.2.1.2 Bidang Kesehatan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Belum optimalnya upaya Kesehatan yang dilakukan baik upaya Kesehatan perorangan maupun upaya Kesehatan masyarakat, dilihat dari masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi, belum optimal pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, serta masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
2. Belum optimalnya pembiayaan Kesehatan di Provinsi Jawa Barat terutama untuk menjamin pembiayaan Kesehatan bagi yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. masyarakat miskin untuk berobat di Rumah Sakit, melalui pembiayaan SKTM di rumah sakit;
3. Belum terpenuhinya SDM Kesehatan di fasilitas Kesehatan sesuai standar. Terbatasnya tenaga kesehatan ditunjukkan dengan indikator Puskesmas Lengkap 9 (sembilan) Jenis Tenaga



- Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 baru mencapai 45,81 persen serta masih kurangnya pelatihan untuk tenaga Kesehatan;
4. Belum terpenuhinya sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan/minuman;
  5. Belum optimalnya pengelolaan manajemen data dan informasi Kesehatan serta regulasi Kesehatan, saat ini belum ada regulasi manajemen system informasi Kesehatan provinsi;
  6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat ditunjukkan dengan Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tahun 2021 baru mencapai 59,2 persen.
  7. Masih rendahnya gizi masyarakat dan masih terdapatnya balita gizi buruk dan *stunting*.

#### **2.5.2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Perkembangan kewilayahan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk;
2. Disparitas Wilayah Utara dan Selatan;
3. Sebagian besar dari jalan Provinsi sudah habis umur rencananya;
4. Sebagian dari ruas jalan Provinsi berada pada jalur rawan bencana;
5. Muatan Lebih *Overdimention and Overload* (ODOL) Kendaraan;
6. Pemanfaatan kapasitas jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang melintas;
7. Peralatan untuk pemeliharaan jalan belum memadai;
8. Pertumbuhan kendaraan tidak diikuti dengan penambahan jalan;
9. Kerusakan infrastruktur karena bencana alam yang tidak diimbangi dengan penanganannya;
10. Belum tersediannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena penyesuaian terhadap peraturan perundangan;
11. belum terpenuhinya jumlah ketersediaan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang;



12. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum dan akses aman/akses layak/akses jaringan perpipaan, yang disebabkan antara lain :
  - a. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal;
  - b. Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum;
  - c. Keterbatasan pendanaan APBD dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum
  - d. Kinerja kelembangaan belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga pengelolaan system tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat;
13. Belum optimalnya cakupan pelayanan dan akses air limbah domestik (akses aman/akses layak), yang disebabkan antara lain:
  - a. Masih tingginya angka BABS, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang PHBS, terutama menyangkut air limbah domestik
  - b. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat, dan belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan limbah;
  - c. Masih rendahnya pelayanan limbah terpusat, tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terolah di IPAL dan/atau kebocoran tangka septik, dan masih terbatasnya regulasi pengelolaan air limbah di tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. Terbatasnya pendanaan di tingkat Kabupaten/Kota untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah sistem terpusat;
  - e. Rendahnya komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan limbah.
14. Belum optimalnya pengelolaan persampahan (aspek penanganan/pengurangan) yang disebabkan antara lain :
  - a. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarang serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah (3R);
  - b. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir);



- c. Pengelolaan persampahan berorientasi 3R (dari hulu ke hilir) yang belum efektif dan terpadu;
  - d. Masih rendahnya pembiayaan pengelolaan persampahan
15. Belum optimalnya pengelolaan drainase yang disebabkan antara lain:
- a. Ketidakmampuan badan air penerima dalam menampung air limpasan dari permukiman;
  - b. Tidak terbentuknya sistem drainase buatan;
  - c. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi;
  - d. Penyumbatan/tidak mengalirnya saluran;
  - e. Belum optimalnya penanganan terhadap daerah rawan banjir;
16. Belum kuatnya dukungan pengelolaan sistem drainase;
- a. Masih belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau; dan
  - b. Masih belum optimal penyelenggaraan bangunan gedung.

#### **2.5.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

1. Masih rendahnya akses Rumah Layak Huni yang disebabkan antara lain :
  - a. Harga rumah yang sesuai standar tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan di bawah MBR;
  - b. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di Rumah tidak layak huni (Rutilahu);
  - c. Tingkat pemahaman masyarakat yang belum memadai tentang perlunya rumah dilengkapi dengan parasarana air minum dan sanitasi;
2. Masih besarnya luasan kawasan permukiman kumuh yang disebabkan antara lain :
  - a. Keterbatasan pengetahuan tentang regulasi penataan bangunan (rumah) dan lingkungan
  - b. Pelayanan PSU yang tidak memenuhi standar;
  - c. Dukungan PSU yang terbatas karena belum menjadi aset pemerintah dikarenakan pengembang belum menyerahkan asetnya yang disebabkan prasyarat untuk serah terima belum terpenuhi;





3. Persoalan penyediaan tanah untuk rumah MBR: keterbatasan dan mahalnnya harga lahan, pembangunan rumah bagi MBR yang sesuai dengan batas harga pemerintah berlokasi jauh dari perkotaan dan tempat kerja, dan belum ada intervensi pemerintah untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan dan mengendalikan harga lahan;
4. Tahapan perizinan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman masih belum transparan dan akuntabel;
5. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana yang tercantum dalam RTRW/RDTR karena dalam beberapa kasus belum ada dokumennya.

#### **2.5.2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

1. Masih terdapat ancaman konflik sosial dan konflik agama yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
2. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana dan kebakaran;
3. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku;
4. Belum Optimalnya pelaksanaan program pengorganisasian Pedagang Kaki Lima (PKL) dilokasi yang strategis; (kewenangan kabupaten/kota);
5. Masih tingginya pelanggaran hukum oleh masyarakat dan dunia usaha;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas;
7. Luasnya jangkauan sosialisasi dan pengawasan serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
8. Kualitas dan kuantitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memadai;
9. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan daerah;
10. Belum optimalnya pelaksanaan operasi ketentraman dan ketertiban umum; dan



11. Terbatasnya jumlah diklat keterampilan tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **2.5.2.1.6 Bidang Sosial**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial meliputi:

1. Jumlah data Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS di Kabupaten Kota belum terdata dengan baik sehingga pelayanan terhadap LKS masih belum maksimal;
2. Pemanfaatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puskessos) masih belum sesuai standar;
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Dinas Sosial Tingkat Provinsi terutama terhadap layanan pengemis dan gelandangan masih belum mencapai 100 persen, karena adanya klien panti yang melarikan diri dari panti;
4. Pendataan data DTKS masih belum valid atau akurat, sehingga penyaluran bantuan terhadap masyarakat miskin belum tepat sasaran ;
5. Masih tingginya persentase penduduk miskin di Jawa Barat;
6. Aksesibilitas pelayanan tenaga kaum disabilitas, terutama dalam akses mencari kerja masih minim;
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia pekerja sosial di dalam panti, dan belum ketersediaannya SDM, dengan kemampuan Teknis tertentu;
8. Kualitas pelayanan panti lanjut usia terlantar perlu ditingkatkan;

#### **2.5.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **2.5.2.2.1 Bidang Tenaga Kerja**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja meliputi:

1. Kualitas tenaga kerja masih rendah  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) banyak didominasi lulusan SMK. TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang Pendidikan lainnya yaitu sebesar 16,71 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 6,07 persen. Hal ini terjadi akibat *missmatch* (tidak sesuai) antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri atau perusahaan.



2. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment* " cukup tinggi. Data rilis BPS Jabar pada Agustus 2021 menunjukkan masih banyak penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu (pekerja tidak penuh) yaitu sebanyak 6,82 juta orang, pekerja yang bekerja dibawah 35 jam/minggu ini sangat rentan untuk menjadi penganggur.
3. Pengangguran terbuka di perkotaan lebih banyak BPS merilis data terbaru terkait pengangguran Jawa Barat menurut daerah tempat tinggal Pengangguran terbuka di perkotaan lebih banyak. Berdasarkan data per Agustus 2021, Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Agustus 2021, TPT perkotaan (8,32 persen) lebih tinggi hampir 2 (dua) kali TPT di daerah perdesaan (4,17 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT nasional, yaitu turun dibandingkan Agustus 2020 dan naik dibandingkan Februari 2021. Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan dan perdesaan turun masing-masing sebesar 0,66 persen poin dan 0,54 persen poin. Namun jika dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan dan perdesaan naik masing-masing sebesar 0,32 persen poin dan 0,06 persen poin.
4. Kurangnya kemampuan angkatan kerja untuk usaha mandiri Data BPS pada Agustus tahun 2021 menyebutkan bahwa penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di Jawa Barat masih di dominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 37,46 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,09 persen.
5. Struktur atau kualitas tenaga kerja Jawa Barat saat ini masih jauh tertinggal dari provinsi lain dan juga Indonesia secara keseluruhan - Dari sebanyak 23,80 juta orang angkatan kerja Jawa Barat pada Agustus 2019, 38,66 persennya menamatkan pendidikan tertinggi setingkat Sekolah Dasar. Angka ini terpaut jauh dari DKI Jakarta yang hanya 13,13 persen angkatan kerjanya dengan pendidikan tertinggi di Sekolah Dasar. - Tidak sampai 10 persen angkatan kerja Jawa Barat yang merupakan lulusan universitas.
6. Kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Jawa Barat dalam



mengejar produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0.

7. Minimnya Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan

Kebutuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Jawa Barat berdasarkan Permenakertrans RI Nomor : PER02/MEN/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: kebutuhan personil pengawas ketenagakerjaan adalah:  $22.500/60 = 375$  orang. Kebutuhan personil pengawas ketenagakerjaan Spesialis (muda) adalah:  $25.000/96 = 260$  orang. Sedangkan jumlah pegawai pengawas saat ini = 162 orang, maka masih terdapat kekurangan:  $375 - 162 = 213$  orang.

8. Masih minimnya Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Jawa Barat berdasarkan data Disnakertrans masih dirasa kurang jika dibanding dengan jumlah pencari kerja, Jumlah pencari kerja/penganggur di Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 2,43 juta orang, tidak sebanding dengan jumlah BLK dan LPK tahun 2021 yang hanya 3.013 unit dengan total kapasitas 127.177, selain itu sarana dan prasarana BLK dan LPK yang ada pun sangat terbatas, baik SDM-nya (instruktur, pengelola) maupun infrastruktur lainnya.

9. Produktivitas tenaga kerja masih rendah

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat masih tergolong rendah, dipicu tingkat kualitas kompetensi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Secara makro tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat masih relatif rendah. Kesempatan kerja yang tersedia belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh pencari kerja karena keterampilan dan kompetensi yang dianggap belum sesuai. Sektor yang paling rendah tingkat produktivitasnya terdapat pada industri padat karya, di mana banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA. Kondisi ini membuat industri menjadi lebih berat karena tidak mampu mengejar kapasitas produksi sehingga daya saing menjadi rendah dibanding produk impor.



10. Hubungan industrial belum kondusif  
Pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan terdampak merumahkan dan mem-PHK pekerjanya. Berdasarkan data Bidang HI & Wasnaker per Maret 2021 terdata 1.011 perusahaan yang merumahkan 81.374 pegawai dan 483 perusahaan mem-PHK 20.143 orang pegawainya. Tahun 2021 jumlah kasus yang masuk sebanyak 355 kasus (Agustus 2021). sementara jumlah petugas Fungsional Mediator Hubungan Industrial minim, 4 (empat) orang di Provinsi, 63 di kabupaten kota. Penetapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disambut dengan rencana *Judicial Review* oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh selain itu pada tahun 2021 kali pertamanya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan diterapkan di Provinsi Jawa Barat, hal ini berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial. Masyarakat makin sadar hukum sehingga makin banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Perjanjian Bersama, berpotensi diajukan melalui jalur hukum.
11. Perlindungan tenaga kerja masih rendah  
Salah satu indikasi bahwa pekerja/buruh masih merasakan rendahnya upaya perlindungan adalah rendahnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat, Dari data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 ditemukan bahwa dari 22,31 Juta (Agustus 2021) penduduk yang bekerja di Jawa Barat hanya sekitar 21,84 persen (4.872.338 orang) yang dilindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
12. Peluang untuk bekerja kembali terbatas  
Dalam beberapa tahun ini, model perekrutan calon pegawai yang dilaksanakan oleh perusahaan banyak mencari *fresh graduates*. *Fresh graduates* dianggap relatif lebih mudah untuk dibentuk sesuai dengan budaya kerja perusahaan karena belum memiliki pengalaman bekerja di tempat lain. Di satu sisi hal ini berdampak positif untuk penyerapan angkatan kerja baru, tetapi disisi lain mengurangi kesempatan bagi angkatan kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal ini membuktikan bahwa peluang untuk kembali bekerja sangat terbatas untuk korban PHK.



13. Turunnya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)  
Berdasarkan data SiskoTKLN BP2MI pada tahun 2020 pengiriman Pekerja Migran Indonesia asal (PMI) Jawa Barat mencapai 15.008 orang namun pada tahun 2021 pengiriman PMI asal Jawa Barat hanya sebanyak 2.552 orang (31 Oktober 2021), hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga beberapa negara penempatan membatasi penerimaan PMI
14. Identifikasi permasalahan ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 di Jawa Barat  
Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor ketenagakerjaan. Hal ini tergambar dari perkembangan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terdampak dari awal pandemi hingga dipenghujung Maret 2021. Jumlah perusahaan yang terdampak COVID-19 di awal pandemi terdapat 88 perusahaan yang merumahkan pegawainya sebanyak 14.053 orang dan jumlah perusahaan yang mem-PHK pegawainya terdapat 238 perusahaan dengan jumlah pegawai yang ter-PHK berjumlah 5.047 orang. Di akhir Maret 2021 terdapat 1.011 perusahaan yang merumahkan 81.374 pegawai dan 483 perusahaan mem-PHK 20.143 orang pegawainya. Kondisi ini terkait pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian Jawa Barat sehingga menyebabkan PHK.

#### **2.5.2.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

1. Kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap isu gender serta manfaat/peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan sehingga berdampak pada rendahnya penganggaran pembangunan yang responsif gender;
2. Pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal dan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Perlunya penguatan ekonomi perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga;
4. Masih tingginya tingkat perkawinan dibawah umur;



5. Keterwakilan perempuan di legislatif masih rendah, di bawah kuota 30 persen.

#### **2.5.2.2.3 Bidang Pangan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pangan meliputi:

1. Masih rendahnya konsumsi penganeekaragaman pangan masyarakat;
2. Tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah;
3. Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pola konsumsi kandungan energi dan protein serta kualitas bahan pangan produk pertanian yang rendah belum memenuhi standar yang mutu pangan; dan
5. Beredarnya pangan segar asal tumbuhan terpapar bahan racun cemaran seperti pestisida, formalin dan bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh manusia.

#### **2.5.2.2.4 Bidang Pertanahan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanahan meliputi:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memiliki data dan informasi asset pertanahan yang jelas dan akurat serta bisa diakses *stakeholder* yang berkepentingan.
2. Belum adanya data dan informasi spasial dan aspasial yang andal dan terintegrasi sebagai masukan(*input*) dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya bidang perumahan dan permukiman.
3. Belum adanya system yang baik sebagai sarana komunikasi antara Disperkim dengan publik pada umumnya dan instansi pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Barat pada khususnya.
4. Banyaknya tanah kosong dan tanah terlantar di Jawa Barat yang belum terdata.
5. Banyaknya tanah ulayat di Jawa Barat yang belum terdata.
6. Banyaknya asset tanah milik Provinsi Jawa Barat yang dibiarkan dan tidak jelas peruntukannya.





7. Terjadinya permasalahan/konflik pertanahan antara: masyarakat vs Pemerintah; Swasta vs Pemerintah; Pemerintah; Pemerintah Daerah; dan Pemerintah Daerah vs Pemerintah Daerah.
8. Kebutuhan sinkronisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan BPN.
9. Belum adanya data untuk kebutuhna Redistribusi Tanah.

#### **2.5.2.2.5 Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

1. Rendahnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
2. Rendahnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
3. Belum optimalnya pengelolaan persampahan secara terintegrasi yang berdampak pada tingginya pencemaran, terutama pada upaya pengurangan sampah pada sumbernya, upaya pengolahan sampah bernilai ekonomi (sirkular ekonomi), belum beroprasinta TPPAS Regional, serta TPA kabupaten/kota yang belum terkelola dengan baik.
4. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Jawa Barat yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif;
5. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan kebijakan 45 persen kawasan lindung Jawa Barat;
7. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana;
8. Belum sinerginya berbagai sektor diantaranya sektor permukiman dan perumahan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, dan perhubungan dalam pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup;





9. Belum optimalnya komitmen dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, diantaranya sektor kehutanan, perkebunan, energi, perhubungan dan permukiman dan perumahan; dan
10. Permasalahan daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan.

#### **2.5.2.2.6 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Belum optimalnya satu nama satu data kependudukan di Jawa Barat;
2. Kewenangan Disdukcapil Provinsi yang sangat terbatas;
3. Masih minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang administrasi kependudukan dan teknologi informasi. Hal ini mengingat bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat banyak bersinggungan dengan kebijakan administrasi kependudukan dan data; dan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **2.5.2.2.7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

1. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kolaboratif dan inovatif untuk menuju Gerbang Desa Juara;
2. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, baik secara parsial maupun sektoral di tingkat desa;
3. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa belum



terjangkau oleh jaringan telekomunikasi (*blankspot*); dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong *One Village One Company* (OVOC);

4. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
5. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup:
  - 1) peningkatan pelayanan dasar;
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan;
  - 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - 4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
  - 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
6. Menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

#### **2.5.2.2.8 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Pertambahan penduduk atau laju kelahiran yang tidak disertai dengan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga;
2. Persebaran dan mobilitas penduduk yang belum merata sehingga berdampak pada kesejahteraan antarwilayah yang juga belum merata;
3. Masih tingginya masyarakat yang belum mengikuti program KB; dan
4. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi *stunting* dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal.

#### **2.5.2.2.9 Bidang Perhubungan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan meliputi:

1. Transportasi darat : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum; belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan; rendahnya disiplin pengguna jalan; belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin;



belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas; rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi; masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah; perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor; masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat; masih belum berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi, belum optimalnya pembangunan transportasi umum massal di Perkotaan.

2. Transportasi udara, antara lain: Masih rendahnya mobilitas transportasi moda udara, Prasarana dan sarana bandar udara yang ada saat ini belum memadai untuk mengakomodir pergerakan orang dan barang melalui transportasi udara, baik domestik maupun internasional; Masih diperlukan dukungan investasi dari pemerintah dan swasta dalam mewujudkan bandara internasional di Jawa Barat; Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi udara;
3. Transportasi laut, antara lain: Belum optimalnya koordinasi dan konsultasi seluruh stakeholders dalam rencana pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat, sebagai pengganti rencana pembangunan pelabuhan laut di Cilamaya; Belum sepenuhnya kewenangan bidang transportasi laut diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; Belum berkembangnya badan usaha yang dapat mengelola pelabuhan di Jawa Barat; Belum tersedianya pelabuhan pengumpan regional yang dikelola oleh Jawa Barat, sehingga prasarana dan sarana transportasi laut dan ASDP yang ada saat ini belum mengakomodir pergerakan orang dan barang, baik domestik maupun internasional; Belum optimalnya pemanfaatan potensi sungai danau dan penyeberangan untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah; Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi laut dan ASDP..
4. Transportasi Perkeretaapian : Pembangunan transportasi perkeretaapian di Jawa Barat diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Daerah. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda



transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian. Namun permasalahan pembangunan perkeretaapian di Jawa Barat antara lain Tingginya investasi infrastruktur, sarana dan operasional angkutan kereta api menyebabkan pihak swasta dan pemerintah daerah belum ada yang serius, mampu dan berani membuka layanan kereta api dalam daerah selain PT. KAI; Belum optimalnya Pembenahan/penertiban aset jalur kereta api di daerah termasuk di Jawa Barat sebagai upaya reaktivasi; Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **2.5.2.2.10 Bidang Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Dalam infrastruktur *e-Government* beberapa permasalahan yang terjadi adalah masih terbatasnya tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi, tenaga operator di perangkat daerah, kabupaten/kota dan kecamatan belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil bimbingan teknis di perangkat daerah bagi aparatur dan sekolah bagi masyarakat belum dapat diukur secara terstandar, dan penyebarluasan informasi tentang Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 perlu melibatkan semua komponen pemangku kepentingan bidang kominfo secara terstruktur pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota;
2. Dalam Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik permasalahan yang terjadi adalah mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi, pemahaman tupoksi Diskominfo yang belum diapresiasi secara penuh oleh perangkat daerah;
3. Perlu adanya koordinasi dalam menyamakan antara kewenangan Dinas Kominfo dengan segmentasi program Lembaga Penyiaran;
4. Dalam layanan hubungan masyarakat, permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antar *stakeholder* terkait agenda prioritas, yang menyebabkan informasi yang didapat kurang lengkap sehingga menimbulkan miskomunikasi, serta



belum adanya ketetapan atau aturan yang jelas dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk media-media yang sudah terakreditasi oleh dewan pers, sehingga dapat menyaring media secara resmi, mengingat semakin maraknya tumbuh media-media digital baru;

5. Belum termanfaatkannya KIM sebagai media penyampaian informasi;
6. Belum terkoordinasikan-nya informasi program-program pemerintah;
7. Belum memiliki mekanisme agar data dapat dibagi-pakaikan (terintegrasi) antar aplikasi atau sistem di Perangkat daerah;
8. Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas; dan
9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

#### **2.5.2.2.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah meliputi:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurun karena pandemi COVID-19;
2. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi;
3. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan;
4. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM;
5. Belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi para pelaku KUMKM dalam memasarkan produknya; dan
6. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

#### **2.5.2.2.12 Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal meliputi:

1. Banyaknya potensi investasi dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang belum diinventarisir menyebabkan terbatasnya bahan/data penanaman modal yang diperlukan untuk promosi;
2. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi mengurangi interaksi secara langsung antara para pelaku usaha dan investor sehingga *business meeting* dan *matchmaking* belum optimal;



3. Terbitnya UUCK disusul oleh implementasi OSS RBA tidak segera dibarengi dengan penerbitan peraturan perundangan turunan termasuk NSPK dari kementerian teknis sehingga menghambat pelayanan perizinan. Kemudian, tidak semua jenis perizinan diakomodir ke dalam aplikasi OSS RBA sehingga mengakibatkan beberapa layanan perizinan yang tidak segera terlayani;
4. Provinsi Jawa Barat dengan wilayah yang luas dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar mengakibatkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Sehingga, banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban mereka untuk berusaha terutama dalam hal pengisian LKPM sehingga pencatatan nilai realisasi tidak seluruhnya dilaporkan; dan
5. Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang diwajibkan di semua kabupaten/kota dimana tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup memadai dan belum dapat melaksanakan pembangunan MPP ini, sehingga dinilai menghambat pelayanan perizinan.

#### **2.5.2.2.13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi:

1. Permasalahan bidang kepemudaan dengan nilai Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2020 yang masih rendah:
  - a. Capaian domain pendidikan masih stagnan yakni sebesar 66,67 poin dengan semua indikator pembagiannya yang masih di bawah rata-rata nasional. RLS pemuda Jawa Barat 10,69 dan nasional 10,78 tahun, APK sekolah menengah Jawa Barat 85,03 dan nasional 88,32 persen dan APK perguruan tinggi Jawa Barat 25,75 dan nasional 30,85 persen;
  - b. Capaian domain lapangan dan kesempatan kerja menurun dikarenakan rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda. Pada tahun 2020 TPT pemuda Jawa Barat adalah sebesar 21,55 persen dan berada pada posisi kedua tertinggi di Indonesia;
  - c. Capaian domain gender dan diskriminasi menurun dikarenakan tingginya angka perkawinan anak yakni sebesar 34,65 persen.



2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga secara rutin;
3. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga belum terbangun, PPLP belum memiliki asrama/wisma, Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
4. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
5. Pembinaan olahraga belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet dalam kompetisi olahraga nasional maupun internasional.
6. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian;
7. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan;
8. Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Jawa Bara yang memenuhi standar Nasional dan Internasional;
9. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di Kota/Kabupaten di Jawa Barat; dan
10. Prestasi Olahraga Jawa Barat pada Multievent Nasional peringkat pertama, ini merupakan tantangan sekaligus permasalahan dalam upaya penanganan dan antisipasi terhadap berbagai kendala yang mungkin timbul dalam upaya mempertahankan prestasi Jawa Barat.

#### **2.5.2.2.14 Bidang Statistik**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik meliputi:

1. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan;
2. Kurangnya kualitas data statistik sektoral; dan
3. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur.





### **2.5.2.2.15 Bidang Persandian**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian meliputi:

1. Masih rendahnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
2. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur ;
3. Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana; dan
5. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana APU (Alat Pendukung Utama) Persandian.

### **2.5.2.2.16 Bidang Kebudayaan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kebudayaan meliputi:

1. Masih rendahnya perlindungan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Provinsi Jawa Barat;
2. Masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Kurang optimalnya promosi budaya tradisional Provinsi Jawa Barat di dalam dan luar negeri;
4. Besarnya peluang masuknya pengaruh negatif budaya asing ke Provinsi Jawa Barat;
5. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Jawa Barat;
6. Masih kurangnya ruang publik sebagai ruang pelestarian dan pemajuan budaya lokal, ruang ekspresi seniman dan budayawan serta ruang interaksi pemanfaatan seni budaya;
7. Masih kurangnya event/festival seni budaya unggulan yang menjadi ikon Jawa Barat;
8. Adanya kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Jawa Barat;
9. Masih banyaknya aset tinggalan sejarah yang masih belum tersentuh sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah;
10. Belum terdata dengan baik, tercatat dan ditetapkan sebagai warisan budaya Jawa Barat oleh pemerintah pusat. Pencatatan belum berhasil dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan; dan
11. Masih kurangnya sarana publik yang secara berkesinambungan menampilkan seni budaya daerah baik





dengan fungsi pembinaan maupun fungsi media apresiasi dan ekspresi masyarakat di bidang seni budaya,

#### **2.5.2.2.17 Bidang Perpustakaan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan meliputi:

1. Belum optimalnya peran kelembagaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pelayanan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat;
2. Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan provinsi;
4. Perlunya peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan;
5. Perlu adanya penguatan Lembaga perpustakaan di desa-desa baik SDM, sarana prasarana maupun penunjang, dan bahan Pustaka;
6. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat terhitung rendah; dan
7. Ketersediaan bahan pustaka masih belum mencukupi kebutuhan di masyarakat.

#### **2.5.2.2.18 Bidang Kearsipan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kearsipan meliputi:

1. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat daerah;
2. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif; dan
3. Belum optimalnya tingkat pengawasan pengelolaan arsip di daerah.
4. Komitmen kepala perangkat daerah selaku penanggungjawab penciptaan arsip belum maksimal;
5. Identifikasi dan penelusuran arsip bernilai kesejarahan belum efektif.

#### **2.5.2.3 Urusan Pilihan**

##### **2.5.2.3.1 Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:



1. Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
2. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan;
3. Pengawasan dan pengendalian SDKP (Penganggulan dan penyelesaian IUU *Fishing*);
4. Degradasi lingkungan perikanan dan kelautan (Abrasi, intrusi, pencemaran, kerusakan hutan *mangrove*, kerusakan terumbu karang, kerusakan padang lamun, *overfishing*, *destructive fishing* dan sedimentasi di Kawasan Pelabuhan perikanan);
5. Pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut (manajemen dan teknologi pemanfaatan yang belum optimal dan belum teradaptasi oleh masyarakat);
6. Terbatasnya jumlah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan perikanan;
7. Pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal;
8. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi;
9. Minimnya fasilitas dan infrastruktur di wilayah Selatan Jawa Barat sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal;
10. Terbatasnya teknologi penangkapan yang dihadapi nelayan khususnya nelayan wilayah Selatan Jawa Barat;
11. Meminimalkan disparitas pembangunan antara wilayah pesisir utara dan selatan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Barat; dan
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat.
13. Kelembagaan dan struktur penganggaran yang belum kompatibel dengan pembagian pengurusan saat ini.  
Kelembagaan dan struktur penganggaran saat ini belum kompatibel dengan pembagian pengurusan saat ini. Di satu sisi belanja pegawai meningkat hingga, namun peningkatan belanja publik tidak sejalan dengan peningkatan belanja pegawai. Adanya gap dari segi penganggaran ini menjadikan program yang dapat dilakukan menjadi terbatas. Untuk mengurangi gap penganggaran tersebut bisa dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu mendorong APBD provinsi untuk dinaikkan atau pusat memberikan ke provinsi atau bisa juga mendorong pihak swasta dalam bentuk *bussiness to bussiness*.



#### 14. Terbatasnya SDM

Keterbatasan SDM tidak hanya dari segi jumlah tapi juga dari kapasitas. Untuk jumlah SDM yang terbatas terutama pada terbatasnya jumlah penyuluh karena jumlah penyuluh saat ini masih di bawah ideal. Selain itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat sebanyak 54 persen bidang tugasnya tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan 46 persen yang bidang tugasnya sesuai dengan pendidikan.

#### 15. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perkembangan teknologi kelautan dan perikanan

Ketersediaan prasarana dan sarana perikanan yang ada di Jawa Barat belum optimal dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Diantaranya adalah permasalahan dalam teknologi penangkapan dan budidaya serta pengolahan.

#### 16. Monitoring dan pencatatan data yang masih lemah dan belum terintegrasi.

Saat ini monitoring dan pencatatan data masih lemah dan belum terintegrasi. Minimnya data realisasi capaian dari target yang direncanakan, diduga karena indikator kinerja belum terukur dan terarah sehingga sulit untuk dihitung.

#### 17. Terbatasnya anggaran dari sumber lainnya

Dana pengelolaan saat ini mengandalkan dan alokasi APBD. Anggaran untuk pengelolaan dari sumber lainnya seperti kerjasama masih terbatas termasuk *refocusing* anggaran untuk penanggulangan COVID-19

### 2.5.2.3.2 Bidang Pariwisata

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pariwisata meliputi:

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata masih rendah;
2. Masih rendahnya kesadaran dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam pengembangan kegiatan pariwisata;
3. Belum semua kabupaten/kota memiliki destinasi wisata unggulan;
4. Belum optimalnya keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi;
5. Belum optimalnya pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata;



6. Belum optimalnya pengembangan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata;
7. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif di Jawa Barat;
8. Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha pariwisata dan masyarakat;
9. Belum optimalnya perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pariwisata baik baik pada aturan maupun kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata;
10. Belum memadainya fasilitas pendukung pariwisata sebagai pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan terhadap faktor pendukung dan infrastruktur pariwisata, aksesibilitas menuju obyek wisata dan pengemasan kawasan-kawasan wisata di Jawa Barat;
11. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan pengembangan kepariwisataan Jawa Barat oleh seluruh *stakeholder* kepariwisataan dan masih kurangnya kualitas infrastruktur menuju Obyek Wisata di Jawa Barat sehingga menyebabkan aksesibilitas ODTW di Jawa Barat. Hal ini turut mempengaruhi minat dan tingkat kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.;
12. Masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di sekitar obyek wisata dalam hal mendukung kondusivitas lingkungan yang dapat menarik minat calon wisatawan; dan
13. Masih perlu ditingkatkannya peran serta aktif masyarakat dan seluruh *stakeholder* pariwisata dalam meningkatkan perkembangan kepariwisataan daerah bersama-sama dengan pemerintah; masih perlu ditingkatkannya “will” dan kebijakan lokal yang mendukung tumbuhnya kepariwisataan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

#### **2.5.2.3.3 Bidang Pertanian**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pertanian meliputi:

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
2. Kondisi fisik jaringan irigasi belum optimal;
3. Adanya konflik kebutuhan dan pemanfaatan air;
4. Kondisi modal usaha petani masih sangat terbatas;
5. Penerapan teknologi belum optimal pada sektor pertanian;



6. Kerentanan terhadap guncangan eksternal (ketidakpastian pasar, bencana, perubahan iklim, regulasi);
7. Belum optimalnya regenerasi petani;
8. Daya saing, nilai tambah dan akses pasar masih rendah dalam bidang pertanian;
9. Terlalu rendahnya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditingkat petani;
10. Perlu adanya terobosan dalam pengentasan permasalahan pada bidang pertanian, permohonan permodalan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat-alat pertanian dan argo bisnis hortikultura, bibit, jaringan irigasi pertanian, serta pupuk gratis bagi para petani dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
11. Semakin tingginya alih fungsi lahan;
12. Menurunnya kualitas tanah (lahan) pertanian khususnya di wilayah utara
13. Lambatnya perbaikan Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi;
14. Adanya potensial terkena DPI (kekeringan/ kebanjiran);
15. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani;
16. Kemampuan permodalan petani terbatas;
17. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi;
18. Masih kurangnya indek yang diterima peternak dibandingkan dengan indek harga yang dibayar peternak;
19. Masih tingginya impor daging dan susu;
20. Rendahnya populasi ternak, produksi dan produktivitas ternak yang belum optimal, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan meningkatnya produksi daging, telur dan susu; dan
21. Masih ditemukan produk hewan dimasyarakat yang belum memenuhi standar mutu.

#### **2.5.2.3.4 Bidang Kehutanan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kehutanan meliputi:

1. Tingkat degradasi hutan dan lahan masih tinggi pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
2. Rendahnya pengembangan teknologi dan budidaya di lahan kritis;
3. Meningkatnya gangguan fungsi ekosistem;
4. Terbatasnya produksi hasil hutan bukan kayu;



5. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan;
6. Terbatasnya kemampuan kelompok tani hutan;
7. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

#### **2.5.2.3.5 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Adanya penurunan penggunaan listrik khususnya pada sektor industri akibat pandemi sehingga perlu dilakukan perubahan target konsumsi listrik di Jawa Barat;
2. Belum semua pelanggan listrik non PLN menyampaikan laporan hasil penggunaan listriknya pada tahun 2020;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Inspeksi Teknik terbatas oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
4. Masih kurangnya kesadaran para pemilik instalasi tenaga listrik untuk melakukan proses sertifikasi laik operasi;
5. Perubahan kewenangan provinsi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diberlakukannya pemberhentian sementara untuk SLO dan Perizinan pada tanggal 12 November 2020, hingga adanya peraturan pelaksanaan serta arahan lebih lanjut;
6. Belum tersedianya Peraturan dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM sebagai NSPK bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tingkat mutu pelayanan bagi pemegang IUPTL di Jawa Barat;
7. Masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang kondisinya layak untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik namun belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
8. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor ketenagalistrikan khususnya inspektur ketenagalistrikan sebagai pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
9. Belum adanya NSP dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM terkait penetapan konsumsi listrik per kapita sebagai indikator pembangunan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki referensi dalam pelaksanaan Perhitungan Konsumsi Perkapita;



10. Sektor terkait sebagai *driver factor* maupun sebagai pendukung peningkatan konsumsi listrik per kapita belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kepentingan perhitungan konsumsi listrik per kapita;
11. Adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi menyebabkan tidak terlaksanakannya pembangunan instalasi energi baru terbarukan yang dianggarkan pada 7 (tujuh) cabang dinas;
12. Adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan pengawasan usaha pertambangan tidak dapat berjalan secara optimal;
13. Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti kewajiban untuk membuat sumur imbuhan, ataupun telah memiliki sumur imbuhan tetapi belum diregistrasi, dan belum memasang piezometer;
14. Adanya kendala dalam masalah biaya dalam melakukan pengujian konstruksi sumur bor melalui *bore hole camera*; dan
15. Masih ditemukan adanya meter air yang belum dikalibrasi (ditera) atau meter air yang kondisinya rusak.

#### **2.5.2.3.6 Bidang Perdagangan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan meliputi:

1. Fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
2. Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang;
3. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
4. Daya saing produk lokal yang masih lemah; dan
5. Lemahnya rantai nilai yang utuh dan terintegrasi (belum terbentuknya sistem logistik yang terpadu).

#### **2.5.2.3.7 Bidang Perindustrian**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian meliputi:

1. Produk industri berdaya saing rendah, Pandemi COVID-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
2. Infrastruktur pendukung Kawasan industry yang belum terintegrasi





3. Bahan baku industri mayoritas impor;
4. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi; dan
5. Produk industri unggulan yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi.

#### **2.5.2.3.8 Bidang Transmigrasi**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Transmigrasi meliputi:

1. Alokasi target penempatan calon transmigran  
Alokasi target penempatan calon transmigran ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Penetapan target ini menjadi permasalahan bagi daerah pengirim, termasuk Jawa Barat. Setiap tahun alokasi target pengiriman berkurang. Pada tahun 2018 target pengiriman yang diterima oleh Jawa Barat sebanyak 67 Kepala Keluarga (KK), kemudian menjadi 40 KK pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada target penempatan calon transmigrasi karena dampak dari pandemi COVID-19 dan pada tahun 2021 hanya 40 KK.
2. Ketidaksesuaian antara keterampilan dasar calon transmigran dengan kebutuhan daerah penempatan  
Kurangnya informasi antara pusat dengan daerah menyebabkan calon transmigran menghadapi kondisi yang sulit. Kesulitan calon transmigran dalam menghadapi perbedaan karakteristik fisik daerah penempatan dengan daerah asal calon transmigran, sehingga calon transmigran harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan karakter daerah penempatan. Daerah penempatan transmigran saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh dinas yang membidangi ketransmigrasian.
3. Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah sulit diimplementasikan  
Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dimaksudkan untuk sinkronisasi pelaksanaan ketransmigrasian antara daerah pengirim dengan daerah penempatan. Pada kenyataannya KSAD ini sulit untuk ditindaklanjuti pasca-penempatan transmigran. Hal ini disebabkan oleh penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan Kementerian terkait.





## **2.5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **2.5.2.4.1 Bidang Perencanaan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya pelibatan *stakeholder* nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

1. Belum optimalnya pelibatan *stakeholder* nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

### **2.5.2.4.2 Bidang Keuangan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan meliputi:

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh Perangkat Daerah belum optimal;
2. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK masih sering terjadi;
3. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatnya jumlah paket pengadaan barang dan jasa;
4. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
5. Pelaksanaan *e-audit* dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
6. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai.

### **2.5.2.4.3 Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan



standar kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS dan Persentase *Smart ASN* yang menurun.

Permasalahan pada bidang Pendidikan dan Pelatihan yaitu BPSDM Provinsi Jawa Barat sebagai instansi penunjang program juara yang telah digambarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat, Bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, masih mempunyai permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap tugas pokok dan fungsi Lembaga.

Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kerja BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah masih banyaknya PNS yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi PNS. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa isu permasalahan penting yang dihadapi BPSDM Provinsi Jawa Barat diidentifikasi sebagai berikut:

### **1. Aspek Hasil Kerja (Kinerja)**

- a. Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
- b. Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS, sesuai dengan Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS “Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam setahun), sehingga belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;
- c. Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal, terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai.

### **2. Aspek Internal**

Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur belum memadai untuk mencetak aparatur berkelas dunia.



- a. Aspek kewenangan : Kapasitas dan kapabilitas BPSDM Provinsi Jawa Barat dalam mencetak aparatur yang SMART ASN belum optimal;
- b. Aspek Perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur : Kapasitas dan Kapabilitas Perencanaan BPSDM Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah;
- c. Aspek Pengorganisasian : Kapasitas dan Kapabilitas Pengorganisasian BPSDM Provinsi Jawa Barat belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan secara optimal;
- d. Aspek Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi : belum tercapainya proses pembelajaran berstandar internasional dan pembelajaran jarak jauh; dan
- e. Aspek Evaluasi dan Pengembangan Pelatihan : Kapasitas dan kapabilitas evaluasi BPSDM Provinsi Jawa Barat belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengembangan kompetensi;

### **3. Aspek Manajemen Pelatihan**

- a. Aspek Sumber Daya Aparatur;
  - 1) Masih terbatasnya pegawai BPSDM Provinsi Jawa Barat yang mampu berbahasa Inggris, Bahasa Mandarin dan Bahasa Arab secara aktif.
  - 2) Terbatasnya tenaga WidyaIswara yang memiliki sertifikat kompetensi teknis di mata diklat yang diampuhnya.
- b. Aspek Kurikulum;
  - 1) Belum dimilikinya mata diklat yang berpengantar Bahasa Inggris.
  - 2) Belum dimilikinya kurikulum diklat unggulan yang diminati internasional dan selaras dengan pembangunan daerah.
- c. Aspek Aplikasi TIK;
  - 1) Belum terkoneksi unit-unit kerja BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan aplikasi pengembangan kompetensi secara *online*.
  - 2) Tahapan pengelolaan data administrasi pengembangan kompetensi belum optimal dalam memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer (TIK).



- 3) Belum optimalnya sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer (TIK).
- 4) Aspek anggaran; Anggaran Diklat masih kurang dari 0,34 persen dari total APBD Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanat perundang-undangan.

#### **2.5.2.4.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi:

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah;
3. Belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan daya saing daerah;
4. Kurangnya eksistensi kelembagaan Kelitbangan di Kabupaten/Kota;
5. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan IPTEK;
6. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya;
7. Belum memadainya pendanaan untuk penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK;
8. Wabah Pandemi COVID-19;
9. Terbatasnya SDM Peneliti;
10. Belum seluruhnya data base tersedia sebagai data dan informasi pendukung kelitbangan;
11. Belum optimalnya program kerja sama baik antar daerah, swasta, dan masyarakat;
12. Belum terkoordinasinya, sinkronisasi dan terintegrasinya program-program kelitbangan antar PD;
13. Belum optimalnya peran Lembaga-lembaga pendukung kelitbangan seperti Dewan Riset Daerah (DRD). Tim Koordinasi SIDA, Tim Advisor IPTEK dan Sosial Budaya, dan Majelis BP2D.

#### **2.5.2.4.5 Bidang Pengawasan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang pengawasan meliputi:



1. Inspektorat belum bisa sepenuhnya memenuhi peran umum selaku penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, risiko dan pengendalian (*governance, risk and control*) bagi pimpinan dan pemerintahan provinsi;
2. Mempertahankan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih belum sesuai harapan;
4. Masih lemahnya sistem pengendalian internal (SPI/wasnal) pada PD dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (wasmas);
5. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rawan tindak pidana korupsi;
6. Beban kinerja Inspektorat yang semakin banyak dan pengendalian mutu pengawasan yang belum optimal;
7. *Skill, knowledge* dan *attitude* pemeriksa masih belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan berwawasan pembinaan;
8. Perlu mempersiapkan SDM pembinaan dan pengawasan yang memahami tentang hukum pidana dan perdata, serta mampu berkoordinasi dengan APH;
9. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

#### **2.5.2.4.6 Fungsi Lainnya**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam fungsi lain penunjang pemerintahan daerah yaitu:

1. Terdapat BPR yang sudah melakukan proses merger di Kabupaten Bogor, Cirebon, dan Indramayu yang sampai saat ini masih menunggu diterbitkannya Perda untuk melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah;
2. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mengisi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Adanya keterlambatan dalam penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap perangkat daerah;
4. Pengisian paket kegiatan saat ini dilakukan oleh staf/operator di perangkat daerah, yang belum sepenuhnya memahami metode pengadaan barang dan jasa;



5. Permasalahan dalam integrasi *e-Budgeting* dengan SIPD, dimana terdapat beberapa data yang belum ada di formulir sebelumnya, sehingga harus menambahkan lagi informasi yang sesuai dengan kebutuhan data SIPD;
6. Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada acara rapat kerja Gubernur FKD MPU ada yang belum ditindaklanjuti;
7. Belum sinergisnya perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota serta tidak ada perencanaan skala prioritas;
8. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi antar Biro yang belum efektif, SDM yang belum menguasai kompetensi dalam bidang perencanaan;
9. Dalam pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih diperlukan asistensi dari operator program untuk dapat membiasakan diri bagi para pengguna sistem;
10. Belum tersedianya instrumen dan indikator monitoring dan evaluasi kerja sama yang bersifat universal;
11. Ketersediaan dan validitas data capaian kinerja provinsi dan kabupaten/kota;
12. Belum terbitnya aturan yang mengatur tentang Penataan Daerah (PP tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah);
13. Kurang lengkapnya persyaratan administrasi dari pemohon fasilitasi administrasi pemerintahan umum;
14. Masih banyak kesalahan dalam persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
15. Jumlah kuasa hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang masih terbatas;
16. Masih kurangnya desa/kelurahan yang belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum;
17. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kajian produk hukum kabupaten/kota serta pemahaman yang belum optimal dalam perancangan produk hukum di kabupaten/kota;



18. Belum adanya pedoman pengaturan investasi Pemerintah Daerah yang meliputi investasi langsung dan investasi pembelian surat berharga;
19. Adanya perubahan regulasi tentang kelembagaan yang berakibat kepada penyesuaian secara cepat kepada struktur organisasi perangkat daerah dan tugas pokok serta fungsinya;
20. Belum semua Perangkat Daerah menetapkan standar pelayanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
21. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
22. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa;
23. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota;
24. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
25. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
26. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan;
27. Belum optimalnya Penganggaran CSR dan *Crowdfunding*;
28. Penerapan *e-Government* belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/ aturan hukum daerah;
29. Belum adanya standar keamanan informasi;
30. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik ;
31. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral ;
32. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awarness*);
33. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Barat;
34. Akses penggunaan arsip belum efektif;
35. Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif;



36. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
37. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;
38. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat;
39. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketenteraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat;
40. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
41. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
42. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Provinsi Jawa Barat;
43. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; serta
44. Pelayanan publik masih belum sesuai.

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan di atas, terdapat 5 (lima) isu strategis yang menjadi fokus untuk solusi permasalahan dan kelima isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, diantaranya 1) Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial; 3) Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; 4) Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan; dan 5) Reformasi Birokrasi.

## **2.6 Inovasi**

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai IKU tersebut, dirumuskan program-program strategis dan inovatif dalam kerangka Program Jabar Juara. Program Jabar Juara diharapkan berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, serta mendorong peningkatan IKU





sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Program Jabar Juara saat ini mengalami reklasifikasi menjadi 11 (sebelas) Program Juara meliputi; 1) Pemerintahan Juara, 2) Pendidikan Juara, 3) Kesehatan Juara, 4) Gerbang Desa Juara, 5) Keagamaan Juara, 6) Lingkungan Juara, 7) Ekonomi Juara, 8) Pembiayaan dan Investasi Juara, 9) Infrastruktur Juara, 10) Kesejahteraan Juara, 11) Tenaga Kerja Juara.

### **2.6.1 Capaian *Outcome* Program Jabar Juara**

Secara keseluruhan Program Jabar Juara mencakup berbagai sektor dan urusan, baik yang bersifat internal pemerintah maupun yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat luas. Setiap Program Jabar Juara memiliki korelasi terhadap IKU. Keterkaitan Program Jabar Juara terhadap IKU beserta capaiannya pada Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.112.



**Tabel 2.112**  
**Keterkaitan Program Jabar Juara Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaiannya**  
**pada Tahun 2019-2021**

No	Program Juara	Sub-Program Juara	IKU	Satuan	Target IKU			Capaian IKU		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pemerintahan Juara	APBD Juara	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		ASN Juara								
		Birokrasi Juara								
		BUMD Juara								
2	Pendidikan Juara	Perguruan Tinggi Juara	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15	12,2	12,52	12,48	12,5	12,61
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,35	8,58	8,37	8,55	8,61
		Sekolah Juara	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,35	8,58	8,37	8,55	8,61
		Budaya Juara	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	16,63	8,07	19,56	17,43	37,69	24,78
3	Kesehatan Juara	Fasilitas dan Layanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,67 - 74,87	72,82	73,06	72,85	73,04	73,23
		Promosi Kesehatan								
		Jaminan Kesehatan								
4	Gerbang Desa Juara	Penguatan Infrastruktur Desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65	0,68	0,7	0,67	0,69	0,72
		Penguatan Ekonomi Desa								
		Penguatan SDM Desa								



No	Program Juara	Sub-Program Juara	IKU	Satuan	Target IKU			Capaian IKU		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
5	Keagamaan Juara	Pesantren Juara	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,6 - 69	68,1	68,6	68,5	68,5	72,7
		Masjid Juara								
		Ulama Juara								
		Umat Juara	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,6 - 69	68,1	68,6	68,5	68,5	72,7
			Indeks Demokrasi	Poin	68,79 - 70,78	70,7	70,79	69,09	71,32	79,72
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	70 - 71	70	72	77,5	88,4	87,5		
6	Lingkungan Juara	Kelola Sampah Juara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	49,76	60,57	60,78	51,12	61,59	62,69
		Tanggap Bencana Juara	Indeks Risiko Bencana	Poin	165	150,5	149	152,1	145,8	134,9
		Lingkungan Juara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	49,76	60,57	60,78	51,12	61,59	62,69
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,8	3,82	4,29	3,85	3,87	4,23
		Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Penggunaan Air	Poin	1,192	1,193	1,192	1,192	1,193	1,191
7	Ekonomi Juara	Pasar Juara	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3	-7,96	3,23	7,51	-7,94	3,19
		UMKM Juara	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21	19	19,9	21,1	19,41	21,67
		Wirausaha Juara								
		Petani Juara	Nilai Tukar Petani	Poin	113,11	101,1	102,3	112,4	101,4	97,84
		Ekonomi Kreatif Juara	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,3	2,65	2,91	6,84	2,85	2,84
		Pariwisata Juara								



No	Program Juara	Sub-Program Juara	IKU	Satuan	Target IKU			Capaian IKU		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
		Industri Juara	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,63	-4,49	2,78	4,04	-4,22	4,22
		Logistik Juara								
8	Pembiayaan dan Investasi Juara	Investasi Juara	Penanaman Modal Tetap Bruto	Triliun Rupiah	495,4	490,2	501,5	535,7	494	547,9
		Kemitraan Juara	Tingkat Efektivitas Kerjasama	Persen	50	54	56	61,22	73,43	80,24
9	Infrastruktur Juara	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	41	38	41	46,13	39,06	43,51
		Infrastruktur Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	-	50,6	51,7	-	52,28	53,14
		Energi Juara	Konsumsi Listrik Per Kapita	KwH/kapita	1300	1000	1050	1302	1147	943,9
10	Kesejahteraan Juara	Perempuan Juara	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,34	69,48	69,6	69,48	70,24	70,24
			Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,32	89,26	89,3	89,26	89,2	89,36
		Peningkatan Kesejahteraan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,66-6,9	8,48	7,77	6,82	8,43	7,97
11	Tenaga Kerja Juara	Buruh Juara	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8-7,9	10,58	10,45	8,04	10,46	9,82
		Migran Juara								
		Milenial Juara	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8-7,9	10,58	10,45	8,04	10,46	9,82
			Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	53,63	49	50	50	50	48,83

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Kontribusi Program Jabar Juara terhadap IKU sebagai keluaran di level *outcome* bervariasi di berbagai sektor. Secara keseluruhan, Program Jabar Juara berkontribusi positif di level *outcome* pada tahun 2021. Dari 30 (tiga puluh) IKU terkait yang menjadi *outcome*, hanya terdapat 7 (tujuh) IKU yang capaiannya tidak mencapai target. IKU yang tidak mencapai target di tahun 2021 terdapat di Program Juara berikut:

1. Lingkungan Juara; yaitu pada indikator Persentase Penurunan Gas Rumah kaca dan Indeks Penggunaan Air. Meskipun pada tahun 2021, Jawa Barat berhasil mencapai kemajuan dalam penanganan Citarum Harum, dan berkesempatan menyampaikan capaian tersebut pada forum UN *Climate Change Conference* di Glasgow, Britania Raya.
2. Ekonomi Juara; yaitu pada indikator Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Nilai Tukar Petani, dan Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB.
3. Infrastruktur Juara; yaitu pada Konsumsi Listrik Per Kapita.
4. Tenaga Kerja Juara; yaitu pada indikator Indeks Pembangunan Pemuda

## **2.6.2 Contoh Implemmentasi Program Jabar Juara**

Berikut adalah bentuk implementasi Program Jabar Juara yang sudah berjalan, baik yang ditujukan bagi internal pemerintah maupun yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat luas.

### **2.6.2.1 Warna Jabar**

Merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana bagi seluruh warga Jawa Barat untuk dapat ikut berperan serta dalam proses perumusan kebijakan, yaitu pada penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun rencana tahunan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada akhir Tahun 2019 meluncurkan aplikasi Warna Jabar dan mulai digunakan pada tahun 2020. Warna Jabar merupakan aplikasi baru yang mendukung aplikasi *e-planning* untuk menampung aspirasi, laporan, masukan ide maupun gagasan dari masyarakat umum terhadap rencana pembangunan yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Warna Jabar terintegrasi dengan aplikasi *website* Bappeda Jabar. Sehingga konektivitas, efektif dan efisiensi dalam memberikan masukan, ide, laporan maupun gagasan bagi seluruh warga Jawa Barat untuk dijadikan sebagai bahan

pertimbangan usulan kegiatan dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat dapat menjadi lebih baik lagi.

**Gambar 2.58**  
**Aplikasi Warna Jabar**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

### **2.6.2.2 Penerapan Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH)**

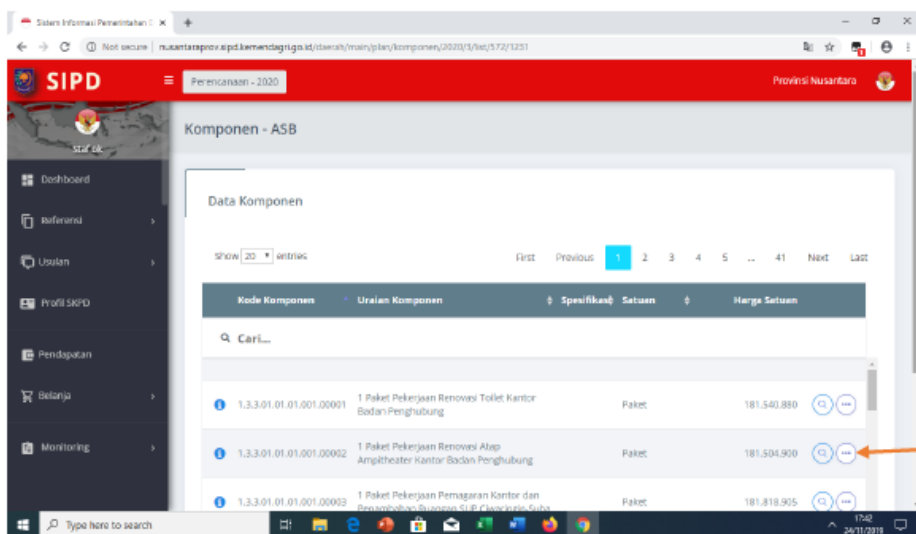
Penerapan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga dalam aplikasi Sirampak Sekar, merupakan suatu inovasi yang menjadikan anggaran yang termuat dalam RKPD menjadi lebih tajam. Penentuan anggaran terhadap kegiatan sudah menggunakan standar satuan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga, sehingga ketika proses pembahasan menjadi APBD proses penyesuaian anggaran adalah cukup mengurangi *output* yang tersedia, adapun anggaran secara otomatis akan menyesuaikan.

Analisa Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas biaya yang diperlukan dalam menjalankan suatu kegiatan. Nilai ASB ini didapatkan melalui analisa terhadap peraturan – peraturan yang ada di Kementerian seperti, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007, analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditahun sebelumnya, serta analisa perangkat daerah terkait untuk komponen khusus. Dengan adanya ASB, *output* kegiatan yang sama akan memiliki nilai anggaran yang sama untuk

setiap perangkat daerah. Penggunaan ASB dalam penyusunan rencana anggaran, sudah digunakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2019 dan terus berlanjut untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Selain digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan, Analisa Standar Belanja ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan hibah, bansos dan bantuan keuangan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyusunannya, ASB yang bersifat umum disediakan oleh BPKAD, sementara untuk yang bersifat khusus diusulkan oleh perangkat daerah yang telah diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan RKPD hingga APBD. Nilai ASB ini sudah tersedia di dalam sistem, sehingga tidak perlu dilakukan pengisian manual oleh perangkat daerah, cukup memilih dari menu yang sudah tersedia. Begitu juga saat proses pengusulan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, pengusul cukup mengisi data volume usulan sesuai dengan kamus usulan yang tersedia. ASB ini juga sudah terhubung dengan nilai Standar Satuan Harga (SSH), sehingga saat harga barang di dalam SSH tersebut berubah, akan ikut mengubah nilai dari ASB yang ada.

**Gambar 2.59**  
**Penggunaan E-ASB di Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), 2021

### 2.6.2.3 Pikobar

Pusat Koordinasi dan Informasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) merupakan sebuah sistem yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Informasi yang ditampilkan melalui *website* dan aplikasi *mobile* Pikobar tersebut meliputi perkembangan jumlah kasus, peta sebaran kasus dan lokasi fasilitas kesehatan, daftar pusat panggilan COVID-19 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dan grafik data kasus Orang Dalam Pengawasan (ODP), PDP Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Positif COVID-19.

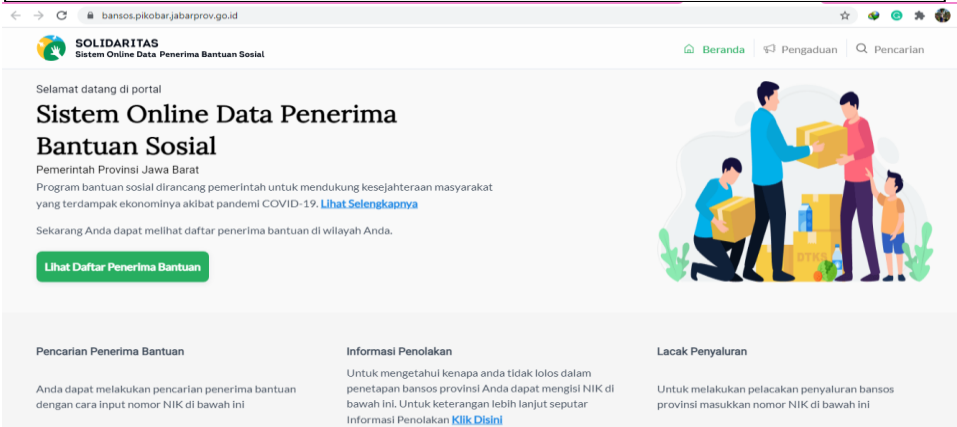
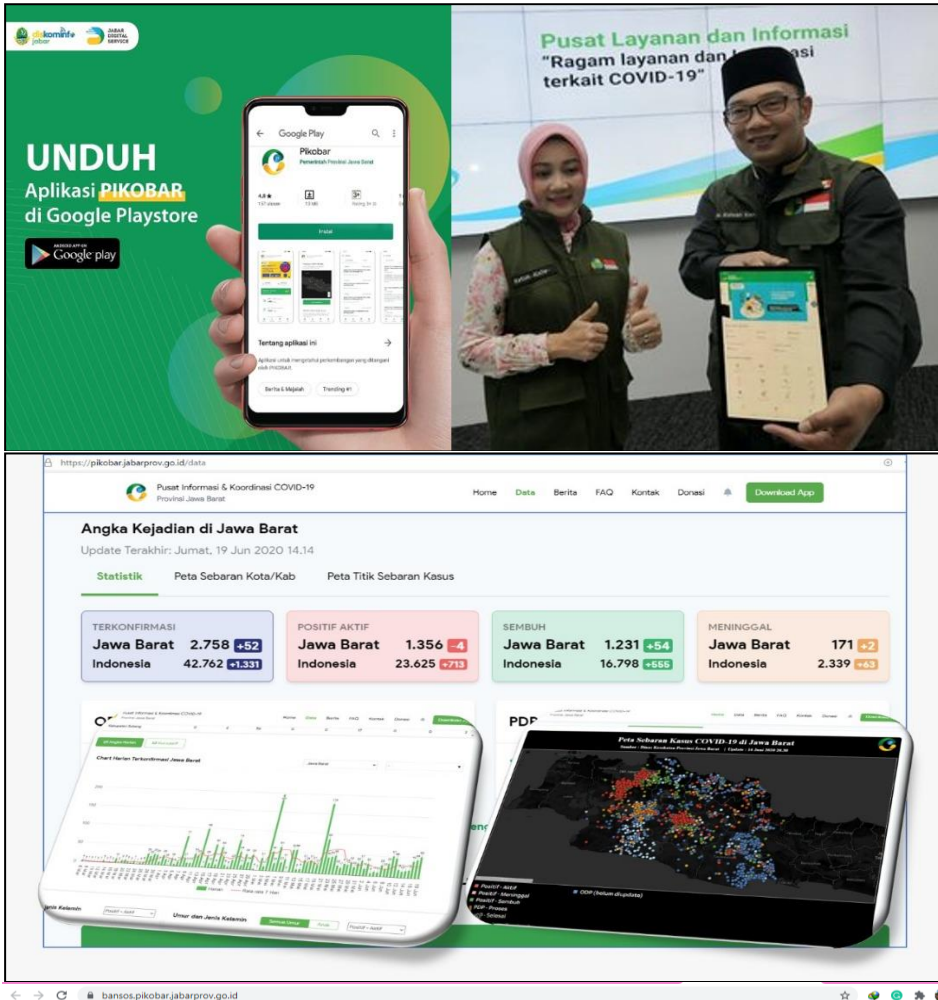
Pikobar diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 4 Maret 2020 di Jabar *Command Center*, menyusul penetapan status Siaga-1 COVID-19 di wilayah Jawa Barat.

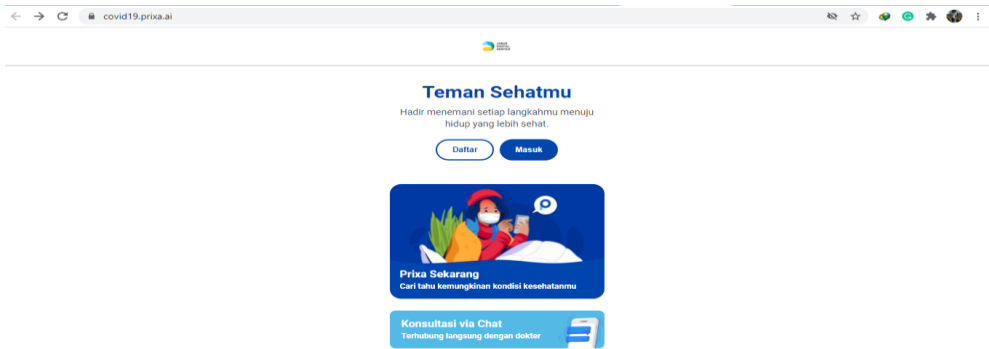
Berikut ini 8 (delapan) manfaat yang bisa didapatkan jika menggunakan aplikasi PIKOBAR, yaitu:

1. Menghindari penyebaran *hoaks* COVID-19;
2. Berisi informasi seputar data ODP, PDP dan Positif COVID-19;
3. Terdapat fasilitas nomor darurat untuk penanganan COVID-19;
4. Menampilkan video dan grafis;
5. Bisa memberikan bantuan masukan;
6. Deteksi 29 macam penyakit pernafasan;
7. Peningkatan ketepatan pemberian bantuan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudahan pemantauan penyaluran bantuan dengan penambahan fitur “Bantuan Sosial”; dan
8. Penyediaan fasilitas telekonsultasi kesehatan mandiri melalui penyediaan fitur “Periksa Mandiri”.



**Gambar 2.60**  
**Aplikasi Pikobar**





Sumber: Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, 2021

#### 2.6.2.4 **Command Center**

*Command Center* (Pusat Komando) adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui *online*, *offline*, internal maupun eksternal disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar *video wall*. Fungsi dari *command center* yaitu monitoring kinerja perangkat daerah, monitoring laporan lapangan secara *realtime*, penyajian informasi eksekutif, *video conference*, dan presentasi. Fasilitas *command center* antara lain sistem komunikasi (*seluler*, *VOIP phone*, *video conference*), sistem keamanan (CCTV dan *electronic access*), dan fasilitas *emergency support*. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membangun *Command Center* di 27 kabupaten/kota dan ditargetkan selesai pada tahun 2022.

Pada masa pandemi COVID-19 *command center* berperan sebagai pusat informasi penanganan pandemi COVID-19. Pada operasionalnya *command center* menggunakan aplikasi Pikobar sebagai aplikasi utama dalam penanganan pandemi COVID-19.

**Gambar 2.61**  
**Command Centre**

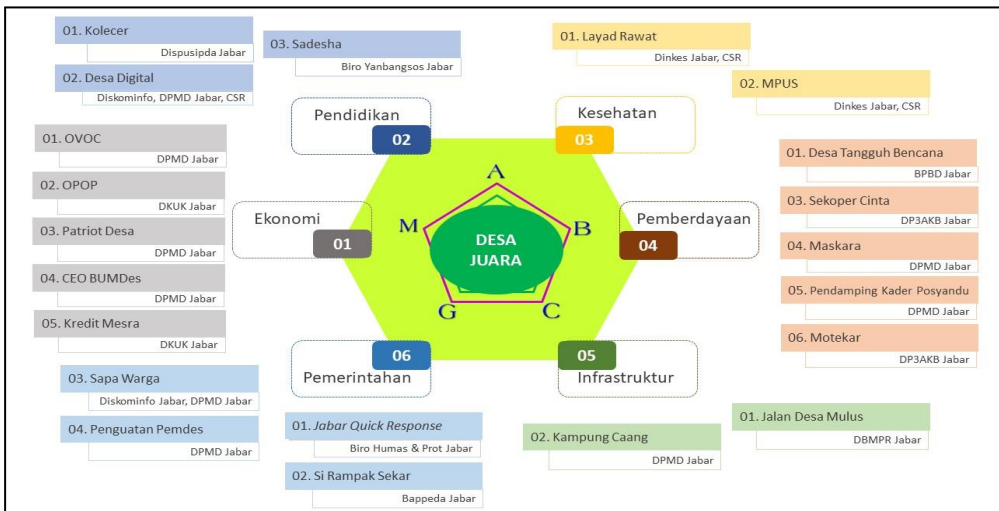


Sumber: Diskominfo Provinsi Jawa Barat, 2020

### 2.6.2.5 Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)

Gerbang Membangun Desa merupakan gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa, sehingga mampu menekan angka kemiskinan dan urbanisasi melalui penciptaan lapangan pekerjaan diperdesaan. Gerbang Membangun Desa melaksanakan skema yang sudah disusun secara sistematis, skema tersebut disajikan dalam gambar berikut ini.

**Gambar 2.62**  
**Model Kerangka Pikir Gerbang Desa**



Sumber: DPM Desa Provinsi Jawa Barat, 2021

**Gambar 2.63**  
**Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)**



Sumber: DPM Desa Jawa Barat, 2020

**Gambar 2.64**  
**Gerakan Membangun Desa Jawa Barat**

1	2	3
SOSIAL	EKONOMI	EKOLOGI
Kampung Keluarga Juara	One Village One Company	Irigasi Pertanian
Desa Digital	Kredit Mesra	Desa Tangguh Bencana
One Village One Hafidz Qur'an	Trenmaret	Pendidikan Bencana
Sapa Warga	1 BUMDesa 1 Desa	Jalan Mulus
Mobil Siaga Desa	Desa Wisata	Sanitasi & Air Bersih
Dana Desa Provinsi	Desa Kreatif	
Patriot Desa		

Sumber: DPM Desa Provinsi Jawa Barat, 2020

**2.6.2.6 Creative Center**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat *Creative Center* di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sebagai wadah untuk mewujudkan kreativitas, ide dan gagasan anak-anak muda untuk menghasilkan sebuah karya inovasi.

Pada tahun 2020 pembangunan gedung *Creative Center* sudah selesai di Kabupaten Sumedang, Kota Bogor dan Kota



Cirebon, Sedangkan pada tahun 2021 pembangunan gedung *Creative Center* akan dilanjutkan di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bekasi. Diharapkan kehadiran *Creative Center* bisa meningkatkan perekonomian kreativitas masyarakat di kabupaten dan kota tersebut.

**Gambar 2.65**  
***Creative Center***



Sumber: Disparbud Provinsi Jawa Barat, 2020

### **2.6.2.7 Inovasi Pembangunan Infrastruktur**

Jawa Barat berkomitmen menjadi provinsi dengan tingkat konektivitas wilayah tertinggi. Adapun tahapan pembangunan Bandara Kertajati direncanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap 1A (Tahun 2018-2024), Tahap 1B (Tahun 2024-2027), Tahap 2 (Tahun 2027-2030), Tahap 3 (Tahun 2030-2032). Skema Pendanaan Bandara Kertajati dengan ekuitas dan utang. Ekuitas diperoleh dari PT Jasa Sarana, Provinsi Jawa Barat, Investor RDPT Ekuitas, dan PT Angkasa Pura II. Sementara utang bersumber dari Sindkikasi Perbankan.

**Gambar 2.66**  
**BIJB Kertajati**



Sumber: BIJB Kertajati, 2020

#### **2.6.2.8 Citarum Harum**

Program Citarum Harum merupakan upaya untuk merevitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Nasional Citarum Harum yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Inovasi yang dilakukan adalah pengelolaan pengendalian DAS secara masif, multi-sektor dan lintas wilayah kewenangan yang sinergis antara Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat dengan melibatkan unsur TNI, POLRI, komunitas filantropi dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim DAS Citarum yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum, TNI dan POLRI, yang beroperasi melalui Satuan Tugas dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai Komandan Satuan Tugas.

Pelaksanaan Program Citarum Harum dilaksanakan secara tematik dan holistik melalui penanganan menyeluruh dan terfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan fungsi DAS. Program yang dilakukan disesuaikan dengan berbagai permasalahan pencemaran dan kerusakan di DAS Citarum, meliputi penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah domestik, penanganan persampahan, penanganan limbah peternakan,

penanganan limbah perikanan dari keramba jaring apung, pemantauan kualitas air, pengendalian pemanfaatan ruang, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya air, pariwisata, edukasi dan hubungan masyarakat. Pendanaan dari berbagai program penanganan bersumber dari APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; PHLN; Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat.

Berbagai penanganan dilaksanakan oleh multisektor secara terintegrasi sesuai pembagian kewenangan, yang tertuang dalam Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2019-2025. Rencana Aksi pada dasarnya mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan utama (*ultimate goal*) untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) hingga mencapai 40,86 pada Tahun 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan status mutu sungai dari kategori cemar berat menjadi cemar sedang.

Kinerja pada setiap program diukur melalui indikator dan target sebagai berikut:

**Tabel 2.113**  
**Target Outcome Kinerja Program Tahun 2025**

<b>Program</b>	<b>Indikator Outcome</b>	<b>Target Tahun 2025</b>
Penanganan Lahan Kritis	Luas lahan kritis yang ditangani	199.514, 14 Ha
Penanganan Limbah Industri	Jumlah industri yang telah terawasi dan taat terhadap izin	1242 industri
Penanganan Limbah Peternakan	Jumlah ternak yang diintervensi	13.000 ternak
Penanganan Air Limbah Domestik	Jumlah desa yang terlayani	629 desa bebas BABS dan sanitasi layak
Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	Seluruh sampah dikelola (100%)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya data ketidaksesuaian ruang	Terbangunnya sistem pemanfaatan ruang berbasis GIS
Pemantauan	Jumlah titik pantau	329 titik



Program	Indikator Outcome	Target Tahun 2025
Kualitas Air		
Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengurangan luas genangan banjir	7 lokasi banjir
Penataan Keramba Jaring Apung	Jumlah KJA yang tertata	3 Waduk
Penegakan Hukum	Jumlah kasus tertangani	Menurunnya jumlah kasus pembuangan limbah
Pariwisata	Jumlah lokasi	6 Lokasi
Edukasi	Jumlah industri teredukasi	350 industri
	Jumlah institusi pendidikan PH & 3R	390 institusi pendidikan
Hubungan Masyarakat	Jumlah desa prioritas terintervensi kampanye PHBS	629 desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Penanganan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dilaksanakan di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dengan luas penanganan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.114**  
**Penanganan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang dilaksanakan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/ Kota	Luas Adm (Ha)	Luas Dalam DAS (Ha)	Persentase Luas DAS (%)
1	Bandung	174.304,12	134.384,06	77,10
2	Bandung Barat	128.468,03	128.305,52	99,87
3	Subang	216.871,79	95,16	0,04
4	Bekasi	125.172,77	46.655,77	37,27
5	Bogor	299.225,41	44.623,40	14,91
6	Cianjur	363.409,06	127.626,97	35,12
7	Cimahi	4.248,10	4.248,10	100,00
8	Garut	310.605,53	1.198,39	0,39
9	Karawang	191.540,46	94.026,31	49,09
10	Kota Bandung	16.681,01	16.681,01	100,00
11	Purwakarta	99.407,63	70.788,95	71,21
12	Sukabumi	416.338,79	379,61	0,09
13	Sumedang	156.916,42	13.213,51	8,42
<b>Total</b>		<b>2.503.189,13</b>	<b>682.227</b>	<b>27,25</b>

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Adapun lingkup penanganan meliputi wilayah dari hulu hingga hilir DAS Citarum dengan fokus penanganan pada setiap segmen disesuaikan dengan permasalahan pada masing-masing



segmen. Lingkup wilayah penanganan disajikan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.67**  
**Fokus Penanganan DAS Citarum**



Sumber: Hasil Pengolahan dari SK MENLHK SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Peta Daerah Aliran Sungai, 2018

**Gambar 2.68**  
**Citarum Harum Juara**



Sumber: DLH Provinsi Jawa Barat, 2020

### 2.6.2.9 *One Pesantren One Product (OPOP) dan Pesantren Juara*

*One Pesantren One Product (OPOP)* merupakan salah satu dari program Pesantren Juara yang fokus pada penguatan ekonomi Pesantren. OPOP bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Pesantren dengan cara membangun bisnis Pesantren. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan dalam mencari produk yang laku di pasaran, membangun forum pembeli, memberikan pelatihan, dan pendampingan pada aktivitas produksi, pemasaran, dan keuangan.

**Gambar 2.69**  
***One Pesantren One Product (OPOP) dan Pesantren Juara***



Sumber: Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, 2020

### 2.6.2.10 **JABAR MASAGI**

Jabar MASAGI merupakan program Pendidikan karakter berbasis budaya. Program ini muncul atas kekhawatiran kondisi siswa-siswi di Jawa Barat yang mulai kehilangan identitas budaya lokal, nilai *IQ-EQ-SQ-PQ* yang belum seimbang, dan kurikulum formal yang tidak bisa mengajarkan mata pelajaran, nilai-nilai lokal dan moralitas dalam waktu yang bersamaan. Lebih lanjut, program ini merupakan upaya Provinsi Jawa Barat menumbuhkan manusia Jawa Barat yang harmoni dengan diri, alam, dan seluruh makhluk

hidup untuk mewujudkan nilai-nilai universal yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta.

**Gambar 2.70**  
**Masagi**



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2020

#### **2.6.2.11 KOLECER dan CANDIL**

Kolecer atau Kotak Literasi Cerdas adalah sebuah inovasi perpustakaan mini yang diletakkan di jalur-jalur pejalan kaki. Sementara Candil atau Maca Dina *Digital Library* adalah sebuah aplikasi *e-library* yang memuat berbagai *e-book* dengan pengarang dari seluruh Indonesia.

**Gambar 2.71**  
**Kolecer dan Candil**



Sumber: Dispusipda Provinsi Jawa Barat, 2018

### 2.6.2.12 Layad Rawat

Layad Rawat merupakan sebuah inovasi pelayanan kesehatan dengan konsep mendatangi warga hanya dengan menghubungi pusat panggilan 119. Program ini ditujukan untuk Warga Jawa Barat yang sedang sakit dan tidak mampu ke rumah sakit dalam hal fisik dan finansial. Melalui program ini, warga Jawa Barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan kesehatan istimewa untuk mencegah potensi kondisi kesehatan yang semakin buruk dengan pertolongan pertama.



**Gambar 2.72**  
**Layad Rawat**



Sumber: Dinkes Provinsi Jawa Barat, 2019

### **2.6.2.13 KREDIT MESRA (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)**

Kredit Mesra adalah program kredit mikro yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UKM dari masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bekerja sama dengan rumah ibadah sebagai mitra strategis dalam penyaluran kredit. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih religius.

Program ini selaras dengan misi Jawa Barat untuk menjadikan rumah ibadah sebagai pusat peradaban yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2.73**  
**Kredit Mesra**



Sumber: Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, 2019

#### **2.6.2.14 Jabar Saber Hoaks**

Jabar SABER *Hoaks* adalah kanal yang bertugas untuk verifikasi informasi/berita yang beredar di masyarakat. Tim akan rutin memberikan informasi dan mengajak masyarakat ikut aktif melawan berita bohong.

Berita bohong begitu meresahkan, menghambat produktivitas hingga merusak kedamaian. Keadaan yang kondusif adalah pondasi dasar dalam membangun Jawa Barat Juara Lahir Batin. Jabar Saber *Hoaks* hadir sebagai instrumen penyangga agar keadaan tetap kondusif.

**Gambar 2.74**  
**Jabar Saber Hoaks**

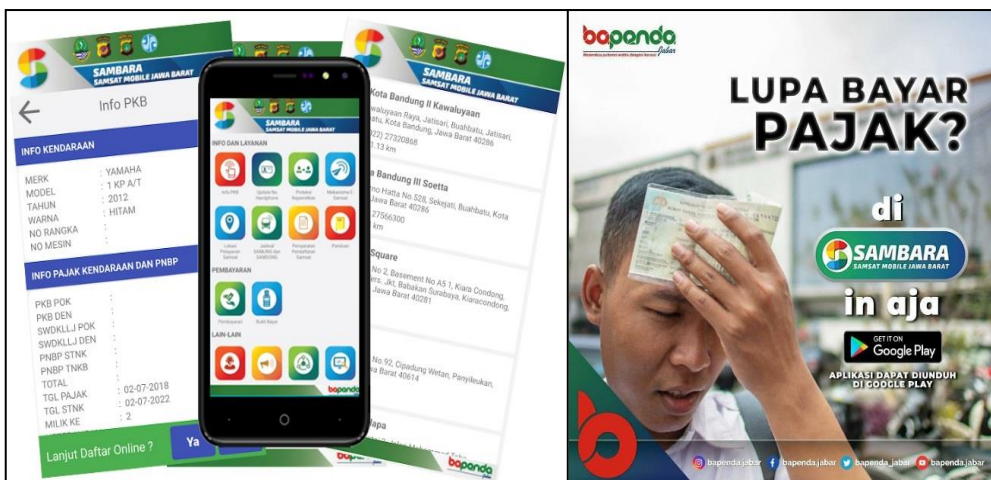


Sumber: Diskominfo Provinsi Jawa Barat, 2019

### 2.6.2.15 SAMBARA (Samsat *Mobile* Jawa Barat)

SAMBARA adalah inovasi yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Bank BJB, Gerai Modern, Loker PPOB.

**Gambar 2.75**  
**Sambara**



Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2020



### 2.6.2.16 JABAR QUICK RESPONSE

Merupakan kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat. *Jabar Quick Response* (JQR) hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat.

**Gambar 2.76**  
**Jabar Quick Response**



Sumber: Diskominfo Provinsi Jawa Barat, 2018

### 2.6.2.17 Petani Milenial

Program Petani Milenial bercita-cita mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, sektor pertanian nampaknya belum menjadi magnet pekerjaan bagi generasi milenial di Provinsi Jawa Barat. Jumlah petani muda di Provinsi Jawa Barat masih relatif kecil. Padahal kita butuh tenaga baru di bidang pertanian yang sampai saat ini adalah sektor penyumbang ekonomi terbesar ke-3 di Provinsi Jawa Barat. Program Petani Milenial diharapkan dapat menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan.

Program petani milenial ini dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu perekrutan secara *online* dan juga perekrutan secara *offline* dengan tahapan sebagai berikut: sosialisasi, pendataan, wawancara, seleksi, bimbingan teknis, pendanaan, pengukuhan dan operasional program.

Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada program Petani Milenial adalah :

1. Fasilitasi permodalan;
2. Fasilitasi pasar melalui penyediaan *off taker*;
3. *Up skill* keahlian dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
4. Pemanfaatan UPTD/Balai sebagai pusat inkubasi
5. Menyiapkan dan mendorong penggunaan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
6. Stimulus benih/bibit unggul bersertifikat, pupuk serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
7. Penyediaan lahan pertanian atau lahan usaha bagi yang belum memiliki lahan.

**Gambar 2.77**  
**Petani Milenial**



Sumber: Humas Jawa Barat, 2021

### 2.6.2.18 SIM Jawara

Guna mendorong penerapan birokrasi dan pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong kabupaten/kota menerapkan sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Manajemen talenta ASN merupakan bagian dari sistem merit yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta. Aplikasi SIM Jawara (Sistem Informasi Manajemen Talenta Jawa Barat) merupakan sistem untuk menilai ASN dari sisi kinerja dan potensi.

Dalam permenpan RB, manajemen talenta ASN dinilai berdasarkan Kotak Manajemen Talenta yang mengukur potensi dan kinerja berdasarkan 9 (sembilan) kotak. Potensi dan kinerja diukur berdasarkan standar ‘di bawah ekspektasi’, ‘sesuai ekspektasi’, serta ‘di atas ekspektasi’. Dari kotak manajemen talenta, akan menghasilkan rekomendasi sesuai kategori yang dicapai seorang pegawai. Jika skornya tinggi, maka rekomendasinya bisa berupa promosi, masuk kelompok rencana suksesi instansi, atau diberi penghargaan. Sebaliknya, jika skor pegawai dalam kategori menengah atau rendah, maka rekomendasi bisa berupa konseling kerja, tugas belajar, bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi, atau bahkan diproses sesuai ketentuan perundangan.

Dengan manajemen talenta ASN ini, rekrutmen, penempatan, rotasi, mutasi, dan pengangkatan jabatan benar-benar objektif, terencana, terbuka, akuntabel, serta bebas intervensi politik dan KKN.

**Gambar 2.78**  
**Aplikasi Manajemen Talenta**



Sumber: Aplikasi SIM Jawara, 2021



# **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**



## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Jawa Barat tahun 2023 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Jawa Barat tahun 2023. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2023 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 di Jawa Barat, asumsi kondisi pandemi COVID-19, serta potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas untuk pengembangan wilayah (investasi, industri pengolahan dan pariwisata).

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2022, target tahun 2022 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Arah kebijakan ekonomi Jawa Barat tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan nasional baik kondisi tahun 2022 maupun perkiraan tahun 2023.

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2023**

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2021, awal tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 membahas capaian kinerja indikator ekonomi daerah Jawa Barat tahun 2021 dan awal tahun



2022 yang terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2022 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Beroperasinya infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban sebagai simpul ekspor mobil nasional dapat mempercepat pembangunan ekonomi Jawa Barat. Hal ini merupakan dampak yang dirasakan dari pembangunan Kawasan Rebana. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Jawa Barat diharapkan telah memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Jawa Barat dapat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi.

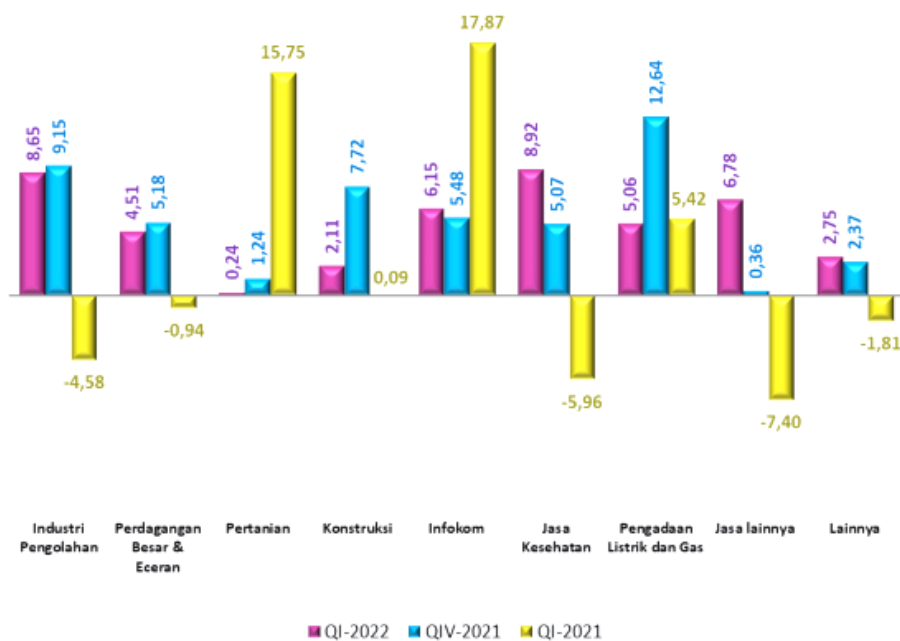
Capaian perekonomian Jawa Barat tahun 2021 dan awal tahun 2022 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020, namun belum sepenuhnya pulih seperti periode sebelum pandemi, hal ini ditandai dengan :

- a. Perkembangan *output* produksi LPE secara triwulanan tahun 2021 terus tumbuh positif;
- b. Kinerja sektor-sektor ekonomi sisi pengeluaran seperti investasi, ekspor, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menunjukkan kecenderungan fase pemulihan menuju tahap penormalan;
- c. Tahun 2021 juga masih diwarnai kebijakan PPKM yang berdampak pada pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga berdampak pada kehilangan sebagian potensi pertumbuhan pada sektor konsumsi.

Berdasarkan capaian sektor lapangan usaha perekonomian Jawa Barat tahun 2021, terdapat 5 (lima) besar sektor lapangan usaha yang tumbuh positif. Sektor tersebut yaitu *Real Estate* sebesar 11,75 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,63 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,54 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen.



**Gambar 3.1**  
**Perkembangan Sektor Lapangan Usaha**  
**Perekonomian Jawa Barat Y-on-Y (Persen)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Mei 2022

Kontraksi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 pada gilirannya telah mendorong percepatan transformasi digital di berbagai aktivitas perekonomian, baik dari aspek produksi, transaksi perdagangan barang dan jasa serta sektor keuangan. Transformasi tersebut dicirikan oleh pertumbuhan signifikan pada sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi yang merupakan basis transformasi ekonomi digital.

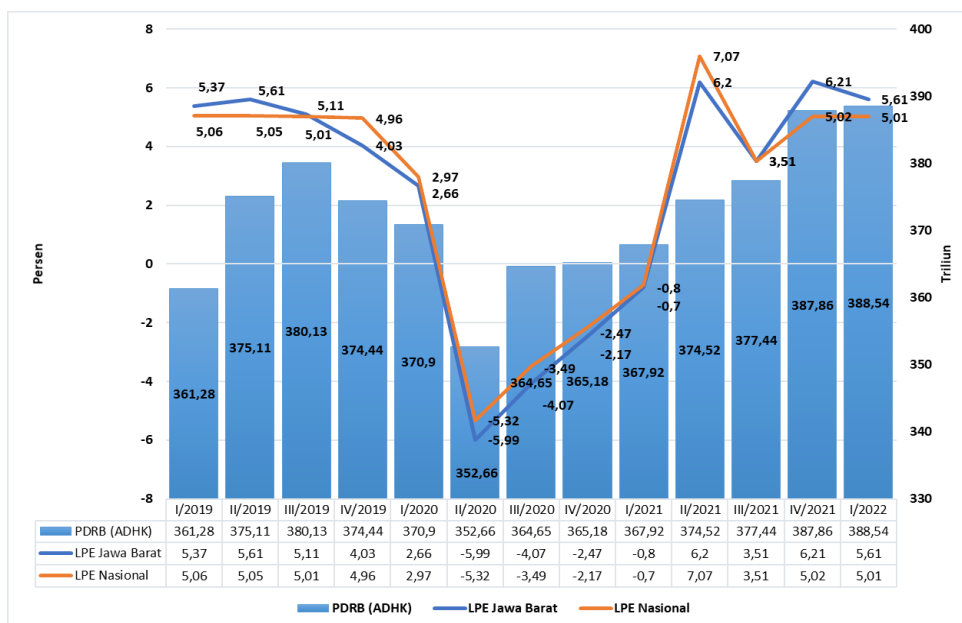
### 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Sebagaimana pada Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,74 persen (*y-o-y*), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,52 persen (*y-o-y*). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tahun 2021 tersebut didorong oleh pertumbuhan komponen ekspor sebesar 22,93 persen (*y-o-y*) seiring dengan pulihnya transaksi perekonomian negara mitra dagang. Selain itu, permintaan domestik juga menunjukkan perbaikan yang terlihat dari pertumbuhan



konsumsi rumah tangga sebesar 1,33 persen dan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,99 persen.

**Gambar 3.2**  
**Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulan (YoY) Provinsi Jawa Barat**

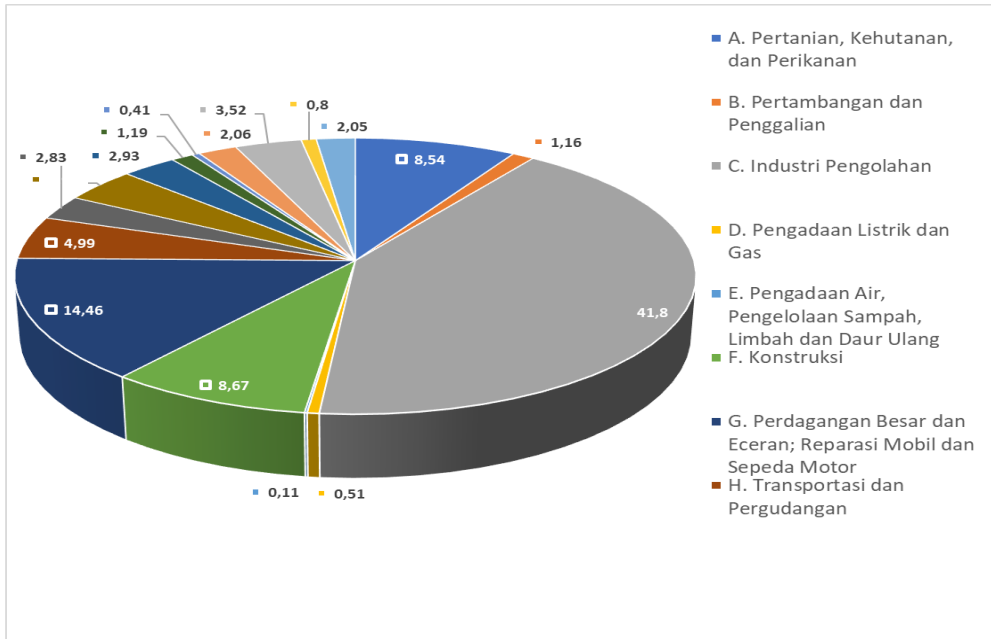


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, April 2022, diolah

Dibandingkan nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2021 menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pada Triwulan IV-2021, Perkembangan LPE Jawa Barat mencapai 6,21 persen diatas LPE Nasional sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perbaikan seiring dengan efektivitas penanganan COVID-19 serta pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dari sisi sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan, perdagangan dan sektor pertanian masih menjadi 3 (tiga) kelompok lapangan usaha terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2021.

**Gambar 3.3**  
**Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Februari 2022, Diolah

### 1. **Industri Pengolahan**

Industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat dibanding sektor lainnya, yaitu mencapai 41,80 persen dari total PDRB di tahun 2021. Industri pengolahan tersebut meliputi 16 (enam belas) kategori, dengan 3 (tiga) kategori terbesar yaitu industri alat angkutan tumbuh sebesar 7,81 persen. Pertumbuhan tersebut didorong antara lain oleh adanya insentif PPnBM yang berdampak pada peningkatan produksi kendaraan bermotor. Subsektor berikutnya adalah industri barang logam; komputer, barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik tumbuh sebesar 7,77 persen yang sejalan dengan peningkatan produksi karena tingginya permintaan ekspor. Selanjutnya, subsektor industri tekstil dan pakaian dengan pertumbuhan sebesar 6,63 persen.

### 2. **Perdagangan Besar dan Eceran**

Sektor Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar nomor 2 (dua) setelah Industri



Pengolahan sebesar 14,46 persen dari total PDRB. Kontribusi ini disumbang dari Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Pembebasan pajak PPnBM hingga 100 persen, relaksasi *down payment* kredit kendaraan bermotor 0 persen serta pelonggaran *Loan to Value* (LTV) 100 persen yang berlaku efektif sejak 1 Maret 2021. Stimulus ini berhasil untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui pembelian kendaraan baru.

Perkembangan ekonomi dan keuangan digital pada sektor perdagangan eceran tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan volume sebesar 18,70 persen, dimana pada triwulan IV-2021 mencapai lebih dari 153 juta transaksi. Jumlah pembeli barang konsumsi di *e-commerce* Indonesia adalah 107 juta orang (Januari 2019). Sama halnya dengan di Jawa Barat, total transaksi *e-commerce* tercatat mencapai Rp83,77 triliun atau tumbuh 43,65 persen (*y-o-y*). Kondisi ini diyakini akan terus meningkat pada 2022 sejalan dengan semakin meningkatnya preferensi masyarakat terhadap digitalisasi dan akseptansi teknologi, serta berbagai kemudahan yang ditawarkan terkait dengan pembelian barang/jasa secara *online*. Dari 4.545.874 UMKM di Jawa Barat, sebanyak 26,2 persen UMKM diantaranya telah aktif menggunakan *e-commerce* untuk memasarkan produknya. (Laporan Perekonomian Bank Indonesia, 2022).

### **3. Pertanian**

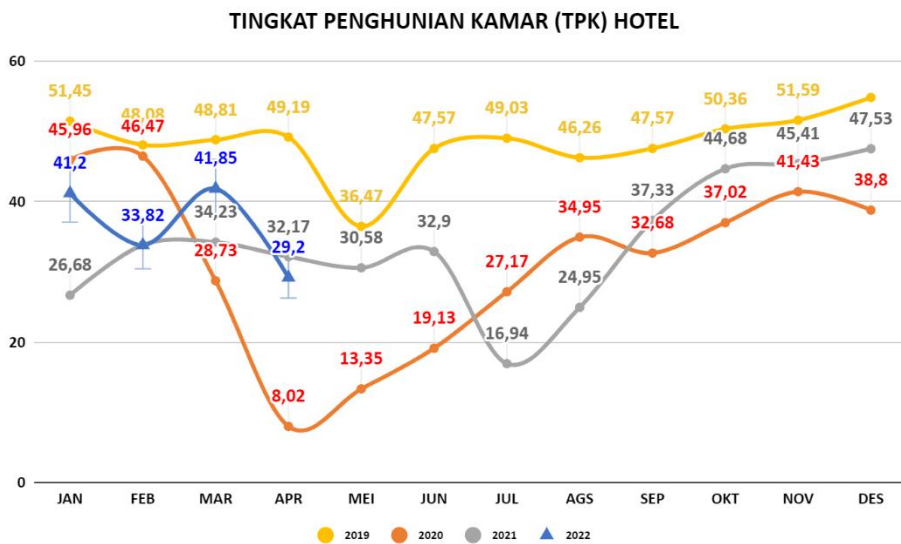
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB mencapai sebesar 8,54 persen pada tahun 2021. Sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui intensifikasi lahan pertanian. Lingkup lapangan usaha ini meliputi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, Perikanan; Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan.

### **4. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman**

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2021 memberikan andil 2,83 persen terhadap PDRB Jawa Barat atau sebesar Rp38,62 triliun. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung

dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi. Perkembangan ekonomi sektor hotel restoran diindikasikan oleh kinerja Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. TPK Hotel di Jawa Barat pada April 2022 mencapai 29,2 persen, turun 12,65 poin dibandingkan TPK Maret 2022 yang mencapai 41,85 persen dan kinerja TPK hotel April 2022 lebih kecil dibandingkan dengan kinerja pada bulan yang sama di tahun 2021.

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan TPK Hotel**



Sumber: BPS Jawa Barat, Juni 2022, Diolah

## 5. Konstruksi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha konstruksi memberikan andil sebesar 8,67 persen terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2021 atau sebesar Rp126,76 triliun. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prefabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Proyek pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Barat jangka menengah seperti Pelabuhan Patimban, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Tol Cisumdawu dan proyek KPBU TPPAS Regional Lulut Nambo memberikan kontribusi pada perekonomian di sektor konstruksi.



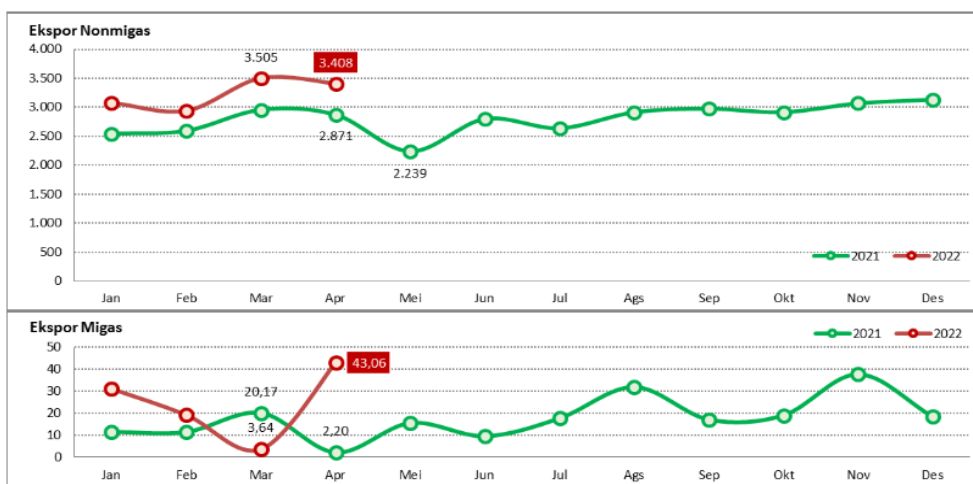
## 6. Informasi dan Komunikasi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan andil 3,95 persen terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2021 atau sebesar Rp91,88 triliun. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan; persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori Informasi dan Komunikasi menjadi peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi. Di era digitalisasi, peranan lapangan usaha ini menjadi indikator kemajuan Jawa Barat dalam jasa telekomunikasi,

## 7. Ekspor dan Impor

Ekspor Jawa Barat pada April 2022 mengalami penurunan sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan Maret 2022, yaitu dari USD 3,51 miliar menjadi USD 3,45 miliar. Namun demikian secara *year on year* mengalami kenaikan sebesar 20,11 persen di bandingkan April 2022. Penurunan ekspor di April 2022 terjadi karena adanya penurunan ekspor nonmigas sebesar 2,75 persen, sedangkan pada ekspor migas mengalami peningkatan sebesar 1.081,4444I persen. Kinerja total ekspor (Januari-April 2022) menguat sebesar 18,31 persen. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, nilai ekspor nonmigas mengalami capaian tertinggi di Bulan Maret 2022 (USD 3,50 miliar).

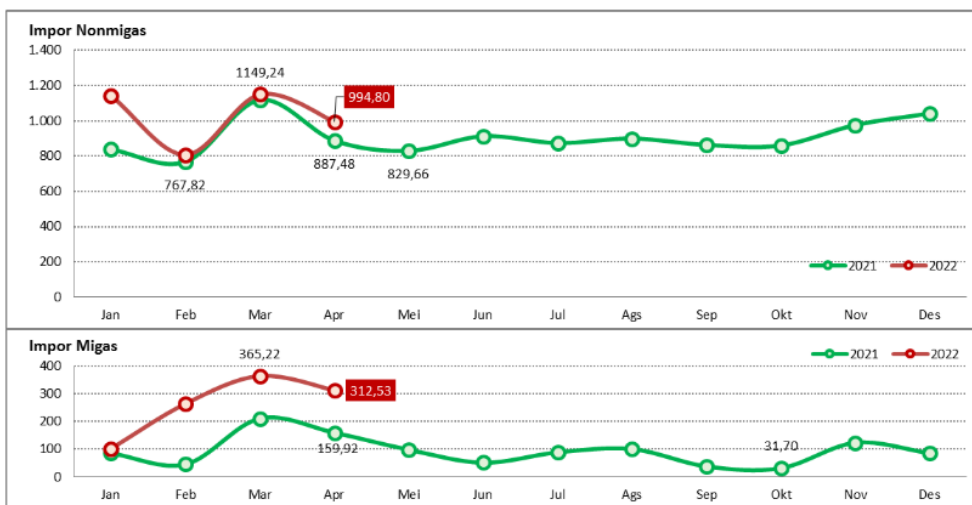
**Gambar 3.5**  
**Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas**  
**Januari 2021-April 2022 (Juta USD)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Juni 2022

Penurunan kinerja ekspor di bulan April 2022 sejalan dengan impor Jawa Barat yang mengalami penurunan sebesar 13,68 persen atau senilai USD 1,31 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya impor nonmigas sebesar 13,44 persen. Begitu juga dengan impor migas yang mengalami penurunan sebesar 14,43 persen. Bila dibandingkan dengan kinerja impor di bulan April 2021 terjadi peningkatan nilai impor sebesar 24,89 persen. Nilai impor secara kumulatif (Januari-April 2022) mengalami peningkatan sebesar 24,89 persen atau senilai USD 5,14 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan oleh impor nonmigas (13,34 persen) dan migas (107,81 persen). Dalam rentang waktu 2021 hingga April 2022, nilai impor nonmigas mengalami capaian tertinggi terjadi di Bulan Maret 2022 senilai USD 1,15 miliar. Penurunan nilai impor berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor dikarenakan bahan impor merupakan faktor pendorong produksi Jawa Barat.

**Gambar 3.6**  
**Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas**  
**Januari 2021-April 2022**



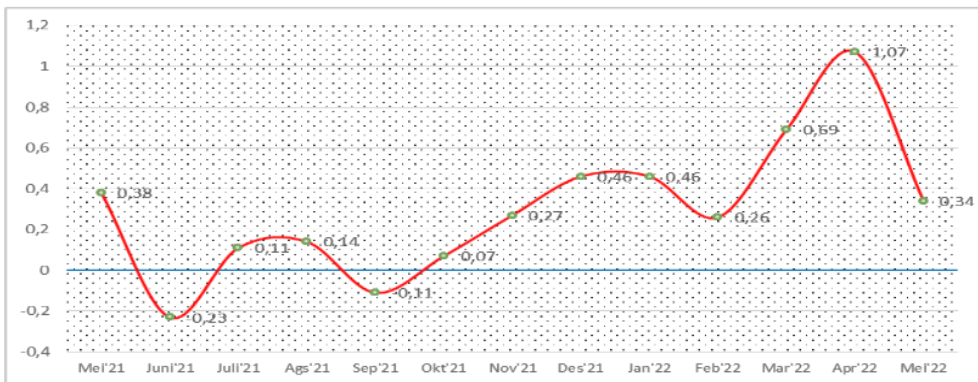
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Juni 2022

### 3.1.1.2 Inflasi

Perkembangan perubahan harga-harga produk barang dan jasa secara agregat pada tahun 2021 relatif lebih dinamis dibanding kondisi tahun 2020, hal ini ditandai dengan terjadinya fenomena inflasi yang diikuti oleh deflasi. Deflasi yang berlangsung pada Bulan Juni dan September 2021 disebabkan oleh penurunan sisi permintaan, khususnya kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran yang disebabkan oleh pemberlakuan PPKM dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Namun, pada Mei 2022 Inflasi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya yang antara lain disebabkan oleh kenaikan harga minyak dan gas alam dunia. Laju inflasi bulanan dalam kurun waktu Januari 2022 – Mei 2022 sebesar 2,84 persen dengan laju inflasi dari Mei 2022 terhadap Mei 2021 tercatat sebesar 3,57 persen. Angka inflasi masih relevan dengan target Jawa Barat sekitar  $(3 \pm 1)$  persen dan inflasi masih dalam kategori terkendali.



**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Provinsi Jawa Barat**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Juni 2022

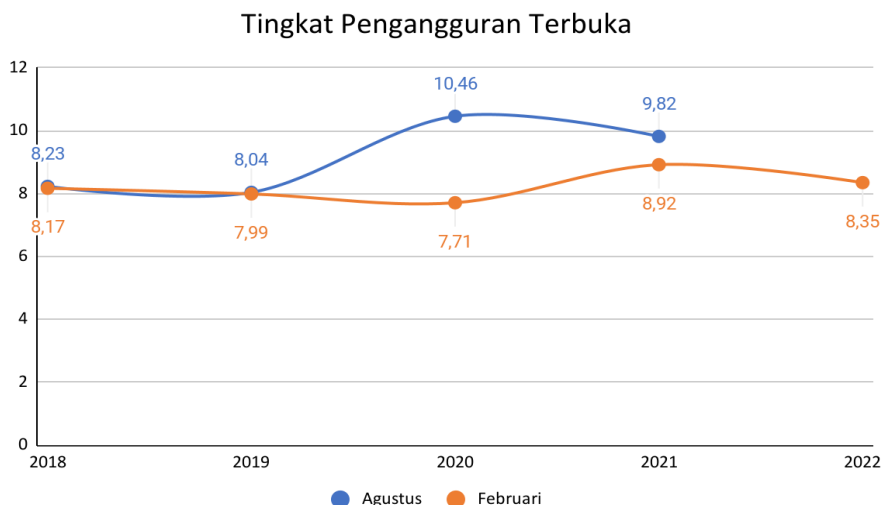
Keterangan: Menggunakan IHK Tahun Dasar 2018=100

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kontributor inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 1,12 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan kontribusi pada deflasi terbesar, yaitu Kelompok Transportasi memberikan sebesar 0,18 persen.

### 3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu periode Februari dan Agustus. TPT Agustus cenderung lebih tinggi dibanding Februari, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pencari kerja baru yang baru lulus sekolah di bulan Juli. Selain itu, pada periode bulan Januari-Februari umumnya sektor pertanian memasuki masa tanam, sehingga jumlah pekerja di sektor pertanian lebih banyak dan berkontribusi dalam menurunkan TPT. TPT periode Februari 2022 sebesar 8,35 persen, menurun 2,07 persen dibanding keadaan Februari 2021 sebesar 8,92 persen. Penurunan TPT pada Februari 2022 menunjukkan lapangan kerja di Jawa Barat sudah membaik, walaupun belum sepenuhnya pulih. Hal ini didukung oleh kondisi pandemi COVID-19 yang mulai terkendali dan meningkatnya penyerapan pekerja pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian.

**Gambar 3.8**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat**  
**Februari 2018 – Februari 2022 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022, diolah

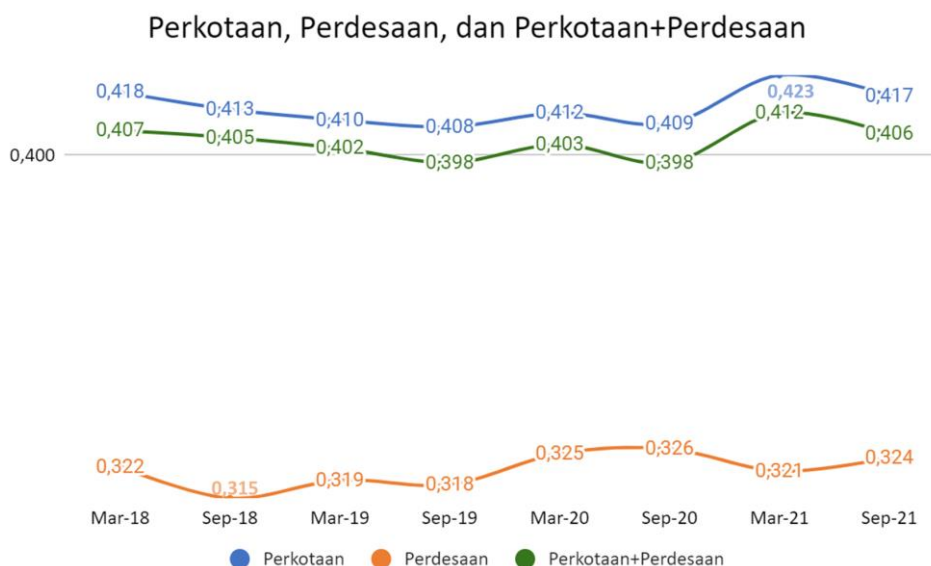
Berdasarkan tingkat pendidikan, angka TPT Jawa Barat disumbang oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 11,16 persen. Hal ini lebih tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Dengan kata lain, terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT Perkotaan turun sebesar 0,12 poin dan TPT Perdesaan turun sebesar 1,85 persen poin pada Februari 2021. TPT Perdesaan mengalami penurunan lebih tinggi daripada TPT Perkotaan.

#### **3.1.1.4 Indeks Gini**

Perkembangan ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh Indeks gini mengalami fluktuasi sepanjang periode September 2018 – September 2021. Indeks gini Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan cukup secara gradual pada September 2018 sampai September 2019. Pandemi COVID-19 membuat ketimpangan di Jawa Barat semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Maret 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,005 poin dibanding September 2019. Meski demikian, pertumbuhan indeks gini pada September 2021 sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2021. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah dibandingkan periode sebelumnya yang mengurangi jarak ketimpangan. Berdasarkan spasial, Indeks Gini di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Pada September 2021, indeks gini di perkotaan tercatat sebesar 0,417 poin lebih tinggi dibanding indeks gini pada perdesaan sebesar 0,324 poin.

**Gambar 3.9**  
**Perkembangan Indeks Gini Maret 2018 – September 2021**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022, diolah

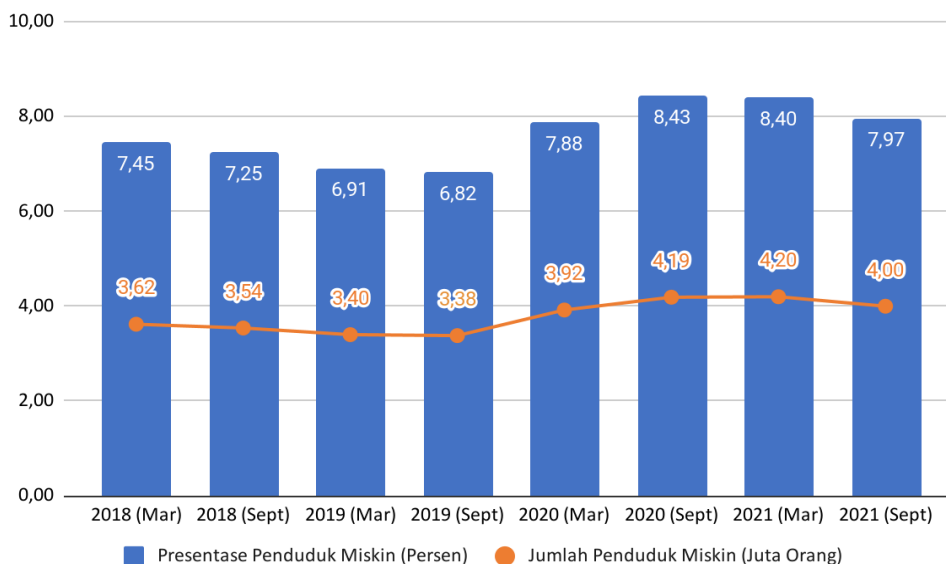
### 3.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2019 – September 2021 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan, terutama pada penduduk perkotaan di Jawa Barat.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat periode September 2021 mengalami penurunan dibanding September 2020. Pada September 2021 penduduk miskin Jawa Barat mencapai 4 juta jiwa atau turun 19 ribu jiwa dibandingkan keadaan September 2020 di angka 4,190 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan perbaikan seiring

dengan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

**Gambar 3.10**  
**Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat**  
**Maret 2018 – September 2021**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

### 3.1.1.6 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

Proyeksi indikator kinerja ekonomi makro menjadi kerangka perencanaan pembangunan tahun 2023. Proyeksi indikator makro tahun 2022 dan tahun 2023 berdasarkan RPJMD disandingkan dengan target nasional disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat**  
**Disandingkan dengan Nasional Tahun 2023**

No.	Indikator Makro & Pembangunan	Nasional	Jawa Barat
		2023	2023*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,31-73,49	73,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3-6,0	4,35



No.	Indikator Makro & Pembangunan	Nasional	Jawa Barat
		2023	2023*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,00-5,30	9,69
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	N/A	7,54
5	Indek Gini (Poin)	0,378-0,375	0,396
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	N/A	1,12
7	Pendapatan Per Kapita* (Juta Rupiah)	N/A	49,29

Sumber: \* Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2023 diprediksi akan mengalami perbaikan seiring dengan penormalan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diprediksi mengalami perbaikan dan terus tumbuh positif mengalami penormalan di tahun 2023.

Demikian pula dengan kinerja Indeks gini pada tahun 2022 dan tahun 2023 diprediksi mengalami perbaikan dan mencapai kondisi level di bawah kinerja sebelum masa pandemi. Kinerja IPM Jawa Barat juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023. Analisis secara lebih rinci dijelaskan sebagaimana berikut.

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

#### 1. Tantangan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 mencapai 5,5 - 5,9 persen. Kondisi ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan lebih lambat dibanding tahun 2022, yang berdampak pada risiko penurunan perekonomian global secara tajam atau *hard landing*. Kondisi ini akan berimplikasi pada ancaman perlambatan pertumbuhan beberapa sektor ekonomi di nasional dan Jawa Barat.

Lembaga IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 4,4 persen, sementara untuk tahun 2023 yaitu sebesar 3,8 persen. Sementara *World Bank* memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 mencapai 4,1 persen, dan untuk tahun 2023 yaitu 3,2 persen.

Tantangan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan meliputi gangguan rantai pasok, krisis energi, normalisasi suku bunga, perkembangan varian baru COVID-19, *China switching policy*,

*scarring effect* dari Pandemi COVID-19, dan ketidakstabilan eskalasi tensi geopolitik global.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan luka memar (*scarring effect*) terhadap kondisi korporasi dan menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat sejak pandemi. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga terjadi di Amerika Serikat dan China. *Scarring effect* ini yang menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi global terutama pada sektor tenaga kerja, industri pengolahan dan penurunan investasi.

## **2. Tantangan Ekonomi Nasional**

Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 6,0 persen, *World Bank* memproyeksikan pada angka 5,1 persen dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan juga pada angka 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dipengaruhi oleh efektivitas penanganan COVID-19 serta kebijakan nasional dalam memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi.

Tantangan ekonomi nasional adalah dampak memburuknya konflik di Ukraina, meningkatnya kembali kasus dan varian baru COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

## **3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Jawa Barat**

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari perkembangan kasus pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata.

**Gambar 3.11**  
**Perkembangan Kasus COVID-19 Dunia dan Nasional**



Sumber: *coronavirus.thebaselab.com* per tanggal 21 juni 2022

Ditemukannya perkembangan varian COVID-19 Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 merupakan hal yang harus diwaspadai. Penambahan kasus harian baru dan kecepatan penularan COVID-19 merupakan tantangan bagi ketahanan sistem kesehatan daerah dalam mengendalikan sebaran virus. Pengendalian virus merupakan kunci dalam percepatan pemulihan ekonomi daerah. Dampak kenaikan kasus harian yang ditransmisikan pada pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat menahan kinerja perekonomian daerah.

Eskalasi tensi geopolitik global (Rusia-Ukraina) berpotensi mempengaruhi perekonomian Jawa Barat melalui 3 (tiga) jalur yaitu jalur perdagangan, jalur komoditas dan jalur keuangan. Pada jalur perdagangan akan mempengaruhi permintaan global dan volume perdagangan. Pada jalur komoditas akan mempengaruhi inflasi global yang berpengaruh pada harga komoditas dan volume perdagangan. Pada jalur keuangan akan mempengaruhi likuiditas global yang berpengaruh pada risiko pasar dan percepatan kebijakan politik.

Dampak langsung invasi Rusia Ukraina melalui jalur perdagangan ke Jawa Barat relatif rendah. Nilai perdagangan Jawa Barat dengan Rusia dan Ukraina pada Januari 2022 relatif kecil. Baik secara nasional maupun Jawa Barat kinerja ekspor ke Rusia pada Januari 2022 secara berturut-turut hanya sebesar 0,97



persen dan 0,88 persen dari total ekspor secara keseluruhan. Adapun ekspor terbesar Jawa Barat ke Rusia berasal dari industri mesin dan alat listrik. Pada Januari 2022 kegiatan perdagangan dengan Ukraina juga menunjukkan proporsi yang relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Adapun ekspor terbesar Jawa Barat berasal dari Industri plastik/karet. Dampak tidak langsung invasi Rusia Ukraina ke Jawa Barat melalui transmisi jalur harga komoditas. Potensi kenaikan gas alam terutama bagi industri petrokimia akibat Rusia sebagai salah satu eksportir gas alam utama global.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2023 meliputi:

1. Penormalan kinerja perekonomian;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat;
3. Digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis *high tech*;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat; dan
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
  - a. Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) pada seluruh sektor perizinan;
  - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
  - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*, *link and match* investor industri kecil dan industri besar; dan
  - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada sektor industri:
  - a. Mendorong perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. Substitusi bahan baku impor;
  - c. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
  - d. Pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri 40 persen.



3. Tantangan pada sektor UMKM:
  - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan
  - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
  - a. Promosi destinasi pariwisata baru;
  - b. Pengembangan Desa wisata;
  - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional; dan
  - d. Percepatan Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE).
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
  - a. Perdagangan berorientasi ekspor;
  - b. Standarisasi pasar rakyat ber-SNI;
  - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
  - d. *Market intelligence* untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;
  - e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga.
6. Tantangan pada sektor pangan dan hortikultura:
  - a. Ketersediaan pangan yang terjangkau;
  - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
  - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan dan hortikultura impor; dan
  - d. Ketersediaan pangan berkualitas.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
  - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
  - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat; dan
  - c. Balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Prospek perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan menurunnya sebaran kasus COVID-19 dan peningkatan persentase vaksinasi.

Kinerja ekspor tahun 2022 diperkirakan semakin membaik seiring dengan bertambahnya negara yang membuka pembatasan untuk kegiatan ekspor-impor, pengembangan pasar tujuan ekspor, peluang penetrasi pasar non tradisional. Impor barang produksi atau bahan baku juga mulai membaik, sementara untuk perdagangan dalam negeri akan terus tumbuh yang didorong oleh digitalisasi pemasaran serta penerapan *QR-code* dalam transaksi pembayaran. Secara umum kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2022 membaik.

Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2022 diharapkan telah dapat dilaksanakan, secara lebih ekspansif dibanding tahun 2021. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) turut menunjang pergerakan ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*). Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar ekspor. Secara umum, perekonomian pada tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 akan sama atau lebih besar dari 3,92 persen.

Pada tahun 2023, diperkirakan vaksin telah didistribusikan secara merata di seluruh Jawa Barat, dan telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi COVID-19 meskipun muncul varian baru. Penurunan kasus pandemi COVID-19 akan berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Secara umum, perekonomian tahun 2023 sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi normal. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan sama atau lebih besar dari 4,35 persen. Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2022-2023**

No	Indikator	Realisasi 2021	Target	
			2022	2023
1	Nilai PDRB-ADHB (triliun rupiah)	2.209,82	2.391,6 – 2.405,66	2.641,42 – 2.706,48

No	Indikator	Realisasi 2021	Target	
			2022	2023
2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	3,74	3,92	4,35
3	Inflasi (persen)	1,75	3,00	3,00
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	N/A	46,48	49,29
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,82	9,70	9,69
6	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,97	7,67	7,54
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	547,93	515,31	531,87

Sumber: Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat 2021 (c to c), Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 masih dalam fase pemantapan pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, serta Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Informasi dan Komunikasi, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2023. Proyeksi pertumbuhan lapangan usaha tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen)**

Lapangan Usaha	Realisasi	Proyeksi	
	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	1,61	1,79
B Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,84	1,11
C Industri Pengolahan	4,22	3,40	3,71
D Pengadaan Listrik dan Gas	11,66	1,40	1,55
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,63	3,67	4,07
F Konstruksi	6,47	5,08	5,64



Lapangan Usaha		Realisasi	Proyeksi	
		2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,19	4,01	4,45
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,17	3,70	4,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,04	5,80	6,44
J	Informasi dan Komunikasi	7,30	7,41	8,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,69	2,47	2,74
L	Real Estate	11,75	6,96	7,73
M,N	Jasa Perusahaan	8,54	6,42	7,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,02	2,82	3,12
P	Jasa Pendidikan	0,02	4,78	5,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	6,32	7,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,81	5,78	6,41

Sumber: Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat 2021 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 digerakkan oleh komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor, dan Konsumsi Rumah Tangga. PMTB diperkirakan akan mengalami kenaikan pertumbuhan seiring dengan masuknya investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kinerja Ekspor Jawa Barat tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,23 persen dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan. Adapun pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2023**

Komponen Pengeluaran		Realisasi	Proyeksi	
		2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,33	3,63	4,00



Komponen Pengeluaran	Realisasi	Proyeksi	
	2021	2022	2023
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,92	2,48	14,12
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,95	1,89	2,09
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,99	4,25	4,72
5 Ekspor	22,93	3,22	4,23
6 Impor	19,84	7,85	2,21

Sumber: Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat 2021 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2023.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 dibawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat**  
**Tahun 2023**

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,69
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,54
5	Indeks Gini (Poin)	0,396
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,12
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	49,29

Sumber: \*Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

#### 3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2023 yaitu: 1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan



gaya hidup sehat dan berkelanjutan; 2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah; 3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan 4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Strategi nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2023 yaitu: 1) strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara; dan 2) strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan serta kawasan rawan bencana.

Sasaran nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2023 yaitu: 1) mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah; 2) mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan 3) meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Prioritas pengembangan wilayah nasional Tahun 2023 adalah investasi, industri pengolahan dan pariwisata. Arah kebijakan investasi yaitu: percepatan investasi industri, pariwisata dan infrastruktur; penyiapan peta potensi investasi daerah; fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri; penuntasan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko; dan deregulasi serta integrasi perijinan investasi. Arah kebijakan industri manufaktur yaitu: *re-skilling* dan *up-skilling* industri pengolahan; pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal; substitusi impor dan TKDN; peningkatan ekspor hasil industri; percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan KEK; serta inovasi dan adaptasi teknologi. Arah kebijakan industri pariwisata yaitu: reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara; reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal; penerapan standar kebersihan dan keselamatan; serta *re-skilling* dan *up-skilling* pariwisata.

Setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan keunggulannya. Untuk wilayah Jawa-Bali fokus pengembangannya adalah:



1) industrialisasi berbasis pasar, memproduksi barang konsumsi, dan memanfaatkan keunggulan aglomerasi; 2) simpul pengolahan dalam rantai nilai domestik antar wilayah; 3) berpartisipasi dalam *Global Value Chains*; 4) pusat jasa modern nasional; 5) pintu gerbang internasional pariwisata nasional; dan 6) lumbung pangan nasional.

Ekonomi Nasional tahun 2021 sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat, tetapi masih ada beberapa sektor yang belum pulih akibat *scars effect*. Efek *scars* krisis COVID-19 ini sebagian besar mengenai sisi produksi yaitu penurunan produktivitas perekonomian, penurunan produktivitas tenaga kerja dan penurunan produktivitas modal/kapital.

### **3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2023 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang diarahkan kepada peningkatan realisasi investasi, optimalisasi industri berbasis bahan baku lokal (TKDN) dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pemulihan kinerja pariwisata, dan penguatan sistem pangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kelautan berbasis kawasan, komoditas unggulan dan korporasi.
2. Penguatan Sistem Pangan
  - a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi kebutuhan pangan mandiri, khususnya bahan pokok penting;
  - b. Meningkatkan akses pangan melalui penyediaan infrastruktur wilayah serta penyederhanaan sistem logistik dan distribusi;
  - c. Pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah dan;
  - d. Membangun sistem satu data pangan yang terintegrasi.
3. Peningkatan Realisasi Investasi
  - a. Percepatan investasi industri, pariwisata, dan infrastruktur (Rebana dan Jabar Selatan);
  - b. Penyiapan peta potensi investasi daerah;
  - c. Fasilitasi lokasi untuk relokasi investasi swasta dari luar negeri;



- d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.
4. Optimalisasi pengembangan industri TKDN dan Operasionalisasi dengan KPI secara berkelanjutan.
  - a. Penguatan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal;
  - b. Peningkatan TKDN melalui substitusi bahan baku dan produk impor;
  - c. Peningkatan ekspor produk industri manufaktur dan agroindustri;
  - d. Percepatan operasionalisasi kawasan industri dan KEK secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keberadaan lahan sawah yang dilindungi;
  - e. Inovasi dan adaptasi industri 4.0.
5. Pemulihan Kinerja Pariwisata
  - a. Reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara, serta reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal;
  - b. Penerapan standar kebersihan dan keselamatan berwisata (jaminan berwisata yang *Clean, Health, Safety, and Environment* (CHSE));
  - c. *Re-skilling* dan *up-skilling* pariwisata (melalui peningkatan kapasitas SDM pariwisata);
  - d. Pengembangan destinasi wisata berstandar internasional.
6. Penguatan peran UMKM dalam perekonomian daerah
  - a. Pengembangan ekosistem digital UMKM melalui peningkatan literasi digital, digitalisasi produksi dan pemasaran, akses permodalan serta percepatan digitalisasi transaksi keuangan.
  - b. pengembangan inkubator bisnis dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah

menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); obligasi daerah; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP); serta swadaya masyarakat. Konsep pendanaan pembangunan di Jawa Barat dikenal dengan 8 (delapan) pintu anggaran dalam membangun Jawa Barat.

**Gambar 3.12**  
**Kolaborasi Pendanaan Pembangunan**



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan RKP Tahun 2003.

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

### **3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2020 dan tahun 2021, asumsi pendapatan tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Apabila melihat kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan cenderung mengalami penurunan di tahun 2021 menurun sebesar 9,77 persen, hal ini dimungkinkan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2021 pandemi COVID-19 mengalami kenaikan sehingga pemerintah menerapkan kebijakan PPKM level 3 dan 4 berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan daerah, namun pada sisa waktu November dan Desember



2021 ini pandemi COVID-19 melandai sehingga diharapkan pada akhir tahun 2021 pendapatan daerah akan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 walaupun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini terkait dengan pandemi COVID-19 diharapkan sudah melandai pada akhir tahun 2022, dan potensi yang dimiliki, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi akan dilakukan.

Selain hal tersebut, di Provinsi Jawa Barat masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang, yang secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2023**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 <sup>1)</sup>	Realisasi Tahun 2021 <sup>2)</sup>	Target Tahun 2022 <sup>3)</sup>	Proyeksi/Target pada Tahun 2023 <sup>4)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	18.521.882.178.042	20.333.679.966.126	21.362.075.736.757	22.823.871.083.739
4.1.01	Pajak Daerah	17.035.963.236.918	18.847.183.713.165	19.759.612.472.108	21.172.743.769.203
4.1.02	Retribusi Daerah	40.220.203.478	43.262.322.502	41.987.094.443	42.399.411.443
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	401.703.315.844	414.780.606.267	423.127.560.394	431.590.111.601
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.043.995.421.802	1.028.453.324.192	1.137.348.609.812	1.177.137.791.492
4.2	Pendapatan Transfer	15.910.828.461.271	16.606.086.315.554	10.155.411.279.423	10.126.693.424.255
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	15.881.415.189.271	16.577.293.915.554	10.155.411.279.423	10.126.693.424.255
4.2.01.01	Dana Perimbangan	15.881.415.189.271	16.489.128.153.554	10.136.013.445.423	10.038.527.662.255
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.063.105.718.266	2.594.482.992.137	2.178.446.873.423	2.037.647.126.255
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.964.612.155.000	3.007.926.119.000	3.015.641.290.000	3.058.955.254.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	10.853.697.316.005	10.886.719.042.417	4.941.925.282.000	4.941.925.282.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	88.165.762.000	19.397.834.000	88.165.762.000
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	29.413.272.000	-	-	-
4.2.02.01	Dana Penyesuaian	29.413.272.000	-	-	-
4.2.03	Transfer Antar Daerah	-	28.792.400.000	-	-
4.2.03.01	Pendapatan bagi hasil	-	-	-	-





No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 <sup>1)</sup>	Realisasi Tahun 2021 <sup>2)</sup>	Target Tahun 2022 <sup>3)</sup>	Proyeksi/Target pada Tahun 2023 <sup>4)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.2.03.02	Bantuan Keuangan	-	28.792.400.000	-	-
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	71.565.066.005	52.106.943.251	23.379.000.000	28.796.717.598
4.3.01	Hibah	36.459.066.005	33.163.983.828	23.379.000.000	28.796.717.598
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	35.106.000.000	18.942.959.423	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)</b>	<b>34.504.275.705.318</b>	<b>36.991.873.224.931</b>	<b>31.540.866.016.180</b>	<b>32.979.361.225.592</b>

Sumber: Bappeda, 2022

<sup>1)</sup> Perda Pertanggungjawaban APBD 2020,

<sup>2)</sup> Realisasi APBD 2021 (*audited BPK*)

<sup>3)</sup> Perda APBD 2022,

<sup>4)</sup> Tahun 2023 (hasil proyeksi masih sangat sementara).

Pada tabel di atas, terlihat bahwa target Pendapatan Daerah tahun 2023 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 4,56 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2022, peningkatan tersebut diasumsikan dari PAD ditargetkan naik sebesar 6,84 persen dan Dana Transfer diasumsikan tetap atau sama dengan target APBD tahun 2022. Namun asumsi pendapatan daerah pada tahun 2023 tersebut bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah asumsi kesuksesan pemberian vaksin kepada masyarakat selesai pada akhir tahun 2022 sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal dan perekonomian dapat membaik. Diharapkan pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 masyarakat dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan membeli kendaraan bermotor, selain hal tersebut analisis atau strategi di dalam penggalan pendapatan daerah masih diperlukan, mengingat masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dan Dinas/Balai Penghasil.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.



9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh melalui:
  - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
  - b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
  - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan antara lain Sarana Layanan SAMSAT; Samsat *OUTLET*; Samsat Gendong (SAMDONG); Samsat Masuk Desa (SAMADES); Samsat Keliling (SAMLING); Sarana ATM (*E-SAMSAT*); Aplikasi SAMBARA; Aplikasi ATOS PAMOR; Aplikasi ZONITA PAMOR; *Account Representatif* (Pengampu pajak), *drive thru*, Aplikasi Sambara, Aplikasi Sipolin, Samsat J'Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret). Selain itu dilakukan kerja sama dengan beberapa toko ritel

- dalam rangka kemudahan pelayanan pembayaran.
- e. Menggalakkan sebuah program akselerasi pendapatan daerah yaitu "Program Triple Untung Plus". Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sebagai tahun Tertib Administrasi Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor sekaligus memberikan insentif pajak daerah kepada dunia usaha sektor otomotif dan masyarakat/wajib pajak di Provinsi Jawa Barat. Program Triple Untung Plus tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/267-Bapenda/2020. Program Triple Untung Plus merupakan tindak lanjut terhadap arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemberian relaksasi pajak untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - f. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO: 9001-2008.
  - g. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
  - h. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya dalam rangka peningkatan kinerja BUMD yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.
  - i. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
  - j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui:
    - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

- b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  - c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
  - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
  - c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Jawa Barat saat ini, serta belajar dari dampak pandemi COVID-19, saat ini Provinsi Jawa Barat harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian Jawa Barat antara pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan *outcome* yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah yang pada tahun 2023. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana

dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, diantaranya:
  - a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebanyak 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut:
    - 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3) Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Reformasi sistem perlindungan sosial; 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8) Gerakan membangun desa; 9) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 10) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
  - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
  - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan



kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
7. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.





8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
9. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
10. Pengalokasian dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.
11. Pengalokasian untuk pendanaan hibah bersifat kompetitif dan menstimulus munculnya karya-karya inovatif yang memberikan efek akseleratif pencapaian target-target pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin dirasakan masyarakat daerah.
12. Penyediaan penganggaran untuk pelaksanaan revitalisasi UPTD/ Balai/KP3DW/Kantor Cabang Dinas secara selektif, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
13. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah.
14. Penyediaan alokasi Gaji dan Tunjangan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya realisasi pendapatan daerah tahun 2021, pada Belanja daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 juga mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada triwulan kedua tahun 2021 terjadi peningkatan kasus terkena pandemi COVID-19 secara signifikan, hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali level 3 dan 4, hal tersebut berdampak pada target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan-pendapatan lain. Dengan penurunan target pendapatan daerah membuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus melakukan analisa dan penelaahan kembali terhadap belanja daerah yang telah ditargetkan agar lebih



efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap antisipatif, responsif serta fleksibel.

Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk mengubah budaya kerja. Antara lain melaksanakan kerja digital dalam menggelar pertemuan/rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor, serta belanja aparatur. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan pada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022, maka belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen, diantaranya adalah pada belanja operasi sebesar 3,61 persen dikarenakan salah satunya adalah peningkatan belanja Gaji dan Tunjangan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), peningkatan belanja modal sebesar 9,51 persen dan penurunan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 64,02 persen dengan asumsi bahwa pada tahun 2023 pandemi COVID-19 sudah berkurang sehingga penyediaan pendanaan pada BTT ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2022, serta adanya peningkatan pada belanja transfer sebesar 1,69 persen. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.7**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2023**

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Tahun 2022 <sup>1)</sup>	Proyeksi/Target pada Tahun 2023 <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>5.01.00</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>21.066.529.850.169</b>	<b>23.385.024.872.111</b>	<b>16.305.060.252.081</b>	<b>16.942.937.515.143</b>
5.01.01	Belanja pegawai	6.097.572.592.290	6.179.742.118.217	6.568.021.090.570	7.126.401.200.824
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	4.796.352.354.090	6.688.760.948.583	6.376.382.305.341	6.402.885.432.043
5.01.03	Belanja Bunga	18.123.947.774	-	-	-
5.01.04	Belanja Subsidi	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000
5.01.05	Belanja Hibah	9.948.395.206.015	9.774.239.405.311	3.149.052.106.170	3.192.319.848.276
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	206.085.750.000	742.282.400.000	196.604.750.000	206.331.034.000
<b>5.02.00</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.672.906.514.876</b>	<b>2.045.428.563.538</b>	<b>2.479.635.946.667</b>	<b>2.715.388.362.112</b>
5.02.01	Belanja Modal	1.672.906.514.876	2.045.428.563.538	2.479.635.946.667	2.715.388.362.112
<b>5.03.00</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.154.919.548.515</b>	<b>261.344.249.524</b>	<b>689.012.451.497</b>	<b>247.876.894.239</b>
5.03.01	Belanja tidak terduga	3.154.919.548.515	261.344.249.524	689.012.451.497	247.876.894.239
<b>5.04.00</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>12.233.175.835.689</b>	<b>11.779.112.751.891</b>	<b>12.051.991.292.407</b>	<b>12.255.416.808.806</b>
5.04.01	Transfer Bagi Hasil Pajak	7.212.501.291.449	7.608.373.465.011	8.272.319.882.763	8.750.602.533.393
5.04.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.020.674.544.240	4.170.739.286.880	3.779.671.409.644	3.504.814.275.413
5.04.03	Transer Bantuan Keuangan Ke Desa				
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>38.127.531.749.249</b>	<b>37.470.910.437.064</b>	<b>31.525.699.942.652</b>	<b>32.161.619.580.300</b>

Sumber: Bappeda, 2022

1) Perda Pertanggungjawaban APBD 2020,

2) Realisasi APBD 2021 (*audited BPK*)

3) Perda APBD 2022,

4) Tahun 2023 (hasil proyeksi masih sangat sementara).

Apabila melihat tabel di atas, terlihat bahwa Belanja Operasi pada proyeksi tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, hal ini dikarenakan bahwa pada realisasi tahun 2021 dalam Belanja Hibah terdapat alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukkan bagi SD dan SMP, tetapi mulai tahun 2022 alokasi BOS untuk SD dan SMP tidak lagi berada di Provinsi tetapi dillimpahkan ke kabupaten/kota, kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang mulai berlaku pada tahun 2022. Pengalokasian BOS itu sudah disesuaikan dengan kewenangannya, jadi provinsi hanya mengurus dan mengelola BOS SMA atau SMK saja. Perubahan tersebut dilakukan agar pencatatan BOS tersebut bisa lebih mudah karena sesuai kewenangan masing-masing. Selain dikarenakan BOS SD dan SMP, penurunan Belanja Operasi juga dikarenakan adanya penurunan target pada Belanja Bantuan Sosial yaitu pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2023 yang ditargetkan sebanyak 10 ribu unit sedangkan pada tahun 2021 Rutilahu yang dibangun adalah sebanyak 42 ribu unit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Provinsi Jawa Barat sudah mengembangkan *e-ASB* yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2019. *e-ASB* yang dikembangkan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah berjalan yaitu *e-planning* dan *e-budgeting*.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a) Informasi Pembangunan Daerah; b) Informasi Keuangan Daerah; dan c) Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Provinsi Jawa Barat.

### **3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan



surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berdasarkan hasil analisis perkiraan dan realisasi pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 serta dengan melihat target pada tahun 2022, maka penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sudah memperhitungkan adanya SiLPA dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kapasitas fiskal Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti dibutuhkan peningkatan pendapatan daerah untuk mendanai seluruh belanja daerah, sehingga penerimaan pembiayaan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Yang selain berasal dari SiLPA juga dari Penerimaan Pinjaman Daerah (PEN) yang diluncurkan pada tahun 2022, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan adalah pembayaran cicilan pinjaman, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan daerah untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.8**  
**Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 s.d 2023**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi 2020 <sup>1)</sup>	Realisasi 2021 <sup>2)</sup>	Target Tahun 2022 <sup>3)</sup>	Proyeksi/Target pada Tahun 2023 <sup>4)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1.01</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	654.500.000.000	300.000.000.000
<b>6.1.02</b>	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
<b>6.1.04</b>	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.532.607.660.148	1.881.560.755.969	87.874.014.864	-
<b>6.1.05</b>	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
<b>6.1</b>	Penerimaan Piutang Daerah				
<b>6.1.08</b>	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	50.131.410.442	258.422.180	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.872.039.978.913</b>	<b>3.154.053.591.932</b>	<b>742.374.014.864</b>	<b>300.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.2.01</b>	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	100.000.000.000	500.000.000.000
<b>6.2.02</b>	Penyertaan Modal Daerah	53.018.000.000	100.000.000.000	402.105.478.367	261.000.000.000
<b>6.2.03</b>	Pemberian Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	255.434.610.025	356.741.645.292
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.018.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>757.540.088.392</b>	<b>1.117.741.645.292</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>4.819.021.978.913</b>	<b>3.054.053.591.932</b>	<b>(15.166.073.528)</b>	<b>(817.741.645.292)</b>

Sumber: Bappeda, 2022

1) Perda Pertanggungjawaban APBD 2020,

2) Realisasi APBD 2021 (*Audited BPK*)

3) Perda APBD 2022,

4) Tahun 2023 (hasil proyeksi masih sangat sementara).





Selain hal-hal di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024, maka diperlukan pendanaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018, bahwa pendanaan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 mencapai Rp1,71 triliun, maka pendanaan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp2 triliun. Tingginya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada tersebut menjadi masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Dana cadangan menjadi salah satu alternatif solusi yang dipertimbangkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Untuk itu, dalam struktur pendanaan daerah tahun 2022 dan tahun 2023, pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan dana cadangan masing-masing pada tahun 2022 sebesar Rp100 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp1,00 triliun, yang akan dipergunakan pada tahun 2024 sebagai penerimaan pembiayaan melalui pencairan dana cadangan.

### **3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Jawa Barat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) APBD Kabupaten/Kota; 4) Dana Masyarakat/Umat;

5) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 6) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 7) Obligasi Daerah; dan 8) Hibah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pandemi COVID-19. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

#### **3.3.2 APBD Kabupaten/Kota**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya

diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

### **3.3.3 Dana Masyarakat/Umat**

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.3.4 Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))**

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, telah terdaftar sebanyak 258 mitra PKBL dan TJSL Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terbagi menjadi 188 perusahaan swasta, 50 BUMN dan 20 BUMD. Realisasi program pembangunan melalui CSR di Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar



Rp92.082.952.530,- atau meningkatkan sebesar 66,3 persen dibandingkan pelaporan pada Tahun 2020 (Rp55,36 Milyar). Tiga sektor terbesar yang menyumbang capaian realisasi CSR ini berasal dari sektor Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Capaian pelaporan realisasi CSR Jawa Barat di 2021 ini dilaporkan oleh 98 perusahaan mitra CSR dari 258 perusahaan yang telah bergabung.

Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Jawa Barat tahun 2023 ditempuh melalui:

1. perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Jawa Barat.
2. Penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2023.

### **3.3.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)*.**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi



lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Secara definisi dapat diartikan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

Sampai dengan tahun 2021, dari seluruh proyek strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU Status proyek yang diusulkan dengan KPBU, sebanyak 1 (satu) proyek telah mencapai tahap konstruksi, 1 (satu) proyek telah dalam tahap transaksi (*already tendered*), dan sisanya masih dalam tahap penyiapan dan perencanaan. TPPAS Lulut Nambo, yang telah memasuki fase konstruksi, saat ini dalam tahap pemenuhan keuangan (*Financial Close*), yang mana diharapkan akan tercapai 100 persen pada bulan Januari 2022 dan direncanakan dapat beroperasi 40 persen pada Februari 2022 serta operasional penuh pada Februari 2023. Selanjutnya, proyek TPPAS Regional Legok Nangka, telah memasuki fase Transaksi (*already tendered*), dan perkembangan terakhirnya adalah telah ditandatanganinya Perubahan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 6 (enam) Kabupaten/Kota telah pada tanggal 27 Oktober 2021. Saat ini sedang dalam proses menunggu persetujuan VGF dari Kementerian keuangan untuk dapat melaksanakan proses *Request for Proposal* (RfP). Selanjutnya, terdapat 4 (empat) proyek yang saat ini masih dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, SPAM Sinumbra (*unsolicited*), LRT Bandung Raya dan Penerangan Jalan Umum (*unsolicited*). Selain itu juga terdapat beberapa proyek yang masih berada dalam tahap perencanaan, yaitu proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya; Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Gedung-Gedung Sekolah dan Pemerintahan; Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Padjadjaran (UNPAD); dan Proyek Konektivitas Digital (*Digital Connectivity*) di Jawa Barat. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan proses pembangunan proyek strategis melalui skema KPBU dapat dilanjutkan.

### 3.3.6 Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (*departemen dan non-departemen*), lembaga pemerintahan *non-departemen* (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan yang dapat diusulkan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman; Untuk usulan kegiatan ini harus melampirkan Surat Persetujuan DPRD calon penerima penerusan pinjaman, dan memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemda, yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
  - 2) Kegiatan tersebut merupakan urusan Pemda;
  - 3) Kegiatan yang diusulkan adalah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan



- sejalan dengan program RPJM;
- 4) Hasil dari kegiatan PHLN yang diusulkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan
  - 5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
- b. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerusan hibah. Untuk usulan kegiatan ini harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
- 1) Kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
  - 2) Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemberian layanan dasar umum;
  - 3) Kegiatan tersebut untuk pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah.
  - 4) Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan Pinjaman Campuran.

Selain sumber dana tersebut di atas, alternatif sumber pembiayaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat lainnya adalah melalui penerbitan Sukuk Daerah, penyiapan pranata regulasi dan kelembagaan antara lain melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat. Seta pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).





# **BAB IV**

## **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah, dengan 7 (tujuh) tujuan, dan 21 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; (3) Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals*

(SDGs); dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta (8) Pembangunan Rendah Karbon.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja

pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

#### 4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional tahun keempat, diantaranya sebagai berikut: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan *Major Project*.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah terintegrasi dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan.  
Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kuat dan berkelanjutan dan untuk menyejahterakan secara adil dan merata (*inklusif*). Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta



- kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuat dan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
  - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdayasaing.
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif untuk menjadikan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.  
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdayasaing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
  - a. Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
  - b. Memajukan kebudayaan;
  - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
  - e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.  
Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional dengan peningkatan investasi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
  - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.  
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, pada wilayah-wilayah yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

- akan diarahkan melalui kebijakan:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
  - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta memberikan hak-hak asasi manusia dengan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
  - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
  - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

*Platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien adalah Pembangunan Rendah Karbon, dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon) (Bappenas, 2018). Pembangunan Rendah Karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial melalui pengurangan kemiskinan.

Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui **kebijakan pembangunan rendah karbon** sebagai berikut:





1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
4. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
5. Tujuan 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
6. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
7. Tujuan 11: Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
8. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
9. Tujuan 13: Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
10. Tujuan 14: Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan; dan
11. Tujuan 15: Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Komitmen Pemerintah Pusat dalam hal ini juga tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dimana pembangunan rendah karbon menjadi Sasaran Nasional ke-23. Terkait hal ini, Provinsi Jawa Barat melalui dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 menuangkan kebijakan ini ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu sasaran ke-13: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini dicapai melalui strategi “mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon” yang diturunkan ke dalam 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

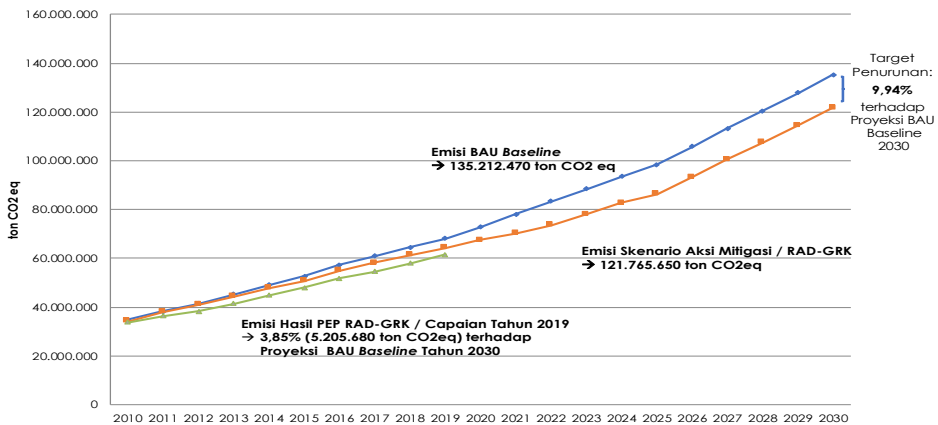
1. Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik; dan
2. Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mentransformasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2019. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari 7 (tujuh) provinsi yang menjadi percontohan perencanaan pembangunan rendah karbon nasional. Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat saat ini masih disusun. Prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon pada dasarnya telah tertuang pada program dan kegiatan di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk

kebijakan, rencana dan program strategis, penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan proyek strategis, serta pengawasan ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Profil emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan melalui proyeksi besar emisi *baseline* tahun 2030 pada kondisi tanpa aksi mitigasi (*Business as Usual*), yaitu sebesar 135.212.470 ton CO<sub>2</sub> eq, dengan sumber emisi mencakup sektor energi (40,65 persen), transportasi (30,99 persen), kehutanan (11,75 persen), sampah dan limbah domestik (11 persen), dan pertanian (5,60 persen). Adapun target penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat sebesar 9,94 persen pada tahun 2030 dari proyeksi jumlah emisi pada kondisi *Business as Usual* (BAU) atau tanpa melakukan upaya apapun, sehingga emisi dapat diminimalkan hingga sebesar 121.765.650 ton CO<sub>2</sub> eq sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat**



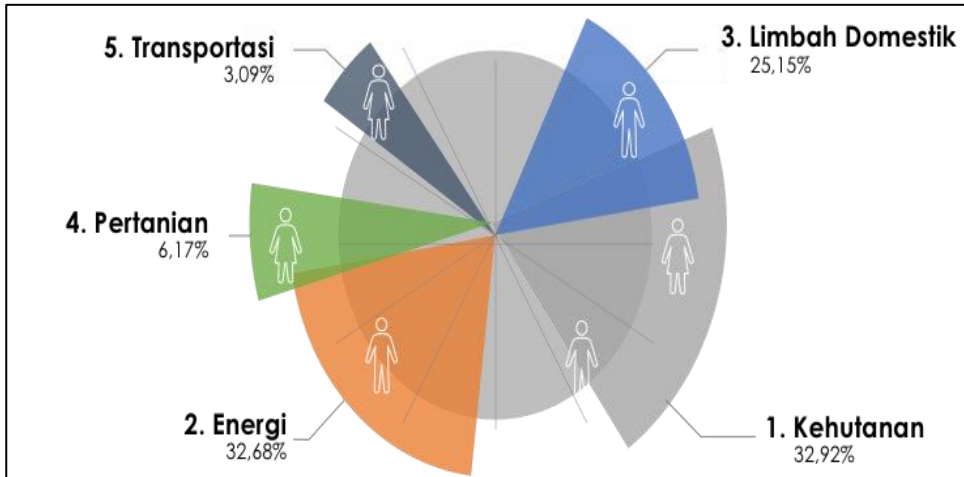
Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor, yaitu:

1. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian;
2. Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi; dan
3. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik.

Kebijakan pembangunan rendah karbon pada ketiga bidang tersebut ditetapkan dengan target kontribusi penurunan emisi sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.3**  
**Kontribusi Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**  
**Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Sektor yang ditargetkan menurunkan emisi paling besar adalah sektor kehutanan sebesar 32,92 persen, sedangkan sektor lainnya meliputi sektor energi (32,68 persen), pengelolaan limbah (25,15 persen), pertanian (6,17 persen), dan transportasi (3,09 persen). Adapun penurunan emisi pada sektor industri menjadi ranah implementasi dari RAN-GRK karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui:

1. Sektor Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
2. Sektor Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya *System Rice Intensification* (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Sektor Energi, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, diantaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi serta substitusi bahan bakar fosil ke listrik antara lain dengan pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB);

4. Sektor Transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pembangunan *Integrated Transportation System* (ITS) atau *Area Traffic Control System* (ATCS), pelaksanaan *car free day*, peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir, dan pelatihan *eco-smart driving*; dan
5. Sektor Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo, Legok Nangka dan Cirebon Raya (Cira), pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), serta pembangunan IPAL domestik dan Sanimas.

#### **4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan tahun 2023 berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

***“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin  
dengan Inovasi dan Kolaborasi”***

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

***Jawa Barat Juara Lahir Batin:*** Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

***Inovasi:*** Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi:** Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jawa Barat Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Provinsi Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain Masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tenteram, dan bahagia.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat, agar rakyat Provinsi Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan, perempuan Provinsi Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya serta dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui

Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten serta antar provinsi. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Ekonomi kerakyatan yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Provinsi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antarpelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antarkawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, *good governance* atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan, serta akuntabel.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merepresentasikan *good governance* melalui penerapan Provinsi Cerdas (*Smart Province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.



Kelima misi dalam Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.



6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdayasaing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai sebagai prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jawa Barat Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Kerakyatan dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Provinsi Jawa Barat yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan

- ibukota negara menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang koridor Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
  4. Keragaman budaya Provinsi Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; dan
  5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Indikasi pencapaian Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi (*society development*).
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan.
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif.
6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Jawa Barat



ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat pasca pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Realisasi		TARGET		KET			
			2020	2021	2022	2023				
Visi :Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi										
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban										
1.1	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		a.	<b>Indeks Demokrasi (poin)</b>	<b>71,32</b>	<b>79,72</b>	<b>71,79</b>	<b>72,79</b>		
		1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,50	72,70	69,10	69,60	
				b.	Indeks Demokrasi (Poin)	71,32	79,72	71,79	72,79	
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif										
2.1	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat		a.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)</b>	<b>72,09</b>	<b>72,45</b>	<b>72,57</b>	<b>73,05</b>		
		2.1.1	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	8,43	7,97	7,67	7,54	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Realisasi		TARGET		KET
			2020	2021	2022	2023	
		b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	10,46	9,82	10,16	9,69	
	2.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	a. Usia Harapan Hidup (tahun)	73,04	73,23	73,09	73,11	
	2.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	70,24	70,24*	69,80	70,30	
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	89,20	89,36	89,42	90,02	
	2.1.4 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	a. Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,55	8,61	8,60	8,64	
		b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,50	12,61	12,54	12,56	
	2.1.5 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat	a. Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	50,00	49,00**	52,00	54,00	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Realisasi		TARGET		KET	
			2020	2021	2022	2023		
	berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional							
2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	a.	<b>Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)</b>	<b>37,69</b>	<b>24,78</b>	<b>24,89</b>	<b>24,21</b>	
	2.2.1 Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	37,69	24,78	24,89	24,21	
	2.2.2 Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	88,40	87,50	74,00	75,00	
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah								
3.1	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	a.	<b>Indeks Williamson (poin)</b>	<b>0,692</b>	<b>0,667</b>	<b>0,655</b>	<b>0,650</b>	
		b.	<b>Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)</b>	<b>39,06</b>	<b>43,51</b>	<b>44,00</b>	<b>47,00</b>	DBMPR / Dishub Bid Infracwil Bappeda





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Realisasi		TARGET		KET		
			2020	2021	2022	2023			
	3.1.1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.146,6	1.280,83	1.100	1.150	ESDM
	3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	39,06	43,51	44,00	47,00	DBMPR / Dishub Bid Infraswil Bappeda
	3.1.3	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,69	0,72	0,71	0,72	
	3.1.4	Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	3	2	1	2	
3.2	Meningkatnya daya dukung		a.	<b>Indeks Kualitas</b>	<b>61,59</b>	<b>62,69</b>	<b>61,19</b>	<b>61,60</b>	DLH



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Realisasi		TARGET		KET		
			2020	2021	2022	2023			
dan daya tampung lingkungan									
	3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	61,59	62,69	61,19	61,60	DLH
			b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	3,87	4,23	4,75	5,22	DLH
			c.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen)	52,28	53,14	52,80	53,90	Disperkim
	3.2.2	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (Poin)	1,1927	1.1913	1,1912	1,1902	DSDA
	3.2.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	145,82	134,94	147,00	144,00	BPBD



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Realisasi		TARGET		KET			
			2020	2021	2022	2023				
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.										
4.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	a.	<b>Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp. Triliun)</b>	<b>2.084,62</b>	<b>2.209,82</b>	<b>2.376,70</b>	<b>2.559,66</b>			
		b.	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)</b>	<b>-2,52</b>	<b>3,74</b>	<b>3,92</b>	<b>4,35</b>			
		4.1.1	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	84,80	84,10	84,80	85,60	
				b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	101,41	97,84	103,39	104,52	
		4.1.2	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,85	2,84	2,99	3,08	
		4.1.3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	-4,22	4,22	3,40	3,72	
				b.	Laju pertumbuhan	-7,94	3,19	4,01	4,45	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Realisasi		TARGET		KET		
			2020	2021	2022	2023			
	4.1.4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Sektor Perdagangan (%)	493,96	547,93	515,31	531,87	
			b.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	19,41	21,67	20,50	21,10	
				Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)					
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota									
5.1	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>		a.	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)</b>	<b>BB (75,62)</b>	<b>BB (78,68)</b>	<b>A (80,01)</b>	<b>A (82,01)</b>	
	5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB (75,62)	BB (78,68)	A (80,01)	A (82,01)	
	5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam	a.	Tingkat efektivitas kerja sama Daerah (%)	73,43	80,24	58,00	62,00	



Seluruh sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sesuai tabel di atas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 5 (lima) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Satu sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Sandingan Keterhubungan Sasaran antara RPJMN dengan RPJMD**

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	
SN1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat
SN2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
SN3	Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi	S16	Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang mandiri



Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	
	pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera	S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan
SN4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih, dan akuntabel
SN5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
SN6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
SN7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional
SN8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri
SN9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
SN10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
SN11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
SN12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
SN13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
SN14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
		S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
SN15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
SN16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat





Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	
SN17	Meningkatnya konektivitas wilayah <sup>7</sup> didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
SN18	Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
SN19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
SN20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel
SN21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
SN22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
SN23	Pembangunan rendah karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
SN24	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	S8	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan <u>kenyamanan lingkungan sosial</u>
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan <u>integratif</u>

Sumber: hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

### 4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung

dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", dengan 8 (delapan) Arah Kebijakan, yaitu: (1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (2) Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan; (3) Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job*; (4) Mendorong Pemulihan Dunia Usaha; (5) Revitalisasi Industri dan Penguatan Reset Terapan; (6) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim); (7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air bersih dan Sanitasi; dan (8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Masing-masing prioritas nasional memiliki sasaran seperti tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional**  
**Tahun 2023**

PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	
PN-1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	SN1	Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan
		SN2	Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (c) Pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB Pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor rill barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.
PN-2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan	SN3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI
		SN4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan penduduk miskin KBI.
PN-3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	SN5	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> /TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
		SN6	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
		SN 7	Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi <i>stunting</i> pada balita, (d) menurunkan insidensi <i>tuberculosis</i> , (e) meningkatkan jumlah



PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	
			kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah
		SN8	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
		SN9	Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif
		SN10	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah pengangguran tinggi (PT) yang masuk dalam <i>world class university</i> , (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat <i>global innovation index</i>
PN-4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	SN11	Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
		SN12	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
		SN13	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat
		SN14	Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama
		SN15	Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Karakter Bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median usia kawin pertama perempuan
		SN16	Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi
PN-5	Memperkuat Infrastruktur untuk	SN17	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah



PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	
	Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
		SN18	Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100Km), (b) peningkatan persentase rute pelayanan yang terhubung ( <i>loop</i> ), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar <i>Track Quality Index (TQI)</i> kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian <i>On Time Performance (OTP)</i> transportasi udara
		SN19	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan
		SN20	Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (Juta ton)
		SN21	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)
PN-6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	SN22	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		SN23	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
		SN24	Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i> dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK
PN-7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	SN25	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah
		SN26	Optimalnya kebijakan luar negeri dengan



PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	
			meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional
		SN27	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum
		SN28	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional
		SN29	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2022 yaitu masih belum berakhirnya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2023 prioritas pembangunan nasional tahun 2023 ditekankan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan; PN-3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan PN- 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

#### 4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

a. Permasalahan Kesehatan

1. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas diberbagai daerah, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan *ambulance* di setiap desa/kelurahan, penyediaan alat-alat kesehatan,

- penyediaan obat-obatan, pembangunan MCK, serta penyediaan alat-alat kesehatan yang masih banyak dibutuhkan masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS, karena sering terjadi kendala dan cenderung mempersulit bagi pasien, selain itu perlu meningkatkan jumlah subsidi bagi BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK).
  3. Sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi COVID-19, mohon untuk memberikan sehingga tidak ada lagi isu-isu yang meresahkan di masyarakat.
  4. Penguatan sarana dan prasarana posyandu di berbagai daerah serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif.
  5. Agar vaksin yang aman dan halal dapat diprioritaskan bagi warga Jawa Barat yang muslim. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, serta memberikan sosialisasi dan penjelasan sebaik-baiknya ke warga masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
  6. Peningkatan Akses Kesehatan Balita, Ibu Hamil dan Remaja Putri.
  7. Penanggulangan HIV AIDS.
- b. Permasalahan Pendidikan
1. Penguatan sistem pembelajaran jarak jauh, diantaranya berkaitan dengan fasilitasi peralatan pembelajaran, penguatan jaringan internet di *blank spot* area, distribusi kuota data internet gratis secara merata dan tepat sasaran.
  2. Pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri, pembelian lahan sekolah untuk SMK.
  3. Bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
  4. Pengangkatan PNS dan P3K bagi guru honorer, insentif Operator Sekolah, serta peningkatan insentif untuk guru PAUD



dan Madrasah yang masih jauh dari kata layak untuk para pendidik, maka mohon sekiranya diberikan apresiasi insentif yang layak bagi mereka.

5. Pengadaan pelatihan-pelatihan *life skill* dan *soft skill* yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini untuk mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat.
  6. Perhatian terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah di bawah Kemendikbud atau Kemenag sudah berpuluh tahun tidak mendapatkan apresiasi yang layak.
  7. Perlunya anggaran untuk peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan.
  8. Akses pendidikan kesehatan bagi remaja putri
  9. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin sektor pendidikan
  10. Bantuan sarana prasarana dan operasional Perguruan Tinggi
- c. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan
1. Pengambilan kebijakan strategis dan taktis dalam menghadapi fenomena banyaknya tenaga kerja di Jawa Barat yang dikurangi/dirumahkan/di PHK yang berdampak dari pasca pandemi COVID-19 yang akan berdampak terhadap angka kemiskinan di Jawa Barat.
  2. Penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan digitalisasi pada pelaku UMKM, pelaku usaha di pasar tradisional di Jawa Barat, dengan pemilihan usaha yang sedang trend di masyarakat, berbelanja secara *online* melalui aplikasi dan pembayaran secara non tunai.
  3. Mendorong BUMD Provinsi Jawa Barat untuk berkontribusi aktif dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
  4. Peningkatan penguatan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu, peningkatan kemampuan internet marketing, peningkatan bantuan modal usaha bagi para pemuda dan masyarakat secara umum.
  5. Pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun anggota kelompok masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan, fasilitasi terciptanya ekosistem

- ekonomi kreatif bagi masyarakat, pengadaan bantuan sarana usaha untuk masyarakat, pelatihan dan pemodalan UMKM.
6. Penguatan dan sinergitas Satgas anti rentenir di tingkat kabupaten kota dan provinsi untuk memerangi praktek bank emok (Rentenir).
  7. Pengembangan ekonomi desa melalui pengembangan pariwisata berbasis desa, Program Desa Pangan Mandiri, penguatan modal BUMDES, penguatan bantuan untuk sektor seni dan budaya, mendorong perekonomian UMKM mulai dari asset pemerintah yang dikerjasamakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pelatihan, bantuan modal usaha dan promosi.
  8. Penyelenggaraan sosialisasi program pemerintah menyangkut usaha maupun wirausaha pada masyarakat agar referensi wirausaha semakin terbuka serta pembentukan gugus tugas atau Lembaga non struktural terkait kewirausahaan.
  9. Peningkatan standar pelatihan untuk koperasi dan UMKM melalui pelatihan digital marketing.
  10. Pembinaan wirausaha kecil/ *home industry* dengan memberikan bantuan modal usaha kecil bagi masyarakat khususnya pemuda dan ibu rumah tangga melalui kemudahan akses kredit dari bank Jabar Banten dalam merangka penciptaan lapangan kerja dengan pemberian program pelatihan kewirausahaan.
  11. Penguatan dukungan di sektor pertanian guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah melalui peningkatan bantuan sarana pertanian dan infrastruktur penunjang pertanian serta penyediaan penyuluh lapang yang kapabel dan tidak habis kontrak di saat petani membutuhkan.
  12. Mendorong program UMKM kuliner karena Jawa Barat memiliki potensi besar di bidang kuliner.
  13. Penyelenggaraan program agrobisnis yang berintegrasi dari pembukaan lahan hingga pemasaran hasil pertanian bagi para petani.
  14. Pemberdayaan petani benih dalam pengembangan sumber benih unggul di Jawa Barat.



15. Memasukkan muatan sertifikasi benih unggul dan unggul lokal ke dalam raperda yang akan diusulkan.
16. Penyelenggaraan informasi lapangan pekerjaan untuk lulusan SMA/SMK.
17. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan kerja pemuda yang putus sekolah maupun belum memiliki pekerjaan.
18. Pembangunan tempat berjualan/pameran untuk hasil karya anak muda dan mendorong pengembangan pemasaran produk dengan cara digital.
19. Penyelenggaraan pelatihan di kalangan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
20. Menangani kelangkaan pupuk bersubsidi serta kemudahan mengaksesnya karena proses pendistribusian pupuk bersubsidi ini sering kali menyulitkan. Menangani permasalahan di lapangan seperti pembelian pupuk bersubsidi yang harus sepaket dengan obat-obatan pembasmi hama tanaman atau pupuk jenis lain yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh petani.
21. Penggalan sumber daya alam di Jawa Barat sebagai potensi wisata baru yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik termasuk di desa-desa.
22. Penguatan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat seperti UMKM, koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin serta BUMDES dalam merangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19; melalui penyelenggaraan pelatihan kepada pelaku UMKM secara gratis terkait dengan meraih omset melalui pasar dan pemasaran *online*, kemudahan perijinan usaha, akses permodalan, stimulus bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha.
23. Pengendalian harga sembako agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
24. Penguatan ketahanan pangan di daerah yang memerlukan pembuatan lumbung pangan desa.
25. Pengadaan fasilitasi akses, ketersediaan maupun fasilitas lain



- terkait lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
26. Penguatan dukungan di bidang pertanian seperti bantuan permodalan termasuk kemudahan akses pinjaman modal bagi pengusaha kecil dengan prosedur yang sederhana dan tidak memberatkan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, jaringan irigasi pertanian, harga pupuk yang terjangkau serta penyediaan pupuk gratis bagi para petani dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
  27. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.
  28. Kemudahan izin usaha dan akses permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk menangkal menjamurnya bank Emok yang meresahkan masyarakat.
  29. Pengadaan bantuan untuk *home industry* berupa pelatihan, modal dan pemasaran.
  30. Penetapan regulasi yang membatasi peminjaman uang dari bank keliling/yang berkedokan koperasi (Bank Emok) dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam hal literasi perbankan dan pengelolaan keuangan keluarga.
  31. Pengadaan pelatihan dan pemberian bantuan dalam rangka memenuhi konsumsi daging dan susu.
  32. Pengadaan bantuan dan ruang untuk sektor perdagangan pasca pandemi COVID- 19.
  33. Penguatan bantuan modal usaha desa dan koperasi, peningkatan UMKM, pelatihan petani rumahan, pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan pertanian dan peternakan, pelatihan bank sampah, peningkatan sarana dan prasarana untuk sengar seni dalam rangka peningkatan wisata daerah, pembentukan kelompok masyarakat di desa desa, bantuan sosial bagi pelaku usaha yang terdampak PPKM, pengadaan lapangan pekerjaan yang bersifat *home industry*, pemberdayaan bagi kelompok tani
  34. Terkait dengan banyaknya masukan terkait dengan perlunya lapangan pekerjaan, mohon untuk dapat mempermudah



akses, ketersediaan maupun fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

- d. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya
1. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan, jalan provinsi yang rusak dan jalan desa.
  2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian.
  3. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung serbaguna di setiap desa.
  4. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)/ drainase utama.
  5. Pembangunan polder penanganan banjir.
  6. Pembangunan rumah layak huni.
  7. Penanganan kerusakan lingkungan yang bertambah dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
  8. Penambahan infrastruktur dalam penanganan pasca pandemi COVID-19.
  9. Pembangunan sumur resapan air penanganan banjir.
  10. Meningkatkan infrastruktur akses internet lebih luas.
  11. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman.
  12. Normalisasi dan pemeliharaan sungai.
  13. Penataan Kawasan Kumuh.
  14. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat.
  15. Pengadaan sarana penerangan jalan umum.
  16. Perbaikan rumah tidak layak huni.
  17. Program pengorganisasian PKL dilokasi yang strategis.
  18. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.
  19. Rehabilitasi/ penataan situs cagar budaya.
  20. Pengadaan armada pengangkut sampah.
  21. Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB); perlunya pemekaran daerah di kabupaten/kota. Usulan

pemekaran DOB ini harus terus dilakukan secara serius dan berkesinambungan bersama usulan pemekaan DOB lainnya yang telah ada.

#### **4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2022, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 5 (lima) isu strategis, yaitu 1) Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial; 3) Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; 4) Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan; dan 5) Reformasi Birokrasi. Kelima isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan</li> </ol>	<p>Lokal: Daya beli dan Pengangguran Pemerataan</p>	<p>Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Indeks Pembangunan Manusia belum mencapai target.</li> <li>3. Indeks Pemberdayaan Gender belum mencapai target.</li> <li>4. Indeks Pembangunan Gender belum mencapai target.</li> <li>5. Rata-rata Lama Sekolah masih rendah.</li> <li>6. Indeks Pembangunan Pemuda masih rendah.</li> <li>7. Belum meratanya akses dan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi.</li> <li>8. Masih rendahnya kualitas mutu pendidikan vokasi:</li> <li>9. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.</li> <li>10. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular.</li> <li>11. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan.</li> <li>12. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.</li> <li>13. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.</li> <li>14. Masih rendahnya partisipasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia</li> </ul>





Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			<p>masyarakat dalam kegiatan olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"><li>15. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.</li><li>16. Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar nasional dan internasional.</li><li>17. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal Jawa Barat.</li><li>18. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri.</li><li>19. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya Jawa Barat.</li></ol>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan</li><li>2. Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan <i>Decent job</i></li></ol>	Nasional: Daya Beli  Lokal: Daya Beli Pengangguran Pemerataan	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase penduduk miskin belum mencapai target.</li><li>2. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi.</li><li>3. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal</li><li>4. Belum Optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li><li>5. Lapangan kerja terbatas.</li><li>6. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja.</li><li>7. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/<i>vulnerable employment</i>" cukup tinggi lebih dari 50 persen.</li><li>8. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial</li></ul>



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			<ol style="list-style-type: none"><li>Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di Jawa Barat.</li><li>Masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li></ol>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Mendorong pemulihan dunia usaha</li><li>Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan</li><li>Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau)</li><li>Percepatan pembangunan infrastruktur dasar</li></ol>	<p>Global: Pasokan pangan dan energi Investasi</p> <p>Nasional: Defisit Fiskal dan Investasi Rantai nilai Daya Beli</p> <p>Lokal: Bencana Pemulihan Ekonomi</p>	<p>Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>Konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Jawa Barat belum optimal.</li><li>Persentase Rumah tangga hunian layak masih rendah.</li><li>Konsumsi listrik per kapita belum sesuai target.</li><li>Akses dan standardisasi terhadap layanan listrik belum merata</li><li>Jaringan jalan belum merata, masih terdapat ketimpangan antara kawasan jalur utara, tengah dan selatan sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas</li><li>Umur teknis layanan jalan sudah terlampaui</li><li>Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan provinsi belum optimal</li><li>Pergerakan barang maupun penumpang antar wilayah belum efisien</li><li>Pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum optimal</li><li>Penyediaan sumber daya air untuk aktivitas domestik dan industri belum optimal sehingga penggunaan air tanah meningkat</li><li>Umur jaringan irigasi sudah terlalu tua dengan tingkat kerusakan tinggi sehingga rentan terhadap kejadian</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.</li></ul>



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			<p>bencana alam</p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Cakupan pelayanan dan akses air minum layak dan aman serta Jaringan Perpipaan belum optimal</li><li>13. Cakupan pelayanan dan akses air limbah domestik (layak dan aman) belum optimal</li><li>14. Pelayanan pengelolaan persampahan (pengurangan dan penanganan) belum optimal</li><li>15. Masih besarnya luasan permukiman kumuh</li><li>16. Penyediaan perumahan masih terkendala pelayanan PSU yang masih terbatas dan tidak memenuhi standar.</li><li>17. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terjadi akibat pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan belum optimal</li><li>18. Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan belum diantisipasi secara optimal</li><li>19. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas domestik, industri, pertanian, dan pertambangan belum optimal</li><li>20. Penerapan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim belum optimal</li><li>21. Degradasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan luas lahan kritis meningkat</li><li>22. Upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana belum optimal</li></ol>	



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			23. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong pemulihan dunia usaha</li><li>2. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan</li><li>3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau)</li></ol>	Nasional: Investasi  Lokal: Pemulihan Ekonomi	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laju Pertumbuhan Ekonomi masih rendah.</li><li>2. Pendapatan per kapita belum sesuai target.</li><li>3. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat belum sesuai target.</li><li>4. Nilai Tukar Petani belum sesuai target.</li><li>5. Kontribusi lapangan usaha Pariwisata terhadap PDRB masih rendah.</li><li>6. Laju pertumbuhan sektor industri belum sesuai target.</li><li>7. Laju pertumbuhan sektor perdagangan belum sesuai target.</li><li>8. Proporsi kredit UMKM yang mendapat kredit masih rendah.</li><li>9. Tingkat upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca belum sesuai target.</li><li>10. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi,</li><li>11. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan.</li><li>12. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM</li><li>13. Belum optimalnya kapasitas <i>digital literacy</i> bagi para pelaku KUMKM dalam memasarkan produknya</li><li>14. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.</li><li>15. Belum meratanya realisasi investasi di kabupaten/kota</li></ol>	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			<ol style="list-style-type: none"><li>16. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN</li><li>17. Belum optimalnya akses (konektivitas), amenitas dan atraksi pada destinasi wisata.</li><li>18. Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian</li><li>19. Menurunnya luas lahan pertanian yang disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian</li><li>20. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.</li><li>21. Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran</li><li>22. Pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal</li><li>23. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi</li><li>24. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan</li><li>25. Pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu</li><li>26. Degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai</li><li>27. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok</li><li>28. Belum optimalnya rantai pasok pemasaran</li><li>29. Aktvitas perekonomian belum secara optimal menerapkan prinsip rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim</li><li>30. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan</li></ol>	



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			kondisi ekonomi masyarakat.	
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan	Global: Investasi	Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Demokrasi belum mencapai target.</li><li>2. Indeks Kerukunan Umat Beragama belum mencapai target.</li><li>3. Indeks Reformasi Birokrasi belum sesuai target.</li><li>4. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa.</li><li>5. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota</li><li>6. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa</li><li>7. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa</li><li>8. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan</li><li>9. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan <i>Crowdfunding</i></li><li>10. Penerapan <i>e-Government</i> belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/</li></ol>	Reformasi birokrasi



Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			<p>aturan hukum daerah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Belum adanya standar keamanan informasi</li><li>12. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik</li><li>13. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral</li><li>14. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>)</li><li>15. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Barat,</li><li>16. Akses penggunaan arsip belum efektif.</li><li>17. Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif.</li><li>18. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan</li><li>19. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan.</li><li>20. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.</li><li>21. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketenteraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat.</li><li>22. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan</li></ol>	





Arah Kebijakan RKP 2023	Isu	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
			daerah. 23. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 24. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Jawa Barat. 25. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan LGBT. 26. Kecenderungan peningkatan konflik sosial. 27. mengurangi potensi konflik antar umat beragama. 28. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 29. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2022

Catatan:

Sumber perumusan isu strategis:

1. Permasalahan pembangunan dalam RPJMD;
2. Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD;
3. Arah kebijakan RPJMD; dan
4. Arah kebijakan RKP.

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada Tabel 4.4, maka 5 (lima) isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi.

Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis, sebagai berikut:

### **1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai 100 persen. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antardaerah, pemerataan jumlah sekolah masih terdapat 19 (sembilan belas) kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat tahun 2021 sebesar 8,61 tahun, target pada tahun 2023 sebesar 8,64 tahun, sehingga Jawa Barat masih memiliki gap sebesar 0,03.

Selain hal tersebut di atas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih belum terciptanya *link and match* antara kurikulum dan

sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Faktor lain yang mempengaruhi disparitas kualitas SDM di Jawa Baart, yaitu kejadian pandemi COVID-19 yang memiliki dampak sangat luas di berbagai sektor mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi kerentanan sosial akibat pandemi ini menyebabkan ketahanan keluarga dan masyarakat mengalami penurunan sehingga produktivitas menurun, mata pencaharian terganggu, serta munculnya kepanikan sosial di tengah masyarakat.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Rasio Kematian Ibu pada tahun 2020 mencapai 85,77 per 100.000 KH dan pada tahun 2021 sebesar 149,21 per 100.000 KH sedangkan untuk Rasio Kematian Bayi pada tahun 2020 mencapai 3,18 persen dan pada tahun 2021 sebesar 3,39 persen. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, serta perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.

Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19.

Terbatasnya tenaga kesehatan ditunjukkan dengan indikator Puskesmas Lengkap 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 baru mencapai 45,81 persen. Dalam Undang-



undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga Kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Kebutuhan dokter umum di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 yang ditempatkan di Puskesmas secara umum telah terpenuhi, dengan jumlah Puskesmas 1.093 rasio dokter umum yang bekerja di Puskesmas sebesar 2,54 yang artinya jika penyebaran dokter umum merata maka setiap Puskesmas mempunyai 2 (dua) dokter umum namun masih ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang belum memenuhi standar yaitu Kabupaten Kuningan dengan rasio 1.92, Kabupaten Purwakarta dengan rasio 1.60, Kota Sukabumi dengan rasio 1.93 dan Kota Tasikmalaya dengan rasio 0.98. hal tersebut menunjukkan belum meratanya penyebaran tenaga Kesehatan di Jawa Barat.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat ditunjukkan dengan Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tahun 2021 baru mencapai 59,2 persen. Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan maupun kematian. Jumlah Rumah Tangga di Jawa Barat sebanyak 12.812.138 rumah tangga, dan dibina sikap perilaku ber-PHBS sebanyak 8.916.951 keluarga (69,60 persen), dari pembinaan ini ditemukan 5.399.993 keluarga berperilaku PHBS (60,6 persen). Cakupan rumah tangga ber-PHBS dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan, pada tahun 2020 mencapai 60,7 persen dan tahun 2021 menjadi 59,2 persen. Berdasarkan data yang tersedia masih terdapat beberapa Kabupaten/kota di Jawa Barat yang cakupan PHBS masih rendah diantaranya Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Sukabumi. Hasil IPKM 2018, proporsi perilaku merokok di Jawa Barat usia  $\geq 10$  Tahun sebanyak 32,0 persen, proporsi perilaku cuci tangan dengan benar di Jawa Barat sebanyak 56,8 persen, proporsi perilaku BAB di jamban sebanyak 90,9 persen dan proporsi aktivitas fisik cukup sebanyak 62,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat masih merupakan tantangan berat.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami

*stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak *stunting* juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, *stunting* dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. *Stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan produktivitas kerja pasar yang mengakibatkan hilangnya 11 persen GDP (*Gross Domestic Product*), mengurangi pendapatan bekerja dewasa hingga 20 persen, dan melebarnya kesenjangan sehingga mengurangi 10 persen total pendapatan seumur hidup. Maka kemiskinan antargenerasi akan terjadi terus menerus jika *stunting* tidak segera ditangani (100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)).

Sesuai amanat RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa pada tahun 2024 Indonesia memiliki target prevalensi *Stunting* sebesar 14 persen. Penurunan *stunting* di Jawa Barat di dukung oleh Program Jabar *Zero New Stunting 2023*. Capaian Prevalensi *Stunting* Jawa Barat Tahun 2021 masih mencapai 24,5 persen (SSGI,2021) sehingga untuk mengejar target prevalensi *stunting* tahun 2023 sebesar 19,2 persen dibutuhkan upaya yang cukup berat dan melibatkan lintas sektor.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Provinsi Jawa Barat sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2021 sebesar 70,24 poin sementara target tahun 2023 sebesar 70,30 poin, sehingga masih terdapat gap sebesar 0,06 poin.

## **2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial**

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan



Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah menekankan target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem atau kelompok masyarakat dengan kesejahteraan terbawah pada akhir tahun 2024 sebesar 0 persen. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi pendapatan penduduk kurang dari 1,90 dollar AS pada PPP (*Purchasing Power Parity*) 2011. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin terutama penduduk yang berada di dalam kemiskinan ekstrem. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, hal ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat di desa termasuk penurunan volume perdagangan hasil-hasil pertanian akibat penurunan permintaan pasar dampak pandemi COVID-19.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan. Faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menambah jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Mengacu kepada isu strategis nasional, daya saing tenaga kerja muda.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan, dan *human trafficking*, belum



optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intensif demi terciptanya kerukunan umat beragama.

### **3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**

Isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan Jawa Barat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terkendala tingkat konektivitas antar wilayah yang baru mencapai 43,51 persen pada tahun 2021, target tahun 2023 adalah 47,0 persen, masih terdapat gap sebesar 3,49 persen, sehingga konektivitas daerah belum optimal dalam mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Jawa Barat, jaringan jalan belum merata, serta masih terdapat ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan sehingga tingkat mobilitas antarwilayah relatif terbatas.

Pada beberapa ruas jalan masih didapat adanya umur teknis layanan jalan yang sudah terlampaui, tingkat ketersediaan perlengkapan jalan provinsi yang belum lengkap sehingga pergerakan barang maupun penumpang antarwilayah belum efisien.

Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat masih dihadapkan pada masalah akses dan standarisasi terhadap layanan listrik belum merata; pemanfaatan energi final belum efisien dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum optimal; penyediaan sumber daya air untuk aktivitas domestik dan industri belum optimal sehingga penggunaan air tanah meningkat; umur jaringan irigasi sudah terlalu tua dengan tingkat kerusakan tinggi sehingga rentan terhadap kejadian bencana alam; cakupan pelayanan air minum, air limbah domestik dan pelayanan persampahan belum optimal; serta penyediaan perumahan masih terkendala pelayanan PSU yang masih terbatas dan belum memenuhi memenuhi standar.



Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, serta untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang ditunjukkan dengan penurunan capaian indeks gini. Indeks Gini pada tahun 2021 sebesar 0,412 poin, target tahun 2023 sebesar 0,396 poin, sehingga terdapat gap sebesar 0,016 poin.

Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Barat masih terjadi di beberapa wilayah sebagai akibat pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan belum optimal, upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas domestik, industri, pertanian, dan pertambangan belum dapat berjalan secara efektif, belum sepenuhnya dilaksanakan penerapan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, serta degradasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan luas lahan kritis meningkat, yang menyebabkan berbagai wilayah rentan dengan bencana longsor dan banjir.

Penerapan pembangunan rendah karbon ditunjukkan dengan tingkat upaya penurunan gas rumah kaca pada tahun 2021 sebesar 4,23 persen, sedangkan target tahun 2023 sebesar 5,22 persen, sehingga terdapat gap sebesar 0,99 persen.

Pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan belum optimal, hal ini disebabkan oleh dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan melebihi kapasitas.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, serta pengolahan persampahan dan limbah yang belum memadai. Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

#### **4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Terdapat *double disruption*, yaitu revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, semakin memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,52 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang baik pasca terjadinya pandemi COVID-19 dimana ekonomi Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,74 persen, target tahun 2023 sebesar 4,35 persen, sehingga terdapat gap sebesar 0,61 persen.

Penurunan penerimaan pajak terutama dari sektor perdagangan, terganggunya pasokan bahan baku, gelombang PHK yang begitu besar, serta terpuruknya sektor usaha kecil sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga memerlukan strategi pemulihan ekonomi yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2023.

Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya sektor usaha kecil, hal ini disebabkan minimnya akses perbankan; belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi, pemanfaatan dan pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk KUMKM, digitalisasi KUMKM; serta belum meratanya penerapan standar produk KUMKM. Berdasarkan kondisi tersebut Jawa Barat pada tahun 2021 memiliki Proporsi kredit UMKM sebesar 21,67 persen, dan ditargetkan sebesar 21,10 persen pada tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Subang, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Cirebon, dan Kuningan serta 6 (enam) daerah di Jawa Barat selatan, yakni Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Pembangunan kawasan tersebut ditopang dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka, pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, dan dilengkapi Jalan Tol Cipali, termasuk lintasan kereta api. Kawasan Rebana paling siap menampung investasi, karena dari sisi harga lahan masih relatif murah dan upah pekerja tergolong masuk ke kelompok menengah ke bawah. Dengan Peraturan Presiden tersebut seluruh pembangunan di kawasan Rebana dan Jawa Barat selatan bisa diintegrasikan. Kebijakan tersebut mampu menumbuhkan investasi baru dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Hal lain yang menjadi perhatian pasca pandemi COVID-19 adalah pemulihan pada sektor pariwisata, yang meliputi peningkatan kunjungan wisata di setiap destinasi wisata di Jawa Barat, pelaksanaan pemenuhan kualitas dan kuantitas infrastruktur, dukungan amenities pariwisata, dan promosi pariwisata.

Peningkatan kunjungan wisata di setiap destinasi wisata di Jawa Barat belum naik secara signifikan yang menyebabkan sektor pariwisata belum maksimal dalam mendorong terciptanya perekonomian inklusif. Hal ini dikarenakan antara lain pergelaran kesenian dan upacara adat yang dapat menarik pengunjung dibatasi dengan pelaksanaan aturan protokol kesehatan dan dukungan amenities pariwisata belum maksimal, promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal, serta

kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata juga belum berjalan dengan maksimal.

Untuk itu perlu dilakukan penanganan secara komprehensif melalui upaya promosi dalam negeri dan luar negeri, penyelenggaraan event, dan penyelenggaraan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE), serta dukungan publikasi, promosi dan aktivitas budaya. Hal itu dilakukan dengan strategi *matching fund*, *matching program*, dan *matching promotion*.

Pada sektor pertanian terdapat permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi seiring dengan alih fungsi lahan pertanian dan terganggunya ekosistem pertanian, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, petani kesulitan dalam akses modal dan pasar, usia petani Provinsi Jawa Barat berada pada tidak usia produktif dan regenerasi petani masih rendah, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terbatas. Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi. NTP tahun 2021 adalah 97,84 poin, ini lebih rendah dibanding NTP tahun 2020 yaitu 101,42 poin.

Pada sektor kelautan dan perikanan terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir Utara dan Selatan, dengan wilayah tengah, eksploitasi ruang laut yang berlebihan dicirikan oleh meningkatnya angka tingkat pemanfaatan ikan, tingginya tingkat pencemaran, dan degradasi lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (diantaranya lahan dan kapal, pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, serta masih belum meratanya tingkat penguasaan dan pemanfaatan teknologi oleh nelayan, keterbatasan kualitas dan kuantitas produksi garam, usia nelayan saat ini juga berada di atas usia produktif, serta keterbatasan nelayan dan pembudidaya perikanan dalam mengakses pasar serta permodalan.

Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. Potensi krisis pangan tidak hanya terjadi pada skala Provinsi Jawa Barat namun pada skala nasional maupun global. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang tidak stabil sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Jawa Barat.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan yang masih tinggi di DAS, pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Provinsi Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi. Laju pertumbuhan sektor industri pada tahun 2021 sebesar 4,22 persen, dan target pada tahun 2023 sebesar 3,72 persen.

## **5. Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi

publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, tatakelola pemerintahan, kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu menetapkan kebijakan yang tepat dan cepat pasca pandemi COVID-19 melalui penyesuaian-penyesuaian terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu:

- a. Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di fasilitas umum;
- b. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
- c. Perpaduan pembelajaran (*Blended Learning*) dan pola kerja melalui daring (*online*) dan luring (*offline*);
- d. Konsultasi pengobatan jarak jauh (*Telemedicine*) dan peningkatan *health care*;
- e. Pembatasan jumlah pengunjung pada pelayanan kesehatan dan fasilitas umum; serta
- f. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik.

Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat, sehingga diperlukan kualitas SDM ASN yang mampu meningkatkan pelayanan, peningkatan transparansi, penerapan merit sistem, penghapusan jabatan struktural, serta reformasi birokrasi.

Berdasarkan 5 (lima) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat tahun 2023 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.5 di bawah.

**Tabel 4.5**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI</b>							
<b>Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban</b>							
1.1.	Terwujudnya Manusia yang Berketuhanan, Berdemokrasi, Berkebangsaan dan Berkeadilan Sosial	1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	1.1.1.1.	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat	a.	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumberdaya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
						b.	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan dan kewaspadaan terhadap paham-paham radikalisme dan komunisme melalui penciptaan sistem kewaspadaan dini masyarakat
<b>Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif</b>							
2.1.	Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	2.1.1.1.	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	a.	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19
						b.	Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19
						c.	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
				2.1.1.2.	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	a.	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar





TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		2.1.2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	2.1.2.1.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	b.	Mengembangkan inkubator bisnis
						a.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO.
						b.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
						c.	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan melalui upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.
		2.1.3.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.1.3.1.	Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender	a.	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak
		2.1.4.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2.1.4.1.	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	a.	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan <i>center of excellence</i> di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan
						b.	Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							menengah melalui sertifikasi kompetensi
						c.	Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan <i>e-book</i> gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI
						d.	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital
		2.1.5.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional	2.1.5.1.	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a.	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
						b.	Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
						c.	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
2.2.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Tertib dan Tenram Berbasis Kearifan Lokal dan Seni Budaya Daerah	2.2.1.	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	2.2.1.1.	Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat	a.	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal
						b.	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan
		2.2.2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan	2.2.2.1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	a.	Mengembangkan fasilitasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat
						b.	Meningkatkan penanganan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			kenyamanan lingkungan sosial				pelanggaran Perda
<b>Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah</b>							
3.1.	Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	3.1.1.1.	Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	a.	Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik
						b.	Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan rumah tangga hingga ke pelosok
		3.1.2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	3.1.2.1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	a.	Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok
						b.	Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
				3.1.2.2.	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	a.	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
						b.	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, dan kereta api, yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis
3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan	3.1.3.1.	Mempercepat pembangunan desa	a.	Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan		



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			pemberdayaan masyarakat desa			b.	Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan
						c.	Memperkuat pemerintahan desa
		3.1.4.	Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan	3.1.4.1.	Optimalisasi penataan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru	a.	Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB
3.2.	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	3.2.1.1.	Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	a.	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
						b.	Meningkatkan kualitas tutupan lahan
						c.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
				3.2.1.2.	Mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon	a.	Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik
						b.	Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak
				3.2.1.3.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	a.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman
						b.	Meningkatkan kualitas



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							perumahan dan kawasan permukiman
						c.	Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan
		3.2.2.	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	3.2.2.1.	Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	a.	Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya air
						b.	Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
						c.	Meningkatkan kinerja jaringan irigasi
		3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	3.2.3.1.	Mengurangi risiko bencana	a.	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
<b>Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan</b>							
4.1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Mengurangi Disparitas Ekonomi	4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	4.1.1.1.	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat	a.	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan
				4.1.1.2.	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	a.	Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.
						b.	Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						c.	Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial
		4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	4.1.2.1.	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	a.	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif
						b.	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
		4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	4.1.3.1.	Meningkatkan daya saing industri	a.	Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri
				4.1.3.2.	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	a.	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen
						b.	Memperluas infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	4.1.4.1.	Meningkatkan investasi daerah	a.	Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar ( <i>Off Taker</i> dan Promosi)
						b.	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
<b>Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>							
5.1.	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Whole Of Government</i>	5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	5.1.1.1.	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a.	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
						b.	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
						c.	Pemberlakuan sistem merit secara penuh
		5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	5.1.2.1.	Meningkatkan kerja sama pembangunan	a.	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan untuk menopang pelaksanaan kawasan metropolitan di Jawa Barat.

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah:

### **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Berikut uraian singkat program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 pada setiap misi, tujuan dan sasaran, serta kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan program Jabar Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi 1**, yaitu Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban, dilaksanakan melalui **43 program pembangunan** dan mendukung prioritas pembangunan daerah Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta Program Jabar Juara bertema Keagamaan Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran **Misi 2**, yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan melalui **8 (delapan) program** pembangunan dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 4) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; dan 5) Gerakan membangun desa, **8 (delapan) Program Jabar Juara**, terdiri dari: 1) Kesehatan Juara; 2) Pendidikan Juara; 3) Kesejahteraan Juara;

4) Tenaga Kerja Juara; 5) Ekonomi Juara; 6) Lingkungan Juara; 7) Gerbang Desa Juara; 8) Pembiayaan dan Investasi Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi 3**, yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah, dilaksanakan melalui **47 program pembangunan** dan mendukung **5 (lima) prioritas pembangunan daerah**, meliputi: 1) Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan; 3) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; 4) Gerakan Membangun Desa; dan 5) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, **serta 5 (lima) Program Jabar Juara**, terdiri dari: 1) Infrastruktur Juara; 2) Lingkungan Juara; 3) Pemerintahan Juara; 4) Gerbang Desa Juara; 5) Ekonomi Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi 4**, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan, dilaksanakan melalui **44 Program pembangunan** dan mendukung **6 (enam) prioritas pembangunan daerah**, meliputi: 1) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi; 2) Pengembangan Infrastuktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Reformasi sistem kesehatan daerah; 4) Gerakan Membangun Desa; 5) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan 6) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, , **serta 6 (enam) Program Jabar Juara**, terdiri dari: 1) Ekonomi Juara; 2) Kesejahteraan Juara; 3) Tenaga Kerja Juara; 4) Gerbang Desa Juara; 5) Pembiayaan dan Investasi Juara; dan 6) Infrastruktur Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi 5**, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui **36 program pembangunan** dan mendukung **1 (satu) prioritas pembangunan daerah**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, **serta Program Jabar Juara** bertema Pemerintahan Juara.

Total program pembangunan daerah untuk seluruh misi adalah **178 program**. Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 secara lengkap disajikan pada Lampiran II.

#### **4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun untuk mendukung Prioritas dan Sasaran Nasional, isu strategis, pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD untuk Tahun 2018-2023 sangat erat. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Jawa Barat yaitu pandemi COVID-19 yang diprediksi akan terus berdampak sampai tahun 2023. Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan**

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri.</li> <li>b. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen</li> <li>c. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (<i>Off Taker</i> dan Promosi)</li> <li>d. Menciptakan iklim usaha yang berdaya Saing</li> <li>e. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar</li> </ul>
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan</li> <li>b. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>c. Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan</li> </ul>



No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan <i>center of excellence</i> di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan;</li><li>Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi;</li><li>Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan</li></ol>
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i></li><li>Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika;</li><li>Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB.</li></ol>
8	Gerakan Membangun Desa	Memperkuat pemerintahan desa
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik</li><li>Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok</li><li>Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial</li></ol>



No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
		<ul style="list-style-type: none"><li>d. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda.</li><li>e. Mengembangkan prasarana transportasi Darat, Laut, dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, dan kereta api yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis</li><li>f. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara</li><li>g. Meningkatkan kualitas tutupan lahan</li><li>h. Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ul>
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif</li><li>b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital</li></ul>

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Sementara itu, beberapa prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai jawaban terhadap isu strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023, adapun keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.7**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis**

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>1. PD1-Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</li><li>2. PD5-Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan</li><li>3. PD9-Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara</li></ul>
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>1. PD1-Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</li></ul>



Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
	<ol style="list-style-type: none"> <li>PD2-Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi</li> <li>PD3-Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan</li> <li>PD4-Reformasi Sistem Perlindungan Sosial</li> </ol>
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>PD8-Gerakan Membangun Desa</li> <li>PD10-Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ol>
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>PD2-Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi</li> <li>PD3-Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan</li> <li>PD8-Gerakan Membangun Desa</li> <li>PD10-Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>PD11-Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata</li> </ol>
5. Reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PD7-Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah</li> </ol>

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Selain dikaitkan dengan isu strategis, prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat juga berasal dari hasil rumusan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

NO	PRIORITAS	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas diberbagai daerah,





NO	PRIORITAS	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan Ambulance di setiap desa/kelurahan, penyediaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat-obatan, pembangunan MCK, serta penyediaan alat-alat kesehatan pandemi COVID-19 yang masih banyak di butuhkan di masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS, karena sering terjadi kendala dan cenderung mempersulit bagi pasien, selain itu perlu meningkatkan jumlah subsidi bagi BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBP) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK).</li><li>3. Sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi COVID-19, mohon untuk memberikan sehingga tidak ada lagi isu-isu yang meresahkan di masyarakat.</li><li>4. Penguatan sarana dan prasarana posyandu di berbagai daerah serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif.</li><li>5. Agar vaksin yang aman dan halal dapat diprioritaskan bagi warga Jawa Barat yang muslim. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, serta memberikan sosialisasi dan penjelasan sebaik-baiknya ke warga masyarakat di Provinsi Jawa Barat..</li><li>6. Peningkatan Akses Kesehatan Balita, Ibu Hamil dan Remaja Putri.</li><li>7. Penanggulangan HIV AIDS</li><li>8. Akses pendidikan kesehatan bagi remaja putri</li></ol>
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong dinas tenaga kerja kabupaten/kota dan perusahaan setempat untuk memfasilitasi untuk siswa yang telah lulus dari SMA/SMK untuk melanjutkan ke dunia industri.</li><li>2. Bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat, seperti UMKM, Koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin, serta BUMDes dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.</li><li>3. Mempermudah akses permodalan serta perizinan usaha bagi masyarakat.</li><li>4. Permudah akses dan ketersediaan fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta fasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.</li><li>5. Mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li></ol>



NO	PRIORITAS	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>(UMKM).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Pembentukan Peraturan Daerah tentang kewirausahaan</li><li>7. Program pengorganisasian PKL dilokasi yang strategis</li><li>8. Pemberian bantuan untuk melakukan riset dan penelitian dengan melibatkan akademisi yang ahli di bidangnya masing-masing dengan target mengembangkan produk-produk pertanian, perikanan dan yang lainnya.</li><li>9. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin sektor pendidikan</li></ol>
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkaitan dengan bidang pertanian, permohonan permodalan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat-alat pertanian dan argo bisnis hortikultura, bibit, jaringan irigasi pertanian, serta pupuk gratis bagi para petani dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.</li><li>2. Bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, pelatihan pembuatan pakan ternak, serta bantuan untuk pengadaan perahu dan alat tangkap ikan bagi nelayan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.</li><li>3. Kelangkaan pupuk masih terjadi di sebagian daerah, masih diperlukannya subsidi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk sanggar seni, untuk meningkatkan pariwisata daerah.</li><li>4. Penambahan anggaran untuk pertanian khususnya pembenihan komoditas kopi, teh, vanila dan kelapa.</li><li>5. Pendampingan pengolahan pasca panen buah-buahan agar memiliki nilai jual lebih, seperti mesin pengolahan kopi.</li></ol>
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diperbaharunya secara berkala data terpadu kesejahteraan sosial penerima bantuan sosial.</li><li>2. Berkaitan bantuan sosial, agar pemerintah melakukan secara berkesinambungan selama pandemi belum berakhir, serta senantiasa memperbaharui data penerima bantuan agar tepat sasaran dalam penyalurannya.</li><li>3. Terkait dengan banyaknya masukan terkait dengan perlunya lapangan pekerjaan, mohon untuk dapat mempermudah akses, ketersediaan maupun fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.</li></ol>



NO	PRIORITAS	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di haruskan menambah jumlah anggaran untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat.</li><li>5. Perlunya peraturan daerah terkait perlindungan pekerja perempuan di Provinsi Jawa Barat, termasuk peraturan daerah terkait Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)</li><li>6. Perlunya program pembinaan dan pemberdayaan eks narapidana ketika kembali ke masyarakat</li><li>7. Perlunya pendataan dan penyelenggaraan program untuk menanggulangi anak-anak yang menjadi yatim piatu disebabkan orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19</li></ol>
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan sistem pembelajaran jarak jauh, diantaranya berkaitan dengan fasilitas peralatan pembelajaran, penguatan jaringan internet di <i>blank spot area</i>, distribusi kuota data internet gratis secara merata dan tepat sasaran.</li><li>2. Pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB), kobong, dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri, pembelian lahan sekolah untuk SMK.</li><li>3. Bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.</li><li>4. Pengangkatan PNS dan P3K bagi guru honorer, insentif Operator Sekolah, serta peningkatan insentif untuk guru PAUD dan Madrasah yang masih jauh dari kata layak untuk para pendidik, maka mohon sekiranya diberikan apresiasi insentif yang layak bagi mereka.</li><li>5. Pengadaan pelatihan-pelatihan <i>life skill</i> dan <i>soft skill</i> yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini untuk mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat.</li><li>6. Perhatian terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah di bawah Kemendikbud atau Kemenag sudah berpuluh tahun tidak mendapatkan apresiasi yang layak.</li><li>7. Perlunya anggaran untuk peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan.</li><li>8. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan desa.</li><li>9. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk anak jalanan</li><li>10. Bantuan sarana prasarana dan operasional Perguruan Tinggi</li></ol>
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bantuan mobil operasional kebencanaan serta optimalisasi upaya mitigasi untuk daerah</li></ol>



NO	PRIORITAS	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
	Penanggulangan Risiko Bencana	rawan bencana beserta mempercepat upaya <i>recovery</i> setelah bencana.
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan mall pelayanan publik</li><li>2. Permohonan peningkatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat, seperti pembangunan lapangan sepakbola, perbaikan lapangan serbaguna PPIK, lapangan bola voli, lapangan futsal, tenis meja serta pembangunan GOR desa.</li><li>3. Pengadaan teknologi tepat guna, serta penyediaan alat-alat keterampilan ibu-ibu.</li><li>4. Permohonan bantuan untuk inovasi teknologi dalam penanggulangan sampah terutama di perkotaan, alat pengolahan sampah organik, alat transportasi serta pembuatan TPS di daerah-daerah.</li><li>5. Regulasi sistem transportasi angkutan umum yang seimbang, agar moda transportasi angkutan umum dan online bisa hidup bersama (Kompentran)</li><li>6. Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB); perlunya pemekaran daerah di kabupaten/kota. Usulan pemekaran DOB ini harus terus dilakukan secara serius dan berkesinambungan bersama usulan pemekaran DOB lainnya yang telah ada.</li></ol>
8	Gerakan Membangun Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana prasarana desa digital</li><li>2. Permohonan pengembangan serta mempromosikan destinasi wisata pedesaan.</li><li>3. Permohonan penguatan sarana prasarana dan SDM perangkat desa, seperti pembangunan dan rehab kantor desa, insentif perangkat desa, penguatan kapabilitas perangkat desa terutama berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, serta peningkatan jumlah anggaran dana desa karena dampak kebijakan Refocusing anggaran sehingga program desa lainnya terbengkalai.</li><li>4. Hampir di setiap desa di kabupaten/kota banyak permohonan bantuan berkaitan denganaspalisasi/betonisasi jalan poros desa dengan panjang dan lebar disesuaikan dengan kondisi desa.</li><li>5. Beberapa kantor Kepala Desa mengalami kerusakan, sehingga terdapat permohonan bantuan berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan kantor Kepala Desa.</li><li>6. Di beberapa desa, terdapat permohonan bantuan pembuatan dan perbaikan fasilitas lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat.</li><li>7. Beberapa desa mengajukan pembangunan <i>Solar Cell Pump</i> untuk kebutuhan peningkatan</li></ol>



NO	PRIORITAS	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		daya listrik mandiri. 8. Perwakilan dari Badan Pengawas Desa berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat membuat tempat Sekretariat BPD untuk mendukung kinerja pengawasan desa.
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1. Permohonan bantuan pembangunan/ perbaikan/ pengembangan sarana peribadatan baik masjid, pondok pesantren/ kobong/ asrama santri, mushola, majelis taklim, serta termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pembelajaran.
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan, jalan provinsi yang rusak dan jalan desa. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian. 3. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung serbaguna di setiap desa. 4. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT)/ drainase utama. 5. Pembangunan folder penanganan banjir. 6. Pembangunan rumah layak huni. 7. Penanganan kerusakan lingkungan yang bertambah dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. 8. Penambahan infrastruktur dalam penanganan COVID- 19. 9. Pembangunan sumur resapan air penanganan banjir. 10. Meningkatkan infrastruktur akses internet lebih luas. 11. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman. 12. Normalisasi dan pemeliharaan sungai. 13. Penataan Kawasan Kumuh. 14. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat. 15. Pengadaan sarana penerangan jalan umum. 16. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni. 17. Program pengorganisasian PKL dilokasi yang strategis 18. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok. 19. Rehabilitasi/ penataan situs cagar budaya. 20. Pengadaan armada pengangkut sampah. 21. Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru

NO	PRIORITAS	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		(DOB); perlunya pemekaran daerah di kabupaten/kota. Usulan pemekaran DOB ini harus terus dilakukan secara serius dan berkesinambungan bersama usulan pemekaran DOB lainnya yang telah ada.
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan pengembangan serta mempromosikan destinasi wisata pedesaan.</li> <li>2. Program pelebaran jalan menuju tempat destinasi wisata di kabupaten/kota Se-Jawa Barat.</li> </ol>

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah dan arahan program dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 tersebut kemudian diterjemahkan dalam arahan program-program prioritas sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Program Prioritas**

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM PRIORITAS
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	<p><b>Melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi/kemitraan tata kelola kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat;</li> <li>2. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pekerja tertentu yang belum memiliki BPJS Kesehatan;</li> <li>3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik;</li> <li>4. Kajian Rumah Sakit rujukan pusat infeksi Provinsi Jawa Barat sebagai upaya kesiapsiagaan serta mitigasi bencana non alam seperti COVID-19</li> <li>5. Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal;</li> <li>6. Penguatan sistem informasi kesehatan antara daerah dengan pusat, serta pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. (Digitalisasi Kesehatan)</li> <li>7. Peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin dan teknologi;</li> <li>8. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100% <i>Universal Health Coverage</i> (UHC);</li> <li>9. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M.</li> <li>10. Penguatan peran puskesmas dalam optimalisasi preventif dan promotif kesehatan seperti peningkatan sarana prasarana serta SDM</li> </ol>



NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM PRIORITAS
		Kesehatan. 11. Percepatan penurunan <i>Stunting</i> menuju “Jabar <i>Zero New Stunting</i> ” melalui penguatan 8 (delapan) aksi konvergensi dan membuka peluang kemitraan dengan berbagai <i>stakeholder</i> .
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	<b>Melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui:</b> 1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK; 2. Pelatihan <i>digital marketing</i> , fasilitasi promosi bagi UMKM dan Koperasi; 3. Kemudahan akses dan prosedur perizinan usaha dan permodalan; 4. Fasilitasi pengembangan ekspor; 5. Pengembangan program petani milenial; 6. Pembentukan wirausaha pemula berkolaborasi dengan inkubator bisnis; 7. Pengendalian harga komoditas pertanian melalui fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan; 8. Penerapan teknologi pertanian; 9. Peningkatan kereampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja kompetensi, mandiri dan migran; 10. Penempatan tenaga kerja melalui <i>Job Fair/Bursa Kerja</i> ; 11. Perlindungan dan pengembangan PMI melalui <i>Migran Cervis Center</i> PMI; 12. Pengembangan kawasan transmigrasi 13. Melakukan <i>Link and Match</i> bagi industri besar dan IKM; 14. Peningkatan daya saing produk; 15. Fasilitasi pengembangan ekspor; 16. Penguatan Produksi melalui: Peningkatan Sistem Pangan Produksi pertanian; 17. Revitalisasi pasar rakyat, melalui Peningkatan kapasitas industri kecil, menengah dan perbaikan sistem distribusi barang; 18. Kemampuan Berwirausaha, melalui penciptaan tenaga kerja yang terlatih dan mandiri; 19. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja, melalui: Peningkatan Pelayanan dan pelaksanaan Penanaman Modal; 20. Digitalisasi Umum, melalui program OPOP dan wirausaha baru; dan 21. Pengembangan Destinasi Wisata dan ekonomi Kreatif, melalui pengembangan destinasi wisata dan Ekonomi Kreatif yang memberi dampak kepada ekonomi masyarakat.
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	<b>Melakukan penguatan sistem ketahanan pangan dengan memperhatikan aspek ketersediaan, aspek akses (distribusi), dan aspek pemanfaatan, melalui:</b> 1. Penyediaan pangan baik secara mandiri ataupun mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-





NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM PRIORITAS
		<p>impor) serta menyediakan stok cadangan pangan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;</li><li>3. Pemberian insentif serta mempermudah akses permodalan bagi petani dan nelayan untuk biaya produksi;</li><li>4. Mempermudah akses pasar bagi petani dan nelayan;</li><li>5. Peningkatan jaringan irigasi dan jalan usaha tani;</li><li>6. Peningkatan kualitas SDM (penyuluh dan petani);</li><li>7. Penerapan <i>agriculture 4.0</i>;</li><li>8. Membangun gudang penyimpanan sesuai komoditi;</li><li>9. Merancang perubahan pola rantai pasok;</li><li>10. Stabilisasi harga pangan;</li><li>11. Optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan;</li><li>12. Membangun sistem informasi satu data pangan.</li><li>13. Pengembangan <i>Food Estate</i> dan pembentukan Klaster/Kawasan Pertanian;</li><li>14. Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur; dan</li><li>15. Mengembangkan Pusat Distribusi Perdagangan dan Sistem Logistik Daerah.</li></ol>
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	<p><b>Melakukan penguatan sistem perlindungan sosial melalui:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan bantuan tunai dan subsidi bagi keluarga miskin;</li><li>2. Peningkatan kapasitas ekonomi bagi keluarga miskin; dan</li><li>3. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Sosial.</li></ol>
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	<p>A. Penguatan sistem pendidikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerataan dan penguatan tata kelola, aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan di daerah;</li><li>2. Penguatan program vokasi; dan</li><li>3. Bantuan hukum bagi tenaga pendidik.</li></ol> <p>B. Pemajuan kebudayaan untuk pembentukan karakter melalui pemanfaatan sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan</p>
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	<p><b>Penguatan sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana melalui:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sistem mitigasi bencana;</li><li>2. Pemetaan (<i>mapping</i>) daerah rawan bencana; dan</li><li>3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan yang modern.</li></ol>



NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM PRIORITAS
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	<b>Melakukan peningkatan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah melalui:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Digitalisasi pelayanan publik (administrasi hingga prosedur perizinan usaha);</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana media digital; dan</li><li>3. Pelatihan digitalisasi bagi aparaturnya terkait.</li></ol>
8	Gerakan Membangun Desa	<b>Mewujudkan desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.</b>
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	<b>Melakukan peningkatan pendidikan agama dan tempat ibadah melalui:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan melalui pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan tata kelola/manajemen tempat ibadah;</li><li>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama; dan</li><li>3. Peningkatan kemampuan manajerial pendidikan keagamaan.</li></ol>
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>Melakukan pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup melalui:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya;</li><li>2. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi;</li><li>3. Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan;</li><li>4. Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota;</li><li>5. Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota;</li><li>6. Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi di wilayah REBANA;</li><li>7. Bantuan dana untuk perbaikan/peningkatan jalan kabupaten/kota;</li><li>8. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon ;</li><li>9. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi;</li><li>10. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui</li></ol>

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM PRIORITAS
		<p>Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya melalui Penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Pengembangan Perumahan;</li> <li>12. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas; dan</li> <li>13. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis.</li> </ol>
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan atau penataan destinasi dan infrastruktur pariwisata;</li> <li>2. Pembenahan amenities, atraksi dan akses pariwisata;</li> <li>3. Pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal;</li> <li>4. Standarisasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang berbasis pada <i>Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)</i>;</li> <li>5. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>6. Pembangunan pusat budaya;</li> <li>7. Pengembangan sentra industri ekonomi kreatif; dan</li> <li>8. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata.</li> </ol>

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023

Selain penjabaran pelaksanaan prioritas pembangunan di atas, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19 melalui 11 (sebelas) program Jabar Juara, meliputi Pemerintahan Juara, Pendidikan Juara, Kesehatan Juara, Gerbang Desa Juara, Keagamaan Juara, Lingkungan Juara, Ekonomi Juara, Pembiayaan dan Investasi Juara, Infrastruktur Juara, Kesejahteraan Juara, Tenaga Kerja Juara.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan Jawa Barat. Strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dilakukan melalui **28 strategi** dan **54 arah kebijakan** yang tersebar ke dalam **11 (sebelas) prioritas pembangunan**, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

Terjadinya pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan Provinsi Jawa Barat terutama bagi upaya pencegahan penularan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (*health care center*), jaminan kesehatan (*health security*), sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan *surveilans*, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan, serta peningkatan jumlah cakupan vaksinasi COVID-19.

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023 bertumpu pada stimulus pemulihan sektor kesehatan dasar yang mengoptimalkan fungsi dan kapasitas puskesmas, dengan mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, melengkapi sarana prasarana/alat kesehatan yang diperlukan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM puskesmas melalui penguatan program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) serta meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dengan melakukan akreditasi puskesmas serta fasilitasi pembangunan rumah sakit tipe D.

Sistem kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat seyogyanya memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu:

- a. Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas (efektif, aman dan berfokus pada pasien);
- b. Menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan (biaya, waktu tunggu dan jarak ke fasilitas layanan kesehatan); dan
- c. Menjamin keterjangkauan biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan (kontrol biaya).

2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi

Dalam rangka pemulihan pasca COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan

masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk kepentingan tersebut maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi, difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2023 pemulihan ekonomi akan dikonsentrasikan pada penguatan perekonomian dan peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan belanja pemerintah pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM. Tantangan perekonomian tahun 2023 yaitu terjadinya penormalan perekonomian, akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat, serta kinerja pertumbuhan perekonomian Jawa Barat diharapkan dapat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional.

a. Pemulihan Ekonomi

1) Pemulihan Industri

Industri merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat sekaligus memiliki *share* terbesar dalam PDRB dan bagi industri nasional. Selain itu, Jawa Barat dikenal sebagai “rumah” bagi industri-industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi industri di Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri dan penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan yang berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan dengan

meningkatnya jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan. Strategi pemulihan ekonomi pada sektor perindustrian adalah:

1) Menghidupkan kembali industri Jawa Barat yang bersifat strategis dan padat karya; 2) Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0; serta 3) Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru.; 4) Meningkatkan dukungan kelancaran distribusi hasil produksi melalui aksesibilitas, pengawasan dan pengendalian transportasi sarana prasarana logistik.

2) Pemulihan Investasi

Investasi merupakan kunci utama dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Menurunnya realisasi penanaman modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 di Jawa Barat merupakan salah satu masalah yang harus ditangani secara tepat. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar nasional, khususnya dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentu menjadi ukuran tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Untuk itu tantangan terbesar dalam hal investasi di Provinsi Jawa Barat adalah mengembalikan kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan: 1) Realisasi “investasi baru” di Jawa Barat dengan mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor; 2) Fasilitasi proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya melalui *Investor Relation Officer* (IRO); dan 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sektor pertanian terkena dampak pandemi COVID-19 paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari

pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan.

Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19, dibutuhkan reformasi ketahanan pangan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Ketersediaan Pangan

Mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan, yakni melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, penggunaan teknologi yang bersifat *sustainable* dan pemberdayaan masyarakat bersifat padat karya.

b. Akses Pangan

1) Meningkatkan distribusi, logistik, dan perbaikan tata niaga pangan, yakni melalui:

- a) Pembenahan distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada penerapan sistem logistik dan distribusi yang terintegrasi, termasuk koordinasi antardaerah dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI);
- b) Optimalisasi BUMD untuk meningkatkan distribusi komoditas pangan antardaerah terutama dari daerah surplus kepada daerah defisit pangan;
- c) Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung optimalisasi distribusi pangan; dan
- d) Pengaturan distribusi pangan melalui penguatan pengaturan oleh pemerintah, serta penetapan kebijakan impor yang tepat waktu dengan dukungan data sistem logistik dan distribusi.

2) Membenahi struktur pasar, melalui:

- a) Penguatan pengaturan distribusi pangan oleh pemerintah, melalui pengaturan pelaku usaha distribusi terdaftar, dan monitoring harga; dan





- b) Optimalisasi peran BULOG sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, serta penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis seperti jagung, serta penguatan pemantauan harga dan pasokan dengan dukungan sistem informasi dan harga yang terintegrasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.
- c. Pemanfaatan Pangan
  - 1) Mendorong pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial.
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan pangan dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
  - 3) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif;
  - 4) Memperbaiki status gizi masyarakat; dan
  - 5) Menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan.
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut perlu direspon cepat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selain pemulihan ekonomi diperlukan pula perlindungan sosial yang komprehensif di antaranya:

  - a. Peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), akses permodalan usaha melalui kredit MESRA, pelatihan kewirausahaan; dan
  - b. Penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan SPP gratis, beasiswa, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), pelayanan gratis bagi masyarakat miskin di RS Provinsi, pelayanan panti, pembangunan rutilahu

(rumah tidak layak huni), pemasangan listrik gratis, dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan  
Pandemi COVID-19 merupakan suatu bencana kesehatan yang dapat dikategorikan pada kejadian luar biasa dan mengubah hampir seluruh tatanan hidup masyarakat di dunia. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat, berbagai pola hidup masyarakat dipaksa untuk berubah dan menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pula dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang menekankan protokol kesehatan yang ketat saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.

Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merupakan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal perbaikan sistem pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjawab tantangan peningkatan daya saing dalam menghadapi persaingan global yang diimbangi dengan pemajuan nilai-nilai kebudayaan Jawa Barat. Untuk itu, reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merujuk kepada perbaikan tatakelola pendidikan, pemenuhan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas mutu lulusan yang berdayasaing.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilakukan melalui pengembangan sekolah terintegrasi dimana sekolah jenjang pertama dan sekolah jenjang menengah berada dalam satu kawasan yang bertujuan untuk memudahkan akses peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, diberikan pula dana bantuan Biaya Operasional Sekolah yang membebaskan SPP bagi siswa SMA/SMK/SLB Negeri dan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta dan Madrasah Aliyah (MA), serta bantuan dana bagi siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak masuk sekolah menengah/ sederajat negeri.

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi sebagai salah satu prioritas di Jawa Barat dilakukan melalui revitalisasi SMK serta pengembangan SMK sebagai pusat unggulan *Center of Excellent* (COE) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi

lulusan yang berdaya saing. SMK COE sebagai sekolah pusat unggulan penjamin kualitas mutu lulusan pendidikan vokasi dan diharapkan dapat mewujudkan *link and match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai market dari lulusan SMK.

Dalam membangun sumberdaya manusia, peran kebudayaan sangat besar pengaruhnya terutama terhadap pembentukan karakter masyarakat. Integrasi unsur kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan karakter di Provinsi Jawa Barat diwujudkan melalui program Jabar Masagi dengan tujuan untuk membangun pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Barat yang menumbuhkan niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti sehingga dapat terwujud generasi masa depan Jawa Barat yang beriman, berkarakter, sehat dan cerdas.

6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Bercermin dari kejadian bencana pandemi dan wabah penyakit COVID-19, diperlukan reformasi sistem kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan wabah penyakit lainnya. Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah: penyiapan sarana prasarana kesehatan, pemerataan tenaga medis, peningkatan kewaspadaan masyarakat, penerapan protokol kesehatan secara berkesinambungan.

Selain bencana pandemi dan wabah penyakit, Provinsi Jawa Barat juga memiliki potensi bencana alam yang tinggi sehingga diperlukan peningkatan upaya mitigasi, sistem penanganan tanggap darurat, penanganan korban bencana, dan penanganan pasca bencana (rekonstruksi dan rehabilitasi).

Upaya mitigasi dan rehabilitasi perlu lebih mendapatkan perhatian dimana ruang lingkup upaya-upaya tersebut meliputi edukasi guna meningkatkan kepedulian masyarakat tentang bencana, mempersiapkan persediaan makanan, menyiapkan tempat untuk persediaan makanan, memberikan pelatihan kedaruratan, mempersiapkan peta bahaya, melakukan inventarisasi dan identifikasi kerentanan, membangun sistem peringatan dini, dan lain-lain.

Budaya penanggulangan bencana yang sudah dibangun pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana (rekonstruksi/rehabilitasi) yang reaktif dan *insidentil* dilakukan

mulai proses evakuasi, pencarian, penyelamatan, pembuatan posko, penempatan pengungsi, dapur umum, distribusi bantuan, pembersihan puing-puing atau longsor, sampai perbaikan sarana dan prasarana fisik yang hancur atau rusak akibat bencana.

Dalam penanganan bencana berupa mitigasi ataupun kesiapsiagaan seringkali terlewatkan. Selanjutnya, belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan reformasi terhadap sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat agar siap dengan kondisi yang dihadapi akibat bencana alam maupun bencana non alam.

Sistem kesiapsiagaan merupakan langkah penting dalam upaya penanggulangan bencana karena pada kenyataannya tidak semua bahaya dapat dicegah ataupun ditangani dengan aktivitas mitigasi yang komprehensif untuk menghindari kerugian lebih besar yang diakibatkan dari sebuah bencana. Sistem kesiapsiagaan dibuat bukan pada saat bahaya muncul tetapi saat sebelum ancaman bencana terjadi. Lingkup kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.

Strategi dan kebijakan untuk penguatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat yaitu melalui peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana melalui 6 (enam) aspek yaitu 1) Ketangguhan Masyarakat dan Komunitas (*Resilience Citizen*), 2) Ketangguhan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) dan Kearifan Lokal (*Resilience Knowledge and Local Wisdom*), 3) Ketangguhan Kelembagaan dan Kebijakan (*Resilience Institutional and Policy*), 4) Ketangguhan Pendanaan (*Resilience Financing*), 5) Ketangguhan Infrastruktur (*Resilience Infrastructure*), serta 6) Ketangguhan Ekologi (*Resilience Ecology*). Strategi dan kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dalam kerangka kerja untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat, yang dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) aktivitas yaitu: 1) Penilaian resiko, 2) Rencana kontijensi, 3) Kelembagaan, 4) Sistem informasi, 5) Mobilisasi sumberdaya, 6) Peringatan dini, 7) Mekanisme respon, 8) Pendidikan dan pelatihan publik, serta 9) Gladi/simulasi.

7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah merupakan prioritas untuk menjawab isu reformasi birokrasi. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 dan 5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis *e-government* melalui:

- a. Pembangunan *mall* pelayanan publik;
- b. Inovasi teknologi dalam penanggulangan sampah terutama di perkotaan, alat pengolahan sampah organik, alat transportasi serta pembuatan TPS di daerah-daerah;
- c. Regulasi sistem transportasi angkutan umum yang seimbang, agar moda transportasi angkutan umum dan *online* bisa hidup bersama (Kompentran);
- d. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB);
- e. Digitalisasi pelayanan publik (administrasi hingga prosedur perizinan usaha);
- f. Peningkatan sarana dan prasarana media digital; dan
- g. Pelatihan digitalisasi bagi aparatur terkait.

8. Gerakan Membangun Desa

Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yaitu desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Gerbang Desa merupakan prioritas untuk menjawab isu kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 2, Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

Pendidikan agama dan tempat ibadah juara merupakan prioritas untuk menjawab isu strategis Jawa Barat yaitu peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 1 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menetapkan 2 (dua) indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Infrastruktur konektivitas wilayah merupakan prioritas untuk menjawab isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 3 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan akan dikembangkan beberapa infrastruktur antara lain pembangunan Pelabuhan Patimban, peningkatan BIJB Kertajati di Majalengka, Lanjutan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Pembangunan Jalur KA Subang-Patimban, Pembangunan TPA Sampah Jalupang di Kabupaten Subang, Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kabupaten Kuningan, Pembangunan Jalan Lingkar Garut, Pengembangan SPAM Pelabuhan Ratu, dan Pembangunan koridor Jalur Tengah Selatan (JTS).

11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Pasca pandemi COVID-19 sektor pariwisata diharapkan dapat kembali tumbuh dan menghasilkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong hal tersebut, diperlukan pengembangan destinasi wisata dan amenitasnya serta infrastruktur, yaitu kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata diantaranya penerbangan, pelayaran, agen travel lokal, hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata. Selain itu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, dilakukan



beberapa kegiatan antara lain peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih; peningkatan event-event seni, budaya dan olah raga; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas, peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan; serta pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik, sehingga memperpanjang lama tinggal Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara dengan tetap menerapkan kebijakan protokol kesehatan.

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas, penanggung jawab Perangkat Daerah untuk masing-masing program prioritas, indikator sasaran untuk prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas, serta tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas. Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep tematik, tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, serta penerapan konsep integratif terkait pelibatan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan gambaran dari penjelasan tersebut di jabarkan pada Tabel 4.10 sampai dengan Tabel 4.20.





**Tabel 4.10**  
**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Reformasi Sistem Kesehatan Daerah**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a Usia Harapan Hidup	Tahun	73,11	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Persen	95,00	502.201.286.648	Dinas Kesehatan
									2 Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Persen	95,00		Dinas Kesehatan
									3 Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RSUD Pameungpeuk	Hari	9		Dinas Kesehatan
									4 Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RS Kesehatan Kerja	Hari	9		Dinas Kesehatan
									5 Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	Hari	9		Dinas Kesehatan
									6 Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RS Jiwa	Hari	21		Dinas Kesehatan
									7 Lama Rawat Pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RS Paru	Hari	9		Dinas Kesehatan
									8 Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) pada RSUD Al Ihsan	Hari	9		Dinas Kesehatan



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	Persen	69	104.216.835.803	Dinas Kesehatan
									2	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD Upelkes	Persen	4,99		Dinas Kesehatan	
									3	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RSUD Pameungpeuk	Persen	100		UPTD RS Jiwa	
									4	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RS Kesehatan Kerja	Persen	30		UPTD RSUD Jampang Kulon	
									5	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RSUD Jampang Kulon	Persen	75		UPTD RSUD Pameungpeuk	
									6	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD RS Jiwa	Persen	70		UPTD RS Kesehatan Kerja	
									7	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan UPTD RS Paru	Persen	100		UPTD Upelkes	



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Seksi Farmasi Kosalkes Mamin	Persen	90	526.732.200	Dinas Kesehatan
								4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Persen	100	1.808.831.180	Dinas Kesehatan
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp608.753.685.831</b>			

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

**Tabel 4.11**  
**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri	Persen	3,72	Meningkatkan daya saing industri	Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	Unit Usaha	250	10.704.903.925	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
									2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Persen	1,60	237.642.653	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
									3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota yang Masuk dalam SII Nasional	Persen	50	304.177.150	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah / Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	14.839.864.762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,45	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; Meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; Revitalisasi atau membangun Pasar Rakyat; serta Perlindungan konsumen	1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	Persen	100	341.038.860	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								2	Program Pengembangan Ekspor	1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	milyar USD	10,84	4.551.541.021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen	9,76	4.496.373.496	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	7	426.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	5	15.942.645.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1	Persentase pengaduan konsumen yang ditangani	Persen	80	2.259.266.393	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	Triliun Rupiah	531,87	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker dan Promosi)	1	Program Promosi Penanaman Modal	1	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	Persen	10	2.165.950.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	Persen	15	1.198.391.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
									3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Persen	70-75	850.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
									4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	76	474.849.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
									5	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan	Persen	76	8.877.288.999	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian	
									Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Indikator Daya Saing (Peringkat Ease Of Doing Business)	Peringkat	2	1.524.999.999	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	21,10	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Dukungan	1	Program Pengembangan UMKM	1	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	Persen	6,5	8.609.090.700	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pembiayaan Usaha dan Peningkatan Akses Pasar (Off Taker dan Promosi)	2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1 Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	4,5	1.200.000.200	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								3 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1 Tingkat Koperasi yang berkualitas	Persen	37	3.550.000.009	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								2 Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	6,9			
								4 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1 Persentase Wirausaha menjadi usaha mikro	Persen	100	47.499.999.955	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								2 Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	Persen	100			
		3 Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat	c Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,69	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	Persen	100	5.906.609.218	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								2 Program Penempatan Tenaga Kerja	1 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	88.305,00	18.242.746.640	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								3 Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100,00	213.858.470	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi





**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah / Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								4	Program Hubungan Industrial	1	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	90,00	2.227.386.580	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	20,00	3.244.597.135	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp159.889.721.165</b>			

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Tabel 4.12

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	a Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	85,60	Meningkatkan kemandirian dan Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	50,00	12.407.394.640	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
								2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	Persentase desa rawan pangan yang diintervensi	Persen	10,00	458.670.196	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
								3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	Persentase peningkatan sertifikasi PSA	Persen	12,67	2.683.420.345	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
								5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	5,00	5.855.934.360	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
								6	Program Penyuluhan Pertanian	1	Prosentase petugas dan pelaku usaha peternakan yang meningkat kinerjanya	Persen	25,00	2.973.552.617	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
								b.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,52	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1
			2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih	Poin							85,00	28.026.627.157	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah / Stakeholder	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									2	Persen	100,00			
									Jumlah pemenuhan dukungan penunjang manajemen perkantoran di BPPIBTSPB Bunikasih					
								3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Ton	186.558,07	41.853.368.481	Dinas Kelautan dan Perikanan
								4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Ton	882.923,42	6.641.451.706	Dinas Kelautan dan Perikanan
								5	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	1	persen	85,00	2.328.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
								6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Ku/Ha	58,76	3.467.435.763	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
								2	Produktivitas Tanaman Hortikultura	1	Ku/Ha	90,34		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
								3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	1	Persen	82,21		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
								7	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Kg/Kap/Th	30,93	3.467.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
								8	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Persen	100,00	133.770.836	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan					



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah / Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								9	Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase Penyuluh yang Berprestasi	Persen	2,13	71.101.710.738	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
									2	Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh Penyuluh	Persen	94,17			
									3	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	Persen	20,41			
									4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	88,86			
								10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Laju Peningkatan Penyediaan sarana perkebunan	Persen	25	18.233.605.223	Dinas Perkebunan
								11	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Persentase Perkebunan Bear yang mendapatkan Izin Usaha Perkebunan	Persen	67	250.000.000	Dinas Perkebunan
								12	Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase Pelaku Usaha Tani Perkebunan yang memiliki kompetensi	Persen	75	4.823.450.000	Dinas Perkebunan
							Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1.892.521	15.785.584.380	Dinas Perkebunan
									2	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	199,271			
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp230.476.395.684</b>			

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Tabel 4.13

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah / Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1 Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat	a. Indeks Kesejahteraan Sosial	persen	40,27	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19	1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten /Kota	Keluarga	0,00	38.846.086.790	Dinas Sosial
								2 Program Pemberdayaan Sosial	1 (Meningkatnya Kemampuan PSM dalam Penyelenggaraan Kesos)	PSM	200,00	8.393.816.403	Dinas Sosial
									2 (meningkatnya kemampuan TKSK dalam Penyelenggaraan Kesos)	TKSK	627,00		UPTD PPKS
									3 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi	Persen	32,00		Dinas Sosial
									4 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi UPTD PPKS	Persen	0,00		UPTD PPKS
									5 Persentase Daerah yang Difasilitasi Untuk Membentuk Puskesmas	Persen	100,00		Dinas Sosial
									6 Indeks Partisipasi Sosial	Poin	50,00		Dinas Sosial
								3 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban	1 (Fasilitasi Perulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari			141.182.700	Dinas Sosial



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Tindak Kekerasan						
								4 Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosialnya	Persen	100,00	25.499.824.289	UPTD PRSAMPK, PPSEBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU
							2		Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Panti Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	105,00			
							3		Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	Persen	100,00			
											<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp72.880.910.182</b>	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

**Tabel 4.14**  
**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah / Stakeholder			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,56	Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan <i>center of excellence</i> di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	persen	78,46	5.097.730.831.288	Dinas Pendidikan
									2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	persen	47,59				
									Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi	1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai Standar	Persen	100	13.000.000.000
		2. Meningkatkan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	Persen	24,21	Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat	Memperluas tingkat partisipasian kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan	1	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan	persen	30,79	7.434.020.075	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									1 Aksara daerah yang dilestarikan, dan seni budaya yang dilindungi)				
									2 Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	persen	30,79		
								2 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	persen	26,09	3.677.692.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
								3 Program Pengelolaan Permuseuman	1 Persentase Benda Koleksi Museum Negeri Sri Baduga yang Dilindungi	persen	23,18	3.600.164.999	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp5.125.442.708.862</b>	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022



**Tabel 4.15**  
**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	144	Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	1	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana	Persen	100	9.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
												2	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100		
												3	Persentase Kabupaten Kota yang indeks ketahanan daerahnya meningkat	Persen	100		
										2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Gangguan Transtibum yang Dapat Diselesaikan	persen	71	17.183.500.950	Satuan Polisi dan Pamong Praja
												2	Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat	persen	75		
												3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	persen	100		
												4	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	persen	50		
										3	Program Penanganan Bencana	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	persen	100	4.100.470.175	Dinas Sosial



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	persen	4,5	27.036.232.192	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
								5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan	persen	25	3.055.129.950	Dinas Perkebunan
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp60.875.333.267</b>			

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022



Tabel 4.16

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
7	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A (82,01)	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>	1	Program Kepegawaian Daerah	1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	120	22.449.713.203	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
									2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	persen	1,05	8.393.824.852	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
									2	Persentase Jabatan Struktural Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL	persen	85				
									3	Persentase Pelaksana Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL	persen	90				
									4	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan atau STTPL Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	persen	85				
5	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan Rencana	persen	6													



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional				
									6 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Dan Sumber Belajar	persen	3		
									7 Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan	persen	100		
									8 Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100		
									9 Persentase Ketersediaan dokumen Akuntansi dan Pelaporan keuangan	persen	100		
									10 Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	persen	100		
									11 Persentase Ketersediaan dokumen untuk diverifikasi	persen	100		
									12 Persentase Ketersediaan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	persen	100		
									13 Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	persen	100		



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
									14	Persentasi Pemeliharaan Kendaraan	persen	100			
									15	Persentase Tersedianya Akomodasi Rapat Internal Dan Luar Kantor	persen	100			
									16	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	persen	100			
									17	Persentase Ketersediaan Barang Habis Pakai Kantor	persen	100			
									18	Persentase Terpuhinya Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya	persen	100			
									19	Persentase Terpuhinya Langgan Kantor	persen	100			
									20	Persentase Terpuhinya Kebutuhan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	persen	100			
									21	Persentase Terpuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	persen	100			
									22	Persentase Terpuhinya koordinasi dan konsultasi	persen	100			
									23	Persentase Terpuhinya kebutuhan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur	persen	100			
									24	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olah Raga Serta Pakaian Aparatur, Sarana Dan Prasarana Olah Raga	persen	100			
								3	Program Pengelolaan	1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD	Waktu	Tepat Waktu	16.236.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Keuangan Daerah	Perubahan Provinsi Jawa Barat				Daerah Provinsi Jawa Barat	
									2	persen	80			
									3	Waktu	Tepat Waktu			
									4	persen	100			
									5	persen	100			
									6	persen	6			
								4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persen	100	17.554.353.680	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
									2	Persen	0,36			
									3	Persen	80			
							Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis	1	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persen	100	15.257.724.630	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
								2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Persen	90	54.888.721.430	Dinas Komunikasi dan Informatika





# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
							teknologi dan informatika									
								3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	60	94.852.114.050	Dinas Komunikasi dan Informatika	
									2	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Persen	60				
								4	Program Penataan Organisasi	1	Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja yang efektif dan efisien	Persen	95	4.023.548.678	Sekretariat Daerah/ Biro Organisasi	
								5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	95,481	20.137.588.982	Badan Pendapatan Daerah	
								6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	persen	100	25.820.394.042	Inspektorat	
								7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1	Terselenggara kegiatan pembinaan dan pengawasan	persen	100	4.270.675.035	Inspektorat	
			b.	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	2	Optimalisasi pemekaran daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru	Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB	1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	Persentase fasilitasi kebijakan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah	90	25.011.400.000	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
									2	Program Pendaftaran Penduduk	1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	persen	83,25	420.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									3	Program Pencatatan Sipil	1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	83,25	270.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	persen	84,78	635.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									5	Program Pengelolaan	1	Persentase Dokumen	persen	100	75.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Profil Kependudukan	Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri				
								6 Program Pengendalian Penduduk	1 Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	persen	64,07	11.159.714.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
								7 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	persen	100	2.530.518.740	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		persen	100			
								8 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	persen	96,90	3.901.022.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
								9 Program Pengelolaan Arsip	1 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	persen	45	630.732.348	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								10 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1 Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggung jawaban Setiap Aspek Kehidupan Bangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik	persen	70	121.119.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								11	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1	Peresentase Penyelenggaraan Kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	persen	100	6.509.741.650	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
								12	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Level Maturitas UKPBJ	Level	4	8.054.372.000	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
								2	Kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ	persen	90				
								13	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Tingkat Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persen	100	212.803.613.036	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
								2	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD serta Penjaringan Aspirasi	persen	100				
								14	Program Pelayanan Penghubung	1	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan, dan Promosi Informasi Yang Difasilitasi	persen	100	2.115.680.000	Badan Penghubung
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,60	1	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah	persen	0	501.460.081	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				2	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	5,22	2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	persen	100	5.725.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
								2	Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang	persen	0				
								3	Persentase Berita Acara yang diterbitkan dalam rangka persetujuan substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota	persen	89,86				



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
									4	persen	60,1				
		3	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	24,21	1	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	persen	23	85.683.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	24,21	1	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	persen	23	85.683.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		5	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	85,60	1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	persen	83,51	14.302.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,52			2	Jumlah Produksi Garam	ton	284.750,29		
		6	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	69,60	1	Program Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	persen	90	180.902.902.142	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra
				2	Indeks Demokrasi	Poin	72,90			2	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang ditindaklanjuti	persen	85		
		7	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	1	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	47,00	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Dihadirkan	persen	100	4.408.612.959	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													<b>Rp764.134.213.438</b>		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022



Tabel 4.17

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Gerakan Membangun Desa**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
8	Gerakan Membangun Desa	1	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Persen	10,11	Mempercepat pembangunan desa	Memperkuat pemerintahan desa	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Persentase desa yang mendapat fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Persen	70	41.688.106.250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
									2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa	Persen	60	29.831.767.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
									3	Program Penataan Desa	1	Persentase Desa yang difasilitasi Penataannya	Persen	100	800.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
									4	Program Peningkatan kerja sama Desa	1	Persentase Kerjasama antar Desa kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	Persen	100	175.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
									5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	1	Persentase Status Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten/Kota	persen	100	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp72.644.873.250</b>				

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022



Tabel 4.18

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	69,60	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat	1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	persen	0,01	1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1 Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	persen	0,01	113.568.760.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								3 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1 Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100,00	800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								4 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persen	0,01	1.756.996.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp117.525.756.400</b>	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022



**Tabel 4.19**  
**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah**  
**Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan**  
**Pengelolaan Lingkungan Hidup**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a. Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	(Kwh/kapita)	1.150	Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik	1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1 Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan	persen	98	7.396.276.250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									2 Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	persen	100		
									3 Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah II Bogor	persen	100		
									4 Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta	persen	100		
									5 Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung	persen	100		
									6 Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang	persen	100		



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
									7	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya	persen	100			
									8	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon	persen	100			
								2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1	Jumlah Reduksi CO2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	Ton Co2eq	2175,21	7.396.312.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									2	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	SBM (Setara Barel Minyak)	23,81			
									3	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	SBM (Setara Barel Minyak)	23,81			
									4	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	SBM (Setara Barel Minyak)	23,81			
									5	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	SBM (Setara Barel Minyak)	23,81			
									6	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	SBM (Setara Barel Minyak)	23,81			
									7	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	SBM (Setara Barel Minyak)	23,81			
									8	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja	SBM (Setara Barel Minyak)	23,81			









**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya				
									8 Persentase Pengambil Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	60,00		
									9 Persentase sample air tanah yang diuji kualitasnya	persen	3,00		
		2 Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	47,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrast-ruktur transportasi	Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok	1 Program Penyelenggaraan Jalan	1 Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	persen	100,00	971.214.001.193	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
									2 Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	persen	100,00		
									3 Persentase panjang jalan yang dilakukan pengujian mutu		0,00		
								2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih	persen	100,00	3.450.919.919	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
						Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial		1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Provinsi	persen	87,85	59.966.613.223	Dinas Perhubungan
									2 Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	persen	87,85		
									3 Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	persen	87,85		
									4 Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	persen	87,85		
									5 Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup Provinsi	persen	87,85		



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakholder				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
						Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda	1	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	(UPTD PPP LLAJ Wilayah IV) Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yang Kewenangan Provinsi	Persen	100	2.650.000.000	Dinas Perhubungan		
						Mengembangkan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, udara, dan kereta api yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis	Mengembangkan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, udara, dan kereta api yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis	1	Program Pengelolaan Pelayaran	1	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi	persen	100	2.980.368.000	Dinas Perhubungan		
										2	Jumlah dokumen pendukung Pelabuhan Pengumpan Regional yang disiapkan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)	dokumen	14				
		3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,60	Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	persen	100	4.223.163.212	Dinas Lingkungan Hidup
										2	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Dituji	persen	100				
										2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	1	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	100	145.781.000	Dinas Lingkungan Hidup
										3	Program Pembinaan Dan Pengawasan	1	Persentase peningkatan dokumen	Persen	100	905.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya				
								4 Program Pengelolaan Persampahan	1 Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	persen	100	63.955.450.599	Dinas Lingkungan Hidup
								5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1 Persentase SITU yang Terpelihara	persen	10,95	242.818.628.353	Dinas Sumber Daya Air
							2 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi		persen	100,00			
							3 Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi		Persen	69,77			
								6 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	persen	100	1.340.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
								7 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1 Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Pengakuan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	persen	100	2.880.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
								8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	persen	100	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
								9 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	1 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Berbudaya Lingkungan	persen	100	850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	5,22	Meningkatkan kualitas tutupan lahan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	100	370.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
								2. Program Pengelolaan Hutan	1. Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahan Pengelolaan Hutan	persen	100,00	19.372.067.919	Dinas Kehutanan
									2. Persentase Penanganan Lahan Kritis	persen	5		
									3. Tingkat Kerusakan Hutan	persen	0,5		
									4. Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	persen	30,00		
									5. Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	persen	10,00		
								3. Program Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya	1. Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan	Persen	5	200.000.000	Dinas Kehutanan
			c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	38,90	Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	Meningkatkan kualitas tutupan lahan	1. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persen	36,55	250.000.000	Dinas Kehutanan
									2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	orang	120	529.999,875	Dinas Kehutanan
			d.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	53,90	Meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen	0	6.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
									2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persen	74,6	10.300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	50	17.700.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
								4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Persentase luas genangan yang tertangani	Perssn	77	1.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		1	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	220.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
								2	Program Kawasan Permukiman	1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	76	14.100.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
								3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Persen	49,63	4.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp1.671.892.528.778</b>			

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Tabel 4.20

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	3,08	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	1	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	1	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	Persen	29,27	7.544.954.269	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
									2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase Sumber Daya Industri Kreatif yang Dikembangkan	Persen	22,22	4.248.547.688	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
									2	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital	1	Persentase Seni Budaya Dan Destinasi Wisata Yang Dipromosikan	Persen	28,57	4.545.651.295	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>Rp16.339.153.252</b>				

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022



Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat diterjemahkan kedalam program prioritas, serta salah satu pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 4.21**  
**Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3		4	5	
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
				2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
				4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Dinas Kesehatan
				2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Dinas Kesehatan		



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4		5
				2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
				2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	
		5	Program Perizinan Dan	1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Pendaftaran Perusahaan	1 Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	
			3 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	
		6 Program Pengembangan Ekspor	1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			3 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		8 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5		
		9	1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		
		10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
				3	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
		11	Program Promosi Penanaman Modal	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		12	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		13	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
				Terpadu Satu Pintu
		14 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15 Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
			2 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
		16 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
		17 Program Pengembangan UMKM	1 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		18 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		19 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		20 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		21 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 2 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 3 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 4 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		22 Program Penempatan Tenaga Kerja	1 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		23 Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		24 Program Hubungan Industrial	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 3 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Kabupaten/Kota (UMSK)	
		25 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
			2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
			3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
		2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
		3 Program Pengawasan Keamanan Pangan	1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			2 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
3 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah				



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			4 Kesejahteraan Hewan	
		5 Program Penyuluhan Pertanian	1 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		6 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Penataan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			2 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		7 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
			3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			4 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	
		8 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
			3 Pengelolaan Penangkapan Ikan di	





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	
			Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
			4 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
			5 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
		9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
			3 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
		10	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,		



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		11 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 2 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		12 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
		13 Program Perizinan Usaha Pertanian	1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		14 Program Penyuluhan Pertanian	1 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 2 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
		4 Program Rehabilitasi Sosial	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	UPTD PRSAMPK, PPSBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU
			2 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
			4 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1 Program Pengelolaan Pendidikan	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan
			2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
			3 Pengelolaan Pendidikan Khusus	
		2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dinas Pendidikan
		3 Program Pengembangan Kebudayaan	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
		4 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4		5
		5	Program Pengelolaan Permuseuman	1	Pengelolaan Museum Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Satuan Polisi dan Pamong Praja
				2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
		3	Program Penanganan Bencana	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Dinas Sosial
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
7	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1	Program Kepegawaian Daerah	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
				2	Mutasi dan Promosi ASN	
				3	Pengembangan Kompetensi ASN	
				4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
		2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
				2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5		
			2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Barat	
			3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
			4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
			5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
		4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
		5	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
				2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
		8	Program Penataan Organisasi	1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah/ Biro Organisasi



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5
				2 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
		9	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
				2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		11	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
				2 Pendampingan dan Asistensi	
		12	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				2 Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				3 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
		13	Program Pendaftaran Penduduk	1 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
		14	Program Pencatatan Sipil	1 Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		15	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
		16	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Penyediaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pengendalian Penduduk	1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Pengendalian Kuantitas Penduduk	
		18 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		19 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
		20 Program Pengelolaan Arsip	1 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
			3 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
		21 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		22 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
			2 Fasilitasi Bantuan Hukum	
		23 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
			2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		24 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			4 Peningkatan Kapasitas DPRD	
			5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			7 Pembahasan Kerja Sama Daerah	
			8 Fasilitasi Tugas DPRD	
		25 Program Pelayanan Penghubung	1 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
		26 Program Penataan Bangunan Gedung	1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		27 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
			2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	
			3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
			4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
		28 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	
			3 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	
			4 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
		29 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5
				3 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
		30	Program Kesejahteraan Rakyat	1 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra
				2 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
				3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
		31	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
8	Gerakan Membangun Desa	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		3	Program Penataan Desa	1 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Kepala Desa dan Desa Adat	
		4 Program Peningkatan kerja sama Desa	1 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		5 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	1 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Pembangunan Pengembangan Infrastruktur	1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5		
	Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1	Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
			2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
			3	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
			4	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		
		2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
		3	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat			



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	
			4 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
			5 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
		4 Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	1 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			2 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
			3 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
		5 Program Penyelenggaraan Jalan	1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		6 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
			2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
			3 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
		7 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dinas Perhubungan
			2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
			3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			4 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			5 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			6 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			7 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
		8 Program Pengelolaan Perkeretaapian	1 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan
			2 Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	
		9 Program Pengelolaan Pelayaran	1 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan
			2 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			3 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	
		10 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		11 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	1 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		12 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		13 Program Pengelolaan Persampahan	1 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup
		14 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air
			2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		15 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		16 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		17 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		18 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		19 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		20 Program Pengelolaan Hutan	1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 2 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 3 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 4 Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dinas Kehutanan





NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
			5 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
			6 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
			7 Perbenihan Tanaman Hutan	
		21 Program Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya	1 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Kehutanan
		22 Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kehutanan
		23 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		24 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas Perumahan dan Permukiman
		25 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan dan Permukiman
		26 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Dinas Perumahan dan Permukiman



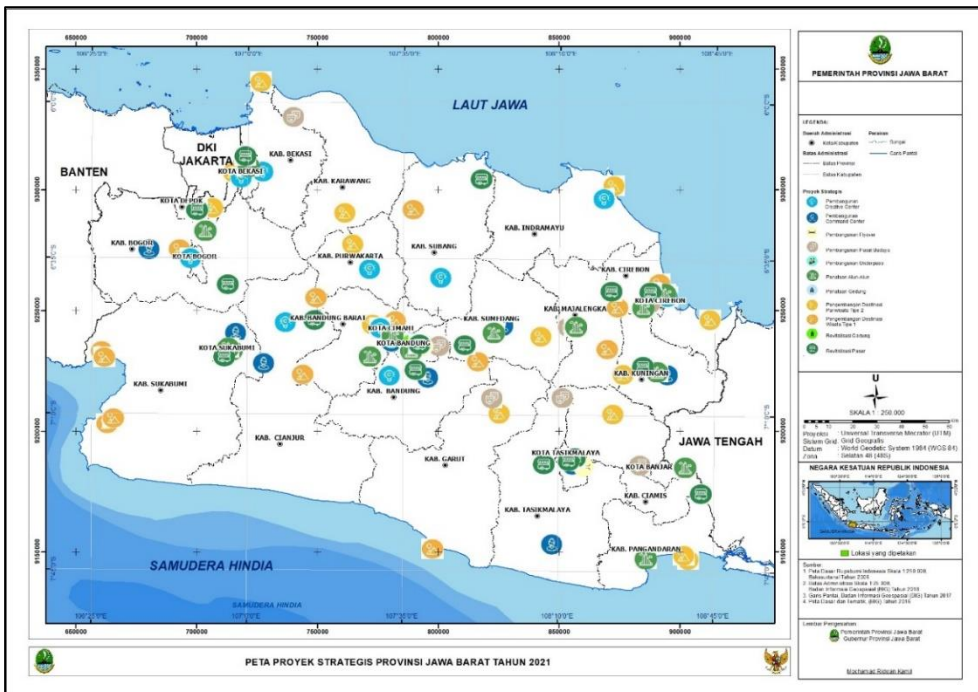
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5		
			Penyediaan Air Minum	Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
		27	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		28	Program Pengembangan Perumahan	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman
				2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
				3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		29	Program Kawasan Permukiman	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas Perumahan dan Permukiman
30	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman		
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
				2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					
		2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	
		3	Program Pemasaran Pariwisata	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat strategis selanjutnya disebut proyek strategis. Adapun lokasi pelaksanaan proyek strategis Tahun 2023 secara spasial disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 4.4**  
**Peta Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

#### 4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2023; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2023 dengan sasaran PN RKP Tahun 2023; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan PN RKP Tahun 2023; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.22**  
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023**

No	Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	a. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi b. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan c. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan c. Gerakan Membangun Desa d. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan b. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial d. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan b. Pendidikan Agama dan Tempat

No	Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
		Ibadah Juara
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial b. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Keterkaitan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.23**  
**Persandingan antara Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dengan Sasaran Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023**

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Tahun 2023	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
S5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel



Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Tahun 2023	
S6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
S7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S9	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
S10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S11	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
S12	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
S13	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S14	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S15	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S16	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S17	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat



Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Tahun 2023	
S18	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S19	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S20	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
S21	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel
S22	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S23	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S24	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S25	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel
SN26	Optimalnya kebijakan luar negeri	S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.
SN27	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel
SN28	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel
SN29	Terjaganya keutuhan Wilayah	S21	Terwujudnya kolaborasi



Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Tahun 2023	
	Negara Kesatuan Republik Indonesia		antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2022

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.24**  
**Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)
Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Rasio kewirausahaan nasional (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)
Pertumbuhan PDB pertanian (%f)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)
Pertumbuhan PDB perikanan (%)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)	laju pertumbuhan sektor industri (%)
Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1a) (%)	laju pertumbuhan sektor industri (%)
Nilai devisa pariwisata (8.9.1©)a) (miliar US\$)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1a) (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	1. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen) 2. Laju pertumbuhan Sektor Industri





Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
	(persen) 3. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen) 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)
IPM KBI (nilai min-maks)	1. Umur Harapan Hidup 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-rata lama sekolah 4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Persentase penduduk miskin KBI (%)	Persentase Penduduk Miskin
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	Umur Harapan Hidup
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Umur Harapan Hidup
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai) Membaca (nilai) Sains (nilai)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)
Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
	(Persen)
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)
Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)
Peringkat Global Innovation Index	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)
Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah
Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	Nilai Tukar Petani
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	Indeks Penggunaan Air
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
dikembangkan (kota)	
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	Indeks Kebahagiaan
Rasio elektrifikasi (%)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)
Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)
Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	Indeks Resiko bencana (poin)
Persentase penurunan emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Demokrasi (poin)
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)
Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)
Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)
Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2022

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam Rancangan RKPD 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.25**  
**Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan**  
**Program Prioritas Nasional dalam RKP 2023**

NO	RKP 2023		RKPD 2023
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
	1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>	
1	01 . 01	Memenuhi Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	3.29.03 - Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara 3.29.05 - Program Pengelolaan Energi Terbarukan
2	01 . 03	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan 2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan 4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan 5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3	01 . 04	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	3.25.02 - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan
4	01 . 05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	2.17.02 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2.17.03 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 2.17.04 - Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 2.17.05 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 2.17.06 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 2.17.07 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 2.17.08 - Program Pengembangan Umkm 2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor 3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	2.10.02 - Program Pengelolaan Izin Lokasi 2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal 2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal



NO	RKP 2023		RKPD 2023
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
			2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 3.31.02 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri 5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
6	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	2.13.05 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan 5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>	
1	02 . 02	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa 3.32.03 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	
1	03 . 01	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	2.12.02 - Program Pendaftaran Penduduk 2.12.03 - Program Pencatatan Sipil 2.12.04 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.05 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2	03 . 02	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1.06.02 - Program Pemberdayaan Sosial 1.06.03 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial 1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.06.06 - Program Penanganan Bencana 1.06.07 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3	03 . 03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1.02.03 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	03 . 04	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan 1.01.04 - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5	03 . 05	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	2.08.02 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan



NO	RKP 2023		RKPD 2023			
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah			
			2.08.03 - Program Perlindungan Perempuan			
			2.08.04 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
			2.08.05 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak			
			2.08.06 - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)			
			2.08.07 - Program Perlindungan Khusus Anak			
			2.14.02 - Program Pengendalian Penduduk			
			2.14.03 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)			
			2.14.04 - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)			
			2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
			2.19.03 - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			
			2.19.04 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
			6	03 . 07	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
						1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						
1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						
2.07.02 - Program Perencanaan Tenaga Kerja						
2.07.03 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						
2.07.04 - Program Penempatan Tenaga Kerja						
2.07.06 - Program Pengawasan Ketenagakerjaan						
2.11.08 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa						
2.13.05 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						
2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
2.19.03 - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan						
2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
3.25.02 - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil						
3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						
3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						
3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						
3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian						
3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian						



NO	RKP 2023		RKPD 2023
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
			3.28.05 - Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor 3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 4.01.07 - Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah 5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	
1	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	2.13.02 - Program Penataan Desa 2.23.03 - Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
2	04 . 02	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	2.13.03 - Program Peningkatan Kerja Sama Desa 2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan 2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 2.22.06 - Program Pengelolaan Permuseuman
3	04 . 04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana 2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan 2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 2.23.02 - Program Pembinaan Perpustakaan 5.07.02 - Program Pelayanan Penghubung 8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 8.01.04 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8.01.05 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	
1	05 . 01	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan 2.10.03 - Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.04 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 1.02.05 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	05 . 02	Infrastruktur Ekonomi	3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap



NO	RKP 2023		RKPD 2023
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
			3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			3.26.03 - Program Pemasaran Pariwisata
			3.26.05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	05 . 03	Infrastruktur Perkotaan	1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			1.03.03 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			1.03.04 - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			1.03.05 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			1.03.06 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			1.03.08 - Program Penataan Bangunan Gedung
			1.03.09 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
			1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan
			1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			1.04.03 - Program Kawasan Permukiman
			1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
			2.10.08 - Program Pengelolaan Tanah Kosong
			2.10.10 - Program Penatagunaan Tanah
			2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
			2.15.03 - Program Pengelolaan Pelayaran
			2.15.05 - Program Pengelolaan Perkeretaapian
			3.28.06 - Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	05 . 04	Energi dan Ketenagalistrikan	3.29.06 - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
5	05 . 05	Transformasi Digital	1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal
			2.18.06 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal





NO	RKP 2023		RKPD 2023
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
			3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4.01.02 - Program Penataan Organisasi 4.01.07 - Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 5.01.02 - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>	
1	06 . 01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana 2.11.02 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2.11.05 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2.11.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 2.11.07 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 2.11.09 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2.11.10 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan 3.28.04 - Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 3.28.05 - Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 3.29.02 - Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan 4.01.08 - Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	06 . 02	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan 1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana 1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	
1	07 . 01	Konsolidasi Demokrasi	4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat
2	07 . 03	Penegakan Hukum Nasional	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 4.01.05 - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum



NO	RKP 2023		RKPD 2023
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
3	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
			2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			2.24.02 - Program Pengelolaan Arsip
			2.24.03 - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
			3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			3.27.05 - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian
			3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian
			3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			4.01.02 - Program Penataan Organisasi
			4.01.03 - Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan
			4.01.07 - Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
			4.01.08 - Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
			4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			5.01.02 - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah
			5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			5.07.02 - Program Pelayanan Penghubung
			8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
8.01.04 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			



NO	RKP 2023		RKPD 2023
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
4	07 . 05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	8.01.05 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat
5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah Tahun 2022

Program prioritas yang di jelaskan diatas didukung oleh berbagai Program Prioritas Daerah seperti yang di rangkum di dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.26**  
**Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
<b>PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan</li> <li>2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati</li> <li>3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi</li> <li>4. Peningkatan pemenuhan energi domestik</li> <li>5. Pengembangan industri pendukung EBT</li> </ol>	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Penyediaan air untuk pertanian	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Irigasi
		1. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		1. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan DAS
		2. Pengembangan waduk multiguna	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional		Program Penyuluhan Pertanian
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan		Program Penyuluhan Pertanian



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		serta database kelautan dan perikanan		
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar</li><li>2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha</li><li>3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi</li><li>4. Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha</li></ol>	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>2. Program Pengembangan UMKM</li><li>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>2. Program Pengembangan UMKM</li><li>1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li><li>3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li><li>4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</li><li>5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li><li>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>2. Program Pengembangan UMKM</li><li>3. Program Promosi Penanaman Modal</li></ol>



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial		4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir 2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi  Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata  Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja
		4. Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		5. Pengembangan industri halal	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Program Pengembangan Ekspor Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan





NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif		2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif		1. Program Pengembangan Ekspor
				2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Program Pengembangan UMKM				
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
3. Program Pemasaran Pariwisata				
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	
				1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
<b>PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>				
1	Pembangunan Wilayah Sumatera	1. Pengembangan Kawasan strategis	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penaatan Bangunan dan Lingkungannya
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan	4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)	Gerakan membangun desa  Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 3. Program Penyelenggaraan Jalan
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi	5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Penataan Organisasi
6	Pembangunan Wilayah Maluku			
7	Pengembangan Wilayah Papua			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
<b>PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>				
1	Perlindungan sosial dan tata Kelola Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan</li> <li>2. Integrasi sistem administrasi kependudukan</li> <li>3. Pendampingan layanan terpadu</li> <li>4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk</li> </ol>	<p>Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah</p> <p>Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah</p> <p>Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi</p> <p>Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Program Pencatatan Sipil</li> </ol> <p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>Program Pengendalian Penduduk</p>
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem jaminan sosial nasional</li> <li>2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran</li> <li>3. Perlindungan sosial adaptif</li> <li>4. Kesejahteraan sosial</li> </ol>	<p>Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</p> <p>Reformasi Sistem Perlindungan Sosial</p> <p>Reformasi sistem kesiapsiagaan penganggulangan risiko bencana</p> <p>Reformasi Sistem Perlindungan Sosial</p>	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Program Penanganan Bencana</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial</p>
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi</li> <li>2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</li> <li>3. Peningkatan pengendalian penyakit</li> <li>4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</li> </ol>	<p>Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</p> <p>Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</p>	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun 3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Penjaminan mutu pendidikan 5. Peningkatan tata kelola pendidikan	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak 2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan 3. Kualitas pemuda	Reformasi sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pemenuhan HAK Anak 3. Program Perlindungan Khusus Anak 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial		
		3. Reformasi agraria	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Izin Lokasi 2. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3. Program Pengelolaan Tanah Kosong 4. Program Penatagunaan tanah
		4. Perhutanan sosial	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Hutan
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum
		2. Prestasi olahraga	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
<b>PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum
		2. Revolusi mental dalam tata kelola	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Kepegawaian Daerah
		3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	
		masyarakat dalam pembentukan karakter			
		4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila			
		5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Program pengembangan kebudayaan	
		2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
		3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif			
		4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan			
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pembinaan Perpustakaan	
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra			
		3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Inovasi Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pembinaan Perpustakaan
<b>PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>				
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau  2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman  3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan  4. Keselamatan dan keamanan transportasi  5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan  1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum  1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Program Penanggulangan Bencana





NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Konektivitas darat	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengelolaan Perkeretapian
3	Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	1. Transportasi perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengelolaan Perkeretapian
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)
4	Transformasi digital	1. Penuntasan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
<b>PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>				
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				3. Program Pengelolaan DAS
				4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
				5. Program Pengelolaan Hutan
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				3. Program Pengelolaan DAS
				4. Program Konservasi Sumber Daya Alam



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				Hayati dan Ekosistemnya
				5. Program Pengelolaan Hutan
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				3. Program Pengelolaan DAS
				4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
				5. Program Pengelolaan Hutan
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Hutan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		3. Pengelolaan limbah	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan DAS 3. Program Pengelolaan DAS
		4. Pengembangan industri hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Hutan 3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 5. Program Pengelolaan DAS
<b>PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	
		3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi		
		2. Perbaikan Sistem Hukum dan Perdata		
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi
		4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Penataan Organisasi 2. Program Kepegawaian Daerah
		2. Transformasi Pelayanan		
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis		



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Program Penyelenggaraan Pengawasan
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)		
		3. Penguatan Keamanan Laut		
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber		

Sumber: Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2023 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital, disajikan dalam subbab ini. RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2023 agar target-target pembangunan baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pada RPJMN Tahun 2020-2024:

**Tabel 4.27**  
**Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan**  
**Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)**  
**Pembangunan Nasional Tahun 2023**

<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<b>Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)</b>	
<b>Goal 1 Tanpa Kemiskinan</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi</li><li>• Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</li><li>• Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li><li>2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li><li>3. Program Pemberdayaan Sosial</li><li>4. Program Rehabilitasi Sosial</li><li>5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li><li>6. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah</li></ol>



<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<p>masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>8. Program Pengelolaan Kota Administrasi</li><li>9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li><li>10. Program Penempatan Tenaga Kerja</li><li>11. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li><li>12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li><li>13. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li><li>14. Program Perlindungan Khusus Anak</li><li>15. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li><li>16. Program Penanganan Bencana</li><li>17. Program Penanggulangan Bencana</li><li>18. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li><li>19. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li><li>20. Program Pengelolaan Aspek Gegeologian</li><li>21. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li><li>22. Program Perizinan Usaha Pertanian</li></ol>
<p><b>Goal 2 Tanpa Kelaparan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</li><li>• Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li><li>2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li></ol>





Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
<p>pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</li> <li>• Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</li> <li>• Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> <li>5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>9. Program Perizinan Usaha Pertanian</li> <li>10. Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> <li>14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>15. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> </ol>
<p><b>Goal 3 Kehidupan Sehat &amp; Sejahtera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</li> <li>• Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</li> <li>• Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>5. Program Rehabilitasi Sosial</li> </ol>



<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<p>memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</li><li>• Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</li><li>• Target 3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</li><li>• Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</li><li>• Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekecualian untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li><li>7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li></ol>
<p><b>Goal 4 Pendidikan Berkualitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</li><li>• Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>2. Program Pengembangan Kurikulum</li><li>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li><li>4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li></ol>



<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<p>berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</li><li>• Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</li><li>• Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</li></ul>	
<p><b>Goal 5 Kesetaraan Gender</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</li><li>• Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</li><li>• Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</li><li>• Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</li><li>2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li><li>3. Program Perlindungan Perempuan</li><li>4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li><li>5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li><li>6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li></ol>
<p><b>Goal 6 Air Bersih &amp; Sanitasi Layak</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</li><li>• Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li><li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat</li><li>3. Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li><li>5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li></ol>



<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</li><li>• Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li></ol>
<p><b>Goal 7 Energi Bersih &amp; Terjangkau</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</li><li>• Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</li><li>• Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan</li><li>2. Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li></ol>
<p><b>Goal 8 Pekerjaan Layak &amp; Pertumbuhan Ekonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</li><li>• Target 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa pada layanan keuangan.</li><li>• Target 8.6 Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.</li><li>• Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</li><li>2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>3. Program Pengembangan UMKM</li><li>4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li><li>5. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li><li>6. Program Penempatan Tenaga Kerja</li><li>7. Program Pengembangan Kebudayaan</li><li>8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li><li>9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li><li>10. Program Pengelolaan Permuseuman</li><li>10. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata</li></ol>



<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<p>mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>11. Program Pemasaran Pariwisata</li><li>12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li><li>13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>14. Program Perekonomian dan Pembangunan</li></ol>
<p><b>Goal 9 Industri, Inovasi &amp; Infrastruktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</li><li>• Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</li><li>• Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</li><li>• Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat</li><li>2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat</li><li>3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li><li>4. Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)</li><li>5. Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan</li><li>6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</li><li>7. Program Pengembangan Aplikasi Informatika</li></ol>
<p><b>Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Kesejahteraan Rakyat</li><li>2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li></ol>



<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Program Hubungan Industrial</li><li>5. Program Penanganan Bencana</li><li>6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro</li></ol>
<p><b>Goal 11 Kota &amp; Permukiman Yang Berkelanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.</li><li>• Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</li><li>• Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</li><li>• Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Kawasan Permukiman</li><li>2. Program Pengembangan Perumahan</li><li>3. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li><li>4. Program Kesejahteraan Rakyat</li><li>5. Program Pengembangan Perumahan</li><li>6. Program Pelayanan Penghubung</li><li>7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li><li>8. Program Penanggulangan Bencana</li><li>9. Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.</li><li>10. Program penangan bencana</li><li>11. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>12. Program Pengelolaan Persampahan</li><li>13. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li></ol>
<p><b>Goal 12 Konsumsi &amp; Produksi yang Bertanggung Jawab</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 12.4 Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</li><li>2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li><li>3. Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li></ol>





<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<p>terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</li><li>• Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</li></ul>	
<p><b>Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</li><li>• Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li><li>3. Program Penanganan Bencana</li></ol>
<p><b>Goal 14 Ekosistem Lautan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif pada tahun 2020.</li><li>• Target 14.5 melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020.</li><li>• Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li><li>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li><li>3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li><li>4. Program Pengaturan pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau *****</li><li>5. Program Perencanaan Lingkungan hidup</li><li>6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil</li></ol>
<p><b>Goal 15 Ekosistem Daratan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</li><li>• Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Konsservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li><li>2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li><li>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li><li>4. Program Pengelolaan Hutan</li><li>5. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li></ol>



<b>Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)</b>	<b>Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023</b>
<p>berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.</li><li>• Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</li><li>• Target 15.a Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi,</li></ul>	
<p><b>Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</li><li>• Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</li><li>• Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</li><li>• Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Kesejahteraan Rakyat</li><li>2. Program Perlindungan Khusus Anak</li><li>3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</li><li>4. Program Penguatan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</li><li>5. Program Penataan Organisasi</li></ol>
<p><b>Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li></ol>
<p><b>Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b> Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</li><li>2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li></ol>





Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	3. Program Penataan Organisasi 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Program Penyelenggaraan Pengawasan
<b>Aspek III : Gender</b> Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan
<b>Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital</b> 1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas  2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	3. Program Penataan Desa 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa 5. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 6. Program Pengembangan Kebudayaan 7. Program Pembinaan Sejarah  1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

### 4.3 Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat menurut RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, meliputi:

1. Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP) dengan ketetapan kawasan yang

- dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
2. Pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  3. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
  4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung;.
  5. Pengamanan Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Nasional;
  6. Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
  7. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  8. Pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) pertahanan dan keamanan.

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) WP serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan. WP ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya. WP mengacu pada skenario pengembangan wilayah sesuai target pencapaian penataan ruang dan arah pengembangan ekonomi. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, sesuai dengan sektor unggulan dan fokus pengembangan masing-masing kabupaten/kota. WP di Jawa Barat terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig,

WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya. Peta WP tercantum pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.5**  
**Wilayah Pengembangan di Jawa Barat**



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029

Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP, meliputi:

1. Kawasan yang terletak di bagian Utara Provinsi mencakup Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, Wilayah Pengembangan Kawasan Khusus (WP KK) Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya. Strategi mengendalikan pengembangan meliputi:
  - a. Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;
  - b. Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan sawah;
  - c. Menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan perkotaan



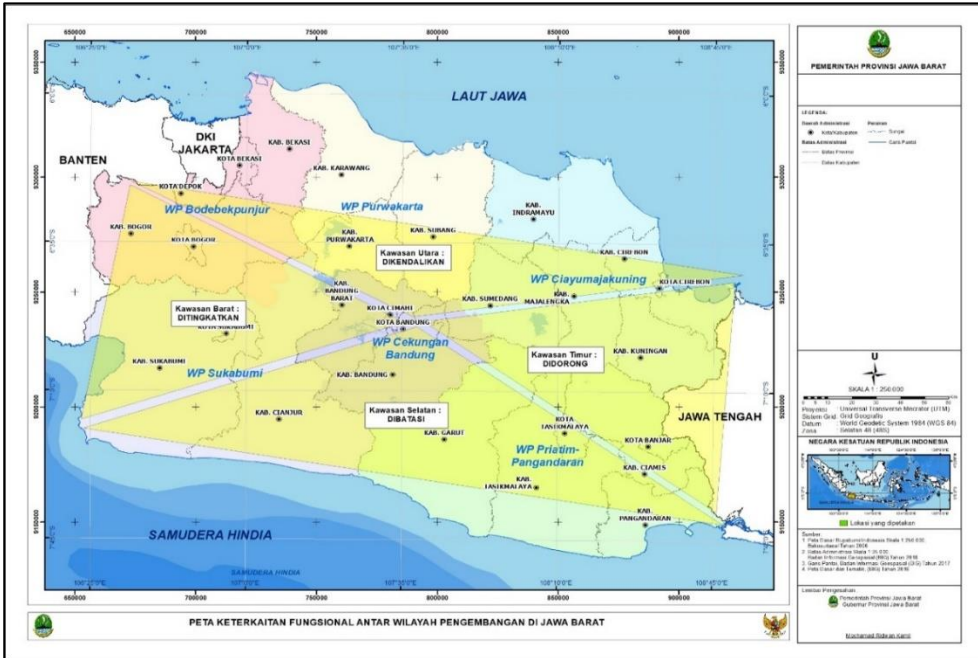
- yang menarik arus migrasi masuk tinggi;
  - d. Mengembangkan sistem transportasi massal;
  - e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
  - f. Mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Kawasan yang terletak di bagian Timur Provinsi mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan sebagai menjadi kawasan yang didorong pengembangannya.  
Strategi mendorong pengembangan meliputi:
- a. Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan RTRWP;
  - b. Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;
  - c. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - d. Menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan; dan
  - e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.
3. Kawasan yang terletak di bagian Selatan Provinsi mencakup sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya.  
Strategi membatasi pengembangan meliputi:
- a. Mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Lindung yang telah ditetapkan;
  - b. Meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
  - c. Meningkatkan akses menuju dan ke luar kawasan;
  - d. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman terutama di wilayah perbatasan;
  - e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarprovinsi



- dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN; dan
- f. Mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan Kawasan Lindung berbasis DAS.
4. Kawasan yang terletak di bagian Barat Provinsi mencakup sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan sebagai kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.
- Strategi meningkatkan pengembangan meliputi:
- a. Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan/jasa;
  - b. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - c. Mengembangkan sistem transportasi massal;
  - d. Menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan; dan
  - e. Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.

Efektifitas pengembangan wilayah di WP dan antar WP didorong oleh pembangunan dan peningkatan jaringan prasarana wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan. Peta keterkaitan fungsional antar WP tercantum pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.6**  
**Keterkaitan Fungsional Antar Wilayah Pengembangan**  
**di Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029

### 4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi Jawa Barat, meliputi pemantapan peran dan fungsi PKN, PKW, dan PKL dipenuhi melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana minimal, yang terdiri dari:

1. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. PKN di Jawa Barat terdiri dari PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKN Cirebon. Sarana dan prasarana minimal di PKN meliputi:
  - a. Perhubungan : bandar udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe A, angkutan umum massal
  - b. Ekonomi : pusat distribusi regional
  - c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B
  - d. Pendidikan : kawasan pendidikan tinggi, pusat kebudayaan





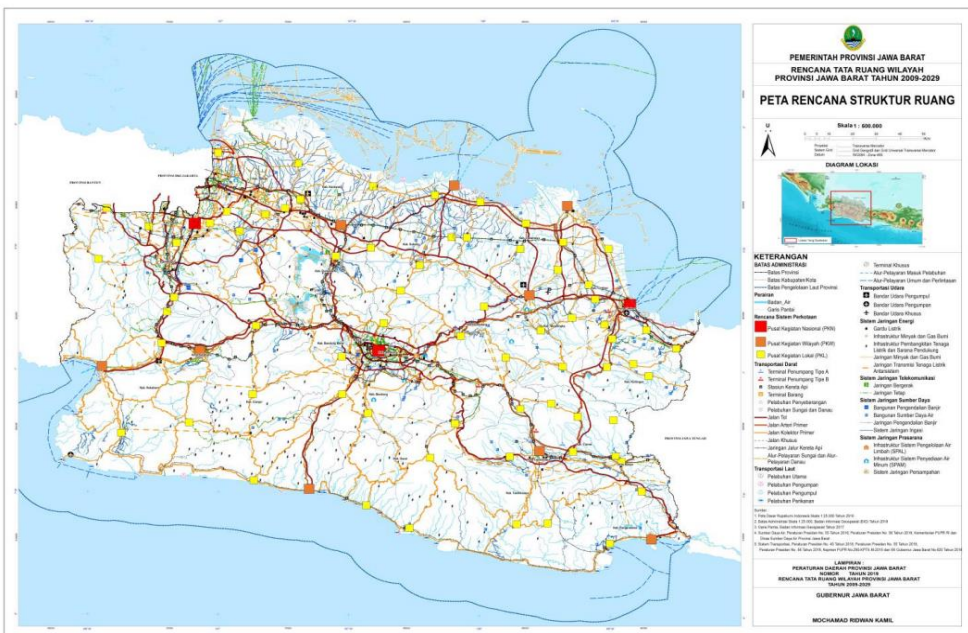
- e. Permukiman : TPPAS Regional, kawasan olah raga terpadu, hunian vertikal, SPAM regional, dan sistem pengolahan air limbah
2. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW di Jawa Barat pada Perda 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 terdiri dari PKW Daerah Kota Sukabumi, PKW Indramayu, PKW Daerah Kota Tasikmalaya, PKW Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Kadipaten, PKW Cikampek-Cikopo, sedangkan pada Revisi Perda Tahun 2022 - 2042 terdapat revisi dengan menambahkan PKW Cidaun-Rancabuaya, PKW Patimban, PKW Kadipaten-Kertajati. Sarana dan prasarana minimal di PKW meliputi:
  - a. Perhubungan : Bandar udara/ pangkalan udara, dan/atau pelabuhan laut, dan/atau terminal tipe B
  - b. Ekonomi : pusat distribusi provinsi, fasilitas bisnis pariwisata internasional, fasilitas bisnis perikanan
  - c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B
  - d. Pendidikan : perguruan tinggi, pusat kebudayaan
  - e. Permukiman : penyediaan Rusun, penyediaan PSU, kawasan olah raga terpadu, sistem pelayanan air minum dan sistem pengolahan air limbah
3. PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Penetapan PKL diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya. Sarana dan prasarana minimal di PKL, meliputi:
  - a. Sarana pendidikan: pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan pembangunan ruang kelas baru untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK.
  - b. Sarana kesehatan: pembangunan Rumah Sakit Tipe C, dan pembangunan Puskesmas Poned.
  - c. Sarana ekonomi dan budaya: terminal agribisnis, pasar, jasa keuangan, IPAL industri komunal, masjid, lapangan olahraga/ruang publik, dan tempat atraksi budaya.





Adanya implikasi dari Undang-undang No 11 Tahun 2020 serta dinamika perubahan aturan khususnya Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang serta menyuasikan dengan dinamika pembangunan di Provinsi Jawa Barat, maka sedang disusun Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042 yang berimplikasi pada perubahan rencana struktur dan rencana pola ruang seperti dalam gambar dibawah:

**Gambar 4.8**  
**Perubahan Peta Rencana Struktur Ruang**



Sumber: Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

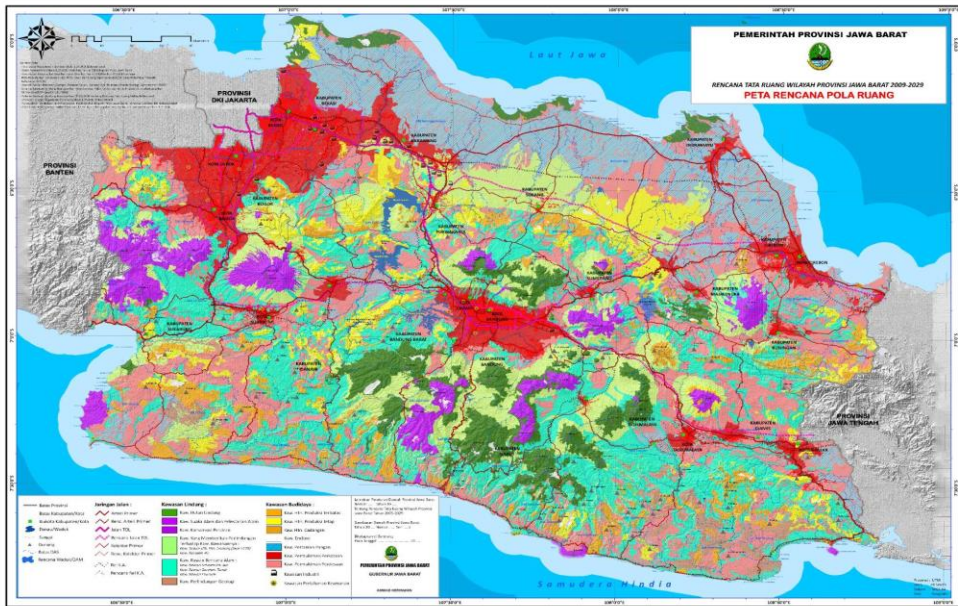
### 4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 yang menampilkan dominasi ruang dalam skala peta provinsi (1:250.000).

Kawasan lindung berupa deliniasi badan air, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan

perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, dan kawasan cagar budaya.

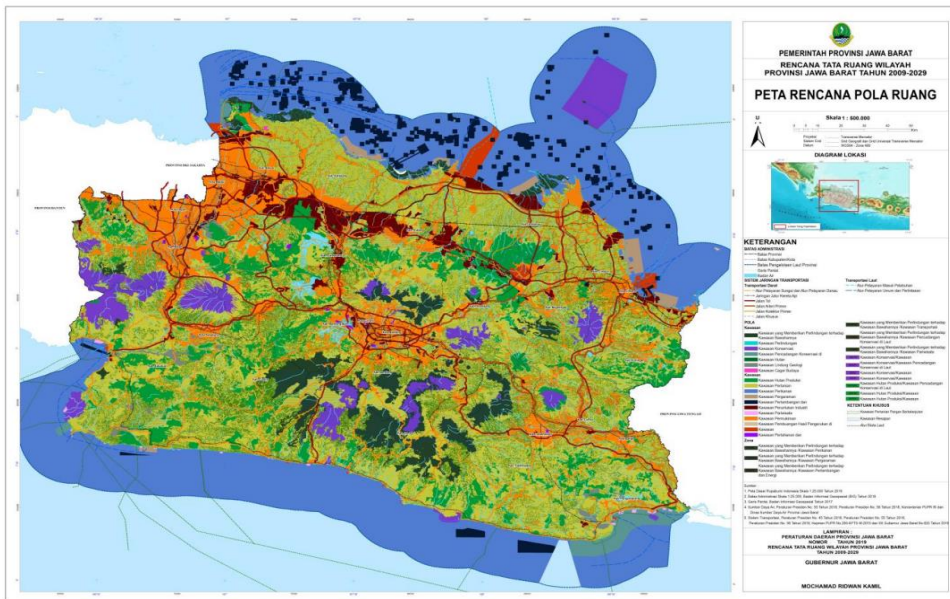
**Gambar 4.9**  
**Rencana Pola Ruang Jawa Barat Tahun 2009-2029**



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Pada Raperda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042 terdapat perubahan dalam nomenklatur kawasan budidaya yang tercantum dalam peta pola ruang terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pergaraman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan berfungsi lindung merupakan informasi yang penting dalam pemanfaatan ruang/pembangunan di kawasan budidaya, karena pembangunan harus dilaksanakan sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam gambar berikut ini.

**Gambar 4.10**  
**Perubahan Peta Rencana Pola Ruang**



Sumber: Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Menindaklanjuti penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) oleh Pemerintah Pusat, yang meliputi WPPI 1 (mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta), dan WPPI 2 (mencakup Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi secara terarah, fokus, terukur dan tepat sasaran melalui penyediaan percepatan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berupa kota baru dan kawasan peruntukan industri dalam rangka meningkatkan ekonomi wilayah di Kawasan Pantura Jawa Barat. Pengembangan tersebut dilakukan khususnya di sekitar 3 (tiga) kawasan simpul transportasi utama di wilayah Pantura meliputi Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban Subang, dan Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Kawasan yang dikembangkan tersebut dikenal dengan sebutan Pengembangan Kawasan Cirebon- Patimban- Kertajati (Rebana), yang digambarkan sebagai wilayah segitiga emas perekonomian dan menjadi pintu masuk-keluar jalur perdagangan dan logistik.



Menimbang kebijakan pengembangan industri di Provinsi Jawa Barat, perkembangan industri diarahkan menuju bagian timur-utara Provinsi Jawa Barat, yaitu Kawasan Rebana. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana diharapkan dapat memicu peningkatan investasi di Kawasan industri yang telah ditetapkan. Dengan adanya Kawasan Rebana, arah investasi dan pengembangan industri akan terdistribusi ke bagian Timur-Utara Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pengembangan kawasan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan penataan kawasan berbasis daya dukung lingkungan, konektivitas kawasan, proyeksi kondisi ekonomi dan sosial, serta kolaborasi dengan investasi industri dalam rangka meningkatkan IPM daerah.

Raperda RTRWP Tahun 2022-2042 menetapkan kawasan-kawasan yang dinilai strategis sesuai sudut kepentingan provinsi sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi:

1. KSP Bandung Utara sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
2. KSP Sukabumi Bagian Selatan dan sekitarnya, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
3. KSP *Aerocity* Kertajati dan sekitarnya, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
4. KSP Patimban, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
5. KSP Mundu-Losari, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

Perubahan Peta KSP tercantum dalam gambar berikut ini.





yang melibatkan 2 (dua) Provinsi dan Wilayah yang berbatasan. Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sehingga harus memperhatikan pemerataan yang menjangkau daerah terpencil dan juga daerah perbatasan. Wilayah perbatasan sering diidentikkan dengan daerah pinggiran, daerah terpencil dan daerah miskin sebagai daerah yang termarginalkan. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah yang berbatasan menjadi suatu kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama.

Kerja sama Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi yang berbatasan langsung adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan antardaerah. Semua Perangkat Daerah yang terkait dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus menindaklanjutinya melalui Perjanjian Kerja Sama juga harus berkomitmen untuk merencanakan, mengawal dan melaksanakan rencana kegiatan kerja sama pembangunan Jawa Barat sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Hubungan kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan daerah-daerah perbatasannya yakni Banten dan DKI Jakarta harus terus ditingkatkan dan menjadi prioritas program pembangunan. Hal ini mengingat masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara ketiganya sangat membutuhkan perhatian khususnya dalam urusan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Persoalan mendasar lainnya yang membutuhkan kerja sama antardaerah perbatasan adalah kualitas infrastruktur jalan dalam upaya konektivitas jalur perbatasan yang lebih memadai. Karena, hal tersebut akan mempengaruhi efektifitas pelayanan publik karena menghambat akses publik memperoleh pelayanan. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi antarwilayah perbatasan juga akan semakin meningkat mengingat potensi yang dimiliki baik Banten, DKI Jakarta maupun Jawa Barat sangat melimpah dan saling membutuhkan satu sama lain.



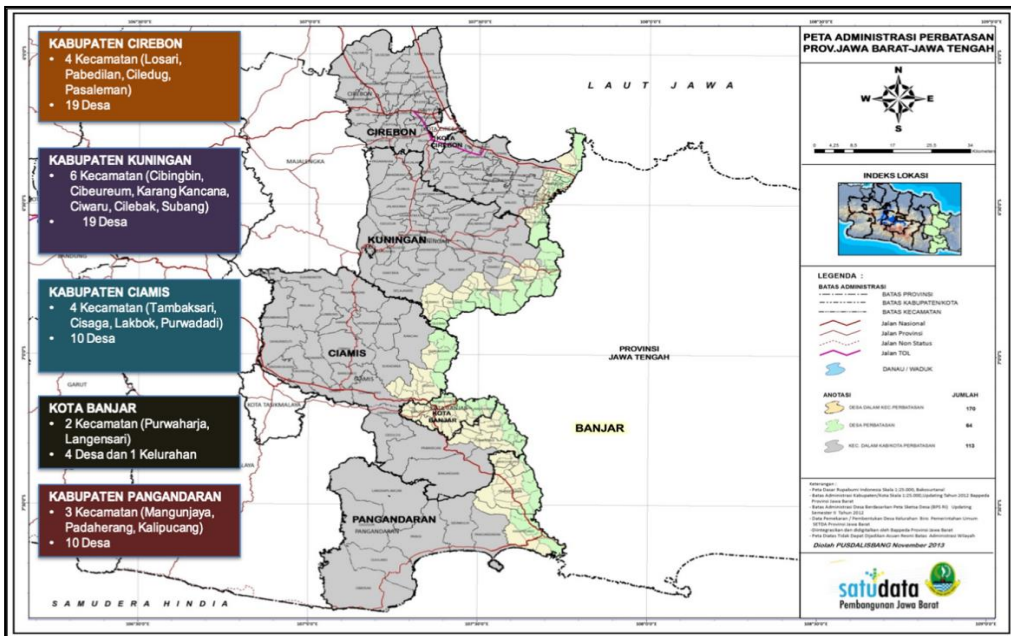
#### **4.4.1 Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah**

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan di Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Objek kerja sama yaitu pembangunan daerah yang berbatasan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di daerah yang berbatasan, dengan ruang lingkup meliputi: Pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perhubungan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; dan Perindustrian dan Perdagangan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagaimana gambar di bawah ini.

**Gambar 4.12**  
**Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2022

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan, Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat Tahun 2022.

Rangkaian acara Musrenbang perbatasan dimulai dengan penginputan form evaluasi dan usulan kegiatan dari setiap SKPD masing-masing provinsi. Berdasarkan usulan kegiatan yang telah terkumpul, dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antara kedua provinsi melalui diskusi kelompok secara *online* melalui *zoom meeting*. Diskusi terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok bidang pembahasan yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pada puncak acara ini dihasilkan kesepakatan usulan program dan kegiatan kerja sama pembangunan di wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah tahun 2022 yang ditandai dengan adanya penandatanganan Berita Acara Kerja Sama. Terdapat 111 usulan rencana kerja/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh





26 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 17 (tujuh belas) ruang lingkup kerja sama yang mengusulkan rencana kerja/kegiatan kerja sama pembangunan daerah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah tahun 2023. Sebanyak 58 usulan rencana kerja/kegiatan dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan 53 usulan rencana kerja/kegiatan dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pendanaan usulan rencana kerja/kegiatan kerja sama pembangunan daerah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan APBD Provinsi Jawa Tengah, serta sumber pendanaan alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain Perangkat Daerah dari kedua provinsi, dalam acara ini turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten yang berada pada wilayah perbatasan seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, untuk turut memberikan masukan usulan pembangunan di wilayah perbatasan.

Dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah melalui usulan kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pemenuhan pelayanan publik di daerah perbatasan.

#### **4.4.2 Perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta**

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

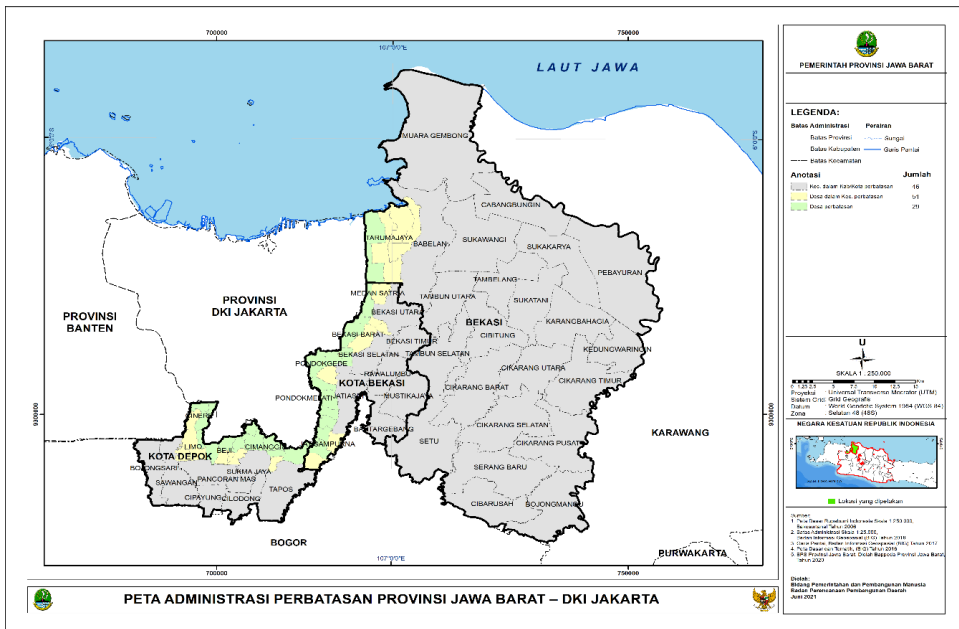
Pada Tahun 2022 ini telah disiapkan Naskah Perjanjian Kerja Sama yang akan Mengatur terkait Urusan urusan Kerja Sama Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Mengingat sebelumnya baik Jawa Barat atau DKI Jakarta memang sudah terikat dalam hubungan kerja sama dibawah Badan Kerja Sama Pemerintah (BKSP) dan Sekretariat Kunci Bersama yang saat ini organisasi tersebut sudah tidak aktif.

Mengingat Urusan urusan Kerja Sama Pembangunan anantara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta masih memiliki

Urusan urusan Pembangunan yang memerlukan Perhatian Khusus antara lain pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dengan ruang lingkup meliputi urusan: Kesehatan; Pendidikan; Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Perumahan dan Permukiman; Pariwisata; Koperasi dan Usaha Kecil; Perdagangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Pekerjaan Umum; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perencanaan; dan Kebudayaan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten sebagaimana gambar di bawah ini.

**Gambar 4.13**  
**Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta**



Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

#### 4.4.3 Perbatasan Jawa Barat dan Banten

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah

Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023.

Berdasarkan hasil pembahasan teknis yang dilakukan sebelumnya, ada 18 urusan kerjasama pembangunan antara Jawa Barat-Banten dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2021-2023. Ke-18 urusan tersebut diantaranya meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, trantibumlinmas, perumahan dan permukiman, pariwisata, KUK, perdagangan, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta perencanaan.

Ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang berbatasan. Kota Tangerang Selatan dengan Depok dan Bogor, Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak dengan Sukabumi. Pada aspek pendidikan, banyak warga Bogor bersekolah di Tangerang Selatan, warga Lebak juga banyak bersekolah di Sukabumi karena jarak lebih dekat. Dalam pembahasan kerja sama, baik Banten maupun Jawa Barat sama-sama ingin mengembangkan wilayah selatan. Jalan akses sampai Pelabuhan ratu, dari Banten juga demikian karena ada tol Serang Panimbang yang bisa tersambung. Tangerang Selatan juga dengan Bogor ada jalan khusus untuk pengambilan batu dari gunung Sindur sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten sebagaimana gambar di bawah ini.





## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023 yang berdasarkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 berbasis sinkronisasi dan integrasi merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### 5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota

Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Pengeluaran Penduduk Perkapita. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

##### 5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten dan kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.




**Tabel 5.1**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021**


NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Poin)	
		REALISASI	
		2020	2021
1	Kabupaten Bogor	70,40	70,60
2	Kabupaten Sukabumi	66,88	67,07

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Poin)	
		REALISASI	
		2020	2021
3	Kabupaten Cianjur	65,36	65,56
4	Kabupaten Bandung	72,39	72,73
5	Kabupaten Garut	66,12	66,45
6	Kabupaten Tasikmalaya	65,67	65,90
7	Kabupaten Ciamis	70,49	70,93
8	Kabupaten Kuningan	69,38	69,71
9	Kabupaten Cirebon	68,75	69,12
10	Kabupaten Majalengka	67,59	67,81
11	Kabupaten Sumedang	71,64	71,80
12	Kabupaten Indramayu	67,29	67,64
13	Kabupaten Subang	68,95	69,13
14	Kabupaten Purwakarta	70,82	70,98
15	Kabupaten Karawang	70,66	70,94
16	Kabupaten Bekasi	74,07	74,45
17	Kabupaten Bandung Barat	68,08	68,29
18	Kabupaten Pangandaran	68,06	68,28
19	Kota Bogor	76,11	76,59
20	Kota Sukabumi	74,21	74,60
21	Kota Bandung	81,51	81,96
22	Kota Cirebon	74,89	75,25
23	Kota Bekasi	81,50	81,95
24	Kota Depok	80,97	81,37
25	Kota Cimahi	77,83	78,06
26	Kota Tasikmalaya	73,04	73,31
27	Kota Banjar	71,70	71,92
<b>Provinsi Jawa Barat</b>		<b>72,09</b>	<b>72,45</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

**Tabel 5.2**  
**Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

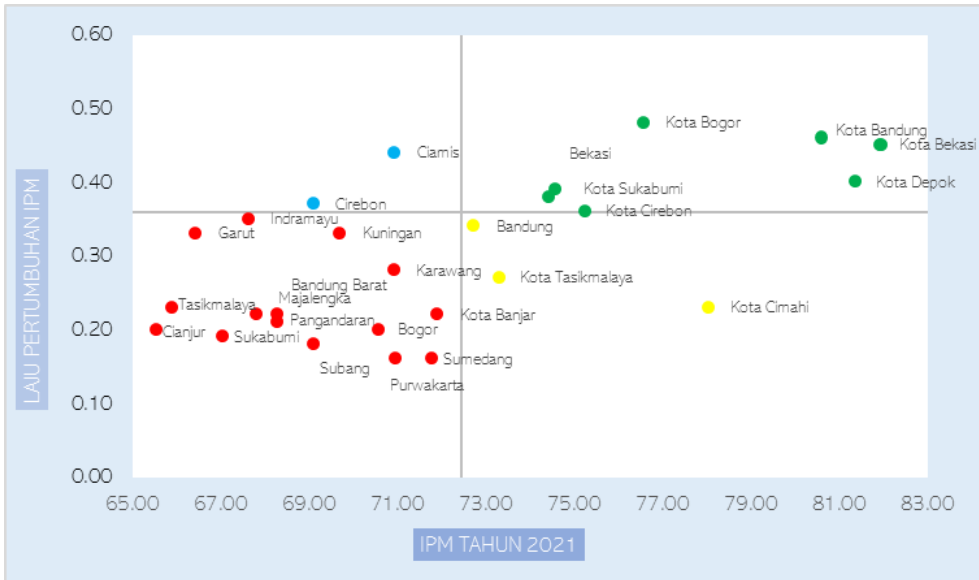
Kuadran	Simbol	Interpretasi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 15 (lima belas) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cirebon.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi.



**Gambar 5.1**  
**Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021**



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 65,56 (Kabupaten Cianjur) hingga 81,96 (Kota Bandung). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok menjadi daerah dengan capaian IPM tertinggi dengan kategori “Sangat Tinggi”. Sementara 9 (sembilan) kabupaten/kota masuk kategori “Tinggi” dan 11 (sebelas) kabupaten/kota lainnya kategori “Sedang”.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Jawa Barat, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah kabupaten/kota, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

**Tabel 5.3**  
**Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota**  
**Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2022-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Poin)	
		TARGET	
		2022	2023
1	Kabupaten Bogor	70,89	70,72
2	Kabupaten Sukabumi	68,25	68,78
3	Kabupaten Cianjur	65,48	65,98
4	Kabupaten Bandung	73,48	74,17
5	Kabupaten Garut	67,37	68,98
6	Kabupaten Tasikmalaya	65,90	66,37
7	Kabupaten Ciamis	71,09	72,13
8	Kabupaten Kuningan	69,45	69,66
9	Kabupaten Cirebon	68,97	69,08
10	Kabupaten Majalengka	68,33	68,85
11	Kabupaten Sumedang	72,35	73,28
12	Kabupaten Indramayu	66,95	67,22
13	Kabupaten Subang	68,95	69,35
14	Kabupaten Purwakarta	69,92	70,35
15	Kabupaten Karawang	71,17	71,96
16	Kabupaten Bekasi	74,87	75,40
17	Kabupaten Bandung Barat	69,13	69,76
18	Kabupaten Pangandaran	68,25	68,50
19	Kota Bogor	77,22	77,78
20	Kota Sukabumi	74,60	74,75
21	Kota Bandung	82,78	83,03
22	Kota Cirebon	75,73	75,93
23	Kota Bekasi	82,67	83,04
24	Kota Depok	82,64	83,15
25	Kota Cimahi	78,08	78,41
26	Kota Tasikmalaya	73,01	73,53
27	Kota Banjar	72,22	72,65
<b>Provinsi Jawa Barat</b>		<b>72,57</b>	<b>73,05</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

### 5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka capaian LPE kabupaten/kota





dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4**  
**Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)	
		REALISASI	
		2020	2021
1	Kabupaten Bogor	-1,77	3.55
2	Kabupaten Sukabumi	-1,08	3.75
3	Kabupaten Cianjur	-0,78	3.48
4	Kabupaten Bandung	-1,87	3.56
5	Kabupaten Garut	-1,26	3.58
6	Kabupaten Tasikmalaya	-0,98	3.43
7	Kabupaten Ciamis	-0,14	3.66
8	Kabupaten Kuningan	-0,09	3.56
9	Kabupaten Cirebon	-1,108	2.47
10	Kabupaten Majalengka	0,86	4.75
11	Kabupaten Sumedang	-1,12	3.17
12	Kabupaten Indramayu	-1,58	0.58
13	Kabupaten Subang	-1,27	2.4
14	Kabupaten Purwakarta	-2,05	3.42
15	Kabupaten Karawang	-3,59	5.85
16	Kabupaten Bekasi	-3,30	3.65
17	Kabupaten Bandung Barat	-2,41	3.46
18	Kabupaten Pangandaran	-0,05	3.67
19	Kota Bogor	-0,53	3.76
20	Kota Sukabumi	-1,48	3.71
21	Kota Bandung	-2,28	3.76
22	Kota Cirebon	-0,99	3.04
23	Kota Bekasi	-2,55	3.22
24	Kota Depok	-1,92	3.76
25	Kota Cimahi	-2,26	4.19
26	Kota Tasikmalaya	-2,01	3.57
27	Kota Banjar	1,04	3.46
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>-2,44</b>	<b>3.74</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

**Tabel 5.5**  
**Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dan Rata-rata LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dan Rata-rata LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 16 (enam belas) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon dan Kota Depok.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Majalengka.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Karawang, Kota Bogor, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

**Gambar 5.2**  
**Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata LPE**  
**Kabupaten/Kota**



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2022

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2021 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Barat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat menggambarkan pula percepatan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Jawa Barat. Terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2021 melebihi capaian Jawa Barat dan terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang capaian Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2021 melebihi capaian rata-rata Jawa Barat.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, wilayah Timur Jawa Barat menjadi prioritas lokasi pembangunan kewilayahan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati)

**Tabel 5.6**  
**Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota**  
**Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2020-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)	
		TARGET	
		2022	2023
1	Kabupaten Bogor	4,69	5,01
2	Kabupaten Sukabumi	5,23	5,54
3	Kabupaten Cianjur	5,00	5,33
4	Kabupaten Bandung	5,25	5,59
5	Kabupaten Garut	4,31	4,59
6	Kabupaten Tasikmalaya	4,5	4,93
7	Kabupaten Ciamis	4,73	5,04
8	Kabupaten Kuningan	1,90	2,00
9	Kabupaten Cirebon	4,61	4,84
10	Kabupaten Majalengka	4,5	5,17
11	Kabupaten Sumedang	5,4	6,2
12	Kabupaten Indramayu	1,46	1,56
13	Kabupaten Subang	4,19	4,47
14	Kabupaten Purwakarta	3,66	4,16
15	Kabupaten Karawang	4,43	4,71
16	Kabupaten Bekasi	4,25	4,55
17	Kabupaten Bandung Barat	4,51	4,81
18	Kabupaten Pangandaran	4,58	4,87
19	Kota Bogor	5,37	5,53
20	Kota Sukabumi	5,23	5,54
21	Kota Bandung	5,2	5,5
22	Kota Cirebon	5,17	5,5
23	Kota Bekasi	4,25	5,32
24	Kota Depok	4,89	5,21
25	Kota Cimahi	5,11	5,45
26	Kota Tasikmalaya	5,00	5,50
27	Kota Banjar	5,11	5,45
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>3,92</b>	<b>4,35</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

### 5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.




**Tabel 5.7**  
**Capaian TPT Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)	
		REALISASI	
		2020	2021
1	Kabupaten Bogor	14,29	12,22
2	Kabupaten Sukabumi	9,60	9,51
3	Kabupaten Cianjur	11,05	9,32
4	Kabupaten Bandung	8,58	8,32
5	Kabupaten Garut	8,95	8,68
6	Kabupaten Tasikmalaya	7,12	6,16
7	Kabupaten Ciamis	5,66	5,06
8	Kabupaten Kuningan	11,22	11,68
9	Kabupaten Cirebon	11,52	10,38
10	Kabupaten Majalengka	5,84	5,71
11	Kabupaten Sumedang	9,89	9,18
12	Kabupaten Indramayu	9,21	8,30
13	Kabupaten Subang	9,48	9,77
14	Kabupaten Purwakarta	11,07	10,70
15	Kabupaten Karawang	11,52	11,83
16	Kabupaten Bekasi	11,54	10,09
17	Kabupaten Bandung Barat	12,25	11,65
18	Kabupaten Pangandaran	5,08	3,25
19	Kota Bogor	12,68	11,79
20	Kota Sukabumi	12,17	10,78
21	Kota Bandung	11,19	11,46
22	Kota Cirebon	10,97	10,53
23	Kota Bekasi	10,68	10,88
24	Kota Depok	9,87	9,76
25	Kota Cimahi	13,30	13,07
26	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66
27	Kota Banjar	6,73	6,09
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>10,46</b>	<b>9,82</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

**Tabel 5.8**  
**Kategori Capaian TPT Kabupaten/Kota**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding

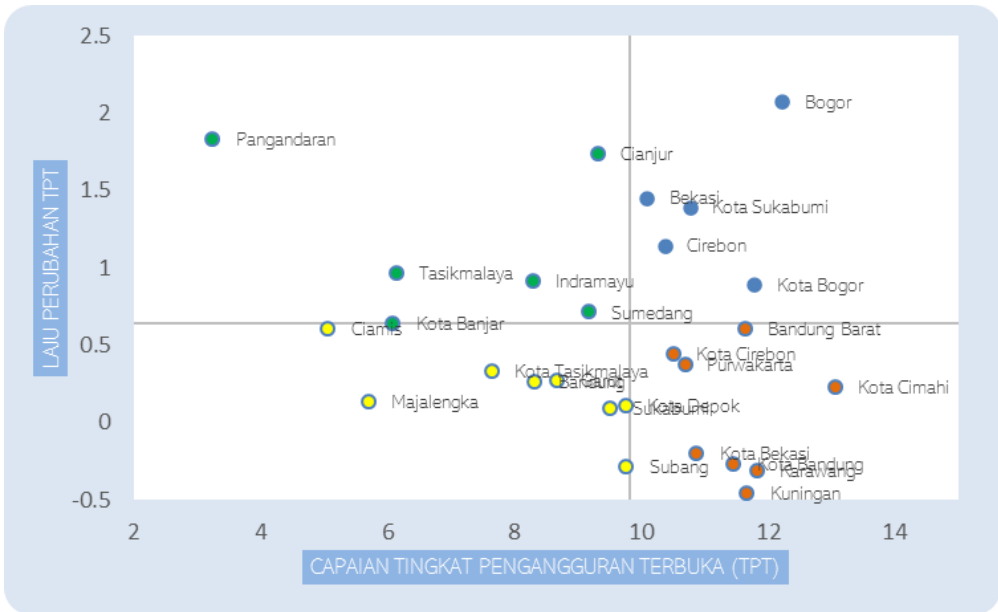
Kuadran	Simbol	Interpretasi
		capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIBAWAH</b> capaian provinsi
<b>II</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIBAWAH</b> capaian provinsi
<b>III</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIATAS</b> capaian provinsi
<b>IV</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIATAS</b> capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2022

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kota Depok, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Subang.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi dan Kota Bekasi.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang dan Kota Banjar.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon dan Kota Sukabumi.



**Gambar 5.3**  
**Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT**  
**Kabupaten/Kota**



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2022

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

**Tabel 5.9**  
**Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota**  
**Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2020-2023**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)	
		TARGET	
		2022	2023
1	Kabupaten Bogor	12,28	11,05
2	Kabupaten Sukabumi	7,40	7,20
3	Kabupaten Cianjur	9,81	9,69
4	Kabupaten Bandung	6,70	5,50
5	Kabupaten Garut	8,41	7,51
6	Kabupaten Tasikmalaya	6,19	6,25
7	Kabupaten Ciamis	4,72	4,81
8	Kabupaten Kuningan	11,01	10,14
9	Kabupaten Cirebon	9,86	8,39
10	Kabupaten Majalengka	5,13	4,88
11	Kabupaten Sumedang	7,99	6,95
12	Kabupaten Indramayu	8,9	8,8
13	Kabupaten Subang	8,88	8,84
14	Kabupaten Purwakarta	10,08	9,91
15	Kabupaten Karawang	9,45	9,7
16	Kabupaten Bekasi	8,37	8,05
17	Kabupaten Bandung Barat	8,77	8,7
18	Kabupaten Pangandaran	4,93	4,84
19	Kota Bogor	11,65	11,33
20	Kota Sukabumi	9,7	9,59
21	Kota Bandung	11,14	11,1
22	Kota Cirebon	9,00	8,50
23	Kota Bekasi	8,40	8,30
24	Kota Depok	7,88	7,69
25	Kota Cimahi	11,37	10,3
26	Kota Tasikmalaya	7,02	6,32
27	Kota Banjar	5,87	5,85
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>10,16</b>	<b>9,69</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

#### **5.1.4 Persentase Penduduk Miskin**

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian Persentase





Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.10**  
**Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)	
		REALISASI	
		2020	2021
1	Kabupaten Bogor	7,69	8,13
2	Kabupaten Sukabumi	7,09	7,7
3	Kabupaten Cianjur	10,36	11,18
4	Kabupaten Bandung	6,91	7,15
5	Kabupaten Garut	9,98	10,65
6	Kabupaten Tasikmalaya	10,34	11,15
7	Kabupaten Ciamis	7,62	7,97
8	Kabupaten Kuningan	12,82	13,1
9	Kabupaten Cirebon	11,24	12,3
10	Kabupaten Majalengka	11,43	12,33
11	Kabupaten Sumedang	10,26	10,71
12	Kabupaten Indramayu	12,7	13,04
13	Kabupaten Subang	9,31	10,03
14	Kabupaten Purwakarta	8,27	8,83
15	Kabupaten Karawang	8,26	8,95
16	Kabupaten Bekasi	4,82	5,21
17	Kabupaten Bandung Barat	10,49	11,3
18	Kabupaten Pangandaran	8,99	9,65
19	Kota Bogor	6,68	7,24
20	Kota Sukabumi	7,7	8,25
21	Kota Bandung	3,99	4,37
22	Kota Cirebon	9,52	10,03
23	Kota Bekasi	4,38	4,74
24	Kota Depok	2,45	2,58
25	Kota Cimahi	5,11	5,35
26	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13
27	Kota Banjar	0,09	7,11
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>8,43</b>	<b>8,4</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

**Tabel 5.11**  
**Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Penurunan <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Penurunan <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Banjar.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten

- Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya.

**Gambar 5.4**  
**Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota**



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2022

Persentase penduduk miskin di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar

dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2021 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2021.

**Tabel 5.12**  
**Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota**  
**Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2020-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)	
		TARGET	
		2022	2023
1	Kabupaten Bogor	7,38	7,14
2	Kabupaten Sukabumi	6,88	6,63
3	Kabupaten Cianjur	10,0510,05	9,76
4	Kabupaten Bandung	6,23	6,06
5	Kabupaten Garut	8,41	7,66
6	Kabupaten Tasikmalaya	10,0310,03	9,81
7	Kabupaten Ciamis	7,38	7,01
8	Kabupaten Kuningan	13,06	12,74
9	Kabupaten Cirebon	9,88	9,14
10	Kabupaten Majalengka	10,8	10,37
11	Kabupaten Sumedang	9,54	7,56
12	Kabupaten Indramayu	11,9511,95	11,5
13	Kabupaten Subang	9,75	9,61
14	Kabupaten Purwakarta	7,63	7,48
15	Kabupaten Karawang	8,72	8,57
16	Kabupaten Bekasi	4,00	3,91
17	Kabupaten Bandung Barat	10,3310,33	10,08
18	Kabupaten Pangandaran	8,12	7,72
19	Kota Bogor	6,12	6,01
20	Kota Sukabumi	7,7	7,5

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)	
		TARGET	
		2022	2023
21	Kota Bandung	3,32	3,14
22	Kota Cirebon	8,55	8,35
23	Kota Bekasi	4,724,72	4,014,01
24	Kota Depok	4,55	4,46
25	Kota Cimahi	5,025,02	4,95
26	Kota Tasikmalaya	11,6611,66	10,9610,96
27	Kota Banjar	6,16	6,04
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>7,677,67</b>	<b>7,547,54</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

### 5.1.5 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota

Pengeluaran Per Kapita disesuaikan kabupaten dan kota menunjukkan kelompok kabupaten/kota dengan pengeluaran per kapita pertahun berada dibawah garis laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase pengeluaran perkapita kabupaten/kota tahun 2020 dibandingkan terhadap provinsi, maka capaian Persentase pengeluaran per kapita kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.





**Tabel 5.13**  
**Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (Ribu Rupiah)	
		REALISASI	
		2020	2021
1	Kabupaten Bogor	10.317	10.410
2	Kabupaten Sukabumi	8.823	8.850
3	Kabupaten Cianjur	7.980	8.052
4	Kabupaten Bandung	10.201	10.307
5	Kabupaten Garut	7.876	7.961
6	Kabupaten Tasikmalaya	7.852	7.829
7	Kabupaten Ciamis	9.288	9.259
8	Kabupaten Kuningan	9.459	9.409
9	Kabupaten Cirebon	10.342	10.368
10	Kabupaten Majalengka	9.521	9.591
11	Kabupaten Sumedang	10.217	10.262
12	Kabupaten Indramayu	9.859	9.810
13	Kabupaten Subang	10.790	10.854
14	Kabupaten Purwakarta	11.614	11.669
15	Kabupaten Karawang	11.315	11.522
16	Kabupaten Bekasi	11.241	11.341

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (Ribu Rupiah)	
		REALISASI	
		2020	2021
17	Kabupaten Bandung Barat	8.455	8.546
18	Kabupaten Pangandaran	9.084	9.065
19	Kota Bogor	11.564	11.716
20	Kota Sukabumi	10.999	10.942
21	Kota Bandung	16.887	16.996
22	Kota Cirebon	11.800	11.810
23	Kota Bekasi	15.776	15.903
24	Kota Depok	15.281	15.420
25	Kota Cimahi	12.025	12.019
26	Kota Tasikmalaya	10.263	10.213
27	Kota Banjar	10.535	10.476
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>10.84510.845</b>	<b>10.934</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

**Tabel 5.14**  
**Kategori Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Pengeluaran Per Kapita <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi..
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Laju Pertumbuhan Penduduknya <b>LEBIH TINGGI</b> dan Pengeluaran Per Kapita <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi.
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk <b>LEBIH RENDAH</b> dan Pengeluaran Per Kapita <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Pengeluaran Per Kapita <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi

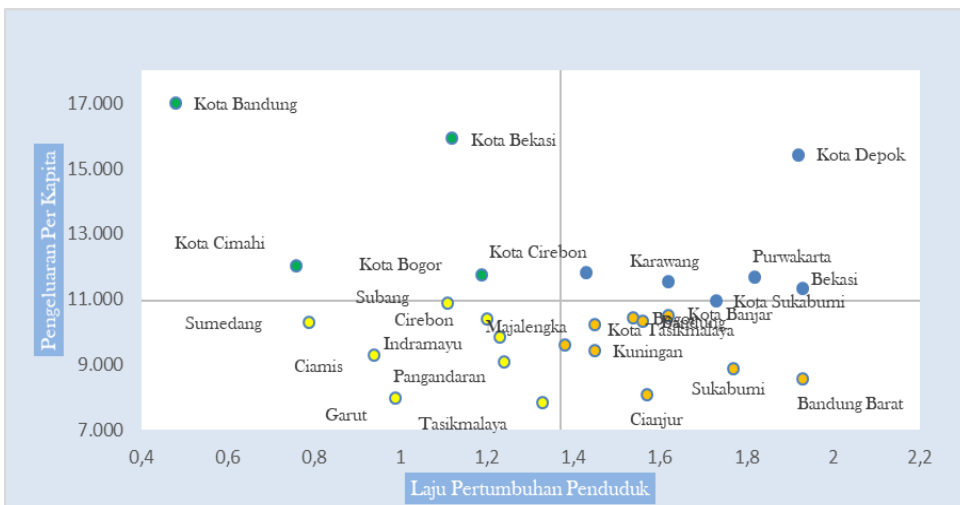
Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2022

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian laju pertumbuhan penduduk dan pengeluaran per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Garut, Kabupaten



- Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Pangandaran.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian laju pertumbuhan penduduk tinggi dan pengeluaran per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Mejalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
  - Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian laju pertumbuhan penduduk lebih rendah dan pengeluaran per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimahi.
  - Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian laju pertumbuhan penduduk dan pengeluaran per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan Kota Depok.

**Gambar 5.5**  
**Analisis Kuadran Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat**



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2022

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Gambar diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang kurang baik tren konsisten menurun.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2021 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022.

**Tabel 5.15**  
**Tabel Pengeluaran per Kapita**

Kode	Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP)			
		2017	2018	2019	2020
3200	JAWA BARAT	10.285	10.790	11.152	10.845
3201	Bogor	9.901	10.323	10.683	10.317
3202	Sukabumi	8.263	8.618	8.973	8.823
3203	Cianjur	7.300	7.874	8.290	7.980
3204	Bandung	9.854	10.203	10.502	10.201
3205	Garut	7.270	7.597	8.099	7.876
3206	Tasikmalaya	7.250	7.761	8.092	7.852
3207	Ciamis	8.658	9.190	9.557	9.288
3208	Kuningan	8.736	9.297	9.673	9.459
3209	Cirebon	9.650	10.212	10.670	10.342
3210	Majalengka	8.833	9.416	9.822	9.521
3211	Sumedang	9.569	10.153	10.406	10.217
3212	Indramayu	9.014	9.633	10.090	9.859
3213	Subang	10.206	10.715	11.012	10.790
3214	Purwakarta	10.941	11.372	11.819	11.614
3215	Karawang	10.703	11.277	11.856	11.315
3216	Bekasi	10.790	11.155	11.610	11.241
3217	Bandung Barat	8.002	8.329	8.684	8.455
3218	Pangandaran	8.588	8.968	9.423	9.084
3271	Kota Bogor	10.940	11.348	11.825	11.564
3272	Kota Sukabumi	10.188	10.609	11.204	10.999
3273	Kota Bandung	16.033	16.630	17.254	16.887



Kode	Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP)			
		2017	2018	2019	2020
3274	Kota Cirebon	11.100	11.397	11.930	11.800
3275	Kota Bekasi	15.378	15.755	16.157	15.776
3276	Kota Depok	14.727	15.262	15.696	15.281
3277	Kota Cimahi	11.353	11.921	12.448	12.025
3278	Kota Tasikmalaya	9.497	9.855	10.414	10.263
3279	Kota Banjar	9.987	10.329	10.705	10.535

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Tim Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

**Tabel 5.16**  
**Penetapan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (Ribu Rupiah)	
		TARGET	
		2022	2023
1	Kabupaten Bogor	10.731	10.945
2	Kabupaten Sukabumi	8.557	8.843
3	Kabupaten Cianjur	8.110	8.421
4	Kabupaten Bandung	10.800	10.980
5	Kabupaten Garut	8.540	8.990
6	Kabupaten Tasikmalaya	7.830	7.951
7	Kabupaten Ciamis	9.334	9.365
8	Kabupaten Kuningan	9.116	9.190
9	Kabupaten Cirebon	10.436	10.484
10	Kabupaten Majalengka	9.410	9.475
11	Kabupaten Sumedang	10.450	10.800
12	Kabupaten Indramayu	9.499	9.599
13	Kabupaten Subang	11.205	11.418
14	Kabupaten Purwakarta	13.000	13.150
15	Kabupaten Karawang	12.026	12.309
16	Kabupaten Bekasi	10.998	11.091
17	Kabupaten Bandung Barat	8.850	9.086
18	Kabupaten Pangandaran	9.277	9.555
19	Kota Bogor	11.534	11.657
20	Kota Sukabumi	10.966	11.129
21	Kota Bandung	17.013	17.227
22	Kota Cirebon	12.307	12.626
23	Kota Bekasi	15.000	15.450
24	Kota Depok	15.240	15.366
25	Kota Cimahi	12.340	12.548
26	Kota Tasikmalaya	9.860	11.150
27	Kota Banjar	10.862	11.109
<b>28</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>11.024</b>	<b>11.394</b>

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023



## **5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota terdiri atas kebijakan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan kebijakan pembangunan kabupaten/kota berbasis prioritas pembangunan daerah provinsi.

### **5.2.1 Kebijakan Pembangunan Berbasis Pengembangan Wilayah**

Arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mengacu pada 6 (enam) Pengembangan wilayah (WP) terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya.

Perencanaan kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan wilayah diperlukan sebagai strategi pengembangan ruang yang mengatur hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia agar kinerja ruang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 5.17**  
**Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat**

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
1	Bodebekpunjur Tema: Mengendalikan perkembangan fisik wilayah	1. Kabupaten Bogor; 2. Kota Bogor; 3. Kabupaten Bekasi; 4. Kota Bekasi; 5. Kota Depok; 6. Kabupaten Cianjur (Puncak)	Sektor unggulan: Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata Fokus pengembangan: a. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi, diarahkan sebagai kota terdepan, berbatasan dengan ibukota negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja;  b. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, mendukung upaya pengendalian banjir melalui pembangunan kanal banjir dan pengelolaan kawasan pesisir serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi (kewenangan provinsi); kawasan pesisir, Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor dan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKL  PKN: Kawasan Perkotaan Bodebek PKL: - Kab.Bekasi: Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibusarah, Setu,  - Kab.Bogor: Cibinong, Cileungsi, Parung, Cigudeg, Caringin, Parungpanjang 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata 4. Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif 5. Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal 6. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi,



NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			Kabupaten Cianjur, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Lindung di KSN Jabodetabekpunjur, dukungan pengembangan pariwisata melalui pembangunan jalan puncak II	jagung, kedelai dan protein hewani) 7. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan 8. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
2.	Purwasuka Tema: Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura	1. Kabupaten Purwakarta; 2. Kabupaten Subang; dan 3. Kabupaten Karawang.	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan.  Fokus Pengembangan: a. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Wilayah pengaruhnya; b. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri nonpolutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam; c. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agroindustri, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral nonlogam; dan d. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW: PKW Cikampek-Cikopo  PKL: - Kab.Purwakarta: Purwakarta - Kab. Karawang: Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat - Kab.Subang: Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Pusakanagara 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor 4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana



NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri nonpolutif dan nonekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, dan tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B. pengelolaan kawasan pesisir	
3.	Ciayumajakuning Tema: Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	1. Kabupaten Cirebon; 2. Kota Cirebon; 3. Kabupaten Indramayu; 4. Kabupaten Majalengka; 5. Kabupaten Kuningan; dan 6. sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata  Fokus Pengembangan: a. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; b. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; industri kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis <i>folklore</i> (batik Trusmi), c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL  PKN: Cirebon  PKW: - Indramayu - Kadipaten  PKL: - Kab.Cirebon: Sumber, Arjawinangun, Lemahabang, Ciledug, Palimanan  - Kab.Indramayu: Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis  - Kab.Majalengka: Majalengka, Kertajati, Talaga, Rajagaluh  - Kab.Kuningan: Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan



NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			<p>air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada lahan pangan, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri;</p> <p>d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan <i>Aerocity</i> di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, dan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi, pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten;</p> <p>e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan</p> <p>f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan pertambangan mineral,</p>	<p>- Kab. Sumedang: Sumedang, Conggeang-Tomo, Wado</p> <p>2. Mengembangkan infrastruktur strategis</p> <p>3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku)</p> <p>4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam</p> <p>5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggir</p> <p>6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak</p> <p>7. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir</p> <p>8. Pengembangan kerja sama wilayah</p> <p>9. Peningkatan kesiapsiagaan bencana</p>
4.	Priangan Timur dan Pangandaran Tema:	1. Kabupaten Garut; 2. Kabupaten Tasikmalaya;	Sektor Unggulan: kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL





NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
	Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan	3. Kota Tasikmalaya; 4. Kabupaten Ciamis; 5. Kota Banjar; dan 6. Kabupaten Pangandaran.	pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral Fokus Pengembangan: a. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; b. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam; c. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya; d. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral nonlogam; e. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; dan	PKW: - Tasikmalaya - Pangandaran  PKL: - Kab.Garut: Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Rancabuaya (Caringin-Mekarmukti-Bungbulang)  - Kab.Tasikmalaya: Singaparna, Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal  - Kab.Ciamis: Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, Cisaga  - Kota Banjar: Banjar  - Kab.Pangandaran: Parigi
				2. Mengembangkan infrastruktur strategis
				3. Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk
				4. Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi
				5. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan
				6. Peningkatan kesiapsiagaan bencana



NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			f. Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.	
5.	Cekungan Bandung Tema: Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah	1. Kota Bandung; 2. Kabupaten Bandung; 3. Kabupaten Bandung Barat; 4. Kota Cimahi; dan 5. sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, agroforestri, industri nonpolutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.  Fokus Pengembangan: a. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; b. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, agroindustri, wisata alam, tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan; c. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, dan PKL  PKN: Kawasan Perkotaan Bandung Raya  PKL: - Kab.Bandung: Ciwidey, Pangalengan  - Kab.Bandung Barat: Cicalong Wetan, Padalarang 2. Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan 3. Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan 4. Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal 5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana



NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			<p>KP2B, tanaman pangan dan hortikultura, industri kreatif dan teknologi tinggi;</p> <p>d. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri nonpolutif; dan</p> <p>e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri nonpolutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B.</p>	
6.	<p>Sukabumi dan sekitarnya</p> <p>Tema: Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kota Sukabumi,</li> <li>Kabupaten Sukabumi, dan</li> <li>Sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur</li> </ol>	<p>Sektor unggulan: kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral, serta perikanan budidaya laut</p> <p>Fokus Pengembangan:</p> <p>a. Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi;</p> <p>b. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL</li> </ol> <p>PKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palabuhanratu</li> <li>Kota Sukabumi</li> </ul> <p>PKL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab.Sukabumi: Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon</li> <li>Kab.Cianjur: Cianjur, Sindangbarang, Sukanagara</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan infrastruktur strategis</li> <li>Mengembangkan agribisnis, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air,</li> </ol>



NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			<p>air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, serta pengembangan subzona perikanan budidaya laut khususnya budidaya lobster antara lain di perairan Sukabumi Selatan, pertambangan mineral logam dan nonlogam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKW Palabuhanratu; dan</p> <p>c. Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agroindustri, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Cidaun, serta pertambangan mineral logam dan nonlogam.</p>	<p>wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus.</p> <p>4. Mengembangkan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global</p> <p>5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana</p> <p>6. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan</p>

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

### **5.2.1.1 Arah Pengembangan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, terkait penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: (1) Kabupaten Subang; (2) Kabupaten Sumedang; (3) Kabupaten Indramayu; (4) Kabupaten Majalengka; (5) Kabupaten Cirebon; (6) Kota Cirebon; dan (7) Kabupaten Kuningan, serta untuk Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi: (1) Kabupaten Sukabumi; (2) Kabupaten Cianjur; (3) Kabupaten Garut; (4) Kabupaten Tasikmalaya; (5) Kabupaten Ciamis; dan (6) Kabupaten Pangandaran.

Arah pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan langkah-langkah strategis, terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdayasaing tinggi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

#### **A. Arah Pengembangan Kawasan Rebana**

Kawasan Rebana menjadi salah satu dari 7 (tujuh) ekonomi baru di Jawa Barat yang menjadi solusi dari dinamika dan masalah pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

#### **B. Arah Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**

Rencana pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berlokasi pada 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Beberapa isu di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan antara lain isu

infrastruktur, agribisnis dan agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu.

Ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi isu Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki kondisi morfologi kawasan yang menyebabkan pembangunan tidak dapat dilakukan secara sporadis sebagaimana pembangunan di wilayah Jawa Barat bagian Tengah maupun utara. Banyaknya wilayah hutan dengan fungsi lindung dan konservasi di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini menjadikan banyak kawasan yang menjadi *negative list* pembangunan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya disparitas ekonomi antarkawasan. Selain itu masih rendahnya tingkat konektivitas Kawasan Jawa Barat bagian Selatan, baik antarkota/kabupaten atau antarkawasan di dalam Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan itu sendiri maupun antara Kawasan Jawa Barat bagian Selatan dengan wilayah di bagian utaranya menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan belum optimal. Investasi di berbagai sektor yang didorong di wilayah ini terhambat oleh faktor keterbatasan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, terutama dalam konteks aksesibilitas antarwilayah. Hal ini pula yang menyebabkan masih cukup banyak kawasan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan yang masih tergolong ke dalam kategori wilayah tertinggal. Terkait hal tersebut sehingga perlu ada pemetaan sesuai dengan potensi wilayah yang ada, sehingga pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa Barat bagian Selatan harus dilakukan. (Sumber Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021)

Keenam kabupaten tersebut merupakan titik pengembangan yang akan dikembangkan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Pangandaran diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan;
2. Kabupaten Ciamis diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis;
3. Kabupaten Tasikmalaya diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan perikanan;
4. Kabupaten Garut diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan;



5. Kabupaten Cianjur diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan; dan
6. Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan.

Kawasan pengembangan pada kabupaten-kabupaten tersebut didukung dengan pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang mendukung masing-masing program di setiap wilayah, baik dari pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya.

### **5.2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi**

Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi antar pemangku kepentingan dan hasil sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka ditetapkan target arah kebijakan pembangunan terhadap kabupaten/kota untuk memenuhi harapan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 menjadi arah kebijakan pembangunan di kabupaten/kota Tahun 2023 yang terdiri dari 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut: 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3) Penguatan system ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Reformasi system perlindungan sosial; 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8) Gerakan membangun desa; 9) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 10) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:



## 1. Kabupaten Bogor

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bogor meliputi :

### a. Aspek Sosial

- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
- 7) Percepatan penurunan *stunting*;
- 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
- 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### b. Aspek Ekonomi

- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
- 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
- 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan; dan
- 5) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.





c. Aspek Infrastruktur

- 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
- 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
- 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
- 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
- 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 7) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
- 8) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
- 9) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

**2. Kabupaten Sukabumi**

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi meliputi :

a) Aspek Sosial

- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
- 7) Percepatan penurunan *stunting*;
- 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan



- 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

### **3. Kabupaten Cianjur**

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur meliputi :

- a) Aspek Sosial
- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;



- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Peningkatan pusat perdagangan masyarakat;
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 4) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 5) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 6) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 7) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 5) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;



- 6) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
- 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
- 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 9) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu Citarum;
- 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

#### **4. Kabupaten Bandung**

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bandung meliputi :

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;



- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan; dan
  - 5) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 7) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 8) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 9) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 10) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu Citarum;
  - 11) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 12) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 13) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 14) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 5. Kabupaten Garut

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Garut meliputi :

- a) Aspek Sosial
- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;



- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;



- 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 6. Kabupaten Tasikmalaya

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi :

### a) Aspek Sosial

- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
- 7) Percepatan penurunan *stunting*;
- 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
- 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### b) Aspek Ekonomi

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
- 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
- 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
- 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
- 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.

c) Aspek Infrastruktur

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
- 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
- 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
- 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
- 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
- 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

**7. Kabupaten Ciamis**

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Ciamis meliputi :

a) Aspek Sosial

- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;





- 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Pengembangan pusat budaya masyarakat;
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 4) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 5) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 6) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 7) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 7) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 8) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 9) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.



## 8. Kabupaten Kuningan

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Kuningan meliputi :

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
  
- c) Aspek Infrastruktur
  - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;



- 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
- 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
- 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
- 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
- 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
- 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 9. Kabupaten Cirebon

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon meliputi :

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



- b) Aspek Ekonomi
  - a) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - c) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - d) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - e) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - f) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
  
- c) Aspek Infrastruktur
  - 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 7) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 8) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 9) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 10. Kabupaten Majalengka

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;



- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 7) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;

- 8) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
- 9) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 11. Kabupaten Sumedang

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sumedang meliputi:

### a) Aspek Sosial

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan;
- 2) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 3) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 4) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 5) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 6) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 7) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
- 8) Percepatan penurunan *stunting*;
- 9) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
- 10) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### b) Aspek Ekonomi

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;



- 2) Peningkatan sarana pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 10) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu Citarum;
  - 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
  - 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 12. Kabupaten Indramayu

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Indramayu meliputi:

- a) Aspek Sosial
- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;



- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;



- 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 9) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu Citarum;
- 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

### 13. Kabupaten Subang

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Subang meliputi:

#### a) Aspek Sosial

- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
- 7) Percepatan penurunan *stunting*;
- 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
- 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### b) Aspek Ekonomi

- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
- 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;



- 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 7) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 8) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 9) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 10) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum dan DAS Cilamaya;
  - 11) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 12) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
  - 13) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 14) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

#### **14. Kabupaten Purwakarta**

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a) Aspek Sosial
- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;



- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif dan kesenian (*Creative Center*);
  - 2) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 4) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 5) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 6) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 7) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;

- 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 9) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum dan DAS Cilamaya;
- 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 15. Kabupaten Karawang

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Karawang meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
  - 2) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;



- 4) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 5) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 10) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Cilamaya dan DAS Citarum;
  - 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 16. Kabupaten Bekasi

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bekasi meliputi:

- a) Aspek Sosial
- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
  - 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;



- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 7) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 8) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum dan DAS Kali Bekasi;
  - 9) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan



11) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 17. Kabupaten Bandung Barat

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi:

### a) Aspek Sosial

- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
- 7) Percepatan penurunan *stunting*;
- 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
- 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### b) Aspek Ekonomi

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
- 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
- 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
- 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
- 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.

### c) Aspek Infrastruktur

- 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;



- 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
- 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
- 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
- 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 7) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
- 8) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
- 9) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 10) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum;
- 11) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 12) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 13) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 14) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## **18. Kabupaten Pangandaran**

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran meliputi:

### a) Aspek Sosial

- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
- 3) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
- 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
- 5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
- 7) Percepatan penurunan *stunting*;





- 8) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 9) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta desa wisata;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan;
  - 5) Optimalisasi lahan tidur; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
  - 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
  - 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 19. Kota Bogor

Arah pengembangan wilayah Kota Bogor meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 2) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 3) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 5) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 6) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 7) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
  
- c) Aspek Infrastruktur
  - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 8) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;



- 9) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 11) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 20. Kota Sukabumi

Arah pengembangan wilayah Kota Sukabumi meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 3) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 7) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 8) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
  - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;

- 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
- 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 6) Pembangunan embung/situ untuk pengendalian banjir;
- 7) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 8) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 9) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 11) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 21. Kota Bandung

Arah pengembangan wilayah Kota Bandung meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 3) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 7) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 8) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.



- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Penataan Ruang Terbuka Publik;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 7) Pembangunan embung/situ untuk pengendalian banjir;
  - 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 9) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum;
  - 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 22. Kota Cirebon

Arah pengembangan wilayah Kota Cirebon meliputi:

- a) Aspek Sosial
- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 3) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
  - 6) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 7) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 8) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif dan kesenian (*Creative Center*)
  - 2) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 4) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 5) Pengembangan usaha pertanian melalui klaster pertanian, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan; dan
  - 6) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
  
- c) Aspek Infrastruktur
  - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 8) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 9) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 11) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

### **23. Kota Bekasi**

Arah pengembangan wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 3) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;



- 4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 7) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 8) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan pusat perdagangan masyarakat;
  - 2) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 4) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 5) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk pengendalian banjir;
  - 7) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 8) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Kali Bekasi;
  - 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 24. Kota Depok

Arah pengembangan wilayah Kota Depok meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 2) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 3) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 5) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 6) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 7) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi;
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
  
- c) Aspek Infrastruktur
  - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 7) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 8) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;



- 9) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 10) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 25. Kota Cimahi

Arah pengembangan wilayah Kota Cimahi meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 3) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 7) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 8) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
  - 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;



- 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 7) Pembangunan embung/situ untuk pengendalian banjir;
- 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
- 9) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum;
- 10) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- 11) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
- 12) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
- 13) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 26. Kota Tasikmalaya

Arah pengembangan wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- a) Aspek Sosial
  - 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 3) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 7) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 8) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
  - 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.



- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 6) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian;
  - 7) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 8) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 9) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan;
  - 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 11) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

## 27. Kota Banjar

Arah pengembangan wilayah Kota Banjar meliputi:

- a) Aspek Sosial
- 1) Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;
  - 3) Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Percepatan penurunan *stunting*;
  - 7) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
  - 8) Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Aspek Ekonomi
- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;



- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
  - 3) Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
  - 4) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c) Aspek Infrastruktur
- 1) Pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
  - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
  - 5) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
  - 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 7) Pembangunan embung/situ untuk pengendalian banjir;
  - 8) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
  - 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
  - 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
  - 11) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
  - 12) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

Selain arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan 3 (tiga) aspek di atas, juga terdapat beberapa arah kebijakan yang bersifat khusus, diantaranya:

1. Petani Milenial

Program Petani Milenial bercita-cita mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Jumlah petani muda di Provinsi Jawa Barat masih relatif kecil, perlu dilakukan kolaborasi dari 18 (delapan belas) kabupaten yang tersebar di Jawa Barat untuk mencapai target 5.000 Petani Milenial di Jawa Barat pada tahun 2023.

2. Renaksi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021

Rencana aksi implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 merupakan percepatan pembangunan kawasan



Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Program tersebut meliputi:

- a) penyediaan dan peningkatan infrastruktur transportasi;
- b) pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan;
- c) pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar,
- d) pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air dan e) pembangunan dan peningkatan infrastruktur lainnya.

3. Penanganan Penurunan *Stunting*

4. Peningkatan APM SMA/SMK/Sederajat

Pemerintah daerah tingkat provinsi mempunyai kewenangan untuk meningkatkan serta mengembangkan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya peningkatan APM SMA/SMK/Sederajat dengan menurunkan tingkat Putus Sekolah, serta melakukan proses Pendataan terhadap elemen sekolah.

Dalam upaya pencegahan putus sekolah, pemerintah memberikan program sekolah gratis, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), peningkatan aksesibilitas, serta peningkatan sarana prasarana pembelajaran di sekolah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak hanya meningkatkan sekolah milik pemerintah saja, tetapi juga ikut meningkatkan kualitas pendidikan swasta yang ada di Jawa Barat, melalui pemberian bantuan untuk pembangunan gedung sekolah maupun untuk pemenuhan kebutuhan proses belajar mengajar yang diperlukan disekolah. Oleh karena itu pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan terus melakukan pendataan-pendataan terhadap elemen-elemen sekolah, seperti gedung sekolah, tenaga pendidik/pengajar, sarana prasarana sekolah maupun peserta didik. Data peserta didik terus dipantau/didata untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah.

5. Peningkatan Kualitas SDM

Masyarakat Jawa Barat adalah heterogen, yang terdiri dari berbagai suku dan agama tinggal di Jawa Barat, untuk itu upaya dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat dan beragamaan harus dijaga. Peningkatan dan penguatan fasilitasi sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat, serta meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan dan kewaspadaan terhadap paham-paham

radikalisme dan komunisme terus dilakukan melalui penciptaan sistem kewaspadaan dini masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menghormati terhadap suku dan agama lain, untuk mencegah timbulnya paham radikalisme dan komunisme serta munculnya kerusuhan di masyarakat.

Pendidikan dan sosialisasi terhadap munculnya paham-paham yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban terus dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antara unsur di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, TNI/POLRI serta masyarakat Jawa Barat.

6. Produktivitas Tani dan Ketahanan Pangan

Produktivitas Tani dan Ketahanan Pangan ditingkatkan melalui program Petani Milenial yang bercita-cita mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

7. Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemandirian Pesantren

Peningkatan sarana prasarana dan kemandirian Pesantren diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat serta menurunkan kemiskinan masyarakat Jawa Barat. Pelaksanaan pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) dilembaga pendidikan pondok pesantren sangat penting, dengan tujuan adanya keseimbangan antara ilmu Agama dan ilmu umum, yang akan berdampak dalam pembentukan kemandirian pada pribadi santri serta keselarasan dalam memenuhi kebutuhan aspek dunia dan akhirat.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, ini menjadi Peraturan daerah yang monumental karena merupakan Peraturan Daerah pertama di Indonesia, di mana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren. Ada 3 (tiga) fokus bantuan untuk pondok pesantren sesuai Peraturan Daerah Pesantren, yaitu hak menerima anggaran, hak mendapatkan pembinaan, serta hak menerima pemberdayaan dari pihak pemerintah.

Unsur pemberdayaan dalam Peraturan Daerah Pesantren akan membuat pondok pesantren, alumninya, hingga para kiai tidak

diabaikan. Mereka akan diberdayakan atau dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Jawa Barat, khususnya terkait visi Jabar Juara Lahir dan Batin. Pondok pesantren pun akan mendapatkan penyuluhan dari pemerintah. Meski begitu, penyuluhan tersebut tidak akan mengganggu atau mengubah kurikulum masing-masing.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun memiliki sejumlah program unggulan terkait pesantren maupun keumatan, di antaranya *One Pesantren One Product* (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Magrib Mengaji, hingga *English for Ulama*. Berbagai program di bidang batin tersebut bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Jawa Barat sehingga terwujud Jabar Juara Lahir dan Batin.

8. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan, seperti melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja/kewirausahaan, penyediaan lapangan kerja, serta memberikan bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan serta pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pencegahan penyakit melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terus dilakukan, mengingat jika masyarakat sudah terkena suatu penyakit maka beban pengeluaran untuk biaya pengobatan akan sangat mahal, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan baru. Pemerintah mengupayakan agar masyarakat tetap terus sehat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

9. Pengelolaan Air, Sanitasi, Sampah, dan Limbah

Upaya peningkatan Pengelolaan Air, Sanitasi, Sampah, dan Limbah melalui peningkatan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara, meningkatkan kualitas tutupan lahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

10. Pengelolaan dan Peningkatan Daya Tarik Wisata

Pengelolaan dan peningkatan pariwisata dilaksanakan dengan mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata



tersebut adalah pembangunan atau pengembangan 18 (delapan belas) Desa Wisata, pembangunan 27 destinasi wisata baru, inisiasi pembangunan 6 (enam) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata meliputi, KEK Pariwisata Cikidang-Sukabumi, KEK Aeropolis Majalengka, KEK Lido, KEK Sumedang (Jatigede), KEK Agrowisata Purwakarta, dan KEK Subang.

11. Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur Desa  
Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan, Memperkuat ekonomi desa dan Kawasan perdesaan serta Memperkuat pemerintahan desa.
12. Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan  
Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Jawa Barat terutama masyarakat rentan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan jaminan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dengan menjalin kerja sama dengan pihak lembaga bantuan hukum yang ada serta peran serta masyarakat. Masyarakat rentan diberi pendidikan dan pelatihan untuk mencegah dan melindungi terjadinya tindak kriminalitas/pelecehan. Kegiatan pelatihan-pelatihan pencegahan ini diharapkan agar masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan dini terhadap intoleransi kebebasan beragama sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **5.2.3 Arah Kebijakan Tematik Pembangunan Daerah**

#### **5.2.3.1 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Keterpaduan dan Sinergi Program, Serta Kerjasama Antar Kementerian/Lembaga Maupun Pemerintah Daerah. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Maka dari itu para Bupati/Walikota diinstruksikan untuk:

- a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;





- b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutaakhiran data penerima dengan nama dan alamat;
- d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada gubernur setiap 3 bulan sekali.

Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, telah ditetapkan lokasi prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Kota Bogor;
- b. Kabupaten Purwakarta;
- c. Kabupaten Pangandaran;
- d. Kota Bekasi;
- e. Kabupaten Sukabumi;
- f. Kota Sukabumi;
- g. Kabupaten Ciamis;
- h. Kabupaten Tasikmalaya;
- i. Kota Cimahi; dan
- j. Kota Banjar.

### **5.2.3.2 Percepatan Penurunan Stunting**

Upaya percepatan penurunan *stunting* di Jawa Barat dalam rangka mewujudkan *Jabar Zero New Stunting*, mengingat masih terdapat 816 Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi prioritas penurunan *stunting* sebagaimana daftar yang disajikan pada tabel dibawah ini.



**Tabel 5.18**  
**Desa/Kelurahan yang Menjadi Lokasi Prioritas Penurunan *Stunting***

NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
1	KAB BOGOR	1	BOJONG GEDE	3201220005	3201132009	Bojong Gede	BERITA ACARA PENENTUAN LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 DI KABUPATEN BOGOR Nomor : 022 / INT.PPM / IV / 2022	
		2	BOJONG GEDE	3201220013	3201132008	Rawa Panjang		
		3	BOJONG GEDE	3201220014	3201132007	Pabuaran		
		4	CIBINONG	3201210001	3201011002	Karadenan		
		5	CIBINONG	3201210002	3201011004	Nanggewer		
		6	CIBINONG	3201210010	3201011012	Pabuaran		
		7	CILEUNGI	3201180012	3201072009	Setu Sari		
		8	CILEUNGI	3201180020	3201072001	Pasir Angin		
		9	GUNUNG PUTRI	3201190003	3201022006	Tlajung Udik		
		10	GUNUNG PUTRI	3201190010	3201022002	Bojong Kulur		
	<b>TOTAL</b>		<b>10</b>					
2	KAB.SUKABUMI	1	BANTARGADUNG	3202121001	3202042005	Bantargebang	KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR K5.16/Kep.410/BAPPELIBA NGDA/2022 TENTANG LOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2023	
		2	BANTARGADUNG	3202121002	3202042003	Bojonggaling		
		3	BANTARGADUNG	3202121003	3202042001	Bantargadung		
		4	BANTARGADUNG	3202121004	3202042002	Mangunjaya		
		5	BANTARGADUNG	3202121005	3202042004	Limusnunggal		
		6	BANTARGADUNG	3202121007	3202042007	Boyongsari		
		7	BOJONG GENTENG	3202261002	3202142001	Bojong Genteng		
		8	BOJONG GENTENG	3202261003	3202142005	Bojong Galing		
		9	BOJONG GENTENG	3202261004	3202142002	Cibodas		
		10	BOJONG GENTENG	3202261005	3202142004	Cipanengah		
		11	CARINGIN	3202212003	3202312007	Talaga		
		12	CARINGIN	3202212008	3202312008	Cikembang		
		13	CARINGIN	3202212009	3202312009	Pasirdatar Indah		
		14	CIBADAK	3202210003	3202112002	Sekarwangi		
		15	CIBADAK	3202210010	3202112004	Karangtengah		
		16	CICURUG	3202230001	3202162011	Mekarsari		
		17	CICURUG	3202230006	3202162006	Cisaat		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		18	CICURUG	3202230009	3202161001	Cicurug		
		19	CICURUG	3202230012	3202162004	Benda		
		20	CICURUG	3202230013	3202162010	Kutajaya		
		21	CIDAHU	3202240001	3202172003	Pondok Kaso Tengah		
		22	CIDAHU	3202240007	3202172004	Cidahu		
		23	CIKIDANG	3202280009	3202062007	Bumisari		
		24	CIREUNGHAS	3202172001	3202352002	Cipurut		
		25	CIREUNGHAS	3202172002	3202352001	Cireunghas		
		26	CIREUNGHAS	3202172003	3202352003	Bencyoy		
		27	CIREUNGHAS	3202172005	3202352005	Tegalpanjang		
		28	CISAAT	3202200008	3202292004	Cisaat		
		29	CISAAT	3202200009	3202292006	Babakan		
		30	CISAAT	3202200013	3202292008	Cibatu		
		31	CISAAT	3202200017	3202292002	Sukasari		
		32	CISAAT	3202200019	3202292013	Sukaesmi		
		33	GEGER BITUNG	3202160001	3202402003	Ciengang		
		34	KABANDUNGAN	3202300003	3202192001	Kabandungan		
		35	KABANDUNGAN	3202300005	3202192003	Cihamerang		
		36	KADUDAMPIT	3202190001	3202302003	Muaradua		
		37	KADUDAMPIT	3202190005	3202302001	Kadudampit		
		38	KADUDAMPIT	3202190006	3202302004	Gede Pangrango		
		39	KADUDAMPIT	3202190008	3202302007	Cipetir		
		40	KALAPA NUNGGAL	3202270007	3202182003	Pulosari		
		41	KEBONPEDES	3202171004	3202342001	Kebonpedes		
		42	NAGRAK	3202220001	3202122004	Cisarua		
		43	NAGRAK	3202220002	3202122009	Balekambang		
		44	NAGRAK	3202220004	3202122003	Nagrak Utara		
		45	NAGRAK	3202220010	3202122012	Cihanyawar		
		46	PABUARAN	3202090003	3202372001	Pabuaran		
		47	PABUARAN	3202090004	3202372006	Cibadak		
		48	PALABUHANRATU	3202110011	3202012006	Pasirsuren		
		49	PARUNG KUDA	3202260003	3202132005	Sundawenang		
		50	PARUNG KUDA	3202260008	3202132007	Langensari		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		51	PARUNG KUDA	3202260009	3202132006	Bojong Kokosan		
		52	PARUNG KUDA	3202260010	3202132003	Kompa		
		53	PARUNG KUDA	3202260011	3202132004	Pondok Kaso Landeuh		
		54	PURABAYA	3202131005	3202382003	Pagelaran		
		55	SIMPENAN	3202111003	3202022002	Loji		
		56	SIMPENAN	3202111004	3202022001	Cidadap		
		57	SUKABUMI	3202180001	3202322001	Parungseah		
		58	SUKALARANG	3202173003	3202362004	Titisan		
		59	SUKALARANG	3202173004	3202362003	Cimangkok		
		60	SUKALARANG	3202173005	3202362001	Sukalarang		
		61	SUKARAJA	3202170011	3202332008	Selawangi		
		62	SUKARAJA	3202170012	3202332001	Pasirhalang		
		63	SUKARAJA	3202170013	3202332004	Sukaraja		
		64	SUKARAJA	3202170016	3202332005	Limbangan		
		65	SUKARAJA	3202170017	3202332003	Langensari		
		66	SUKARAJA	3202170021	3202332009	Margaluyu		
		67	SURADE	3202030001	3202242009	Pasiripis		
		68	SURADE	3202030014	3202242006	Kadaleman		
		69	SURADE	3202030015	3202242003	Wanasari		
		70	SURADE	3202030016	3202242005	Sirnasari		
		71	SURADE	3202030018	3202242012	Kademangan		
	<b>TOTAL</b>		<b>71</b>					
<b>3</b>	<b>KAB.CIANJUR</b>	1	CIANJUR	3203200001	3203012002	Nagrak		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2022
		2	CIANJUR	3203200003	3203011009	Sayang		
		3	CIANJUR	3203200005	3203011011	Muka		
		4	CIANJUR	3203200006	3203011008	Bojongherang		
		5	CIANJUR	3203200007	3203011006	Pamoyanan		
		6	CIANJUR	3203200008	3203011007	Sawah Gede		
		7	CIANJUR	3203200009	3203012005	Limbangan Sari		
		8	CIANJUR	3203200010	3203012004	Mekarsari		
		9	CIANJUR	3203200011	3203012001	Babakankaret		
		10	CIBEBER	3203120001	3203032009	Cibokor		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		11	CIDAUN	3203030005	3203232006	Kertajadi		
		12	CILAKU	3203140001	3203042002	Sukasari		
		13	CILAKU	3203140002	3203042004	Sukakerta		
		14	CILAKU	3203140007	3203042003	Sirnagalih		
		15	CIPANAS	3203221001	3203282007	Sindangjaya		
		16	CIPANAS	3203221002	3203282001	Cipanas		
		17	CIPANAS	3203221003	3203282004	Sindanglaya		
		18	CIPANAS	3203221004	3203282006	Palasari		
		19	CIPANAS	3203221005	3203282002	Cimacan		
		20	CIPANAS	3203221006	3203282003	Ciloto		
		21	CIPANAS	3203221007	3203282005	Batulawang		
		22	CIRANJANG	3203170011	3203052001	Ciranjang		
		23	KARANGTENGAH	3203190005	3203072004	Maleber		
		24	KARANGTENGAH	3203190006	3203072010	Sabandar		
		25	KARANGTENGAH	3203190007	3203072002	Bojong		
		26	MANDE	3203180006	3203082003	Jamali		
		27	MANDE	3203180009	3203082002	Bobojong		
		28	PACET	3203220001	3203102010	Ciputri		
		29	PACET	3203220002	3203102001	Ciherang		
		30	PACET	3203220003	3203102007	Cipendawa		
		31	PACET	3203220004	3203102003	Cibodas		
		32	PACET	3203220008	3203102013	Sukatani		
		33	PACET	3203220014	3203102005	Sukanagalih		
		34	SUKALUYU	3203150004	3203092002	Sukamulya		
		35	SUKANAGARA	3203090010	3203142005	Sukamekar		
		36	SUKARESMI	3203230004	3203132003	Ciwalen		
		37	SUKARESMI	3203230006	3203132005	Cibadak		
	<b>TOTAL</b>		<b>37</b>					
<b>4</b>	<b>KAB.BANDUNG</b>	1	ARJASARI	3204150008	3204162008	Pinggirsari	DRAFT SK BUPATI BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT , KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR : /Kep. -	
		2	ARJASARI	3204150009	3204162009	Patrolsari		
		3	BALEENDAH	3204140001	3204321004	Jelegong		
		4	BALEENDAH	3204140002	3204321003	Manggahang		
		5	BALEENDAH	3204140003	3204321001	Baleendah		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		6	BALEENDAH	3204140004	3204321002	Andir	Bappelitbangda/2023 TENTANG PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023	
		7	BALEENDAH	3204140006	3204322005	Bojongmalaka		
		8	BALEENDAH	3204140007	3204322006	Rancamanyar		
		9	BALEENDAH	3204140008	3204321008	Wargamekar		
		10	BANJARAN	3204160003	3204132005	Ciapus		
		11	BANJARAN	3204160010	3204132008	Tarajusari		
		12	CICALENGKA	3204100001	3204252012	Nagrog		
		13	CICALENGKA	3204100006	3204252011	Waluya		
		14	CICALENGKA	3204100007	3204252008	Panenjoan		
		15	CIKANCUNG	3204090001	3204272009	Srirahayu		
		16	CIKANCUNG	3204090003	3204272007	Mekaraksana		
		17	CIKANCUNG	3204090004	3204272004	Cihanyir		
		18	CIKANCUNG	3204090005	3204272002	Cikancung		
		19	CIKANCUNG	3204090009	3204272008	Tanjunglaya		
		20	CIMAUNG	3204030007	3204172002	Jagabaya		
		21	CIPARAY	3204130002	3204292004	Cikoneng		
		22	CIPARAY	3204130003	3204292009	Sigaracipta		
		23	CIPARAY	3204130004	3204292006	Pakutandang		
		24	CIPARAY	3204130006	3204292003	Mekarsari		
		25	CIPARAY	3204130007	3204292001	Ciparay		
		26	CIPARAY	3204130010	3204292011	Serangmekar		
		27	CIPARAY	3204130011	3204292002	Gunungleutik		
		28	CIPARAY	3204130014	3204292013	Bumiwangi		
		29	IBUN	3204070006	3204362009	Sudi		
		30	KATAPANG	3204180004	3204112004	Gandasari		
		31	KATAPANG	3204180009	3204112001	Sangkanhurip		
		32	KATAPANG	3204180010	3204112006	Sukamukti		
		33	MAJALAYA	3204120005	3204332009	Padaulun		
		34	MAJALAYA	3204120006	3204332003	Biru		
		35	MARGAASIH	3204250001	3204102003	Nanjung		
		36	PACET	3204060003	3204302005	Sukarame		
		37	PACET	3204060004	3204302007	Cikawao		
		38	PACET	3204060005	3204302006	Nagrak		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		39	PACET	3204060006	3204302010	Mandalahaji		
		40	PACET	3204060007	3204302004	Maruyung		
		41	PAMEUNGPEUK	3204170003	3204142001	Sukasari		
		42	PAMEUNGPEUK	3204170004	3204142005	Rancamulya		
		43	PAMEUNGPEUK	3204170006	3204142004	Bojongkunci		
		44	PANGALENGAN	3204040002	3204152008	Banjarsari		
		45	PANGALENGAN	3204040008	3204152004	Sukamanah		
		46	PANGALENGAN	3204040009	3204152006	Margamukti		
		47	PANGALENGAN	3204040010	3204152001	Pangalengan		
		48	PANGALENGAN	3204040011	3204152007	Margamulya		
		49	PANGALENGAN	3204040012	3204152010	Tribaktimulya		
		50	PANGALENGAN	3204040013	3204152005	Lamajang		
		51	PASEH	3204080012	3204352001	Cigentur		
		52	PASIRJAMBU	3204020003	3204382010	Tenjolaya		
		53	RANCABALI	3204011005	3204402005	Alamendah		
		54	RANCAEKEK	3204110006	3204282005	Jelegong		
		55	SOREANG	3204190007	3204372001	Soreang		
	<b>TOTAL</b>		<b>55</b>					
<b>5</b>	<b>KAB.GARUT</b>	1	BLUBUR LIMBANGAN	3205290011	3205382004	Surabaya		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	BLUBUR LIMBANGAN	3205290010	3205382006	Neglasari		
		3	BLUBUR LIMBANGAN	3205290012	3205382010	Ciwangi		
		4	BLUBUR LIMBANGAN	3205290013	3205382014	Pangeureunan		
		5	CILAWU	3205140009	3205192011	Margalaksana		
		6	CILAWU	3205140011	3205192012	Dangiang		
		7	CILAWU	3205140013	3205192008	Mekarmukti		
		8	CILAWU	3205140014	3205192006	Sukahati		
		9	CILAWU	3205140015	3205192015	Mangkurayat		
		10	CILAWU	3205140016	3205192009	Desakolot		
		11	BAYONGBONG	3205150010	3205172017	Cinisti		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		12	CILAWU	3205140017	3205192016	Ngamplang		
		13	GARUT KOTA	3205190004	3205011002	Kotawetan		
		14	GARUT KOTA	3205190011	3205011006	Sukamantri		
		15	MEKARUKTI	3205031003	3205322001	Mekarmukti		
		16	MEKARUKTI	3205031001	3205322002	Karangwangi		
		17	WANARAJA	3205210005	3205032007	Sukamenak		
		18	WANARAJA	3205210016	3205032011	Wanajaya		
	<b>TOTAL</b>		<b>18</b>					
<b>6</b>	<b>KAB.TASIKMALAYA</b>	1	BOJONGASIH	3206071002	3206092003	Bojongasih		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	BOJONGASIH	3206071003	3206092004	Sindangsari		
		3	BOJONGASIH	3206071004	3206092002	Cikadongdong		
		4	CIAWI	3206260003	3206362002	Bugel		
		5	CIAWI	3206260007	3206362008	Citamba		
		6	CIGALONTANG	3206200001	3206272014	Sirnagalih		
		7	CIGALONTANG	3206200011	3206272016	Sirnaputra		
		8	CIGALONTANG	3206200012	3206272008	Sirnaraja		
		9	CIGALONTANG	3206200002	3206272001	Kersamaju		
		10	CIGALONTANG	3206200003	3206272015	Tanjungkarang		
		11	CIGALONTANG	3206200007	3206272005	Lengkongjaya		
		12	CINEAM	3206150012	3206202010	Madiasari		
		13	CISAYONG	3206230002	3206322001	Cisayong		
		14	CISAYONG	3206230003	3206322002	Sukajadi		
		15	CISAYONG	3206230004	3206322003	Sukasukur		
		16	CISAYONG	3206230006	3206322011	Sukaraharja		
		17	CISAYONG	3206230010	3206322010	Purwasari		
		18	CISAYONG	3206230001	3206322013	Santanamekar		
		19	CISAYONG	3206230009	3206322006	Cikadu		
		20	CULAMEGA	3206072002	3206102002	Cintabodas		
		21	CULAMEGA	3206072003	3206102001	Cikuya		
		22	CULAMEGA	3206072004	3206102003	Cipicung		
		23	JAMANIS	3206250001	3206352006	Karangsembung		
		24	JAMANIS	3206250002	3206352001	Condong		
		25	JAMANIS	3206250004	3206352003	Sindangraja		





NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		26	JAMANIS	3206250006	3206352004	Karangmulya		
		27	JAMANIS	3206250008	3206352005	Geresik		
		28	JATIWARAS	3206141001	3206192009	Mandalamekar		
		29	JATIWARAS	3206141002	3206192008	Kersagalih		
		30	JATIWARAS	3206141003	3206192007	Ciwarak		
		31	JATIWARAS	3206141004	3206192005	Jatiwaras		
		32	JATIWARAS	3206141005	3206192006	Papayan		
		33	JATIWARAS	3206141006	3206192004	Neglasari		
		34	JATIWARAS	3206141009	3206192003	Sukakerta		
		35	KADIPATEN	3206261002	3206372005	Buniasih		
		36	KADIPATEN	3206261005	3206372003	Cibahayu		
		37	KADIPATEN	3206261003	3206372004	Mekarsari		
		38	KARANGJAYA	3206151001	3206212004	Citalahab		
		39	MANGUNREJA	3206192001	3206252005	Pasirsalam		
		40	MANGUNREJA	3206192002	3206252006	Sukaluyu		
		41	MANGUNREJA	3206192003	3206252001	Sukasukur		
		42	MANGUNREJA	3206192004	3206252002	Salebu		
		43	PADAKEMBANG	3206212002	3206292002	Rancapaku		
		44	PUSPAHIANG	3206111005	3206152006	Pusparahayu		
		45	PUSPAHIANG	3206111007	3206152007	Cimanggu		
		46	RAJAPOLAH	3206240006	3206342005	Sukaraja		
		47	SALOPA	3206140004	3206182008	Karyamandala		
		48	SALOPA	3206140003	3206182001	Mandalahayu		
		49	SALOPA	3206140005	3206182002	Mulyasari		
		50	SALOPA	3206140006	3206182006	Tanjungsari		
		51	SALOPA	3206140007	3206182007	Mandalaguna		
		52	SALOPA	3206140008	3206182003	Kawitan		
		53	SALOPA	3206140009	3206182004	Mandalawangi		
		54	SALOPA	3206140018	3206182005	Karyawangi		
		55	SINGAPARNA	3206190012	3206242008	Sukamulya		
		56	SINGAPARNA	3206190021	3206242005	Cikunir		
		57	SINGAPARNA	3206190020	3206242004	Cintaraja		
		58	SUKAHENING	3206231001	3206332001	Banyurasa		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		59	SUKARAJA	3206130008	3206172007	Margalaksana		
		60	SUKARAME	3206191003	3206262002	Suka Menak		
		61	SUKARAME	3206191004	3206262004	Padasuka		
		62	SUKARAME	3206191006	3206262001	Sukarame		
		63	SUKARESİK	3206271002	3206392001	Cipondok		
		64	SUKARESİK	3206271005	3206392003	Sukaratu		
		65	TARAJU	3206100001	3206132006	Banyuasih		
		66	TARAJU	3206100002	3206132001	Taraju		
		67	TARAJU	3206100005	3206132002	Cikubang		
	<b>TOTAL</b>		<b>67</b>					
<b>7</b>	<b>KAB.KUNINGAN</b>	1	CIAWIGEBANG	3208100002	3208102024	Cijagamulya		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	CIAWIGEBANG	3208100007	3208102017	Keramatmulya		
		3	CIAWIGEBANG	3208100009	3208102005	Ciputat		
		4	CIAWIGEBANG	3208100011	3208102022	Dukuhdalem		
		5	CIAWIGEBANG	3208100014	3208102009	Pangkalan		
		6	CIAWIGEBANG	3208100016	3208102002	Kadurama		
		7	CIAWIGEBANG	3208100027	3208102014	Cigarukgak		
		8	CIAWIGEBANG	3208100029	3208102011	Sukaraja		
		9	CIAWIGEBANG	3208100031	3208102020	Padarama		
		10	CIAWIGEBANG	3208100032	3208102015	Sukadana		
		11	CIBEUREUM	3208071004	3208282002	Sumurwiru		
		12	CIDAHU	3208090017	3208112007	Cikeusik		
		13	CIGANDAMEKAR	3208171001	3208322005	Sangkanurip		
		14	CIGANDAMEKAR	3208171002	3208322011	Sangkanmulya		
		15	CIGANDAMEKAR	3208171003	3208322004	Karangmuncang		
		16	CIGANDAMEKAR	3208171004	3208322003	Koreak		
		17	CIGANDAMEKAR	3208171005	3208322002	Jambugeulis		
		18	CIGANDAMEKAR	3208171006	3208322001	Bunigeulis		
		19	CIGANDAMEKAR	3208171007	3208322008	Babakanjati		
		20	CIGANDAMEKAR	3208171008	3208322007	Timbang		
		21	CIGANDAMEKAR	3208171009	3208322006	Panawuan		
		22	CIGANDAMEKAR	3208171010	3208322009	Indapatra		
		23	CIGUGUR	3208140004	3208182007	Puncak		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		24	CIGUGUR	3208140006	3208182009	Cisantana		
		25	CILIMUS	3208170015	3208132009	Linggajati		
		26	CILIMUS	3208170020	3208132020	Caracas		
		27	CILIMUS	3208170022	3208132018	Kaliaren		
		28	CIMAHI	3208081005	3208242012	Cimulya		
		29	CIWARU	3208060001	3208042008	Citundun		
		30	CIWARU	3208060006	3208042007	Sagaranten		
		31	DARMA	3208010018	3208172014	Karangsari		
		32	GARAWANGI	3208120004	3208082003	Pakembangan		
		33	GARAWANGI	3208120006	3208082027	Tembong		
		34	JALAKSANA	3208160002	3208122002	Sidamulya		
		35	JALAKSANA	3208160004	3208122013	Babakanmulya		
		36	JALAKSANA	3208160013	3208122012	Padamenak		
		37	JAPARA	3208161004	3208232004	Japara		
		38	KALIMANGGIS	3208091006	3208272005	Wanasaraya		
		39	KUNINGAN	3208130005	3208091002	Kuningan		
		40	KUNINGAN	3208130006	3208091006	Purwawinangun		
		41	KUNINGAN	3208130014	3208091010	Awirarangan		
		42	LEBAKWANGI	3208110025	3208072025	Manggari		
		43	LEBAKWANGI	3208110028	3208072016	Bendungan		
		44	LURAGUNG	3208080006	3208062005	Luragungtonggoh		
		45	MALEBER	3208111003	3208302001	Garahaji		
		46	MALEBER	3208111007	3208302012	Cikahuripan		
		47	MALEBER	3208111013	3208302016	Buniasih		
		48	NUSAHERANG	3208021002	3208202002	Kertayuga		
		49	NUSAHERANG	3208021008	3208202008	Ciasih		
		50	PANCALANG	3208181012	3208222012	Tarikolot		
		51	PASAWAHAN	3208190001	3208192008	Cibuntu		
		52	PASAWAHAN	3208190010	3208192006	Cimara		
		53	SELAJAMBE	3208040001	3208152002	Cantilan		
		54	SELAJAMBE	3208040002	3208152001	Selajambe		
		55	SELAJAMBE	3208040005	3208152006	Bagawat		
		56	SELAJAMBE	3208040006	3208152005	Jamberama		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		57	SELAJAMBE	3208040007	3208152007	Padahurip		
		58	SINDANGAGUNG	3208121002	3208312002	Kaduagung		
		59	SINDANGAGUNG	3208121004	3208312007	Kertawangunan		
		60	SINDANGAGUNG	3208121007	3208312012	Mekarmukti		
	<b>TOTAL</b>		<b>60</b>					
<b>8</b>	<b>KAB.CIREBON</b>	1	ASTANAJAPURA	3209080004	3209102004	Munjul		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	ASTANAJAPURA	3209080005	3209102005	Sidamulya		
		3	CILEDUG	3209020016	3209022016	Ciledug Tengah		
		4	CILEDUG	3209020017	3209022017	Bojongnegara		
		5	JAMBLANG	3209191004	3209402001	Jamblang		
		6	JAMBLANG	3209191006	3209402003	Wangunharja		
		7	JAMBLANG	3209191014	3209402004	Bojong Wetan		
		8	JAMBLANG	3209191017	3209402007	Bakung Kidul		
		9	JAMBLANG	3209191018	3209402008	Bakung Lor		
		10	KALIWEDI	3209231001	3209292001	Kalideres		
		11	KALIWEDI	3209231004	3209292007	Kaliwedi Kidul		
		12	KALIWEDI	3209231006	3209292004	Ujungsemi		
		13	MUNDU	3209090001	3209122001	Setupatok		
		14	MUNDU	3209090010	3209122010	Banjarwangunan		
		15	MUNDU	3209090011	3209122011	Pamengkang		
		16	PANGENAN	3209081004	3209112006	Beringin		
		17	TALUN	3209111001	3209142001	Sampiran		
		18	TALUN	3209111002	3209142002	Ciperna		
		19	TALUN	3209111003	3209142003	Kecomberan		
		20	TALUN	3209111004	3209142004	Cirebon Girang		
		21	TALUN	3209111006	3209142006	Wanasaba Kidul		
		22	TALUN	3209111007	3209142007	Wanasaba Lor		
		23	TALUN	3209111012	3209142008	Cempaka		
		24	TALUN	3209111013	3209142009	Kepongpongan		
		25	WALED	3209010009	3209012009	Waled Kota		
		26	WALED	3209010012	3209012012	Ambit		
		27	WALED	3209010014	3209012014	Gunungsari		
		28	WERU	3209150008	3209192003	Megu Gede		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
	<b>TOTAL</b>		<b>28</b>					
9	KAB.MAJALENGKA	1	CIKIJING	3210030015	3210032003	Sindangpanji	Keputusan Bupati Majalengka Nomor: KS.02.00.00/KEP.293-DP3AKB/2022 tentang Desa Lokus Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023	
		2	CIKIJING	3210030016	3210032004	Cikijing		
		3	CIKIJING	3210030017	3210032008	Cidulang		
		4	CIKIJING	3210030019	3210032007	Kasturi		
		5	CIKIJING	3210030020	3210032006	Banjaransari		
		6	CIKIJING	3210030021	3210032005	Sindang		
		7	CIKIJING	3210030022	3210032001	Sukasari		
		8	CIKIJING	3210030025	3210032009	Jagasari		
		9	CINGAMBUL	3210031004	3210232003	Maniis		
		10	CINGAMBUL	3210031005	3210232010	Rawa		
		11	CINGAMBUL	3210031007	3210232005	Wangkelang		
		12	DAWUAN	3210150016	3210122021	Baturuyuk		
		13	DAWUAN	3210150018	3210122011	Balida		
		14	JATIWANGI	3210140002	3210112014	Sukaraja Kulon		
		15	JATIWANGI	3210140003	3210112005	Sukaraja Wetan		
		16	JATIWANGI	3210140008	3210112002	Burujul Wetan		
		17	JATIWANGI	3210140009	3210112001	Burujul Kulon		
		18	JATIWANGI	3210140015	3210112009	Ciborelang		
		19	KADIPATEN	3210170001	3210132005	Liangjulang		
		20	KADIPATEN	3210170002	3210132001	Heuleut		
		21	KADIPATEN	3210170004	3210132002	Kadipaten		
		22	KADIPATEN	3210170006	3210132004	Karangsambung		
		23	KASOKANDEL	3210151004	3210242008	Jatimulya		
		24	KASOKANDEL	3210151006	3210242004	Ranjiwetan		
		25	KASOKANDEL	3210151007	3210242003	Ranjikulon		
		26	KASOKANDEL	3210151008	3210242005	Gunungsari		
		27	LEMAHSUGIH	3210010011	3210012014	Sinargalih		
		28	LEMAHSUGIH	3210010012	3210012008	Padarek		
		29	LEUWIMUNDING	3210120013	3210102008	Mirat		
		30	MAJA	3210060008	3210062017	Maja Selatan		
		31	MAJA	3210060009	3210062008	Maja Utara		
		32	MAJALENGKA	3210070001	3210071002	Babakan Jawa		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		33	MAJALENGKA	3210070005	3210071004	Sindangkasih		
		34	MAJALENGKA	3210070006	3210071003	Cicurug		
		35	MAJALENGKA	3210070007	3210071007	Majalengka Wetan		
		36	MAJALENGKA	3210070012	3210071008	Majalengka Kulon		
		37	MALUSMA	3210021002	3210262002	Werasari		
		38	MALUSMA	3210021003	3210262003	Malausma		
		39	MALUSMA	3210021004	3210262007	Banyusari		
		40	MALUSMA	3210021006	3210262005	Cimuncang		
		41	MALUSMA	3210021007	3210262006	Ciranca		
		42	MALUSMA	3210021008	3210262004	Lebakwangi		
		43	MALUSMA	3210021009	3210262001	Sukadana		
		44	PALASAH	3210130009	3210192009	Waringin		
		45	RAJAGALUH	3210100003	3210092003	Payung		
		46	RAJAGALUH	3210100008	3210092008	Rajagaluh Kidul		
		47	SINDANGWANGI	3210110006	3210212005	Sindangwangi		
		48	SINDANGWANGI	3210110010	3210212008	Balagedog		
		49	SUMBERJAYA	3210210007	3210172009	Panjalin Kidul		
		50	SUMBERJAYA	3210210011	3210172012	Panjalin Lor		
		51	TALAGA	3210040010	3210042010	Talagawetan		
	<b>TOTAL</b>		<b>51</b>					
<b>10</b>	<b>KAB.SUMEDANG</b>	1	CIBUGEL	3211090001	3211042002	Buana Mekar		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	CIBUGEL	3211090005	3211042004	Sukaraja		
		3	CIMALAKA	3211160021	3211222011	Citimun		
		4	CIMALAKA	3211160022	3211222010	Licin		
		5	GANEAS	3211061001	3211192007	Cikondang		
		6	GANEAS	3211061006	3211192001	Ganeas		
		7	JATINANGOR	3211010002	3211152005	Sayang		
		8	JATINANGOR	3211010003	3211152006	Mekargalih		
		9	JATINANGOR	3211010009	3211152001	Cikeruh		
		10	JATINANGOR	3211010010	3211152003	Cibeusi		
		11	JATINUNGGAL	3211101001	3211022006	Kirisik		
		12	JATINUNGGAL	3211101002	3211022008	Cipeundeuy		
		13	JATINUNGGAL	3211101004	3211022007	Sukamanah		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		14	JATINUNGGAL	3211101008	3211022001	Sirnasari		
		15	PAMULIHAN	3211032006	3211132001	Cigendel		
		16	PAMULIHAN	3211032010	3211132003	Pamulihan		
		17	PAMULIHAN	3211032011	3211132009	Sukawangi		
		18	RANCAKALONG	3211040006	3211162010	Pasir Biru		
		19	SUKASARI	3211031005	3211122004	Nangerang		
		20	SUKASARI	3211031007	3211122002	Genteng		
		21	SUMEDANG SELATAN	3211050001	3211172010	Sukajaya		
		22	SUMEDANG SELATAN	3211050007	3211172009	Gunasari		
		23	SUMEDANG SELATAN	3211050013	3211171001	Pasanggrahan Baru		
		24	SUMEDANG UTARA	3211060001	3211182009	Sirnamulya		
		25	SUMEDANG UTARA	3211060002	3211182006	Girimukti		
		26	SUMEDANG UTARA	3211060003	3211182005	Mulyasari		
		27	SUMEDANG UTARA	3211060004	3211182004	Padasuka		
		28	WADO	3211100004	3211012001	Cimungkal		
	<b>TOTAL</b>		<b>28</b>					
<b>11</b>	<b>KAB. INDRAMAYU</b>	1	GANTAR	3212011002	3212252002	Sanca	KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR : 444/Kep.152-Dinkes/2022 TENTANG DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023	
		2	TERISI	3212041002	3212262003	Jatimunggul		
		3	TERISI	3212041005	3212262005	Rajasinga		
		4	TERISI	3212041006	3212262006	Karangasem		
		5	KRANGKENG	3212090003	3212092003	Singakerta		
		6	KRANGKENG	3212090011	3212092011	Tanjakan		
		7	JATIBARANG	3212130003	3212132003	Jatibarang Baru		
		8	JATIBARANG	3212130006	3212132006	Jatibarang		
		9	JATIBARANG	3212130007	3212132007	Kebulen		
		10	INDRAMAYU	3212150005	3212152013	Singaraja		
		11	INDRAMAYU	3212150006	3212152014	Singajaya		
		12	LOHBENER	3212170004	3212182004	Langut		
		13	LOHBENER	3212170005	3212182005	Larangan		
		14	LOSARANG	3212180001	3212202001	Ranjeng		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
	<b>TOTAL</b>		<b>14</b>					
12	KAB.SUBANG	1	BLANAKAN	3213220006	3213132003	Blanakan		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	CIASEM	3213180001	3213092006	Sukamandijaya		
		3	CIASEM	3213180008	3213092001	Ciasem Girang		
		4	CIATER	3213021001	3213292002	Ciater		
		5	CIATER	3213021002	3213292003	Nagrak		
		6	CIATER	3213021003	3213292004	Cibeusi		
		7	CIATER	3213021004	3213292005	Cibitung		
		8	CIATER	3213021005	3213292007	Sanca		
		9	CIATER	3213021007	3213292001	Cisaat		
		10	CIBOGO	3213060005	3213172002	Cibogo		
		11	CIPEUNDEUY	3213090005	3213202004	Cipeundeuy		
		12	CIPEUNDEUY	3213090006	3213202005	Wantilan		
		13	COMPRENG	3213160001	3213152008	Sukadana		
		14	COMPRENG	3213160002	3213152002	Sukatani		
		15	COMPRENG	3213160003	3213152007	Kiarasari		
		16	COMPRENG	3213160004	3213152003	Jatireja		
		17	DAWUAN	3213081002	3213272008	Margasari		
		18	DAWUAN	3213081004	3213272004	Situsari		
		19	DAWUAN	3213081005	3213272003	Sukasari		
		20	DAWUAN	3213081007	3213272006	Dawuan Kidul		
		21	DAWUAN	3213081010	3213272009	Batusari		
		22	JALANCAGAK	3213020008	3213122012	Sarireja		
		23	JALANCAGAK	3213020013	3213122011	Kumpay		
		24	KALIJATI	3213080007	3213042011	Kalijati Barat		
		25	LEGONKULON	3213210004	3213212005	Legonwetan		
		26	PABUARAN	3213100005	3213052006	Salamjaya		
		27	PABUARAN	3213100007	3213052003	Pringkasap		
		28	PAMANUKAN	3213190007	3213112004	Pamanukan Kota		
		29	PAMANUKAN	3213190008	3213112006	Pamanukan Hilir		
		30	PAMANUKAN	3213190009	3213112010	Lengkongjaya		
		31	PAMANUKAN	3213190012	3213112009	Mulyasari		
		32	PAMANUKAN	3213190010	3213112007	Pamanukan Sebrang		





NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		33	PATOKBEUSI	3213110004	3213162005	Tambakjati		
		34	PATOKBEUSI	3213110009	3213162001	Rancabango		
		35	SUBANG	3213070002	3213031003	Pasirkareumbi		
		36	SUBANG	3213070003	3213031005	Soklat		
		37	SUBANG	3213070004	3213031004	Karanganyar		
		38	SUBANG	3213070005	3213031002	Cigadung		
		39	SUBANG	3213070006	3213031007	Dangdeur		
		40	SUBANG	3213070007	3213031006	Sukamelang		
		41	SUBANG	3213070012	3213031008	Wanareja		
		42	TAMBAKDAHAN	3213171006	3213252006	Tambakdahan		
		43	TANJUNGSANG	3213040005	3213142004	Sirap		
		44	TANJUNGSANG	3213040006	3213142005	Kawungluwuk		
	<b>TOTAL</b>		<b>44</b>					
<b>13</b>	<b>KAB.KARAWANG</b>	1	CIAMPEL	3215020007	3215042003	Parungmulya		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	KARAWANG BARAT	3215113004	3215011005	Tanjungpura		
		3	KARAWANG BARAT	3215113005	3215011006	Tanjungmekar		
		4	KARAWANG BARAT	3215113006	3215011010	Karangpawitan		
		5	KARAWANG BARAT	3215113007	3215011012	Mekarjati		
		6	KARAWANG BARAT	3215113008	3215011007	Tunggakjati		
		7	KARAWANG TIMUR	3215112006	3215261003	Palumbonsari		
		8	KLARI	3215040007	3215052017	Gintungkerta		
		9	KOTABARU	3215072004	3215252002	Pangulah Selatan		
		10	KOTABARU	3215072005	3215252003	Pangulah Utara		
		11	KOTABARU	3215072008	3215252005	Pucung		
		12	PURWASARI	3215051003	3215292003	Purwasari		
		13	PURWASARI	3215051008	3215292006	Cengkong		
		14	RENGASDENGKLOK	3215150001	3215062008	Kalangsari		
		15	RENGASDENGKLOK	3215150003	3215062006	Karyasari		
		16	RENGASDENGKLOK	3215150007	3215062002	Rengasdengklok Utara		
	<b>TOTAL</b>		<b>16</b>					
<b>14</b>	<b>KAB.BANDUNG BARAT</b>	1	CIHAMPELAS	3217050011	3217102009	Tanjungwangi		Berita Acara Penetapan Lokus
		2	CIHAMPELAS	3217050013	3217102006	Pataruman		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		3	CIHAMPELAS	3217050014	3217102001	Cipatik	Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023	
		4	CIHAMPELAS	3217050016	3217102003	Cihampelas		
		5	CIHAMPELAS	3217050021	3217102004	Mekarjaya		
		6	CIKALONG WETAN	3217140008	3217042002	Cikalong		
		7	CIKALONG WETAN	3217140009	3217042011	Rende		
		8	CIPATAT	3217080001	3217072004	Rajamandala Kulon		
		9	CIPATAT	3217080002	3217072001	Ciptaharja		
		10	CIPATAT	3217080003	3217072002	Cipatat		
		11	CIPATAT	3217080004	3217072003	Citatah		
		12	CIPATAT	3217080005	3217072008	Gunungmasigit		
		13	CISARUA	3217130006	3217032004	Pasirlangu		
		14	GUNUNGHALU	3217020004	3217152001	Sirnajaya		
		15	GUNUNGHALU	3217020005	3217152002	Gununghalu		
		16	NGAMPRAH	3217100005	3217062003	Cilame		
		17	PADALARANG	3217090004	3217082007	Kertajaya		
		18	PADALARANG	3217090006	3217082002	Padalarang		
		19	PADALARANG	3217090007	3217082001	Kertamulya		
		20	SINDANGKERTA	3217030008	3217142005	Cicangkang Girang		
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>						
15	<b>KAB.BEKASI</b>	1	BABELAN	3216090006	3216022001	Bunibakti		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	BABELAN	3216090001	3216021006	Bahagia		
		3	BABELAN	3216090002	3216021007	Kebalen		
		4	BABELAN	3216090003	3216022008	Babelan Kota		
		5	CIBARUSAH	3216030001	3216222006	Cibarusahjaya		
		6	CIBARUSAH	3216030002	3216222005	Cibarusahkota		
		7	CIBARUSAH	3216030004	3216222004	Wibawamulya		
		8	CIBARUSAH	3216030005	3216222001	Sirnajati		
		9	CIBARUSAH	3216030003	3216222007	Sindangmulya		
		10	CIBARUSAH	3216030007	3216222003	Ridomanah		
		11	CIBITUNG	3216070013	3216071001	Wanasari		
		12	CIBITUNG	3216070014	3216072002	Wanajaya		
		13	CIKARANG BARAT	3216071008	3216082007	Sukadanau		
		14	CIKARANG BARAT	3216071010	3216082001	Telagamurni		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		15	CIKARANG UTARA	3216061001	3216092011	Wangunharja		
		16	CIKARANG UTARA	3216061002	3216092009	Harjamekar		
		17	CIKARANG UTARA	3216061006	3216092008	Tanjungsari		
		18	CIKARANG UTARA	3216061010	3216092005	Karangraharja		
		19	CIKARANG UTARA	3216061011	3216092004	Waluya		
		20	KEDUNGWARINGIN	3216050002	3216122006	Bojongsari		
		21	KEDUNGWARINGIN	3216050003	3216122007	Kedungwaringin		
		22	KEDUNGWARINGIN	3216050009	3216122003	Karangmekar		
		23	SERANG BARU	3216021001	3216212004	Jayamulya		
		24	SERANG BARU	3216021002	3216212001	Sukaragam		
		25	SERANG BARU	3216021007	3216212003	Sukasari		
		26	SERANG BARU	3216021008	3216212008	Jayasampurna		
		27	SETU	3216010005	3216182006	Taman Sari		
		28	SETU	3216010007	3216182003	Burangkeng		
		29	SETU	3216010008	3216182004	Cileduk		
		30	SETU	3216010012	3216182001	Cijengkol		
		31	SETU	3216010013	3216182002	Lubangbuaya		
		32	SUKATANI	3216120001	3216152004	Sukaasih		
		33	SUKATANI	3216120004	3216152003	Sukahurip		
		34	TAMBUN SELATAN	3216081006	3216062006	Setiamekar		
		35	TAMBUN SELATAN	3216081009	3216062009	Mangunjaya		
		36	TAMBUN SELATAN	3216081010	3216062010	Sumberjaya		
		37	TAMBUN UTARA	3216082001	3216052008	Karangsatria		
		38	TARUMAJAYA	3216100007	3216012002	Segarajaya		
		39	TARUMAJAYA	3216100005	3216012001	Segaramakmur		
	<b>TOTAL</b>		<b>39</b>					
<b>16</b>	<b>KOTA BEKASI</b>	1	BANTARGEBAH	3275030001	3275071007	Sumur Batu	Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 476/Kep-DPPKB/IV/2022 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan Penurunan	
		2	BEKASI SELATAN	3275030002	3275071008	Jaka Mulya		
		3	BEKASI TIMUR	3275030003	3275071004	Bekasi Jaya		
		4	BEKASI TIMUR	3275030004	3275071003	Aren Jaya		
		5	BEKASI UTARA	3275060001	3275021004	Harapan Jaya		
		6	BEKASI UTARA	3275060002	3275021001	Kaliabang Tengah		
		7	JATIASHIH	3275060003	3275021002	Jatisari		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS			
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD		
				BPS	KEMENDAGRI					
		8	JATIASIH	3275060005	3275021003	Jatirasa	StuntingKota Bekasi Tahun 2023			
		9	JATIASIH	3275060008	3275021005	Jatikramat				
		10	MEDAN SATRIA	3275050001	3275041003	Harapan Mulya				
		11	MEDAN SATRIA	3275050002	3275041004	Pejuang				
		12	MUSTIKAJAYA	3275050004	3275041002	Mustika Jaya				
		13	PONDOKGEDE	3275050007	3275041005	Jatibening				
		14	RAWALUMBU	3275040005	3275011002	Bojong Menteng				
		15	RAWALUMBU	3275040006	3275011001	Bojong Rawalumbu				
		16	RAWALUMBU	3275040008	3275011004	Sepanjang Jaya				
		17	RAWALUMBU	3275070001	3275031006	Pengasinan				
	<b>TOTAL</b>		<b>17</b>							
<b>17</b>	<b>KOTA DEPOK</b>	1	BEJI	3276050001	3276061001	Beji			Sk Walikota Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/49/Kpts/Bappeda/Huk/2022 Tentang Penetapan Kelurahan Lokus Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023 di Kota Depok	
		2	BEJI	3276050002	3276061006	Beji Timur				
		3	BEJI	3276050003	3276061004	Kemirimuka				
		4	BEJI	3276050004	3276061005	Pondok Cina				
		5	BEJI	3276050005	3276061002	Kukusan				
		6	BEJI	3276050006	3276061003	Tanah Baru				
		7	BOJONGSARI	3276011001	3276111007	Duren Seribu				
		8	BOJONGSARI	3276011002	3276111006	Duren Mekar				
		9	BOJONGSARI	3276011003	3276111001	Bojongsari Lama				
		10	BOJONGSARI	3276011004	3276111002	Bojongsari Baru				
		11	BOJONGSARI	3276011005	3276111005	Curug				
		12	BOJONGSARI	3276011006	3276111004	Pondok Petir				
		13	BOJONGSARI	3276011007	3276111003	Serua				
		14	CILODONG	3276031001	3276081004	Kalimulya				
		15	CILODONG	3276031002	3276081005	Jatimulya				
		16	CILODONG	3276031003	3276081003	Kalibaru				
		17	CILODONG	3276031004	3276081002	Cilodong				
		18	CILODONG	3276031005	3276081001	Sukamaju				
		19	CIMANGGIS	3276040007	3276021008	Curug				
		20	CIMANGGIS	3276040009	3276021007	Harjamukti				
		21	CIMANGGIS	3276040010	3276021012	Cisalak Pasar				
		22	CIMANGGIS	3276040011	3276021010	Mekarsari				



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		23	CIMANGGIS	3276040012	3276021009	Tugu		
		24	CIMANGGIS	3276040013	3276021011	Pasir Gunung Selatan		
		25	CINERE	3276061001	3276091001	Cinere		
		26	CINERE	3276061002	3276091002	Gandul		
		27	CINERE	3276061003	3276091004	Pangkalanjati Baru		
		28	CINERE	3276061004	3276091003	Pangkalanjati		
		29	CIPAYUNG	3276021001	3276071002	Cipayung Jaya		
		30	CIPAYUNG	3276021002	3276071004	Bojong Pondok Terong		
		31	CIPAYUNG	3276021003	3276071005	Pondok Jaya		
		32	CIPAYUNG	3276021004	3276071003	Ratujaya		
		33	CIPAYUNG	3276021005	3276071001	Cipayung		
		34	LIMO	3276060001	3276041001	Meruyung		
		35	LIMO	3276060002	3276041002	Grogol		
		36	LIMO	3276060003	3276041003	Krukut		
		37	LIMO	3276060004	3276041004	Limo		
		38	PANCORAN MAS	3276020006	3276011010	Rangkapan Jaya Baru		
		39	PANCORAN MAS	3276020007	3276011011	Rangkapan Jaya		
		40	PANCORAN MAS	3276020008	3276011009	Mampang		
		41	PANCORAN MAS	3276020009	3276011008	Pancoran Mas		
		42	PANCORAN MAS	3276020010	3276011007	Depok Jaya		
		43	PANCORAN MAS	3276020011	3276011006	Depok		
		44	SAWANGAN	3276010003	3276031003	Pengasinan		
		45	SAWANGAN	3276010004	3276031002	Bedahan		
		46	SAWANGAN	3276010005	3276031001	Pasir Putih		
		47	SAWANGAN	3276010006	3276031011	Sawangan Baru		
		48	SAWANGAN	3276010007	3276031010	Sawangan Lama		
		49	SAWANGAN	3276010013	3276031012	Kedaung		
		50	SAWANGAN	3276010014	3276031009	Cinangka		
		51	SUKMA JAYA	3276030006	3276051001	Sukmajaya		
		52	SUKMA JAYA	3276030007	3276051010	Tirtajaya		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		53	SUKMA JAYA	3276030008	3276051004	Mekar Jaya		
		54	SUKMA JAYA	3276030009	3276051003	Abadijaya		
		55	SUKMA JAYA	3276030010	3276051005	Bakti Jaya		
		56	SUKMA JAYA	3276030011	3276051008	Cisalak		
		57	TAPOS	3276041001	3276101006	Cilangkap		
		58	TAPOS	3276041002	3276101007	Cimpaeun		
		59	TAPOS	3276041003	3276101001	Tapos		
		60	TAPOS	3276041004	3276101002	Leuwinanggung		
		61	TAPOS	3276041005	3276101005	Jatijajar		
		62	TAPOS	3276041006	3276101004	Sukamaju Baru		
		63	TAPOS	3276041007	3276101003	Sukatani		
	<b>TOTAL</b>		<b>63</b>					
<b>18</b>	<b>KOTA BANDUNG</b>	1	ANDIR	3273180005	3273051003	Ciroyom		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	ANDIR	3273180006	3273051004	Kebon Jeruk		
		3	ANTAPANI	3273141001	3273201005	Antapani Kidul		
		4	ANTAPANI	3273141002	3273201004	Antapani Tengah		
		5	ARCAMANIK	3273130001	3273241003	Cisaranten Kulon		
		6	ARCAMANIK	3273130003	3273241001	Sukamiskin		
		7	ARCAMANIK	3273130005	3273241003	Cisaranten Endah		
		8	ASTANAANYAR	3273050001	3273101001	Karasak		
		9	BABAKAN CIPARAY	3273020001	3273031005	Margasuka		
		10	BABAKAN CIPARAY	3273020002	3273031006	Cirangrang		
		11	BABAKAN CIPARAY	3273020003	3273031004	Margahayu Utara		
		12	BABAKAN CIPARAY	3273020004	3273031001	Babakan Ciparay		
		13	BABAKAN CIPARAY	3273020005	3273031002	Babakan		
		14	BABAKAN CIPARAY	3273020006	3273031003	Sukahaji		
		15	BANDUNG KIDUL	3273080004	3273211004	Kujangsari		
		16	BANDUNG KULON	3273010005	3273151004	Caringin		
		17	BANDUNG KULON	3273010006	3273151003	Warung Muncang		
		18	BANDUNG KULON	3273010002	3273151005	Cigondewah Kaler		
		19	BATUNUNGGAL	3273160005	3273121003	Cibangkong		
		20	BATUNUNGGAL	3273160003	3273121006	Kebon Gedang		
		21	BATUNUNGGAL	3273160008	3273121005	Kebon Waru		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		22	BOJONGLOA KALER	3273030003	3273041004	Babakan Asih		
		23	BOJONGLOA KALER	3273030005	3273041003	Jamika		
		24	BOJONGLOA KALER	3273030001	3273041001	Kopo		
		25	BOJONGLOA KALER	3273030002	3273041005	Suka Asih		
		26	BOJONGLOA KIDUL	3273040001	3273171005	Cibaduyut Kidul		
		27	BOJONGLOA KIDUL	3273040005	3273171002	Kebon Lega		
		28	BOJONGLOA KIDUL	3273040006	3273171001	Situsaeur		
		29	BUAHBATU	3273090001	3273221003	Cijaura		
		30	BUAHBATU	3273090002	3273221002	Margasari		
		31	BUAHBATU	3273090003	3273221001	Sekejati		
		32	CIBEUNYING KALER	3273220004	3273181004	Cigadung		
		33	CIBEUNYING KIDUL	3273210001	3273141004	Sukamaju		
		34	CIBEUNYING KIDUL	3273210002	3273141003	Cicadas		
		35	CIBIRU	3273110004	3273251002	Cipadung		
		36	CIBIRU	3273110005	3273251001	Palasari		
		37	CICENDO	3273190006	3273061006	Sukaraja		
		38	CIDADAP	3273260001	3273081001	Hegarmanah		
		39	CIDADAP	3273260002	3273081002	Ciumbuleuit		
		40	CINAMBO	3273121002	3273291004	Babakan Penghulu		
		41	COBLONG	3273230004	3273021003	Sadang Serang		
		42	COBLONG	3273230006	3273021004	Dago		
		43	COBLONG	3273230001	3273021001	Cipaganti		
		44	KIARACONDONG	3273150006	3273161004	Cicaheum		
		45	LENGKONG	3273070005	3273131003	Burangrang		
		46	LENGKONG	3273070006	3273131007	Cikawao		
		47	MANDALAJATI	3273142001	3273301001	Jatihandap		
		48	MANDALAJATI	3273142002	3273301002	Karang Pamulang		
		49	PANYILEUKAN	3273111003	3273281003	Cipadung Wetan		
		50	RANCASARI	3273100001	3273231002	Derwati		
		51	RANCASARI	3273100006	3273231004	Mekarjaya		
		52	REGOL	3273060004	3273111001	Cigereleng		
		53	SUKAJADI	3273240001	3273071003	Sukawarna		
		54	SUKASARI	3273250001	3273011004	Sarijadi		





NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		55	UJUNG BERUNG	3273120004	3273261006	Pasirjati		
		56	UJUNG BERUNG	3273120003	3273261007	Pasanggrahan		
	<b>TOTAL</b>		<b>56</b>					
<b>19</b>	<b>KAB. CIAMIS</b>	1	TAMBAKSARI	3207170003	3207162003	Kaso	Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023	
		2	CIMARAGAS	3207140002	3207292003	Raksabaya		
		3	RANCAH	3207180005	3207152002	Kiarapayung		
		4	PANAWANGAN	3207270018	3207102017	Mekarbuana		
		5	CIDOLOG	3207130004	3207052002	Janggala		
		6	PANJALU	3207290002	3207082002	Kertamandala		
		7	RANCAH	3207180004	3207152003	Cileungsir		
		8	LAKBOK	3207110002	3207172019	Puloerang		
		9	PANAWANGAN	3207270009	3207102010	Jagabaya		
		10	SINDANGKASIH	3207221005	3207312002	Gunungcupu		
	<b>TOTAL</b>		<b>10</b>					
<b>20</b>	<b>KAB. PURWAKARTA</b>	1	BABAKANCIKAO	3214101003	3214122008	Mulyamekar	Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023	
		2	BABAKANCIKAO	3214101009	3214122001	Cilangkap		
		3	DARANGDAN	3214060001	3214062010	Pasirangin		
		4	JATILUHUR	3214010016	3214032009	Cisalada		
		5	JATILUHUR	3214010017	3214032008	Mekargalih		
		6	MANIIS	3214020002	3214072003	Sinargalih		
		7	MANIIS	3214020003	3214072002	Citamiang		
		8	MANIIS	3214020006	3214072008	Pasirjambu		
		9	PASAWAHAN	3214090009	3214102004	Ciherang		
		10	PASAWAHAN	3214090015	3214102008	Lebakanyar		
		11	PASAWAHAN	3214090020	3214102002	Pasawahan		
		12	PLERED	3214040004	3214042003	Cibogohilir		
		13	PLERED	3214040005	3214042002	Palinggihan		
		14	PLERED	3214040012	3214042014	Pamoyanan		
		15	PLERED	3214040013	3214042007	Liunggunung		
		16	PLERED	3214040016	3214042015	Sempur		
		17	PURWAKARTA	3214100005	3214011004	Sindangkasih		
		18	PURWAKARTA	3214100006	3214011001	Nageri Kidul		
		19	PURWAKARTA	3214100007	3214011003	Nageri Tengah		





NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023				DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS	
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		20	PURWAKARTA	3214100008	3214011005	Cipaisan		
		21	PURWAKARTA	3214100009	3214011002	Nageri Kaler		
		22	PURWAKARTA	3214100011	3214012010	Citalang		
		23	PURWAKARTA	3214100012	3214011009	Munjuljaya		
		24	PURWAKARTA	3214100016	3214011006	Purwamekar		
		25	SUKASARI	3214011002	3214152004	Sukasari		
		26	SUKATANI	3214050002	3214052007	Cianting		
		27	SUKATANI	3214050007	3214052002	Malangnengah		
		28	SUKATANI	3214050010	3214052005	Cipicung		
		29	SUKATANI	3214050012	3214052014	Sindanglaya		
		30	SUKATANI	3214050013	3214052013	Panyindangan		
	<b>TOTAL</b>		<b>30</b>					
<b>21</b>	<b>KOTA BOGOR</b>	1	BOGOR SELATAN	3271010003	3271011006	Ranggamekar		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	BOGOR SELATAN	3271010016	3271011008	Cikaret		
		3	BOGOR UTARA	3271030003	3271051007	Tanahbaru		
		4	BOGOR TENGAH	3271040004	3271031007	Tegallega		
		5	BOGOR BARAT	3271050007	3271041009	Cilendek Timur		
		6	BOGOR BARAT	3271050013	3271041003	Bubulak		
		7	BOGOR BARAT	3271050016	3271041011	Curug		
		8	TANAH SAREAL	3271060011	3271061009	Kencana		
	<b>TOTAL</b>		<b>8</b>					
<b>22</b>	<b>KOTA CIMAHI</b>	1	CIMAHI SELATAN	3277010001	3277011001	Melong		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	CIMAHI SELATAN	3277010002	3277011002	Cibeureum		
		3	CIMAHI SELATAN	3277010003	3277011003	Utama		
		4	CIMAHI SELATAN	3277010004	3277011004	Leuwigajah		
		5	CIMAHI SELATAN	3277010005	3277011005	Cibeber		
		6	CIMAHI TENGAH	3277020001	3277021001	Baros		
		7	CIMAHI TENGAH	3277020002	3277021002	Cigugur Tengah		
		8	CIMAHI TENGAH	3277020003	3277021003	Karangmekar		
		9	CIMAHI TENGAH	3277020004	3277021004	Setiamanah		
		10	CIMAHI TENGAH	3277020005	3277021005	Padasuka		
		11	CIMAHI TENGAH	3277020006	3277021006	Cimahi		
		12	CIMAHI UTARA	3277030001	3277031001	Pasirkaliki		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		13	CIMAHI UTARA	3277030002	3277031002	Cibabat		
		14	CIMAHI UTARA	3277030003	3277031003	Citeureup		
		15	CIMAHI UTARA	3277030004	3277031004	Cipageran		
	<b>TOTAL</b>		<b>15</b>					
<b>23</b>	<b>KOTA TASIKMALAYA</b>	1	BUNGURSARI	3278071002	3278091002	Sukarindik	Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023	
		2	BUNGURSARI	3278071006	3278091006	Bantarsari		
		3	CIBEUREUM	3278030005	3278061008	Kotabaru		
		4	CIBEUREUM	3278030006	3278061007	Kersanagara		
		5	CIHIDEUNG	3278050002	3278011006	Tuguraja		
		6	CIHIDEUNG	3278050005	3278011003	Cilembang		
		7	CIHIDEUNG	3278050006	3278011004	Argasari		
		8	CIPEDES	3278080001	3278021001	Panglayungan		
		9	CIPEDES	3278080002	3278021002	Cipedes		
		10	CIPEDES	3278080003	3278021003	Nagarasari		
		11	CIPEDES	3278080004	3278021004	Sukamanah		
		12	KAWALU	3278010003	3278051003	Gunungtanda		
		13	KAWALU	3278010008	3278051007	Karanganyar		
		14	KAWALU	3278010010	3278051001	Karsamenak		
		15	MANGKUBUMI	3278060005	3278081004	Linggajaya		
		16	MANGKUBUMI	3278060006	3278081001	Mangkubumi		
		17	TAMANSARI	3278020003	3278071001	Tamansari		
		18	TAMANSARI	3278020002	3278071005	Setiawargi		
		19	TAMANSARI	3278020005	3278071006	Mulyasari		
		20	TAWANG	3278040001	3278031005	Kahuripan		
	<b>TOTAL</b>		<b>20</b>					
<b>24</b>	<b>KOTA CIREBON</b>	1	HARJAMUKTI	3274010001	3274031005	Argasanya	Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023	
		2	HARJAMUKTI	3274010002	3274031001	Kalijaga		
		3	HARJAMUKTI	3274010003	3274031002	Harjamukti		
		4	HARJAMUKTI	3274010004	3274031003	Kecapi		
		5	KEJAKSAN	3274050001	3274011001	Kejaksan		
		6	KEJAKSAN	3274050002	3274011004	Kebonbaru		
		7	KESAMBI	3274040001	3274051005	Karyamulya		
		8	KESAMBI	3274040003	3274051004	Drajat		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		9	KESAMBI	3274040005	3274051001	Pekirangan		
		10	LEMAHWUNGKUK	3274020001	3274021001	Pegambiran		
		11	LEMAHWUNGKUK	3274020002	3274021003	Kesepuhan		
		12	LEMAHWUNGKUK	3274020003	3274021002	Lemahwungkuk		
		13	LEMAHWUNGKUK	3274020004	3274021004	Panjunan		
		14	PEKALIPAN	3274030001	3274041001	Jagasatru		
		15	PEKALIPAN	3274030002	3274041003	Pulasaren		
	<b>TOTAL</b>		<b>15</b>					
25	<b>KOTA SUKABUMI</b>	1	BAROS	3272010009	3272051001	Baros		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	WARUDOYONG	3272030001	3272041003	Dayeuhluhur		
		3	WARUDOYONG	3272030004	3272041005	Benteng		
		4	GUNUNG PUYUH	3272040001	3272011004	Karang Tengah		
		5	CIKOLE	3272050005	3272021005	Cisarua		
		6	CIKOLE	3272050006	3272021006	Subangjaya		
	<b>TOTAL</b>		<b>6</b>					
26	<b>KAB.PANGANDARAN</b>	1	SIDAMULIH	3218060006	3218102006	Kersaratu		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023
		2	CIJULANG	3218020003	3218022004	Kertayasa		
		3	PADAHERANG	3218090003	3218072002	Ciganjeng		
		4	MANGUNJAYA	3218100004	3218062005	Jangraga		
		5	PADAHERANG	3218090006	3218072003	Karangsari		
		6	KALIPUCANG	3218080001	3218082001	Putrapinggan		
		7	PARIGI	3218050007	3218012006	Selasari		
		8	CIJULANG	3218020007	3218022007	Margacinta		
		9	CIMERAK	3218010011	3218032006	Sukajaya		
		10	CIMERAK	3218010009	3218032010	Mekarsari		
		11	SIDAMULIH	3218060002	3218102004	Cikembulan		
		12	CIJULANG	3218020002	3218022003	Cibanten		
		13	KALIPUCANG	3218080002	3218082002	Emplak		
	<b>TOTAL</b>		<b>13</b>					
27	<b>KOTA BANJAR</b>	1	BANJAR	3279010001	3279011006	Situbatu		Berita Acara Penetapan Lokus Prioritas Penanganan
		2	BANJAR	3279010002	3279012005	Neglasari		
		3	PURWAHARJA	3279020001	3279031001	Purwaharja		
		4	PATARUMAN	3279030005	3279021002	Pataruman		



NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA DESA/KELURAHAN 2023			DASAR PENETAPAN DESA/KEL LOKUS		
			KECAMATAN	KODE DESA/KEL		NAMA DESA/KELURAHAN	SK BUPATI/WALIKOTA	BA RAPAT LINTAS OPD
				BPS	KEMENDAGRI			
		5	LANGENSARI	3279040005	3279041004	Muktisari	Stunting Tahun 2023	
	<b>TOTAL</b>		<b>5</b>					
	<b>TOTAL PROVINSI</b>		<b>816</b>					

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah, 2022

Strategi percepatan penurunan *Stunting* di Jawa Barat dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar yakni:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan prilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Sedangkan konvergensi upaya percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Situasi;
2. Rencana Kegiatan;
3. Rembuk *Stunting*;
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa;
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
6. Sistem manajemen data;
7. Publikasi Data *Stunting*; dan
8. Reviu Kinerja Tahunan.

Lokasi prioritas intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* selalu berkoordinasi dengan semua *stakeholder* terkait, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, unsur Akademisi, Bisnis/Swasta, Masyarakat maupun Media masa.

### **5.3 Sinergitas Pembangunan Daerah**

Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsubsektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud yaitu adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain

dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan dalam memperdayakan kelompok masyarakat Jawa Barat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memperdayakan kualitas kehidupan berkelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam angka partisipasi sekolah, daya beli dan kesehatan.

Upaya untuk membangun sinergitas ini, berdasarkan kepada 2 (dua) pendekatan yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal yaitu adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, partisipasi sekolah, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal yaitu adanya keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Berikut tabel Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urusan pemerintahan:

## 1. Pendidikan

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD periode Tahun 2018-2023 adalah bidang Pendidikan. Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan yang harus didukung melalui program-program di bidang Pendidikan. Berikut tabel Sinergi Pembangunan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan.

**Tabel 5.19**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pendidikan**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	
		Jumlah warga negara usia 4-18	Jumlah warga negara usia 7-15	100%	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
		-	Jumlah warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
		Rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional	-	2	
		-	Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,9	
		Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional	-	1,9	
		-	Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,8	
		Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional	-	2	
		-	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8	
		Rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan asesmen nasional	-	1,9	
		-	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8	
		-	Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan	63,64	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
			akreditasi B		
		-	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,8	
		-	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,8	
		Rata-rata kompetensi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-	1,9	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	56%	
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	80%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 2. Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan Kesehatan. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota di bidang kesehatan.

**Tabel 5.20**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi Kabupaten/Kota**  
**Bidang Kesehatan**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Yang Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Rujukan Yang Terakreditasi	95%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio TT 1:4:1000 penduduk (sesuai revisi Renstra Kemenkes)	
2.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Persentase pelayanan			





No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
	(SPM) Bidang Kesehatan	kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	-	100%		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB	-	100%		
			Pelayanan kesehatan ibu hamil		100%	
		-	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan		100%	
		-	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%	
		-	Pelayanan kesehatan balita		100%	
		-	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		100%	
		-	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		100%	
		-	Pelayanan kesehatan pada usia lansia		100%	
		-	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		100%	
		-	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		100%	
		-	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat		100%	
		-	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		100%	
		-	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus		100%	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
			yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)		
3.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC ( <i>Treatment Coverage</i> )	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC ( <i>Treatment Coverage</i> )	90%	
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	16%	
		Jumlah penurunan kematian ibu	Jumlah penurunan kematian ibu	3.274 (Penurunan 22% dari <i>baseline</i> 2019)	
		Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	90%	
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,3%	
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94,6%	
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83% (berdasarkan transformasi sistem kesehatan)	
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	93%	
		Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan KTR	-	474 kabupaten/kota	
		Jumlah kabupaten/ kota >40% FKTP yang menyelenggarakan UBM	-	275 kabupaten/kota	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Jumlah kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	-	385 kabupaten/kota	
		Jumlah kabupaten/ kota dengan minimal 80% posyandu aktif	-	60%	
		Persentase kabupaten/ kota dengan Ketersediaan obat esensial	-	83%	
		Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki griya sehat	-	42 kabupaten/ Kota	
		Jumlah kabupaten/ kota sehat	-	380 kabupaten/ Kota	
		Persentase kabupaten/ kota yang memiliki kinerja baik dalam 8 aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	-	90%	
		-	Persentase tatanan yang menerapkan Kawasan tanpa rokok	80%	
		-	Jumlah puskesmas yang melaksanakan layanan UBM	40%	
		-	Annual parasite Incidence (API) <1/1000 penduduk	<1/1000 penduduk	
		-	Persentase posyandu aktif	80%	
		-	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%	
		-	Persentase capaian 8 aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i>	100%	
		-	Persentase FKTP terakreditasi	90%	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		-	Jumlah puskesmas yang dibangun di kecamatan yang belum memiliki puskesmas	56 puskesmas (15 kabupaten /kota)	
4.	Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang,	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	100%	
5.	sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan industri produk obat tradisional (usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional)	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	-	93%	
		-	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar Dan persyaratan perizinan	79%	
		-	Persentase sarana produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	80%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ditengah upaya pemulihan ekonomi dengan berbagai dinamika yang terjadi, urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu urusan yang terdampak namun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap mengupayakan optimalisasi dalam setiap kebijakan yang ditempuh, Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota untuk urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

**Tabel 5.21**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Presentase rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	14,22%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	28,01%	
		Presentase PDAM dengan kinerja sehat	Presentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase angka BABS di tempat terbuka	1,49%	
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sampah yang Terkelola dengan baik di perkotaan	92,21% (77,64% penanganan 14,57% pengurangan)	
2.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	97,55%	
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,03% akses layak (termasuk 13% akses aman)	
3.	Terlaksananya pengelolaan SDA terpadu	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah Irigasi teknis yang direhabilitasi	110.672 Ha	
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	30.447 Ha	
		Tambahan debit air baku		2,86 m3/detik	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
4.	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	73%	
5.	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian materi teknis RTRW	Penyelesaian materi teknis RTRW	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah  **Target Bimtek RTRW 2023 : 43	Satuan berupa materi teknis RTRW provinsi/kabupaten/kota  Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya
		-	Penyelesaian materi teknis RDTR	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah  **Target Bimtek RDTR 2023 : 189	Satuan berupa materi teknis RDTR kabupaten/kota  Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya
		Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	*Berdasarkan target Persub RTRW  **Target Persub RTRW 2023 : 43	Satuan (yang diharapkan dari Pemda) berupa Perda RTRW provinsi/ kabupaten/ kota  Satuan dari K/L berupa Persetujuan Substansi  Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya
		-	Penetapan RDTR	*Berdasarkan target Persub RTRW  **Target Persub RDTR 2023 : 132	Satuan (yang diharapkan dari Pemda) berupa Perkada RDTR  Satuan dari K/L berupa Persetujuan Substansi  Target dari K/L masih bersifat indikatif, dapat berubah dalam penyusunan RKT di tahap selanjutnya
6.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	6 provinsi, 62 kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Berau Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Paser



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
					Kabupaten Penajam Paser Utara  Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan Kota Tarakan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung  Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Utara Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Kapuas Kabupaten Katingan Kota Palangkaraya Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Lamandau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara  Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara  Provinsi Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
					Kabupaten Pahuwato Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Buol Kabupaten Donggala Kota Palu Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Poso Kabupaten Sigi Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Toli Toli
		Pelaksanaan fasilitasi penerbitan alih fungsi lahan sawah	Pelaksanaan fasilitasi alih fungsi lahan sawah	12 Provinsi	Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Provinsi Bangka Belitung
		Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada daerah aliran sungai (DAS)	6 Daerah Aliran Sungai pada 6 Provinsi, 12 kabupaten/Kota	DAS Aesesa WS Flores Provinsi NTT (Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagakeo)  Danau Matano DAS Larona WS Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Timur)  DAS Lorentz WS Einladen-Digul- Bikuma Provinsi Papua (Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Baeven Digoel, Kabupaten Marauke)  DAS Seputih WS Seputih Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro)





No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
					DAS Tulung WS Ambon-Seram Provinsi Maluku (Kabupaten Maluku Tengah)  DAS Mentaya WS Mentaya-Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Kotawaringin Timur)
		Pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	15 Kasus	DAS Batanghari Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan) Provinsi Jambi (Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin)  Danau Ranau dan Danau Teluk Gelam Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat) Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir)  Danau Rawa Pening dan Kedung Ombo Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali)  DAS Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Barat)  DAS Bali-Penida Provinsi Bali (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem,



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
					Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar)  DAS Parigi – Poso Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Morowali) Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu)  Danau Tempe Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Soppeng)  DAS Memberamo- Tami-Apauvar Provinsi Papua (Kabupaten Sarmi)

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

#### 4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk kabupaten/kota dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.22**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan
		Persentase Warga negara yang terkena relokasi	Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni		keuangan daerah
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	1.459 Ha	
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	-	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	208.764 Unit	
4.	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	100%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Laju Penegakan Perda dan Perkada; Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat; dan Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.23**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
**Serta Perlindungan Masyarakat**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya pelayanan	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan	Jumlah SOP dalam penegakan Perda	10 dokumen	Daerah menyesuaikan besaran target dengah



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	Trantibum yang sesuai standar	Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa) yang ditetapkan	dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa) yang ditetapkan		hasil Kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Jumlah Satgas Linmas Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota	1 Dokumen	
		-	Persentase Satgas Linmas Tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota	100%	
		-	Persentase anggota Satlinmas yang telah Dikukuhkan melalui SK Bupati/ walikota	100%	
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/ kabupaten/ kota yang ditangani	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum Dalam kabupaten/ kota yang ditangani	100%	
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	
		Persentase aparaturnya Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	Persentase aparaturnya Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	50%	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	100%	
		Persentase ketersediaan posko Linmas tingkat kabupaten/ kota	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kecamatan	20%	
		Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 orang/provinsi; 7 orang/ kabupaten/kota	
		Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%	
2.	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	100%	
		Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/ kabupaten/ kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan	20%	
		Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	Jumlah personil TRC yang Dikembangkan teknis manajerialnya	20%	
		Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana Lintas kabupaten/ kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	20%	
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100%	
		Persentase pendampingan	Persentase penanganan	100%	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		penanganan tanggap darurat bencana	tanggap darurat bencana		
3.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%	
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%	
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	25%	
		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang sosial dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.24**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Jumlah lembaga di bidang Kesos yang mendapatkan peningkatan	Jumlah Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	850	Daerah menyesuaikan besaran target Dengan hasil Kortekrenban



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		kualitas pelayanan			g Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah
		Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Jumlah SDM PKH yang mendapatkan peningkatan kapasitas	39351	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	10.000.000	
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	34	
		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	15.000	
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan Pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	34	
		Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB)	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB)	34	
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	38.000	
		Jumlah TJSLBU	Jumlah TJSLBU		



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		(Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	(Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	200	
2	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	100	
		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan	133.000	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	514	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	133.000	
		Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	1.000	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	10.230	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban Bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1.000	
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	-	136	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	10	
		Persentase (%)	Persentase (%) lanjut		





No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	3.400	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50	
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di luar panti	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluarpanti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1.360	
		Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti	2	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	50.000	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2.720	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	25	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti	100	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	250	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	100	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3400	
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100	
		Jumlah alat bantu yang	Jumlah alat bantu yang disediakan di	68	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		disediakan didalam panti	luar panti		
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50	
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1700	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	204.330	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di luar panti	136	
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	340	
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	680	
		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan	Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		penulusuran keluarga			
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100	
		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di luar panti	100	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	136	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	340	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di	1	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		dilaksanakan di dalam panti	luar panti		
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	2	
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah paket Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan luar panti	1	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1000	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3400	
4	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70	
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	7.230	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.000	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Peningkatan Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.25**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Tenaga Kerja**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	72%	Daerah menyesuaikan besaran target Dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	1.546.370 orang	
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	45.000 orang	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan	227.500 orang	



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		kerja	kerja		
3.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak - haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak - hak dasarnya	-	7.056.010 orang	
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	7.056.010 orang	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Jawa Barat melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu berkualitas dan berdaya saing. Dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui Kegiatan prioritas diantaranya pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas pemuda. Beberapa Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.26**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2021	Daerah menyesuaikan besaran target Dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkat minimal 0,1 poin dari kondisi 2021	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 0,5 poin dari kondisi 2021	





No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	90%	Sesuai target RPJMN dan Renstra Kementerian PPA
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Provinsi menyesuaikan dengan hasil proyeksi tahun 2023; Kab/Kota meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2021	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi Dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	75%	Sesuai target RPJMN dan Renstra Kementerian PPA

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 9. Pangan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pangan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.27**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pangan**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah	Provinsi= 20% x cadangan beras total provinsi Kab/kota= 80% x cadangan beras total	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan



No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
				provinsi x rasio jumlah penduduk kab/kota	keuangan daerah
		Persentase daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	12%	
2.	Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas serta terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	94	
		Persentase pangan segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 10. Pertanian

Urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi melalui indikator Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria sehingga Tujuan Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat secara menyeluruh dapat terwujud. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanahan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.28**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pertanian**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	355.157 Bidang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	144.200 Kepala Keluarga	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 11. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.29**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Lingkungan Hidup**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48 poin	
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75% (dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan)	
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	20%-30% (dari total usaha yang diawasi)	
		-	Persentase pengurangan sampah	27%	
		-	Persentase sampah yang ditangani	72%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada bulan Juni 2022, diharapkan terdapat peningkatan kualitas layanan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.30**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 %	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%	
		Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	80%	
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100%	
		Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun	Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun	98%	
		Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	100%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.31**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	13.494 Orang	
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	7.500 Desa	
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	7.500 Desa	
2.	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	5.444 Desa	
		Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	58.291 Desa	
		Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	11.652 Desa	
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	270 Bumdesma	
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	9.000 BUM Desa	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

#### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukkan dari laju pertumbuhan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir yang berangsur menurun dari tahun ke tahun. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.32**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	2.19 Rata-rata Anak per Wanita	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive (mCPR)</i>	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive (mCPR)</i>	62.92%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	7.7%	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59 Indeks (skala 0-100)	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

#### 15. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berhasil meningkatkan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari ketersediaan *website* milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.33**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Komunikasi dan Informatika**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase (%) masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase (%) masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2%	
		Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kab/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	-	100 Orang	
		-	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kab/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	10 Orang	
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan system penghubung layanan Pemerintah Daerah	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan system penghubung layanan Pemerintah Daerah	65%	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase (%) aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase (%) aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100%	
3.	Meningkatnya Penguatan tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Persentase (%) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	80%	
		Persentase (%) ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	-	80%	
		Persentase (%) khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase (%) khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional (tema: protokol kesehatan, vaksin, <i>stunting</i> , dll) sesuai strategi komunikasi	85%	
		Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)	74%	
		Persentase (%) permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase (%) permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	
4.	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase (%) Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan	Persentase (%) Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan	80%	





No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		intra Pemerintah Daerah	intra Pemerintah Daerah		
5.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	-	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kab/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kab/kota cerdas yang sudah ditetapkan	100%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sebagai salah satu urusan bidang yang paling tinggi menyerap angkatan kerja serta menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi pasca pandemi di Provinsi Jawa Barat, tentunya indikator-indikator yang tersaji harus dapat memenuhi target. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.34**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	18%	
2.	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal	Meningkatnya Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal	4%	
		Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	70%	
		Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	3,5%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 17. Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang penanaman modal dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.35**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Penanaman Modal**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Rp1.200 Triliun	Target realisasi Penanaman Modal tahun 2023 disesuaikan dengan target tahun 2022 sebesar Rp1.200 Triliun dan akan dilakukan penyesuaian apabila ada arahan lebih lanjut dari Presiden  Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 18. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kepemudaan dan olahraga dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.36**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Persentase Penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	-	38,46 persen	
		Jumlah Atlet yang berasal dari Provinsi yang masuk Pelatnas	Jumlah Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Pelatnas	10 Orang	
2.	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	Indeks Pembangunan Pemuda	-	56,65 Indeks (skala 0-100)	
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Kab/Kota	1 Dokumen	
		Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Provinsi	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota	100 Orang	
		Persentase Wirausahawan Muda di tingkat Provinsi	Persentase Wirausahawan Muda di tingkat Kabupaten/Kota	0,5%	
3.	Meningkatnya partisipasi organisasi Kepramukaan dalam pembangunan bangsa	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarda	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarda	300 Orang	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 19. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Jawa Barat yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis

dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kebudayaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.37**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Kebudayaan**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,99	
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,82	
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	58,86	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36,00	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12,00	
2.	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0,50	
		Persentase satuan Pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persentase satuan Pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0,46	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 20. Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan

daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang statistik dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.38**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Statistik**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100%	
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	100%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 21. Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*),

keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang persandian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.39**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Persandian**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menguatnya keamanan siber Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Jumlah Lulusan Sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi M pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	100 orang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah Lulusan Peningkatan kompetensi M pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 Orang	
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,5	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	69,2%	
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	3 Daerah	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 22. Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perpustakaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.40**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Perpustakaan**

No.	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan	Indeks Pembangunan	14 indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil
2.	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Literasi Masyarakat	67.3 nilai	Kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

### 23. Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kearsipan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.41**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Kearsipan**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	47317 Orang	
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	17.8%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 24. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Untuk mendukung peningkatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing serta pengawasan perikanan yang *integrative* maka dibutuhkan beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.42**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Kelautan dan Perikanan**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	-	15.800.000 Ha	
		Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	-	34 Provinsi	1. Indikator ini merupakan bentuk dukungan dearth dalam rangka pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.  2. Dearth menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022,





No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	-	1.700.000 Ton	1. Indikator ditujukan untuk Provinsi yang memiliki potensi produksi garam.  2. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
		Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	8.735.580 Ton	1. Perlu memperhatikan penguatan jaminan usaha korporasi nelayan.  2. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
		Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	21.580.000 Ton	1. Indikator diarahkan untuk mendukung Mendukung Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>dan Bandeng yang berlokasi di wilayah Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.</p> <p>2. Indikator diarahkan untuk mendukung salah satu program prioritas KKP yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.</p> <p>3. Agar memperhatikan pelestarian sumber daya laut dan penguatan ekonomi masyarakat melalui budidaya.</p> <p>4. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah</p>
		Konsumsi ikan	-	61,02 Kg/KAP/Th	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Operasi kapal/ <i>Speedboat</i> pengawas	Operasi kapal/ <i>Speedboat</i> pengawas	100 hari	serta kemampuan keuangan daerah 1. Operasi kapal/ <i>Speedboat</i> pengawas dilakukan untuk pengawasan di wilayah kewenangan Provinsi (0-12 mil laut) dan Kabupaten/Kota (Perairan Umum Daratan). 2. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
		Pelaku usaha kelautan dan Perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha kelautan dan Perikanan izin Kabupaten/ Kota yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	2.870 Pelaku Usaha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
		Pokmaswas yang ditumbuhkan dan dikembangkan	-	1.150 Kelompok	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
		Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	-	1 Forum	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					serta kemampuan keuangan daerah

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 25. Pariwisata

Sektor pariwisata telah lama menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Indonesia. pembangunan pariwisata haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat yang utuh dan berkelanjutan. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang baik dapat mendorong akselerasi pemasaran pariwisata Indonesia. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.43**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pariwisata**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	300.000.000 – 315.000.000 perjalanan	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
		Kontribusi PDB Pariwisata	Kontribusi PDB Pariwisata	4,4%	
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp1.279.000.000.000	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 26. Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber

daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.44**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pertanian**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai)	2,36 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,85%	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	2,05%	
		Jumlah Produksi daging	Jumlah Produksi daging	4.647.800 Ton	
		Jumlah produksi susu	Jumlah produksi susu	986.370 Ton	
		Jumlah produksi telur	Jumlah produksi telur	5.831.500 Ton	
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	71,87%	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	50,20%	

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	81%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 27. Kehutanan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kehutanan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.45**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Kehutanan**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	-	200.000 Ha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
2	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	-	1.172.000 Ha	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 28. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta

pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang energi dan sumber daya mineral dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.46**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	-	17,9 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
2	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	-	100%	
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	-	100%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

## 29. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan ekspor. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari meningkatnya kinerja ekspor bernilai tambah tinggi, meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah serta terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting terhadap total nilai ekspor nonmigas secara nasional dengan kontribusi rata-rata mencapai 17,43 persen. Hal ini menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang ekspor barang nonmigas terbesar di Indonesia. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.47**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Perdagangan**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	-	50-75%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	92%	
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	55%	Catatan Indikator Nomor 6 : *Daerah yang belum terdapat kelembagaan SRG (Sistem Resi Gudang)  ** Daerah yang sudah terdapat kelembagaan SRG Lengkap
3	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5,96% - 7,86%	
5	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Tertib Usaha	Tertib Usaha	75-90	
6	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	-	Pertumbuhan implementasi SRG	*33% **5-15%	
		Pertumbuhan Implementasi PLK	-	10-50%	
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	72%	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,9%	
9	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	Inflasi Pangan Bergejolak	3-5%	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

### 30. Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap *input* atau bahan dasar yang diolah. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.48**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Perindustrian**

No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	7,70%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	18,40%	
3	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	21,34 Juta Orang	



No	Kinerja	Indikator		Target 2023	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	USD 160,64 Miliar	
5	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Rp. Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Rp. Triliun)	Rp544,59 Triliun	

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022

### 31. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Transmigrasi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.49**  
**Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Bidang Transmigrasi**

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata- rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata- rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	55,31 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah

Sumber: Permendagri Nomor 81 Tahun 2022



# **BAB VI**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023**



## **BAB VI**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023**

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Jawa Barat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, obligasi daerah, dana umat, serta hibah.

### **6.1 Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2023**

#### **6.1.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2023 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN**  
**untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023**

No	Usulan	Volume	Satuan	Major Project	Kementerian	Lokasi
1	Pembangunan Waduk Cibeet (Kabupaten Bogor)	1	Lokasi		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Bogor
2	Pembangunan Waduk Cijurey (Kabupaten Karawang)	1	Lokasi		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Bogor
3	Pembangunan Jalan Tol Bogor - Serpong via Parung (JORR 3) Kabupaten Bogor (31,11 km)	31.11	km		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Bogor
4	Pembangunan TPA Nangkaleah Kabupaten Tasikmalaya	1	Lokasi		Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kabupaten Tasikmalaya
5	Pengendalian Banjir Kawasan BIJB Kertajati Kab. Majalengka	1	Lokasi		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Majalengka
6	Penyediaan Air Baku TPPAS Legok Nangka	1	Lokasi		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Bandung
7	Pembangunan IPLT Cibeet	1	Unit		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Bandung
8	Pengembangan Food Estate Mangga Gedong Gincu	3806	Ha		Kementerian Pertanian	Kabupaten Sumedang
9	Integrated Farming Sayuran Berbasis Korporasi Petani	231	Ha		Kementerian Pertanian	Kabupaten Sumedang
10	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu (Lanjutan)	1	Lokasi		Kementerian Perhubungan	Kabupaten Sukabumi
11	Pembangunan Embung Rancahilir	75000	m <sup>3</sup>		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Subang
12	Pembangunan TPA Heuleut	1	Unit		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Majalengka



No	Usulan	Volume	Satuan	Major Project	Kementerian	Lokasi
13	Pembangunan TPA Jalupang	1	Lokasi		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Subang
14	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan	10	Km		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Kuningan
15	*Pembangunan Pusat Pendidikan Vokasi/Pelatihan Vokasi	45	Ha	Major Project	Kementerian Perindustrian	Kab. Subang
16	*Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II	13,8	Ha	Major Project	a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Kementerian Dikbud-Ristek.	Kab. Majalengka
17	*Pengembangan Desa Digital (Rebana)	100	Desa	Major Project	a. Kementerian Kominfo; b. Kementerian Desa dan PDTT.	Kab. Majalengka, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang
18	*Pengembangan Desa Digital (Jabsel)	120	Desa	Major Project	a. Kementerian Kominfo; b. Kementerian Desa dan PDTT.	Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Pangandaran
19	*Pengembangan Pusat Jantung Terpadu RSUD Jampang Kulon	13.960	M <sup>2</sup>	Major Project	Kementerian Kesehatan.	Kab. Sukabumi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

\*Berdasarkan Perpres 87 Tahun 2021 (P1)

Selanjutnya disajikan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yang sudah diinput dalam aplikasi Krisna Selaras, sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Pagu Anggaran Indikatif**  
**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2023**  
**untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif DAK Tahun 2023	
		Fisik (Rp.)	Non Fisik (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	1.022.964.575.625	908.065.344.644
2	Dinas Kesehatan	31.888.843.000	2.002.160.000
3	Dinas Sumber Daya Air	56.692.831.810	-
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.104.982.211	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	-	-
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3.200.000.000	
7	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	9.677.237.000	
8	Dinas Perkebunan	493.456.921	
9	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	-	5.500.000.000
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	-	2.419.964.000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	301.800.000
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	898.391.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127.021.926.567</b>	<b>919.187.659.644</b>

Sumber : Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2022 dan Usulan DAK Tahun 2023

Selanjutnya untuk daftar usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang diusulkan didanai melalui DAK Bidang Fisik Tahun 2023 dan statusnya terinput dalam aplikasi Krisna Selaras (diusulkan secara resmi melalui Surat Gubernur) akan disampaikan dalam lampiran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.



## **6.2 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2023**

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2023 dengan sasaran PN RKP Tahun 2023; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan PN RKP Tahun 2023; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2023. Dukungan Program Prioritas dan Pendanaan Daerah terhadap Program prioritas nasional dalam Rancangan RKP 2023 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 6.3**

**Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2023  
serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2023**

NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
	<b>1</b>	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>		
1	01 . 01	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	3.29.03 - Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	3.033.199.350
			3.29.05 - Program Pengelolaan Energi Terbarukan	7.396.312.000
2	01 . 03	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	12.407.394.640
			2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan	458.670.196
			2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.683.420.345
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	6.699.788.999
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	80.000.000
3	01 . 04	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	3.25.02 - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	13.882.156.000
			3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	41.618.572.068
			3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.271.385.036
			3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	127.392.840
			3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.527.135.000
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	6.699.788.999
4	01 . 05	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	2.17.02 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	600.000.000
			2.17.03 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1.200.000.200
			2.17.04 - Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	500.000.025



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			2.17.05 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	47.499.999.955
			2.17.06 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3.550.000.009
			2.17.07 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2.549.999.980
			2.17.08 - Program Pengembangan Umkm	8.609.090.700
			2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.449.999.999
			3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	73.600.000
			3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	3.364.220.277
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	327.199.000
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.000.000
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.187.898.715
5	01 . 06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	2.10.02 - Program Pengelolaan Izin Lokasi	150.000.000
			2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75.000.000
			2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal	2.165.950.000
			2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal	750.000.000
			2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.198.391.000
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.245.728.461
			3.31.02 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	10.704.903.925
			3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri	237.642.653



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	75.000.000
6	01 . 08	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	2.13.05 - Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	6.779.588.000
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	4.331.373.496
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.143.115.670
			5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	16.236.000.000
			5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.554.353.680
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.743.896.448
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	266.005.560
				<b>2</b>
1	02 . 02	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.002.181.000
			3.32.03 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	531.058.750
	<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>		
1	03 . 01	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	2.12.02 - Program Pendaftaran Penduduk	420.000.000
			2.12.03 - Program Pencatatan Sipil	270.000.000
			2.12.04 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	635.000.000
			2.12.05 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan	75.000.000
2	03 . 02	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1.06.02 - Program Pemberdayaan Sosial	8.393.816.403
			1.06.03 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	141.182.700
			1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial	26.345.764.691
			1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	38.846.086.790



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			1.06.06 - Program Penanganan Bencana	4.100.470.175
			1.06.07 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	269.615.920
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.000.000.000
3	03 . 03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	492.450.684.676
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100.000.000
			1.02.03 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	104.216.835.803
4	03 . 04	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	5.065.880.831.288
			1.01.04 - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	13.000.000.000
5	03 . 05	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	2.08.02 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.447.645.000
			2.08.03 - Program Perlindungan Perempuan	700.161.280
			2.08.04 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga	50.000.000
			2.08.05 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	465.800.000
			2.08.06 - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	350.649.000
			2.08.07 - Program Perlindungan Khusus Anak	440.875.680
			2.14.02 - Program Pengendalian Penduduk	11.159.714.000
			2.14.03 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	200.000.000
			2.14.04 - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	10.489.403.489
			2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	14.433.675.030
2.19.03 - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	63.819.823.063			



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			2.19.04 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	550.000.000
6	03 . 07	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.654.262.760
			1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	611.122.540
			1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.035.855.535
			1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	165.154.000
			2.07.02 - Program Perencanaan Tenaga Kerja	213.858.470
			2.07.03 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.906.609.218
			2.07.04 - Program Penempatan Tenaga Kerja	18.242.746.640
			2.07.06 - Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.244.597.135
			2.11.08 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	850.000.000
			2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa	40.685.925.250
			2.13.05 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	23.052.179.000
			2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	14.433.675.030
			2.19.03 - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	63.819.823.063
			2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	294.826.000
			3.25.02 - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	420.144.000
			3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	937.093.480
			3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	940.265.000



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	49.727.668.143
			3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.157.487.697
			3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000
			3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian	74.916.297.357
			3.28.05 - Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	454.999.875
			3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	426.500.000
			3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	1.187.320.744
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	169.304.252
			4.01.07 - Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	275.000.000
			5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	8.502.199.781
			5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.298.936.852
	<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>		
1	04 . 01	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	2.13.02 - Program Penataan Desa	800.000.000
			2.23.03 - Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	85.683.000
2	04 . 02	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	2.13.03 - Program Peningkatan Kerja Sama Desa	175.000.000
			2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan	3.056.590.400
			2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	3.677.692.500
			2.22.06 - Program Pengelolaan Permuseuman	3.600.164.999



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
3	04 . 04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana	650.000.000
			2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan	4.377.429.675
			2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.850.000.000
			2.23.02 - Program Pembinaan Perpustakaan	2.106.472.048
			5.07.02 - Program Pelayanan Penghubung	538.991.640
			8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.400.000.000
			8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	113.568.760.000
			8.01.04 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	900.000.000
			8.01.05 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	800.000.000
			8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.756.996.400
<b>5</b>		<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>		
1	05 . 01	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	2.000.000.000
			2.10.03 - Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	600.000.000
			1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	322.231.780
			1.02.04 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	526.732.200
			1.02.05 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.808.831.180
2	05 . 02	Infrastruktur Ekonomi	3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	234.796.413
			3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.370.066.670



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	2.328.000.000
			3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.544.954.269
			3.26.03 - Program Pemasaran Pariwisata	4.545.651.295
			3.26.05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4.248.547.688
			3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	426.500.000
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	176.645.364
			3	05 . 03
			1.03.03 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.700.000.000
			1.03.04 - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	10.300.000.000
			1.03.05 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.000.000.000
			1.03.06 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.000.000.000
			1.03.08 - Program Penataan Bangunan Gedung	104.604.583.582
			1.03.09 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	267.582.000.000
			1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan	989.214.001.193
			1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi	252.095.920
			1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.657.922.380
			1.04.03 - Program Kawasan Permukiman	14.100.000.000
			1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.000.000.000
			2.10.08 - Program Pengelolaan Tanah Kosong	250.000.000





NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			2.10.10 - Program Penatagunaan Tanah	2.000.000.000
			2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	59.966.613.223
			2.15.03 - Program Pengelolaan Pelayaran	2.980.368.000
			2.15.05 - Program Pengelolaan Perkeretaapian	2.650.000.000
			3.28.06 - Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	250.000.000
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat	91.755.603.642
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.472.144.920
4	05 . 04	Energi dan Ketenagalistrikan	3.29.06 - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.396.276.250
5	05 . 05	Transformasi Digital	1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi	544.561.239
			1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	455.955.080
			2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	54.888.721.430
			2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	94.852.114.050
			2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal	100.000.000
			2.18.06 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	474.849.000
			3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	304.177.150
			4.01.02 - Program Penataan Organisasi	-
			4.01.07 - Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	5.194.372.000
			4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	282.535.000
			5.01.02 - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.082.200.000
5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.245.075.000			



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
	<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>		
1	06 . 01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana	600.000.000
			2.11.02 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup	670.000.000
			2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.363.163.212
			2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	370.000.000
			2.11.05 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	145.781.000
			2.11.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	905.000.000
			2.11.07 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	150.000.000
			2.11.09 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	500.000.000
			2.11.10 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.880.000.000
			2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan	63.955.450.599
			3.28.04 - Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	200.000.000
			3.28.05 - Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	75.000.000
			3.29.02 - Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2.394.747.760
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.193.138.500
			4.01.08 - Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	-



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	120.000.180
2	06 . 02	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan	220.500.000.000
			1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana	8.250.000.000
			1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	68.698.000
			2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.860.000.000
	<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>		
1	07 . 01	Konsolidasi Demokrasi	4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat	85.571.907.500
2	07 . 03	Penegakan Hukum Nasional	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.447.418.775
			4.01.05 - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	6.509.741.650
3	07 . 04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.277.194.207
			1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	66.148.000
			2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.235.692.740
			2.24.02 - Program Pengelolaan Arsip	630.732.348
			2.24.03 - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	121.119.700
			3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.263.513.680
			3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	61.293.433.125
			3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.855.934.360
			3.27.05 - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	30.091.362.142



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian	133.770.836
			3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian	3.982.415.998
			3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	267.438.860
			3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	15.912.620.000
			3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	517.034.680
			3.30.07 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	65.000.000
			4.01.02 - Program Penataan Organisasi	4.023.548.678
			4.01.03 - Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	25.011.400.000
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat	3.125.391.000
			4.01.06 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	382.565.660
			4.01.07 - Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	2.585.000.000
			4.01.08 - Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	759.089.680
			4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	212.803.613.036
			5.01.02 - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	15.257.724.630
			5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.101.977.600
			5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.744.902.250
			5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	13.947.513.422
			5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	94.888.000
			5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.579.708.504



NO	RKP 2023		RKPD 2023	
	KODE PN/PP	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
			5.07.02 - Program Pelayanan Penghubung	1.576.688.360
			8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.400.000.000
			8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	113.568.760.000
			8.01.04 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	900.000.000
			8.01.05 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	800.000.000
			8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.756.996.400
4	07 . 05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.423.032.433
			2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.901.022.200
			3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	30.025.000
			4.01.04 - Program Kesejahteraan Rakyat	450.000.000
			5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	700.000.000

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2022, berdasarkan tagging prioritas nasional pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023

### 6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif.

**Tabel 6.4**  
**Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2023**

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN SASARAN	PAGU ANGGARAN
1.	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	<b>Rp608.753.685.831</b>
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Rp608.753.685.831
2.	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	<b>Rp159.889.721.165</b>
1.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	Rp54.103.953.260
2.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Rp75.950.569.862
3.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	Rp29.835.198.043
3.	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	<b>Rp230.476.395.684</b>
1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Rp230.476.395.684
4.	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	<b>Rp72.880.910.182</b>
1.	Meningkat-nya kualitas dan taraf hidup masyarakat	Rp72.880.910.182
5.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	<b>Rp5.125.442.708.862</b>
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Rp5.110.730.831.288
2.	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	14.711.877.574
6.	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	<b>Rp60.875.333.267</b>
1.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Rp60.875.333.267



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN SASARAN	PAGU ANGGARAN
7.	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	<b>Rp764.134.213.438</b>
1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Rp558.122.572.256
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Rp6.226.460.081
3.	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	Rp85.683.000
4.	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	Rp85.683.000
5.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	Rp14.302.300.000
6.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Rp180.902.902.142
7.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Rp4.408.612.959
8.	Gerakan Membangun Desa	<b>Rp72.644.873.250</b>
1.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Rp72.644.873.250
9.	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	<b>Rp117.525.756.400</b>
1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Rp117.525.756.400
10.	Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>Rp1.671.892.528.778</b>
1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	Rp20.220.535.360
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Rp1.040.261.902.335
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Rp611.410.091.083
11.	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	<b>Rp16.339.153.252</b>
1.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Rp16.339.153.252
<b>TOTAL</b>		<b>Rp8.900.855.280.109</b>

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022

\*Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah per tanggal 8 Juli 2022

Sedangkan rincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6.5**  
**Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

KODE	PERANGKAT DAERAH	RANCANGAN ALOKASI 2023
1.01.01	Dinas Pendidikan	10.416.146.281.732
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.831.104.135.591
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1.154.436.552.128
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air	329.681.892.221
1.04.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	774.780.423.236
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	40.623.984.586
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.212.604.657
1.05.03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	171.365.268.240
1.06.01	Dinas Sosial	174.030.878.251
1.07.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	139.096.127.896
1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	48.438.235.327
1.09.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	146.269.962.408
1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	133.451.379.869
1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.385.126.350
1.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	113.014.066.710
1.15.01	Dinas Perhubungan	150.357.472.638
1.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.186.567.126
1.17.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	103.937.991.606
1.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.149.285.618
1.19.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	168.726.070.236
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	53.670.196.158
2.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	140.169.563.880
2.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	99.277.750.938
2.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	313.320.828.732





KODE	PERANGKAT DAERAH	RANCANGAN ALOKASI 2023
2.03.02	Dinas Perkebunan	87.564.678.441
2.04.01	Dinas Kehutanan	213.430.503.405
2.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100.248.171.376
2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	143.090.695.954
3.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86.537.601.346
3.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.677.585.262.955
3.02.02	Badan Pendapatan Daerah	435.878.998.968
3.03.01	Badan Kepegawaian Daerah	59.173.137.848
3.03.02	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.323.904.434
3.04.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.006.116.861
3.05.03	Sekretariat Daerah	867.593.853.164
3.05.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	478.644.779.852
3.05.05	Inspektorat	104.410.712.069
3.05.10	Badan Penghubung	13.298.517.496
<b>JUMLAH</b>		<b>32.161.619.580.303</b>

Sumber: Hasil olahan Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2022, berdasarkan batasan pagu anggaran Perangkat Daerah per tanggal 14 Juli Tahun 2022

Rancangan pagu diatas telah memuat belanja pegawai, belanja *fixed cost*, prioritas perangkat daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja prioritas lainnya. Untuk rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pagu pendanaannya di jabarkan pada lampiran RKPD tahun 2023 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya pada Tabel 6.6 tentang Proyek Strategis Provinsi tahun 2023, ditetapkan beberapa Proyek Strategis Provinsi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 beserta skema pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan. Daftar Proyek ini disusun sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan provinsi untuk kabupaten/kota di Jawa Barat dan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

**Tabel 6.6**  
**Proyek Strategis Provinsi Tahun 2023**

NO	KELOMPOK PROYEK	NAMA PROYEK	LOKASI KAB. KOTA	STATUS PERENCANAAN	TAHUN PERENCANAAN	STATUS KONSTRUKSI	TAHUN KONSTRUKSI	TAHAPAN PROYEK	SKEMA PENDANAAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	PRIORITAS
1	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Gadobangkong Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi	Selesai	2019	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	18.500.000.000	1
2	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Langensari Kota Banjar	Kota Banjar	Selesai	2019	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	15.000.000.000	1
3	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Ciparay Kab. Bandung	Kab. Bandung	Selesai	2020	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	10.000.000.000	1
4	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Cimahi Kota Cimahi	Kota Cimahi	Selesai	2020	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	16.822.000.000	1
5	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Ciamis Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	Selesai	2020	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BTL	16.000.000.000	1
6	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Ciranjang Kab. Cianjur	Kab. Cianjur	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	16.000.000.000	1
7	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Jatiwangi Kab. Majalengka	Kab. Majalengka	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	11.500.000.000	1
8	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Dadaha Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Pelaksanaan Konstruksi	BL	16.000.000.000	1
9	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Parung Panjang Kab. Bogor	Kab. Bogor	Proses Perencanaan	2022	Tahap Pengusulan	2023	Pelaksanaan Perencanaan	BL	10.000.000.000	1
10	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-alun Kab. Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	14.000.000.000	1



NO	KELOMPOK PROYEK	NAMA PROYEK	LOKASI KAB. KOTA	STATUS PERENCANAAN	TAHUN PERENCANAAN	STATUS KONSTRUKSI	TAHUN KONSTRUKSI	TAHAPAN PROYEK	SKEMA PENDANAAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	PRIORITAS
11	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Pataraksa Kab. Cirebon (lanjutan)	Kab. Cirebon	Selesai	2019	Proses Pembangunan	2021 & 2023	Pelaksanaan Kontruksi	BTL	5.000.000.000	1
12	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Taman Benteng Pancasila Kab. Subang	Kab. Subang	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	21.200.000.000	1
13	Penataan Alun-Alun	Penataan Alun-Alun Karawang Kab. Karawang (lanjutan)	Kab. Karawang	Selesai	2018	Proses Pembangunan	2022 & 2023	Usulan Kontruksi	BL	8.000.000.000	1
14	Pembangunan Pusat Budaya	Pembangunan Pusat Budaya Karangkamulya n Kab. Ciamis	Kab. Ciamis	Selesai	2018	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BTL	12.868.437.000	1
15	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Gebang Mekar Kab. Cirebon	Kab. Cirebon	Selesai	2019	Proses Pembangunan	2023	Usulan Kontruksi	BL	5.000.000.000	1
16	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Destinasi Pariwisata Situ Panjalu	Kab. Ciamis	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	14.991.375.000	1
17	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Destinasi Pariwisata Situ Cisaat Kab. Purwakarta	Kab. Purwakarta	Selesai	2019	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	3.000.000.000	1
18	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Destinasi Pariwisata Situ Kemang Kab. Bogor	Kab. Bogor	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	5.000.000.000	1



NO	KELOMPOK PROYEK	NAMA PROYEK	LOKASI KAB. KOTA	STATUS PERENCANAAN	TAHUN PERENCANAAN	STATUS KONSTRUKSI	TAHUN KONSTRUKSI	TAHAPAN PROYEK	SKEMA PENDANAAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	PRIORITAS
19	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Destinasi Pariwisata Situ Jatijajat Kota Depok	Kota Depok	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	5.000.000.000	1
20	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Karangtawulan Kab. Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya	-	-	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BTL	10.000.000.000	1
21	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Amphiteater Ciletuh	Kab. Sukabumi	Selesai	2019	-	2023	-	-	10.498.885.300	1
22	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Geyser Cisolok Kab. Sukabumi (Lanjutan)	Kab. Sukabumi	Selesai	2020	Proses Pembangunan	2021 & 2023	Pelaksanaan Kontruksi	BTL	11.069.797.000	1
23	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Pangumbahan (Lanjutan)	Kab. Sukabumi	Selesai	2021	Proses Pembangunan	2022 & 2023	Pelaksanaan Kontruksi	BL	5.000.000.000	1
24	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pembangunan Pusat Pencak Silat Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	32.251.049.600	1
25	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Kawasan Kampung Bali	Kota Bekasi	Selesai	-	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BTL	2.941.600.000	1



NO	KELOMPOK PROYEK	NAMA PROYEK	LOKASI KAB. KOTA	STATUS PERENCANAAN	TAHUN PERENCANAAN	STATUS KONSTRUKSI	TAHUN KONSTRUKSI	TAHAPAN PROYEK	SKEMA PENDANAAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	PRIORITAS
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Pariwisata (Lanjutan)	Kab. Cianjur	Selesai	2021	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BTL	22.853.188.600	1
27	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Agro Edu Wisata Penataan Satuan Pelayanan Margahayu Cikole	Kab. Bandung Barat	Proses Perencanaan	2022	Proses Pembangunan	2023	Usulan Kontruksi	BL	13.125.000.000	1
28	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Agro Edu Wisata Perbaikan Laboratorium Kimia Agri	Kab. Bandung Barat	Usulan Perencanaan	2022	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	8.565.000.000	1
29	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Agro Edu Wisata Pengandaan Peralatan Laboratorium Kimia Agro Cikole	Kab. Bandung Barat				2023		BL	5.144.287.200	
30	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pembangunan Embung Sindangsari (Kehati)	Kab. Sumedang	Usulan Perencanaan	2022	Tahap Pengusulan	2023		BL	7.000.000.000	1
31	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pembangunan Embung Wisata Cikanyere	Kab. Cianjur		2022		2023		BL	2.500.000.000	1
32	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jasa Konsultasi Perencanaan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Batujaya	Kab. Karawang		2022		2023		BL	350.000.000	1



NO	KELOMPOK PROYEK	NAMA PROYEK	LOKASI KAB. KOTA	STATUS PERENCANAAN	TAHUN PERENCANAAN	STATUS KONSTRUKSI	TAHUN KONSTRUKSI	TAHAPAN PROYEK	SKEMA PENDANAAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	PRIORITAS
33	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Curug Dago	Kota Bandung		2022		2023		BL	350.000.000	1
34	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Buper Kiara Payung Sebagai Destinasi Wisata	Kab. Sumedang		2022		2023		BL	500.000.000	1
35	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Agro Edu Wisata Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Sapi Perah dan Hijau Pekan Ternak Cikole	Kab. Bandung Barat		2022		2023		BL	1.000.000.000	1
36	Revitalisasi Pasar Rakyat	Pembangunan Pasar Harapan Jaya (Lanjutan)	Kota Bekasi	Selesai	2019	Proses Pembangunan	2021 & 2023	Pelaksanaan Kontruksi	BTL	15.000.000.000	1
37	Revitalisasi Pasar Rakyat	Pasar Ciranjang Kab. Cianjur	Kab. Cianjur	Proses Perencanaan	2019 & 2022	Proses Pembangunan	2021 & 2023	Pelaksanaan Kontruksi	BL	15.000.000.000	1
38	Pembangunan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jembatan Sodong - Kopo	Kab. Pangandaran	Selesai	-	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BL	80.000.000.000	1
39	Pembangunan Jalan & Jembatan	Pedestrian Kota Sukabumi 4 Ruas	Kota Sukabumi	-	-	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Konstruksi	BTL	23.040.000.000	1
40	Pembangunan Jalan & Jembatan	Pembangunan Pedestrian Lembang Kab. Bandung Barat	Kab. Bandung Barat	Selesai	-	Tahap Pengusulan	2023	Usulan Kontruksi	BL	20.600.000.000	1
41	Pembangunan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jembatan Walahar (Lanjutan)	Kab. Karawang	Selesai	-	Proses Pembangunan	2023	Pelaksanaan Kontruksi	BTL	36.067.127.000	1



NO	KELOMPOK PROYEK	NAMA PROYEK	LOKASI KAB. KOTA	STATUS PERENCANAAN	TAHUN PERENCANAAN	STATUS KONSTRUKSI	TAHUN KONSTRUKSI	TAHAPAN PROYEK	SKEMA PENDANAAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	PRIORITAS
42	Pembangunan Jalan & Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Perkemahan Kaiara Payung	Kab. Sumedang	-	-	-	2023	-	BL	3.681.577.146,1 <sub>2</sub>	1
43	Penataan Ruang Terbuka Publik	Penataan Monumen Perjuangan & Gasibu	Kota Bandung	Selesai	2019	Proses Pembangunan	2020 & 2023	Pelaksanaan Konstruksi	BL	70.000.000.000	1
44	Pembangunan Sarana Peribatan	Pembangunan Menara Masjid Al Kamil (lanjutan)	Kab. Sumedang	Proses Perencanaan	2020 & 2021	Proses Pembangunan	2021, 2022 & 2023	Pelaksanaan Kontruksi	BTL	11.500.000.000	1
45	Pembangunan Sarana Peribatan	Pembangunan Jembatan Masjid Al Kamil (lanjutan)	Kab. Sumedang	Proses Perencanaan	2020 & 2021	Proses Pembangunan	2021, 2022 & 2023	Pelaksanaan Kontruksi	BTL	5.000.000.000	1
46	Pembangunan Sarana Peribatan	Pembangunan Masjid Magonda Kota Depok	Kota Depok	Proses Perencanaan	2022		2023		BTL	20.000.000.000	1
47	Revitalisasi Gedung Pemerintahan	Pembangunan Gedung Laboratorium Berstandar Internasional UPTD LH (lanjutan)	Kota Bandung		2022		2023		BL	2.000.000.000	1
48	Revitalisasi Gedung Pemerintahan	Peralatan Mebeulair dan Peralatan Gedung Laboratorium Berstandar Internasional UPTD LH (Lanjutan)	Kota Bandung				2023		BL	1.500.000.000	1



NO	KELOMPOK PROYEK	NAMA PROYEK	LOKASI KAB. KOTA	STATUS PERENCANAAN	TAHUN PERENCANAAN	STATUS KONSTRUKSI	TAHUN KONSTRUKSI	TAHAPAN PROYEK	SKEMA PENDANAAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	PRIORITAS
49	Revitalisasi Gedung Pemerintahan	Pengembangan Laboratorium Berstandar Internasional UPTD LH (Lanjutan)	Kota Bandung		2022		2023		BL	3.000.000.000	1
50	Revitalisasi Gedung Pemerintahan	Jasa Konsultasi Masterplan BPPT Domba Garut Jatiwangi	Kab. Garut				2023		BL	500.000.000	1
51	Revitalisasi Gedung Pemerintahan	Jasa Konsultasi DED BPPT Unggas Jatiwangi	Kab. Majalengka		2022		2023		BL	1.000.000.000	1

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah, 2022



### **6.2.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat menjadi kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil, dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial dan Agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bekerja sama untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh Proyek Strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU telah ada 1 (satu) proyek strategis yang sedang dalam proses pelaksanaan, yaitu TPPAS Regional Lulut Nambo.

TPPAS Regional Lulut Nambo merupakan salah satu sarana strategis milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan skema pembiayaan KPBU. TPPAS Lulut Nambo melayani pembuangan sampah bagi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu

Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang merupakan badan usaha dalam pengelolaan TPPAS Lulut Nambo untuk persampahan menggunakan teknologi MBT untuk mengubah sampah menjadi *Refused Derived Fuel* (RDF) dan kompos. Di areal seluas 55 hektar, produksi RDF diperkirakan 35 persen dari potensi limbah yang masuk ke pabrik, produknya langsung dimanfaatkan oleh PT. Indocement sebagai *offtaker*.

Perkembangan proyek TPPAS Lulut Nambo saat ini dalam tahap pemenuhan keuangan (*Financial Close*) oleh PT Jabar Bersih Lestari (PT JBL) dengan mitra barunya *Euwelle Environment Gmbh* dan PT Jasa Sarana. Diharapkan *Financial Close* akan tercapai pada bulan Januari 2022, direncanakan akan beroperasi 40 persen pada Februari 2022 dan operasional penuh pada Februari 2023.

Perkembangan proyek lainnya yang terdapat dalam skema pembiayaan KPBU adalah 1 (satu) proyek yang dalam proses transaksi, yaitu TPPAS Regional Legok Nangka, dan 3 (tiga) proyek dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, Sinumbra, serta LRT Bandung Raya dan 13 (tiga belas) proyek dalam proses perencanaan. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan proses pembangunan proyek strategis melalui skema KPBU dapat dilanjutkan.

**Tabel 6.7**  
**Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2023**

No.	Proyek Strategis	Perkembangan s.d Tahun 2021	Jadwal KPBU Tahun 2023
1	Pembangunan RS Pendidikan Unpad	Tahap Perencanaan (Studi Investasi dikerjakan oleh UNPAD)	Pelaksanaan (Konstruksi)
2	Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat	-	Penyiapan (Penyusunan OBC)
3	TPPAS Lulut Nambo	Penyiapan <i>Financial Close</i> oleh PT JBL (dengan mitra baru)	Operasional
4	TPPAS Legok Nangka	Tahap Transaksi ( <i>Request for Proposal</i> )	Pelaksanaan (konstruksi)
5	TPPAS Bekarpur	Tahap Penyiapan (Penyusunan studi pendahuluan dibantu oleh JICA)	Transaksi (Proses lelang)
6	TPPAS Ciayumajakuning	Penyiapan FS dengan skema penugasan BUMD	Penyiapan ( <i>Market Sounding</i> dan <i>Perjanjian Tipping fee</i> )
7	SPAM Jatigede	Tahap Penyiapan (Penyusunan FBC bersama PT SMI)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan <i>Financial Close</i> )
8	SPAM Metro Bandung	Tahap Penyiapan (Studi	Transaksi (Perjanjian



No.	Proyek Strategis	Perkembangan s.d Tahun 2021	Jadwal KPBU Tahun 2023
	Regional Wilayah Barat (Sinumbra)	Pendahuluan dengan skema KPBU <i>Unsolicited</i> )	KPBU dan <i>Financial Close</i> )
9	SPALD Cirebon Raya	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan ( <i>Market Sounding</i> dan Perjanjian Tarif)
10	SPALD Bandung Raya	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan ( <i>Market Sounding</i> dan Perjanjian Tarif)
11	Pengembangan Kawasan Wisata dan MICE	Tahap Perencanaan (FS tahun 2018)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
12	Patimban <i>Seaport Access</i> , Subang <i>Railway Construction</i>	Tahap Perencanaan (KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
13	Kertajati <i>Aerocity Railway Access Construction</i>	Tahap Perencanaan KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan	Penyiapan (Penyusunan FBC)
14	Nusawiru <i>Airport Development</i> (Pangandaran)	Tahap Perencanaan (FS disusun oleh Dishub Jabar)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
15	LRT Bandung Raya	Tahap Penyiapan (Penyusunan OBC)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan <i>Financial Close</i> )
16	Pengembangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi	Tahap Perencanaan (FS KPBU <i>Unsolicited</i> )	Penyiapan ( <i>Market Sounding</i> , dan Perjanjian Tarif)
17	Pembangunan PLT Surya Atap di Gedung-gedung Pemerintah Provinsi	Tahap Perencanaan (Sudah ada FS yang dibuat <i>British Embassy</i> )	Penyiapan ( <i>Market Sounding</i> , dan Perjanjian Tarif)
18	Kolam Retensi di Kabupaten Bandung		Penyiapan (Penyusunan OBC)
19	Puncak II Road Construction		Penyiapan (Penyusunan OBC)
20	Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh – Pelabuhan Ratu		Penyiapan (Penyusunan FBC)
21	Cirebon Ring Road Construction		Penyiapan (Penyusunan OBC)
22	Shortcut Cibungur Tanjung Rasa		Penyiapan (Penyusunan OBC)
23	Kawasan Sains Technopark Jatinangor		Penyiapan (Penyusunan OBC)

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, 2021

**Tabel 6.8**  
**Prospek Proyek KPBU**

No.	Nama Proyek	Dinas yang Bertanggung Jawab	Nilai Investasi (dalam Rp)
1	TPPAS Legok Nangka	Dinas Lingkungan Hidup	4 T
2	TPPAS Ciayumajakuning	Dinas Lingkungan Hidup dan PT MUJ	484 M
3	SPAM Jatigede	Dinas Perumahan dan Permukiman dan PT Tirta Jabar	2,1 - 2,3 T
4	SPAM Metro Bandung Raya	Dinas Permukiman	828 M



No.	Nama Proyek	Dinas yang Bertanggung Jawab	Nilai Investasi (dalam Rp)
	(Sinumbra)	dan Perumahan	
5	SPALD Bandung Raya	Dinas Perumahan dan Permukiman	115,3 M
6	SPALD Cirebon Raya	Dinas Permukiman dan Perumahan	116,5 M
7	Pengembangan Pelabuhan Cirebon	Dinas Perhubungan	975 M
8	Pelabuhan Bojongsalawe	Dinas Perhubungan	1,3 T
9	Bendungan Sawarna	Dinas Sumber Daya Air	1,3 T
10	Hutan Bakau Sinar Laut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36,5 M
11	Pengembangan Jalur Puncak II	Dinas Bina Marga	1,2 T
12	Pengembangan Jalur Lingkar Cirebon	Dinas Bina Marga	-
13	Pengembangan Pariwisata <i>Geopark</i> Ciletuh	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200 M
14	Bandara Nusawiru	Dinas Perhubungan	238 M
15	Bandara Sukabumi	Dinas Perhubungan	395 M
16	Pengembangan Pantai Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	226 M
17	<i>Shortcut</i> Cibungur - Tanjung Rasa	Dinas Perhubungan	1,9 T
18	Pengembangan Hotel di Batu Karas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	185 M
19	Jatinangor <i>Science Park</i>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	940 M
20	Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 1 (Gedebage-Tasikmalaya)	Kementerian PUPR	13,91 T
21	Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Segmen 1 (Ciawi-Sukabumi)	Kementerian PUPR	15,95 T

Sumber: Simpul KPB Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

### 6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal karena Peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 memiliki sejumlah aspek perbedaan dibanding Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Perbedaan itu misalnya pada aspek jenis dan mutu layanan. Pada aspek tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 menjelaskan tentang teknis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target, dan batas waktu capaian. Dalam aturan tersebut juga sudah menggambarkan soal mutu minimal layanan.

Sedangkan dalam aspek yang sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian, serta batas waktu capaian yang hanya mencakup penerima layanan dasar. Namun, pada regulasi tersebut belum menggambarkan mutu minimal layanan.

Selain aspek jenis dan mutu layanan, perbedaan juga terdapat pada aspek lainnya seperti tahapan penerapan SPM, pencapaian SPM, pelaporan, tim penerapan SPM, koordinasi penerapan SPM, hingga lampiran.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa *mandatory spending* bagi pemerintah daerah provinsi yaitu: 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 (dua puluh) persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). *Mandatory spending* tersebut dapat dijadikan salah satu poin perhitungan alokasi anggaran



untuk pemenuhan anggaran SPM di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.9**

**Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023**

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	SPM Pendidikan	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.976.275.613.515	APBD, APBN
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.628.170.460.139	APBD, APBN
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	821.416.332.523	APBD, APBN
2	SPM Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	425.773.044.336	APBD, APBN
		Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				
3	SPM Pekerjaan Umum	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	17.700.000.000	APBD
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestic Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	6.000.000.000	APBD
4	SPM Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.000.000.000	APBD
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	400.000.000	APBD



No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
				Bencana atau Relokasi		
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	219.100.000.000	APBD
5	SPM Trantibumlinas	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	219.100.000.000	APBD
6	SPM Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.746.345.800	APBD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	15.945.616.404	APBD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.606.450.000	APBD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.201.412.000	APBD
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	4.100.470.175	APBD

Sumber: diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2022



Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, yaitu:

1. Membebaskan biaya SPP bagi masyarakat Jawa Barat yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri. Target jumlah siswa yang mendapatkan fasilitas tersebut berjumlah 811.001 siswa, yang terdiri dari 484.181 siswa SMA, 321.230 siswa SMK dan 5.650 siswa SLB. Selain itu, diberikan pula bantuan untuk siswa yang bersekolah di SMA/SMK/SLB swasta dan Madrasah Aliyah (MA) melalui program yang disebut dengan Program BPMU atau Bantuan Pendidikan Menengah Universal kepada 1.303.257 siswa, yang terdiri dari 271.408 siswa SMA Swasta, 773.907 siswa SMK swasta, 18.708 siswa SLB swasta serta siswa Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 239.234 orang;
2. Adapun untuk Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan berupa anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pasal 25 ayat (2) yaitu Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan pembiayaan Kesehatan untuk masyarakat yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut telah disusun Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah. Penerima PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Usulan jumlah masyarakat yang dibantu untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 2.588.950 orang, jumlah tersebut merupakan 40% peserta yang merupakan kewajiban Provinsi;
3. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, dilaksanakan dengan melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan



kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu: a) Keterbatasan penyediaan rumah; b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; dan c) Permukiman kumuh yang semakin meluas. Target sasaran perbaikan Rutilahu pada tahun 2021 adalah sebanyak 31 ribu unit rumah yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dan target tahun 2022 adalah sebesar 21.500 unit rumah yang tersebar di 27 kabupaten/kota;

4. Upaya penyediaan mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibumlinmas merupakan bagian dari SPM Provinsi yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sarana prasarana yang memadai dan dilaksanakan oleh SDM Satpol PP dibantu Satlinmas yang sesuai dengan standar; Mutu Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi Standar Operasional Prosedur Satpol PP; Standar Sarana Prasarana Satpol PP; Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat serta Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada. Target Capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mencakup Mutu Standar Pelayanan Dasar penerima jenis pelayanan dasar yang terkena dampak Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi dengan target pencapaian 100 persen dalam kegiatan



Penegakan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi (5 Perda). Dalam pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan SPM, Satpol PP Jawa Barat melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibum, Penegakan 5 Perda dan Pelaksanaan Satlinmas Juara dalam melakukan edukasi, sosialisasi dan mitigasi pengelolaan manajemen kebencanaan, peningkatan kemampuan dalam penanganan pandemi COVID-19, serta dukungan operasional untuk menunjang tugas dan tanggungjawab Satlinmas di 14 (empat belas) Desa dalam 7 (tujuh) Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam mempermudah pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat untuk pencapaian target SPM trantibumlinas, Satpol PP menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinas dalam meningkatkan suksesnya Indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 persen setiap tahunnya. Hal lain yang dilakukan Satpol PP dengan adanya Pandemi COVID-19 dan era digitalisasi (*Jabar Digital Service*) menuntut perubahan paradigma mengenai peran dan fungsi Satpol PP sebagai pelindung masyarakat untuk terus menumbuhkembangkan budaya digital atau literasi digital (*internet of things*) inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *Aplikasi Sicaplang* untuk mendukung pencatatan pelanggaran aturan yang sejalan dengan proses transformasi digital yang tengah disusun *Grand Design Transformasi Digital* Satpol PP Provinsi Jawa Barat diperlukan perencanaan penganggaran dalam bentuk APBD.

5. Penguatan kebencanaan juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2023. Hal tersebut diimplementasikan melalui penguatan layanan logistik, mitigasi dan kelembagaan; penyiapan rumah korban bencana, *Buffer Stock* (Perlindungan Sosial Korban Bencana), rehabilitasi daerah irigasi kritis, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
6. Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di dalam panti meliputi pengasuhan (untuk anak terlantar), pemberian permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan



dasar, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal (untuk gelandangan dan pengemis). Rehabilitasi sosial dasar untuk korban bencana adalah pemberian permakanaan, sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan psikososial.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**



## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 berdasarkan pada hasil capaian kinerja tahun 2021, dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), 172 Indikator kinerja daerah pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan Indikator kinerja daerah pada tingkat hasil (*outcome*) sebanyak 342 indikator yang ditetapkan pada target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Tahun 2023.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Gini dan Pendapatan Per Kapita. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2023 tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

No.	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi	
			2022)**	2023)**
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72,45	72,57	73,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,74	3,92	4,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,82	10,16	9,69
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,97	7,67	7,54
5	Indeks Gini (Poin)	0,412	0,400	0,396
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)*	1,41	1,16	1,12
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	45,30	46,48	49,29

Sumber: \*) Data diperoleh dari BPS Jawa Barat, 2021

\*\*\*) Data diperoleh dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Berdasarkan pada

Tabel 7.1, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang maksimal dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan indikator makro tahun 2023, dengan memperhatikan capaian tahun 2021 untuk mencapai target-target tersebut.

Kenaikan IPM tahun 2021 ke tahun 2022 diproyeksikan tidak terlalu tinggi karena masih dalam tahap pemulihan perekonomian menuju kondisi normal. Pada tahun 2023 diperkirakan aktivitas perekonomian sudah mulai normal, sehingga daya beli atau indeks pengeluaran yang merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan sudah meningkat dan dapat tumbuh signifikan. Dengan meningkatnya IPM, diindikasikan kualitas pendidikan meningkat sehingga dapat mendorong kesuksesan program pengendalian penduduk dan memicu penurunan LPP, menekan LPP pada tahun 2022 dan 2023.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan tetap tumbuh positif. Selain itu, keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 dan rencana peralihan status pandemi menjadi endemi akan meningkatkan mobilitas masyarakat ke tempat kerja sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Hal ini memicu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023.

TPT tahun 2022 dan 2023 diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk berinventasi di Jawa Barat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 7.2**  
**Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

No	Indikator Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi	
		2021)*	2022)	2023)
1	Inflasi (%)	1,69	3,00**	3,00**
2	Indeks Williamson (poin)	0,667	0,655***	0,650***
3	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	4,20	3,86***	3,83***
4	PDRB Per Kapita (ADHK) (Juta Rupiah)	29,83***	30,91***	32,10***
5	PDRB Per Kapita (ADHB) (Juta Rupiah)	45,30	46,34***	49,04***
6	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun)	10.934	11.024***	11.394***
7	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	73,23	73,09	73,11
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,61	8,60	8,64
9	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,61	12,54	12,56

Sumber: diolah, Bappeda 2022 dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Keterangan: \*) Data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat

\*\*) Data diperoleh dari Kementerian Keuangan

\*\*\*) Data diperoleh dari Tim Kerangka Ekonomi Makro Daerah Provinsi Jawa Barat



Pada Indikator Pembangunan Daerah yang tertera pada Tabel 7.2 dengan hasil realisasi pada tahun 2021 mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan daerah di Jawa Barat pasca pandemi COVID-19. Hal ini didorong oleh berjalannya aktivitas perekonomian yang dilakukan dengan protokol kesehatan, yang berdampak pada setiap indikator pembangunan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat dan indikator pembangunan ini saling berpengaruh satu sama lain didalam indikator pembangunan.

Salah satu indikator pembangunan Jawa Barat adalah inflasi dengan target proyeksi di rentan 3 persen dengan deviasi 1 persen di tahun 2023. Diprediksi inflasi pada tahun 2023 akan berada pada rentang atas karena pengaruh perbaikan ekonomi domestik dan tantangan kondisi global dunia yang tertransmisi melalui jalur komoditas. Kenaikan harga minyak dunia dan gas dunia juga diprediksi akan memberikan rambatan terhadap kenaikan harga komoditi meskipun subsidi bagi masyarakat menengah kebawah tetap diberikan.

Indikator pembangunan lainnya adalah Indeks williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan antarwilayah. Realisasi indeks williamson tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 0,025 poin dari tahun sebelumnya. Artinya ketimpangan antarwilayah semakin menurun pada tahun 2021. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan pemulihan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimisnya dengan keberhasilan pemulihan ekonomi maka sejalan dengan penurunannya jumlah penduduk miskin yang diproyeksikan pada tahun 2022 dan 2023.

Komponen indikator Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari PDRB Per Kapita ADHK, PDRB Per Kapita ADHB, Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah. Dengan adanya peningkatan aktivitas perekonomian pada tahun 2022 dan 2023, pendapatan masyarakat meningkat sehingga daya beli masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **7.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Guna mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan Indikator

Kinerja Utama dan target capaian selama 5 (lima) tahun. Dan penetapan Indikator Kinerja Utama ini terus dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023. IKU tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh kinerja perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat dengan jelas pada tahapan perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini dilakukan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Upaya seluruh perangkat daerah memiliki peran yang berbeda-beda terhadap pencapaian prioritas indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat.

Target capaian indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dan 2023 merupakan target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Peningkatan upaya pemulihan ekonomi pasca penanganan pandemi COVID-19, mempengaruhi kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat, sehingga Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dan 2023 mengalami penyesuaian dengan merujuk pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, yang dirangkum pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.3**  
**Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2023**

NO.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target	
		2021	2022	2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	72,70	69,10	69,60
2	Indeks Demokrasi (poin)	79,72	71,79	72,79
3	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,97	7,67	7,54
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	9,82	10,16	9,69
5	Umur Harapan Hidup (tahun)	73,23	73,09	73,11
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	70,24*	69,80	70,30
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,36	89,42	90,02
8	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,61	8,60	8,64
9	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,61	12,54	12,56
10	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	49,00*	52,00	54,00
11	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	24,78	24,89	24,21
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	87,50	74,00	75,00
13	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.280,53	1.100	1.150
14	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	43,51	44,00	47,00



NO.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target	
		2021	2022	2023
15	Indeks Desa Membangun (poin)	0,72	0,71	0,72
16	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	2	1	2
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	62,69	61,19	61,60
18	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	4,23	4,75	5,22
19	Indeks Penggunaan Air (poin)	1,1913	1,1912	1,1902
20	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	134,94	147	144
21	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	84,10	84,80	85,60
22	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	53,14	52,80	53,90
23	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	97,84	103,39	104,52
24	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,84	2,99	3,08
25	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	4,22	3,40	3,72
26	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	3,19	4,01	4,45
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	547,93	515,31	531,87
28	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	21,67	20,50	21,10
29	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	A (80,01)	A (82,01)
30	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	80,24	58,00	62,00

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023 dan Dokumen LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Keterangan: \*) Data sementara dari LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

## 7.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama Gubernur tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya

indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. IKK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode Tahun 2018-2023.

### **7.2.1 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah (*Impact*)**

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah maupun IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) yang digunakan untuk menggambarkan aspek/indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Peningkatan upaya penanganan pandemi COVID-19 yang memasuki fase pemulihan pada tahun 2021 dan tahun 2022, mempengaruhi kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat, sehingga Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan 2022 mengalami penyesuaian dengan merujuk kepada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, yang dirangkum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7.4**  
**Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,19	72,45	72,57	73,05	Indikator Makro
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,15	3,74	3,92	4,35	Indikator Makro
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,45	9,82	10,16	9,69	Indikator Makro
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,77	7,97	7,67	7,54	Indikator Makro
5	Indeks Gini	Poin	0,402	0,412	0,400	0,396	Indikator Makro
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,21	1,41	1,16	1,12	Indikator Makro
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	44,02	45,30	46,48	49,29	Indikator Makro
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,06	73,23	73,09	73,11	IKU Pemerintah Daerah/IKU Dinas Kesehatan
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	69,60	70,24*	69,80	70,30	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,30	89,36	89,42	90,02	IKU Pemerintah Daerah
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,58	8,61	8,60	8,64	IKU Pemerintah Daerah
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,52	12,61	12,54	12,56	IKU Pemerintah Daerah
13	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*	Triliun Rupiah	51,70	53,14	52,80	53,90	IKU Pemerintah Daerah
14	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	83,20	84,10	84,80	85,60	IKU Pemerintah Daerah



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,91	2,84	2,99	3,08	IKU Pemerintah Daerah
16	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,78	4,22	3,40	3,72	IKU Pemerintah Daerah
17	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,23	3,19	4,01	4,45	IKU Pemerintah Daerah
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	501,52	547,93	515,31	531,87	IKU Pemerintah Daerah
19	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	19,90	21,67	20,50	21,10	IKU Pemerintah Daerah
20	Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	indeks	3,51	3,61	3,70	4,01	IKU Dinas Pendidikan
21	APM SMA, SMK dan SLB	persen	72,56	83,58	75,51	78,46	IKU Dinas Pendidikan
22	Nilai Mutu Pendidikan*						IKU Dinas Pendidikan
	SMA	Nilai (SMA)	6,59	N/A**	6,61	6,63	
	SMK	Nilai (SMK)	6,51	N/A**	6,53	6,55	
	SLB	Nilai (SLB)	4,63	N/A**	4,83	5,03	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT*	Poin	N/A	81,99	81-26-81,75	81,76-82,25	IKU Dinas Kesehatan
24	Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna*	RS Terakreditasi	2	3	2	3	IKU Dinas Kesehatan
25	Prevalensi Stunting	Persen	23,20	24,50	21,20	19,20	IKU Dinas Kesehatan
26	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Kesehatan*	Nilai	86,50	86,87	87	87,50	IKU Dinas Kesehatan
27	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Kondisi Baik dan Sedang	persen	81,11	82,15	82,78	83,84	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	persen	13,23	15,83	19,07	24,90	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
29	Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)*	persen	56,21	54,78	75,57	94,93	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
30	Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaat Ruang*	persen	34,45	34,45	45,43	60,10	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
31	Persentase Sumber Daya Kontruksi yang terlatih*	persen	47,29	83,27	78,04	100	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
32	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	persen	0,20	0,34	0,25	0,25	IKU Dinas Sumber Daya Air
33	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	persen	54,50	54,60	55,50	56,50	IKU Dinas Sumber Daya Air
34	Persentase Luas genangan yang tertangani*	persen	36,90	50,31	57,00	77,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
35	Tingkat kualitas kawasan permukiman	persen	64,50	85,63	66,00	67,50	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
36	Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib	persen	77,00	78,54	83,50	88,50	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
37	Tingkat ketersediaan rumah layak	persen	92,09	92,33	92,41	92,72	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
38	Tingkat tertib tata kelola pertanahan*	persen	52,24	54,24	69,77	88,37	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Akses Sanitasi Layak*	persen	80,37	77,08	83,58	86,79	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
40	Akses Air Minum Layak*	persen	95,12	93,24	96,75	98,37	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
41	Akses Penanganan Sampah di Perkotaan*	persen	72,30	70,70	77,00	79,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
42	Rasio Permukiman Layak	Rasio	0,9958	0,9968	0,9962	0,9965	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
43	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat*	Poin	80,00	98,51	85,00	90,00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
44	Laju Penegakan Perda dan Perkada	persen	6,00	6,00	6,00	0,00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
45	Indeks Kesejahteraan Sosial*	persen	39,01	42,50	39,67	40,27	IKU Dinas Sosial
46	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi*	Persen	70,00	100,00	75,00	80,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
47	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja*	Persen	63,66	36,76	64,55	65,43	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan*	Persen	63,39	91,93	69,73	76,7	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
49	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	20,00	22,92	20,00	20,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
50	Persentase transmigran yang ditempatkan*	Persen	80,00	100,00	90,00	90,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi





No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender*	persen	88,88	88,88	92,59	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
52	Persentase Perempuan di Parlemen provinsi*	persen	20,00	21,67	20,00	20,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
53	Tingkat Keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
54	Tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan*	persen	74,07	66,67	85,19	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
55	Tingkat penanganan kasus KED terhadap anak*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Keluarga Berencana
56	Persentase Kab/ Kota yang memperoleh predikat menuju kab/ Kota layak anak (KLA)	persen	88,88	77,78	96,22	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
57	Angka Fertilitas Total ( <i>Total Fertility Rate</i> )	anak	2,12	2,30	2,10	2,07	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
58	Indeks Perlindungan Anak*	Nilai	67,83	68,32**	68,53	69,53	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
59	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	42,87	43,09	43,07	43,27	IKU Dinas Lingkungan Hidup
60	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) *	Poin	70,50	87,42	73,00	75,50	IKU Dinas Lingkungan Hidup
61	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	79,71	79,34	79,91	80,11	IKU Dinas Lingkungan Hidup
62	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	persen	0,81	0,81	0,83	6,10	IKU Dinas Lingkungan Hidup



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	persen	82,63	84,81	83,47	84,28	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64	Persentase Perkembangan Strata Desa Mandiri*	persen	6,34	11,03	8,22	10,11	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
65	Persentase Perkembangan Strata Desa Tertinggal*	persen	1,10	0,33	0,00	0,00	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
66	Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi*	persen	37,00	35,83	38,00	39,00	IKU Dinas Perhubungan
67	Presentase Terminal Tipe B yang dibangun*	persen	3,48	1,04	28,57	42,86	IKU Dinas Perhubungan
68	Tingkat ketersediaan prasarana dan dukungan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	persen	58,97	43,33	86,82	97,13	IKU Dinas Perhubungan
69	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	persen	34,24	34,15	41,14	89,14	IKU Dinas Perhubungan
70	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	persen	90,45	78,54	90,50	90,55	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,30	3,28	3,50	3,70	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
72	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah*	persen	80,00	100,00	90,00	100,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	level	575	623	600	625	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
74	Persentase Koperasi yang mengakses kredit*	persen	23,00	27,27	26,00	30,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
75	Persentase UMKM yang Naik Kelas	persen	5,00	6,90	6,00	7,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
76	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	101,97	136,13	105,00	109,20	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
77	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	poim	85,00	85,84	87,00	89,00	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
78	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	poim	46,67	46,67**	46,67	46,67	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
79	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	persen	54,00	49,70	56,00	58,00	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
80	Peringkat Jawa Barat pada <i>Multievent</i> Berkebutuhan Khusus Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat	3	N/A	N/A	3	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
81	Peringkat Jawa Barat pada <i>Multievent</i> Nasional:						IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. POPNAS	Peringkat	1	N/A	N/A	1	
	b. POPWILNAS	Peringkat	N/A	N/A	1	N/A	
82	Peringkat Jawa Barat pada <i>Multievent</i> Nasional:						IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PON	Peringkat	1	1	N/A	N/A	
	b. PEPARNAS	Peringkat	1	2	N/A	N/A	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Poin	69,00	65,34	71,00	72,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
84	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	persen	30,00	57,89	45,00	60,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
85	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	persen	48,00	48	68,00	88,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
86	Indeks membaca masyarakat	Poin	62,00	61,49	63,00	64,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
87	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal*	Kategori	B	B	BB	A	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
88	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis*	Persen	35,00	35,00	50,00	65,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
89	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	1.014.400	1.491.723,08*	1.041.553,12	1.069.481,49	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
90	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Jawa Barat	persen	1,10	3,62*	1,10	1,10	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
91	Persentase Kawasan konservasi perairan yang dikelola	persen	22,27	22,38	24,38	25,43	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
92	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	persen	55,00	64,16	60,00	65,00	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan	persen	19,56	24,78	24,89	24,21	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
94	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	30.000	1.120	33.000	36.300	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
95	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	30.000.000	47.132.138	36.000.000	39.600.000	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
96	Skor PPH Tingkat Ketersediaan	poin	91,60	94,02	92,50	93,40	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
97	Persentase peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan sesuai standar mutu dan keamanan pangan*	persen	10,27	140,51	11,35	12,67	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
98	Tingkat Konsumsi Pangan:						IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- energi	kcal/kap/hr	2.150	2.176	2.150	2.150	
	- protein	gr/kap/hr	57	64,34	57	57	
99	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Poin	101,00	95,25	102,50	104,00	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
100	Produksi komoditas peternakan (ton):						IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- Daging	ton	1.084.574	1.109.769	1.147.449	1.210.324	
	- Telur	ton	630.222	694.674	650.702	671.183	
	- Susu	Ton	372.403	283.361	409.032	445.662	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Persentase Peningkatan mutu produk hewan*	Persen	10,00	340,00	10,00	10,00	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
102	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran*	persen	80,00	80,00	85,00	90,00	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
103	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	12.686.496	13.615.558**	12.802.956	12.919.701	IKU Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
104	Laju peningkatan produktivitas komoditas unggulan utama perkebunan	persen	5	5,59	5,00	5,00	IKU Dinas Perkebunan
105	NTUP -R	Poin	101,25	96,31	102,39	103,52	IKU Dinas Perkebunan
106	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	38,80	40,78	38,85	38,90	IKU Dinas Kehutanan
107	Presentase Tutupan Hutan	persen	40,77	43,17	41,02	41,27	IKU Dinas Kehutanan
108	Nilai Produksi Hasil Hutan	Rp. Milyar	1.892,31	1.944,51	1.911,24	1.930,35	IKU Dinas Kehutanan
109	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	51.169	61.816	54,169	56,869	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
110	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	persen	1,84	1,90	2,45	5,13	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
111	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	persen	46	48,33	47,00	48,00	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
112	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	persen	2	10,46	2,00	2,00	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
113	PDRB Industri Non Migas	(Rp Triliun)	823,6	923,79	856,79	892,86	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
114	Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	persen	1,44	27,51	2,88	4,33	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
115	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Triliun	310,23	319,59	324,90	341,28	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
116	Persentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengalaman keagamaan	persen	80,00	80,00	85,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
117	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Skor/ nilai	3,329	3,329	3,344	3,354	IKU Sekretariat Daerah
118	Persentase Fasilitas Administrasi Pemerintahan Umum*	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
119	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti*	persen	80,00	80,00	85,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
120	Persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM*	persen	80,00	100,00	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
121	Persentase penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
122	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah*	indeks	70	61,57	80	90	IKU Sekretariat Daerah
123	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi *	Nilai	3,94	3,75**	4,06	4,18	IKU Sekretariat Daerah
124	Nilai Manajemen Perubahan	nilai	3,45	3,97**	3,55	3,65	IKU Sekretariat Daerah
125	Kategori akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	predikat	A	A**	A	A	IKU Sekretariat Daerah





No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
126	Nilai Penataan Tatalaksana	nilai	3,20	3,31**	3,30	3,40	IKU Sekretariat Daerah
127	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	nilai	4,06	5,26**	4,18	4,30	IKU Sekretariat Daerah
128	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
129	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	80,00	97,94	80,00	85,00	IKU Sekretariat Daerah
130	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti*	Persen	90,00	95,25	90,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
131	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan*	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
132	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
133	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda*	Nilai	B	B	B	B	IKU Sekretariat Daerah
134	Persentase penyelenggaraan fungsi Biro Organisasi secara efektif*	persen	93,00	N/A**	94,00	95,00	IKU Sekretariat Daerah
135	Indek Kepuasan Layanan Intenal Setda*	kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
136	Persentase Usulan Daerah Persiapan Otonom yang disetujui DPRD Provinsi*	Jumlah	2	2	1	1	IKU Sekretariat Daerah
137	Tingkat dukungan dan fasilitasi	persen	100	99,64	100	100	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
138	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	4,00	3,446	4,00	4,00	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
139	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Penghubung*	Nilai	78,00	83,06	82,00	85,00	IKU Badan Penghubung
140	Tingkat konsistensi Perencanaan pembangunan Jawa Barat	persen	87,00	96,51	89,00	91,00	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
141	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi*	persen	28,00	N/A**	28,00	28,00	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
142	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Proses Audit BPK	WTP	WTP	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
143	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	60,49	54,97	60,56	60,01	IKU Badan Pendapatan Daerah
144	Indeks Sistem Merit	poin	375,50	375,50	380,50	390	IKU Badan Kepegawaian Daerah
145	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL*	persen	80,00	104,00	85,00	90,00	IKU Badan Pengembangan



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Sumberdaya Manusia
146	Persentase Akreditasi Penyelenggaraan Diklat*	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
147	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan Biro Pemrov. Jabar/Pemerintah Kab.Kota di Jabar/Masyarakat/Dunia Usaha/Pihak Lainnya*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
148	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	point	4,309	N/A**	4,344	4,354	IKU Inspektorat
149	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	A	A	A	A	IKU Inspektorat
150	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
151	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern	persen	3	3	3	4	IKU Inspektorat
152	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	persen	96,00	91,80	98,00	100,00	IKU Inspektorat
153	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,50	0,67	0,55	0,60	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
154	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	persen	100,00	135,00	100,00	100,00	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Tingkat Bina Demokratisasi*	persen	100,00	103,00	100,00	100,00	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
156	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Poin	100,00	103,00	100,00	100,00	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>II. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,60	72,70	69,10	69,60	IKU Pemerintah Daerah
2	Indeks Demokrasi	Poin	71,79	79,72	72,79	73,79	IKU Pemerintah Daerah
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	19,56	24,78	24,89	24,21	IKU Pemerintah Daerah
4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	72,00	87,50	74,00	75,00	IKU Pemerintah Daerah
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	50,00	49,00*	52,00	54,00	IKU Pemerintah Daerah
6	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	41,00	43,51	44,00	47,00	IKU Pemerintah Daerah
7	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1.050	1.280,53	1.100	1.150	IKU Pemerintah Daerah
8	Indeks Desa Membangun	Poin	0,70	0,72	0,71	0,72	IKU Pemerintah Daerah
9	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	2	1	2	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	60,78	62,69	61,19	61,60	IKU Pemerintah Daerah
11	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4,29	4,23	4,75	5,22	IKU Pemerintah Daerah
12	Indeks Penggunaan Air	Persen	1,1922	1,1913	1,1912	1,1902	IKU Pemerintah Daerah



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	149,00	134,94	147,00	144,00	IKU Pemerintah Daerah
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	102,25	97,84	103,39	104,52	IKU Pemerintah Daerah
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	A	A	IKU Pemerintah Daerah
16	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	56,00	80,24	58,00	62,00	IKU Pemerintah Daerah

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Keterangan :

\*) Indikator baru digunakan pada periode Perubahan RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.

\*\*) Data Sementara menggunakan hasil Sementara menggunakan hasil perhitungan sementara dan menunggu proses realisasi data baik dari Pemerintah Pusat ataupun Badan Pusat Statistik (BPS)

\*\*\*) Data Sangat Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2020)

### 7.2.2 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (*Outcome*)

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu kiranya ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari Program Perangkat Daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilah pada 4 (empat) urusan yakni : 1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari 80 Indikator Kinerja Program (*Outcome*); 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari 99 Indikator Kinerja Program (*Outcome*); 3) urusan pemerintahan pilihan yang terdiri dari 94 Indikator Kinerja Program (*Outcome*); 4) unsur pendukung urusan pemerintahan umum yang terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program (*Outcome*); 5) unsur penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari 47 Indikator Kinerja Program (*Outcome*); 6) unsur pengawasan urusan pemerintahan yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program (*Outcome*); 7) unsur pemerintahan umum yang terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Program (*Outcome*).

Pandemi COVID-19 mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat, sehingga indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Tahun 2020-2021 mengalami penyesuaian berdasarkan hasil *desk* penyesuaian indikator kinerja daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait yang dirangkum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7.5**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/ Outcome Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023**

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah*	persen	72,56	83,58	75,51	78,46	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus*	persen	45,27	96,41	46,43	47,59	Dinas Pendidikan
3	Tingkat pengembangan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus*	persen	80,00	100,00	80,00	84,00	Dinas Pendidikan
4	Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai Standar*	persen	100,00	94,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
5	Persentase izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan*	persen	80,00	100,00	80,00	84,00	Dinas Pendidikan
6	Persentase dokumen pembinaan, pengembangan dan perlindungan	persen	80,00	100,00	84,00	88,20	Dinas Pendidikan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
		bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah di Provinsi Jawa Barat*						
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>							
	1	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	Persen	89,00	98,62	91,00	93,00	Dinas Kesehatan
	2	Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas*	Persen	85,00	87,90	90,00	95,00	Dinas Kesehatan
	3	Persentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)*	Persen	80,00	85,90	85,00	90,00	Dinas Kesehatan
	4	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi*	Persen	73,27	100,00	80,19	90,00	Dinas Kesehatan
	5	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular*	Persen	63,00	100,00	83,00	93,00	Dinas Kesehatan
	6	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan*	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	7	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi*	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan





No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar*	Persen	91,00	95,00	96,00	100,00	Dinas Kesehatan
9	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional*	Persen	80,00	82,45	88,00	96,00	Dinas Kesehatan
10	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi*	Persen	80,00	88,95	90,00	100,00	Dinas Kesehatan
11	Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat*	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
12	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi*	Persen	45,00	46,03	60,00	80,00	Dinas Kesehatan
13	Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi*	Persen	80,00	85,18	90,00	100,00	Dinas Kesehatan
14	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas*	Persen	90,00	91,77	92,00	95,00	Dinas Kesehatan
15	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)*	Persen	90,00	84,56	95,00	96,00	Dinas Kesehatan
16	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat*	Persen	91,67	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
17	Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif*						
18	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)*	hari	9	3	9	9	RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RS Paru, RS Kesehatan kerja, RS Jampangkulon
19	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) *	hari	21	16,14	21	21	RS Jiwa
20	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan*	persen	90,00	72,00	90,00	95,00	Labkes
21	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan*	persen	75,00	50,00	75,00	80,00	Upelkes
22	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan*	Persen	70,00	47,00	59,00	69,00	Dinas Kesehatan
23	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	75,00	21,00	60,00	70,00	UPTD RS Jiwa
24	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan*	Persen	60,00	40,00	80,00	100,00	UPTD RS Paru
25	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	75,00	21,00	75,00	75,00	UPTD RSUD Jampang Kulon
26	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	75,00	20,00	85,71	100,00	UPTD RSUD Pameungpeuk



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	27	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	UPTD RS Kesehatan Kerja
	28	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	2,4	3,9	4,57	4,99	UPTD Upelkes
	29	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	N/A	N/A	75,00	80,00	UPTD Labkes
	30	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) *	Persen	87,00	90,59	88,00	90,00	Dinas Kesehatan
	31	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas*	Persen	50,00	92,59	92,60	100,00	Dinas Kesehatan
	32	Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring eksternal TB melalui kegiatan Layad Paru*	Persen	70,00	100,00	80,00	100,00	UPTD RS Paru
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
	1	Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah*	persen	75,77	76,44	100,00	0	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	2	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	3	Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan,	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan*						
4	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang*	km	1.914,76	1.939,216	1.953,98	1.979,18	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
5	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial*	persen	13,23	15,83	19,07	24,90	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
6	Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih	persen	47,29	83,27	78,04	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
7	Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang*	persen	42,86	40,00	71,43	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
8	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan*	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
9	Persentase Berita Acara yang diterbitkan dalam rangka persetujuan substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota*	persen	69,57	69,57	79,71	89,69	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
10	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang	persen	34,46	34,46	45,43	60,10	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
11	Persentase SITU yang Terpelihara*	persen	10,71	11,19	10,83	10,95	Dinas Sumber Daya Air
12	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sumber Daya Air
13	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi*	Persen	69,65	52,83	69,71	69,77	Dinas Sumber Daya Air



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	14	Persentase Drainase Utama yang dikelola dan dikembangkan*	Persen	36,90	0,00	57,00	77,00	Dinas Sumber Daya Air
	15	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota*	persen	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	16	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani*	persen	70,60	70,70	72,60	74,60	Dinas Perumahan dan Permukiman
	17	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional*	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	18	Persentase Luas genangan yang tertangani*	persen	36,90	50,31	57,00	77,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	19	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung*	Persen	77,00	78,54	83,50	88,50	Dinas Perumahan dan Permukiman
	20	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (% PBL)*	persen	64,50	85,63	66,00	67,50	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>							
	1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani*	persen	74,00	47,243	75,00	76,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU*	persen	42,40	71,83	46,02	49,63	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>5</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>							
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan*	persen	65,00	98,65	68,00	71,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	2	Persentase Anggota Linmas Desa di Jawa Barat*	persen	70,00	69,44	73,00	75,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan*	persen	75,00	100,00	95,00	100,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	4	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	persen	40,00	100,00	45,00	50,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	5	Persentase Kabupaten Kota yang indeks ketahanan daerahnya meningkat*	persen	100,00	63,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	7	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8	Persentase Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	9	Persentase Pendampingan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>Sosial</b>							
1	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Didayagunakan Dalam Penyelenggaraan Kesos*	Persen	55,00	59,67	60,00	68,00	Dinas Sosial	
2	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Didayagunakan Dalam Penyelenggaraan Kesos UPTD PPKS*	persen	55,00	21,86	60,00	68,00	Dinas Sosial, UPTD PPKS	
3	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi*	persen	28,00	13,00	30,00	32,00	Dinas Sosial	
4	Persentase Daerah yang Difasilitasi Untuk Membentuk Puskesmas*	persen	95,00	44,70	98,00	100,00	Dinas Sosial	
5	Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani*	persen	0,75	1,73	1,20	1,35	Dinas Sosial	
6	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti*	persen	100,00	110,00	100,00	100,00	Dinas Sosial, UPTD PRSAMPK, PPSBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU	
7	Persentase Fakir Miskin yang tertangani*	persen	37,50	69,70	38,10	38,70	Dinas Sosial	
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi*	persen	100,00	120,00	100,00	100,00	Dinas Sosial	
9	Tingkat pengelolaan makam pahlawan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial	



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	10	Indeks Partisipasi Sosial*	poin	40,00	0,00	50,00	50,00	Dinas Sosial
<b>II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
	1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan*	orang	84.050	135.638	86.150	88.300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan*)	persen	80,00	72,78	85,00	90,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan*	persen	20,00	22,92	20,00	20,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
	1	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender*	persen	22,22	22,22	37,40	51,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,





No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Keluarga Berencana
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)*	persen	1,92	3,60	1,90	1,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana , UPTD PPA
4	Jumlah Kab Kota yang Sudah Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Di Jawa Barat*	kab/kota	16	16	21	27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
5	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*	persen	66,00	66,00	74,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
6	Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi*	persen	25,00	25,00	50,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
								dan Keluarga Berencana
	7	Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi*	persen	25,00	25,00	50,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	8	Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)*	rasio	0,27	0,73	0,24	0,21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	9	Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (UPTD PPA)
<b>3</b>	<b>Pangan</b>							
	1	Persentase Cadangan Pangan	persen	50,00	42,36	50,00	50,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2	Persentase Desa Rawan Pangan yang Diintervensi	persen	10,00	4,00	10,00	10,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	3	Persentase Peningkatan Sertifikasi PSAT	persen	10,27	140,51	11,35	12,67	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>							
	1	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota yang Diterbitkan*	persen	100,00	N/A	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Pembangunan Strategis Di Jawa Barat*	persen	33,33	33,33	50,00	66,67	Dinas Perumahan dan Permukiman
	4	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	persen	20,00	20,00	60,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
	1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*	persen	50,00	70,00	75,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD (Mg/L)	persen	94,00	127,86	97,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SOX	persen	93,00	87,34	96,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	4	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota	persen	60,00	70,37	80,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	5	Persentase Peningkatan Kampung Iklim	persen	85,71	100,00	92,86	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Diuji*	persen	81,25	83,33	90,62	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	7	Persentase Jumlah Sertifikat Kompetensi Teknis yang Diperoleh*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	8	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persen	100,00	114,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	9	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3*	persen	45,23	50,00	71,42	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	10	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	persen	70,00	80,00	85,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	11	Persentase Status Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten/Kota*	persen	20,00	100,00	60,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	12	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Berbudaya Lingkungan*	persen	88,89	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	13	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	persen	60,00	85,52	80,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	14	Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan Dalam Pelaksanaan	persen	80,91	91,52	91,71	100,00	Dinas Lingkungan Hidup



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup						
	15	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	persen	50,00	56,34	50,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
	1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	persen	81,60	83,92	82,42	83,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	81,60	90,45	82,42	83,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	persen	82,35	83,57	83,57	84,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
	1	Persentase fasilitas penataan desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan*	persen	100,00	94,51	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi*	persen	100,00	99,07	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	
							Masyarakat dan Desa	
	3	Persentasi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan*	persen	100,00	98,71	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4	Persentase fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa*	persen	100,00	98,20	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
	1	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR*	persen	63,27	58,90	63,67	64,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	2	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	3	Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat Di Kabupaten Kota*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>							
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Provinsi*	persen	87,69	87,69	87,69	87,85	Dinas Perhubungan	
2	Nilai V/C Ratio di Jalan Provinsi*	persen	0,82	0,52	0,82	0,82	Dinas Perhubungan	
3	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)*	persen	87,69	87,69	87,69	87,85	Dinas Perhubungan	
4	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)*	persen	87,69	87,69	87,69	87,85	Dinas Perhubungan	
5	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)*	persen	87,69	87,69	87,69	87,85	Dinas Perhubungan	
6	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)*	persen	87,69	87,69	87,69	87,85	Dinas Perhubungan	
7	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi*	persen	92,59	92,59	96,30	100,00	Dinas Perhubungan	
8	Jumlah Dokumen Pendukung Pelabuhan Pengumpan Regional yang Disiapkan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)*	dokumen	10	5	14	14	Dinas Perhubungan	
9	Persentase Dermaga yang Terpenuhi Standar (UPTD PPP LL ASDP)*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan	
10	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yang Kewenangan Provinsi*	persen	30,00	30,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan	



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	11	Jumlah Kebijakan Pengembangan Perhubungan yang Dihasilkan*	Dokumen	4	0	3	3	Dinas Perhubungan
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
	1	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	persen	80,00	91,00	80,50	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	persen	95,00	100,00	98,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	persen	40,00	41,09	58,00	60,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	persen	40,00	50,00	50,00	60,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
	1	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional	persen	0	0	7,00	9,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil





No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Tingkat Kepatuhan Koperasi	persen	3,10	17,25	3,70	4,50	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	3	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	persen	0	0	50,00	55,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	4	Persentase Wirasusaha Menjadi Usaha Mikro	persen	48,40	44,92	74,10	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	5	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	persen	33,30	50,00	66,60	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	6	Tingkat Koperasi yang Berkualitas	persen	33,00	88,50	33,00	37,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	7	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	persen	6,30	11,00	6,60	6,90	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	8	Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	persen	30,00	75,90	32,00	35,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	9	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	persen	5,50	50,00	6,00	6,50	Dinas Koperasi dan Usaha
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
	1	Indikator Daya Saing (Peringkat <i>Ease Of Doing Business</i> )	Peringkat	2,00	N/A	2,00	2,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	persen	60,00	73,58	65,00	70,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	4	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	persen	15,00	40,77	15,00	15,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5	Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	persen	80,00	81,00	84,00	88,20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
	1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	persen	17,30	31,97	17,80	18,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	persen	68,00	40,00	70,00	72,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	persen	2,60	2,69	3,00	3,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	4	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	persen	10,50	12,48	11,50	12,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	5	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional POPNAS	persen	20,00	N/A	0,00	20,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	6	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional POPWILNAS	persen	0,00	N/A	20,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	7	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik	persen	80,00	71,00	85,00	87,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	8	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Pemuda dan Olahraga



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	9	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional Peparpenas	persen	9,00	N/A	0,00	12,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	10	Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa barat dalam Kepramukaan	persen	17,00	11,69	17,00	17,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>14</b>	<b>Statistik</b>							
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>15</b>	<b>Persandian</b>							
	1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	persen	89,15	96,59	93,02	96,90	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
	1	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan	persen	18,47	18,47	34,48	30,79	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aksara daerah yang dilestarikan, dan seni budaya yang dilindungi)						
2	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	persen	17,39	19,13	26,09	26,09	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Benda Koleksi Museum Negeri Sri Baduga yang Dilindungi	persen	19,87	24,60	23,51	23,18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>						
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	53,00	52,33	54,00	55,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	69,00	68,61	70,00	71,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Tingkat Kebiasaan Membaca	Poin	64,00	63,54	65,00	66,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	persen	19,00	19,00	21,00	23,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>						
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	persen	15,00	15,00	30,00	45,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	persen	58,00	58,00	65,00	70,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Persentase Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
	1	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	persen	79,51	85,00	81,51	83,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Jumlah Produksi Garam	ton	258.276,9	79.314,33	271.190,75	284.750,29	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	182.160,00	277.282,94	184.345,92	186.558,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	832.240,00	1.214.440,14	857.207,20	882.923,42	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	persen	85,00	87,80	85,00	85,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Th	30,28	37,73	30,60	30,93	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>							
	1	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	persen	19,51	19,51	24,39	29,27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	persen	14,29	28,57	23,81	28,57	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase Sumber Daya Industri Kreatif yang Dikembangkan	persen	22,22	22,22	25,93	22,22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>							
	1	Rata-Rata Performa Ternak yang Sesuai Standar	persen	42,00	47,00	43,00	44,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2	Tingkat Pemenuhan Prasarana Peternakan	persen	32,00	26,00	78,60	90,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	persen	4,00	64,00	5,00	5,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	4	Persentase Petugas dan Pelaku Usaha Peternakan yang Meningkatkan Kinerjanya	persen	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	5	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	57,76	57,41*	58,26	58,76	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	6	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	90,19	101,36*	90,19	90,34	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	persen	80,59	90,16	81,59	82,21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	8	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1.892.521,00	1.776.697*	1.892.521,00	1.892.521,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	9	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	194.718,00	336.992*	196.981,00	199.271,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	10	Indeks Pertamanan (IP)	persen	1,90	2,10	1,95	2,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	11	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	persen	4,50	4,46	4,50	4,50	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	12	Persentase Penyuluh yang Berprestasi	persen	2,13	2,13	2,13	2,13	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	13	Persentase Kelompok Tani yang di Bina oleh Penyuluh	persen	56,15	52,63	72,20	94,17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	14	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	persen	20,41	20,73	20,41	20,41	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	15	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	persen	88,86	89,27	88,86	88,86	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	16	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	persen	N/A	N/A	100,00	100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	17	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Sarana Perkebunan	persen	25,00	29,40	25,00	25,00	Dinas Perkebunan
	18	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	persen	25,00	20,00	25,00	25,00	Dinas Perkebunan
	19	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan	persen	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Perkebunan
	20	Laju Peningkatan Perkebunan Besar yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan	persen	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Perkebunan
	21	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	persen	75,00	26,84	75,00	75,00	Dinas Perkebunan
<b>4</b>	<b>Kehutanan</b>							
	1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahana Pengelolaan Hutan	persen	71,00	72,70	100,00	100,00	Dinas Kehutanan
	2	Persentase Penanganan Lahan Kritis	persen	3,00	3,54	4,00	5,00	Dinas Kehutanan
	3	Tingkat Kerusakan Hutan	persen	0,70	0,10	0,60	0,50	Dinas Kehutanan
	4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	persen	30,00	31,46	30,00	30,00	Dinas Kehutanan
	5	Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	persen	10,00	-11,20	10,00	10,00	Dinas Kehutanan
	6	Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan	persen	5,00	3,75	5,00	5,00	Dinas Kehutanan





No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	7	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Mengikuti Bimtek/Diklat	orang	75,00	297	100,00	120,00	Dinas Kehutanan
	8	Penurunan Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Daerah Aliran Sungai	persen	41,55	23,84	39,05	36,55	Dinas Kehutanan
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
	1	Rasio Sumur Imbuhan Terhadap Sumur Produksi	persen	15,98	41,53	18,31	20,64	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	2	Persentase Pengambil Air Tanah yang Taat Peraturan	persen	56,00	59,99	58,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	56,00	58,06	58,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah I Cianjur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	4	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	56,00	60,91	58,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah II Bogor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	5	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	56,00	58,73	58,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	6	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	56,00	61,73	58,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah IV Bandung Dinas



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	56,00	56,22	58,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah V Sumedang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	56,00	56,05	58,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	56,00	61,60	58,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Persentase Sample Air Tanah yang Diuji Kualitasnya	persen	1,50	1,56	2,00	3,00	Cabang Dinas UPTD Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi	persen	58,00	58,81	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	58,00	59,42	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	13	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	58,00	58,06	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	14	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	58,00	52,38	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
	15	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	58,00	61,73	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	16	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	58,00	56,25	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	17	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	58,00	61,90	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	18	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	58,00	58,00	59,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
	19	Persentase Pengujian Kualitas Bahan Tambang Di Jawa Barat	persen	40,00	41,33	50,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Mineral, Cabang Dinas UPTD Laboratorium
20	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Teknis	persen	46,00	48,33	47,00	48,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21	Jumlah Reduksi CO2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	Ton Co2eq	932,70	932,70	1.553,95	2.175,21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	0,00	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
23	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	0,00	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
24	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	0,00	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
25	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	0,00	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	0,00	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
27	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	0,00	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
28	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	0,00	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
29	Persentase Komoditas EBT yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Bidang Energi	persen	50,00	50,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan	persen	79,08	85,00	90,08	98,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
31	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	persen	60,00	60,65	80,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
32	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Cabang Dinas Wilayah II Bogor	persen	60,00	62,36	80,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta	persen	60,00	60,53	80,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
34	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung	persen	60,00	70,82	80,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
35	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang	persen	60,00	76,25	80,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
36	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya	persen	60,00	72,00	80,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
37	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon	persen	60,00	62,27	80,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
38	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
39	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Dinas Wilayah I Cianjur
40	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
41	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
42	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
43	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
44	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
45	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>							
1	1	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Laju Sarana Distribusi Perdagangan*	persen	3,00	29,53	5,00	7,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok*	persen	5,00	4,00	5,00	5,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas*	milyar USD	10,14	12,46	10,39	10,84	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5	Persentase Konsumen yang dilayani dan Ditangani*	persen	73,00	88,53	80,00	80,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>7</b>	<b>Perindustrian</b>							
	1	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi*	Unit Usaha	200	261	200	250	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait*	persen	1,60	2,09	1,60	1,60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan	persen	50,00	88,18	50,00	50,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan





No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SII Nas*						
<b>8</b>	<b>Transmigrasi</b>							
	1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya*	lokasi	0,00	0,00	3,00	3,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian yang Direalisasikan	persen	85,00	100,00	90,00	95,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>							
	1	Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja yang efektif dan efisien*	persen	93,00	93,00	94,00	95,00	Sekretariat Daerah/ Biro Organisasi
	2	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan dan otonom daerah yang ditindaklanjuti*	Persen	90,00	99.31	90,00	90,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	3	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti*	persen	85,00	0,00	90,00	90,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti*	persen	80,00	80,00	85,00	90,00	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	5	Peresentase Penyelenggaraan Kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum*	persen	80,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	6	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan*	persen	62,00	62,00	66,00	76,00	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
	7	Level Maturitas UKPBJ*	Level	3,00	3,00	3,00	4,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
	8	Kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ*	persen	70,00	52,00	80,00	90,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>							
	1	Tingkat Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*	persen	100,00	99,42	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	2	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD serta Penjaringan Aspirasi*	persen	100,00	99,14	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>							
	1	Rata-Rata Tingkat Kesesuaian Perencanaan Antar Waktu dan Level Pemerintahan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>							
	1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan Provinsi Jawa Barat*	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	3	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tepat waktu*	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan APBD Perubahan yang dievaluasi tepat waktu*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	Persentase Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang dievaluasi tepat waktu*	persen	80,00	100,00	80,00	80,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	6	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan*	persen	6,00	6,40	6,00	6,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	7	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah*	persen	80,00	99,00	90,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	8	Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah*	persen	0,26	0,63	0,32	0,36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	9	Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah*	persen	70,00	99,81	75,00	80,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	10	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah*	persen	90,00	102,41	92,70	95,48	Badan Pendapatan Daerah
<b>3</b>	<b>Kepegawaian</b>							
	1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan ; Pengadaan;	poin	113,00	113,00	117,00	120,00	Badan Kepegawaian Daerah



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian*						
	2	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi *	poin	40,00	40,00	40,00	40,00	Badan Kepegawaian Daerah
	3	Nilai Kriteria Pengembangan Karir*	poin	102,50	102,50	103,5	110,00	Badan Kepegawaian Daerah
	4	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin*	poin	120,00	120,00	120,00	120,00	Badan Kepegawaian Daerah
<b>4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>							
	1	Persentase Jabatan Struktural Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL*	persen	75,00	84,00	80,00	85,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2	Persentase Pelaksana Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL*	persen	75,00	82,00	80,00	85,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan atau STTPL Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum*	persen	75,00	82,00	80,00	85,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan	persen	6,00	6,00	6,00	6,00	Badan Pengembangan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional*						Sumber Daya Manusia
	5	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Dan Sumber Belajar*	persen	3,00	3,00	3,00	3,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	6	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	7	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	8	Persentase Ketersediaan dokumen Akuntansi dan Pelaporan keuangan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	9	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	10	Persentase Ketersediaan dokumen untuk diverifikasi*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2021	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	11	Persentase Ketersediaan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	13	Persentasi Pemeliharaan Kendaraan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	14	Persentase Tersedianya Akomodasi Rapat Internal Dan Luar Kantor*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	15	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	16	Persentase Ketersediaan Barang Habis Pakai Kantor*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	17	Persentase Terpenuhinya Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	18	Persentase Terpenuhinya Langganan Kantor*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Sumber Daya Manusia
19	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Persentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Persentase Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olah Raga Serta Pakaian Aparatur, Sarana Dan Prasarana Olah Raga*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>						
1	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dihasilkan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah





No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Dihasilkan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Dihasilkan*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4	Persentase kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Tehnologi dan Hasil Kelitbangan*	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang Dihasilkan*	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
<b>6</b>	<b>Penghubung</b>							
	1	Tingkat layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol dan Promosi Informasi yang Difasilitasi*	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>1</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>							
	1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah Provinsi yang Diselesaikan	persen	90,00	N/A*	95,00	100,00	Inspektorat



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan*	persen	80,00	65,44*	80,00	90,00	Inspektorat
	3	Persentase Hasil Reviu Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti*	persen	90,00	90,00	95,00	100,00	Inspektorat
	4	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	persen	75,00	75,00	90,00	100,00	Inspektorat
	5	Persentase kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD- PPK) yang Mencapai Target*	persen	96,00	93,86*	98,00	100,00	Inspektorat
	6	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kebijakan Peningkatan Kapabilitas APIP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
	7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan*	persen	80,00	100,00	80,00	90,00	Inspektorat
<b>VII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>								
<b>1</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>							
	1	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan*	persen	0,0079	0.0084	0,0094	0,011	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri*	persen	0,0054	0.0055	0,0064	0,0077	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8
	3	Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	persen	0,0032	0.0032	0,0038	0,0046	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya*	persen	0,0047	0.0119	0,0056	0,0068	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial*	persen	0,004	0.0033	0,0048	0,0058	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Keterangan:

\*) Indikator baru digunakan pada periode Perubahan RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.

\*\*) Data Sangat Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2020)

\*\*\*) Data berdasarkan Laporan Evaluasi RKPD Provinsi TW III 2021, Persentase Realisasi Per Program



## **BAB VIII PENUTUP**



## BAB VIII P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang di dalamnya memuat proses perencanaan pembangunan, dimana pelaksanaannya diturunkan kedalam sasaran, indikator dan target pembangunan yang dicapai melalui strategi dan kebijakan. Selanjutnya dalam operasionalnya kebijakan dilaksanakan melalui program prioritas beserta kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan kewenangannya. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang mempunyai tema atau fokus pembangunan yaitu **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR/ PKBL/ TJSL, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;
4. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.



Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tahun 2023 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2023, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2023;
4. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat Jawa Barat; dan
5. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran ditetapkan berdasarkan jadwal serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pematapan daya saing daerah menuju kemandirian masyarakat Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MUHAMMAD RIDWAN KAMIL

## INFORMASI LEBIH LANJUT

Pemerintah Provinsi Jawa Barat  
Jl. Diponegoro No 22 Bandung Telp. (022) 4232448 - 4233347 - 4230963 Fax. (022) 420 3450

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat  
Jl. Ir. H. Juanda No.287 Bandung Telp. (022) 2516065 Fax. (022) 2510731 <http://bappeda.jabarprov.go.id>

